BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025







Nomor : 12.A/T/LHP/DJPKN-VI.TJS/PPD.01/05/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Mulawarman No. 98 Tarakan Telp. 0551-33939, Fax 0551-30538
www.kaltara.bpk.go.id

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DI TARAKAN

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
   c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
   a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 i

DAFTAR ISI..... ii

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN..... 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/T/LHP/DJPKN-VI.TJS/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tarakan, 22 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dwi Sabardiana, S.E, M.A., CFrA, CSFA, ERMCP, CertDA

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);

c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas Yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang memiliki 29 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2025;

b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 6 April s.d. 5 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 84/T/ST/DJPKN-VI.TJS/PPD.01/04/2026 tanggal 1 April 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB i

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN ii

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3. NERACA

4. LAPORAN OPERASIONAL

5. LAPORAN ARUS KAS

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 4

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 7

BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI 9

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Tempat Entitas 9

2.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya 9

2.3 Ketentuan Perundang-undangan Sebagai Landasan Kegiatan Operasional 11

BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 14

3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 14

3.2 Kondisi Ekonomi Tahun 2025 40

3.3 Kebijakan Keuangan 43

3.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 47

3.5 *Mandatory Spending* 54

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 61

4.1 Entitas Pelaporan 61

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 61

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 62

BAB V PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN KEUANGAN 153
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 153
5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 216
5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca 219
5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO) 304
5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK) 363
5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 370
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN ... 376
6.1 Informasi Non Keuangan 376
BAB VII PENUTUP 384
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023 s.d. 2025	14
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Tidung Periode 2023 s.d. 2025	15
Tabel 3.3	Data Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Wilayah dan Domisili	15
Tabel 3.4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung	16
Tabel 3.5	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung	16
Tabel 3.6	Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung TA 2025	17
Tabel 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Tidung	24
Tabel 3.8	Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin	24
Tabel 3.9	Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran Kabupaten Tana Tidung TA 2025	25
Tabel 3.10	Indeks Pembangunan Manusia	26
Tabel 3.11	IPM Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2023 s.d. 2025	27
Tabel 3.12	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tana Tidung	27
Tabel 3.13	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2025	28
Tabel 3.14	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan RLS dan HLS TA 2025	33
Tabel 3.15	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	37
Tabel 3.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung TA 2023 s.d. 2025	38
Tabel 3.17	PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	40
Tabel 3.18	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 s.d. 2025	41
Tabel 3.19	PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 s.d. 2025	41
Tabel 3.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 s.d. 2025	42
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	52
Tabel 3.22	Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan	54
Tabel 3.23	Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik	56
Tabel 3.24	Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Insfrastruktur Daerah	56

Tabel 3.25	Perhitungan *Mandatory Spending* Urusan Wajib Berdasarkan Perundang-Undangan APBD TA 2025	57
Tabel 3.26	Alokasi Anggaran Untuk Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun 2025	58
Tabel 4.1	Rekapitulasi Umur Piutang	90
Tabel 4.2	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru	111
Tabel 4.3	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan dan Restorasi	115
Tabel 4.4	Penambahan Masa Manfaat	120
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024	154
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025 dan 2024	155
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024	163
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan 2024	164
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 dan 2024	165
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan 2024	167
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024	171
Tabel 5.8	Hasil Kerjasama Daerah TA 2025	173
Tabel 5.9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2025	174
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 dan 2024	178
Tabel 5.11	Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024	179
Tabel 5.12	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024	180
Tabel 5.13	Realisasi Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024	181
Tabel 5.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024	181
Tabel 5.15	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024	182
Tabel 5.16	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024	183
Tabel 5.17	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024	185
Tabel 5.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik TA 2025 dan 2024	186
Tabel 5.19	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 dan 2024	187
Tabel 5.20	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 dan 2024	188

Tabel 5.21	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Kesetaraan TA 2025 dan 2024	189
Tabel 5.22	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOK Puskesmas TA 2025 dan 2024	190
Tabel 5.23	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 dan 2024	191
Tabel 5.24	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024	193
Tabel 5.25	Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum TA 2025 dan 2024	194
Tabel 5.26	Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 dan 2024	194
Tabel 5.27	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP TA 2025 dan 2024	196
Tabel 5.28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024	197
Tabel 5.29	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024	198
Tabel 5.30	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024	199
Tabel 5.31	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	201
Tabel 5.32	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024	203
Tabel 5.33	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025	204
Tabel 5.34	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024	205
Tabel 5.35	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2025 dan 2024	206
Tabel 5.36	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024	206
Tabel 5.37	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024	208
Tabel 5.38	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024	209
Tabel 5.39	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024	210
Tabel 5.40	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan 2024	211
Tabel 5.41	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024	212
Tabel 5.42	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024	212
Tabel 5.43	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 dan 2024	213

Tabel 5.44	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa TA 2025 dan 2024	214
Tabel 5.45	Rincian Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024	215
Tabel 5.46	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 dan 2024	216
Tabel 5.47	Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025	218
Tabel 5.48	Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024	220
Tabel 5.49	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024	221
Tabel 5.50	Saldo Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	222
Tabel 5.51	Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	222
Tabel 5.52	Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024	223
Tabel 5.53	Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024	224
Tabel 5.54	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	225
Tabel 5.55	Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024	225
Tabel 5.56	Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 2024	226
Tabel 5.57	Saldo Kas Dana BOP per 31 Desember 2025 dan 2024	227
Tabel 5.58	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024	228
Tabel 5.59	Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	229
Tabel 5.60	Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024	229
Tabel 5.61	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	231
Tabel 5.62	Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024	232
Tabel 5.63	Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 dan 2024	232
Tabel 5.64	Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 dan 2024	233
Tabel 5.65	Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024	234
Tabel 5.66	Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024	235
Tabel 5.67	Rincian Piutang Dana Perimbangan DBH Pajak	236
Tabel 5.68	Rincian Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam	237
Tabel 5.69	Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Utara	238
Tabel 5.70	Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	240
Tabel 5.71	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	240
Tabel 5.72	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024	241
Tabel 5.73	Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	241
Tabel 5.74	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 dan 2024	242
Tabel 5.75	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024	243
Tabel 5.76	Rincian Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik per 31 Desember 2025 dan 2024	243

Tabel 5.77	Rincian Penyisian Piutang PBB P2 per 31 Desember 2025 dan 2024	244
Tabel 5.78	Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	246
Tabel 5.79	Rincian Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024	247
Tabel 5.80	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	248
Tabel 5.81	Rincian Persediaan yang Rusak/Usang/Kedaluwarsa	250
Tabel 5.82	Rincian Penambahan Persediaan dikarenakan Kesalahann Penganggaran	250
Tabel 5.83	Rincian Pengurangan Persediaan dikarenakan Kesalahan Penganggaran	251
Tabel 5.84	Rincian Perencanaan Persediaan yang Melebihi Periode 12 Bulan	251
Tabel 5.85	Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024	255
Tabel 5.86	Investasi Permanen ke Perusda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap per 31 Desember 2025 dan 2024	257
Tabel 5.87	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	257
Tabel 5.88	Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025	258
Tabel 5.89	Rincian Mutasi Tanah Tahun 2025	259
Tabel 5.90	Rincian Mutasi per Jenis Tanah Tahun 2025	260
Tabel 5.91	Rincian Tanah di atas Lahan Inhutani	261
Tabel 5.92	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025	262
Tabel 5.93	Rincian Mutasi per Jenis Peralatan dan Mesin Tahun 2025	263
Tabel 5.94	Rincian Aset Peralatan dan Mesin Bantuan Kementerian Program Revitalisasi Sekolah Dasar	265
Tabel 5.95	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025	266
Tabel 5.96	Rincian Mutasi per Jenis Gedung dan Bangunan Tahun 2025	267
Tabel 5.97	Rincian Aset Gedung Bantuan Kementerian Program Revitalisasi Sekolah Dasar	267
Tabel 5.98	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani	268
Tabel 5.99	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah dan Bukan Tanah HGB PT. Inhutani	273
Tabel 5.100	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	275
Tabel 5.101	Rincian Mutasi per Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	276
Tabel 5.102	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Berdiri diatas Tanah HGB PT. Inhutani	277
Tabel 5.103	Rincian JIJ yang Berdiri di Atas Bukan Milik Pemda dan Bukan Tanah HGB PT. Inhutani	279
Tabel 5.104	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	281
Tabel 5.105	Rincian Mutasi per Jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	283

Tabel 5.106	Aset Tetap Lainnya yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani	283
Tabel 5.107	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025	285
Tabel 5.108	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani	285
Tabel 5.109	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	287
Tabel 5.110	Rincian Aset Lainnya yang Belum Dihapuskan Tahun 2025.....	288
Tabel 5.111	Rincian Aset Lainnya Belum Diserahkan ke Provinsi Kalimantan Utara	289
Tabel 5.112	Rincian Aset Tetap Habis Masa Manfaatnya	289
Tabel 5.113	Rincian Aset yang Hilang Masih dalam Proses TGR	289
Tabel 5.114	Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024	290
Tabel 5.115	Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	291
Tabel 5.116	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025.....	292
Tabel 5.117	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	294
Tabel 5.118	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024	295
Tabel 5.119	Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 .	296
Tabel 5.120	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berupa Sewa per 31 Desember 2025 dan 2024	296
Tabel 5.121	Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024.....	297
Tabel 5.122	Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	298
Tabel 5.123	Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025	299
Tabel 5.124	Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025	300
Tabel 5.125	Rekapitulasi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025.....	301
Tabel 5.126	Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Hibah Tahun 2025.....	302
Tabel 5.127	Realisasi Pendapatan-LO.....	304
Tabel 5.128	Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO	305
Tabel 5.129	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO	305
Tabel 5.130	Pengukuran Pajak Daerah pada LRA dan LO TA 2025	306
Tabel 5.131	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO	308
Tabel 5.132	Pengukuran Retribusi Daerah pada LRA dan LO TA 2025	308
Tabel 5.133	Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO	310
Tabel 5.134	Pengukuran Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada LRA dan LO TA 2025....	311
Tabel 5.135	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer-LO	313
Tabel 5.136	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	314

Tabel 5.137	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO	314
Tabel 5.138	Rincin Dana Bagi Hasil-LO	315
Tabel 5.139	Pengukuran DBH-Pajak dan DBH-SDA pada LRA dan LO TA 2025	316
Tabel 5.140	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	317
Tabel 5.141	Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik-LO	317
Tabel 5.142	Pengukuran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada LRA dan LO TA 2025	318
Tabel 5.143	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Lainnya-LO	320
Tabel 5.144	Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO	321
Tabel 5.145	Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada LRA dan LO TA 2025	321
Tabel 5.146	Rincian Realisasi Bantuan Keuangan-LO	323
Tabel 5.147	Pengukuran Bantuan Keuangan pada LRA dan LO TA 2025	323
Tabel 5.148	Pendapatan Hibah-LO	324
Tabel 5.149	Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP-LO	326
Tabel 5.150	Rincian Beban Operasi	327
Tabel 5.151	Rincian Beban Pegawai	328
Tabel 5.152	Pengukuran Belanja dan Beban Pegawai pada LRA dan LO TA 2025	329
Tabel 5.153	Beban Barang dan Jasa	332
Tabel 5.154	Rincian Beban per Jenis Barang dan Jasa	332
Tabel 5.155	Pengukuran Belanja dan Beban Banrag dan jasa pada LRA dan LO TA 2025	334
Tabel 5.156	Rincian Beban Persediaan	339
Tabel 5.157	Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	342
Tabel 5.158	Rincian Beban Jasa	347
Tabel 5.159	Rincian Beban Pemeliharaan	352
Tabel 5.160	Rincian Beban Perjalanan Dinas	354
Tabel 5.161	Rincian Beban Hibah	354
Tabel 5.162	Pengukuran Belanja dan Beban Hibah pada LRA dan LO TA 2025	355
Tabel 5.163	Rincian Beban Penyisihan Piutang	357
Tabel 5.164	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	358
Tabel 5.165	Rincian Beban Transfer	358
Tabel 5.166	Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	359
Tabel 5.167	Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	360
Tabel 5.168	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	362
Tabel 5.169	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	364
Tabel 5.170	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	365
Tabel 5.171	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	366

Tabel 5.172 Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris 367
Tabel 5.173 Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris..... 368
Tabel 5.174 Rekapitulasi Penurunan Kas TA 2025 dan 2024 368
Tabel 5.175 Saldo Awal Kas TA 2025 dan 2024 369
Tabel 5.176 Saldo Akhir Kas 369
Tabel 5.177 Laporan Perubahan Ekuitas 370
Tabel 5.178 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 371
Tabel 5.179 Koreksi Ekuitas Lain-lain 372

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Rincian Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

Lampiran 5.1 Rincian Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Lampiran 5.2 Rincian Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.3 Realisasi Penerima Hibah Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.4 Belanja Modal Tanah Per-SKPD Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per-SKPD Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per-SKPD Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per-SKPD Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.8 Belanja Modal Aset Tetap lainnya per-SKPD Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.9 Belanja Modal Aset Lainnya per-SKPD Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.10 Rincian Transfer Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.11 Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Antara Buku Pembantu Kas dan Rekening Koran Kas Daerah TA 2025

Lampiran 5.12 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi TA 2025

Lampiran 5.13 Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Dana BOSP SD dan SMP Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.14 Simulasi Perhitungan Penyisihan Piutang dengan Menggunakan Penggolongan Kualitas Piutang Retrebusi Berdasarkan Umur Piutang Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.15 Laporan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2025

Lampiran 5.16 Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Lampiran 5.17 Beban Dibayar Dimuka

Lampiran 5.18 Laporan Persediaan

Lampiran 5.19 Laporan Persediaan Rusak/ Usang/ Kedaluwarsa

Lampiran 5.20 Penambahan Persediaan Disebabkan Kesalahan Penganggaran

Lampiran 5.21 Pengurangan Persediaan Dikarenakan Kesalahan Penganggaran

Lampiran 5.22 Laporan Keuangan PDAM TA 2025

Lampiran 5.23 Rincian Aset Tetap Tanah TA 2025

Lampiran 5.24 Rincian Penyertaan Modal Tanah ke PDAM

Lampiran 5.25 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

Lampiran 5.26 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

Lampiran 5.27 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025
Lampiran 5.28 Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2025
Lampiran 5.29 Rincian Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan TA 2025
Lampiran 5.30 Rincian Aset Lainnya Belum Diserahkan ke Provinsi Kalimantan Utara
Lampiran 5.31 Aset Tidak Berwujud
Lampiran 5.32 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran 5.33 Aset Lain-lain
Lampiran 5.34 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Lampiran 5.35 Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame TA 2025
Lampiran 5.36 Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2025
Lampiran 5.37 Utang Belanja Aset Tetap TA 2025
Lampiran 5.38 Penyaluran Kurang bayar dan Penyelesaian lebih Bayar dan Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2023
Lampiran 5.39 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (Beban Lain-lain)
Lampiran 5.40 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025
Lampiran 6.1 Laporan Keuangan PDAM TA 2025

BUPATI TANA TIDUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tideng Pale, 22 Mei 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN**	5.1.1	1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	105,02	1.483.899.695.654,45
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	5.1.1.1	30.948.274.122,00	54.358.134.393,05	175,64	49.612.809.888,45
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	7.812.710.096,00	10.240.378.261,00	131,07	7.812.755.443,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	1.778.963.865,00	9.851.845.257,00	553,80	706.311.634,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	6.099.406.000,00	3.741.723.567,47	61,35	4.930.224.687,96
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	15.257.194.161,00	30.524.187.307,58	200,06	36.163.518.123,49
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	102,83	1.415.256.686.466,00
8	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	5.1.1.2.1	982.308.887.000,00	976.414.177.571,00	99,40	1.342.315.180.153,00
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	5.1.1.2.1.1	947.926.898.000,00	942.849.102.171,00	99,46	1.298.349.353.153,00
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1.1	503.424.284.000,00	506.994.414.300,00	100,71	832.040.549.000,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.2	402.661.605.000,00	397.312.680.666,00	98,67	425.690.872.922,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.1.3	41.841.009.000,00	38.542.007.205,00	92,12	40.617.931.231,00
13	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	5.1.1.2.1.2	34.381.989.000,00	33.565.075.400,00	97,62	43.965.827.000,00
14	Dana Desa	5.1.1.2.1.2.1	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	97,02	29.801.783.000,00
15	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2.2	6.996.098.000,00	6.996.098.000,00	100,00	14.164.044.000,00
16	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	5.1.1.2.2	13.823.296.331,00	47.938.342.781,00	346,79	72.941.506.313,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	12.088.801.079,00	46.203.847.529,00	382,20	35.037.618.142,00
18	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	100,00	37.903.888.171,00
19	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.3	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	19.030.199.300,00
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	17.314.145.000,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	1.716.054.300,00
22	**BELANJA**	5.1.2	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	81,39	1.356.243.522.076,42
23	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	84,22	774.466.031.112,02
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	80,93	313.541.036.552,00
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	86,92	422.867.337.627,02
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	97,94	38.040.036.933,00
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	243.500.000,00	243.500.000,00	100,00	17.620.000,00
28	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	89,13	446.286.590.042,40
29	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	94,43	0,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	89,98	39.818.595.746,00
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	90,03	225.324.831.715,40
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	86,72	179.911.495.381,00
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	105,85	305.796.700,00
34	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	91,40	925.870.500,00
35	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.1.2.3	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Tidak Terduga		94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
37	**BELANJA TRANSFER**	5.1.2.4	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	99,32	135.490.900.922,00
38	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	989.949.241,00	989.949.241,00	100,00	0,00
39	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	99,31	135.490.900.922,00
40	**SURPLUS / (DEFISIT)**	5.1.3	(406.022.138.025,90)	(87.728.720.631,65)	21,61	127.656.173.578,03
41	**PEMBIAYAAN**	5.1.4	406.022.138.025,90	436.022.138.025,90	107,39	308.365.964.447,87
42	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.1	436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	100,00	308.365.964.447,87
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	100,00	308.365.964.447,87
44	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.2	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
47	**PEMBIAYAAN NETTO**		406.022.138.025,90	436.022.138.025,90	107,39	308.365.964.447,87
48	**SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN**	5.1.5	0,00	348.293.417.394,25	0,00	436.022.138.025,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	436.022.138.025,90	308.365.964.447,87
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(436.022.138.025,90)	(308.365.964.447,87)
3	**Sub Total (1 - 2)**		**0,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	348.293.417.394,25	436.022.138.025,90
5	**Sub Total (3 + 4)**		**348.293.417.394,25**	**436.022.138.025,90**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-Lain	5.2.5	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	5.2.6	**348.293.417.394,25**	**436.022.138.025,90**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	348.295.864.474,25	436.035.274.872,90
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	343.429.299.450,43	430.172.961.885,93
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	2.392.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	4.161.619.400,95	4.256.815.368,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5	238.238,90	149.312.323,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	438.600,00	5.529.955,00
10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.7	408.734.250,97	258.215.304,97
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.8	295.534.533,00	1.190.048.036,00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3	3.437.362.186,00	2.938.545.467,00
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.4	67.382.337,00	33.697.944,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	0,00	1.164.197.214,49
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6	349.279.261.000,00	63.174.239.000,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7	29.962.545.759,00	19.308.478.465,00
17	Piutang Lainnya	5.3.1.1.8	1.234.837.507,00	1.984.414.780,81
18	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(3.002.117.352,02)	(1.391.757.105,64)
19	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	382.390.966,67	4.154.148.705,00
20	Persediaan	5.3.1.1.11	136.500.250.938,15	144.839.799.829,34
21	**Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20)**		**866.157.777.816,05**	**672.241.039.172,90**
22	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.1.2**		
23	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**5.3.1.2.1**		
24	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
25	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
26	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non permanen (24 s/d 25)**		**0,00**	**0,00**
27	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**5.3.1.2.2**		
28	Penyertaan Modal Daerah		148.593.447.042,11	103.690.906.609,54
29	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (28)**		**148.593.447.042,11**	**103.690.906.609,54**
30	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 29)**		**148.593.447.042,11**	**103.690.906.609,54**
31	**ASET TETAP**	**5.3.1.3**		
32	Tanah	5.3.1.3.1	480.250.499.507,38	444.105.621.898,61
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	400.327.614.969,40	368.942.603.056,79
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.733.804.884.801,55	1.454.317.612.762,93
35	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.405.519.511.462,56	2.333.413.362.850,06
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	30.835.126.317,78	30.049.549.747,30
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	342.318.932.552,84	356.033.937.401,24
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.310.802.049.238,91)	(2.141.030.024.649,11)
39	**Jumlah Aset Tetap (32 s/d 38)**		**3.082.254.520.372,60**	**2.845.832.663.067,82**
40	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.4**		
41	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	23.868.930.822,61	31.915.383.824,39
42	Aset Tak berwujud	5.3.1.4.2	58.828.003.550,45	52.603.177.006,00
43	Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud	5.3.1.4.3	(42.910.625.458,55)	(37.309.275.999,00)
44	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.4	119.541.861.882,31	153.133.187.528,95
45	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.5	(70.301.122.673,68)	(72.988.066.674,24)
46	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.6	0,00	3.709.941.000,00
47	**Jumlah Aset Lainnya (41 s/d 46)**		**89.027.048.123,14**	**131.064.346.686,10**
48	**JUMLAH ASET (21 + 30 + 39 + 47)**		**4.186.032.793.353,90**	**3.752.828.955.536,36**

NO	URAIAN	REF	2025	2024
49	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
50	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.2.1**		
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	2.504.952,00	11.344.847,00
52	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	52.498.817,74	138.745.677,00
53	Utang Belanja	5.3.2.1.3	5.438.651.174,84	8.338.063.528,58
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	170.656.804.678,70	133.970.594.000,00
55	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (51 s/d 54)**		**176.150.459.623,28**	**142.458.748.052,58**
56	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**5.3.2.2**		
57	Utang kepada Pihak Swasta	5.3.2.2.1	67.123.757.984,00	0,00
58	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)**		**67.123.757.984,00**	**0,00**
59	**JUMLAH KEWAJIBAN (55 + 58)**		**243.274.217.607,28**	**142.458.748.052,58**
60	**EKUITAS**	**5.3.3**		
61	EKUITAS		3.942.758.575.746,62	3.610.370.207.483,78
62	**JUMLAH EKUITAS (61)**		**3.942.758.575.746,62**	**3.610.370.207.483,78**
63	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59 + 62)**		**4.186.032.793.353,90**	**3.752.828.955.536,36**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**					
2	**PENDAPATAN - LO**	5.4.1	**1.028.473.552.676,30**	**983.691.175.744,73**	**44.782.376.931,57**	**4,55**
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO**	5.4.1.1	**53.616.787.939,46**	**54.566.035.153,48**	**(949.247.214,02)**	**(1,74)**
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	10.729.155.449,26	7.646.855.773,58	3.082.299.675,68	40,31
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	9.860.962.650,00	1.283.361.623,00	8.577.601.027,00	668,37
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	3.741.723.567,47	5.454.784.626,96	(1.713.061.059,49)	(31,40)
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	29.284.946.272,73	40.181.033.129,94	(10.896.086.857,21)	(27,12)
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	5.4.1.2	**970.452.000.024,00**	**905.103.395.785,00**	**65.348.604.239,00**	**7,22**
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	5.4.1.2.1	**925.326.985.171,00**	**832.161.889.472,00**	**93.165.095.699,00**	**11,20**
10	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO**	5.4.1.2.1.1	**918.330.887.171,00**	**817.997.845.472,00**	**100.333.041.699,00**	**12,27**
11	Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.1.1.1	482.476.199.300,00	351.689.041.319,00	130.787.157.981,00	37,19
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.1.2	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.2.1.1.3	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
14	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	5.4.1.2.1.2	**6.996.098.000,00**	**14.164.044.000,00**	**(7.167.946.000,00)**	**(50,61)**
15	Insentif Fiskal - LO	5.4.1.2.1.2.1	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00	(7.167.946.000,00)	(50,61)
16	**Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO**	5.4.1.2.2	**45.125.014.853,00**	**72.941.506.313,00**	**(27.816.491.460,00)**	**(38,14)**
17	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2.1	43.390.519.601,00	35.037.618.142,00	8.352.901.459,00	23,84
18	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.2.2	1.734.495.252,00	37.903.888.171,00	(36.169.392.919,00)	(95,42)
19	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO**	5.4.1.3	**4.404.764.712,84**	**24.021.744.806,25**	**(19.616.980.093,41)**	**(81,66)**
20	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	4.332.967.133,84	22.305.690.506,25	(17.972.723.372,41)	(80,57)
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.4.1.3.2	71.797.579,00	1.716.054.300,00	(1.644.256.721,00)	(95,82)
22	**BEBAN**	5.4.2	**949.881.863.933,31**	**1.089.206.567.844,34**	**(139.324.703.911,03)**	**(12,79)**
23	**BEBAN OPERASI**	5.4.2.1	**857.922.496.410,31**	**983.619.991.794,34**	**(125.697.495.384,03)**	**(12,78)**
24	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	314.479.737.531,00	316.377.435.083,00	(1.897.697.552,00)	(0,60)
25	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	309.331.871.936,46	390.791.123.553,54	(81.459.251.617,08)	(20,84)
26	Beban Hibah	5.4.2.1.3	23.075.271.125,00	35.692.558.871,00	(12.617.287.746,00)	(35,35)
27	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	243.500.000,00	0,00	243.500.000,00	0,00
28	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	1.610.360.246,38	395.946.180,53	1.214.414.065,85	306,71
29	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	209.181.755.571,47	240.362.928.106,27	(31.181.172.534,80)	(12,97)
30	**BEBAN TRANSFER**	5.4.2.3	**91.959.367.523,00**	**105.568.956.050,00**	**(13.609.588.527,00)**	**(12,89)**
31	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	989.949.241,00	533.000.000,00	456.949.241,00	85,73
32	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	90.969.418.282,00	105.035.956.050,00	(14.066.537.768,00)	(13,39)
33	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	5.4.2.2	**0,00**	**17.620.000,00**	**(17.620.000,00)**	**(100,00)**
34	Beban Tidak Terduga	5.4.2.2	0,00	17.620.000,00	(17.620.000,00)	(100,00)
35	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2 - 22)**	5.4.3	**78.591.688.742,99**	**(105.515.392.099,61)**	**184.107.080.842,60**	**(174,48)**
36	**SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	5.4.4	**261.289.093.923,51**	**(27.941.350.038,67)**	**289.230.443.962,18**	**(1.035,13)**
37	**Surplus Non Operasional - LO**	5.4.4.1	**325.012.514.803,29**	**6.202.824,00**	**325.006.311.979,29**	**5.239.650,71**
38	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		325.012.514.803,29	6.202.824,00	325.006.311.979,29	5.239.650,71
39	**Defisit Non Operasional**	5.4.4.2	**63.723.420.879,78**	**27.947.552.862,67**	**35.775.868.017,11**	**128,01**
40	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		7.360.607.254,63	26.491.539.256,67	(19.130.932.002,04)	(72,22)
41	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		56.362.813.625,15	1.456.013.606,00	54.906.800.019,15	3.771,04
42	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (35 + 36)**		**339.880.782.666,50**	**(133.456.742.138,28)**	**473.337.524.804,78**	**(354,67)**
43	**POS LUAR BIASA**	5.4.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
46	**SURPLUS / DEFISIT LO (42 + 43)**	5.4.6	**339.880.782.666,50**	**(133.456.742.138,28)**	**473.337.524.804,78**	**(354,67)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	5.5.1		
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		10.240.378.261,00	7.812.755.443,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		9.851.845.257,00	706.311.634,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.741.723.567,47	4.930.224.687,96
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		30.266.053.399,58	35.931.993.623,49
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		506.994.414.300,00	832.040.549.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)		397.312.680.666,00	425.690.872.922,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)		38.542.007.205,00	40.617.931.231,00
10	Penerimaan Dana Desa		26.568.977.400,00	29.801.783.000,00
11	Penerimaan Dana Insentif Fiskal		6.996.098.000,00	14.164.044.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		46.203.847.529,00	35.037.618.142,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		1.734.495.252,00	37.903.888.171,00
14	Penerimaan Hibah		0,00	17.314.145.000,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		71.797.579,00	1.716.054.300,00
16	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)**		**1.078.524.318.416,05**	**1.483.668.171.154,45**
17	**Arus Keluar Kas**			
18	Pembayaran Pegawai		315.896.000.484,00	313.541.036.552,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		325.696.829.085,46	422.867.337.627,02
20	Pembayaran Hibah		19.262.097.420,00	38.040.036.933,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		243.500.000,00	17.620.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan		117.538.395.682,00	135.490.900.922,00
23	Pembayaran Bagi Hasil		989.949.241,00	0,00
25	**Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 23)**		**779.626.771.912,46**	**909.956.932.034,02**
26	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 25)**		**298.897.546.503,59**	**573.711.239.120,43**
27	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.2		
28	**Arus Masuk Kas**			
29	Penjualan Aset Lainnya		258.133.908,00	231.524.500,00
30	**Jumlah Arus Masuk Kas (29)**		**258.133.908,00**	**231.524.500,00**
31	**Arus Keluar Kas**			
32	Perolehan Tanah		2.847.964.666,00	0,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		35.323.557.737,00	39.818.595.746,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		233.904.479.133,85	225.324.831.715,40
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		111.466.199.577,39	179.911.495.381,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.461.196.461,00	305.796.700,00
37	Perolehan Aset Tidak berwujud		1.881.003.468,00	925.870.500,00
38	**Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 37)**		**386.884.401.043,24**	**446.286.590.042,40**
39	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 38)**		**(386.626.267.135,24)**	**(446.055.065.542,40)**
40	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	5.5.3		
41	**Arus Masuk Kas**			
42	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
43	**Jumlah Arus Masuk Kas (42)**		**0,00**	**0,00**
44	**Arus Keluar Kas**			
45	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
46	**Jumlah Arus Keluar Kas (45)**		**0,00**	**0,00**
47	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 46)**		**0,00**	**0,00**

NO	URAIAN	REF	2025	2024
48	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**5.5.4**		
49	**Arus Masuk Kas**			
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.276.527.552,00	96.035.532.796,00
51	**Jumlah Arus Masuk Kas (50)**		**83.276.527.552,00**	**96.035.532.796,00**
52	**Arus Keluar Kas**			
53	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.281.716.637,00	96.129.636.346,00
54	Pengeluaran Kas Lainnya		57.872,00	29.197.300,00
55	**Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 54)**		**83.281.774.509,00**	**96.158.833.646,00**
56	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (47 - 56)**		**(5.246.957,00)**	**(123.300.850,00)**
57	**Kenaikan / Penurunan Kas (26 + 39 + 47 + 56)**	**5.5.5**	**(87.733.967.588,65)**	**127.532.872.728,03**
58	**Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BOS, dan Kas Kapitasi**	**5.5.6**	**436.029.832.062,90**	**308.496.959.334,87**
59	**Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (57 + 58)**		**348.295.864.474,25**	**436.029.832.062,90**
60	Kas di Kas Daerah		343.429.299.450,43	430.172.961.885,93
61	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	600.000,00
62	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
63	Kas di BLUD		4.161.619.400,95	4.256.815.368,00
64	Kas Dana BOSP		408.734.250,97	254.564.494,97
65	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		238.238,90	149.312.323,00
66	Kas Lainnya		438.600,00	5.529.955,00
67	Kas Dana BOK Puskesmas		295.534.533,00	1.190.048.036,00
68	**Saldo Akhir Kas (60 s/d 67)**	**5.5.7**	**348.295.864.474,25**	**436.029.832.062,90**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	**EKUITAS AWAL**	**5.6.1**	**3.610.370.207.483,78**	**3.742.895.594.401,47**
2	**SURPLUS/DEFISIT - LO**	**5.6.2**	**339.880.782.666,50**	**(133.456.742.138,28)**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	**5.6.3**		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.6.3.1	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.6.3.2	22.382.562.788,56	0,00
6	LAIN-LAIN	5.6.3.3		
	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.3.1	(1.353.897.362,00)	(137.618.705,96)
	Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	5.6.3.3.2	(380.087.119,35)	1.117.225.376,50
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.3.3	(0,02)	(25.751.449,95)
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.3.4	28.094.753.071,52	0,00
	Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	5.6.3.3.5	1.130.000,01	0,00
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya	5.6.3.3.6	(241.292.242,68)	0,00
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.3.7	11.128.174.444,30	(22.500.000,00)
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Panjang	5.6.3.3.8	(67.123.757.984,00)	0,00
7	**EKUITAS AKHIR**	**5.6.4**	**3.942.758.575.746,62**	**3.610.370.207.483,78**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran (TA) 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
3) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluarannya;
4) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

5) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam pungutan pajak dan pinjaman; dan

7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran. Informasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran. Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lampiran LRA disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyediakan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih atau sering menjadi SAL sendiri, menurut paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-TA sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca per 31 Desember 2025 ini merupakan Neraca yang format penyajiannya telah disesuaikan dengan SAP. Penyusunan Neraca telah menggunakan *double entry system*. Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pertama kali disusun pada tahun 2009 dan tahun ini adalah tahun ke 16 (enam belas) penyajian Neraca.

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan Paragraf 101 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya akun-akun Ekuitas awal, Surplus/Defisit pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas.

6) Laporan Arus Kas

Tujuan penyajian Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2025. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disusun menggunakan metode langsung sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman para penggunanya sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman akibat dari kesalahan persepsi. Setiap pos dalam Laporan Keuangan akan dijelaskan sesuai hasil konversi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan SAP yang menjadi pedoman dalam penatausahaan keuangan daerah dan pelaporannya.

Adapun penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tana Tidung TA 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama TA 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung;

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

h. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

k. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

r. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

z. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

ff. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

gg. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 58 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

hh. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

ii. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

jj. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;

kk. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;

ll. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025;

mm. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II : Memuat Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Bab III : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, indikator pencapaian target kinerja APBD dan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V	:	Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, komponen-komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, komponen-komponen Neraca, komponen-komponen Laporan Operasional, komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas.
Bab VI	:	Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
Bab VII	:	Penutup berisi kesimpulan atas CaLK TA 2025.

BAB II
INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Tempat Entitas

Kabupaten Tana Tidung secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur Lintas Timur Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Kota Tarakan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pusat kehidupan modern.

Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Secara administratif, Kabupaten Tana Tidung mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

a. Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
b. Sebelah Timur : Laut Sulawesi
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
d. Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

2.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Adapun entitas di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari Dinas, Badan/Kantor, Kecamatan dan Sekretariat merupakan unsur pelaksana pemerintah. Kabupaten Tana Tidung yang dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2025, entitas akuntansi keuangan tingkat organisasi perangkat daerah meliputi:

a. Sekretariat terdiri dari:
    1) Sekretariat Daerah

        Sekretariat Daerah terdiri dari:

        a) Bagian Umum
        b) Bagian Pemerintahan
        c) Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
        d) Bagian Hukum
        e) Bagian Organisasi
        f) Bagian Administrasi Pembangunan

    2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Dinas/Badan/Kantor terdiri dari:
   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   2) Dinas Kesehatan
   3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
   4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   5) Satuan Polisi Pamong Praja
   6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   7) Dinas Lingkungan Hidup
   8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   9) Dinas Komunikasi dan Informatika
   10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   11) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
   12) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
   13) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
   14) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   15) Inspektorat Kabupaten
   16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
   17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
   18) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   19) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
   20) Dinas Perhubungan
   21) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   22) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

c. Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari:
   1) Kecamatan Sesayap
   2) Kecamatan Sesayap Hilir
   3) Kecamatan Tana Lia
   4) Kecamatan Betayau
   5) Kecamatan Muruk Rian

2.3 Ketentuan Perundang-undangan Sebagai Landasan Kegiatan Operasional

Dasar hukum sebagai landasan kegiatan operasional entitas atau perangkat daerah yaitu:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

b. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pola Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

c. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

e. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

f. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

g. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

h. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman;

i. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

j. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

k. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

l. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

m. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

n. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

o. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

p. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

q. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

r. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

s. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

t. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

u. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

v. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

w. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;

x. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

y. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

z. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

aa. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2023 - 2025, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan dan pembiayaannya. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, yaitu (minimal) dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023 s.d. 2025

Kondisi Ekonomi Makro			
Indikator	**2023**	**2024**	**2025**
KEMISKINAN	4,62	4,47	4,56
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	3,24	3,67	3,68
IPM	70,06	70,95	71,86
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	4,50*	3,57**	**NA**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung
**** Angka bersifat Tentatif***
***** Angka masih Dinamis***

Kondisi ekonomi makro tahun 2023 sampai dengan 2025 indikatornya sebagai berikut.

3.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan

pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Tidung
Periode 2023 s.d. 2025

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten/Kota (%)	4,62	4,47	4,56
2	Kabupaten/Kota (Ribu Orang)	1,47	1,50	1,59
3	Provinsi (%)	6,45	6,32	5,54
4	Nasional (%)	9,36	9,03	8,47
5	Peringkat Provinsi	5	5	5
6	Peringkat Nasional	495	497	481

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode tahun 2023 s.d. 2025 yang mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 mencapai sebesar 8,47% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Jumlah penduduk miskin (berhasil) ditekan hingga menjadi 0,56%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat provinsi/nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung berada di bawah Provinsi/Nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan.

Tabel 3.3
Data Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Wilayah dan Domisili

Penduduk Miskin		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota							
a.	Kecamatan Sesayap	168	1,41	166	1,49	133	1,07
b.	Kecamatan Sesayap Hilir	385	4,93	357	4,49	259	3,11
c.	Kecamatan Betayau	412	13,03	311	8,09	151	3,73
d.	Kecamatan Tana Lia	180	5,27	360	10,27	144	3,97
e.	Kecamatan Muruk Rian	176	9,92	188	10,52	61	3,42

Sumber Dokumen: Kecamatan Kabupaten Tana Tidung

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.4
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0,14	0,48	0,53
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,64	0,82	0,75
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,46	1,37
4	Peringkat Provinsi	5	5	3
5	Peringkat Nasional	547	509	476

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menyajikan tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung selama periode tahuun 2023 sampai dengan tahun 2025. Indikator ini menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga dapat menunjukkan seberapa jauh kondisi penduduk miskin dari standar kebutuhan minimum.

Selanjutnya, untuk melihat tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, disajikan tabel di bawah mengenai tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat penyebaran pengeluaran penduduk miskin.

Tabel 3.5
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,02	0,07	0,15
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,11	0,19	0,29
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,35	0,32
4	Peringkat Provinsi	5	4	3
5	Peringkat Nasional	546	531	391

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp362.297.951.708,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp327.321.502.521,22 atau 90,35%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**18.507.133.620,00**	**17.895.259.460,00**	**96,69**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**17.261.225.620,00**	**16.703.240.760,00**	**96,77**
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	971.524.200,00	827.550.150,00	85,18
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	16.289.701.420,00	15.875.690.610,00	97,46
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	1.245.908.000,00	1.192.018.700,00	**95,67**
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	349.992.000,00	320.990.000,00	91,71
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	895.916.000,00	871.028.700,00	97,22
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**7.558.325.600,00**	**6.171.264.175,00**	**81,65**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**7.558.325.600,00**	**6.171.264.175,00**	**81,65**
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.546.153.600,00	4.214.577.500,00	75,99
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.894.380.000,00	1.839.346.675,00	97,09
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	117.792.000,00	117.340.000,00	99,62
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.126.378.250,00**	**1.847.488.619,97**	**86,88**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.126.378.250,00**	**1.847.488.619,97**	**86,88**
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	579.826.600,00	486.239.820,00	83,86
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	189.997.250,00	84.468.540,00	44,46
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.356.554.400,00	1.276.780.259,97	94,12
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**9.092.148.067,00**	**8.882.064.239,30**	**97,69**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9.092.148.067,00**	**8.882.064.239,30**	**97,69**
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	9.092.148.067,00	8.882.064.239,30	97,69

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**175.181.340.588,00**	**162.642.226.643,29**	**92,84**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**175.181.340.588,00**	**162.642.226.643,29**	**92,84**
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	351.006.000,00	306.379.000,00	87,29
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	445.003.100,00	396.561.000,00	89,11
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	172.513.579.463,00	161.050.224.643,29	93,36
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.062.910.025,00	587.162.000,00	55,24
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	808.842.000,00	301.900.000,00	37,32
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**7.000.902.000,00**	**5.867.560.840,00**	**83,81**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**7.000.902.000,00**	**5.867.560.840,00**	**83,81**
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	7.000.902.000,00	5.867.560.840,00	83,81
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**105.844.445.594,00**	**94.671.241.738,02**	**89,44**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**105.844.445.594,00**	**94.671.241.738,02**	**89,44**
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	41.792.820.558,00	38.821.931.775,38	92,89
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	47.068.111.016,00	42.137.276.947,38	89,52
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	9.981.508.156,00	8.173.204.010,26	81,88
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	503.072.220,00	489.982.000,00	97,40
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.498.933.644,00	5.048.847.005,00	77,69
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**3.985.340.624,00**	**3.923.632.289,20**	**98,45**
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**2.566.067.524,00**	**2.525.607.489,20**	**98,42**
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2.373.671.324,00	2.336.907.489,20	98,45

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	192.396.200,00	188.700.000,00	98,08
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**231.267.900,00**	**228.333.200,00**	**98,73**
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	99.482.300,00	97.678.200,00	98,19
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	131.785.600,00	130.655.000,00	99,14
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1.188.005.200,00**	**1.169.691.600,00**	**98,46**
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.188.005.200,00	1.169.691.600,00	98,46
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**243.817.500,00**	**241.171.819,26**	**98,91**
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**243.817.500,00**	**241.171.819,26**	**98,91**
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	243.817.500,00	241.171.819,26	98,91
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**6.341.754.898,00**	**6.144.840.922,16**	**96,89**
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**1.268.241.000,00**	**1.111.428.767,00**	**87,64**
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.268.241.000,00	1.111.428.767,00	87,64
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**5.073.513.898,00**	**5.033.412.155,16**	**99,21**
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.418.050.000,00	2.401.300.000,00	99,31
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	2.655.463.898,00	2.632.112.155,16	99,12
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4.301.889.414,00**	**4.125.150.119,05**	**95,89**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**4.301.889.414,00**	**4.125.150.119,05**	**95,89**
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.301.889.414,00	4.125.150.119,05	95,89
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**752.254.880,00**	**724.551.410,00**	**96,32**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**720.318.180,00**	**694.416.210,00**	**96,40**
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.742.500,00	28.484.000,00	92,65
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.917.500,00	44.020.000,00	98,00

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	51.242.280,00	49.513.600,00	96,63
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.644.000,00	34.961.870,00	98,09
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	557.771.900,00	537.436.740,00	96,35
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**9.734.000,00**	**8.346.400,00**	**85,74**
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.734.000,00	8.346.400,00	85,74
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**22.202.700,00**	**21.788.800,00**	**98,14**
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	22.202.700,00	21.788.800,00	98,14
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**19.257.004.473,00**	**12.245.760.320,97**	**63,59**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**82.453.900,00**	**81.696.261,00**	**99,08**
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	82.453.900,00	81.696.261,00	99,08
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**916.053.573,00**	**892.752.399,00**	**97,46**
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	707.113.352,00	707.070.000,00	99,99
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	37.035.800,00	31.075.800,00	83,91
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	48.714.200,00	47.474.800,00	97,46
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	95.746.221,00	85.451.599,00	89,25
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.444.000,00	21.680.200,00	79,00
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**42.885.000,00**	**41.935.000,00**	**97,78**
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	13.430.000,00	13.430.000,00	100,00
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.280.000,00	3.280.000,00	100,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.175.000,00	25.225.000,00	96,37
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**18.215.612.000,00**	**11.229.376.660,97**	**61,65**
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	18.198.172.000,00	11.215.596.660,97	61,63

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	6.750.000,00	5.740.000,00	85,04
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	10.690.000,00	8.040.000,00	75,21
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**339.987.900,00**	**338.338.900,00**	**99,51**
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**339.987.900,00**	**338.338.900,00**	**99,51**
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	339.986.900,00	338.338.900,00	99,52
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000,00	0,00	0,00
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**223.956.100,00**	**170.931.240,00**	**76,32**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**223.956.100,00**	**170.931.240,00**	**76,32**
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	223.956.100,00	170.931.240,00	76,32
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**244.193.000,00**	**231.842.120,00**	**94,94**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**244.193.000,00**	**231.842.120,00**	**94,94**
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**175.566.000,00**	**173.977.000,00**	**99,09**
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**175.566.000,00**	**173.977.000,00**	**99,09**
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	175.566.000,00	173.977.000,00	99,09
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**100,00**
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**100,00**
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**162.640.000,00**	**147.891.000,00**	**90,93**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**24.338.000,00**	**23.736.000,00**	**97,53**

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.338.000,00	23.736.000,00	97,53
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**115.652.000,00**	**103.565.000,00**	**89,55**
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.652.000,00	103.565.000,00	89,55
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**22.650.000,00**	**20.590.000,00**	**90,91**
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.650.000,00	20.590.000,00	90,91
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**10.000.000,00**	**9.900.000,00**	**99,00**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10.000.000,00**	**9.900.000,00**	**99,00**
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**238.020.000,00**	**211.330.000,00**	**88,79**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**77.162.000,00**	**77.160.000,00**	**100,00**
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	77.162.000,00	77.160.000,00	100,00
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**114.488.000,00**	**95.230.000,00**	**83,18**
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.488.000,00	95.230.000,00	83,18
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**46.370.000,00**	**38.940.000,00**	**83,98**
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	46.370.000,00	38.940.000,00	83,98

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**472.418.900,00**	**420.456.225,00**	**89,00**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**175.354.200,00**	**135.515.960,00**	**77,28**
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	161.578.000,00	130.971.160,00	81,06
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.776.200,00	4.544.800,00	32,99
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**188.790.000,00**	**183.537.265,00**	**97,22**
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	188.790.000,00	183.537.265,00	97,22
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**108.274.700,00**	**101.403.000,00**	**93,65**
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**15.670.500,00**	**13.164.940,00**	**84,01**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**15.670.500,00**	**13.164.940,00**	**84,01**
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.670.500,00	13.164.940,00	84,01
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**42.763.800,00**	**41.458.500,00**	**96,95**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**42.763.800,00**	**41.458.500,00**	**96,95**
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.763.800,00	41.458.500,00	96,95
Jumlah		**362.297.951.708,00**	**327.321.502.521,22**	**90,35**

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka**,** terdiri dari:

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;

b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;

c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tana Tidung tahun 2025, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Tidung

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	3,67	3,68
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,01	3,90	3,85
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,32	4,91	4,85
4	Peringkat Provinsi	3	3	3

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2024 lebih rendah dibandingkan angka TPT tahun 2025. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Kabupaten Tana Tidung lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional. Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 3.8
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1.	Tingkat Pendidikan							
	a.	SD ke bawah	172	-	68	-	81	-
	b.	SMP	39	-	166	-	33	-
	c.	SMA Umum	205	-	215	-	192	-
	d.	SMA Kejuruan	54	-	-	-	17	-
	e.	Diploma I/II/III	-	-	-	-	-	-
	f.	Universitas	21	-	105	-	244	-

No	Klasifikasi TPT		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
2.	Jenis Kelamin							
	a.	Laki-Laki	291	-	365	-	369	-
	b.	Perempuan	200	-	189	-	198	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu dengan menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2025 senilai Rp764.175.942,00 dan telah merealisasikannya senilai Rp708.174.864,00 atau 92,67%. Rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran Kabupaten Tana Tidung TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	5.000.000,00	0,00	0,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**204.394.000,00**	**201.189.600,00**	**98,43**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**204.394.000,00**	**201.189.600,00**	**98,43**
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	204.394.000,00	201.189.600,00	98,43
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**66.465.400,00**	**59.891.000,00**	**90,11**
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	6.300.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**60.165.400,00**	**59.891.000,00**	**99,54**
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.165.400,00	59.891.000,00	99,54
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**488.316.542,00**	**447.094.264,00**	**91,56**
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**38.848.000,00**	**38.664.000,00**	**99,53**
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	38.848.000,00	38.664.000,00	99,53

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**449.468.542,00**	**408.430.264,00**	**90,87**
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.476.000,00	4.452.000,00	99,46
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.528.291,00	60.495.682,00	99,95
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	384.464.251,00	343.482.582,00	89,34
Jumlah		**764.175.942,00**	**708.174.864,00**	**92,67**

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, tingkat pengangguran terbuka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung masih dipertahankan di bawah Nasional.

3.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)

b. Sedang (60 ≤ IPM < 70)

c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80)

d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah sebesar 71,86 poin yang berarti masuk kategori (tinggi) dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Indeks Pembangunan Manusia

No	Capaian IPM	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten/Kota	70,06	70,95	71,86
2	Provinsi	72,88	73,41	74,04
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90
4	Peringkat Provinsi	4	4	4

No	Capaian IPM	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten/Kota	70,06	70,95	71,86
2	Provinsi	72,88	73,41	74,04
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90
5	Peringkat Nasional	381	366	**N/A**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menunjukan adanya tren yang fluktuatif atas pencapaian IPM di Kabupaten Tana Tidung. IPM di Kabupaten Tana Tidung pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan berada pada urutan 366 untuk peringkat nasional dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia.

Tabel 3.11
IPM Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2023 s.d. 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Malinau	74,00	74,72	75,21
2	Bulungan	73,20	73,83	74,53
3	Tana Tidung	70,06	70,95	71,86
4	Nunukan	68,43	69,27	69,87
5	Tarakan	77,61	78,03	78,62
Kalimantan Utara		**72,88**	**73,41**	**74,04**

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas, menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dalam periode tahun 2023 s.d. 2025 yang mengalami fluktuasi dimana Kabupaten Tana Tidung menduduki peringkat keempat. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tana Tidung

No	Indikator	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	73,47	73,51	73,64
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,04	9,24	9,41
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,39	12,61	12,85
3.	Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan	8.386.000	8.707.000	9.037.000
Indeks Pembangunan Manusia		**70,06**	**70,95**	**71,86**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Kabupaten Tana Tidung mencapai 73,64 tahun pada tahun 2025. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD sebagai berikut.

Tabel 3.13
Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**33.146.031.455,00**	**29.688.972.028,00**	**89,57**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**23.659.277.055,00**	**21.168.008.568,00**	**89,47**
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	3.223.556.000,00	3.125.306.388,00	96,95
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.322.240.300,00	9.689.339.022,00	93,87
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3.149.273.443,00	3.114.439.000,00	98,89
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.565.368.400,00	1.500.893.000,00	95,88
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	933.264.045,00	909.226.160,00	97,42
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	475.064.000,00	344.202.715,00	72,45
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.858.573.867,00	2.359.956.283,00	61,16
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	131.937.000,00	124.646.000,00	94,47
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**8.941.564.300,00**	**7.992.418.489,00**	**89,39**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.285.500,00	40.620.000,00	65,22
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	153.656.000,00	142.386.271,00	92,67
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	107.277.200,00	79.229.018,00	73,85
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.807.000,00	13.051.600,00	46,94
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.676.700,00	59.016.700,00	73,15
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.860.000,00	7.740.000,00	98,47

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.300.000,00	6.200.000,00	98,41
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.860.000,00	7.740.000,00	98,47
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.780.000,00	3.720.000,00	98,41
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.490.000,00	19.350.000,00	70,39
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.376.000,00	25.300.000,00	99,7
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	72.634.000,00	71.325.000,00	98,2
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.070.493.200,00	790.797.600,00	73,87
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.846.000,00	27.846.000,00	93,30
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	654.701.600,00	603.213.000,00	92,14
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	92.436.800,00	79.376.800,00	85,87
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	415.547.000,00	399.755.000,00	96,20
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.242.700,00	44.842.700,00	99,12
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134.115.400,00	126.285.400,00	94,16
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.017.460.000,00	4.630.900.400,00	92,30
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	36.093.000,00	22.503.000,00	62,35
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	55.746.000,00	45.026.000,00	80,77
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	620.807.200,00	619.579.000,00	99,80
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	186.073.000,00	126.615.000,00	68,05
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**156.592.100,00**	**145.028.978,00**	**92,62**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	156.592.100,00	145.028.978,00	92,62
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**388.598.000,00**	**383.515.993,00**	**98,69**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	106.754.000,00	102.682.772,00	96,19
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	281.844.000,00	280.833.221,00	99,64

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2.734.966.992,00**	**1.911.557.869,00**	**69,89**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.317.860.800,00**	**1.539.664.750,00**	**66,43**
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.876.000,00	1.770.000,00	16,27
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.279.028.800,00	1.520.844.750,00	66,73
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.956.000,00	17.050.000,00	60,99
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**417.106.192,00**	**371.893.119,00**	**89,16**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.106.192,00	371.893.119,00	89,16
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**403.401.676,00**	**318.818.552,00**	**79,03**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**25.768.600,00**	**25.298.600,00**	**98,18**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.768.600,00	25.298.600,00	98,18
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**112.457.640,00**	**82.252.540,00**	**73,14**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	112.457.640,00	82.252.540,00	73,14
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100.141.000,00**	**74.642.776,00**	**74,54**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.141.000,00	74.642.776,00	74,54

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**165.034.436,00**	**136.624.636,00**	**82,79**
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	165.034.436,00	136.624.636,00	82,79
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**307.010.067,00**	**272.660.646,00**	**88,81**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**193.105.667,00**	**177.562.246,00**	**91,95**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	193.105.667,00	177.562.246,00	91,95
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**72.955.400,00**	**54.939.400,00**	**75,31**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.949.000,00**	**40.159.000,00**	**98,07**
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.949.000,00	40.159.000,00	98,07
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**11.791.214.412,00**	**11.295.790.525,00**	**95,80**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.342.873.638,00**	**2.211.332.051,00**	**94,39**
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	218.050.000,00	186.750.000,00	85,65
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.124.823.638,00	2.024.582.051,00	95,28
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**9.448.340.774,00**	**9.084.458.474,00**	**96,15**
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9.448.340.774,00	9.084.458.474,00	96,15
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**168.716.000,00**	**126.208.275,00**	**74,81**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**168.716.000,00**	**126.208.275,00**	**74,81**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.716.000,00	126.208.275,00	74,81
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**271.767.100,00**	**194.232.783,00**	**71,47**

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**271.767.100,00**	**194.232.783,00**	**71,47**
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	135.465.100,00	124.800.000,00	92,13
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	136.302.000,00	69.432.783,00	50,94
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**510.285.100,00**	**468.342.818,00**	**91,78**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**288.566.900,00**	**261.697.818,00**	**90,69**
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	60.654.900,00	47.864.220,00	78,91
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	69.682.000,00	64.278.000,00	92,24
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	47.400.000,00	47.400.000,00	100
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	49.510.000,00	46.495.000,00	93,91
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	61.320.000,00	55.660.598,00	90,77
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**98.489.000,00**	**96.599.000,00**	**98,08**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	98.489.000,00	96.599.000,00	98,08
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**63.694.000,00**	**51.194.000,00**	**80,37**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.440.000,00	18.540.000,00	95,37
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29.466.000,00	19.166.000,00	65,04
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.788.000,00	13.488.000,00	91,21
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**59.535.200,00**	**58.852.000,00**	**98,85**
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.935.000,00	3.842.000,00	97,64
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	55.600.200,00	55.010.000,00	98,94

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**332.400.000,00**	**301.740.570,00**	**90,78**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**332.400.000,00**	**301.740.570,00**	**90,78**
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108.000.000,00	105.657.570,00	97,83
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	224.400.000,00	196.083.000,00	87,38
Jumlah		**49.665.792.802,00**	**44.578.324.066,00**	**89,76**

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.14
Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan RLS dan HLS TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**124.923.688.179,99**	**104.734.665.101,00**	**83,84**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**41.387.149.702,39**	**31.434.063.370,00**	**75,95**
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	445.128.125,00	245.128.125,00	55,07
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.741.562.490,00	2.478.276.610,00	66,24
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.376.600.000,00	1.326.088.900,00	96,33
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.000.000,00	235.342.620,00	98,88
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	354.969.000,00	253.384.986,00	71,38
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.083.238.000,00	978.488.990,00	90,33
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.074.836.000,00	3.978.795.350,00	97,64
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	58.050.000,00	57.750.000,00	99,48

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.114.586.000,00	902.229.398,00	80,95
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	532.190.000,00	483.976.180,00	90,94
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.246.996.000,00	3.609.343.727,00	84,99
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	982.737.900,00	577.122.950,00	58,73
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62.304.600,00	54.084.000,00	86,81
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000,00	196.500.000,00	65,50
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	583.416.500,00	473.335.659,00	81,13
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	58.130.000,00	56.033.000,00	96,39
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	323.762.000,00	168.268.500,00	51,97
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150.400.000,00	148.396.000,00	98,67
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.500.000.000,00	1.325.821.629,00	88,39
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.552.572.587,39	2.338.154.093,00	51,36
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.314.000.000,00	1.122.286.250,00	85,41
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	882.210.000,00	691.532.950,00	78,39
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	415.000.000,00	411.098.900,00	99,06
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.012.050.000,00	8.455.010.093,00	70,39
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	984.410.500,00	867.614.460,00	88,14
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**72.412.115.760,00**	**62.577.905.808,00**	**86,42**
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30.386.759.600,00	25.760.049.331,00	84,77
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.059.053.760,00	6.773.773.297,00	95,96
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	2.948.643.500,00	2.864.271.443,00	97,14
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	842.164.000,00	597.601.460,00	70,96
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.745.800.000,00	7.418.356.039,00	76,12
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.825.968.900,00	5.277.459.700,00	90,59

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.300.114.000,00	4.296.787.500,00	99,92
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.580.130.000,00	1.161.989.608,00	73,54
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.653.276.000,00	2.357.802.640,00	88,86
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.385.050.000,00	2.180.274.715,00	91,41
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	226.000.000,00	165.318.000,00	73,15
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	122.550.000,00	98.179.000,00	80,11
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	187.140.000,00	126.153.000,00	67,41
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.189.466.000,00	801.429.200,00	67,38
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	260.000.000,00	136.954.000,00	52,67
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.700.000.000,00	1.564.702.875,00	92,04
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.000.000,00	996.804.000,00	99,68
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**9.052.735.057,60**	**8.821.759.179,00**	**97,45**
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	583.518.060,00	575.751.679,00	98,67
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	97.781.800,00	96.400.000,00	98,59
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	474.992.800,00	473.347.200,00	99,65
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	99,85
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.602.433.200,00	1.545.353.602,00	96,44
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	187.907.000,00	181.313.000,00	96,49
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	96,65
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	293.338.000,00	287.871.000,00	98,14
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	341.790.000,00	313.961.101,00	91,86
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.700.000,00	98.600.000,00	97,91
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	316.880.000,00	296.177.000,00	93,47
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	133.608.000,00	130.768.500,00	97,87
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	26.093.900,00	26.000.000,00	99,64

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	438.260.000,00	406.778.000,00	92,82
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	317.909.600,00	317.791.507,00	99,96
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.085.000,00	642.808.760,00	98,88
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	337.800.000,00	333.359.000,00	98,69
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	334.799.997,60	334.608.330,00	99,94
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	570.105.700,00	553.040.500,00	97,01
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**2.071.687.660,00**	**1.900.936.744,00**	**91,76**
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	196.950.479,00	98,48
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	84.284.000,00	71.578.500,00	84,93
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	256.836.000,00	254.107.909,00	98,94
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	344.710.000,00	340.710.000,00	98,84
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.806.000,00	20.700.000,00	69,45
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	35.908.000,00	7.000.000,00	19,49
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	40.427.700,00	36.615.000,00	90,57
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	405.690.300,00	372.392.500,00	91,79
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	7.900.000,00	6.970.000,00	88,23
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.756.000,00	39.131.000,00	96,01
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	60.000.000,00	36.998.000,00	61,66
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	103.136.000,00	99.887.000,00	96,85
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	88.025.860,00	54.844.356,00	62,30
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	269.724.000,00	262.263.000,00	97,23
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	74.838.000,00	72.450.000,00	96,81
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	29.645.800,00	28.339.000,00	95,59

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**45.613.900,00**	**44.610.000,00**	**97,80**
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**45.613.900,00**	**44.610.000,00**	**97,80**
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	24.810.000,00	99,24
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.613.900,00	19.800.000,00	96,05
01.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**88.700.000,00**	**64.375.000,00**	**72,58**
1.01.06.2.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**88.700.000,00**	**64.375.000,00**	**72,58**
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	88.700.000,00	64.375.000,00	72,58
Jumlah		**125.058.002.079,99**	**104.843.650.101,00**	**83,84**

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

c. Indikator Pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun. Terkait dengan indikator ini, Kabupaten Tana Tidung juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini senilai Rp852.265.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15
Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**390.406.000,00**	**342.153.300,00**	**87,64**
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**390.406.000,00**	**342.153.300,00**	**87,64**
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	109.887.200,00	86.068.700,00	78,32
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	280.518.800,00	256.084.600,00	91,29
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN**	**70.248.000,00**	**57.337.200,00**	**81,62**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**70.248.000,00**	**57.337.200,00**	**81,62**

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	70.248.000,00	57.337.200,00	81,62
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**71.455.000,00**	**65.381.800,00**	**91,50**
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**71.455.000,00**	**65.381.800,00**	**91,50**
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	55.319.000,00	49.517.400,00	89,51
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	16.136.000,00	15.864.400,00	98,32
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**320.156.500,00**	**223.018.800,00**	**69,66**
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**320.156.500,00**	**223.018.800,00**	**69,66**
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	320.156.500,00	223.018.800,00	69,66
Jumlah		**852.265.500,00**	**687.891.100,00**	**80,71**

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

3.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung TA 2023 s.d. 2025

No	Uraian	Provinsi/Kabupaten/Kota		
		2023	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	4,86	6,21*	3,73**
2	Peringkat Provinsi	2	1	4

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Selama kurun waktu tahun 2023 s.d. 2025, laju perekonomian Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,93%. Sedangkan pada tingkat provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung menempati urutan keempat dari laju pertumbuhan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

3.1.5 Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (C*reeping Inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;

b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

c. Inflasi Berat (*High Inflation*), mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Tidung tidak dapat kami klasifikasikan, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara inflasi berdasarkan gabungan Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

3.1.6 Struktur Perekonomian Kabupaten Tana Tidung

Struktur perekonomian Kabupaten Tana Tidung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17

PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Juta

No	URAIAN	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.125,54	2.227,21	2.284,93
2	Pertambangan dan Penggalian	4.134,12	3.718,40	3.688,79
3	Industri Pengolahan	179,94	349,17	345,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,62	1,88	1,90
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,04	1,13	1,29
6	Konstruksi	1.398,95	1.575,18	1.801,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	400,52	442,25	494,17
8	Transportasi dan Pergudangan	50,92	55,95	62,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,15	18,11	18,81
10	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,99	4,33
11	Jasa Keuangan	8,66	9,19	9,85
12	*Real Estate*	45,50	48,36	51,30
13	Jasa Perusahaan	1,17	1,23	1,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	765,02	823,84	826,81
15	Jasa Pendidikan	117,17	125,23	125,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,01	5,43	6,01
17	Jasa Lainnya	29,74	32,31	34,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		**9.284,20**	**9.438,85**	**9.759,98**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**9.236,45**	**9.237,77**	**9.574,34**
18	Peringkat Provinsi	5	5	5

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

3.2. Kondisi Ekonomi Tahun 2025

Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ikut memicu pergerakan ekonomi daerah menuju kondisi perekonomian daerah yang semakin baik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam satu tahun.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 3.18
PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2021	6.734,16 miliar	6.717,29 miliar
2022	8.851,81 miliar	8.830,67 miliar
2023	9.284,20 miliar	9.236,45 miliar
2024*	9.438,85 miliar	9.237,77 miliar
2025**	9.759,98 miliar	9.574,34 miliar

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 3.19
PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2021	3.813,90 miliar	3.804,90 miliar
2022	4.016,24 miliar	4.006,48 miliar
2023	4.211,63 miliar	4.187,98 miliar
2024*	4.473,03 miliar	4.338,26 miliar
2025**	4.640,00 miliar	4.487,40 miliar

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

3.2.1. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2021 – 2025

Gambaran ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 - 2025 dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal antara lain kepastian hukum, liberalisasi perdagangan dan kebijakan birokrasi investasi, kebijakan moneter yang menyebabkan tingginya suku bunga perbankan, kurs mata uang rupiah, tidak stabilnya harga komoditas dan insentif perpajakan yang belum kompetitif. Sedangkan lingkungan internal antara lain pemilihan Kepala Daerah secara langsung, peraturan-peraturan daerah yang memberatkan bagi investor serta kondisi infrastruktur di daerah yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun terakhir ini selalu mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi fluktuasi di setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 dengan laju pertumbuhan ekonomi senilai Rp4.640,00 miliar atau sebesar 3,73% dari Tahun 2023 yang memiliki laju pertumbuhan ekonominya senilai Rp4.473,03 miliar atau sebesar 6,21% dari tahun 2023.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya laju pertumbuhan ekonomi pada lima tahun terakhir periode 2021 s.d. 2025 setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp4.230,96 miliar atau 4,66%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah daerahnya. Lebih lanjut dapat disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2021 s.d. 2025

Dalam Juta

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.146,65	1.147,92	1.146,84	1.198,09	1.226,92
B	Pertambangan dan Penggalian	1.256,93	1.385,30	1.483,67	1.437,56	1.449,37
C	Industri Pengolahan	82,22	84,27	99,19	215,11	235,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,74	0,84	0,96	1,09	1,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,61	0,63	0,69	0,75	0,82
F	Konstruksi	591,02	614,77	678,58	760,77	844,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190,14	206,21	213,95	234,32	258,25
H	Transportasi dan Pergudangan	27,96	30,21	30,64	33,29	36,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,68	8,44	8,74	9,38	9,55
J	Informasi dan Komunikasi	1,61	1,74	1,87	2,18	2,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,43	4,88	5,62	5,95	6,28
L	Real Estate	24,56	25,73	26,41	27,79	29,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,63	0,67	0,70	0,73	0,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397,98	418,59	425,35	452,89	446,15
P	Jasa Pendidikan	60,54	64,23	65,82	69,56	67,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,10	3,14	3,18	3,32	3,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	17,11	18,67	19,42	20,25	21,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**3.813,90**	**4.016,24**	**4.211,63**	**4.473,03**	**4.640,00**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**3.804,19**	**4.006,48**	**4.187,98**	**4.338,26**	**4.487,40**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

3.3. Kebijakan Keuangan

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Dinamika ini dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan struktur penerimaan daerah, fluktuasi kebijakan transfer ke daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menetapkan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan yang berfokus pada kemandirian dan efisiensi yang dijabarkan dalam empat pilar utama yaitu, kebijakan pada sisi pengelolaan pendapatan daerah yang mana kebijakan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pada sisi kebijakan pengelolaan belanja daerah, pengalokasian belanja daerah diarahkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas melalui pendekatan "*Money Follow Program*" yang berorientasi pada pemenuhan prioritas pembangunan dengan memastikan alokasi anggaran berfokus pada program strategis yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu menjamin ketersediaan anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada sisi kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah, kebijakan pembiayaan difungsikan sebagai instrumen untuk menutup celah defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dengan manajemen silpa yaitu penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) secara cermat untuk mendukung kesinambungan fiskal. Kemudian investasi dan pembiayaan terukur yaitu menata penutupan defisit anggaran dengan tetap menjaga rasio likuiditas dan kapasitas bayar daerah yang sehat. Pada sisi kebijakan umum anggaran (KUA), menyusun kerangka kebijakan yang menyelaraskan antara target pendapatan dengan kebutuhan belanja dengan cara sinkronisasi kebijakan yaitu menjamin keselarasan antara prioritas daerah dengan kebijakan fiskal nasional dan provinsi dan disiplin anggaran dengan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja guna mencapai opini laporan keuangan yang berkualitas.

Arah kebijakan keuangan daerah akan dibagi dalam empat pokok arah kebijakan yaitu pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah dan kebijakan umum anggaran.

3.3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibagi dalam tiga struktur kelompok pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kondisi umum saat ini atas pendapatan daerah adalah dana perimbangan mendominasi jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menggali potensi daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan.

Penurunan jumlah pendapatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar proses percepatan pembangunan pasca pemekaran wilayah Kalimantan Utara dapat segera diatasi.

Arah pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2021-2025 ditujukan pada keseimbangan struktur antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, serta peningkatan PAD rata-rata 10% per tahun.

3.3.1.1. Keseimbangan Struktur Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

Berdasarkan kondisi dan situasi terkini, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan komposisi sumber penerimaan daerah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan guna mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, komposisi pendapatan daerah tercatat sebesar 40% PAD dan 60% Dana Perimbangan. Capaian tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan pendapatan daerah pada tahun berikutnya, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dimaksud, Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah kebijakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip:

a. Tidak memberatkan masyarakat dan pengusaha terutama usaha kecil menengah;
b. Tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam;
c. Penerapan tarif progresif dan proporsional; dan
d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penatausahaan pendapatan.

Intensifikasi ditekankan pada perbaikan sistem pemungutan pajak/retribusi, memperkecil nilai tunggakan pajak, penegakan perda PAD dan menyederhanakan birokrasi izin-izin usaha baru. Adapun potensi retribusi yang masih bisa memberikan kontribusi signifikan dalam PAD untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah retribusi hotel dan restoran.

Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada pemanfaatan potensi-potensi daerah baru. Hasil riset dan kajian terkait regulasi PAD telah ditindaklanjuti dan dilegalkan melalui Peraturan Daerah, sehingga menjadi dasar hukum yang sah untuk pengelolaan dan pemungutan PAD dari sumber-sumber baru tersebut. Langkah ini memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Tana Tidung sebagai peningkatan sumber daya, pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata, maka arah pengelolaan belanja daerah 5 (lima) tahun mendatang difokuskan pada peranan belanja daerah dalam memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor. Selain itu, belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani, serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan.

3.3.2.1. Belanja Daerah Diarahkan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan ditandai semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disinergikan dengan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga diharapkan dapat memberikan dorongan pada laju pertumbuhan ekonomi agar perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara nasional dapat diminimalkan di Kabupaten Tana Tidung, dimana pertumbuhan ekonomi dapat terwujud seiring dibangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sehingga mendorong investasi yang masuk ke Kabupaten Tana Tidung.

Dalam rangka mendorong investasi di Kabupaten Tana Tidung, maka pemerintah merencanakan belanja daerah 5 (lima) tahun mendatang lebih ditekankan pada upaya membangun infrastruktur sarana dan prasarana dan menambah daya tarik investasi. Belanja daerah akan diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, drainase, pelabuhan, pergudangan, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, *sport center* dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha.

Untuk mencapai tujuan di atas maka perlu diambil kebijakan pengelolaan belanja pada tahun 2021-2025. Dengan memperhatikan asumsi dan proyeksi pendapatan di atas belanja daerah pada tahun 2025 semula diproyeksikan meningkat, namun realisasinya menunjukkan penurunan akibat penyesuaian terhadap dinamika kapasitas fiskal dan kebijakan efisiensi belanja daerah.

Besarnya belanja pembangunan ini diarahkan untuk terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi Kabupaten Tana Tidung dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pada akhirnya dapat menyejahterakan rakyat. Sedangkan persentase kenaikan belanja mengikuti persentase kenaikan pendapatan merupakan langkah antisipasi untuk meminimalkan anggaran defisit yang ekstrim, mengingat kondisi likuiditas kas daerah pada saat tahun ini dan tahun mendatang lebih sulit.

3.3.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berencana menata pengelolaan pembiayaan dengan efisiensi dalam rangka mengantisipasi penurunan DBH SDA maupun kurang transfer dari Pemerintah Pusat karena tidak tercapainya target pajak secara nasional. Penataan ini sangatlah penting mengingat unsur-unsur pembiayaan makin bervariasi, tidak hanya sebatas SiLPA atau sisa lebih anggaran. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku banyak variasi pembiayaan yang bisa dikelola pemerintah seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, penyertaan modal dan privatisasi. Pembiayaan ini semakin penting mengingat berperan dalam menutup defisit anggaran dan mencerminkan likuiditas dan solvabilitas.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua unsur yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan akan menambah kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari SiLPA awal tahun, transfer dari dana cadangan, dan penerimaan pinjaman/obligasi serta penerimaan hasil privatisasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan akan membebani keuangan daerah yang terdiri dari transfer ke dana cadangan, pembayaran utang dan bunga serta penyertaan modal.

3.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari pembiayaan utang daerah, yang merupakan komponen penerimaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD, dengan konsekuensi kewajiban pembayaran kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Tana Tidung menetapkan kebijakan bahwa penerimaan pembiayaan harus dikelola secara *prudent* (hati-hati) agar tidak memperberat beban anggaran di masa depan serta tetap menjamin stabilitas likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu, penerimaan pembiayaan difokuskan pada SiLPA awal tahun dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan untuk pemanfaatan pinjaman daerah ditempatkan sebagai opsi terakhir yang akan dilakukan dengan pengkajian mendalam. prioritas tetap pada optimalisasi belanja yang efisien, sembari menunggu kelengkapan regulasi teknis terkait tata cara pinjaman dan penerbitan obligasi daerah. Apabila perangkat peraturannya sudah ada maka pemanfaatan pinjaman/ obligasi akan dikaji dahulu secara matang oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, mengingat pinjaman daerah memiliki beberapa risiko pada masa akan datang seperti likuiditas dan ketergantungan pada pihak lain. Apabila hasil kajian bahwa pinjaman memberikan hasil maksimal bagi masyarakat dan tidak mempersulit kemampuan keuangan daerah maka tidak menutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memanfaatkan pinjaman sebagai alternatif penerimaan pembiayaan untuk mengoptimalkan pembangunan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang;

b. Tujuan pinjaman, hendaknya mempunyai *multiplier effect* yang besar dan *cost recovery*;

c. Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang tidak mempunyai persyaratan politik;

d. Transparansi tata cara pengesahan pinjaman, sehingga akan mengakibatkan biaya yang mahal/kebocoran yang mengakibatkan kerugian bagi peminjam; dan

e. Pengawasan yang efektif dan efisien.

3.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan akan diarahkan dalam usaha-usaha menambah PAD. Oleh karena itu, pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Penyertaan modal akan menambah PAD melalui penerimaan dividen. Sedangkan transfer ke dana cadangan akan menambah penerimaan bunga deposito dan jasa giro. Pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah baik dari segi likuiditas dan solvabilitas.

3.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka pengelolaan APBD, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

h. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

i. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas dan perkembangan anggaran maka kebijakan umum APBD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun mendatang dibagi dalam 6 (enam) pokok kebijakan sebagaimana diuraikan pada paragraf di bawah ini:

3.4.1. Anggaran Merupakan Cermin dari Perencanaan

Anggaran merupakan cermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja SKPD). Hal ini berarti setiap anggaran yang diajukan harus berlandaskan hasil perencanaan sebelumnya. Sistem ini menjamin pencapaian visi dan tujuan Kabupaten Tana Tidung mengingat setiap perencanaan bersumber dari visi dan tujuan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Selain itu, sistem ini menjamin bahwa anggaran menampung pula aspirasi masyarakat mengingat setiap perencanaan yang dihasilkan harus melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat secara aktif.

3.4.2. Kegiatan pada Anggaran Memiliki Indikator Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan dalam anggaran mencerminkan indikator-indikator kinerja. Hal ini menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu memiliki hasil dan manfaat. Tidak ada anggaran yang tidak bermanfaat dan mubazir, semuanya terukur. Dengan demikian, prinsip ekonomis, efektif dan efisien selalu terjaga dalam sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

3.4.3. APBD Menjamin Likuiditas dan Keseimbangan Keuangan

APBD menjamin likuiditas pada rasio di atas satu. Anggaran mencegah defisit ekstrim yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Defisit dalam anggaran dapat dilakukan selama masih bisa ditutup dengan kemampuan sendiri. Apabila terdapat defisit anggaran, pemerintah memprioritaskan pemanfaatan SILPA atau dana cadangan dalam menutup defisit.

3.4.4. APBD sebagai Instrumen Ekonomi

APBD merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peranan APBD dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan anggaran serta keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan mengembangkan pula kebijakan non anggaran yaitu memperkuat dan memperluas kemitraan. Kemitraan dengan swasta sudah merupakan tuntutan zaman sekarang ini, karena peranan pemerintah sudah mulai “berkurang”, sementara peranan swasta semakin meningkat terutama dalam sektor perekonomian.

Prinsip kerjasama (kemitraan) yang saling menguntungkan bagi pemerintahan, swasta dan masyarakat dilaksanakan melalui langkah-langkah:

a. Perumusan model-model kemitraan yang paling tepat dilakukan;

b. Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra Pemerintah Kabupaten; dan

c. Terciptanya model-model kerjasama antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antar swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.

Banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, namun tidak semua jenis prasarana dan sarana dapat dikerjasamakan, ada bagian-bagian tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan. Bagaimanapun, calon investor hanya mau diukur dengan kriteria finansial atau ekonomi, seperti *Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR),* dan *Pay Back Period*. Oleh karena itu, dimasa mendatang dituntut adanya kemampuan aparat atau pejabat pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi swasta untuk mengadakan kemitraan di bidang penyediaan pelayanan jasa bagi masyarakat. Bentuk kerjasama dapat dilakukan melalui:

a. *Leases and Concessions (L&C)*

   Model pembiayaan ini mencakup periode yang panjang dan komitmen pendanaan yang cukup besar. Di bawah kondisi *lease*, Pemerintah menyediakan sarana/fasilitas dan kontraktor mengoperasikan sarana/peralatan. Kontraktor membayar Pemerintah untuk penggunaan sarana/peralatan selama periode kontrak, dan kontraktor berhak mengumpulkan biaya dari tarif pengoperasian tersebut.

   Selanjutnya di bawah kondisi *Concessions*, hampir sama dengan *lease*, tetapi lebih memberikan kewajiban kepada kontraktor untuk menambah investasi infrastruktur. Model konsesi lebih diarahkan pada pelayanan transportasi perkotaan, air bersih, pengelolaan air limbah dan telekomunikasi.

b. *Built, Operate and Transfer (BOT)*

   Ide dari model BOT ini adalah pihak swasta diberi hak untuk membangun prasarana, mengoperasikannya (dan menerima jasa pelayanan) selama masa tertentu dan akhirnya setelah kontrak habis ditransfer menjadi milik Pemerintah. Model ini juga telah dikembangkan seperti misalnya *Build, Operate, Own, Transfer (BOOT)*.

c. *Public Private Partnership*

Ide dari model ini adalah Pemerintah membentuk perusahaan bersama dengan swasta. Pemerintah berkontribusi tanah, prasarana yang sudah ada atau modal. Pihak swasta akan memberikan kontribusi tenaga ahli dan modal.

d. Dana Pembangunan Prasarana

Pemerintah menyediakan dana pinjaman yang dapat digunakan untuk pembangunan prasarana oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini dulu dilakukan oleh Departemen Keuangan berupa *Regional Development Account* (RDA). RDA untuk saat ini perlu diintroduksi kembali karena diperlukan dalam rangka mengatasi kejadian yang *unpredictable* dan membutuhkan pembiayaan yang besar, misalnya kebakaran pasar di suatu wilayah yang memerlukan penanganan segera dengan dana yang cukup besar.

3.4.5. APBD Menerapkan Asas Tepat Waktu, Keterbukaan dan Partisipatif

APBD Kabupaten Tana Tidung akan menerapkan asas tepat waktu, keterbukaan dan partisipatif dalam penganggaran dengan uraian sebagai berikut:

a. Asas tepat waktu

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan berusaha agar setiap proses penganggaran dari pembahasan sampai dengan pengesahan tepat waktu sesuai dengan jadwal pada kalender anggaran. APBD dibahas mulai sejak bulan oktober dan disahkan paling lambat bulan Desember. Sedangkan APBD perubahan dibahas mulai sejak bulan Juni dan disahkan paling lambat bulan Agustus.

b. Asas keterbukaan

Setiap pembahasan APBD akan melalui agenda pembahasan secara bertahap. Tahap pertama akan dilakukan pembahasan antara Banggar Eksekutif dengan Satuan Kerja. Tahap Kedua antara Banggar Legislatif dengan Satuan Kerja. Tahap Ketiga pembahasan antara Banggar Eksekutif dan Legislatif. APBD yang telah disahkan akan disebarluaskan pada masyarakat melalui media massa.

c. Asas partisipatif

Penyusunan anggaran akan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan tercermin pada Musrenbang dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten. Hasil Musrenbang akan dijadikan dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang kemudian tergambar dalam APBD. Selain itu ada pula aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD untuk kemudian dibahas dalam panitia anggaran.

3.4.6. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.4.6.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah TA 2025 telah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Daerah TA 2025 yang ditargetkan senilai Rp1.027.212.457.453,00 Realisasi sampai dengan akhir TA 2025 tercatat senilai Rp1.078.782.452.324,00 atau 105,02%. Dengan demikian Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 diserap lebih senilai Rp51.569.994.871,00 atau 5,02%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 yang tercatat senilai Rp1.483.899.695.654,45 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp405.117.243.330,45 atau 27,30%.

3.4.6.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2025 ditargetkan senilai Rp1.433.234.595.478,90. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp1.166.511.172.955,70 atau 81,39%. Dengan demikian dari anggaran belanja daerah yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp266.723.422.523,20 atau 18,61%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 mengalami defisit.

3.4.6.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari SiLPA Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp436.022.138.025,90. Adapun total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp436.022.138.025,90. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp30.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi pembiayaan daerah TA 2025 senilai Rp436.022.138.025,90.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA TA 2025 sebagai berikut.

a.	Pendapatan yang melebihi target di TA 2025	Rp	51.569.994.871,05
b.	Sisa anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir TA 2025	Rp	266.723.422.523,20

APBD Kabupaten Tana Tidung TA 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Selama TA 2025, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi pendapatan yang diperoleh dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah senilai Rp1.078.782.452.324,05 dengan belanja senilai Rp1.166.511.172.955,70. Gambaran lebih rinci tentang realisasi pendapatan dan belanja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
Pendapatan Asli Daerah	30.948.274.122,00	54.299.047.851,71	175,45	49.612.809.888,45
Pendapatan Transfer	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	102,83	1.415.256.686.466,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	132.000.000,00	130.884.120,34	99,15	19.030.199.300,00
Jumlah pendapatan	**1.027.212.457.453,00**	**1.078.782.452.324,05**	**105,02**	**1.483.899.695.654,45**
Belanja Operasi	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	84,22	774.466.031.112,02
Belanja Modal	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	89,13	446.286.590.042,40
Belanja Tak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	99,32	135.490.900.922,00
Jumlah Belanja	**1.433.234.595.478,90**	**1.166.511.172.955,70**	**81,39**	**1.356.243.522.076,42**
Surplus/(Defisit)	**(406.022.138.025,90)**	**(87.728.720.631,65)**	**21,61**	**127.656.173.578,03**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	100,00	308.365.964.447,87
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**436.022.138.025,90**	**436.022.138.025,90**	**100,00**	**308.365.964.447,87**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**30.000.000.000,00**	0,00	0,00	**0,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**406.022.138.025,90**	**436.022.138.025,90**	**107,39**	**308.365.964.447,87**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	**0,00**	**348.293.417.394,25**	**0,00**	**436.022.138.025,90**

Dari tabel di atas diketahui realisasi pendapatan mencapai 105,02% dan realisasi belanja yang mencapai 81,39%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan pencapaian yang baik atas indikator kinerja sebagaimana tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

3.4.7. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Secara umum hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung hanya bersifat teknis dan keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan yang belum selesai dan dimungkinkan tidak dapat dikerjakan dikarenakan masalah waktu dan anggaran, dimana dalam pelaksanaan program/kegiatan melalui beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui dan anggaran kegiatan tersebut telah direlokasi atau *refocusing*.

Secara khusus permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pencapaian target yang telah ditetapkan misalkan dalam pengelolaan pendapatan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

a. Keterbatasan dana/anggaran;
b. Kurangnya sumber daya manusia;
c. Sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak atau retribusi yang tidak membayar atau terlambat membayar;
d. Pembebasan retribusi;
e. *Class action*;
f. Kecenderungan masyarakat menunda membayar; dan
g. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Permasalahan-permasalahan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak/retribusi yang menjadi kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah; dan
b. Lemahnya pengendalian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target salah satunya target pendapatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a. Penggalian potensi PAD yang dilakukan lebih intensif untuk memaksimalkan capaian pendapatan dimasa yang akan datang;

b. Penerapan pelayanan prima untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD melalui kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi;

c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan sehingga pencapaian dapat lebih optimal;

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi keterampilan dan pengetahuan tentang Pajak/Retribusi daerah sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara baik;

e. Peningkatan/*upgrade/update* sistem aplikasi pengelolaan pendapatan, keuangan, aset dan persediaan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung; dan

f. Melakukan Sosialisasi Pajak Burung Walet untuk meningkatkan Pajak Asli Daerah pada Desa dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tana Tidung.

3.5. *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Tabel 3.22
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah			Jumlah		
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		240.690.049.391,00	93,00%		277.475.288.245,99	94,00%
	1) Belanja Operasi:	240.690.049.391,00		93,00%	277.475.288.245,99		94,00%
	a. belanja pegawai;			0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;			0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;			0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.			0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;			0,00%	0,00		0,00%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		0,00	0,00%		0,00	0,00%

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah			Jumlah		
	1) Belanja Operasi:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		0,00	0,00%		0,00	0,00%
	1) Belanja Operasi:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		0,00	0,00%		0,00	0,00%
	1) Belanja Operasi:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		18.086.217.636,00	7,00%		19.072.571.022,66	6,00%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	Belanja	0,00		0,00%	0,00		0,00%

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah			Jumlah		
	bantuan keuangan…						
	2) Sub Kegiatan .... pada SKPD			0,00%			0,00%
	dst	18.086.217.636,00		7,00%	19.072.571.022,66		6,00%
2.	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)**	**258.776.267.027,00**			**296.547.859.268,65**		
3.	**Total Belanja Daerah**	**1.308.801.880.201,00**			**1.433.234.595.478,90**		
4.	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**	**19,77%**			**20,69%**		

Tabel 3.23
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025	P-APBD 2025
		Jumlah	Jumlah
1	Total Belanja Daerah	1.308.801.880.201,00	1.433.234.595.478,90
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a) belanja bagi hasil	458.721.021,00	989.949.241,00
	b) bantuan keuangan	122.902.730.800,00	118.354.479.900,00
2	Jumlah (a+b)	123.361.451.821,00	119.344.429.141,00
3	Selisih (1-2)	1.185.440.428.380,00	1.313.890.166.337,90
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	**474.176.171.352,00**	**525.556.066.535,16**
5	**Persentase (4 : 3)**	**40%**	**40%**

Tabel 3.24
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	TA 2025	TA 2024
1	a) Belanja Modal	**403.581.107.329,80**	**434.056.815.945,39**
	1) Tanah	150.000.000,00	3.015.903.866,00
	2) Peralatan dan Mesin	29.465.940.095,00	39.255.670.619,00
	3) Bangunan dan Gedung	212.209.430.361,80	259.808.320.981,39
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	160.135.622.573,00	128.538.549.399,00
	5) Aset tetap lainnya	500.000.000,00	1.380.431.856,00

No	Komponen Perhitungan	TA 2025	TA 2024
	6) Aset lainnya	1.120.114.300,00	2.057.939.224,00
	b) Belanja pemeliharaan	**6.882.686.205,00**	**10.244.724.130,01**
2	a) Belanja Hibah	**24.490.903.218,00**	**19.667.134.141,00**
	b) Belanja Bantuan Sosial	**340.000.000,00**	**243.500.000,00**
	c) Belanja Bantuan Keuangan	**122.902.730.800,00**	**118.354.479.900,00**
3	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**558.197.427.552,80**	**582.566.654.116,40**
4	**Persentase**	**47,09%**	**44,34%**

Tabel 3.25
Perhitungan *Mandatory Spending*
Urusan Wajib Berdasarkan Perundang-Undangan
APBD TA 2025

No	SKPD	Total Pagu Belanja Daerah	Total Pagu Belanja SKPD	Rasio Terhadap Belanja	Keterangan
1	Inspektorat	1.433.234.595.478,90	17.080.860.640,00	1,19%	Terpenuhi
2	BKPSDM	1.433.234.595.478,90	8.312.772.120,00	0,58%	Terpenuhi

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, yaitu paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/ atau desa. Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

c. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

d. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan bahwa dalam uraian Pilar Strategi Percepatan meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* dengan tujuan agar persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan *stunting*. Sejalan dengan hal tersebut

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2022-2024 bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Sesuai dengan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengalokasikan dana *stunting* sebagai berikut.

Tabel 3.26
Alokasi Anggaran Untuk Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
1.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG**		**150.000.000,00**	**177.010.000,00**	**174.354.000,00**	**98,50**
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**150.000.000,00**	**177.010.000,00**	**174.354.000,00**	**98,50**
	5.01.03.2.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,50
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,50
2.	**DINAS KESEHATAN**		**3.763.996.224,00**	**2.851.325.800,00**	**2.314.019.159,00**	**81,16**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.065.994.924,00**	**2.342.970.200,00**	**1.854.929.189,00**	**79,17**
	1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	3.065.994.924,00	2.342.970.200,00	1.854.929.189,00	79,17
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.513.500,00	62.285.500,00	40.620.000,00	65,22
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	121.438.000,00	153.656.000,00	142.386.271,00	92,67
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.581.200,00	107.277.200,00	79.229.018,00	73,85
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	38.597.000,00	27.807.000,00	13.051.600,00	46,94
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	290.528.200,00	80.676.700,00	59.016.700,00	73,15
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.964.789.924,00	1.070.493.200,00	790.797.600,00	73,87
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	198.093.000,00	186.073.000,00	126.615.000,00	68,05
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	258.454.100,00	654.701.600,00	603.213.000,00	92,14
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**78.630.800,00**	**72.955.400,00**	**54.939.400,00**	**75,31**
	1.02.05.2.02	***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**78.630.800,00**	**72.955.400,00**	**54.939.400,00**	**75,31**
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	78.630.800,00	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**516.370.300,00**	**332.400.000,00**	**301.740.570,00**	**90,78**
	2.14.04.2.01	***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	**516.370.300,00**	**332.400.000,00**	**301.740.570,00**	**90,78**
	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108.000.000,00	108.000.000,00	105.657.570,00	97,83

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
	2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	68.580.300,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	115.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	224.400.000,00	224.400.000,00	196.083.000,00	87,38
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB**	**103.000.200,00**	**103.000.200,00**	**102.410.000,00**	**99,43**
	2.14.03.2.04	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	**55.600.200,00**	**55.600.200,00**	**55.010.000,00**	**98,94**
	2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	55.600.200,00	55.600.200,00	55.010.000,00	98,94
	2.14.03.2.01	***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal***	**47.400.000,00**	**47.400.000,00**	**47.400.000,00**	**100,00**
	2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
3.	**DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN**		**258.934.700,00**	**192.402.700,00**	**184.146.950,00**	**95,71**
	3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**135.092.000,00**	**84.128.000,00**	**82.743.950,00**	**98,35**
	3.25.06.2.03	***Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota***	**135.092.000,00**	**84.128.000,00**	**82.743.950,00**	**98,35**
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.092.000,00	84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	3.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**123.842.700,00**	**108.274.700,00**	**101.403.000,00**	**93,65**
	3.09.032.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi***	**123.842.700,00**	**108.274.700,00**	**101.403.000,00**	**93,65**
	3.09.032.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	123.842.700,00	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
4.	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**288.872.000,00**	**244.193.000,00**	**231.842.120,00**	**94,94**
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**288.872.000,00**	**244.193.000,00**	**231.842.120,00**	**94,94**
	1.06.05.2.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	**288.872.000,00**	**244.193.000,00**	**231.842.120,00**	**94,94**
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
5.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**190.500.000,00**	**217.500.000,00**	**217.300.000,00**	**99,91**
	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**190.500.000,00**	**217.500.000,00**	**217.300.000,00**	**99,91**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
	2.16.02.2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**190.500.000,00**	**217.500.000,00**	**217.300.000,00**	**99,91**
	2.16.02.2.01.14	Relasi Media	190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
6.	**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**4.595.634.646,00**	**9.104.877.250,00**	**7.532.512.974,97**	**82,73**
	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.836.249.600,00**	**7.558.325.600,00**	**6.171.264.175,00**	**81,65**
	1.03.03.2.01	***Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota***	**2.836.249.600,00**	**7.558.325.600,00**	**6.171.264.175,00**	**81,65**
	1.03.03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.418.124.800,00	5.546.153.600,00	4.214.577.500,00	75,99
	1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.234.415.000,00	1.894.380.000,00	1.839.346.675,00	97,09
	1.03.03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	183.709.800,00	117.792.000,00	117.340.000,00	99,62
	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.759.385.046,00**	**1.546.551.650,00**	**1.361.248.799,97**	**88,02**
	1.03.05.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**1.759.385.046,00**	**1.546.551.650,00**	**1.361.248.799,97**	**88,02**
	1.03.05.2.35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	350.994.246,00	189.997.250,00	84.468.540,00	44,46
	1.03.05.2.40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.408.390.800,00	1.356.554.400,00	1.276.780.259,97	94,12
7.	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**		**2.101.485.000,00**	**4.417.270.900,00**	**4.253.776.502,00**	**96,30**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.101.485.000,00**	**4.417.270.900,00**	**4.253.776.502,00**	**96,30**
	1.01.02.2.03	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	**2.101.485.000,00**	**4.417.270.900,00**	**4.253.776.502,00**	**96,30**
	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	500.000.000,00	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	99,85
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	459.078.000,00	1.602.433.200,00	1.545.353.602,00	96,44
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.046.632.000,00	959.082.400,00	91,64
	1.01.02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	95.775.000,00	570.105.700,00	553.040.500,00	97,01
TOTAL			**11.349.422.570,00**	**17.204.579.650,00**	**14.907.951.705,97**	**86,65**

Rincian program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* terdapat pada **Lampiran 3.1.**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari 29 SKPD dan SKPKD (PPKD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 Komponen Laporan keuangan yang harus disampaikan setiap entitas adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 adalah basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bila mana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan dengan Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran. Pendapatan dan Belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyajikan saldo akun-akun tahun 2025 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Persediaan dicatat sebesar Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian, Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran akun-akun laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi terkait basis akuntansi dan pengukuran akan dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.

c. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.

d. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

a. Pendapatan diakui pada saat:

   1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

b. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

c. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

d. Pendapatan Laporan Operasional yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

e. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Laporan Operasional diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

f. Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional pada PPKD adalah:

1) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan Laporan Operasional, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan Laporan Operasional mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

g. Bantuan Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam bentuk uang atau barang yang langsung ke Perangkat Daerah tanpa melalui mekanisme APBD sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundangan yang mendukung Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah tahun berkenaan adalah Pendapatan Laporan operasional.

h. Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional pada Perangkat Daerah adalah: Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk kedalam kategori ini antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) yaitu antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, apabila dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, Perangkat Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengukuran

a. Pendapatan Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Laporan Operasional bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Pendapatan Laporan Operasional dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan Laporan Operasional dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

d. Pendapatan Laporan Operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

h. Pendapatan dalam atau uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan adalah:

a. Penerimaan Pendapatan Laporan Operasional tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;

b. Penjelasan mengenai Pendapatan Laporan Operasional yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Laporan Operasional;

d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

e. Penjelasan mengenai pendapatan Laporan Operasional non mekanisme APBD seperti Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan baik berupa uang atau barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, yang langsung ke Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah dan Pemda; dan

f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Pengakuan

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai Belanja setelah disahkan oleh BU.

Pengukuran

a. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.

d. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

b. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

c. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

d. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

   1) Belanja Operasi;

   2) Belanja Modal; dan

   3) Belanja Tak Terduga.

   Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

f. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain :

   1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA.

   2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

   3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

   4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas,** dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas,** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan surat tagihan dan atau terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS/pengeluaran kas.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a. Beban Pegawai (gaji, tunjangan dan insentif), diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

b. Beban Barang dan Jasa, (beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas) diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani dan atau pada saat dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

c. Beban Penyusutan dana amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

g. Beban Lain-lain diantaranya adalah sebesar harga perolehan aset tetap bernilai kecil (dibawah nilai kapitalisasi) yang dicatat secara ekstra kompatabel, karena aset tersebut tidak dilakukan penyusutan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

    1) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

3) Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus

4) Pengeluaran beban dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).

5) Beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar yang tercantum dalam BAST, apabila dalam BAST tidak dicantumkan nilai barang dan jasa, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional. Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

   1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas), Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;

   2) Beban Transfer;

   3) Beban Non Operasional; dan

   4) Beban Luar Biasa.

b. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

c. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

   1) Pengeluaran beban tahun berkenaan, disesuaikan dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan.

   2) Beban lain-lain atas Aset Tetap yang nilainya dibawah batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstra kompatabel, tidak dicatat dalam KIB dan tidak dilakukan penyusutan.

   3) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja dengan pengakuan beban.

   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Pengakuan atas kebijakan akuntansi transfer terdiri dari:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

   1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

   2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*, atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.

   3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

   1) Transfer Keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

   2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

   3) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

   4) Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.

Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tercantum dalam dokumen penerimaan dan pengeluaran yang sah.

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

   1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

   2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

   1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

   2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

   Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

   1) Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAK merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAK tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAK TA berjalan.

   2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran Transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun tahun-TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan, yaitu:

a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pada pembiayaan, yaitu:

a. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.

b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas dan setara kas meliputi saldo Kas di Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, dan Setara Kas.

Saldo Kas di Kas Daerah bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;

b. Penyetoran kembali sisa uang persediaan dari bendahara pengeluaran;

c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelunasan piutang;

e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo Kas di Kas Daerah berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;

b. Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja hibah, bantuan keuangan, dan belanja bantuan sosial;

c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan

d. Pengeluaran lainnya, seperti pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas tunai dan saldo rekening bank Bendahara Penerimaan yang hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas tunai dan saldo rekening bendahara pengeluaran yang hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah. Termasuk didalamnya Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas yang masih tersimpan di Rekening Kas BLUD pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas tunai dan saldo kas yang ada pada rekening bank Bendahara BOS pada sekolah negeri milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas tunai dan saldo yang ada pada rekening bank Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca.

Kas Lainnya merupakan saldo kas yang antara lain berasal dari:

a. Uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan dari suatu pekerjaan;

b. Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran; dan

c. Uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan.

b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

Pengakuan

a. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Badan Layanan Umum Daerah.

b. Kas di Kas Daerah diakui penambahannya berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), bukti transfer pihak ketiga, dan bukti lain yang dipersamakan.

c. Kas di Kas Daerah diakui pengurangannya berdasarkan dokumen SP2D baik UP/GU/TU maupun LS dan surat pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD.

d. Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga tanggal pelaporan.

e. Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau pemindahbukuan dari rekening bank Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

f. Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:

   1) SP2D UP/GU/TU yang diterima dari BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA-SKPD.

   2) SP2D LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.

g. Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:

   1) Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka persediaan yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

   2) Bukti Penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah.

h. Kas di Bendahara BOS diakui berdasarkan bukti transfer dari pemerintah pusat/provinsi atau pihak ketiga. Pengurangan Kas di Bendahara BOS diakui berdasarkan pengesahan SPJ atas penggunaan Dana BOS yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

i. Kas di Bendahara FKTP diakui berdasarkan bukti transfer dari BPJS atau pihak ketiga. Pengurangan kas di Bendahara FKTP diakui berdasarkan SPJ penggunaan dana FKTP yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

j. Kas Lainnya diakui ketika terdapat:

1) Uang jaminan (retensi) yang disetorkan pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan;

2) Saldo pemotongan atau pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara; dan

k. Uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU.

Pengukuran

a. Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau dikeluarkan.

b. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian

Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah;

b. Kas di Bendahara Penerimaan;

c. Kas di Bendahara Pengeluaran;

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah;

e. Kas di Bendahara FKTP;

f. Kas Dana BOS;

g. Kas Lainnya; dan

h. Setara Kas.

Pengungkapan

a. Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya menyajikan hal-hal sebagai berikut:

1) Rincian Kas dan Setara Kas;

2) Penyebab timbulnya Kas Lainnya; dan

3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Saldo kas yang berasal dari dana hibah, bantuan keuangan, dan/atau dana sejenisnya yang penyalurannya tanpa melalui mekanisme APBD Kabupaten Tana Tidung cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Yang dimaksud dengan penyajian seluruh piutang adalah peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:

a. Pungutan Pendapatan Negara/Daerah;

b. Perikatan; dan

c. Kerugian Negara/Daerah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Jenis Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yaitu antara lain:

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan perundangan dan Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya, antara lain:

1) Jasa Umum;

2) Jasa Usaha; dan

3) Perizinan Tertentu.

c. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

d. Piutang Dana Transfer

Piutang PAD lainnya dapat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Piutang Transfer lainnya yang besarnya telah ditetapkan dengan peraturan perundangan.

e. Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan daerah yang terutang oleh pihak ketiga selain piutang pajak, retribusi, PAD Lainnya yang sah, dan piutang transfer dan/atau piutang yang timbul karena perikatan dengan pihak lain atau sebab lainnya.

Pengakuan

a. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan untuk dapat diakui sebagai piutang berdasarkan pungutan, harus dipenuhi kriteria :

1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

b. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan:

   1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar;

   2) Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan penghitungannya sendiri yang didasarkan pada ketentuan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait yang melakukan pengelolaan pajak daerah.

d. Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

e. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% terhadap piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

f. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

g. Piutang Pendapatan lain-lain yang sah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Bukti Dokumen Perikatan, Perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

h. Piutang Dana Transfer - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

i. Piutang Dana Transfer - Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

j. Piutang Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

k. Piutang Dana Transfer - Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

l. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi belum menyalurkan seluruh pembayarannya yang besarannya ditetapkan dengan peraturan perundangan atau dokumen yang dipersamakan, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

m. Dana Dana Transfer - Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu TA. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir TA, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

n. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

o. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu TA ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau

2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

4) Untuk Piutang Lain-lain PAD yang sah berupa Piutang pendapatan denda pajak dicatat dan diukur sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.

b. Pengukuran piutang yang berasal dari peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, adalah sebagai berikut:

1) Piutang Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman disajikan senilai jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan

Piutang berupa barang/jasa harus disajikan dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Piutang Penjualan Kredit

Piutang dari penjualan disajikan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul disajikan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul disajikan berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer pemerintah pusat yang berupa Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d. Pengukuran piutang transfer lainnya disajikan sebesar pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima sesuai ketentuan.

e. Pengukuran Piutang transfer antar daerah disajikan sebesar pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima sesuai ketentuan.

f. Pengukuran Piutang yang berasal dari kelebihan transfer disajikan sebesar jumlah nominal kelebihan transfer dari jumlah yang seharusnya.

g. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

h. Pengukuran Piutang Lainnya berupa Piutang Uang Muka disajikan sebesar selisih positif antara realisasi belanja atau pengeluaran kas yang pada akhir periode pelaporan atas pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan realisasi pengadaan barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.

i. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

j. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*) sesuai ketentuan yang berlaku.

k. Piutang disajikan sebesar nilai nominal piutang yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

l. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) kualitas Piutang Lancar;

2) kualitas Piutang Kurang Lancar;

3) kualitas Piutang Diragukan; dan

4) kualitas Piutang Macet.

m. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan

2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

3) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;

(2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

(3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

(4) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;

(2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan dan/atau

(3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

4) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;

(2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

(3) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;

(2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

(3) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

(3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

5) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar

(1) Umur piutang 0 sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau

(2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

(1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

(2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

(1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau

(2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

(1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

6) Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar

Belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

7) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;

b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

8) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

9) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

10) Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/objek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Umur Piutang

UMUR PIUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITASNYA					
No	**Uraian**	**Lancar**	**Kurang Lancar**	**Diragukan**	**Macet**
1	Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah				
	1) Pajak Daerah	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 5 Thn	> 5 Thn
	2) Piutang Retribusi	< 6 Bln	6 sd 12 Bln	> 12 sd 24 Bln	> 24 Bln
2	Piutang dari Perikatan				
	1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi.	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
3	Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:				
	1) Piutang transfer pemerintah pusat;	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn

UMUR PIUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITASNYA					
No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	2) Piutang transfer pemerintah lainnya; dan	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
4	Piutang Dana Bergulir	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn

11) Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut per masing-masing wajib pajak daerah / wajib retribusi / nasabah / debitur / badan / perorangan / dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

12) Penyisihan piutang tersebut dikecualikan untuk instansi pemerintah yang masih eksis lembaganya dan piutang.

13) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

14) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

15) Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.

16) Pelaporan penyisihan piutang meliputi:

a) Beban penyisihan piutang;

b) Penyisihan piutang tidak tertagih. Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional

Pemberhentian Pengakuan

a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang dan penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang.

c. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya, dimaksudkan menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*).

d. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;

2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;

a) Debitur mengalami musibah *(force majeure)*, meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

b) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau tidak dapat ditemukan lagi; dan

c) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan tidak lengkap/atau tidak dapat ditelusuri, objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

e. Penghapusbukuan Piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Dilakukan mengacu/berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah;

2) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih; dan

3) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berhutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM, kredit KUR dan atau yang dapat disejajarkan yang tidak mampu membayar;

2) Penghapustagihan sebagai sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan, juga menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

3) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;

4) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;

5) Penghapustagihan sesuai hukum perdata, hukum kepailitan, hukum industri hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan

6) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL/PUPN, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL/PUPN. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL/PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL/PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan.

Penghapusan piutang sampai dengan Rp 1 miliar oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan diatas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai diatas Rp 5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

g. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah.

h. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

a. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

b. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;

2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;

4) Penjelasan terhadap piutang yang penyelesaiannya melalui proses hukum; dan

5) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

c. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

e. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka disajikan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan atas suatu beban yang belum menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan menggunakan pendekatan bulanan.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pengukuran

Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga jumlah dan nilai persediaan selalu terupdate.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh, yang dihitung dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian.

Beban Persediaan

a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan selama periode pelaporan *(use of goods)*. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

b. Dalam hal persediaan dicatat dengan metode perpetual, pengukuran beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan harga per unit persediaan dengan menggunakan metode FIFO.

c. Dalam hal terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan pengurus barang dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, rusak atau karena sifatnya.

Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau *using* dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara terpisah dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang (kedaluwarsa) dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara ekstra komptabel dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengakuan

a. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable)*.

b. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh

memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran

a. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

c. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.

c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari:

a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

b. Surat Utang Negara (SUN);

c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable)*.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

e. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

f. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau di debetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi *(carrying value)* tersebut.

Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

b. Jenis-jenis investasi jangka pendek;

c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

f. Perubahan pos investasi.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;

2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;

2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan

a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

   1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

   2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable)*, biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

b. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran

a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi jangka panjang non permanen:

   1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

   2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh *(the degree of influence)* atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

f. Perubahan pos investasi.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan

c. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

a. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

c. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pengakuan

a. Properti investasi diakui sebagai aset jika:

   1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

   2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

b. Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

   Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

c. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

d. Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

e. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pengukuran

a. Pengukuran Saat Awal Perolehan

1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

2) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2) Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.

3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

4) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

5) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

c. Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialih gunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.

2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialih gunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialih gunakan menjadi properti investasi.

3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

4) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialih gunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialih gunakan.

d. Pelepasan Properti Investasi

1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil *netto* dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.

6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian

a. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi merupakan bagian dari akun investasi.

b. Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

Pengungkapan

a. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;

2) Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

3) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

4) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

c) pelepasan;

d) penyusutan;

e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan

f) perubahan lain.

5) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;

c) tanggal efektif penilaian kembali;

d) nilai tercatat sebelum revaluasi;

e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan

f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

6) Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen dengan kualifikasi profesional yang relevan dan berpengalaman.

7) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

b) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

c) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, rusak atau karena sifatnya.

b. Dalam hal terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan pengurus barang dengan hasil stock opname, maka selisih tersebut akan diuji oleh tim pemeriksa barang pemerintah daerah. Selisih tersebut diakui sebagai kerugian daerah setelah ditetapkan tim pemeriksa.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya;

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat

tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

2) Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

3) Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

5) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.2
Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
PERALATAN DAN MESIN		
1	**Alat Besar**	
	- Alat Besar Darat	>= 5.000.000
	- Alat Besar Apung	>= 5.000.000
	- Alat Bantu	>= 5.000.000
2	**Alat Angkutan**	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 1.500.000
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	>= 1.500.000
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	>= 1.500.000
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>= 1.500.000

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 10.000.000
3	**Alat Bengkel Dan Alat Ukur**	
	- Alat Bengkel Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Ukur	>= 1.000.000
4	**Alat Pertanian**	
	- Alat Pengolahan	>= 1.000.000
5	**Alat Kantor Dan Rumah Tangga**	
	- Alat Kantor	>= 1.000.000
	- Alat Rumah Tangga	>= 1.000.000
	- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	>= 1.000.000
6	**Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar**	
	- Alat Studio	>= 1.000.000
	- Alat Komunikasi	>= 1.000.000
	- Peralatan Pemancar	>= 1.000.000
	- Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.000.000
7	**Alat Kedokteran Dan Kesehatan**	
	- Alat Kedokteran	>= 1.000.000
	- Alat Kesehatan Umum	>= 1.000.000
8	**Alat Laboratorium**	
	- Unit Alat Laboratorium	>= 1.000.000
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
	- *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 1.000.000
	- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	>= 1.000.000
9	**Alat Persenjataan**	
	- Senjata Api	>= 1.000.000
	- Persenjataan Non Senjata Api	>= 1.000.000
	- Senjata Sinar	>= 1.000.000
	- Alat Khusus Kepolisian	>= 1.000.000
10	**Komputer**	
	- Komputer Unit	>= 1.000.000
	- Peralatan Komputer	>= 1.000.000

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
11	**Alat Eksplorasi**	
	- Alat Eksplorasi Topografi	>= 1.000.000
	- Alat Eksplorasi Geofisika	>= 1.000.000
12	**Alat Pengeboran**	
	- Alat Pengeboran Mesin	>= 1.000.000
	- Alat Pengeboran Non Mesin	>= 1.000.000
13	**Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian**	
	- Sumur	>= 1.000.000
	- Produksi	>= 1.000.000
	- Pengolahan Dan Pemurnian	>= 1.000.000
14	**Alat Bantu Eksplorasi**	
	- Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
	- Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
15	**Alat Keselamatan Kerja**	
	- Alat Deteksi	>= 1.000.000
	- Alat Pelindung	>= 1.000.000
	- Alat Sar	>= 1.000.000
	- Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
16	**Alat Peraga**	
	- Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	>= 1.000.000
17	**Peralatan Proses/Produksi**	
	- Unit Peralatan Proses/Produksi	>= 1.000.000
18	**Rambu - Rambu**	
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
19	**Peralatan Olahraga**	
	- Peralatan Olahraga	>= 1.000.000
GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	**Bangunan Gedung**	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000
2	**Monumen**	
	- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 10.000.000
3	**Bangunan Menara**	
	- Bangunan Menara Perambuan	>= 10.000.000
4	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
	- Tugu/Tanda Batas	>= 10.000.000

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
Aset Tetap Lainnya		
1	**Bahan Perpustakaan**	
	- Bahan Perpustakaan Tercetak	>= 100.000
	- Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	>= 100.000
	- Kartografi, Naskah Dan Lukisan	>= 100.000
	- Musik	>= 100.000
	- Karya Grafika (*Graphic Material*)	>= 100.000
	- *Three Dimensional Artefacts And Realia*	>= 100.000
	- Tarscalt	>= 100.000
2	**Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	
	- Barang Bercorak Kesenian	>= 200.000
	- Alat Bercorak Kebudayaan	>= 200.000
	- Tanda Penghargaan	>= 200.000
3	**Hewan**	
	- Hewan Piaraan	>= 1.000.000
	- Ternak	>= 1.000.000
	- Hewan Lainnya	>= 1.000.000
4	**Biota Perairan**	
	- Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	>= 1.000.000
	- Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Echinodermata (Teripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya	>= 1.000.000
	- Mamalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	>= 1.000.000
	- Biota Perairan Lainnya	>= 1.000.000
5	**Tanaman**	
	- Tanaman	>= 250.000
6	**Barang Koleksi Non Budaya**	
	- Barang Koleksi Non Budaya	>= 200.000

6) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

7) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk persatuan jenis asset atau harga per unit atas jenis asset ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Batasan Kapitalisasi untuk
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
PERALATAN DAN MESIN		
Alat Besar		Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Besar Apung	>= 5.000.000	
Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan		Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 1.000.000	
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-sda-	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 5.000.000	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur		
Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bengkel Tak Bermesin	-sda-	
Alat Ukur	-sda-	
Alat Pertanian		
Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga		
Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Rumah Tangga	-sda-	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-sda-	
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		
Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Komunikasi	-sda-	
Peralatan Pemancar	-sda-	-
Peralatan Komunikasi Navigasi	-sda-	
Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kesehatan Umum	-sda-	
Alat Laboratorium		
Unit Alat Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
	-sda-	
Alat Peraga Praktek Sekolah	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-sda-	
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-sda-	
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	-sda-	
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	-sda-	
Alat Persenjataan		
Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Persenjataan Non Senjata Api	-sda-	
Senjata Sinar	-sda-	
Alat Khusus Kepolisian	-sda-	
Komputer		
Komputer Unit	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Komputer	-sda-	
Alat Eksplorasi		
Alat Eksplorasi Topografi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Eksplorasi Geofisika	-sda-	
Alat Pengeboran		
Alat Pengeboran Mesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pengeboran Non Mesin	-sda-	
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
Sumur	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Produksi	-sda-	
Pengolahan Dan Pemurnian	-sda-	
Alat Bantu Eksplorasi		
Alat Bantu Eksplorasi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bantu Produksi	-sda-	
Alat Keselamatan Kerja		
Alat Deteksi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pelindung	-sda-	
Alat Sar	-sda-	
Alat Kerja Penerbangan	-sda-	
Alat Peraga		
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Proses/Produksi		
Unit Peralatan Proses/Produksi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Rambu - Rambu		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-sda-	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-sda-	
Peralatan Olahraga		
Peralatan Olahraga	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
GEDUNG DAN BANGUNAN		
Bangunan Gedung		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000	-sda-
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000	
Monumen		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 5.000.000	
Bangunan Menara		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Bangunan Menara Perambuan	>= 2.500.000	
Tugu Titik Kontrol/Pasti		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang / berat / Menambah Umur Ekonomis
Tugu/Tanda Batas	>= 5.000.000	
ASET TETAP LAINNYA		
Bahan Perpustakaan		
Bahan Perpustakaan Tercetak	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	-sda-	
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-sda-	
Musik	-sda-	
Karya Grafika (Graphic Material)	-sda-	
Three Dimensional Artefacs And Realita	-sda-	
Tarscalt	-sda-	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
Barang Bercorak Kesenian	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bercorak Kebudayaan	-sda-	
Tanda Penghargaan	-sda-	
Hewan		
Hewan Piaraan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Ternak	-sda-	
Hewan Lainnya	-sda-	
Biota Perairan		
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	-sda-	
Echinodermata (Teripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	-sda-	
Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya	-sda-	
Mamalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	-sda-	
Biota Perairan Lainnya	-sda-	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Tanaman		
Tanaman	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Barang Koleksi Non Budaya		
Barang Koleksi Non Budaya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

8) Untuk jenis aset gedung/bangunan dan jalan/jembatan/bangunan air/irigasi/instalasi dan jaringan memperhatikan pada paragraf 47 sampai dengan paragraf 51 tentang Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*), batasan minimal penganggaran dalam belanja modal sesuai dalam tabel tersebut di atas.

9) Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Pengukuran

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

d. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau mengurangi nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Penambahan Masa Manfaat

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Alat Besar Darat			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Besar Apung			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Alat Bantu			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 45 % s.d 100 %		4	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Alat Angkutan Darat Bermotor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan Sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Alat Angkutan Apung Bermotor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Alat Angkutan Bermotor Udara			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Alat Bengkel Bermesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Bengkel Tak Bermesin			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja
					Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Alat Ukur			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Pengolahan			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 20 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 21 % s.d 40 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 51 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Alat Kantor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Rumah Tangga			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Studio			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan berat	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat komunikasi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Peralatan Pemancar			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Peralatan Komunikasi Navigasi			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Kedokteran			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Kesehatan Umum			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Unit Alat Laboratorium			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Peraga/Praktek Sekolah			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Destructive Testing Laboratory			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Senjata Api			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Persenjataan Non Senjata Api			3		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Senjata Sinar			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Khusus Kepolisian			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Komputer Unit			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Peralatan Komputer			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Alat Eksplorasi Topografi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Eksplorasi Geofisika			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Pengeboran Mesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Pengeboran Non Mesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Sumur			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Produksi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Pengolahan dan Pemurnian			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Bantu Eksplorasi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Bantu Produksi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Deteksi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Pelindung			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Sar			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Alat Kerja Penerbang			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Unit Peralatan Proses / Produksi			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Darat			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Udara			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Laut			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Peralatan Olahraga			3		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Bangunan Gedung Tempat Kerja			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Tinggal			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Menara Perambuan			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		5	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Tugu / Tanda Batas			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Jalan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 60 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 60 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Jembatan			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Bangunan Air Irigasi			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 5 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 5 % s.d 10 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 10 % s.d 20 %		10	Belanja Modal
Bangunan Pengairan Pasang Surut			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder			25		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Bangunan Air Bersih/Baku			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Air Kotor			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
Instalasi Air Bersih/ Air Baku			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 65 %		10	Belanja Modal
Instalasi Air Kotor			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Sampah			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Pembangkit Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Gardu Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Pertahanan			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Gas			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	**Jenis**	**Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran**	**Masa Manfaat**	**Penambahan Masa manfaat**	**Keterangan**
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Pengaman			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Instalasi Lain			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		0	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Jaringan Air Minum			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Jaringan Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Jaringan Telepon			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Jaringan Gas			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	-	-	-	-	-
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	-	-	-	-	-
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	-	-	-	-	-

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

1) Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
2) Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
3) Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan, tanaman, dan buku perpustakaan.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tana Tidung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos dan Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.

b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.

c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

b. Pengeluaran - pengeluaran yang memperpanjang umur aset;

c. Pengeluaran - pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;

d. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

4.3.16 Kebijakan Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi: *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta

(*copyright*), hak paten, *goodwill* dan hak lainnya, hasil riset dan pengembangan, dan aset tak berwujud lainnya. Aset tidak berwujud berupa *software*/aplikasi yang dibangun sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun dan amortisasi mulai dihitung saat aset tidak berwujud tersebut siap digunakan.

Pengakuan

a. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

   1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut mengalir kepada / dinikmati oleh entitas; dan

   2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

   3) Telah memenuhi dari Aset Tidak berwujud.

b. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur ekonomis dari aset tidak berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi dimasa datang sebagai akibat dari penggunaan aset tidak berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan menekankan pada bukti- bukti eksternal.

c. Kendala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas aset tidak berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:

   1) Mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasikan tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan

   2) Menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan secara tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan:

   3) yang dikembangkan secara tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan

d. Untuk menentukan apakah perolehan internal aset tidak berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan aset tidak berwujud dikelompokan dalam 2 tahap, yaitu:

   1) Tahap penelitian atau riset

   2) Tahap pengembangan

Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas / kegiatan internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, Pemerintah Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

e. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

f. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah daerah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa aset tidak berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa dating. Oleh karena itu, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

g. Aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini:

   1) Kelayakan teknis atas penyelesaian aset tidak berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;

   2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;

   3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;

   4) Manfaat ekonomi dan atau social dimasa datang;

   5) Ketersediaannya sumber teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan aset tidak berwujud tersebut;

   6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran pengeluaran yang diatribusikan ke aset tidak berwujud selama masa pengembangan.

h. Apabila telah memenuhi kriteria diatas dan ditetapkan menjadi aset tidak berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

i. Suatu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai aset tidak berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial serta jasa potensial di masa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau social dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

1) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;

2) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;

3) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;

4) Angka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

j. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

1) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototype atau model;

2) Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;

3) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatife pilihan, untuk bahan, peralatan, produk proses, system atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

k. Pada praktek terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

l. Sesuai dengan konsep biaya dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari biaya yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya oleh lembaga lain.

m. Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui aset tidak berwujud tersebut, karena sesuai dengan karakteristik pengakuan aset tidak berwujud yang berasal dari penelitian dan pengembangan, pengakuan terhadap aset tidak berwujud adalah harus sesuai dengan kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat dianggap mempunyai manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial di masa yang akan datang. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal aset tidak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai ini

Pengukuran

a. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tidak berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

b. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian biasanya dapat diukur secara memadai, khususnya bila berkenaan dengan kas atau aset moneter lainnya. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri atas:

   1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

   2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

c. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

   1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat difungsikan secara baik.

d. Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur aset tidak berwujud adalah:

   1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);

   2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);

   3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Amortisasi

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

b. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas *neto* bagi Pemerintah Daerah.

c. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

d. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukan kedalam jumlah tercatatnya.

e. Amortisasi aset tidak berwujud hanya dapat diterapkan terhadap aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk aset tidak berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode sebagai berikut:

f. Amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau pemakaian pada nilai buku aset tidak berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan amortisasi aset tidak terwujud adalah setiap bulan.

g. Biaya perolehan aset tidak berwujud merupakan harga perolehan atau nilai wajar aset tidak berwujud.

h. Masa manfaat merupakan estimasi umur pemakaian aset tidak berwujud yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset tidak berwujud tidak sama tergantung pada beberapa faktor antara lain pembatasan oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

i. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau secara hukum mana yang lebih pendek.

j. Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan.

k. Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

   1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat; atau

   2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:

      a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut

      b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

Jumlah amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas aset tidak berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonomi.

l. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

m. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.

Penghentian Dan Pelepasan

a. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Alasan penghentian penggunaan aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.

b. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Akun aset tidak berwujud yang dihentikan penggunaanya harus ditutup.

c. Apabila suatu aset tidak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tidak berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses pengelolaan barang milik daerah yang disebut disebut penghapusan.

d. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai surplus atau defisit penjualan aset non lancar yang dilaporkan pada Laporan Operasional, dan penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Penyajian Dan Pengungkapan

a. Aset tidak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya.

b. Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud lainnya:

   1) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;

   2) Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud terbatas masa manfaatnya;

   3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

   4) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan

   5) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan:

      a) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam Pemerintah Daerah;

      b) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;

      c) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;

      d) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

c. Disamping informasi-informasi di atas, entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:

   1) Periode amortisasi;

   2) Metode amortisasi; atau

   3) Nilai sisa.

d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

   1) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;

   2) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;

   3) Keberadaan aset tidak berwujud yang dimiliki bersama.

e. Laporan keuangan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.

f. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu mengungkapkan gambaran mengenai setiap aset tidak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan.

4.3.17 Kebijakan Akuntansi Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan Aset Lain lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

b. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. c. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

c. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan

Penyajian dan Pengungkapan

a. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

b. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.3.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari: Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan

a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

b. Kewajiban dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);

2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);

4) Kejadian yang diakui pemerintah *(government-acknowledged events*).

c. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

d. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.

Pengukuran

a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, PT. Askes, dan pihak berkepentingan lainnya) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek.

b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya ber akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para 181 pihak..

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) .

5) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya;

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai 182 kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

e. Pendapatan Diterima Dimuka, dan

1) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

2) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

3) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

f. Utang belanja.

1) Definisi Utang Belanja,

Utang Belanja adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:

a) adanya Belanja yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

(1) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(2) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Belanja

Utang Belanja diakui pada saat:

a) Belanja secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau 183 pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Belanja

Utang Belanja disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri;

1) Definisi Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;

b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan nonbank;

c) Utang Dalam Negeri-obligasi;

d) Utang Pemerintah Pusat;

e) Utang Pemerintah Provinsi; dan

f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

2) Pengakuan Utang Luar Negeri Utang luar negeri diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

a) Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pospos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi / pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya

Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 dan penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024. Adapun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dengan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, pendapatan terealisasi senilai Rp1.078.782.452.324,05 dan Belanja Daerah terealisasi senilai Rp1.166.511.172.955,70 sehingga terdapat Defisit senilai Rp(87.728.720.631,65). Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya senilai Rp436.022.138.025,90 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp348.293.417.394,25. Gambaran keseluruhan tentang anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dapat diuraikan dalam Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.078.782.452.324,05	**1.483.899.695.654,45**

Pendapatan merupakan semua penerimaan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.027.212.457.453,00 dan terealisasi sampai dengan akhir TA 2025 Rp1.078.782.452.324,05 atau 105,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi

Pendapatan TA 2024 senilai Rp1.483.899.695.654,45 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan yaitu senilai Rp405.117.243.330,40 atau 27,30%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	30.948.274.122,00	54.358.134.393,05	175,64	49.612.809.888,45
2	Pendapatan Transfer	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	102,83	1.415.256.686.466,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	19.030.199.300,00
Jumlah		**1.027.212.457.453,00**	**1.078.782.452.324,05**	**105,02**	**1,483,899,695,654.45**

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Pendapatan Daerah oleh realisasi senilai Rp51.569.994.871,05 atau 5,02% yang disebabkan oleh peningkatan realisasi pendapatan, terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang melebihi target yang telah ditetapkan.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**54.358.134.393,05**	**49.612.809.888,45**

Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp30.948.274.122,00 dan terealisasi senilai Rp54.358.134.393,05 atau 175,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 senilai Rp49.612.809.888,45, Pendapatan Asli Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp4.745.324.504,60 atau 9,56%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1	**Pajak Daerah**	**10.240.378.261,00**	**7.812.755.443,00**

Menurut Ketentuan Umum pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi senilai-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp7.812.710.096,00 dan terealisasi senilai Rp10.240.378.261,00 atau 131,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp7.812.755.443,00, Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.427.622.818,00 atau 31,07%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	53.774.501,00	53,77	68.905.819,00
2	Pajak Restoran	1.148.246.343,00	3.895.327.555,00	339,24	4.266.314.470,00
3	Pajak Hiburan	5.000.000,00	3.567.800,00	71,36	1.500.000,00
4	Pajak Reklame	15.000.000,00	18.950.430,00	126,34	28.693.592,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	2.310.737.027,00
6	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	7.747.709,00	77,48	6.803.950,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	5.000.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	225.000.000,00	576.808.547,00	256,36	576.718.743,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	294.000.000,00	381.340.986,00	129,71	333.340.232,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150.000.000,00	214.788.550,00	143,19	214.741.610,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.000.000.000,00	2.286.782.883,00	114,34	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.918.174.396,00	1.263.915.500,00	65,89	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.937.289.357,00	1.535.373.800,00	79,25	0,00
Jumlah		**7.812.710.096,00**	**10.240.378.261,00**	**131,07**	**7.812.755.443,00**

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Pendapatan Pajak Daerah oleh realisasi senilai Rp2.427.668.165,00 atau 31,07% yang disebabkan adanya peningkatan kinerja pemungutan pendapatan daerah yang efektif, optimalisasi sumber-sumber pendapatan, serta adanya faktor pendukung lain seperti peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) serta Pajak Restoran atau Pajak Makan Minum sebagai penyumbang kenaikan terbesar dari semua jenis pajak tersebut.

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

31 Desember 2025	31 Desember 2024
53.774.501,00	**68.905.819,00**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimili, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi senilai 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Hotel TA 2025 dianggarkan senilai Rp100.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp53.774.501,00 atau 53,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel TA 2024 senilai Rp68.905.819,00, Pajak Hotel TA 2025 mengalami

penurunan senilai Rp15.131.318,00 atau 21,96%. Penurunan nilai tersebut terjadi karena berkurangnya jumlah tamu hotel sehingga berpengaruh pada penerimaan Pajak Hotel.

5.1.1.1.1.2	**Pajak Restoran**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		3.895.327.555,00	**4.266.314.470,00**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi senilai 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran dalam hal ini termasuk Pajak Katering.

Pajak Restoran TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.148.246.343,00 dan terealisasi senilai Rp3.895.327.555,00 atau 339,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran TA 2024 senilai Rp4.266.314.470,00, Pajak Restoran TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp370.986.915,00 atau 8,70%, penurunan tersebut terjadi karena penerapan efisiensi anggaran berpengaruh pada Belanja Makan Minum di SKPD.

5.1.1.1.1.3	**Pajak Hiburan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		3.567.800,00	**1.500.000,00**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pajak Hiburan TA 2025 dianggarkan senilai Rp5.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.567.800,00 atau 71,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan TA 2024 senilai Rp1.500.000,00, Pajak Hiburan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.067.800,00 atau 137,85%. Kenaikan penerimaan pajak hiburan karena didorong oleh tingkat kepatuhan wajib pajak atas pemahaman regulasi pajak daerah, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari intensitas pengawasan yang senantiasa dilakukan oleh petugas fiskal dilapangan.

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	18.950.430,00	**28.693.592,00**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame meliputi:

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat, stiker dan Reklame selebaran; dan

d. Reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi senilai 25% dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Reklame TA 2025 dianggarkan senilai Rp15.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp18.950.430,00 atau 126,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame TA 2024 senilai Rp28.693.592,00, Pajak Reklame TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.743.162,00 atau 33,96%. Penurunan realisasi pajak reklame disebabkan oleh berkurangnya Wajib Pajak yang memasang reklame. Menyikapi tren penurunan tersebut, pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada tahun yang sama melakukan langkah intensif berupa penjaringan Wajib Pajak baru melalui pendataan ulang.

5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	**2.310.737.027,00**

Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan sebagai berikut.

a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan

b. Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pajak Penerangan Jalan TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2024 senilai Rp2.310.737.027,00, Pajak Penerangan Jalan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.310.737.027,00 atau 100,00%. Penurunan penerimaan Pajak Penerangan Jalan karena adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi PBJT atas Tenaga listrik sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sehingga untuk realisasi TA 2025 disajikan pada kode akun PBJT dari sumber lain dan yang dihasilkan sendiri.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.6	**Pajak Air Tanah**	**7.747.709,00**	**6.803.950,00**

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah. Dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2033 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah, subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dasar pengenaan adalah nilai perolehan air tanah. Faktor perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai berikut.

a. Jenis sumber air;

b. Lokasi sumber air;

c. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air;

d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan; dan

e. Kualitas air.

Pajak Air Tanah TA 2025 dianggarkan senilai Rp10.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.747.709,00 atau 77,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 senilai Rp6.803.950,00, Pajak Air Tanah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp943.759,00 atau 13,87%. Realisasi mengalami kenaikan karena dilakukannya penguatan pengawasan pemanfaatan air tanah, khususnya pada sektor komersil serta upaya yang

dilakukan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada Wajib Pajak serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.7	**Pajak Sarang Burung Walet**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**

Usaha mendirikan bangunan rumah sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung kian bertambah. Bidang Pendapatan memungut Pajak Sarang Burung Walet sesuai ketetapannya yaitu senilai 2% dari harga jual. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Adapun dasar pengenaan pajak besaran tarif dan cara perhitungan tarif adalah dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet, nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet dan tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan senilai 2%.

Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 dianggarkan senilai Rp10.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.000.000,00 atau 20,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 senilai Rp5.000.000,00, Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp3.000.000,00 atau 60,00%. Penurunan realisasi terjadi karena terjadinya berkurangnya produksi sarang burung walet dan kualitas sarang burung walet yang dipengaruhi oleh cuaca serta terjadi fluktuasi harga pasar yang berdampak pada nilai transaksi. Selain tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan masih belum optimal dan pengawasan terhadap Objek Pajak yang tersebar menjadi kendala dalam pemungutan.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.8	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**576.808.547,00**	**576.718.743,00**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, kerikil, dan lain-lain. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 dianggarkan senilai Rp225.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp576.808.547,00 atau 256,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 senilai Rp576.718.743,00, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp89.804,00 atau 0,01%. Berdasarkan realisasi tahun 2025, penerimaan pajak MBLB mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh adanya optmalisasi pendataan objek pajak terutama pada pelaku usaha pertambangan

serta penguatan pengawasan terhadap pelaporan pada pelaku usaha dan pada pihak ketiga sebagai rekanan pemerintah daerah serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.9	**Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**	**381.340.986,00**	**333.340.232,00**

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek Pajak yang:

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; dan

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis.

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi senilai 0,3% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PBB-P2 TA 2025 dianggarkan senilai Rp294.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp381.340.986,00 atau 129,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 TA 2024 senilai Rp333.340.232,00, PBB-P2 TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp48.000.754,00 atau 14,40%. Kenaikan pajak tersebut dikarenakan adanya program kegiatan yang mendukung pembayaran PBB-P2 hal ini mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain optimalisasi sistem administrasi dan dukungan kepatuhan wajib pajak turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 tersebut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.10	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**214.788.550,00**	**214.741.610,00**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2025 dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp214.788.550,00 atau 143,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB TA 2024 senilai Rp214.741.610,00, BPHTB TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp46.940,00 atau 0,02%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, serta optimalisasi verifikasi dan validasi nilai transaksi serta peningkatan pengawasan terhadap pajak BPHTB tersebut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.11	**PBJT-Tenaga Listrik**	**2.286.782.883,00**	**0,00**

PBJT-Tenaga Listrik terdiri dari PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain dan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri dengan rincian sebagai berikut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.11.1	**PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain**	**2.202.213.206,00**	**0,00**

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain adalah pajak daerah yang dikenakan pada konsumen akhir atas konsumsi Listrik, menggantikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebelumnya, diatur dalam UU HKPD, dan dipungut oleh daerah untuk rumah tangga, industri, pertambangan, serta penggunaan Listrik dari PLN atau sumber lain, dengan tarif bervariasi tergantung jenis penggunaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah masing- masing daerah, dengan pengecualian untuk instansi pemerintah, rumah ibadah, panti sosial dan Listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri tertentu. PBJT untuk tenaga Listrik dari sumber lain adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi listrik oleh pengguna akhir, dengan tarif berbeda tergantung jenis konsumen: 3% untuk industri, pertambangan minyak & gas (migas), 2,4% untuk konsumen non-industri/migas (rumah tangga, dll.), dan 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri (genset), diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan PP No. 4 Tahun 2023, yang menggantikan PPJ.

PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.700.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.202.213.206,00 atau 129,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain TA 2024 senilai Rp0,00, PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.202.213.206,00 atau 100,00%. Kenaikan penerimaan PBJT atas Tenaga listrik mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD sehingga untuk realisasi TA 2025 disajikan pada kode akun PBJT sementara TA 2024 masih menggunakan kode akun PPJ.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.12	**PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri**	**84.569.677,00**	**0,00**

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri adalah pajak atas penggunaan Listrik oleh pengguna akhir (seperti genset) dengan tarif paling tinggi 1,5%, ditetapkan berdasarkan kapasitas, tingkat penggunaan, jangka waktu pemakaian, dan harga satuan Listrik yang berlaku didaerah. Pungutan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang mengintegrasikan pajak dari beberapa jenis konsumsi Listrik.

PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri TA 2025 dianggarkan senilai Rp300.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp84.569.677,00 atau 28,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri TA 2024 senilai Rp0,00, PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp84.569.677,00 atau 100,00%. Kenaikan Pajak tersebut karena penerimaan PBJT atas Tenaga listrik mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD sehingga untuk realisasi TA 2025 disajikan pada kode akun PBJT sementara TA 2024 masih menggunakan kode akun PPJ.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.13	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**1.263.915.500,00**	**0,00**

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen PKB TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.918.174.396,00 dan terealisasi senilai Rp1.263.915.500,00 atau 65,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Opsen PKB TA 2024 senilai Rp0,00, Opsen PKB TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.263.915.500,00 atau 100,00%. Realisasi mengalami kenaikan dikarenakan opsen PKB baru diberlakukan di tahun 2025 dan adanya koordinasi serta kerjasama dalam sosialisasi kepada masyarakat bersama pihak terkait, optimalisasi penagihan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.1.14	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**1.535.373.800,00**	**0,00**

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Opsen BBNKB TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.937.289.357,00 dan terealisasi senilai Rp1.535.373.800,00 atau 79,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi Opsen BBNKB TA 2024 senilai Rp0,00, Opsen BBNKB TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.535.373.800,00 atau 100,00%. Realisasi mengalami kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi balik nama kendaraan bermotor di tingkat provinsi serta meningkatnya

kepatuhan wajib pajak dalam melakukan transaksi BBNKB tersebut. Adapun hal tersebut juga dikarenakan penerimaan BBNKB ini juga baru di berlakukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
9.851.845.257,00	**706.311.634,00**

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 ditargetkan senilai Rp1.778.963.865,00 dan terealisasi senilai Rp9.851.845.257,00 atau 553,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 senilai Rp706.311.634,00 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp9.145.533.623,00 atau 1.294,83%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.323.963.865,00	8.960.041.275,00	676,76	83.096.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	45.000.000,00	62.778.000,00	139,51	31.788.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	36.600.000,00	75.483.000,00	206.24	0,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.400.000,00	11.594.750,00	138,03	3.850.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Ruangan)	14.000.000,00	12.287.200,00	87,77	62.669.940,00
6	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	48.603.000,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	36.000.000,00	157.825.000,00	438,40	54.000.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	411.984.000,00	205,99	320.668.000,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	91.280.713,00	152,13	75.869.500,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.500.000,00	43.844.000,00	120,12	0,00
11	Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi persetujuan Bangunan Gedung)	18.500.000,00	24.727.319,00	133,66	25.767.194,00
Jumlah		**1.778.963.865,00**	**9.851.845.257,00**	**553,80**	**706.311.634,00**

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah oleh realisasi senilai Rp8.072.881.392,00 atau 453,80% yang disebabkan Pendapatan BLUD yang sebelumnya tercatat pada Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah serta penerimaan retribusi daerah yang pencapaiannya didorong oleh optimalisasi pemungutan di

lapangan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, serta tingginya tingkat kepatuhan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	8.960.041.275,00	83.096.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.323.963.865,00 dan terealisasi senilai Rp8.960.041.275,00 atau 676,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 senilai Rp83.096.000,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.876.945.275,00 atau 10.682,76%. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan terjadi karena seluruh puskesmas se-Kabupaten Tana Tidung TA 2025 sudah menerapkan pola keuangan BLUD, sehingga seluruh penerimaan dikelola langsung oleh Puskesmas sehingga mengakibatkan retribusi pelayanan kesehatan mengalami peningkatan. Adapun rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	328.963.865,00	185.274.371,00	56,32	83.096.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	995.000.000,00	8.774.766.904,00	881,89	0,00
Jumlah		**1.323.963.865,00**	**8.960.041.275,00**	**676,76**	**83.096.000,00**

5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	185.274.371,00	83.096.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Seluruh Puskesmas se Kabupaten Tana Tidung TA 2025 menerapkan pola keuangan BLUD. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 dianggarkan senilai Rp328.963.865,00 dan terealisasi senilai Rp185.274.371,00 atau 56,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2024 senilai Rp83.096.000,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp102.178.371,00 atau 122,96%. Kenaikan realisasi tersebut karena Pendapatan BLUD Puskesmas yang sebelumnya dicatat diakun Lain-lain PAD yang Sah kemudian dicatat di Pendapatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Adapun rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Puskesmas Tideng Pale	30.000.000,00	57.244.911,00	190,82	33.315.000,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	40.000.000,00	39.306.360,00	98,27	13.185.000,00
3	Puskesmas Tana Lia	30.000.000,00	12.560.900,00	41,87	3.976.000,00
4	Puskesmas Kujau	45.000.000,00	60.731.500,00	134,96	26.984.500,00
5	Puskesmas Muruk Rian	15.000.000,00	15.430.700,00	102,87	6.616.500,00
6	BPKAD	168.963.865,00	0,00	0,00	(981.000,00)
Jumlah		**328.963.865,00**	**185.274.371,00**	**56,32**	**83.096.000,00**

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada BPKAD tidak terealisasi. Hal ini terjadi karena penganggaran tersebut sebenarnya ditujukan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Tanjung Kramat yaitu salah satu FKTP yang belum berstatus BLUD. Namun, terjadi kesalahan penganggaran yang seharusnya dialokasikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.2.1.2	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**	**8.774.766.904,00**	**0,00**

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola keuangan BLUD yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui RSUD Akhmad Berahim dan Puskesmas yang diantaranya diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim TA 2025 dianggarkan senilai Rp995.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp8.774.766.904,00 atau 881,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim TA 2024 senilai

Rp0,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.774.766.904,00 atau 100,00%. Dikarenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim TA 2024 mengalami salah penganggaran sehingga realisasi diungkapkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dan pada tahun 2025 Pendapatan BLUD di Akun Lain-lain PAD yang Sah dicatat di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

5.1.1.1.2.2	**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		62.778.000,00	**31.788.000,00**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 dianggarkan senilai Rp45.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp62.788.000,00 atau 139,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 senilai Rp31.788.000,00, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp30.990.000,00 atau 97,49%.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami kenaikan karena adanya sinergi antara peningkatan kesadaran wajib retribusi, penagihan yang lebih efektif, dukungan regulasi dan sistem administrasi yang memadai, dan peningkatan tarif retribusi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

5.1.1.1.2.3	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		75.483.000,00	**0,00**

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas setiap pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 huruf d pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat tradisional atau sederhana, berupa peralatan, los kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM. Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dianggarkan senilai Rp36.600.000,00 dan terealisasi senilai Rp75.483.000,00 atau 206,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 senilai Rp0,00, Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp75.483.000,00 atau 100,00%. Retribusi Pelataran mengalami kenaikan karena adanya penambahan objek retribusi, rombong yang berada di RTH Baya Inggulung baru dikenakan retribusi di

tahun 2025. Adapun rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelataran	12.200.000,00	1.425.000,00	11,68	0,00
2	Retribusi Los	12.200.000,00	27.982.000,00	229,36	0,00
3	Retribusi Kios	12.200.000,00	46.076.000,00	377,67	0,00
Jumlah		**36.600.000,00**	**75.483.000,00**	**206,24**	**0,00**

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Retribusi Pelayanan Pasar oleh realisasi senilai Rp38.883.000,00 atau 106,24% yang disebabkan adanya upaya intensifikasi dan/atau ekstensifikasi pemungutan retribusi pelayanan pasar yang didukung oleh mulai optimalnya operasional pasar serta perbaikan sistem penarikan retribusi. Selain itu peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di lingkungan pasar turut memberikan kontribusi terhadap pelampauan target tersebut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.2.4	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**	**11.594.750,00**	**3.850.000,00**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah biaya atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengguna layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan/atau penyedotan kakus atau WC. Layanan ini biasanya diberikan oleh instansi pemerintah atau badan usaha yang ditunjuk untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, dengan tujuan untuk mengelola limbah domestik agar tidak menimbulkan masalah sanitasi yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2025 dianggarkan senilai Rp8.400.000,00 dan terealisasi senilai Rp11.594.750,00 atau 138,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2024 senilai Rp3.850.000,00, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp7.744.750,00 atau 201,16%. Kenaikan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus karena telah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.2.5	**Retribusi Pemakaian Ruangan**	**12.287.200,00**	**62.669.940,00**

Retribusi Pemakaian Ruangan yang merupakan bagian dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp14.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp12.287.200,00 atau 87,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan TA 2024 senilai

Rp62.669.940,00, Retribusi Pemakaian Ruangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp50.382.740,00 atau 80,39%. Penurunan ini karena rendahnya kepatuhan atau kesadaran dari pemilik bangunan tempat tinggal selaku Wajib Pajak, serta lemahnya jalur koordinasi antara SKPD pemungut dengan Wajib Pajak di lapangan.

5.1.1.1.2.6 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	48.603.000,00

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di pasar berbagai jenis barang yang dijual secara grosir/eceran. Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2024 senilai Rp48.603.000,00, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp48.603.000,00 atau 100,00%. karena adanya pemindahan akun dari Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan menjadi Retribusi Pelayanan Pasar yang terdiri dari Retribusi Pelataran, Retribusi Los dan Retribusi Kios.

5.1.1.1.2.7 Retribusi Tempat Khusus Parkir	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	157.825.000,00	54.000.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan. Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2025 dianggarkan senilai Rp36.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp157.825.000,00 atau 438,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2024 senilai Rp54.000.000,00, Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp103.825.000,00 atau 192,27%. Kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya volume pengunjung pasar. Hal ini terjadi akibat meningkatnya daya beli masyarakat yang mendorong ramainya aktivitas transaksi jual beli dipasar.

5.1.1.1.2.8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	411.984.000,00	320.668.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini

dipungut oleh Dinas Perhubungan. Retribusi Jasa Kepelabuhan TA 2025 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp411.984.000,00 atau 205,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan TA 2024 senilai Rp320.668.000,00, Retribusi Jasa Kepelabuhan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp91.316.000,00 atau 28,48%. karena meningkatnya intensitas dan aktivitas kapal yang bersandar di wilayah pelabuhan Tana Tidung sepanjang tahun 2025.

5.1.1.1.2.9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		91.280.713,00	75.869,500,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 dianggarkan senilai Rp60.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp91.280.713,00 atau 152,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 senilai Rp75.869.500,00, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp15.411.213,00 atau 20,31%. Kenaikan dikarenakan bertambahnya pengunjung tempat wisata dan juga bertambahnya masyarakat yang memanfaatkan tempat/fasilitas olahraga.

5.1.1.1.2.10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		43.844.000,00	0,00

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan pungutan atas penggunaan kekayaan milik pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan sebagai pembayaran pemanfaatan Aset Daerah. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp36.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp43.844.000,00 atau 120,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2024 senilai Rp0,00, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp43.844.000,00 atau 100,00%. Kenaikan dikarenakan sewa bangunan rumah ATM di Pasar Imbayud Taka dan hasil reviu inspektorat atas Pemanfaatan Aset Pemda pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Bawang CV. Baskara Multi Konstruksi.

5.1.1.1.2.11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		24.727.319,00	25.767,194,00

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan Objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 937/1030/SJ,SE-1/MK.07/2022, 06/SE/M/2022, dan 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang didalamnya mengatur terkait Retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Dalam hal ini Kabupaten Tana Tidung sudah mengesahkan Peraturan Daerah terkait PBG (Perda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 dianggarkan senilai Rp18.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp24.727.319,00 atau 133,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 senilai Rp25.767.194,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.039.875,00 atau 4,04%. Mulai 2025, pemeriksaan teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (pengganti IMB) resmi beralih dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP). Perubahan ini menyebabkan penurunan jumlah pemohon sementara karena adaptasi prosedur baru dan pengetatan standar teknis bangunan yang lebih komprehensif. Penurunan aktivitas pembangunan fisik atau kelesuan di sektor properti/kontruksi secara langsung mengurangi jumlah permohonan izin baru dan masih terdapat kecenderungan di masyarakat untuk melakukan pembangunan fisik terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan resminya, dan adanya peralihan sistem administrasi dari Dinas PMTSP ke Dinas PUPRPKP.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.741.723.567,47**	**4.930.224.687,96**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen diperoleh dari BPD Kaltimtara atau Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.099.406.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.741.723.567,47 atau 61,35%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2024 senilai Rp4.930.224.687,96, Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.188.501.120,49 atau 24,11%. Penurunan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada Bankaltimtara dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh tidak dilakukannya penambahan penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu, pemegang saham lainnya melakukan peningkatan modal disetor secara bertahap. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dilusi persentase saham pemerintah Kabupaten Tana Tidung terhadap total modal ditempatkan dan disetor pada Bankaltimtara. Penurunan persentase kepemilikan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan proporsi hak atas laba (dividen) yang diterima oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun kinerja keuangan Bankaltimtara secara umum tidak mengalami penurunan yang signifikan, kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren menurun seiring dengan perubahan komposisi kepemilikan saham.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	30.524.187.307,58	36.163.518.123,49

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dianggarkan senilai Rp15.257.194.161,00 dan terealisasi senilai Rp30.524.187.307,58 atau 200,06 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 senilai Rp36.163.518.123,49, Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.639.330.815,91 atau 15,59%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	258.133.908,00	129,07	231.524.500,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	228.413.484,63
3	Penerimaan Jasa Giro	4.526.753.653,00	9.466.066.454,28	209,11	7.609.090.345,26
4	Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah	0,00	2.931.498.473,22	0,00	14.893.284.569,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	184.888.000,00	10.074.036.421,66	5.448,72	5.428.170.032,02
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	0,00	0,00

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	1.471.713.241,39	227,64	238.334.414,58
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.000.000,00	19.323.042,00	322,05	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	279.639.000,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Dari Pengembalian	827.238.409,00	3.807.044.281,93	460,21	118.758.853,00
11	Pendapatan BLUD	8.665.808.000,00	2.157.214.245,71	24,89	7.415.941.925,00
Jumlah		**15.257.194.161,00**	**30.524.187.307,58**	**200,06**	**36.163.518.123,49**

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah oleh realisasi senilai Rp15.266.993.146,58 atau 100,06% yang disebabkan oleh realisasi beberapa komponen pendapatan yang melampaui target, terutama Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan dari Pengembalian.

5.1.1.1.4.1	**Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Terpisahkan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		258.133.908,00	**231.524.500,00**

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp258.133.908,00 atau 129,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2024 senilai Rp231.524.500,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp26.609.408,00 atau 11,49%. Realisasi tersebut atas hasil penjualan aset daerah berdasarkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelaksanaan Penjualan dan Penetapan Harga Minimal Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/012/K-I/2024 tanggal 05 Januari 2024 dan unit yang diusulkan untuk dilelang semuanya terlelang.

5.1.1.1.4.2	**Hasil Kerjasama Daerah**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		0,00	**228.413.484,63**

Kerjasama daerah dengan daerah lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Hasil Kerjasama Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Daerah TA 2024 senilai Rp228.413.484,63, Hasil Kerjasama Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp228.413.484,63 atau 100,00%. Penurunan terjadi karena Pemerintah Tana Tidung tidak memiliki pendapatan Hasil Kerjasama Daerah pada pemerintah pusat maupun pihak lainnya. Adapun rincian realisasi Hasil Kerjasama Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Hasil Kerjasama Daerah TA 2025

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Surat Keputusan Pendaftaran Tanah	0,00	2.000.000,00
2	Pendapatan dari Setoran BPJS	0,00	33.798.000,00
4	Pendapatan dari Setoran Taspen	0,00	79.727.196,00
6	Pendapatan Lain-lain	0,00	98.440.170,63
7	Bunga Giro dari BNI	0,00	3.422.244,00
8	Denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah PBBP2 dan Retribusi Daerah	0,00	1.871.374,00
9	Piutang pajak MBLB	0,00	9.154.500,00
	Jumlah	**0,00**	**228.413.484,63**

5.1.1.1.4.3 Penerimaan Jasa Giro

31 Desember 2025	31 Desember 2024
9.466.066.454,28	**7.609.090.345,26**

Jasa Giro adalah manfaat atau *benefit* yang didapatkan nasabah ketika menempatkan dana dalam rekening giro. Jasa Giro dapat disamakan dengan bunga yang diterima jika memiliki tabungan biasa.

Jasa Giro TA 2025 dianggarkan senilai Rp4.526.753.653,00 dan terealisasi senilai Rp9.466.066.454,28 atau 209,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro TA 2024 senilai Rp7.609.090.345,26, Jasa Giro TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.856.976.109,02 atau 24,40%. Kenaikan tersebut disebabkan penggunaan kas belum optimal karena terdapat alokasi anggaran yang tidak direalisasikan, seperti belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.4.4	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah**	**2.931.498.473,22**	**14.893.284.569,00**

Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penyimpanan uang negara atau daerah pada Bank Umum dalam bentuk instrumen keuangan tertentu antara lain fasilitas dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Bunga Deposito yang bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen kas daerah terhadap dana yang sementara belum digunakan (*idle cash*) tanpa mengganggu likuiditas keuangan dan kualitas keuangan publik. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp2.931.498.473,22 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah TA 2024 senilai Rp14.893.284.569,00, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp11.961.786.095,78 atau 80,32%. Penurunan tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan remunerasi atas penempatan dana pada fasilitas TDF senilai Rp587.564.672,00. Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan strategis pengelolaan kas daerah, khususnya melalui percepatan dan peningkatan volume penarikan dana dari instrumen TDF untuk memenuhi belanja program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2025

No	Uraian	31-Des-25
1	Remunerasi atas TDF di Bank Indonesia	587.564.672,00
2	Bunga Deposito dari Bankaltimtara	202.739.726,02
3	Bunga Deposito dari Bank Rakyat Indonesia (BRI)	620.646.130,00
4	Bunga Deposito dari Bank Tabungan Negara (BTN)	1.520.547.945,20
TOTAL		**2.931.498.473,22**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.4.5	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**10.074.036.421,66**	**5.428.170.032,02**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk kelancaran penyelesaian kerugian negara yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) TA 2025 dianggarkan senilai Rp184.888.000,00 dan terealisasi senilai Rp10.074.036.421,66 atau 5.448,72%. Jika

dibandingkan dengan realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) TA 2024 senilai Rp5.428.170.032,02, TGR TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp4.645.866.389,64 atau 85,59%. Kenaikan tersebut dikarenakan intensifikasi penagihan piutang daerah, penyelesaian temuan kerugian daerah secara hukum atau penyerahan aset atau pembayaran ganti rugi oleh pegawai. Pelampauan realisasi terhadap target anggaran Tuntutan Ganti Kerugian Negara senilai Rp9.889.148.421,66 atau 5.348,72% karena adanya upaya dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menagih sisa tuntutan ganti rugi dari tahun-tahun sebelumnya yang baru disetorkan ke kas daerah pada tahun berjalan sehingga penerimaan yang diterima jauh melampaui target yang ditetapkan dalam anggaran. Adapun rincian pendapatan TGR tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**.

5.1.1.1.4.6	**Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain**	**31 Desember 2025** **59.518.239,39**	**31 Desember 2024** **0,00**

Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp59.518.239,39. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain TA 2024 senilai Rp0,00, maka Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp59.518.239,39 atau 100%. Kenaikan tersebut bersumber dari penerimaan atas kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang tidak diprediksikan pada saat penyusunan anggaran, mengingat pendapatan ini bersifat tidak tetap.

5.1.1.1.4.7	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**31 Desember 2025** **1.471.713.241,39**	**31 Desember 2024** **238.334.414,58**

Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa kadang dijumpai terjadi cidera janji oleh para pihak baik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun oleh penyedia barang/jasa. Hal ini tentu akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan baik dari segi penurunan kualitas pekerjaan, kurangnya kuantitas dan ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian dalam kontrak harus diatur tentang sanksi dan kompensasi yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan TA 2025 dianggarkan senilai Rp646.506.099,00 dan terealisasi senilai Rp1.471.713.241,39 atau 227,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan TA 2024 senilai Rp238.334.414,58, Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.233.378.826,81 atau 517,50%. Kenaikan terhadap Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan ini menunjukkan pelaksanaan pekerjaan penyedia tidak menyelesaikan dengan tepat waktu sesuai kontrak. Pelampauan realisasi terhadap target anggaran Pendapatan dari Denda atas

Keterlambatan Pekerjaan senilai Rp825.207.142,39 atau 127,64% karena adanya pengenaan sanksi finansial terhadap penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan komitmen pekerjaan sesuai masa kontrak yang ditetapkan dan target pendapatan denda ditetapkan secara konservatif (rendah) karena pemerintah tidak mengharapkan adanya kegagalan jadwal dalam proyek.

5.1.1.1.4.8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		19.323.042,00	0,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan sanksi administrasi berupa uang yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran kewajiban perpajakan seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Pendapatan Denda Pajak Daerah meliputi pendapatan denda PBB-P2 adalah sanksi administrasi berupa bunga yang wajib dibayar oleh wajib pajak akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (perdesaan dan perkotaan) setelah jatuh tempo.

Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp19.323.042,00 atau 322,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp0,00, Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp19.323.042,00 atau 100,00%. Kenaikan terhadap pendapatan denda pajak daerah dikarenakan akun pendapatan denda pajak daerah TA 2025 menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, sedangkan TA 2024 pendapatan denda pajak daerah tersebut dicatat pada akun hasil kerjasama daerah. Pelampauan realisasi terhadap target Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai Rp13.323.042,00 atau 222,05% karena optimalisasi dalam intensifikasi penagihan aktif melalui surat teguran serta sistem pengawasan internal terhadap jatuh tempo pembayaran pajak daerah serta meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan piutang pajak masa lalu yang disertai dengan pembayaran sanksi administrasi yang baru disetorkan ke kas daerah pada tahun berjalan sehingga penerimaan yang diterima jauh melampaui target yang ditetapkan dalam penganggaran.

5.1.1.1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		279.639.000,00	0,00

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp279.639.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa TA 2024 senilai Rp0,00, Pelampauan realisasi terhadap target Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp279.639.000,00 atau 100,00% disebabkan adanya penerimaan yang sebelumnya tidak dianggarkan, berupa pengembalian uang muka dari pihak ketiga atas jaminan pelaksanaan

pekerjaan pembangunan jalan poros Bebatu–Sengkong Tahap III tanggal 1 Oktober 2024 oleh CV. Indiego Perkasa, dimana penerimaan tersebut baru disetorkan ke kas daerah pada tahun berjalan, sehingga pendapatan yang diterima melampaui target yang telah ditetapkan dalam anggaran.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.4.10	**Pendapatan Dari Pengembalian**	**3.807.044.281,93**	**118.758.853,00**

Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dianggarkan senilai Rp827.238.409,00 dan terealisasi senilai Rp3.807.044.281,93 atau 460,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 senilai Rp118.758.853,00, Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp3.688.285.428,93 atau 3.105,69%. Pendapatan dari pengembalian TA 2025 mengalami kenaikan karena adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. Pelampauan realisasi terhadap target Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp2.979.805.872,93 atau 360,21% karena adanya percepatan administrasi di unit kerja/SKPD atas pengembalian kelebihan pembayaran (seperti honorarium,tunjangan,gaji dan hibah) segera disetorkan kembali ke kasda sebelum tutup buku. Selain itu, faktor penambah nilai realisasi adalah adanya kebijakan penataan akun, berupa pemindahan pencatatan pendapatan Penyesuaian kembali akun Lain-lain PAD yang Sah, dimana pendapatan yang semula tercatat pada jenis/objek Tuntutan Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dialihkan kejenis/objek Pendapatan dari Pengembalian, agar penyajian laporan sesuai dengan klasifikasi pendapatan yang sebenarnya.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.1.4.11	**Pendapatan BLUD**	**2.157.214.245,71**	**7.415.941.925,00**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 188.4.55/337/K-X/2022 tentang Penetapan BLUD pada RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2022, namun pelaksanaannya di TA 2023 dengan melengkapi beberapa dasar hukum yang tercantum dalam Kemendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Kemudian dari beberapa dasar hukum salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada BLUD RSUD Akhmad Berahim maka pendapatan BLUD TA 2025 dianggarkan senilai Rp8.665.808.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.157.214.245,71 atau 24,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 senilai Rp7.415.941.925,00, Pendapatan BLUD TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.258.727.679,29 atau 70,91% karena pada tahun 2025 atas pendapatan BLUD RSUD Akhmad Berahim dan pendapatan BLUD seluruh Puskesmas dicatat menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10

RIncian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	7.005.000.000,00	88.207.203,00	1,26	7.415.941.925,00
2	Puskesmas Tideng Pale	779.352.000,00	902.720.791,00	115,83	0,00
3	Puskesmas Sesayap Hilir	440.744.000,00	566.381.056,52	128,51	0,00
4	Puskesmas Tana Lia	201.984.000,00	234.204.385,95	115,95	0,00
5	Puskesmas Kujau	168.840.000,00	264.049.235,00	156,39	0,00
6	Puskesmas Muruk Rian	69.888.000,00	101.651.574,24	145,45	0,00
	Jumlah	**8.665.808.000,00**	**2.157.214.245,71**	**24,89**	**7.415.941.925,00**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.024.352.520.352,00	**1.415.256.686.466,00**

Pendapatan Transfer sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan penerimaan uang atau hak atas pendapatan oleh entitas pelaporan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain alokasi dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Daerah juga bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang pada Tahun Anggaran 2025 diatur secara teknis melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/55/2026 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025. Pendapatan Transfer TA 2025 dianggarkan senilai Rp996.132.183.331,00 dan terealisasi senilai Rp1.024.352.520.352,00 atau 102,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 senilai Rp1.415.256.686.466,00, Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp390.904.166.114,00 atau 27,62%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11

Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**982.308.887.000,00**	**976.414.177.571,00**	**99,40**	**1.342.315.180.153,00**
1	Transfer Pemerintah Pusat - Perimbangan	947.926.898.000,00	942.849.102.171,00	99,46	1.298.349.353.153,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	34.381.989.000,00	33.565.075.400,00	97,62	43.965.827.000,00
B	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**13.823.296.331,00**	**47.938.342.781,00**	**346,79**	**72.941.506.313,00**
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.088.801.079,00	46.203.847.529,00	382,20	35.037.618.142,00
2	Bantuan Keuangan - LRA	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	100,00	37.903.888.171,000
Jumlah A + B		**996.132.183.331,00**	**1.024.352.520.352,00**	**102,83**	**1.415.256.686.466,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**976.414.177.571,00**	**1.342.315.180.153,00**

Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Kemudian Transfer Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Perubahan rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU, alokasi lebih bayar dana bagi hasil diperhitungkan dalam penyaluran alokasi kurang bayar dana bagi hasil. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Adapun peraturan rincian Penetapan penyaluran KB dan LB DBH tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/ tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Dalam dana transfer pusat ini, pemerintah daerah memiliki dana bagi hasil yang ditempatkan dalam fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) atau non tunai yang telah melewati masa *holding period* dan dapat dilakukan penarikan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus pada Pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah dalam bentuk

tunai dan non tunai, Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai yang meliputi penerbitan SBN dan TDF. Dana Bagi hasil dalam bentuk non tunai Kabupaten Tana Tidung dalam bentuk TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Penyaluran dana TDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui fasilitas TDF.

Dari beberapa kali penyesuaian dan penetapan Pagu TKDD, maka pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dianggarkan senilai Rp982.308.887.000,00 dan terealisasi senilai Rp976.414.177.571,00 atau 99,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 senilai Rp1.342.315.180.153,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp365.901.002.582,00 atau 27,26%. Tidak tercapainya realisasi terhadap target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp5.894.709.429,00 atau 0,60% karena adanya penyesuaian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya terkait perhitungan kurang bayar (KB) dan lebih bayar (LB) DBH, sehingga jumlah transfer yang diterima daerah tidak seluruhnya sesuai dengan pagu yang telah dianggarkan sebagian dana masih ditempatkan pada fasilitas TDF dan belum dapat dicairkan pada tahun anggaran berjalan, serta adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian belanja pemerintah pusat yang turut mempengaruhi besaran penyaluran transfer ke daerah. Adapun rincian realisasi Transfer Pemerintah Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	942.849.102.171,00	1.298.349.353.153,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.565.075.400,00	43.965.827.000,00
Jumlah		**976.414.177.571,00**	**1.342.315.180.153,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.2.1.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**942.849.102.171,00**	**1.298.349.353.153,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yaitu salah satunya adalah Dana Bagi Hasil. Transfer Dana Bagi Hasil ini tidak hanya disalurkan dalam bentuk tunai, tetapi juga dapat berupa non-tunai melalui TDF, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 19 Tahun 2024 mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non-tunai melalui TDF.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 senilai Rp942.849.102.171,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 senilai Rp1.298.349.353.153,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp355.500.250.982,00 atau 27,38%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut.

Tabel 5.13
Realisasi Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil	506.994.414.300,00	832.040.549.000,00	(325.046.134.700,00)	(39,07)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
Jumlah		**942.849.102.171,00**	**1.298.349.353.153,00**	**(355.500.250.982,00)**	**(27,38)**

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

31 Desember 2025	31 Desember 2024
506.994.414.300,00	**832.040.549.000,00**

Dana Bagi Hasil TA 2025 dianggarkan senilai Rp503.424.284.000,00 dan terealisasi senilai Rp506.994.414.300,00 atau 100,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 senilai Rp832.040.549.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp325.046.134.700,00 atau 39,07%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	203.634.442.000,00	0,00	203.740.003.800,00	203.740.003.800,00	100,05	18.912.969.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.658.197.000,00	0,00	5.404.240.300,00	5.404.240.300,00	95,51	3.353.531.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	188.208.000,00	0,00	172.967.200,00	172.967.200,00	91,90	111.163.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	392.475.000,00	0,00	392.475.000,00	392.475.000,00	100,00	1.899.280.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	156.127.000,00	0,00	179.952.000,00	179.952.000,00	115,26	290.698.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	274.268.000,00	0,00	274.268.000,00	274.268.000,00	100,00	325.447.000,00

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	286.545.638.000,00	3.709.941.000,00	286.545.638.000,00	290.255.579.000,00	101,29	794.913.065.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.323.315.000,00	0,00	2.323.315.000,00	2.323.315.000,00	100,00	5.030.298.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	328.325.000,00	0,00	328.325.000,00	328.325.000,00	100,00	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.174.532.000,00	0,00	1.174.532.000,000	1.174.532.000,000	100,00	1.578.376.000,00
11	DBH Sawit	2.748.757.000,00	0,00	2.748.757.000,00	2.748.757.000,00	100,00	5.625.722.000,00
Jumlah		**503.424.284.000,00**	**3.709.941.000,00**	**503.284.473.300,00**	**506.994.414.300,00**	**100,71**	**832.040.549.000,00**

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2025	31 Desember 2024
209.317.211.300,00	**22.377.663.000,00**

Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dianggarkan senilai Rp209.480.847.000,00 dan terealisasi senilai Rp209.317.211.300,00 atau 99,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 senilai Rp22.377.663.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp186.939.548.300,00 atau 835,38%. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh melonjaknya pendapatan negara dari sektor pajak secara nasional. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak pusat, alokasi Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada daerah pun turut meningkat. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	203.634.442.000,00	0,00	203.740.003.800,00	203.740.003.800,00	100,05	18.912.969.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.658.197.000,00	0,00	5.404.240.300,00	5.404.240.300,00	95,51	3.353.531.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	188.208.000,00	0,00	172.967.200,00	172.967.200,00	91,90	111.163.000,00
Jumlah		**209.480.847.000,00**	**0,00**	**209.317.211.300,00**	**209.317.211.300,00**	**99,92**	**22.377.663.000,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.2.1.1.1.2	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)**	**294.928.446.000,00**	**804.037.164.000,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dianggarkan senilai Rp291.194.680.000,00 dengan realisasi senilai Rp294.928.446.000,00 atau 101,28% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2024 senilai Rp804.037.164.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp509.108.718.000,00 atau 63,32%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam, khususnya komoditi sumber daya alam minyak bumi dan mineral dan batubara royalti. Penurunan pendapatan negara di sektor tersebut secara otomatis berdampak pada berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada daerah.. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	392.475.000,00	0,00	392.475.000,00	392.475.000,00	100,00	1.899.280.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	156.127.000,00	0,00	179.952.000,00	179.952.000,00	115,26	290.698.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	274.268.000,00	0,00	274.268.000,00	274.268.000,00	100,00	325.447.000,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	286.545.638.000,00	3.709.941.000,00	286.545.638.000,00	290.255.579.000,00	101,29	794.913.065.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.323.315.000,00	0,00	2.323.315.000,00	2.323.315.000,00	100,00	5.030.298.000,00
6	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	328.325.000,00	0,00	328.325.000,00	328.325.000,00	100,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.174.532.000,00	0,00	1.174.532.000,00	1.174.532.000,00	100,00	1.578.376.000,00
Jumlah		**291.194.680.000,00**	**3.709.941.000,00**	**291.218.505.000,00**	**294.928.446.000,00**	**101,28**	**804.037.164.000,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.2.1.1.3	**Dana Bagi Hasil Lainnya (DBH Sawit)**	**2.748.757.000,00**	**5.625.722.000,00**

Dana Bagi Hasil Lainnya TA 2025 dianggarkan senilai Rp2.748.757.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.748.757.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya TA 2024 senilai Rp5.625.722.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.876.965.000,00 atau 51,14%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam, khususnya komoditas kelapa sawit.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.2.1.1.2	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**397.312.680.666,00**	**425.690.872.922,00**

DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (provinsi, kabupaten, dan kota) setiap tahunnya. DAU menjadi salah satu komponen pendapatan dalam APBD dan berfungsi sebagai dana pembangunan daerah. Tujuan utama DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Besaran DAU setiap daerah ditetapkan melalui Keputusan Presiden, sehingga besaran yang diterima setiap kabupaten/kota tidak sama. DAU TA 2025 dianggarkan senilai Rp402.661.605.000,00 dengan realisasi senilai Rp397.312.680.666,00 atau 98,67% dari anggaran yang ditetapkan, Jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2024 senilai Rp425.690.872.922,00, maka realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp28.378.192.256,00 atau 6,67%. Penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD serta PMK Nomor 56 Tahun 2025. Kebijakan efisiensi ini mengakibatkan pemangkasan pada Belanja Transfer ke Daerah (TKD), termasuk DAU.

Selain itu, realisasi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) tidak mencapai 100,00%. Pada bidang tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), DAU dianggarkan senilai Rp10.463.412.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.381.538.256,00. Realisasi ini menyesuaikan dengan gaji PPPK yang diangkat pada TA 2025, yaitu untuk periode gaji bulan Oktober hingga Desember. Pemberian DAU bersifat kombinasi, yaitu terdiri atas DAU *Block Grant* (tidak ditentukan penggunaannya) dan DAU *Specific Grant* (ditentukan penggunaannya). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Adapun rincian anggaran dan realisasi DAU disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025			%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Potongan	Realisasi		
1	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	340.233.407.000,00	0,00	339.966.356.410,00	99,92	349.264.548.000,00
2	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	10.463.412.000,00	0,00	5.381.538.256,00	51,43	5.756.624.922,00
3	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	38.264.051.000,00	0,00	38.264.051.000,00	100,00	25.678.444.000,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	13.700.735.000,00	0,00	13.700.735.000,00	100,00	13.513.380.000,00
5	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	31.477.876.000,00
Jumlah		**402.661.605.000,00**	**0,00**	**397.312.680.666,00**	**98,67**	**425.690.872.922,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.1.2.1.1.3	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**38.542.007.205,00**	**40.617.931.231,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan disamping Dana DAU. DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. DAK TA 2025 dianggarkan senilai Rp41.841.009.000,00 dengan realisasi senilai Rp38.542.007.205,00 atau 92,12% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2024 senilai Rp40.617.931.231,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.075.924.026,00 atau 5,11%. DAK terdiri dari Dana Transfer Khusus-DAK Fisik dan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik. Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.999.832.000,00	10.810.611.370,00	98,28	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.268.866.000,00	2.247.694.000,00	99,07	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	775.285.700,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	1.601.422.598,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	960.209.895,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.560.668.240,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.901.850.564,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.401.703.628,00
9	DAK Non Fisik-BOS Reguler	6.023.546.000,00	5.940.759.247,00	98,63	5.776.158.629,00
10	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	100,00	597.500.000,00
11	DAK Non Fisik-TPG PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	85,44	6.365.703.000,00
12	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	482.750.000,00	675.000.000,00	139,82	296.662.000,00
13	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	139,11	1.048.181.000,00
14	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	96,65	971.392.800,00
15	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	344.710.000,00	310.608.878,00	90,11	306.144.300,00
16	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.158.100.000,00	831.212.900,00	71,77	792.301.156,00
17	DAK Non Fisik-BOK-BOK Puskesmas	3.411.298.000,00	2.209.197.516,00	64,76	3.633.032.949,00
18	DAK Non Fisik-BOK-BOK Dinas-Kab/kota	3.958.179.000,00	3.451.051.374,00	87,19	2.267.923.772,00
19	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	303.988.000,00	100,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	297.446.000,00	74,24	361.791.000,00
21	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	62.700.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**41.841.009.000,00**	**38.542.007.205,00**	**92,12**	**40.617.931.231,00**

a. Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik TA 2025 dianggarkan senilai Rp13.268.698.000,00 dengan realisasi senilai Rp13.058.305.370,00 atau 98,41% dari anggaran yang ditetapkan, Jika dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik TA 2024 senilai Rp18.201.140.625,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.142.835.255,00 atau 28,26%. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 yang mengakibatkan berkurangnya alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemangkasan Belanja TKD, sehingga beberapa kegiatan DAK Fisik di bidang lainnya tidak dapat terlaksana. Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.999.832.000,00	10.810.611.370,00	98,28	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.268.866.000,00	2.247.694.000,00	99,07	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	775.285.700,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	1.601.422.598,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	960.209.895,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.901.850.564,00
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.560.668.240,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.401.703.628,00
Jumlah		**13.268.698.000,00**	**13.058.305.370,00**	**98,41**	**18.201.140.625,00**

b. Dana Transfer Khusus berupa DAK Non Fisik TA 2025 dianggarkan senilai Rp28.572.311.000,00 dengan realisasi senilai Rp25.483.701.835,00 atau 89,19% dari anggaran yang ditetapkan, Jika dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik TA 2024 senilai Rp22.416.790.606,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp3.066.911.229,00 atau 13,68%. Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20

Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Penerimaan tidak melalui Kasda	Penerimaan melalui Kasda	Total		
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	6.023.546.000,00	5.940.759.247,00	0,00	5.940.759.247,00	98,63	5.776.158.629,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	0,00	608.500.000,00	100,00	597.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	0,00	8.281.449.600,00	85,44	6.365.703.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	482.750.000,00	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00	139,82	296.662.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	0,00	1.500.258.320,00	139,11	1.048.181.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	0,00	1.011.530.000,00	96,65	971.392.800,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	344.710.000,00	310.608.878,00	0,00	310.608.878,00	90,11	306.144.300,00
8	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.158.100.000,00	0,00	831.212.900,00	831.212.900,00	71,77	792.301.156,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	0,00	303.988.000,00	303.988.000,00	100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00	297.446.000,00	297.446.000,00	74,24	361.791.000,00
11	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00	100,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.958.179.000,00	0,00	3.451.051.374,00	3.451.051.374,00	87,19	2.267.923.772,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.411.298.000,00	2.209.197.516,00	0,00	2.209.197.516,00	64,76	3.633.032.949,00
Jumlah		**28.572.311.000,00**	**20.537.303.561,00**	**4.946.398.274,00**	**25.483.701.835,00**	**89,19**	**22.416.790.606,00**

Berdasarkan tabel di atas realisasi DAK Non Fisik TA 2025 senilai Rp25.483.701.835,00 dengan anggaran senilai Rp28.572.311.000,00 atau 89,19% sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi. Namun demikian, terdapat dua rincian yang melampaui pagu, yaitu DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD dan TKG PNSD, kelebihan tersebut disebabkan oleh pembayaran kekurangan tunjangan Triwulan IV Tahun 2024 yang direalisasikan pada Tahun 2025, masing-masing untuk Tamsil senilai Rp137.250.000,00 dan TKG senilai Rp107.773.820,00 serta adanya penambahan jumlah guru penerima tunjangan. Kondisi ini terjadi karena penetapan nominasi penerima tunjangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak lagi terlibat dalam proses pengusulan penerima.

Dari tabel di atas ada beberapa DAK Non Fisik yang tidak melalui RKUD atau (Non RKUD), sebagai berikut.

a. DAK Non Fisik BOS Reguler dianggarkan senilai Rp6.023.546.000,00 dengan realisasi senilai Rp5.940.759.247,00 atau 98,63% dari anggaran yang ditetapkan, Selanjutnya, DAK Non Fisik BOS Kinerja dianggarkan senilai Rp608.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp608.500.000,00 atau 100%.

b. DAK Non Fisik BOP PAUD/TK dianggarkan senilai Rp1.046.632.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.011.530.000,00 atau 96,65%,. Namun demikian, BOP PAUD/TK Swasta tersebut tidak diakui sebagai salah satu SiLPA sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2023.

c. DAK Non Fisik Kesetaraan dianggarkan senilai Rp344.710.000,00 dengan realisasi senilai Rp310.608.878,00 atau 90,11%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kesetaraan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Kesetaraan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Tana Tidung (SPNF SKB KABUPATEN TANA TIDUNG)	239.780.000,00	205.744.058,00	85,81	206.974.300,00
2	BOSP Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mandiri (Swasta)	104.930.000,00	104.864.820,00	99,94	99.170.000,00
Jumlah		**344.710.000,00**	**310.608.878,00**	**90,11**	**306.144.300,00**

d. DAK Non Fisik-TPG PNSD dianggarkan senilai Rp9.692.749.000,00 dan terealisasi senilai Rp 8.281.499.600,00 atau 85,44%,

e. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD dianggarkan senilai Rp482.750.000,00 dan terealisasi senilai Rp 675.000.000,00 atau 139,82%, DAK Non Fisik-TKG PNSD dianggarkan senilai Rp1.078.499.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.500.258.320,00 atau 139,11%,

f. DAK Non Fisik BOK Puskesmas dianggarkan senilai Rp3.411.298.000,00 realisasi senilai Rp2.209.197.516,00 atau 64,76%. Adapun rincian DAK Non Fisik BOK Puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK Puskesmas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Puskesmas Tideng Pale	667.108.788,00	147.416.488,00	22,10	765.203.382,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	846.716.962,00	688.417.274,00	81,30	977.957.235,00
3	Puskesmas Tana Lia	695.406.131,00	574.094.398,00	82,56	733.349.075,00
4	Puskesmas Kujau	632.137.846,00	407.442.780,00	64,45	703.846.657,00
5	Puskesmas Muruk Rian	569.928.273,00	391.826.576,00	68,75	452.676.600,00
Jumlah		**3.411.298.000,00**	**2.209.197.516,00**	**64,76**	**3.633.032.949,00**

5.1.1.2.1.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		33.565.075.400,00	**43.965.827.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 senilai Rp33.565.075.400,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 senilai Rp43.965.827.000,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp10.400.751.600,00 atau 23,66%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Desa	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	97,02	29.801.783.000,00
2	Insentif Fiskal	6.996.098.000,00	6.996.098.000,00	100,00	14.164.044.000,00
Jumlah		**34.381.989.000,00**	**33.565.075.400,00**	**97,62**	**43.965.827.000,00**

5.1.1.2.1.2.1 Dana Desa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
26.568.977.400,00	**29.801.783.000,00**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa. Dana Alokasi Desa per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025. Dana Alokasi Desa TA 2025 dianggarkan senilai Rp27.385.891.000,00 dan terealisasi senilai Rp26.568.977.400,00 atau 97,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Desa TA 2024 senilai Rp29.801.783.000,00, Dana Alokasi Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp3.232.805.600,00 atau 10,85%. Realisasi Dana Desa mengalami penurunan karena secara nasional alokasi Anggaran Dana Desa mengalami penurunan karena adanya kebijakan Efisiensi Anggaran. Adapun rincian transfer Dana Desa TA 2025 pada **Lampiran 5.2.**

5.1.1.2.1.2.2 Insentif Fiskal

31 Desember 2025	31 Desember 2024
6.996.098.000,00	**14.164.044.000,00**

Insentif Fiskal TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.996.098.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.996.098.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal TA 2024 senilai Rp14.164.044.000,00, Insentif Fiskal TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp7.167.946.000,00 atau 50,61%. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena anggaran Insentif Fiskal TA 2025 mengalami penurunan disebabkan adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	47.938.342.781,00	**72.941.506.313,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang terdiri dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp13.823.296.331,00 dan terealisasi senilai Rp47.938.342.781,00 atau 346,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 senilai Rp72.941.506.313,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp25.003.163.532,00 atau 34,28%. Hal tersebut disebabkan karena pada TA 2025 Kabupaten Tana Tidung tidak menerima Transfer Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 yang melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, terdapat peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.89/2024, alokasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD TA 2025. Hal ini menyebabkan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak mencapai Rp46.203.847.529,00 atau 382,20% dari target anggaran Rp12.088.801.079,00, meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Kelebihan ini terjadi karena anggaran direncanakan lebih konservatif sementara realisasi mengikuti ketetapan definitif dari provinsi.

Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan drastis dari Rp37.903.888.171,00 menjadi Rp1.734.495.252,00 atau 95,42% karena Kabupaten Tana Tidung tidak mendapat alokasi anggaran bantuan keuangan umum dari Provinsi Kalimantan Utara, dan bantuan keuangan khusus juga mengalami penurunan dibanding pada TA 2024, sesuai SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/11/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara berupa tunjangan tambahan ketua rukun tetangga TA 2025 dan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/102/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara TA 2025 sehingga menyebabkan pendapatan transfer antar daerah mengalami penurunan. Adapun rincian pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan sebagai berikut.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	46.203.847.529,00	**35.037.618.142,00**

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/55/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025 dan SK

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.396/2024 Tentang Perubahan Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025 ditargetkan senilai Rp12.088.801.079,00 dan terealisasi senilai Rp46.203.847.529,00 atau 382,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 senilai Rp35.037.618.142,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp11.166.229.387,00 atau 31,87%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi			%	Realisasi TA. 2024
			Realisasi KB TA 2025	Realisasi Tahun 2025	Total		
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	531.607.959,00	1.020.242.716,00	21.486.601,00	1.041.729.317,00	195,96	981.138.634,00
2	Bagi Hasil Dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	512.928.288,00	986.361.648,00	19.747.464,00	1.006.109.112,00	196,15	1.334.747.398,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	7.744.264.832,00	13.327.459.124,00	26.749.043.832,00	40.076.502.956,00	517,50	31.156.253.282,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	300.000.000,00	129.358.548,00	316.566.466,00	445.925.014,00	148,64	167.703.676,00
5	Bagi Hasil Pajak Lainnya/Pajak Rokok	3.000.000.000,00	0,00	3.633.581.130,00	3.633.581.130,00	121,12	1.397.775.152,00
Jumlah		**12.088.801.079,00**	**15.463.422.036,00**	**30.740.425.493,00**	**46.203.847.529,00**	**382,20**	**35.037.618.142,00**

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
1.734.495.252,00 **37.903.888.171,00**

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.734.495.252,00 dan terealisasi senilai Rp1.734.495.252,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 senilai Rp37.903.888.171,00, Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp36.169.392.919,00 atau 95,42%. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena alokasi bantuan keuangan umum TA 2025 nihil atau tidak mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

5.1.1.2.2.2.1 Bantuan Keuangan Umum **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **29.750.000.000,00**

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum kepada Kabupaten Tana Tidung TA 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0%. Jika

dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan Umum TA 2024 senilai Rp29.750.000.000,00, Bantuan Keuangan Umum TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp29.750.000.000,00 atau 100,00%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25
Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pematangan Lahan Landscape Bundaran Pusat Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	11.750.000.000,00
2	Pembangunan Jalan Poros Bebatu-Desa Sengkong Tahap III Zona B	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
3	Rekonstruksi Jalan IR.Soekarno (Bundaran-Simpang AJP)	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.750.000.000,00**

5.1.1.2.2.2	**Bantuan Keuangan Khusus**	**31 Desember 2025** **1.734.495.252,00**	**31 Desember 2024** **8.153.888.171,00**

Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.734.495.252,00 dan terealisasi senilai Rp1.734.495.252,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2024 senilai Rp8.153.888.171,00, Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp6.419.392.919,00 atau 78,73%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Khusus disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26
Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	6.107.400.000,00
2	ASN & TBPP-Penyuluh	0,00	0,00	0,00	438.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Khusus TAPE	1.374.495.252,00	1.374.495.252,00	100,00	1.251.488.171,00
4	Tunjangan Tambahan Ketua RT	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	357.000.000,00
Jumlah		**1.734.495.252,00**	**1.734.495.252,00**	**100,00**	**8.153.888.171,00**

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	71.797.579,00	**19.030.199.300,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 yang terdiri atas Pendapatan atas Dana Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan senilai Rp132.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 54,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 senilai Rp19.030.199.300,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp18.958.401.721,00 atau 99,62%. Adapun Penjelasan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	**17.314.145.000,00**

Pendapatan Hibah terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan Hibah TA 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 senilai Rp17.314.145.000,00, maka Pendapatan Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp17.314.145.000,00 atau 100%. Pendapatan Hibah mengalami penurunan yang signifikan karena tidak adanya alokasi atau transfer dana hibah dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki realisasi cukup besar.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	71.797.579,00	**1.716.054.300,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagian dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP TA 2025 dianggarkan senilai Rp132.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 54,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%.

5.1.1.3.2.1 Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	71.797.579,00	**1.716.054.300,00**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 dianggarkan senilai Rp132.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 54,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA

2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%. Penurunan tersebut disebabkan seluruh puskesmas pada TA 2025 tidak menerima Pendapatan Dana Kapitasi JKN, karena puskesmas sudah menerapkan pola pengelolaan leuangan BLUD Sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/426/K-X11/2024 pada tanggal 24 Desember 2024, tentang Penerapan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tana Tidung. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Puskesmas Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	748.636.237,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	0,00	0,00	0,00	464.209.583,00
3	Puskesmas Tana Lia	0,00	0,00	0,00	219.391.136,00
4	Puskesmas Kujau	0,00	0,00	0,00	211.439.105,00
5	Puskesmas Muruk Rian	0,00	0,00	0,00	72.378.239,00
6	RSP Tanjung Kramat	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	0,00
Jumlah		**132.000.000,00**	**71.797.579,00**	**54,39**	**1.716.054.300,00**

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 hanya terdapat pada RSP Tanjung Kramat dengan anggaran senilai Rp132.000.000,00 dan realisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 45,61%. Tidak tercapainya target anggaran dikarenakan pengaruhi oleh proses migrasi peserta JKN dari Puskesmas Tana Lia ke RSP Tanjung Keramat yang dilakukan secara bertahap, sehingga jumlah peserta terdaftar belum stabil di awal periode dan berdampak pada penerimaan kapitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target pendapatan merupakan dampak dari proses penyesuaian jumlah peserta yang masih berlangsung sepanjang tahun.

5.1.2 Belanja

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.166.511.172.955,70	**1.356.243.522.076,42**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu TA yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari SKPD yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.433.234.595.478,90 dan terealisasi senilai Rp1.166.511.172.955,70 atau 81,39% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp1.356.243.522.076,42, maka Belanja Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp189.732.349.120,72 atau 13,99%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28
Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	**Belanja Operasi**	**784.968.530.028,51**	**661.098.426.989,46**	**84,22**	**774.466.031.112,02**
1	Belanja Pegawai	390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	80,93	313.541.036.552,00
2	Belanja Barang dan Jasa	374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	86,92	422.867.337.627,02
3	Belanja Hibah	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	97,94	38.040.036.933,00
4	Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	243.500.000,00	100,00	17.620.000,00
II	**Belanja Modal**	**434.056.815.945,39**	**386.884.401.043,24**	**89,13**	**446.286.590.042,40**
1	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	94,43	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	89,98	39.818.595.746,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	90,03	225.324.831.715,40
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	86,72	179.911.495.381,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	105,85	305.796.700,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	91,40	925.870.500,00
III	**Belanja Tak Terduga**	**94.864.820.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Belanja Transfer**	**119.344.429.141,00**	**118.528.344.923,00**	**99,32**	**135.490.900.922,00**
1	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	989.949.241,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	**99,31**	135.490.900.922,00
Jumlah (I, II, III, dan IV)		**1.433.234.595.478,90**	**1.166.511.172.955,70**	**81,39**	**1.356.243.522.076,42**

5.1.2 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
661.098.426.989,46	**774.466.031.112,02**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan senilai Rp784.968.530.028,51 dan terealisasi senilai Rp661.098.426.989,46 atau 84,22% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp774.466.031.112,02, maka Belanja Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp113.367.604.122,56 atau 14,64%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	80,93	313.541.036.552,00
2	Belanja Barang dan Jasa	374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	86,92	422.867.337.627,02
3	Belanja Hibah	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	97,94	38.040.036.933,00
4	Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	243.500.000,00	100,00	17.620.000,00
Jumlah		**784.968.530.028,51**	**661.098.426.989,46**	**84,22**	**774.466.031.112,02**

Penjelasan lebih lanjut rincian Belanja Operasi TA 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2025	31 Desember 2024
315.896.000.484,00	**313.541.036.552,00**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai TA 2025 dianggarkan senilai Rp390.349.994.098,23 dan terealisasi senilai Rp315.896.000.484,00 atau 80,93% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp313.541.036.552,00, maka Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.354.963.932,00 atau 0,75%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA. 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji Pokok ASN	118.224.566.091,00	97.800.292.547,00	82,72	90.270.482.932,20
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.517.136.894,00	8.771.897.530,00	83,41	8.160.031.866,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.286.411.462,00	3.212.650.250,00	74,95	3.687.681.140,33
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.463.979.380,00	6.002.014.116,00	80,41	4.957.275.293,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.485.117.574,00	2.006.799.523,00	80,75	1.534.644.999,47
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.857.734.619,00	5.694.791.230,00	83,04	5.228.708.320,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	135.231.415,45	81.411.066,00	60,20	69.389.814,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.864.019,34	1.508.786,00	25,73	1.305.223,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.111.950.008,55	11.124.869.833,00	73,62	7.093.812.820,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.259.324.529,00	202.226.745,00	16,06	183.364.457,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.724.849.643,00	606.682.269,00	35,17	541.649.973,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	300.331.612,12	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	66.067.720,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	189.240.488.385,77	151.120.270.941,00	79,86	160.207.902.502,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.649.218.000,00	10.814.894.467,40	92,84	1.377.750.113,00
16	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	6.227.057.400,00
17	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.128.471.300,00
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	570.000.000,00
19	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	7.438.736.600,00
20	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	1.114.800.000,00

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA. 2024
		Anggaran	Realisasi		
21	Belanja Uang Representasi DPRD	452.290.000,00	451.290.000,00	99,78	450.975.000,00
22	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	58.848.300,00	53.975.600,00	91,72	54.800.100,00
23	Belanja Tunjangan Beras DPRD	61.880.000,00	54.730.000,00	88,45	54.665.000,00
24	Belanja Uang Paket DPRD	45.717.000,00	38.682.000,00	84,61	38.986.500,00
25	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	663.000.000,00	654.370.500,00	98,70	653.913.750,00
26	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.076.175,00	66.487.575,00	56,31	66.137.400,00
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00	6.044.325,00	60,44	0,00
28	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	100,00	2.520.000.000,00
29	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00	420.000.000,00
30	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.971.556,00	66.064.520,00	98,65	0,00
31	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	168.504,00	12.000,00	7,12	12.000,00
32	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.000.700.500,00	2.980.525.916,00	99,33	2.967.005.153,00
33	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.196.800.000,00	3.192.000.000,00	99,85	3.192.000.000,00
34	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00	182.385.000,00
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	148.280.500,00	107.338.560,00	72,39	61.332.960,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.530.000,00	7.248.000,00	43,85	6.864.000,00
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	224.640.000,00	98.280.000,00	43,75	98.280.000,00
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.299.120,00	7.314.420,00	39,97	7.531.680,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.390.000,00	755.900,00	54,38	924.536,00
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	220.000,00	1.860,00	0,85	1.000,00
41	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	318.690.233,00	312.480.000,00	98,05	279.720.000,00
42	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	280.000.000,00
43	Belanja Pegawai BOSP-BOS	3.015.820.000,00	2.578.700.000,00	85,51	0,00
44	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	3.321.390.004,60	63,85	2.346.370.000,00
Jumlah		**390.349.994.098,23**	**315.896.000.484,00**	**80,93**	**313.541.036.552,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	325.696.829.085,46	422.867.337.627,02

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dianggarkan senilai Rp374.707.901.789,28 dan terealisasi senilai Rp325.696.829.085,46 atau 86,92% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp422.867.337.627,02, maka Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp97.170.508.541,56 atau 22,98%. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran transfer pemerintah pusat. Hal ini mengharuskan dilakukannya rasionalisasi anggaran termasuk belanja barang dan jasa, yang mana penyesuaian alokasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah guna menyelaraskan target kinerja dengan ketersediaan kapasitas fiskal yang bersumber dari dana transfer pusat. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang Pakai Habis	122.632.211.996,01	109.020.916.712,93	88,90	153.946.628.122,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	293.218.600,00	280.265.600,00	95,58	364.831.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	230.511.130,00	207.966.570,00	90,22	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	86.638.615.674,00	69.482.956.701,20	80,20	85.410.928.397,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.885.650.600,00	5.317.079.745,00	90,34	4.127.549.288,00
6	Belanja Sewa Tanah	88.000.000,00	77.000.000,00	87,50	87.000.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.697.798.271,00	5.642.643.668,00	84,25	12.610.583.614,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.720.140.000,00	3.176.033.000,00	85,37	3.265.129.400,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	964.857.900,00	844.716.920,60	87,55	8.324.697.031,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.590.572.220,00	1.577.482.000,00	99,18	1.995.198.662,00
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	180.900.000,00	171.980.958,00	95,07	167.464.816,00

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.465.100.000,00	4.463.200.000,00	99,96	2.401.100.000,00
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.701.634.488,00	10.067.290.447,00	73,48	8.797.181.110,00
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	53.252.000,00	100,00	90.125.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	236.000.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.171.856.800,01	4.609.016.611,00	89,12	3.955.662.419,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.156.678.330,00	4.626.839.985,57	89,73	334.305.600,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	4.968.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.912.784.886,26	70.949.996.166,00	88,78	86.674.649.744,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.438.604.266,00	4.995.966.179,00	91,86	18.179.644.111,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	654.291.500,00	623.738.500,00	95,33	714.051.286,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.143.526.913,02
25	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	19.902.053.000,00	18.909.431.502,00	95,01	0,00
26	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.640.000,00	113.346.000,00	99,74	0,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	352.711.000,00	183.023.980,00	51,89	0,00
28	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	92,06	0,00
29	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	7.145.064.692,16	96,07	2.997.581.114,00
Jumlah		**374.707.901.789,28**	**325.696.829.085,46**	**86,92**	**422.867.337.627,02**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
19.262.097.420,00	**38.040.036.933,00**

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan

dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Hibah TA 2025 dianggarkan senilai Rp19.667.134.141,00 dan terealisasi senilai Rp19.262.097.420,00 atau 97,94% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp38.040.036.933,00, maka Belanja Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp18.777.939.513,00 atau 49,36%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	3.550.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	192.198.500,00	174.825.000,00	90,96	479.717.000,00
3	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	600.000.000,00	596.228.675,00	99,37	0,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.307.101.280,00	11.014.024.200,00	97,41	28.693.600.000,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.957.709.935,00	1.912.698.000,00	97,70	2.954.700.600,00
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	140.923.900,00	100,00	205.000.000,00
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.383.822.000,00	2.341.050.820,00	98,21	0,00
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	1.064.668.525,00	100,00	915.918.475,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	572.610.000,00	571.378.300,00	99,78	0,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	99,85	967.996.800,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	273.104.058,00
Jumlah		**19.667.134.141,00**	**19.262.097.420,00**	**97,94**	**38.040.036.933,00**

Rincian penerima hibah disajikan pada **Lampiran 5.3**.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	243.500.000,00	17.620.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dianggarkan senilai Rp243.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp243.500.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp17.620.000,00, maka Belanja Bantuan Sosial TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp225.880.000,00 atau 1.281,95%. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial dikarenakan terdapat kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/297/K-VII/2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif Individu Kabupaten Tana Tidung TA 2025. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No	Uraian	TA 2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/297/K-VIII/2025. SP2D 03819 (48 orang @Rp5.000.000,00) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
2	Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Berobat Bagi Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tana Tidung Akomodasi Berobat Rawat Inap Ke RSUD Tarakan Berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/405/K-XI/2025. SP2D 06515 (an. FERNANDES) pada Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Jumlah		**243.500.000,00**	**243.500.000,00**	**100,00**

5.1.2.2 Belanja Modal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	386.884.401.043,24	446.286.590.042,40

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah, antara lain berupa perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja Modal TA 2025 dianggarkan senilai Rp434.056.815.945,39 dan terealisasi senilai

Rp386.884.401.043,24 atau 89,13% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp446.286.590.042,40, maka Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp59.402.188.999,16 atau 13,31%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan riil SKPD sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Atas pelaksanaan Belanja Modal yang telah selesai di akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menahan jaminan pemeliharaan sebagai kesanggupan rekanan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	94,43	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	89,98	39.818.595.746,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	90,03	225.324.831.715,40
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	86,72	179.911.495.381,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	105,85	305.796.700,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	91,40	925.870.500,00
Jumlah		**434.056.815.945,39**	**386.884.401.043,24**	**89,13**	**446.286.590.042,40**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.847.964.666,00	**0,00**

Belanja Modal Tanah TA 2025 dianggarkan senilai Rp3.015.903.866,00 dan terealisasi senilai Rp2.847.964.666,00 atau 94,43% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp0,00, maka Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.847.964.666,00 atau 100,00%. Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan karena pembangunan jalan dan pematangan lahan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Tana Tidung pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP). Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah Persil	583.802.000,00	583.802.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Lapangan	2.432.101.866,00	2.264.162.666,00	93,09	0,00
Jumlah		**3.015.903.866,00**	**2.847.964.666,00**	**94,43**	**0,00**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah kemudian dijelaskan pada **Lampiran 5.4**.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**35.323.557.737,00**	**39.818.595.746,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dianggarkan senilai Rp39.255.670.619,00 dan terealisasi senilai Rp35.323.557.737,00 atau 89,98% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp39.818.595.746,00, maka Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp4.495.038.009,00 atau 11,29%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan karena adanya kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang memengaruhi postur transfer kedaerah. Pemerintah daerah mengambil langkah melakukan rasionalisasi belanja modal,sehingga pengadaan belanja peralatan dan mesin hanya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan mutlak operasional pelayanan SKPD berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.448.552.300,00	4.399.472.150,00	98,90	2.109.096.000,00
2	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	131.500.000,00
3	Belanja Modal Alat Bantu	570.329.468,00	523.988.440,00	91,87	14.400.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.565.739.852,00	9.202.984.000,00	87,10	12.120.740.701,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	42.284.000,00

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	60.000.000,00	0,00	0,00	52.400.000,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	388.094.900,00	175.325.100,00	45,18	492.039.000,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.197.000,00	1.197.000,00	100,00	40.809.636,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	6.060.629.239,00	5.664.749.677,00	93,47	7.787.630.320,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.925.324.560,00	3.937.480.119,00	79,94	4.262.658.334,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	117.083.254,00	102.848.054,00	87,84	361.918.600,00
13	Belanja Modal Alat Studio	722.303.013,00	531.859.760,00	73,63	2.179.706.320,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	47.728.400,00	46.096.000,00	96,58	112.484.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	67.967.200,00	66.600.000,00	97,99	1.175.000.000,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.147.481.138,00	2.046.569.001,00	95,30	3.272.866.919,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	944.865.245,00	898.835.460,00	95,13	986.251.296,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	119.674.800,00	116.429.850,00	97,29	65.678.752,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	61.383.674,00	47.920.920,00	78,07	21.000.000,00
20	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.711.400,00	4.640.000,00	98,48	0,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	142.317.000,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	3.371.703.484,00	3.193.742.004,00	94,72	1.687.300.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	487.442.688,00	454.301.222,00	93,20	1.105.433.301,00
24	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
25	Belanja Modal Alat Pelindung	43.295.000,00	0,00	0,00	59.790.150,00
26	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.000.000,00	198.912.000,00	99,46	864.302.000,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.408.000,00	13.421.800,00	93,16	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.888.834.000,00	2.729.358.100,00	94,48	0,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	666.827.080,00	95,68	727.489.417,00
Jumlah		**39.255.670.619,00**	**35.323.557.737,00**	**89,98**	**39.818.595.746,00**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada **Lampiran 5.5**.

5.1.2.2.3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		233.904.479.133,85	**225.324.831.715,40**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan senilai Rp259.808.320.981,39, dan terealisasi senilai Rp233.904.479.133,85 atau 90,03% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp225.324.831.715,40, maka Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.579.647.418,45 atau 3,81%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan karena adanya Pembangunan Pusat Pemerintah (Program Prioritas Pemerintahan). Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.695.760.221,39	227.300.323.234,73	90,67	219.352.735.033,40
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.596.380.150,00	1.439.338.100,00	90,16	2.913.895.660,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	157.456.965,00	155.403.842,52	98,70	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	172.357.745,00	164.250.000,00	95,30	0,00
5	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.001.365.900,00	4.664.588.861,60	66,62	2.910.704.262,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	180.575.095,00	97,61	147.496.760,00
Jumlah		**259.808.320.981,39**	**233.904.479.133,85**	**90,03**	**225.324.831.715,40**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.6**.

5.1.2.2.4	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		111.466.199.577,39	**179.911.495.381,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dianggarkan senilai Rp128.538.549.399,00, dan terealisasi senilai Rp111.466.199.577,39 atau 86,72% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp179.911.495.381,00, maka Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp68.445.295.803,61 atau 38,04%. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 mengalami penurunan karena adanya kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat

yang memengaruhi postur transfer ke daerah. Pemerintah daerah mengambil langkah melakukan rasionalisasi belanja modal, sehingga belanja modal jalan, irigasi dan jaringan hanya diprioritaskan untuk pemenuhan infrastruktur esensial yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat berdasarkan kesesuaian Rencana Kebutuhan Barag Milik Daerah (RKBMD) SKPD terkait. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan	101.450.778.187,00	87.026.279.349,02	85,78	147.018.815.273,00
2	Belanja Modal Jembatan	7.323.888.177,00	6.183.889.292,37	84,43	14.984.448.120,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	895.824.283,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.003.806.920,00	9.906.125.700,00	99,02	10.093.657.742,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	68.470.000,00	36.844.356,00	53,81	4.220.777.400,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.144.348.000,00	2.102.007.000,00	98,03	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.210.833.000,00	3.879.256.900,00	74,45	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	277.747.000,00	273.435.180,00	98,45	0,00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.058.678.115,00	2.058.361.800,00	99,98	2.697.972.563,00
Jumlah		**128.538.549.399,00**	**111.466.199.577,39**	**86,72**	**179.911.495.381,00**

Adapun rincian anggaran dan ealisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.7**.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.2.2.5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**1.461.196.461,00**	**305.796.700,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.380.431.856,00, dan terealisasi senilai Rp1.461.196.461,00 atau 105,85% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp305.796.700,00, maka Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.155.399.761,00 atau 377,83%. Pelampauan realisasi dikarenakan terdapat kekeliruan pembagian anggaran akun belanja barang dan jasa dan belanja modal pada DPA Dinas Pendidikan dengan RKAS, dimana pelampauan realisasi tersebut terdapat pada akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler dan Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya BOSP-BOS Reguler. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bahan Perpus takaan Tercetak	200.000.000,00	38.612.682,00	19,31	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	300.000.000,00	296.592.000,00	98,86	7.250.000,00
3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	198.646.700,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	99,89	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	664.679.000,00	897.678.200,00	135,05	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	87.069.000,00	99.771.679,00	114,59	0,00
Jumlah		**1.380.431.856,00**	**1.461.196.461,00**	**105,85**	**305.796.700,00**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.8**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.2.2.6	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**1.881.003.468,00**	**925.870.500,00**

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dianggarkan senilai Rp2.057.939.224,00, dan terealisasi senilai Rp1.881.003.468,00 atau 91,40% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp925.870.500,00, maka Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp955.132.968,00 atau 103,16% karena dipengaruhi oleh tingginya volume Belanja Aset Tak Berwujud (ATB) pada tahun berjalan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Lainnya per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.9**.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00**	**0,00**

Belanja Tidak Terduga TA 2025 dianggarkan senilai Rp94.864.820.364,00 yang diprioritaskan untuk mengantisipasi kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan inkrah PT PMJ senilai Rp67.123.757.984,00. Namun demikian, alokasi tersebut tidak direalisasikan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam

pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penggunaan pos Belanja Tidak Terduga. Lebih lanjut, terdapat sisa anggaran Belanja Tidak Terduga senilai Rp26.876.242.016,00 yang dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Pemanfaatan anggaran ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, antara lain untuk penanganan bencana, kejadian luar biasa, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.1.2.4 Belanja Transfer

31 Desember 2025	31 Desember 2024
118.528.344.923,00	**135.490.900.922,00**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat komponen transfer yang terdiri dari transfer/bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Belanja Transfer pada Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dalam kelompok Belanja Transfer/Bagi Hasil dan Belanja Transfer/Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer TA 2025 dianggarkan senilai Rp119.344.429.141,00 dan terealisasi senilai Rp118.528.344.923,00 atau 99,32% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp135.490.900.922,00, maka Belanja Transfer TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp16.962.555.999,00 atau 12,52%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	989.949.241,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	99,31	135.490.900.922,00
Jumlah		**119.344.429.141,00**	**118.528.344.923,00**	**99,32**	**135.490.900.922,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

31 Desember 2025	31 Desember 2024
989.949.241,00	**0,00**

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran anggaran pemerintah, baik pusat ke daerah maupun daerah ke daerah/desa, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana ini berasal dari pendapatan APBN (pajak dan sumber daya alam) atau pendapatan daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu, umumnya bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal.

Belanja Bagi Hasil TA 2025 dianggarkan senilai Rp989.949.241,00, dan terealisasi senilai Rp989.949.241,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp0,00, maka Belanja Bagi Hasil TA 2025 mengalami

kenaikan senilai Rp989.949.241,00 atau 100,00%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	886.812.239,00	886.812.239,00	100,00	0,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	103.137.002,00	100,00	0,00
Jumlah		**989.949.241,00**	**989.949.241,00**	**100,00**	**0,00**

5 1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
117.538.395.682,00	**135.490.900.922,00**

Belanja Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dianggarkan senilai Rp118.354.479.900,00, dan terealisasi senilai Rp117.538.395.682,00 atau 99,31% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp135.490.900.922,00, maka Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp17.952.505.240,00 atau 13,25%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	357.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	117.994.479.900,00	117.178.395.682,00	99,31	105.332.117.922,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	29.801.783.000,00
Jumlah		**118.354.479.900,00**	**117.538.395.682,00**	**99,31**	**135.490.900.922,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5 1.2.4.2.1	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota**	**0,00**	**357.000.000,00,00**

Belanja Bantuan Keuangan Khusus merupakan transfer dana dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang penggunaannya ditetapkan secara spesifik untuk mendukung program prioritas dan kebutuhan strategis daerah. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp357.000.000,00, maka Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp357.000.000,00 atau 100%.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.2.4.2.2	**Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa**	**117.178.395.682,00**	**105.332.117.922,00**

Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 dianggarkan senilai Rp117.994.479.900,00, dan terealisasi senilai Rp117.178.395.682,00 atau 99,31% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp105.332.117.922,00, maka Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp11.846.277.760,00 atau 11,25%. Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2025 terdiri dari Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 dan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap desa TA 2022. Penganggaran atas bagi hasil pajak dan retribusi seharusnya disajikan pada akun transfer bagi hasil pajak dan transfer bagi hasil retribusi dikarenakan adanya kekeliruan dalam menginterpretasikan dalam penempatan akun terkait bantuan keuangan ke pemerintah desa, demikian pula halnya kesalahan penganggaran iuran jaminan kesehatan desa dan aparat desa yang seharusnya disajikan di belanja jasa. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Alokasi Dana Desa	90.608.588.900,00	90.609.418.282,00	100,00	74.877.173.050,00
2	Dana Desa	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	97,02	29.801.783.000,00
3	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	460.500.000,00

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Daerah				
4	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00
5	Jaminan Kesehatan Bagi Kepala dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	120.161.872,00
Jumlah		**117.994.479.900,00**	**117.178.395.682,00**	**99,31**	**105.332.117.922,00**

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.10**.

5.1.2.4.2.3	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa**	**31 Desember 2025** **360.000.000,00**	**31 Desember 2024** **29.801.783.000,00**

Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa TA 2025 dianggarkan senilai Rp360.000.000,00, dan terealisasi senilai Rp360.000.000,00 atau mencapai 100,00% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp29.801.783.000,00, maka Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp29.441.783.000,00 atau 98,79%. Hal ini dikarenakan pada TA 2025 Dana Desa dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	28.923.773.000,00
2	Insentif Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	878.010.000,00
Jumlah		**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**100,00**	**29.801.783.000,00**

5.1.3	**Surplus/Defisit**	**31 Desember 2025** **(87.728.720.631,65)**	**31 Desember 2024** **127.656.173.578,03**

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi total Pendapatan dengan total Belanja dalam kurun waktu satu periode pelaporan. Realisasi total Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp1.078.782.452.324,05

sedangkan realisasi Belanja adalah senilai Rp1.166.511.172.955,70. Dengan demikian, diketahui bahwa Pendapatan Daerah yang diterima lebih kecil dari pada Belanja, atau terjadi Defisit senilai Rp87.728.720.631,65. Realisasi Defisit TA 2025 senilai Rp87.728.720.631,65 atau 21,62% dari anggaran yang ditetapkan senilai minus Rp(405.752.030.025,90). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp127.656.173.578,03 terjadi penurunan Defisit senilai Rp(215.384.894.209,68) atau (168,72)%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Adapun rincian Perhitungan Surplus/Defisit disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45
Rincian Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Penambahan / Pengurangan	%
1	Pendapatan	1.078.782.452.324,05	1.483.899.695.654,45	(405.117.243.330,40)	(27,30)
2	Belanja	(1.166.511.172.955,70)	(1.356.243.522.076,42)	189.732.349.120,72	(13,99)
Jumlah		**(87.728.720.631,65)**	**127.656.173.578,03**	**(215.384.894.209,68)**	**(168,72)**

5.1.4 Pembiayaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
436.022.138.025,90	**308.365.964.447,87**

Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp406.022.138.025,90 dan terealisasi senilai Rp436.022.138.025,90 atau 107,39%. Bila dibandingkan TA 2024 senilai Rp308.365.964.447,87 maka pembiayaan daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp127.656.173.578,03 atau 41,40%. Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
436.022.138.025,90	**308.365.964.447,87**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 terdiri dari Silpa TA sebelumnya senilai Rp436.022.138.025,90. Jika dibandingkan TA 2024 senilai Rp308.365.964.447,87 maka terjadi kenaikan senilai Rp127.656.173.578,03 atau 41,40%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan yang signifikan karena APBD TA 2025 lebih besar dibandingkan TA 2024.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	**0,00**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp30.000.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan TA 2024 senilai Rp0,00, pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk menganggarkan investasi perbankan, tetapi tidak terealisasi, karena investasi tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari atau

sama dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sehingga penempatan dana lebih tepat diklasifikasikan sebagai setara kas, dan tidak memenuhi kriteria sebagai pengeluaran pembiayaan.

5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	348.293.417.394,25	436.022.138.025,90

SiLPA dalam pelaksanaan APBD TA 2025 senilai Rp348.293.417.394,25 yang merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto dan ditambah atas koreksi SiLPA. Bila dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2024 senilai Rp436.022.138.025,90, maka SiLPA tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan senilai Rp87.728.720.631,65 atau 20,12%. Penurunan tersebut disebabkan adanya efisiensi Anggaran Tahun 2025 Melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025. Sehingga terjadi pemangkasan pada belanja Transfer Ke Daerah (TKD).

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Awal mengalami kenaikan yang signifikan karena sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2024 yang menjadi saldo pada TA 2025. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	436.022.138.025,90	308.365.964.447,87

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun - TA sebelumnya dan SiLPA dari pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Belanja TA 2025 ditambah/dikurangi penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih meliputi saldo awal di Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas Dana BOS, Kas Dana BOSP. Kas Dana BOK Puskesmas dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP. Saldo Anggaran Lebih Awal 1 Januari 2025 adalah senilai Rp436.022.138.025,90 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 (*Audited).* Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Awal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.46
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	1-Jan-25	1-Jan-24
1	Kas di Kas Daerah	430.172.961.885,93	304.256.764.871,88
2	Kas di BLUD	4.252.292.429,00	3.055.287.795,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	600.000,00	4.475.000,00
4	Kas Lainnya	2.358.857,00	31.717,02

No	Uraian	1-Jan-25	1-Jan-24
5	Kas Dana BOS	217.132.552,97	286.347.024,97
6	Kas Dana BOSP	37.431.942,00	995.700,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.190.048.036,00	643.060.923,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	149.312.323,00	119.001.416,00
Jumlah		**436.022.138.025,90**	**308.365.964.447,87**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.2.2	**Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**(436.022.138.025,90)**	**(308.365.964.447,87)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 84 disebutkan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan defisit bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pinjaman Daerah. Penggunaan SAL TA 2025 adalah senilai Rp436.022.138.025,90 setelah dikurangi dengan koreksi SiLPA atas koreksi saldo atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang merupakan pembiayaan TA 2025 dan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada TA 2025.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.2.3	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**	**348.293.417.394,25**	**436.022.138.025,90**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi pengeluaran setelah memperhitungkan pembiayaan neto selama satu periode pelaporan dan koreksi tambah/kurang atas SiLPA. Selain itu, SiLPA dapat pula diperhitungkan dengan menghitung selisih secara langsung antara defisit anggaran dengan Pembiayaan Neto setelah memperhitungkan koreksi tambah/kurang atas SiLPA.

Realisasi SiLPA pada TA 2025 yaitu senilai Rp348.293.417.394,25 dan jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp436.022.138.025,90, maka SiLPA pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp87.728.720.631,65 atau 20,12%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya defisit anggaran karena adanya efisiensi belanja, dan penerimaan pembiayaan yang lebih rendah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan penyesuaian pos yang memengaruhi saldo awal SAL tahun anggaran TA 2025 senilai Rp0,00 dan sedangkan pada TA 2024 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada TA 2025.

5.2.5 Lain – Lain	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	0,00

Lain-Lain pada LPSAL merupakan penyesuaian pos yang mempengaruhi saldo akhir tahun anggaran TA 2025 senilai Rp0,00 dan sedangkan pada TA 2024 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada TA 2025.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	348.293.417.394,25	436.022.138.025,90

Berdasarkan LPSAL Pemerintah Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp348.293.417.394,25. LPSAL mengalami penurunan yang signifikan karena APBD TA 2025 lebih kecil dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya defisit anggaran karena adanya efisiensi belanja, dan penerimaan pembiayaan yang lebih rendah. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025

No	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Sisa Anggaran
Kas yang dibatasi Penggunaannya:		**187.962.791.773,94**
1	DAU SG Bidang Kesehatan	197.045.852,00
2	DAU SG Bidang Pendidikan	5.007.317.307,00
3	Dukungan Penggajian PPPK	0,00
4	DAK FISIK	2,00
5	Insentif Fiskal	837.830.140,00
6	DBH Sawit	301.429.378,79
7	Hibah Rehabilitasi Pascabencana dan BNPB	6.517.253.070,33
8	Silpa BLUD	4.161.619.400,95
9	Silpa Dana BOS	401.488.030,97
10	Silpa Dana Kapitasi pada FKTP	238.238,90

No	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Sisa Anggaran
11	Kas Lainnya_Pajak belum setor	438.600,00
12	Silpa Dana BOSP	7.246.220,00
13	Silpa Dana BOK Puskesmas	295.534.533,00
14	Lebih Bayar DBH Pajak Bagian Daerah PBB Panas Bumi	162.099.000,00
15	Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi	1.171.410.000,00
16	Lebih Bayar DBH SDA Landrent	38.411.000,00
17	Lebih Bayar DBH SDA Royalti	159.770.097.000,00
18	Lebih Bayar DBH SDA PSDH	1.799.497.000,00
19	Lebih Bayar DBH SDA Perikanan	1.361.621.000,00
20	Lebih Bayar DBH SDA Perkebunaan Sawit	5.932.216.000,00
Kas yang tidak dibatasi Penggunaannya:		**160.330.625.620,31**
1	Kas yang tidak dibatasi penggunaannya	160.330.625.620,31
JUMLAH		**348.293.417.394,25**

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai total Aset senilai Rp4.141.311.204.079,80, total Kewajiban senilai Rp243.274.217.607,28, dan total Ekuitas senilai Rp3.897.458.504.755,82. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024, yaitu total Aset senilai Rp3.752.828.955.536,36, total Kewajiban senilai Rp142.458.748.052,58, dan Ekuitas senilai Rp3.610.370.207.483,78, maka terdapat kenaikan Aset senilai Rp388.482.248.543,44 atau 10,35%, kenaikan Kewajiban senilai Rp101.393.951.27 1,40 atau 71,17%, serta kenaikan Ekuitas senilai Rp287.088.297.272,04 atau 7,95%.

Terdapat kenaikan Aset pada tahun 2025 senilai Rp388.482.248.543,44 atau 10,35%, kenaikan Kewajiban pada TA 2025 senilai Rp100.815.469.554,70 atau 70,77% dan kenaikan nilai Ekuitas pada TA 2025 senilai Rp287.088.297.272,04 atau 7,95%. Hal tersebut akan dijabarkan dengan rinci atas masing-masing akun Neraca sebagai berikut.

5.3.1 Aset

31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.186.032.793.353,90	**3.752.828.955.536,36**

Saldo Aset per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.186.032.793.353,90 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.752.828.955.536,36, maka terdapat kenaikan saldo Aset senilai Rp433.203.837.817,54 atau 11,54%. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Adapun rincian aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.48
Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Aset Lancar	866.157.777.816,05	672.241.039.172,90	193.916.738.643,15	28,85
2	Investasi Jangka Panjang	148.593.447.042,11	103.690.906.609,54	44.902.540.432,57	43,30
3	Aset Tetap	3.082.254.520.372,60	2.845.832.663.067,82	236.421.857.304,78	8,31
4	Aset Lainnya	89.027.048.123,14	131.064.346.686,10	(42.037.298.562,96)	(32,07)
Jumlah		**4.186.032.793.353,90**	**3.752.828.955.536,36**	**433.203.837.817,54**	**11,54**

Adapun penjelasan rincian Aset sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
866.157.777.816,05	**672.241.039.172,90**

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan untuk dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Piutang, dan Persediaan. Rincian disajikan sebagai berikut.

a. Kas dan Setara Kas meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas;

b. Pos-pos Piutang antara lain Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya dan Penyisihan Piutang;

c. Beban Dibayar Dimuka; dan

d. Persediaan mencakup Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai diantaranya merupakan perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang akan diserahkan ke masyarakat.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp866.157.777.816,05 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp672.241.039.172,90, maka terdapat kenaikan saldo aset lancar senilai Rp193.916.738.643,15 atau 28,85%. Adapun rincian saldo aset lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Kas dan Setara Kas	348.295.864.474,25	436.035.274.872,90	(87.739.410.398,65)	(20,12)
2	Piutang Pajak Daerah	3.437.362.186,00	2.938.545.467,00	498.816.719,00	16,97
3	Piutang Retribusi Daerah	67.382.337,00	33.697.944,00	33.684.393,00	99,96
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.164.197.214,49	(1.164.197.214,49)	(100,00)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	349.279.261.000,00	63.174.239.000,00	286.105.022.000,00	452,88
6	Piutang Transfer Antar Daerah	29.962.545.759,00	19.308.478.465,00	10.654.067.294,00	55,18
7	Piutang Lainnya	1.234.837.507,00	1.984.414.780,81	(749.577.273,81)	(37,77)
8	Penyisihan Piutang	(3.002.117.352,02)	(1.391.757.105,64)	(1.610.360.246,38)	115,71
9	Beban Dibayar Dimuka	382.390.966,67	4.154.148.705,00	(3.771.757.738,33)	(90,79)
10	Persediaan	136.500.250.938,15	144.839.799.829,34	(8.339.548.891,19)	(5,76)
Jumlah		**866.157.777.816,05**	**672.241.039.172,90**	**193.916.738.643,15**	**28,85**

Rincian Aset Lancar dijelaskan sebagai berikut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.1	**Kas dan Setara Kas**	**348.295.864.474,25**	**436.035.274.872,90**

Saldo Kas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp348.295.864.474,25 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp436.035.274.872,90, maka terdapat penurunan saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp87.739.410.398,65 atau 20,12%. Adapun rincian Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50
Saldo Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Kas di Kas Daerah	343.429.299.450,43	430.172.961.885,93	(86.743.662.435,50)	(20,16)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.392.000,00	(2.392.000,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	4.161.619.400,95	4.256.815.368,00	(95.195.967,05)	(2,24)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	238.238,90	149.312.323,00	(149.074.084,10)	(99,84)
6	Kas Lainnya	438.600,00	5.529.955,00	(5.091.355,00)	(92,07)
7	Kas Dana BOSP	408.734.250,97	258.215.304,97	150.518.946,00	58,29
8	Kas Dana BOK Puskesmas	295.534.533,00	1.190.048.036,00	(894.513.503,00)	(75,17)
Jumlah		**348.295.864.474,25**	**436.035.274.872,90**	**(87.739.410.398,65)**	**(20,12)**

Rincian Kas dan Setara Kas dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah | **31 Desember 2025** | **31 Desember 2024**
343.429.299.450,43 | **430.172.961.885,93**

Kas di Kas Daerah merupakan Rekening Kas Umum Daerah untuk mengelola seluruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka melayani kebutuhan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp343.429.299.450,43 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp430.172.961.885,93, maka terdapat penurunan saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp86.743.662.435,50 atau 20,16%. Saldo Kas di Kas Daerah merupakan posisi saldo pada rekening giro Pemerintah Kabupaten Tana Tidung senilai Rp343.429.299.450,43 yang merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum dengan rekening koran Bankaltimtara Kantor Cabang Tideng Pale Nomor Rekening 0141300016. Adapun rincian Kas di Kas Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.51
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Bank	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Bank Kaltimtara	Rekening KUD Kab Tana Tidung	343.429.299.450,43	430.124.733.328,93
2	Bank Kaltimtara	Pengembalian Kelebihan atas Piutang Uang Muka	0,00	48.228.557,00
Jumlah			**343.429.299.450,43**	**430.172.961.885,93**

Penjelasan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut buku kas umum dan rekening koran dapat dilihat pada **Lampiran 5.11**.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	2.392.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh Kas, baik saldo rekening di Bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.392.000,00, maka terdapat penurunan saldo Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp2.392.000,00 atau 100,00%. Penurunan saldo menjadi Rp0,00 (nihil) pada akhir TA 2025 karena seluruh penerimaan daerah yang dipungut oleh bendahara penerimaan selama tahun berjalan telah disetorkan secara tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum batas akhir penutupan buku per 31 Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 merupakan sisa penerimaan akhir tahun yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada awal tahun anggaran berikutnya.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir TA belum disetor/dipertanggungjawabkan ke Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau 0,00%.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	4.161.619.400,95	4.256.815.368,00

Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.161.619.400,95 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp4.256.815.368,00, maka terdapat penurunan saldo Kas BLUD senilai Rp95.195.967,05 atau 2,24%. Adapun rincian saldo kas BLUD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52
Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Puskesmas Tideng Pale	399.929.125,00	0,00	399.929.125,00	100,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	344.975.876,52	0,00	344.975.876,52	100,00

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
3	Puskesmas Tana Lia	104.621.641,19	0,00	104.621.641,19	100,00
4	Puskesmas Kujau	182.804.905,00	0,00	182.804.905,00	100,00
5	Puskesmas Muruk Rian	57.185.940,24	0,00	57.185.940,24	100,00
6	RSUD Akhmad Berahim	3.072.101.913,00	4.256.815.368,00	(1.184.713.455,00)	(27,83)
Jumlah		**4.161.619.400,95**	**4.256.815.368,00**	**(95.195.967,05)**	**(2,24)**

5.3.1.1.1.5	**Kas Dana Kapitasi pada FKTP**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		238.238,90	**149.312.323,00**

Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2021. Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp238.238,90 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp149.312.323,00, maka terdapat penurunan saldo Kas di FKTP senilai Rp149.074.084,10 atau 99,84%. Adapun rincian saldo kas dana kapitasi FKTP pada FKTP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.53
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Puskesmas Tideng Pale	0,00	244.105,00	(244.105,00)	(100,00)
2	Puskesmas Sesayap Hilir	0,00	26.448.201,00	(26.448.201,00)	(100,00)
3	Puskesmas Tana Lia	0,00	49.847.078,00	(49.847.078,00)	(100,00)
4	Puskesmas Kujau	0,00	52.175.308,00	(52.175.308,00)	(100,00)
5	RSUD Akhmad Berahim	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Muruk Rian	0,00	20.597.631,00	(20.597.631,00)	(100,00)
7	RS Pratama Tanjung Keramat	238.238,90	0,00	238.238,90	100,00
Jumlah		**238.238,90**	**149.312.323,00**	**(149.074.084,10)**	**99,84**

Adapun penjelasan Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada **Lampiran 5.12**.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
438.600,00	5.529.955,00

Kas Lainnya mencakup saldo pungutan atau potongan perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang telah dipotong dari pembayaran atas belanja barang namun belum disetorkan ke kas negara hingga akhir periode pelaporan TA 2025. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp438.600,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp5.529.955,00, maka terdapat penurunan saldo kas lainnya senilai Rp5.091.355,00 atau 92,07%. Adapun rincian Kas Lainnya atas yang belum ditarik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Penyetoran Pajak PPh 23 BOP Melampaui TA	110.600,00	1.068.000,00	(957.400,00)	(89,64)
2	Penyetoran PPN BOP Melampaui TA	328.000,00	4.461.955,00	(4.133.955,00)	(92,65)
Jumlah		**438.600,00**	**5.529.955,00**	**(5.091.355,00)**	**(92,07)**

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOSP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
408.734.250,97	258.215.304,97

Kas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari kas Bos pusat senilai Rp401.488.030,97, kas dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atas PAUD dan Pendidikan Kesetaraan senilai Rp7.246.220,00. Adapun rincian Kas Dana BOS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.55
Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Kas Dana BOS	401.488.030,97	220.783.362,97
2	Kas Dana BOP	7.246.220,00	37.431.942,00
Jumlah		**408.734.250,97**	**258.215.304,97**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.1.7.1	**Kas Dana BOS**	**401.488.030,97**	**220.783.362,97**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan. Dana bos dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur pengelolaan dana BOS yaitu Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 dan PMK 119/PMK.07/2021. Saldo Dana BOS per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp401.488.030,97 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp220.783.362,97, maka terdapat kenaikan saldo Dana BOS senilai Rp180.704.688,00 atau 81,85%. Adapun rincian Kas Dana BOS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56
Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember	
		2025	2024
1	**Saldo BOS**	**399.421.678,97**	**211.159.173,97**
2	**Pajak Makan Minum yang disetorkan Melampaui TA**	**0,00**	**2.802.281,00**
3	**Saldo Kas di Bendahara Sekolah (Utang PFK yang belum disetorkan**	**2.066.352,00**	**6.821.908,00**
	a SDN 005 Tana Tidung	0,00	313.182,00
	b SDN 12 Tana Tidung	0,00	312.360,00
	c SMPN 07 Tana Tidung	0,00	2.545.556,00
	d SDN 013 Tana Tidung	0,00	3.650.810,00
	e SDN 001 Tana Tidung	374.960,00	0,00
	f SDN TU 1 Tana Tidung	330.723,00	0,00
	g SMPN TU 2 Tana tidung	1.360.669,00	0,00
Jumlah		**401.488.030,97**	**220.783.362,97**

Dari tabel di atas, saldo dana bos terdiri dari kas sisa lebih belanja dan utang PFK yang dipungut oleh Bendahara Sekolah atas transaksi belanja tahun 2025 namun belum disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun rincian Kas di Bendahara Dana BOS sebelum ditambah dengan Pajak Makan Minum dan Pajak Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetor dapat dilihat pada **Lampiran 5.13**.

5.3.1.1.1.7.2 Kas Dana BOP	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	7.246.220,00	37.431.942,00

Kas Dana BOP terdiri atas Kas BOSP Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada sekolah dilingkungan Kabupaten Tana Tidung dengan ketentuan sisa saldo kas disetorkan kembali dan kas daerah per 31 Desember 2025, saldo Dana BOP daerah Rp0,00 namun dalam akun ini tercatat juga kas dana BOP Kesetaraan. BOP kesetaraan TKDD melalui DAK non fisik BOP Kesetaraan dan BOP Sanggar Kegiatan Belajar PAUD. Salah satu jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota, selain pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, adalah pendidikan kesetaraan. Sesuai dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 2 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.Sesuai dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 2 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

Saldo Dana BOP per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp7.246.220,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp37.431.942,00, maka terdapat penurunan saldo Dana BOP senilai Rp30.185.722,00 atau 80,64%. Adapun rincian Kas BOP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Saldo Kas Dana BOP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Kas BOP Sanggar Kegiatan Belajar PAUD	294.000,00	3.396.000,00	(3.102.000,00)	(91,34)
2	Kas BOP Sanggar Kegiatan Belajar Kesetaraan	6.952.220,00	34.035.942,00	(27.083.722,00)	(79,57)
Jumlah		**7.246.220,00**	**37.431.942,00**	**(30.185.722,00)**	**(80,64)**

5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	295.534.533,00	1.190.048.036,00

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan diatur sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOK pusat kesehatan masyarakat pada pemerintah daerah.

Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp295.534.533,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.190.048.036,00, maka terdapat penurunan saldo dana BOK puskesmas senilai Rp894.513.503,00 atau 75,17%. Adapun rincian saldo dana BOK puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Puskesmas Tideng Pale	68.834.998,00	513.641.774,00	(444.806.776,00)	(86,60)
2	Puskesmas Sesayap Hilir	15.435.812,00	158.299.688,00	(142.863.876,00)	(90,25)
3	Puskesmas Tana Lia	42.306.450,00	120.153.970,00	(77.847.520,00)	(64,79)
4	Puskesmas Kujau	96.894.704,00	222.694.366,00	(125.799.662,00)	(56,49)
6	Puskesmas Muruk Rian	72.062.569,00	175.258.238,00	(103.195.669,00)	(58,88)
Jumlah		**295.534.533,00**	**1.190.048.036,00**	**(894.513.503,00)**	**(75,17)**

5.3.1.1.2 Setara Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	**0,00**

Setara kas adalah investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik, setara kas per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 karena Setara kas telah disetorkan kembali ke RKUD sesuai dengan penjelasan berikut.

a. Deposito senilai Rp75.000.000.000,00 disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2025 dan dikembalikan ke RKUD pada tanggal 19 Desember 2025.

b. Deposito senilai Rp25.000.000.000,00 disetorkan ke Bank Kaltimtara pada tanggal 6 Oktober 2025 dan dikembalikan ke RKUD pada tanggal 19 Desember 2025.

c. Deposito senilai Rp 150.000.000.000,00 disetorkan ke Bank Negara Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2025 dan dikembalikan ke RKUD pada tanggal 19 Desember 2025.

5.3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.437.362.186,00	**2.938.545.467,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.437.362.186,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.938.545.467,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Pajak Daerah senilai Rp498.816.719,00 atau 16,98%. Adapun rincian Piutang Pajak

Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.59
Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Piutang Pajak Restoran	0,00	3.904.761.791,00	3.903.741.791,00	1.020.000,00
2	Piutang Pajak Reklame	0,00	20.049.081,00	18.950.430,00	1.098.651,00
3	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	7.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
4	Piutang Pajak MBLB	9.860.752,00	584.970.125,00	576.495.777,00	18.335.100,00
5	Piutang PBB-P2	2.928.684.715,00	812.903.344,00	381.340.986,00	3.360.247.073,00
6	Piutang BPJT-Tenaga Listrik	0,00	2.338.444.245,00	2.286.782.883,00	51.661.362,00
Jumlah		**2.938.545.467,00**	**7.668.128.586,00**	**7.169.311.867,00**	**3.437.362.186,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Restoran

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.020.000,00	0,00

Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.020.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang pajak restoran senilai Rp1.020.000,00 atau 100%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan penetapan senilai Rp3.904.761.791,00 dan terealisasi Rp3.903.741.791,00 sehingga terdapat piutang senilai Rp1.020.000,00 atas dua Wajib Pajak yang belum menyetorkan Pajak Restoran ke RKUD.

5.3.1.1.3.2 Piutang Pajak Reklame

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.098.651,00	0,00

Saldo Piutang Pajak Reklame papan/Billboard/Videotron per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.098.651,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang pajak reklame papan/Billboard/Videotron senilai Rp1.098.651,00 atau 100%. Adapun rincian Piutang Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.60
Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Reklame Baliho	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
2	Reklame Papan/Billboard	0,00	1.912.830,00	1.912.830,00	0,00

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
3	Reklame Billboard	0,00	494.667,00	494.667,00	0,00
4	Reklame Neon Sigh/Box	0,00	5.919.666,00	4.821.015,00	1.098.651,00
5	Reklame Kain	0,00	7.657.500,00	7.657.500,00	0,00
6	Reklame Berjalan	0,00	3.512.030,00	3.512.030,00	0,00
7	Reklame Spanduk	0,00	159.688,00	159.688,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**20.049.081,00**	**18.950.430,00**	**1.098.651,00**

Dari tabel di atas, Reklame Neon Sigh/Box dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Terdapat piutang TA 2024 yang baru tercatat pada TA 2025 senilai Rp196.188,00.

b. Terdapat piutang TA 2025 senilai Rp902.463,00 yang merupakan selisih antara nilai penetapan senilai Rp5.723.478,00 dan terealisasi senilai Rp4.821.015,00.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.3.3	**Piutang Pajak Sarang Burung Walet**	**5.000.000,00**	**0,00**

Saldo piutang pajak sarang burung walet per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.000.000,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang pajak sarang burung walet senilai Rp5.000.000,00 atau 100%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan Penetapan senilai Rp7.000.000,00 dan terealisasi Rp2.000.000,00 sehingga terdapat piutang senilai Rp5.000.000,00 atas 1 (satu) Wajib Pajak yang belum menyetorkan ke RKUD.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.3.4	**Piutang Pajak Mineral bukan Logam**	**18.335.100,00**	**9.860.752,00**

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp18.335.100,00 dan jika dibanding saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp9.860.752,,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang pajak mineral bukan logam senilai Rp8.474.348,00 atau 85,94%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan terdapat koreksi saldo awal atas piutang TA 2024 yang tidak tercatat pada TA 2025 senilai Rp18.335.100,00 dan belum tersetor ke RKUD.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.3.5	**Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**	**3.360.247.073,00**	**2.928.684.715,00**

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.360.247.073,00,00, dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp Rp2.928.684.715,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang PBB P2 senilai Rp431.562.358,00 atau 14,74%. Secara keseluruhan Piutang Pajak tersebut merupakan Piutang PBB-P2. Adapun rincian Piutang PBB-P2 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.61
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

No	Uraian	Penambah Piutang	Pengurang Piutang	Saldo Piutang Pajak
1	Saldo Awal TA 2025	0,00	0,00	2.928.684.715,00
2	Ketetapan PBB-P2 TA 2025	812.903.344,00	0,00	3.741.588.059,00
3	Pembayaran Pokok PBB-P2 TA 2025	0,00	381.340.986,00	3.360.247.073,00

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.3.6	**Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain**	**51.661.362,00**	**0.00**

Saldo Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp51.661.362,00 dan jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang PBJT-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain senilai Rp51.661.362,00 atau 100%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan Penetapan senilai Rp2.338.444.245,00 dan terealisasi Rp2.286.782.883,,00 sehingga terdapat piutang senilai Rp51.661.362,00 atas satu Wajib Pajak yang belum menyetorkan Pajak ke RKUD.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.4	**Piutang Retribusi Daerah**	**67.382.337,00**	**33.697.944,00**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.382.337,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp33.697.944,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi senilai Rp33.684.393,00 atau 99,96%. Kenaikan tersebut karena terdapat Piutang Retribusi Jasa Umum senilai Rp33.684.393,00 dan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Rp33.697.944,00. Adapun rincian Piutang Retribusi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.62

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	1.227.985.886,00	1.194.301.493,00	33.684.393,00
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	673.376.913,00	673.376.913,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	33.697.944,00	24.727.319,00	24.727.319,00	33.697.944,00
Jumlah		**33.697.944,00**	**1.926.090.118,00**	**1.892.405.725,00**	**67.382.337,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.4.1	**Piutang Retribusi Jasa Umum**	**33.684.393,00**	**0,00**

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.684.393,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi senilai Rp33.684.393,00 atau 100,00%. Kenaikan tersebut karena terdapat Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas senilai Rp33.207.143,00, Retribusi Pelayanan Pasar senilai Rp122.000,00 dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus senilai Rp355.250,00. Adapun rincian Piutang Retribusi Jasa Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.63

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.080.549.886,00	1.047.342.743,00	33.207.143,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	62.778.000,00	62.778.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	72.708.000,00	72.586.000,00	122.000,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	11.950.000,00	11.594.750,00	355.250,00
Jumlah		**0,00**	**1.227.985.886,00**	**1.194.301.493,00**	**33.684.393,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.4.1.1	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**33.207.143,00**	**0,00**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.207.143,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan senilai Rp33.207.143,00 atau 100%, kenaikan tersebut karena terdapat Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD

Akhmad Berahim senilai Rp33.207.143,00. Adapun rincian Piutang Retribusi Jasa Umum disajikan pada tabel berikut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.4.1.1.1	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**	**33.207.143,00**	**0,00**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.207.143,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim senilai Rp33.207.143,00 atau 100%. Kenaikan tersebut atas Piutang pada PT Waskita atas Jasa Pelayanan Umum Tenaga Kerja PT. Waskita (Pasien Umum) senilai Rp28.524.053,00 dan Pasien Umum senilai Rp4.683.090,00 yang belum dibayarkan.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.4.1.2	**Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**	**122.000,00**	**0,00**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp122.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Retribusi pelayanan Pasar senilai Rp122.000,00 atau 100,00%. Piutang tersebut atas Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Adapun rincian saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.64
Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Piutang Lainnya TA 2025	Piutang Lainnya TA 2024
1	Retribusi Los No.10 dan 33 Periode Desember 2025	77.000,00	0,00
2	Retribusi Pelataran Periode 17 Nopember 31 Desember	45.000,00	0,00
Jumlah		**122.000,00**	**0,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.4.1.3	**Piutang Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus**	**355.250,00**	**0,00**

Saldo Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp355.250,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Retribusi penyediaan penyedotan kakus senilai Rp355.250,00 atau 100,00%. Piutang tersebut atas Retribusi penyediaan penyedotan kakus pada DPUPRPKP yang belum tersetorkan senilai Rp350.000, sedangkan senilai Rp5.250,00 merupakan Biaya potongan qris yang seharusnya tidak dikenakan biaya.

5.3.1.1.4.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.4.3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	33.697.944,00	33.697.944,00

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.697.944,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp33.697.944,00 maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu senilai Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.4.3.1 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	33.697.944,00	33.697.944,00

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.697.944,00 dan jika dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi Izin per 31 Desember 2024 senilai Rp33.697.944,00 atau 0,00%, maka tidak terdapat kenaikan atau penurunan saldo. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut atas SKRD Nomor 008/SKRD/PBG/X/2023 dengan satu Wajib Retribusi belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	1.164.197.214,49

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00, dan jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.164.197.214,49, maka terdapat penurunan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp1.164.197.214,49 atau 100%. Adapun rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.65
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan / Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	548.667.136,00	(548.667.136,00)	(100,00)
2	Piutang Pendapatan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan	0,00	4.968.173,00	(4.968.173,00)	(100,00)
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran	0,00	610.561.905,49	(610.561.905,49)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**1.164.197.214,49**	**(1.164.197.214,49)**	**(100,00)**

5.3.1.1.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	349.279.261.000,00	63.174.239.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat Peraturan Perundang- undangan. Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp349.279.261.000,00, dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp63.174.239.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp286.105.022.000,00 atau 452,88%. Penyebab Piutang Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut.

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.
b. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.
c. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025.
d. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Rincian penyaluran Kurang Bayar senilai Rp349.279.196.000,00 dan Rincian penyaluran Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan TA 2024 senilai Rp170.235.351.000,00.

Adapun rincian saldo piutang transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.66
Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Awal Piutang TA 2025	Koreksi Saldo Awal atas Penyelesaian KB PMK Nomor 89 TA 2024	KB yang disalurkan sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025	KB TA 2024 Sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2025 dan 120 Tahun 2025	Saldo Akhir Piutang TA 2025
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Pajak	63.101.901.000,00	14.822.771.000,00	20.784.449.000,00	318.584.406.000,00	346.079.087.000,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam	72.338.000,00	16.995.000,00	23.825.000,00	3.168.656.000,00	3.200.174.000,00
Jumlah		**63.174.239.000,00**	**14.839.766.000,00**	**20.808.274.000,00**	**321.753.062.000,00**	**349.279.261.000,00**

Berikut penjelasan piutang transfer Pemerintah Pusat.

5.3.1.1.6.1 Piutang Transfer Dana Perimbangan DBH Pajak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	346.079.087.000,00	63.101.901.000,00

Berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025 sesuai dengan PMK tersebut disebutkan bahwa kurang bayar DBH pajak kabupaten Tana Tidung senilai Rp346.079.022.000,00 dan PMK Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2025 senilai Rp65.000,00. Kurang bayar tersebut diakui sebagai saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp346.079.087.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp63.101.901.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak senilai Rp282.977.186.000,00 atau 448,44 %. Adapun rincian saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.67
Rincian Piutang Dana Perimbangan DBH Pajak

Uraian	Sado Awal Piutang TA 2025	Koreksi Saldo Awal atas Penyelesaian KB PMK Nomor 89 TA 2024	KB yang disalurkan sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025	KB TA 2024 Sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2025 dan 120 Tahun 2025	Saldo Akhir Piutang TA 2025
PPh	957.688.000,00	224.963.000,00	315.443.000,00	3.885.280.000,00	4.302.562.000,00
PPh Pasal 21	946.820.000,00	222.410.000,00	311.863.000,00	3.465.944.000,00	3.878.491.000,00
PPh Pasal 25/29	10.868.000,00	2.553.000,00	3.580.000,00	419.336.000,00	424.071.000,00
PBB	62.144.212.000,00	14.597.807.000,00	20.469.006.000,00	314.699.061.000,00	341.776.460.000,00
Bagi Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Daerah	62.144.210.000,00	14.597.805.000,00	20.469.006.000,00	314.699.061.000,00	341.776.460.000,00
Bagian Daerah Migas	0,00	0,00	0,00	5.527.042.000,00	5.527.042.000,00
Bagian Daerah Non Migas	61.876.376.000,00	14.534.890.000,00	20.380.787.000,00	306.638.899.000,00	333.599.598.000,00
Bagian Daerah Perhutanan	195.925.000,00	46.023.000,00	64.534.000,00	1.926.028.000,00	2.011.396.000,00
Bagian Daerah Perkebunan	1.000,00	1.000,00	0,00	384.764.000,00	384.764.000,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya	71.908.000,00	16.891.000,00	23.685.000,00	222.328.000,00	253.660.000,00
Biaya Pemungutan	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan Non Migas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CHT	1.000,00	1.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Jumlah	**63.101.901.000,00**	**14.822.771.000,00**	**20.784.449.000,00**	**318.584.406.000,00**	**346.079.087.000,00**

5.3.1.1.6.2 Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	3.200.174.000,00	72.337.000,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada TA 2023 dan TA 2024 sesuai dengan KMK tersebut Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.200.174.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp72.337.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam senilai Rp3.127.837.000,00 atau 4.323,92%. Adapun rincian kurang salur yang diakui sebagai piutang bagi hasil bukan pajak dan sumber daya alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.68
Rincian Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam

Uraian	Saldo Awal Piutang TA 2025	Koreksi Saldo Awal atas Penyelesaian KB PMK Nomor 89 TA 2024	KB yang disalurkan sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025	KB TA 2024 Sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2025 dan 120 Tahun 2025	Saldo Akhir Piutang TA 2025
Migas	72.335.000,00	16.992.000,00	23.825.000,00	1.420.783.000,00	1.452.301.000,00
Minyak Bumi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gas Bumi	72.334.000,00	16.991.000,00	23.825.000,00	1.420.783.000,00	1.452.301.000,00
Minerba-Royalti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kehutanan	1.000,00	1.000,00	0	1.747.873.000,00	1.747.873.000,00
IIUPH	0,00	0,00	0,00	718.392.000,00	718.392.000,00
PSDH	1.000,00	1.000,00	0,00	1.029.481.000,00	1.029.481.000,00
Jumlah	**72.338.000,00**	**16.995.000,00**	**23.825.000,00**	**3.168.656.000,00**	**3.200.174.000,00**

5.3.1.1.7 Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	29.962.545.759,00	19.308.478.465,00

Saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp29.962.545.759,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp19.308.478.465,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp10.654.067.294,00 atau 55,18%. Penyebab Piutang Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut.

a. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota TA 2023, dicatat kurang salur senilai Rp3.865.855.510,00.

b. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/128/2025 tentang Penetapan Defnitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota TA 2024, dicatat kurang salur senilai Rp13.446.596.141,00.

c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/55/2026 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota TA 2025, dicatat kurang salur senilai Rp12.650.094.108,00.

Adapun rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.69
Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.275.303.394,00	960.754.589,00	1.041.729.317,00	1.194.328.666,00
2	Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.232.952.062,00	792.279.984,00	1.006.109.112,00	1.019.122.934,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	16.638.524.826,00	50.934.452.301,00	40.076.502.956,00	27.496.474.171,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	161.698.183,00	536.846.819,00	445.925.014,00	252.619.988,00
5	Pajak Rokok	0,00	3.633.581.130,00	3.633.581.130,00	0,00
Jumlah		**19.308.478.465,00**	**56.857.914.823,00**	**46.203.847.529,00**	**29.962.545.759,00**

Penjelasan Piutang Transfer DBH Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut.

a. Saldo awal PKB senilai Rp1.275.303.394,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp939.267.988,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp21.486.601,00 dengan jumlah senilai Rp960.754.589,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar PKB TA 2025 senilai Rp1.041.729.317,00, sehingga saldo akhir senilai Rp1.194.328.666,00.

b. Saldo awal BBN-KB senilai Rp1.232.952.062,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp772.532.520,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp19.747.464,00 dengan jumlah senilai Rp792.279.984,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar BBN-KB TA 2025 senilai Rp1.006.109.112,00, sehingga saldo akhir senilai Rp1.019.122.934,00.

c. Saldo awal PBB-KB senilai Rp16.638.524.826,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2023 pada TA 2025 sesuai dengan Pergub Nomor 188.44/K.89 senilai Rp20.799.081,00, ditambah nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp11.628.875.008,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp39.284.778.212,00 dengan jumlah senilai Rp50.934.452.301,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar PBB-KB senilai Rp40.076.502.956,00, sehingga saldo akhir senilai Rp27.496.474.171,00.

d. Saldo awal PAP senilai Rp161.698.183,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp105.920.625,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp430.926.194,00 dengan jumlah senilai Rp536.846.819,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar PAP TA 2025 senilai Rp445.925.014,00, sehingga saldo akhir senilai Rp252.619.988,00.

e. Saldo awal Pajak Rokok senilai Rp0,00, terdapat mutasi masuk atas nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp3.633.581.130,00 sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar Pajak Rokok TA 2025 senilai Rp3.633.681.130,00, sehingga saldo akhir senilai Rp0,00.

5.3.1.1.8	**Piutang Lainnya**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		1.234.837.507,00	**1.984.414.780,81**

Saldo Piutang Lainnya atas Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.234.837.507,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.984.414.780,81, maka terdapat penurunan saldo Piutang Lainnya atas Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp749.577.273,81 atau 37,77%. Penurunan dikarenakan Uang Muka pengadaan telah dipotong pada Berita Acara Pembayaran. Adapun rincian piutang lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70
Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024
1	Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Kabupaten Tana Tidung (MTL)	0,00	329.325.333,77
2	Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung (MTL)	0,00	299.047.899,67
3	Pembangunan Masjid Menjelutung (MTL)	0,00	178.783.922,00
4	Pembangunan Jembatan Sei Sebawang	0,00	1.177.257.625,37
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	631.250.000,00	0,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	603.587.507,00	0,00
Jumlah		**1.234.837.507,00**	**1.984.414.780,81**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.8.1	**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**1.234.837.507,00**	**0,00**

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Senilai Rp1.234.837.507,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan Senilai Rp1.234.837.507,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 Senilai Rp0,00. Kenaikan ini disebabkan adanya perubahan metode pencatatan atas Kerugian Daerah yang telah ditetapkan yang sebelumnya dicatat pada Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Adapun Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.71
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	631.250.000,00	0,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	603.587.507,00	0,00
Jumlah		**1.234.837.507,00**	**0,00**

5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang | **31 Desember 2025** | **31 Desember 2024**
(3.002.117.352,02) | **(1.391.757.105,64)**

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp3.002.117.352,02) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.391.757.105,64), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp1.610.360.246,38) atau 115,71%. Adapun rincian Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.72
Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.767.046.800,06)	(1.388.387.311,24)	(378.659.488,82)	(27,27)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.369.794,40)	(3.369.794,40)	0,00	0,00
3	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.231.700.757,56)	0,00	(1.231.700.757,56)	0,00
Jumlah		**(3.002.117.352,02)**	**(1.391.757.105,64)**	**(1.610.360.246,38)**	**115,71**

Adapun Piutang dan Penyisihan Piutang tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Pajak | **31 Desember 2025** | **31 Desember 2024**
(1.767.046.800,06) | **(1.388.387.311,24)**

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.767.046.800,06) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.388.387.311,24), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp378.659.488,82) atau 27,27%. Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73
Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	Piutang Pajak Restoran	1.020.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2	Piiutang Pajak Reklame	1.098.651,00	4.512,32	19.618,80	0,00	0,00	24.131,12
3	Piutang Pajak Sarang Burung Wallet	5.000.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
4	Piutang Pajak MBLB	18.335.100,00	0,00	1.833.510,00	0,00	0,00	1.833.510,00
5	Piutang PBBP2	3.360.247.073,00	2.811.001,96	47.308.285,00	610.182.367,00	1.104.599.098,00	1.764.900.751,96
6	Piutang PBJT – Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	51.661.362,00	258.306,98	0,00	0,00	0,00	258.306,98
Jumlah		**3.437.362.186,00**	**3.103.921,26**	**49.161.413,80**	**610.182.367,00**	**1.104.599.098,00**	**1.767.046.800,06**

Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.14**.

5.3.1.1.9.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Restoran — **31 Desember 2025: (5.100,00)** — **31 Desember 2024: (0,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Restoran-Restoran dan Sejenisnya per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp5.100,00) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp5.100,00) atau 100,00%. Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.74
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	Rumah Makan Sederhana	420.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2	Warung Ampera Bundo	600.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Jumlah		**1.020.000,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**

5.3.1.1.9.1.2 Penyisihan Piutang Pajak Reklame — **31 Desember 2025: (24.131,12)** — **31 Desember 2024: (0,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Reklame per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp24.131,12) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp24.131,12) atau 100,00%. Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.75
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	PT. Global Jet Express	706.275,00	3.531,38	0,00	0,00	0,00	3.531,38
2	PT. PLN Cabang Tideng Pale	392.376,00	980,94	19.618,80	0,00	0,00	20.599,74
Jumlah		**1.098.651,00**	**4.512,32**	**19.618,80**	**0,00**	**0,00**	**24.131,12**

5.3.1.1.9.1.3 Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik — **31 Desember 2025: (258.306,98)** — **31 Desember 2024: (0,00)**

Saldo Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp258.306,98) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp258.306,98) atau 100,00%. Kenaikan tersebut dikarenakan piutang PBJT-Tenaga Listrik oleh tiga Wajib Pajak yang umur piutangnya masih lancar atau kurang dari satu tahun belum menyetorkan PBJT-Tenaga Listrik TA 2025. Adapun rincian Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.76
Rincian Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	Job Pertamina Medco E&P Simenggaris	45.645.996,00	228.230,10	0,00	0,00	0,00	228.230,10
2	PT. Adindo Inhutani Lestari	5.375.009,00	26.875,08	0,00	0,00	0,00	26.875,08
3	PT. Usaha Kaltim Mandiri	640.357,00	3.201,80	0,00	0,00	0,00	3.201,80
Jumlah		**51.661.362,00**	**258.306,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.306,98**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.9.1.4	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(25.000)	(0,00)

Saldo Penyisihan Piutang Sarang Burung Walet per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp25.000) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp0,00) atau 100%. Kenaikan tersebut dikarenakan piutang pajak sarang burung walet oleh satu Wajib Pajak yang umur piutangnya masih lancar atau kurang dari satu tahun belum menyetorkan Walet TA 2025.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.9.1.5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(1.833.510,00)	(0,00)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.833.510,00) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp1.833.510,00) atau 100%. Kenaikan tersebut dikarenakan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan oleh satu Wajib Pajak yang umur piutangnya kurang lancar atau satu sampai dengan dua tahun.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.9.2	Penyisihan Piutang Pajak PBB P2	(1.764.900.751,96)	(1.388.387.311,24)

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.764.900.751,96) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.388.387.311,24), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp376.513.440,72) atau 27,12%. Adapun rincian Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.77
Rincian Penyisihan Piutang Pajak PBB P2 per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun Pajak	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	2025	0,00	2.811.001,96	0,00	0,00	0,00	2.811.001,96
2	2024	545.909.706,00	0,00	47.308.285,00	0,00	0,00	47.308.285,00
3	2023	438.567.822,00	0,00	0,00	209.022.040,00	0,00	209.022.040,00
4	2022	431.358.235,00	0,00	0,00	208.959.799,00	0,00	208.959.799,00

No	Tahun Pajak	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
5	2021	392.894.703,00	0,00	0,00	192.200.528,00	0,00	192.200.528,00
6	2020	380.559.575,00	0,00	0,00	0,00	374.714.670,00	374.714.670,00
7	2019	386.591.076,00	0,00	0,00	0,00	382.203.552,00	382.203.552,00
8	2018	352.803.598,00	0,00	0,00	0,00	347.680.876,00	347.680.876,00
Jumlah		**2.928.684.715,00**	**2.811.001,96**	**47.308.285,00**	**610.182.367,00**	**1.104.599.098,00**	**1.764.900.751,96**

Adapun rincian penyisihan piutang pajak PBB dapat dilihat pada **Lampiran 5.15**.

5.3.1.1.9.2 Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu IMB

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(3.369.794,40)	**(3.369.794,40)**

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp3.369.794,40) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp3.369.794,40), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp0,00) atau 0,00%. Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu oleh Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut atas SKRD Nomor 008/SKRD/PBG/X/2023 dengan satu Wajib Pajak belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.1.1.9.3 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(1.231.700.757,56)	**(0,00)**

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.231.700.757,56) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp 0,00, maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp1.231.700.757,56) atau 100,00%. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5.16**.

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2025	31 Desember 2024
382.390.966,67	**4.154.148.705,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp382.390.966,67 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp4.154.148.705,00, maka terdapat penurunan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp3.771.575.738,33 atau 90,79%. Adapun Beban Dibayar Dimuka TA 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.78
Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Beban Dibayar Dimuka	0,00	3.813.173.705,00	(3.813.173.705,00)	(100,00)
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	381.231.666,67	340.975.000,00	40.256.666,67	11,81
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya	1.159.300,00	0,00	1.159.300,00	100,00
Jumlah		**382.390.966,67**	**4.154.148.705,00**	**(3.771.757.738,33)**	**(90,79)**

5.3.1.1.10.1 Beban Dibayar Dimuka-Hibah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	**3.813.173.705,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka-Hibah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.813.173.705,00, maka terdapat penurunan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp3.813.173.705,00 atau 100,00%. Adapun penurunan Saldo Beban dibayar dimuka dikarenakan pengakuan Beban Hibah Pilkada yang telah di setorkan kembali pada TA 2025, rincian beban hibah pilkada terdiri atas pengakuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp2.716.048.778,00 dan pengakuan hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp1.097.124.927,00.

5.3.1.1.10.1 Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
381.231.666,67	**340.975.000,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp381.231.666,67 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp340.975.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp40.256.666,67 atau 11,81%. Adapun penurunan Saldo Beban dibayar dimuka dikarenakan terdapat tambahan beban sewa dibayar dimuka Sewa Rumah Kantor Perwakilan KTT di Jakarta. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.79
Rincian Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	107.223.333,33	5.833.333,33	101.390.000,00	1.738,11
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	64.166.666,67	67.583.333,33	(3.416.666,66)	(5,06)
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	15.750.000,00	18.000.000,00	(2.250.000,00)	(12,50)
4	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	117.925.000,00	147.225.000,00	(29.300.000,00)	(19,90)
5	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	76.166.666,67	102.333.333,34	(26.166.666,67)	(25,57)
Jumlah		**381.231.666,67**	**340.975.000,00**	**40.256.666,67**	**11.81**

Adapun Beban Dibayar Dimuka Sewa Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 5.17.**

5.3.1.1.10.1	**Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya**	**31 Desember 2025** **1.159.300,00**	**31 Desember 2024** **0,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.159.300,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp1.159.300,00 atau 100,00%. Adapun kenaikan Saldo Beban dibayar dimuka dikarenakan adanya keterlambatan penyerahan buku oleh pihak penyedia yaitu PT. Penerbit Erlangga kepada SDN 024 Tana Tidung senilai Rp1.159.300,00 berdasarkan BA Keterlambatan Penyerahan Buku Dana BOS TA 2025 Nomor 421.7/090/SDN 024/V/BA/2026.

5.3.1.1.11	**Persediaan**	**31 Desember 2025** **136.500.250.938,15**	**31 Desember 2024** **144.839.799.829,34**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp136.500.250.938,15 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp144.839.799.829,34, maka terdapat penurunan saldo Persediaan senilai Rp8.339.548.891,19 atau 5,76%. Persediaan mengalami penurunan disebabkan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman terdapat penurunan nilai persediaan barang yang sudah diserahkan ke masyarakat atau pihak lain serta bahan bangunan dan konstruksi yang sudah tercatat ke aset tetap dikarenakan sudah terpasang. Adapun rincian Persediaan sebagai berikut.

Tabel 5.80
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.759.510.435,00	17.803.086.608,50	(3.043.576.173,50)	(17,10)
2	Bahan Kimia	94.970.219,00	45.776.850,00	49.193.369,00	107,46
3	Bahan Bakar dan Pelumas	8.694.000,00	10.026.200,00	(1.332.200,00)	(13,29)
4	Bahan/Bibit Tanaman	334.500,00	1.884.000,00	(1.549.500,00)	(82,25)
5	Isi Tabung Gas	600.000,00	38.370.000,00	(37.770.000,00)	(98,44)
6	Bahan Lainnya	1.907.724.703,30	2.171.864.061,21	(264.139.357,91)	(12,16)
7	Suku Cadang Alat Angkutan	41.754.000,00	395.000,00	41.359.000,00	10.470,63
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.250.000,00	3.436.858,00	(2.186.858,00)	(63,63)
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	10.861.200,00	10.861.200,00	0,00	0,00
10	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	1.890.000,00	(1.890.000,00)	(100,00)
11	Suku Cadang Alat Pertanian	2.090.000,00	1.600.000,00	490.000,00	30,63
12	Suku Cadang Lainnya	7.770.000,00	107.254.845,00	(99.484.845,00)	(92,76)
13	Alat Tulis Kantor	482.876.287,80	389.908.408,35	92.967.879,45	23,84
14	Kertas dan Cover	366.731.503,10	291.553.125,00	75.178.378,10	25,79
15	Bahan Cetak	231.931.039,00	218.521.502,10	13.409.536,90	6,14
16	Benda Pos	14.302.000,00	5.925.000,00	8.377.000,00	141,38
17	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
18	Bahan Komputer	426.634.291,75	184.325.502,00	242.308.789,75	131,46
19	Perabot Kantor	316.325.761,27	336.719.609,00	(20.393.847,73)	(6,06)
20	Alat Listrik	272.188.154,80	85.657.200,00	186.530.954,80	217,76
21	Perlengkapan Dinas	33.124.910,00	23.000.000,00	10.124.910,00	44,02

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	84.867.280,00	70.642.680,00	14.224.600,00	20,14
23	Suvenir/Cendera Mata	4.215.000,00	10.152.000,00	(5.937.000,00)	(58,48)
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	322.363.787,00	87.570.883,00	234.792.904,00	268,12
25	Obat	5.395.152.497,65	5.079.923.225,17	315.229.272,48	6,21
26	Obat-Obatan Lainnya	229.800,00	2.418.800,00	(2.189.000,00)	(90,50)
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	110.776.852.803,28	117.207.775.795,85	(6.430.922.992,57)	(5,49)
28	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	45.448,00	0,00	45.448,00	100,00
29	Natura	192.199.767,20	93.031.926,16	99.167.841,04	106,60
30	Natura dan Pakan Lainnya	35.175.100,00	904.800,00	34.270.300,00	3.787,61
31	Komponen Rambu-Rambu	705.665.850,00	555.027.750,00	150.638.100,00	27,14
32	Pipa Baja	2.990.600,00	0,00	2.990.600,00	100,00
33	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	500.000,00	296.000,00	204.000,00	68,92
Jumlah		**136.500.250.938,15**	**144.839.799.829,34**	**(8.339.548.891,19)**	**(5,76)**

Adapun persediaan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.18**.

Terdapat barang persediaan yang dimaksud untuk diserahkan ke masyarakat/ pihak lain namun belum dilakukan penyerahan disebabkan oleh:

a. Pekerjaan tersebut baru selesai dikerjakan pada akhir tahun 2025 dan rencana akan dilakukan penyerahan pada tahun 2026.
b. Masih dilakukan proses inventarisasi terhadap persediaan perencanaan-perencanaan fisik yang sudah dikerjakan fisiknya atau tidak dilanjutkan pekerjaannya oleh dinas terkait, nantinya perencanaan yang tercatat pada persediaan tersebut dan tidak dilanjutkan pekerjaannya akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat persediaan yang sudah rusak/usang/kedaluwarsa senilai Rp933.732.763,32 yang sudah dikeluarkan dalam persediaan dan menjadi beban persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81

Rincian Persediaan yang Rusak/Usang/Kedaluwarsa

No	SKPD	Nilai	Kategori	Keterangan
1	Instalasi Farmasi Kabupaten	293.127.152,07	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
2	RSU Tanjung Keramat	15.727.166,47	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
3	RSUD Akhmad Berahim	438.676.441,38	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
4	RSUD Akhmad Berahim	26.947.948,08	Bahan Lainnya	Kedaluwarsa
5	Puskesmas Tana Lia	84.605.508,71	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
6	Puskesmas Tideng Pale	10.131.020,61	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
7	Puskesmas Sesayap Hiir	5.406.272,00	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
8	Puskesmas Muruk Rian	8.791.912,90	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
9	Puskesmas Kujau	7.613.954,00	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.671.730,00	Barang Cetak	Usang
11	Dinas Perhubungan	7.354.657,10	Barang Cetak	Usang
12	Bagian Umum Sekretariat Derah	24.990.000,00	Barang Cetak	Usang
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	689.000,00	Barang Cetak	Usang
Jumlah		**933.732.763,32**		

Adapun rincian persediaan rusak/usang/kedaluwarsa selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.19.**

Terdapat penambahan persediaan yang disebabkan oleh kesalahan penganggaran belanja senilai Rp1.926.079.162,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82

Rincian Penambahan Persediaan dikarenakan Kesalahan Penganggaran

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Salah Pos Belanja Modal KIB B (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	290.698.640,00	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	Salah Pos Belanja Modal KIB C (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	19.851.167,85	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan
3	Salah Pos Belanja Modal KIB D (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	1.012.707.055,00	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan jaringan yang akan diserahkan
4	Salah Pos Belanja Modal BOP (Seharusnya Belanja Barang Persediaan BOP)	34.515.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Belanja Modal BOP
5	Salah Pos Belanja Modal BOS (Seharusnya Belanja Barang Persediaan BOS)	423.543.300,00	Reklasifikasi Masuk Dari Belanja Modal BOS

No	Uraian	Nilai	Keterangan
Jumlah		**1.781.315.162,85**	**Belanja Modal**
1	Salah Pos Belanja Jasa dan Pemeliharaan (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	144.764.000,00	Reklasifikasi Barang Persediaan Dari Belanja Jasa / Pemeliharaan
Jumlah		**144.764.000,00**	**Belanja Jasa/Pemeliharaan**
Total Penambahan Persediaan		**1.926.079.162,85**	

Adapun penambahan persediaan dikarenakan kesalahan penganggaran selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.20**.

Terdapat juga pengurangan persediaan yang disebabkan oleh kesalahan penganggaran belanja senilai Rp3.875.801.346,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83
Rincian Pengurangan persediaan dikarenakan kesalahan Penganggaran

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	3.353.707.042,58	Reklasifikasi ke Aset Tetap Intrakompatabel
2	Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Kapitalisasi Ekstrakompatabel)	173.868.980,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Ekstrakompatabel
3	Salah Pos Belanja Barang Persediaan BOS/BOP (Seharusnya Belanja Modal BOS/BOP)	329.768.700,00	Reklasifiaksi ke Aset tetap Peralatan mesin,Gedung dan Aset Tetap lainnya
Jumlah		**3.857.344.722,58**	
1	Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Jasa)	18.456.623,52	Reklasifikasi ke beban Jasa / Pemeliharaan
Jumlah		**18.456.623,52**	
Total Pengurangan Persediaan		**3.875.801.346,10**	

Adapun pengurangan persediaan dikarenakan kesalahan penganggaran selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.21**.

Terdapat kondisi persediaan perencanaan melewati periode 12 bulan yang tidak bergerak di Neraca senilai Rp1.834.294.000,0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84
Rincian Perencanaan Persediaan yang Melebihi Periode 12 Bulan

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	1.1.7.01.05.01.39	Perencanaan Pemasangan Siring Lahan Masjid Agung Sesayap Hilir	2018	49.742.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
2	1.1.7.01.05.01.47	Perencanaan Gereja Gbi Tideng Pale Sebawang	2018	49.500.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat tidak ada kejelasan status lahan serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
3	1.1.7.01.05.01.48	Perencanaan Gereja Gkpi Desa Sebidai	2018	45.050.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat adanya perubahan lokasi serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini.
4	1.1.7.01.05.01.34	Perencanaan Gereja Katolik Kasai Desa Buong Baru	2018	49.390.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat tidak ada kejelasan status lahan serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
5	1.1.7.01.05.01.43	Perencanaan Gereja Pantekosta	2018	48.565.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat tidak ada kejelasan status lahan serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
6	1.1.7.01.05.01.44	Perencanaan Mushola Istiqomah Rt.I Tanah Merah	2018	48.565.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, masjid telah dibangun oleh masyarakat/desa/CSR
7	1.1.7.01.05.01.36	Perencanaan Mushola Muruk Rian	2018	49.511.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
8	1.1.7.01.05.01.35	Perencanaan Mushola Seputuk	2018	49.538.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
9	1.1.7.01.05.01.57	Perencanaan Pemasangan Patok Gsb	2018	29.744.000,00	Diusulkan untuk penghapusan karena perencanaan tersebut sudah melewati 5 Tahun

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
10	1.1.7.01.05.01.27	Perencanaan Pembangunan Balai Petemuan Adat	2018	291.150.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
11	1.1.7.01.05.01.26	Perencanaan Pembangunan Gereja Bethany	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
12	1.1.7.01.05.01.28	Perencanaan Pembangunan Gkii Desa Gunawan	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat pekerjaan pek. Ta. 2022, 2023 telah di hibahkan
13	1.1.7.01.05.01.56	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Menjelutung	2018	49.885.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
14	1.1.7.01.05.01.58	Perencanaan Pembangunan Kanal Desa Sedulun	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
15	1.1.7.01.05.01.42	Perencanaan Pembangunan Kantor Desa Sesayap	2018	49.885.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
16	1.1.7.01.05.01.37	Perencanaan Pembangunan Masjid Desa Sambungan	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, masjid telah dibangun oleh masyarakat/desa/CSR
17	1.1.7.01.05.01.31	Perencanaan Pembangunan Mushola Selor	2018	49.885.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
18	1.1.7.01.05.01.84	Perencanaan Irigasi Kolam Ikan Pokdatan Minapolitan	2019	99.374.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, Karena termasuk wilayah BWS
19	1.1.7.01.05.01.87	Pembayaran Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Sesayap	2019	58.960.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
20	1.1.7.01.05.01.88	Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Betayau	2019	59.152.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
21	1.1.7.01.05.01.90	Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Muruk Rian	2019	58.932.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
22	1.1.7.01.05.01.89	Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Sesayap Hilir	2019	59.097.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
23	1.1.7.01.05.01.86	Perencanaan Irigasi Minapadi Pokdatan Minapadi Nuong Ubok	2019	99.440.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, Karena termasuk wilayah BWS
24	1.1.7.01.05.01.126	Perencanaan Irigasi Tambak Desa Sengkong	2020	98.560.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, Karena termasuk wilayah BWS
25	1.1.7.01.05.01.125	Perencanaan Jalan Lingkungan Kecamatan Sesayap - Sesayap Hilir	2020	99.000.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
26	1.1.7.01.05.01.120	Perencanaan Pembangunan Irigasi Sawah Kelompok Tani Desa Tengkudacing	2020	99.380.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, karena termasuk wilayah BWS
Total				**1.834.294.000,00**	

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
148.593.447.042,11	**103.690.906.609,54**

Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp148.593.447.042,11 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp103.690.906.609,54, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Jangka Panjang senilai Rp44.902.540.432,57 atau 43,30%. Kenaikan tersebut dikarenakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap TA 2025 memperoleh laba sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Adapun rinciannya sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	**0,00**

Investasi Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan. Nilai Investasi Non Permanen Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 adalah nihil.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

31 Desember 2025	31 Desember 2024
148.593.447.042,11	**103.690.906.609,54**

Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 900/115/K-VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltimtara Provinsi Kalimantan Timur TA 2009. Atas keputusan tersebut Kabupaten Tana Tidung menyertakan modal senilai Rp100.100.000.000,00 pada Bankaltimtara. Penyertaan Modal tersebut menjadi Investasi Jangka Panjang Kabupaten Tana Tidung dan tidak mengalami perubahan sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp100.100.000.000,00. Investasi Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp148.593.447.042,11 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp103.690.906.609,54, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Permanen senilai Rp44.902.540.432,57 atau 43,30%. Terdiri atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung kepada Bankaltimtara Kantor Cabang Tideng Pale senilai Rp100.100.000.000,00 dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap senilai Rp48.493.447.042,11. Adapun rincian Investasi Permanen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.85
Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ penurunan	%
1	Investasi Permanen Pada Bankaltimtara	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen pada Perusahaan Air Minum	48.493.447.042,11	3.590.906.609,54	44.902.540.432,57	1.250,45
Jumlah		**148.593.447.042,11**	**103.690.906.609,54**	**44.902.540.432,57**	**43,30**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.2.2.1	**Investasi Permanen pada Bankaltimtara**	**100.100.000.000,00**	**100.100.000.000,00**

Saldo Investasi Permanen pada Bankaltimtara per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp100.100.000.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp100.100.000.000,00, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo Investasi Permanen pada Bankaltimtara yang merupakan Penyertaan Modal berbentuk saham sebanyak 20.020 lembar saham @Rp5.000.000,00. Penyertaan Modal disajikan menggunakan metode harga perolehan sehingga nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 senilai jumlah total nominal saham terhadap jumlah lembar yang dimiliki. Adapun rincian investasi permanen pada bankaltimtara disajikan pada tabel berikut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.2.2.2	**Investasi Permanen pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum**	**48.493.447.042,11**	**3.590.906.609,54**

Saldo Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp48.493.447.042,11 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.590.906.609,54, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum senilai Rp44.902.540.432,57 atau 1.250,45%. Penyertaan modal disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah, sehingga penyertaan modal setelah dikurangi laba/rugi bersih pada TA 2025. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap mengungkapkan modal dasar berupa:

a. Uang senilai Rp16.000.000.000,00 telah disetorkan ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap; dan
b. Barang dengan nilai perolehan senilai Rp45.024.336.388,00 nilai akumulasi Penyusutan Senilai Rp1.164.472.701,37 dengan nilai buku Senilai Rp43.859.863.686,63.

Penyertaan modal berupa barang dengan nilai buku senilai Rp43.859.863.686,63 dari tiga SKPD yaitu DPUPRPKP senilai Rp43.757.263.682,30, Bagian Pemerintahan Umum senilai Rp15.400.000,00 dan Kecamatan Sesayap senilai Rp87.200.004,33. Adapun rincian investasi permanen pada Perusda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.86
Investasi Permanen ke Perusda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Modal Dasar	3.590.906.609,54	1.269.459.294,04	2.321.447.315,50	182,87
2	Koreksi Laba TA 2024	(380.087.119,35)	1.117.225.376,50	(1.497.312.495,85)	(134,02)
3	Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung	43.859.863.686,63	0,00	43.859.863.686,63	100,00
4	Laba TA 2025	1.422.763.865,29	524.559.939,00	898.203.926,29	171,23
5	Tambahan Modal dari DPUPRPKP	0,00	679.662.000,00	(679.662.000,00)	(100,00)
Jumlah		**48.493.447.042,11**	**3.590.906.609,54**	**44.902.540.432,57**	**1.250,45**

Laporan Keuangan Perusda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dapat dilihat pada **Lampiran 5.22**.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.082.254.520.372,60	**2.845.832.663.067,82**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.082.254.520.372,60 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.845.832.663.067,82, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap senilai Rp236.421.857.304,78 atau 8,31%. Rincian atas Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.87
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Tanah	480.250.499.507,38	444.105.621.898,61	36.144.877.608,77	8,14
2	Peralatan dan Mesin	400.327.614.969,40	368.942.603.056,79	31.385.011.912,61	8,51
3	Gedung dan Bangunan	1.733.804.884.801,55	1.454.317.612.762,93	279.487.272.038,62	19,22
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.405.519.511.462,56	2.333.413.362.850,06	72.106.148.612,50	3,09
5	Aset Tetap Lainnya	30.835.126.317,78	30.049.549.747,30	785.576.570,48	2,61

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	342.318.932.552,84	356.033.937.401,24	(13.715.004.848,40)	(3,85)
7	Akumulasi Penyusutan	(2.310.802.049.238,91)	(2.141.030.024.649,11)	(169.772.024.589,80)	7,93
Jumlah		**3.082.254.520.372,60**	**2.845.832.663.067,82**	**236.421.857.304,78**	**8,31**

Adapun uraian mutasi masuk dan mutasi keluar Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.88
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Tanah	444.105.621.898,61	37.847.509.428,56	1.702.631.819,79	480.250.499.507,38
2	Peralatan dan Mesin	368.942.603.056,79	45.702.788.185,80	14.317.776.273,19	400.327.614.969,40
3	Gedung dan Bangunan	1.454.317.612.762,93	465.449.664.660,10	185.962.392.621,48	1.733.804.884.801,55
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.333.413.362.850,06	163.501.984.533,46	91.395.835.920,96	2.405.519.511.462,56
5	Aset Tetap Lainnya	30.049.549.747,30	2.824.576.266,48	2.038.999.696,00	30.835.126.317,78
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	356.033.937.401,24	231.171.487.280,10	244.886.492.128,50	342.318.932.552,84
7	Akumulasi Penyusutan	(2.141.030.024.649,11)	(209.473.002.847,16)	(39.700.978.257,36)	(2.310.802.049.238,91)
Jumlah		**2.845.832.663.067,82**	**737.025.007.507,34**	**500.603.150.202,56**	**3.082.254.520.372,60**

Dari tabel di atas di ketahui bahwa Aset Tetap mengalami kenaikan senilai Rp236.421.857.304,78. Adapun penyebab kenaikan sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap

1) Penambahan Aset Tetap atas realisasi Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap pada setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tana Tidung.

2) Penambahan atas hibah peralatan dan mesin, Gedung Bangunan dan Jalan dari Kementerian dan Provinsi.

3) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari dana BOS dan BOP, oleh Satuan Pendidikan di lingkungan Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4) Penambahan Aset Peralatan dan mesin dari BLUD oleh Puskesmas dan RSUD Akhmad Berahim di Lingkungan Dinas Kesehatan.

5) Penambahan Aset Tetap karena kesalahan penganggaran Belanja Jasa menjadi Aset Tetap.

b. Pengurangan Aset Tetap

1) Pengurangan Aset Tetap ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat, serta aset yang akan dialihkan sebagai penyertaan modal ke PDAM.

2) Pengurangan Aset Tetap atas Belanja Modal yang tidak memenuhi karakteristik sebagai Aset Tetap sehingga harus dihapuskan dari Neraca.

3) Pengurangan Aset Tetap karena kesalahan penganggaran Belanja Modal.

Hal - hal tersebut di atas yang mengakibatkan adanya kenaikan/penurunan Aset Tetap, adapun peningkatan terhadap Jalan Irigasi dan Bangunan, karena adanya belanja modal, kapitalisasi aset ke aset induk, koreksi tersebut karena pencatatan aset yang terpisah-pisah. Pencatatan dan penatausahaan aset di Kabupaten Tana Tidung berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi E-BMD sejak tahun 2025. Pengurus Barang seluruh SKPD secara aktif telah menggunakan aplikasi ini untuk keperluan administrasi aset berupa Daftar Barang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Laporan BMD dan Laporan Penyusutan untuk keperluan Neraca. Hal ini untuk menjamin integrasi penatausahaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5.3.1.3.1 Tanah	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	480.250.499.507,38	**444.105.621.898,61**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp480.250.499.507,38 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp444.105.621.898,61, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Tanah senilai Rp36.144.877.608,77 atau 8,14%. Kenaikan Aset Tanah karena terdapat mutasi tambah senilai Rp37.847.509.428,56 dan mutasi kurang senilai Rp1.702.631.819,79. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.89
Rincian Mutasi Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	**Saldo Awal**	**444.105.621.898,61**
B	**Mutasi Masuk**	
1	Penambahan Aset Tanah karena Belanja Modal	2.847.964.666,00
2	Penambahan Aset Tanah karena reklas antar KIB karena pekerjaan pematangan lahan	12.544.081.974,00

No	Uraian	Jumlah
3	Penambahan Aset Tanah dari reklas Persediaan atas aset yang akan dijadikan penyertaan modal	72.900.000,00
4	Penambahan Aset Tanah dari revaluasi tanah pusat pemerintahan	22.382.562.788,56
Jumlah B		**37.847.509.428,56**
C	**Mutasi Keluar**	
1	Pengurangan Aset Tanah atas Pembayaran Utang Tahun Lalu	1.315.292.619,79
2	Pengurangan Aset Tanah atas Pengembalian Sisa Potensi Kelebihan Pembayaran	167.939.200,00
3	Pengurangan Aset Tanah Atas Ubah Kondisi Kedalam Aset Lainnya	219.400.000,00
Jumlah C		**1.702.631.819,79**
Saldo Akhir Tanah (A+B-C)		**480.250.499.507,38**

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Tanah Perakun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.90
Rincian Mutasi per Jenis Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Saldo per 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo per 31 Des 2025
1	Tanah Persil	306.854.202.487,58	33.953.415.538,96	171.577.163,16	340.636.040.863,38
2	Tanah Non Persil	13.551.190.000,00	0,00	0,00	13.551.190.000,00
3	Lapangan	123.700.229.411,03	3.894.093.889,60	1.531.054.656,63	126.063.268.644,00
Jumlah		**444.105.621.898,61**	**37.847.509.428,56**	**1.702.631.819,79**	**480.250.499.507,38**

Adapun rincian Aset Tetap Tanah selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.23**.

Rincian lain Aset Tanah sebagai berikut.

a. Aset tanah yang bersertifikat berjumlah 38 bidang tanah dan yang belum bersertifikat berjumlah 224 bidang tanah terdiri dari 73 bidang telah memiliki dokumen yang lengkap sehingga dapat disertifikatkan sedangkan sisanya 151 bidang masih dalam proses pelengkapan dokumen.

b. Aset Tanah yang diserahkan ke desa/instansi lain tapi masih tercatat di Tanah. Penghapusan aset tersebut masih menunggu keluarnya SK Penghapusan senilai Rp8.575.000,00.

c. Aset Tanah yang akan menjadi penyertaan modal ke PDAM senilai Rp69.750.000,00, Adapun rincian Aset Tetap Tanah selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.24**.

d. Aset Tanah di atas tanah HGB PT. Inhutani berupa pematangan lahan, Ex Bulungan, Pembangunan Jalan dan Penimbunan senilai Rp48.997.228.624,00. Adapun rincian Tanah di Atas Lahan Inhutani disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91
Rincian Tanah di atas Lahan Inhutani

No	SKPD	Jenis Aset	No Reg	Luas M2	Alamat	Penggunaan	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2	35000	Kec. Sesayap	Lapangan Sepak bola	3.776.664.000,00	Pembangunan Lapangan Sepak Bola
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	4	42500	Kec. Sesayap	Stadion Mini	3.864.652.000,00	Pematangan Lahan Stadion Kec Sesayap
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Rawa	1	42500	Kec. Sesayap	Lapangan Sepakbola	78.114.000,00	Penimbunan Lapangan Sepak Bola Inhutani
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Lapangan Lainnya	1	16,4	Ds Tideng Pale Kec. Sesayap	Lapangan Panahan	146.040.063,00	Lapangan Panahan Ds. Tideng Pale
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	93	1200	JL. Jend. Sudirman Timur	Tanah badan jalan	5.214.275.000,00	JL. Jend. Sudirman Timur (Sesayap)
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	94	45600	Jalan Padat Karya	Tanah badan jalan	11.354.400.000,00	Jalan Padat Karya Kec. Sesayap
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	56711,62	KEC. SESAYAP	PERUMAHAN PNS	21.233.325.121,00	Pematangan Perumahan PNS
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Tanah Bangunan Gedung Kesenian	1	1034	Jl. Jend Sudirman	Tanah Untuk Gedung Kesenian	329.758.440,00	(Eks Bulungan)
9	Kantor Camat Sesayap	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	5000	Jl. Tanah Abang	Tanah Bangunan Polsek	3.000.000.000,00	(Eks Bulungan)
Jumlah							**48.997.228.624,00**	

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
400.327.614.969,40	**368.942.603.056,79**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp400.327.614.969,40 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp368.942.603.056,79, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp31.385.011.912,61 atau 8,51%. Kenaikan nilai Aset tersebut disebabkan Belanja Modal, Hibah dari Kementerian, Provinsi, Pihak Ketiga, Masyarakat, pengakuan pencatatan peralatan dan mesin dari Dana BOS dan BOP dan BLUD sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan

Mesin Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Penambahan aset atas Belanja Modal dari BLUD Tahun 2025 senilai Rp666.827.080,00. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.92
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	**Saldo Awal**	**368.942.603.056,79**
B	**Mutasi Masuk**	
1	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2025	31.927.372.557,00
2	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin karena Reklas antar KIB	2.036.603.475,99
3	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin karena berasal dari Belanja Modal BOP TA 2025	1.886.990.400,00
4	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Modal BOS TA 2025	842.367.700,00
5	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Modal BLUD TA 2025	666.827.080,00
6	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	236.548.600,00
7	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin karena berasal dari Belanja Barang TA 2025	81.749.400,00
8	Hibah dari Kemendikdasmen, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi	1.625.114.975,81
9	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Persediaan BOS TA 2025	41.775.000,00
10	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Persediaan BOP TA 2025	19.045.000,00
11	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Internal	6.338.393.997,00
Jumlah B		**39.364.394.188,80**
C	**Mutasi Keluar**	
1	Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklas antar KIB	6.315.812.944,13
2	Pengurangan BM Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	290.698.640,00
3	Pengurangan atas BM TA 2025 bernilai dibawah Kapitalisasi	868.097.513,06
4	Pengurangan atas BM BOP TA 2025 bernilai dibawah Kapitalisasi	334.172.879,00
5	Pengurangan BM BOP Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	28.315.000,00
6	Pengurangan atas BM BOS TA 2025 bernilai dibawah Kapitalisasi	114.094.200,00
7	Pengurangan BM BOS Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	6.502.000,00

No	Uraian	Jumlah
8	Pengurangan BM BLUD Peralatan dan Mesin TA 2025 bernilai dibawah kapitalisasi	21.689.100,00
9	Pengurangan Peralatan dan Mesin atas Pengeluaran Internal	6.338.393.997,00
Jumlah C		**14.317.776.273,19**
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin (A+B-C)		**393.989.220.972,40**

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per akun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.93
Rincian Mutasi per Jenis Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Alat Besar Darat	12.655.006.450,00	4.421.561.150,00	0,00	17.076.567.600,00
2	Alat Besar Apung	131.500.000,00	0,00	0,00	131.500.000,00
3	Alat Bantu	5.876.671.192,00	504.600.000,00	0,00	6.381.271.192,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	85.194.733.362,36	10.582.876.800,03	3.746.002.550,82	92.031.607.611,57
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.285.980.024,00	306.685.241,00	0,00	1.592.665.265,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	3.622.693.900,00	0,00	0,00	3.622.693.900,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	297.566.500,00	0,00	0,00	297.566.500,00
8	Alat Bengkel Bermesin	494.141.600,00	10.420.000,00	8.700.000,00	495.861.600,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	232.840.000,00	0,00	0,00	232.840.000,00
10	Alat Ukur	2.234.188.037,00	200.925.100,00	2.500.000,00	2.432.613.137,00
11	Alat Pengolahan	5.863.856.365,00	333.294.260,00	2.425.800,00	6.194.724.825,00
12	Alat Kantor	21.398.810.305,09	5.949.810.376,30	4.250.081.557,04	23.098.539.124,35
13	Alat Rumah Tangga	58.040.954.355,58	11.699.362.898,46	2.420.439.356,00	67.319.877.898,04
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.461.418.682,18	529.312.186,00	229.497.000,00	7.761.233.868,18
15	Alat Studio	9.330.406.416,00	1.026.500.722,00	222.709.026,00	10.134.198.112,00
16	Alat Komunikasi	1.565.152.395,00	35.032.000,00	236.210.000,00	1.363.974.395,00
17	Peralatan Pemancar	669.418.054,00	70.600.000,00	3.500.000,00	736.518.054,00
18	Alat Kedokteran	46.695.146.317,30	3.205.945.722,00	652.410.922,00	49.248.681.117,30
19	Alat Kesehatan Umum	17.621.544.996,96	999.104.813,00	705.086.335,00	17.915.563.474,96

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
20	Unit Alat Laboratorium	11.376.561.113,14	273.646.850,00	6.234.000,00	11.643.973.963,14
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	263.992.800,00	0,00	0,00	263.992.800,00
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	3.067.350.214,38	93.420.920,00	2.434.028,00	3.158.337.106,38
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	232.887.650,00	0,00	0,00	232.887.650,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	213.374.000,00	4.640.000,00	0,00	218.014.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	734.672.768,00	0,00	0,00	734.672.768,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	192.327.900,00	0,00	0,00	192.327.900,00
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	40.280.626,00	9.000.000,00	0,00	49.280.626,00
28	Persenjataan Non Senjata Api	3.926.000,00	0,00	3.926.000,00	0,00
29	Alat Khusus Kepolisian	18.150.000,00	2.000.000,00	16.350.000,00	3.800.000,00
30	Komputer Unit	44.533.394.647,89	3.898.865.071,00	1.079.521.190,33	47.352.738.528,56
31	Peralatan Komputer	14.645.693.378,91	968.549.476,00	357.644.708,00	15.256.598.146,91
32	Alat Eksplorasi Geofisika	128.649.000,00	0,00	0,00	128.649.000,00
33	Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pengolahan dan Pemurnian	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
35	Alat Deteksi	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
36	Alat Pelindung	384.055.500,00	3.926.000,00	0,00	387.981.500,00
37	Alat SAR	4.119.160.387,00	46.449.800,00	0,00	4.165.610.187,00
38	Alat Kerja Penerbangan	421.776.559,00	22.000.000,00	157.850.000,00	285.926.559,00
39	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
40	Unit Peralatan Proses/Produksi	80.400.000,00	2.495.000,00	0,00	82.895.000,00
41	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2.278.933.260,00	363.162.000,00	198.912.000,00	2.443.183.260,00
42	Peralatan Olahraga	3.532.728.300,00	135.601.800,00	15.341.800,00	3.652.988.300,00
Jumlah		**368.942.603.056,79**	**45.702.788.185,79**	**14.317.776.273,19**	**400.327.614.969,39**

Selain itu, terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang didapatkan dari Kementerian berupa Pemberian Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar di tahun 2025 namun belum tercatat karena BASTnya ditahun 2026. Aset tersebut senilai Rp.7.942.500,00 di Sekolah Dasar Negeri 014 Tana Tidung dan Senilai Rp. 66.717.000,00 di Sekolah Dasar Negeri 023 Tana Tidung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94
Rincian Aset Peralatan dan Mesin Bantuan Kementerian
Program Revitalisasi Sekolah Dasar

No	Kode Rekening Belanja	Jumlah	Harga Satuan	Nilai
Sekolah Dasar Negeri 014 Tana Tidung				
1	Lemari UKS	1	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Ranjang UKS	2	1.000.000,00	2.000.000,00
3	Meja UKS	1	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Kursi UKS	2	500.000,00	1.000.000,00
5	Kasur UKS	2	500.000,00	1.000.000,00
6	Bantal UKS	2	121.250,00	242.500,00
7	Gorden UKS	4	50.000,00	200.000,00
Total		**14**	**5.671.250,00**	**7.942.500,00**
Sekolah Dasar Negeri 023 Tana Tidung				
1	Lemari Kelas	3	900.000,00	2.700.000,00
2	Meja Siswa	84	450.000,00	37.800.000,00
3	Kursi Siswa	84	200.000,00	16.800.000,00
4	Meja Guru	3	800.000,00	2.400.000,00
5	Kursi Guru	3	350.000,00	1.050.000,00
6	Papan Tulis Kelas	3	600.000,00	1.800.000,00
7	Rak Pojok Baca	3	1.389.000,00	4.167.000,00
Total		**183**	**4.689.000,00**	**66.717.000,00**

Rincian selengkapnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 5.25**.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.3.3	**Gedung dan Bangunan**	**1.733.804.884.801,55**	**1.454.317.612.762,93**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.733.804.884.801,55 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.454.317.612.762,93, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp279.487.272.038,62 atau 19,22%. Kenaikan nilai Aset tersebut disebabkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun berjalan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasikan ke gedung.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari BLUD Tahun 2025 senilai Rp180.575.095,00. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.95
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	**Saldo Awal**	**1.454.317.612.762,93**
B	**Mutasi Masuk**	
1	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan karena Belanja Modal TA 2025	233.723.904.038,85
2	Penambahan Aset Ge dung dan Bangunan karena Reklas antar KIB	224.708.281.558,97
3	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Modal BLUD TA 2025	180.575.095,00
4	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Barang TA 2025	1.493.462.212,74
5	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	96.195.000,00
6	Penambahan Aset dari Hibah Pusat dan Provinsi	953.541.309,49
7	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Persediaan BOP TA 2025	11.000.000,00
8	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan atas pengembalian uang muka (Piutang)	628.373.233,08
9	Penambahan Aset Gedung dan Banguan atas Penerimaan Internal	3.654.332.212,00
Jumlah B		**465.449.664.660,13**
C	**Mutasi Keluar**	
1	Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan karena Reklas antar KIB	179.927.906.288,75
2	Pengurangan BM Gedung BangunanTA 2025 Reklas ke Barang dan Jasa	680.343.257,69
3	Pengurangan BM Gedung BangunanTA 2025 Reklas ke Persediaan	19.851.167,85
4	Pengurangan BM Gedung BangunanTA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	506.103.863,61
5	Belanja Modal BOP TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	9.952.100,00
6	Belanja Modal TA 2025 untuk Pembayaran Utang Tahun Lalu	1.163.903.731,61
7	Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan atas Pengeluaran Internal	3.654.332.212,00
Jumlah C		**185.962.392.621,51**
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan (A+B-C)		**1.733.804.884.801,55**

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per akun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.96
Rincian Mutasi per Jenis Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.044.141.926.854,54	451.327.654.161,09	183.817.748.152,37	1.311.651.832.863,26
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	383.168.929.672,39	9.222.683.489,00	1.185.619.393,09	391.205.993.768,30
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.537.212.795,00	0,00	0,00	7.537.212.795,00
4	Tugu/Tanda Batas	19.469.543.441,00	8.304.629.747,04	4.364.327.813,05	23.409.845.374,99
Jumlah		**1.454.317.612.762,93**	**468.854.967.397,13**	**189.367.695.358,51**	**1.733.804.884.801,55**

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.26**.

Rincian lain Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Gedung yang didapatkan dari Kementerian berupa Pemberian Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar di tahun 2025 namun belum tercatat karena BASTnya ditahun 2026. Aset tersebut senilai Rp. 788.785.208,00 di Sekolah Dasar Negeri 014 Tana Tidung dan Senilai Rp929.399.905,00 di Sekolah Dasar Negeri 023 Tana Tidung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97
Rincian Aset Gedung Bantuan Kementerian Program Revitalisasi Sekolah Dasar

SDN 014 Tana Tidung			
No	**Kode Rekening Belanja**	**Jumlah**	**Harga Satuan**
	Gedung Pembangunan Baru :		
1	Gedung UKS	1	233.200.429,00
2	Gedung WC/Toilet	1	227.825.093,00
	Rehabilitasi Gedung :		
1	Rehabilitasi RKB	1	281.350.932,00
	Perencanaan dan Pengawasan :		
1	Biaya Perencanaan	1	14.035.677,00
2	Biaya Pengawasan	1	16.168.428,00
	Biaya Pengelolaan Administrasi :		
1	Biaya Pengelolaan Administrasi	1	16.204.649,00
Total Hibah Gedung dan Bangunan			**788.785.208,00**

SDN 023 Tana Tidung			
No	**Kode Rekening Belanja**	**Jumlah**	**Harga Satuan**
	Gedung Pembangunan Baru :		
1	Gedung RKB 3 Ruang	1	878.616.000,00
	Perencanaan dan Pengawasan :		
1	Biaya Perencanaan	1	15.725.681,00
2	Biaya Pengawasan	1	17.890.725,00
	Biaya Pengelolaan Administrasi :		
1	Biaya Pengelolaan Administrasi	1	17.167.499,00
Total Hibah Gedung dan Bangunan			**929.399.905,00**

b. Terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp541.855.930.480,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98
Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	1	Jl. Inhutani Rt.6 Ds. Tideng Pale	59.400.000,00
2	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1.3.3.1.1.4.7	1	jalan padat karya, rt.001 rw.002 desa tideng pale timur, kec. sesayap, kab. tana tidung	305.535.200,00
3	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	3	Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafarudin	11.315.507.060,00
4	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	4	Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafaruddin.	42.335.747.558,00
5	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	1	Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)	39.193.438.627,00
6	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	2	Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)	37.682.317.347,00
7	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	14	Jalan Padat Karya, RT.001 RW.001 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara	3.398.361.346,00
8	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	7	Jl. Pendofo Japaruddin	1.285.910.000,00
9	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	1	Jl. Padat Karya RT 1 RW 1 Desa Tideng Pale Timur (Rumah Genset RSUD AB)	725.049.900,00
10	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	1	Jl. Pendofo Jafaruddin (RSUD Akhmad Berahim)	15.373.910.246,02
11	RSUD Akhmad Berahim	Pagar Permanen	1.3.3.4.1.4.1	1	Jl. Padat Karya	4.887.853.893,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	7	Kecamatan Sesayap	7.424.330.475,00

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
13	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	18	Jl. Perumahan Dinas	18.243.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	20	Pendopo	18.243.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	6	Jl. Ir. Salmon	18.243.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	4	Jl. Padat Karya Sebidai	18.243.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	5	Jl. Ir. Salmon	18.243.000,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1.3.3.1.1.11.1	8	Jl. Inhutani	2.390.373.725,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1.3.3.1.1.11.1	7	Jl. Jendral Sudirman	5.519.291.000,00
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1.3.3.1.1.11.1	3	Jl. Inhutani	5.539.042.641,00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.11.4	3	DESA TIDENG PALE KEC.SESAYAP KAB.TANA TIDUNG	118.734.038,00
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.11.8	1	Jl. Inhutani	1.281.984.000,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman lainnya	1.3.3.1.1.36.3	4	Jl. Inhutani	866.569.348,00
24	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman lainnya	1.3.3.1.1.36.3	1	Jl. Inhutani	2.300.731.000,00
25	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman lainnya	1.3.3.1.1.36.3	3	Jl. Inhutani	969.341.697,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	114		1.621.187.800,00
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	109	Jl. Padat Karya	227.843.400,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	13	JL. Perintis Rt.06	8.239.398.590,00
29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1.3.3.1.1.2.1	1	-	269.599.500,00
30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	10	-	255.452.242,00
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	11	-	255.715.659,00

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
	Permukiman					
32	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	8	-	1.011.892.600,00
33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	9	-	254.919.472,00
34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pagar Semi Permanen	1.3.3.4.1.4.2	1	Jl. Inhutani	228.467.000,00
35	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1.3.3.1.1.4.6	1	Tideng Pale	2.444.411.089,28
36	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.1.1.8.1	3	Tideng Pale	3.905.363.900,00
37	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	1	Tideng Pale	7.792.313.938,90
38	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	129	Jl. Perintis Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	409.021.718,00
39	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	100	Tideng Pale	56.418.792.183,73
40	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	101	Tideng Pale	59.050.976.059,31
41	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	94	Tideng Pale	273.856.000,00
42	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.1.1.10.2	1	SMPN 01 Sesayap Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	1.366.134.142,86
43	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.1.1.10.2	2	SMAN 1 Sesayap Desa Tideng pale Kec. Sesayap	317.320.000,00
44	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.10.5	66	Desa Tideng Pale	1.705.410.575,00
45	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.10.5	57	Tideng Pale	1.003.507.950,00
46	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.10.5	5	Desa Tideng Pale Kecamaatan Sesayap	59.208.000,00
47	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Gedung Pos Jaga Permanen	1.3.3.1.1.13.1	4	Tideng Pale	1.924.363.477,90
48	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1.3.3.1.1.16.1	12	Tideng Pale	4.863.456.239,17
49	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.30.5	1	Tideng Pale	1.464.447.516,00
50	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Parkir lainnya (dst)	1.3.3.1.1.33.7	31	Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap.	236.421.000,00

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
51	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Parkir lainnya (dst)	1.3.3.1.1.33.7	30	Jl Jendral Sudirman No 1 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	117.157.000,00
52	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Parkir lainnya (dst)	1.3.3.1.1.33.7	24	Tideng Pale	205.015.000,00
53	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	24	Tideng Pale	16.657.186.884,00
54	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.1.2.3.1	5	Tideng Pale	2.101.529.156,72
55	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.1.2.3.1	4	Tideng Pale	2.040.265.726,17
56	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	26	Tideng Pale	31.669.060.387,55
57	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	25	Tideng Pale	7.815.511.617,55
58	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Asrama Permanen	1.3.3.1.2.5.1	6	Tideng Pale	59.768.975.765,65
59	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Asrama Permanen	1.3.3.1.2.5.1	7	Tideng Pale	54.972.154.013,06
60	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	3	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
61	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	4	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
62	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	2	Desa Tideng Pale	216.830.000,00
63	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	1	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
64	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	2	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
65	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1.3.3.1.2.3.16	1	SMPN 01 Sesayap Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	94.200.000,00
66	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	13	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka)	7.542.032.650,00
67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	14	Jl. Jendral Sudirman Rt.06, Rw.03 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung	2.808.789.000,00
68	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Gedung Pos Jaga Permanen	1.3.3.1.1.13.1	2	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka) Tideng Pale	120.507.476,00
69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	2	-	27.459.000,00

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
70	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	3	Jl. Perintis, RTH Josup Abdullah	188.739.744,00
71	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	4	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka) Tideng Pale	120.591.847,00
72	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	1	-	27.459.000,00
73	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.33.1	6	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka Baru)	212.178.558,00
74	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.33.1	2	-	179.944.000,00
75	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	3	Jl.Inhutani	267.619.500,00
76	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	5	Jl.Inhutani	74.034.000,00
77	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1.3.3.1.1.8.2	1	Jl.Inhutani	171.518.000,00
78	Kantor DPRD	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	5	Jl. Inhutani Tideng Pale	49.318.000,00
79	Kantor DPRD	Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen	1.3.3.1.2.3.11	1	Jl. Perumahan Dinas (Rumdin Sekwan)	134.891.714,30
80	Kantor DPRD	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	1	Kantor Dewan Tana Tidung, status tanah: Milik Inhutani (Sewa), status bangunan: Bagian Umum (Kantor Dewan)	82.547.404,02
81	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.1.1.1.2	12	Jl. Inhutani (Rehab Berat Gedung DPRD)	4.167.867.800,00
82	Bagian Umum	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	3	Jl. Inhutani	4.366.000.000,00
83	Bagian Umum	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	1	Jl. Inhutani	6.086.829.448,00
84	Bagian Umum	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	8	Jl. Inhutani	809.987.815,00
Total						**541.855.930.480,55**

c. Terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemda dan bukan di tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp114.463.792.324,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah dan Bukan Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Perhubungan	Gedung Pos Jaga Permanen	1.3.3.1.1.13.1	1	Betayau dan Seputuk	240.702.000,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	1	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	79.800.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	4	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	409.831.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	1	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	3.243.096.000,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	5	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	6.401.548.140,00
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	6	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	1.094.342.810,00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	7	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	478.494.240,00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan tempat pertemuan lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.9.7	1	Gg. Rian	2.501.465.000,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	1	Gg. Rian	1.644.272.000,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	2	Gg. Rian	64.884.000,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	3	Gg. Rian	124.884.000,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	1	Gg. Rian	223.673.000,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	8	Gg. Rian	75.436.000,00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1.3.3.1.1.8.2	1	Wisata Gunung Rian Desa Muruk Rian	219.800.000,00
15	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	1	PAUD Kec. Sesayap Hilir (Desa Manjelutung)	235.494.000,00

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
16	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1.3.3.1.2.3.16	3	SDN 005 Tana Tidung (Rian-Kapuak)	208.000.000,00
17	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	23	Kecamatan Sesayap Hilir	7.990.682.206,90
18	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	24	Kecamatan Sesayap Hilir	7.892.764.206,90
19	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	8	Desa Buong Baru Kecamatan Betayau	1.353.300.500,00
20	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	4	Sebawang	229.984.895,00
21	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	1	Sesayap Hilir	48.500.000,00
22	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	2	Sesayap Hilir	48.500.000,00
23	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	3	Sesayap Hilir	48.500.000,00
24	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	3	SMPN 1 Atap Tana Lia (Tengku Dacing)	801.227.000,00
25	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Asrama Permanen	1.3.3.1.2.5.1	1	Pembangunan Gedung Asrama Putra TK-SD Terpadu Unggulan	7.123.231.868,20
26	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.1.1.8.1	2	Sesayap Hilir	6.716.969.206,80
27	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	98	Pembangunan Gedung Sekolah SD Terpadu Unggulan	21.534.328.341,90
28	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	99	Pembangunan Gedung Sekolah SMP Terpadu Unggulan	35.096.158.412,90
29	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	5	SDN 005 Tana Tidung (Rian-Kapuak)	641.000.000,00
30	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	3	SDN 007 Tana Tidung (Bebakung)	986.588.334,00
31	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	4	Pembangunan Gedung Sekolah SDN Filial Sesayap (Kujau)	876.094.000,00
32	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	73	Pembangunan SDN 013 sesayap+Perencanaan 949577000)+Pengawasan(39820000)+Penyelesaian Administrasi(2015)(129.416.542)	4.704.469.880,00

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
33	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	9	SDN 021 Tana Tidung (Gunawan)	311.551.000,00
34	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	8	SDN 019 Tana Tidung (Buang Baru)	814.220.300,00
Jumlah						**114.463.792.324,60**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.3.4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**2.405.519.511.462,56**	**2.333.413.362.850,06**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.405.519.511.462,56 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.333.413.362.850,06, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp72.106.148.612,50 atau 3,09%. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.100
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	**Saldo Awal**	**2.333.413.362.850,06**
B	**Mutasi Masuk**	
1	Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena BM TA 2025	111.466.199.577,39
2	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklas antar KIB	24.885.173.583,53
3	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Belanja Jasa TA 2025	38.326.648,00
4	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	22.720.831.663,44
5	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Progress Pekerjaan Melebihi Pembayaran	88.881.435,73
6	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Pengembalian Uang Muka	1.177.257.625,37
7	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi atas penerimaan Internal	3.125.314.000,00
Jumlah B		**163.501.984.533,46**
C	**Mutasi Keluar**	
1	Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklas antar KIB	65.778.760.850,31
2	Pengurangan BM Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	1.012.707.055,00
3	Pengurangan BM TA 2025 karena Utang Tahun Lalu	1.607.201.515,65
4	Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Karena Reklas ke Aset Lain-lain (Aset yang akan dipindahtangankan)	19.871.852.500,00

No	Uraian	Jumlah
5	Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Pengeluaran Internal	3.125.314.000,00
Jumlah C		**91.395.835.920,96**
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan (A+B-C)		**2.405.519.511.462,56**

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per akun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.101

Rincian Mutasi per Jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Jalan	1.628.349.691.823,61	126.789.558.691,78	89.304.909.503,93	1.665.834.341.011,46
2	Jembatan	16.099.127.100,11	16.673.835.315,35	705.864.195,74	32.067.098.219,72
3	Bangunan Air Irigasi	82.209.094.263,12	2.538.779.783,54	0,00	84.747.874.046,66
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	237.730.999,00	0,00	0,00	237.730.999,00
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	557.345.246.470,22	11.953.865.923,50	0,00	569.299.112.393,72
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.683.475.000,00	11.975.000,00	0,00	1.695.450.000,00
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.311.033.815,00	54.334.356,00	0,00	3.365.368.171,00
8	Bangunan Air Kotor	218.193.355,00	1.600.378.563,29	1.099.689.221,29	718.882.697,00
9	Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.610.335.155,00	3.879.256.900,00	285.373.000,00	9.204.219.055,00
10	Instalasi Air Kotor	6.493.449.849,00	0,00	0,00	6.493.449.849,00
11	Instalasi Pengolahan Sampah	24.865.359.000,00	0,00	0,00	24.865.359.000,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	957.610.000,00	0,00	0,00	957.610.000,00
13	Instalasi Gardu Listrik	29.880.000,00	0,00	0,00	29.880.000,00
14	Instalasi Pertahanan	375.336.800,00	0,00	0,00	375.336.800,00
15	Instalasi Gas	75.956.000,00	0,00	0,00	75.956.000,00
16	Instalasi Lain	1.124.532.500,00	0,00	0,00	1.124.532.500,00
17	Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,000	0,00
18	Jaringan Listrik	4.427.310.720,00	0,00	0,00	4.427.310.720,00
Jumlah		**2.333.413.362.850,06**	**163.501.984.533,46**	**91.395.835.920,96**	**2.405.519.511.462,56**

Adapun Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.27**.

Rincian lain Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp91.984.610.629,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102
Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	1.3.4.3.5.2.2	1	Tideng Pale, Kab. Tana Tidung	957.610.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1.3.4.4.2.2.2	2	Tideng Pale	2.369.694.720,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	211	Jl. Inhutani (Jl. SMU) (Badan Jalan)	2.003.022.557,15
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	222	Jl. Tanah Abang (Badan Jalan)	3.353.016.617,63
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	214	Jl. Jendral Sudirman Timur (Badan Jalan)	5.679.039.660,59
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	95	Jl. Perintis (Badan Jalan)	7.889.547.279,80
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	37	Jl. Perintis (Irigasi)	8.595.517.942,05
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	8	Jl. Jendral Sudirman Timur (Irigasi)	4.987.426.792,51
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	223	Jl. Ks Tubun (Badan Jalan)	78.484.930,69
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	20	Jl. Rumah Dinas Bupati (Irigasi)	491.991.110,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	7	JL. PADAT KARYA (Irigasi)	16.204.746.698,69

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	16	Jl. Ks. Tubun (irigasi)	118.813.922,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	14	Jl. Jendral Sudirman Barat (Irigasi)	124.356.423,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	17	Jl. Inhutani (Jl. SMU) (Irigasi)	1.764.637.714,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	36	Jl. Tanah Abang (Irigasi)	715.798.922,58
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	224	Jl. Rumah Dinas Bupati (Badan Jalan)	105.393.333,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	215	Jl. Padat Karya	34.380.468.005,47
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	60	-	228.308.000,00
19	Kantor Camat Sesayap	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1.3.4.3.6.2.4	3	jl.jend.sudirman	29.880.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan listrik lainnya	1.3.4.4.2.3.1	6	Taman Lokasi 2 (Samping Dinas PU)	19.800.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan listrik lainnya	1.3.4.4.2.3.1	7	Taman Lokasi 2 (Samping Dinas PU)	19.800.000,00
22	Dinas Kesehatan	Instalasi air kotor lainnya	1.3.4.3.2.4.1	1	JL. Padat Karya Rt.001 Tideng Pale Timur	1.781.300.000,00
23	Dinas Kesehatan	Instalasi gas lainnya	1.3.4.3.8.4.1	1	Jalan Padat Karya Rt.01 Rw.01 Desa Tideng Pale Timur Kec. Sesayap. Kab. Tana Tidung	75.956.000,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.4.2.2.4	3	Jln. Perintis. (Depan SMA SMP Terpadu 1)	10.000.000,00
Total						**91.984.610.629,15**

b. Terdapat Aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang berdiri di atas lahan bukan milik Pemda dan bukan tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp36.853.242.871,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103

Rincian JIJ yang Berdiri di atas Bukan Milik Pemda dan Bukan Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	1	Sesayap Hilir	83.372.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	5	Sesayap Hilir	119.431.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	2	Sesayap Hilir	167.160.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	4	Sesayap Hilir	167.704.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	9	Tideng Pale	237.787.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	6	Sesayap Hilir	427.821.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1.3.4.2.6.2.8	4	Desa Tengku Dacing	1.244.400.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1.3.4.2.6.2.8	1	Sesayap Hilir	1.729.758.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	20	Tideng Pale	202.147.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	16	Sesayap Hilir	539.914.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	19	Tengku Dacing	657.177.300,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	11	Desa Sesayap	1.140.589.746,00

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	15	Bebatu supa-Sesayap	1.308.810.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	8	Desa Sebawang	1.374.225.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	17	Tideng Pale	1.833.864.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	6	Desa Bebatu Supa	2.419.961.100,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	12	Desa Tideng Pale	3.746.003.376,00
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	1	Desa Sedulun	192.323.800,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	3	Optimalisasi Jaringan Air Minum Ipa Sedulun IV	719.611.800,00
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	5	Desa Sedulun	1.297.382.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	6	Optimalisasi Jaringan Air Minum Tideng Pale - Sesayap	6.482.964.600,00
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	1	Desa Tengku Dacing Kec. Tana Lia	3.738.459.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1.3.4.2.6.1.3	1	-	1.073.665.149,00
27	Kecamatan Sesayap	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	3	Jl. Ahmad Yani (PDAM)	218.000.000,00
28	Kecamatan Sesayap	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	1.3.4.3.5.9.1	1	Bebatu	2.500.000,00
29	Kecamatan Sesayap	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryA	1.3.4.3.5.9.4	1	Bebatu	10.000.000,00

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
		Lain-lain				
30	Kantor Camat Sesayap	Jaringan Transmisi Tegangan dibawah 1 KVA	1.3.4.4.2.1.3	2		12.000.000,00
31	Kecamatan Sesayap Hilir	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	5	Desa Sengkong	349.308.000,00
32	Kecamatan Tana Lia	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	1	Jl. Persawahan Desa Tana Merah Barat	230.000.000,00
33	Kecamatan Tana Lia	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	1.3.4.4.1.3.1	1	Jl. Abdullah Tana Merah	230.000.000,00
34	Kecamatan Tana Lia	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	1.3.4.4.2.1.3	1	Jl. Tarakan Jaya	250.000.000,00
36	Kecamatan Tana Lia	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	3	Jl. Persawahan Desa Tana Merah Barat	4.447.564.000,00
37	Kecamatan Betayau	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	1	Desa Buong Baru	199.340.000,00
Jumlah						**36.853.242.871,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
30.835.126.317,78	**30.049.549.747,30**

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp30.835.126.317,78 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.049.549.747,30. Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp785.576.570,48 atau 2,61%. Kenaikan nilai Aset tersebut disebabkan adanya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di tahun berjalan serta adanya Hibah dari Kementerian. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.104
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	**Saldo Awal**	**30.049.549.747,30**
B	**Mutasi Masuk**	
1	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari BM TA 2025	463.746.582,00
2	Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan TA 2025	784.674.000,00

No	Uraian	Jumlah
3	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari BM BOP TA 2025	205.682.879,00
4	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari BM BOS TA 2025	791.767.000,00
5	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin BOP TA 2025	10.000.000,00
6	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin BOS TA 2025	771.000,00
7	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	112.037.716,48
8	Hibah dari Kemendikdasmen dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	67.623.174,00
9	Penambahan Aset Tetap Lainnya atas Progress Pekerjaan (Hutang)	100.690.000,00
10	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Persediaan BOS TA 2025	88.896.000,00
11	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Persediaan BOP TA 2025	43.000.000,00
12	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Penerimaan Internal	34.871.840,00
13	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Mutasi Dari SKPD	120.816.075,00
Jumlah B		**2.824.576.266,48**
C	**Mutasi Keluar**	
1	Reklasifikasi BM Aset Tetap Lainnya BOP TA 2025 ke Peralatan dan Mesin	45.717.879,00
2	Reklasifikasi BM Aset Tetap Lainnya BOS TA 2025 ke Peralatan dan Mesin	32.015.700,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Gedung Bangunan	120.816.075,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud	981.524.500,00
5	Belanja Modal TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	282.300,00
6	Belanja Modal BOP TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	7.350.000,00
7	Pengurangan BM BOP Aset Tetap Lainnya TA 2025 Reklas ke Persediaan	6.200.000,00
8	Belanja Modal BOS TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	206.637.400,00
9	Pengurangan BM BOS Aset Tetap Lainnya TA 2025 Reklas ke Persediaan	417.041.300,00
10	Aset Hibah yang Bernilai dibawah Kapitalisasi	64.567.327,00
11	Pengurangan atas beban dibayar dimuka	1.159.300,00
12	Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Pengeluaran Internal	34.871.840,00
13	Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Mutasi Ke SKPD	120.816.075,00
Jumlah C		**2.038.999.696,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya (A+B-C)		**30.835.126.317,78**

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per akun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.105
Rincian Mutasi per Jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.450.859.888,87	1.138.387.490,00	1.918.183.621,00	2.671.063.757,87
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	5.649.600,00	0,00	0,00	5.649.600,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	627.269.100,00	850.000,00	0,00	628.119.100,00
4	Musik	91.276.100,00	0	0,00	91.276.100,00
5	Karya Grafika (Graphic Material)	7.301.600,00	0	0,00	7.301.600,00
6	Barang Bercorak Kesenian	5.832.597.600,00	490.707.000,00	0,00	6.323.304.600,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	204.325.000,00	103.560.000,00	0,00	307.885.000,00
8	Tanaman	1.307.345.819,00	0,00	0,00	1.307.345.819,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	18.522.925.039,43	1.091.071.776,48	120.816.075,00	19.493.180.740,91
Jumlah		**30.049.549.747,30**	**2.824.576.266,48**	**2.038.999.696,00**	**30.835.126.317,78**

Adapun Aset Tetap Lainnya selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.28.**

Rincian lain Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Tetap Lainnya yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp12.437.803.563,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106
Aset Tetap Lainnya yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	26	Rumah Jabatan Bupati (Pembangunan Pagar+Siring Penahan Tanah+Paving+Kolam Renang+Gazebo+Kanopi+Dapur Kotor per 31 Des 2024)	1.872.343.480,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	13	Perencanaan Penataan RTH Stadion Mini Tideng Pale	98.470.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	17	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Stadion Mini (Pembangunan SP2D 04818 : 3,127,517,000)+(SP2D 06679 : 3,822,483,000)+(Pengawasan : 324,395,280)	7.274.395.280,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	1	Rehab Gedung Serbaguna per 31 Desember 2023 Fisik Rp. 198,500,000.00 Pengawasan Rp. 34,959,750.00	233.459.750,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	3	Rehab Pendopo Japarrudin per 31 Desember 2023 Fisik Rp. 493,177,178.00 Pengawasan	542.984.126,00

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
	dan Kawasan Permukiman				Rp. 49,806,948.00	
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	7	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati Dan Landscape 576.090.000 + Perencanaan Dan Uang Muka 176.700.000 + Pengawasan 28.500.000	781.290.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	6	Pembersihan dan Pematangan Lahan Rumah Dinas Bupati	98.500.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	2	Rumah Dinas Sekda Jl. Ir. Salmon (Rehab Rumdin Sekda)	373.749.713,42
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	3	Rumah Dinas DPRD, Jl. Ir. Salmon (Rumah dinas DPRD)	38.534.714,30
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	8	Review Perancangan Landscape Kawasan Pendopo Japaruddin	242.622.500,00
11	Bagian Umum	Lukisan dan ukiran	1.3.5.1.3.3.1	1	Pengadaan Latar Belakang Panggung Pendopo	198.500.000,00
12	Bagian Umum	Lukisan dan ukiran	1.3.5.1.3.3.1	2	Pengadaan Ukiran Tiang Pendopo	198.500.000,00
13	Bagian Umum	Lukisan dan ukiran	1.3.5.1.3.3.1	3	Pengadaan Ornamen Balok Gantung Pendopo	197.000.000,00
14	Bagian Umum	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	1	Belanja Modal Pengadaan Pos Jaga Eks Rumjab Sekda Milik Inhutani (Sewa Rumdis Asisten Inhutani)	87.920.000,00
15	Bagian Umum	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	7	Kapitalisasi Rehab Fasilitas Parkir (Pembuatan Paving Block Eks Rumah Jabatan Sekda (39.050.000.00) Dan Parkiran Dan Jalan Masuk (73.223.000) , Jl.Ir.Salmon Desa Tideng Pale	112.273.000,00
16	Bagian Umum	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan ,Eks Rumjab Sekda Inhutani (Gudang Bagian Umum) (Perencanaan Rp : 4.900.000, Pengawasan : Rp 1.950.000, Pembuatan Rp. 80.441.000, Total Rp.87.261.000) Tanah Milik Inhutani (Sewa) Jl.Ir.Salmon Desa Tideng Pale	87.261.000,00
Jumlah						**12.437.803.563,72**

5.3.1.3.6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		342.318.932.552,84	**356.033.937.401,24**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp342.318.932.552,84 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp356.033.937.401,24, maka terdapat penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp13.715.004.848,40 atau 3,85%. Penurunan nilai aset tersebut disebabkan Pekerjaan fisik sudah selesai sehingga aset Konstruksi Dalam Pengerjaan reklas ke Gedung Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jaringan. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.107
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	**Saldo Awal**	**356.033.937.401,24**
B	**Mutasi Masuk**	
1	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklas antar KIB	225.067.725.588,63
2	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari belanja jasa / belanja lainnya	477.472.228,00
3	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari belanja Persediaan	3.315.549.986,16
4	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan penambahan atas Progress Pekerjaan melebihi Pembeyaran	2.217.365.201,20
5	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Penambahan atas Pengembalian Uang Muka (Piutang 2024)	93.374.276,11
Jumlah B		**231.171.487.280,10**
C	**Mutasi Keluar**	
1	Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklas antar KIB	244.689.513.828,50
2	Pengurangan Aset KDP atas Aset yang Reklas ke Persediaan	196.978.300,00
Jumlah C		**244.886.492.128,50**
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (A+B-C)		**342.318.932.552,84**

Adapun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.29**.

Rincian lain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp66.317.220.577,16 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Kesehatan dan Kemasyarakatan	Jalan lainnya	1.3.4.1.1.10.1	1	JL. Printis Km 1 tideng Pale	89.761.815,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	5	Jl. Padat Karya (Depan Pendopo)	99.220.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.11.4	1	Stadion Mini Tideng Pale	29.248.500,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.11.4	2	Tideng Pale - Sesayap	87.989.700,00

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.1.1.2.3	1	Jl Inhutani Kec. Sesayap	29.325.120,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	27	Tideng Pale	78.100.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	76	Jalan Perintis RT. IV Tideng Pale Sesayap (Depan PU)	62.941.453.339,28
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	132	Jl. Perintis	98.790.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	133	Jln.Padat Karya (Belakang Kantor Desa Tideng Pale Timur)	588.918.714,54
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	311	Jalan Perintis - Jalan Jendral Sudirma	74.826.210,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	286	Jalan Jendral Sudirman (Depan SDN Unggulan Terpadu 1)	62.888.437,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	277	Jalan Perintis	77.851.237,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	1.3.4.2.1.3.2	5	RSUD Akhmad Berahim	98.503.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	65	Jl. Perintis Depan DPUPRPKP	1.457.737.674,34
15	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.1.1.4.2	9	Area Smp-Sma Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	9.960.880,00
16	Dinas Perhubungan	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	1	Ruas Jl. Jend. Sudirman Ruas Jl. Padat Karya	99.110.000,00

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
17	Dinas Perhubungan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.3.3.1.1.18.1	3	Jl. Inhutani (Belakang Kantor DPRD KTT)	99.598.950,00
18	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	10	Jl. ir salmon RSU AB	94.215.000,00
19	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	11	Jalan Padat Karya, Rt.001 Rw.001 Desa Tideng Pale Timur Kec. Sesayap	88.323.000,00
20	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	12	Jalan Padat Karya, Rt.001, Rw.001 Desa Tideng Pale Timur Kec.Sesayap	38.476.000,00
21	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	13	Jalan Padat Karya, Rt.001, Rw.001 Desa Tideng Pale Timur, Kec.Sesayap	72.923.000,00
Jumlah						**66.317.220.577,16**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(2.310.802.049.238,91) **(2.141.030.024.649,11)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp2.310.802.049.238,91) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.141.030.024.649,11), maka terdapat kenaikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp169.772.024.589,80 atau 7,93%. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggunakan aplikasi e-BMD untuk melakukan proses penyusutan. Aplikasi e-BMD menerapkan metode garis lurus (*straight line method*) dalam proses menghitung Penyusutan Aset tetap dan SIPD menggunakan hasil dari penyusutan e-BMD untuk Laporan Neraca keuangan.

5.3.1.4 Aset lainnya **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
89.027.048.123,14 **131.064.346.686,10**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp89.027.048.123,14 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp131.064.346.686,10, maka terdapat penurunan saldo Aset Lainnya senilai Rp42.037.298.562,96 atau 32,07%. Aset Lainnya terdiri dari, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Adapun rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.109
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tuntutan Ganti Rugi, terdiri dari:		**23.868.930.822,61**	**31.915.383.824,39**
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	438.293.300,13	1.148.271.300,13
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	23.430.637.522,48	30.767.112.524,26
Aset Tak Berwujud dari:		**15.917.378.091,90**	**15.293.901.007,00**

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024
3	Lisensi dan *franchise*	559.627.274,00	558.627.274,00
4	Hak Cipta	190.000.000,00	190.000.000,00
5	*Software*	9.231.987.056,00	8.508.227.056,00
6	Kajian	48.846.389.220,45	43.346.322.676,00
7	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(42.910.625.458,55)	(37.309.275.999,00)
Aset Lain-lain		**49.240.739.208,63**	**83.855.061.854,71**
8	Aset Lain-lain	119.541.861.882,31	153.133.187.528,95
9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(70.301.122.673,68)	(72.988.066.674,24)
10	Kas yang Dibatasi Penggunaannya / TDF	0,00	3.709.941.000,00
Jumlah		**89.027.048.12314**	**131.064.346.686,10**

Rincian lain Aset Lainnya, sebagai berikut.

a. Aset Lainnya yang belum dihapuskan karena menunggu SK Bupati terkait penghapusan senilai Rp119.541.861.882,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110
Rincian Aset Lainnya yang Belum Dihapuskan Tahun 2025

No	KIB	Unit	Total Harga
1	Peralatan dan Mesin	4.666	56.419.713.915,07
2	Gedung dan bangunan	66	11.106.485.327,67
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	107	49.678.459.259,56
4	Aset Tetap Lainya	118	2.267.957.380,00
5	Aset Tak Berwujud	1	69.246.000,00
Total		**4.958**	**119.541.861.882,31**

b. Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang belum diserahkan sehingga belum dilakukan penghapusan senilai Rp1.258.853.867,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111
Rincian Aset Lainnya Belum Diserahkan ke Provinsi Kalimantan Utara

No	SKPD	Harga
1	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	132.259.000,00
2	SMA Negeri 001 Tana Lia	142.565.000,00
3	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	984.029.867,00
JUMLAH		**1.258.853.867,00**

Adapun Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang belum diserahkan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.30**.

c. Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya dan akan dilelang Rp1.393.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112
Rincian Aset Tetap Habis Masa Manfaatnya

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Tahun	Harga
1	Bagian Umum	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	02.02.01.01.006	7	2010	492.250.000,00
2	Bagian Umum	Sedan	02.02.01.01.001	5	2011	450.525.000,00
3	Bagian Umum	Sedan	02.02.01.01.001	6	2011	450.525.000,00
Jumlah						**1.393.300.000,00**

d. Aset yang hilang dan masih dalam proses TGR senilai Rp200.185.659,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113
Rincian Aset yang Hilang Masih dalam Proses TGR

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	Merk	Tahun	Harga	Keterangan
1	BPKAD	Note Book	02.10.01.02.003	Acer4736 G / Intel Core 2 Duo T 6600 @2,2 GHz, 800 Mhz FSB	2010	12.744.325,00	*Notebook*
2	BPKAD	Note Book	02.10.01.02.003	Toshiba / Satelite	2011	11.550.000,00	*Notebook*
3	DISDUKCAPIL	Sepeda Motor	02.02.01.04.001	yamaha / mio sporty cw	2010	17.210.000,00	Sepeda Motor
4	DPMPTSP	Brangkas	02.05.01.04.007	A. Lokal. I. / 58 CMX	2011	5.550.000,00	Hilang
5	DPMPTSP	Lap Top	02.10.01.02.002	Asus / X451C	2014	9.258.000,00	Hilang
6	Kecamatan Muruk Rian	Kipas Angin	02.05.02.04.006	ReGency	2013	1.666.667,00	Kipas Angin
7	Kecamatan Muruk Rian	Kipas Angin	02.05.02.04.006	ReGency	2013	1.666.667,00	Kipas Angin
8	Kecamatan Muruk Rian	*Sound System*	02.05.02.06.008	-	2013	4.150.000,00	Salon
9	Kecamatan Muruk Rian	*Sound System*	02.05.02.06.008	-	2013	4.150.000,00	Salon
10	Kecamatan Muruk	Lap Top	02.10.01.02.002	toshiba / intel corei5-	2013	11.900.000,00	Laptop

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	Merk	Tahun	Harga	Keterangan
	Rian			3317u,4GB DDR3 750 GB HDD, DVR/RW,WIF			
11	Kecamatan Muruk Rian	Mixer PVC	02.06.01.02.074	-	2013	10.000.000,00	Pengadaan Mixer TVC dan Kabel
12	SMPN 4 Tana Tidung	Lap Top	02.10.01.02.002	Acer / TravelMate 4740	2010	11.880.000,00	Laptop
13	SMPN 4 Tana Tidung	Lap Top	02.10.01.02.002	Acer / TravelMate 4740	2010	11.880.000,00	laptop
14	Kecamatan Tana Lia	Camera + Attachment	02.05.02.06.021	Canon	2013	9.000.000,00	*Camera Digital*
15	DPPP	Pompa Lain- lain	02.02.03.05.007	-	2010	5.900.000,00	Mesin Sedot Air hilang
16	DPPP	Mesin Ketik Listrik Standard	02.05.01.01.006	-	2012	14.850.000,00	Solar sel Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
17	DPPP	Mesin Ketik Listrik Standard	02.05.01.01.006	-	2012	14.850.000,00	Solar sel Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
18	Kec Betayau	Lap Top	02.10.01.02.002	HP	2024	10.000.000,00	
19	Bagian Pemerintahan	Lap Top	02.10.01.02.002	Laptop Toshiba / Satelite L754	2011	15.700.000,00	Laptop
20	Satpol-PP	SOLAR CELL	02.06.03.47.003	Polycrstallin E Solar	2017	16.280.000,00	Lokasi Pos Jaga Ds. Kujau Kec.Betayau
Jumlah						**200.185.659,00**	

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.4.1	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**23.868.930.822,61**	**31.915.383.824,39**

Saldo akhir Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp23.868.930.822,61 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp31.915.383.824,39, maka terdapat penurunan saldo TGR senilai Rp8.046.453.001,78 atau 25,21%. TGR merupakan Kerugian Daerah yang penanggung jawabnya oleh Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara serta Pihak Ketiga pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian tuntutan ganti rugi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.114
Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Kerugian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.148.271.300,13	0.00	709.978.000,00	438.293.300,13
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	30.767.112.524,26	6.771.835.115,41	14.108.310.117,19	23.430.637.522,48
Jumlah	**31.915.383.824,39**	**6.771.835.115,41**	**14.818.288.117,19**	**23.868.930.822,61**

Mutasi masuk pada rincian TGR ini terdiri dari koreksi kurang saji atas Hasil Pemeriksaan, Reklasifikasi Status Kerugian Daerah serta Perpindahan atas status dari Informasi ke Ketetapan. Sedangkan Mutasi keluar pada Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara terdiri dari Reklasifikasi status Kerugian Daerah, Pemulihan atas Kerugian Daerah yang telah ditetapkan dan Perpindahan Kerugian Daerah pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara atas yang telah ditetapkan melalui SKTJM.

Selain itu, mutasi keluar pada Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain terdiri dari Koreksi atas Lebih Saji atas Hasil Pemeriksaan, pemulihan Kerugian Daerah yang telah ditetapkan senilai Rp434.770.076,00, pemulihan atas Kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara senilai Rp844.104.144,00, pemulihan atas Kerugian Daerah melalui Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2024 ke bawah senilai Rp49.043.000,00, dan pemulihan atas Kerugian Daerah terhadap Pihak Ketiga yang terdiri dari pemulihan melalui STS senilai Rp8.769.609.201,66 dan pemulihan melalui pemotongan Berita Acara Pembayaran (BAP) Pekerjaan senilai Rp859.114.036,06, serta Perpindahan Kerugian Daerah pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atas yang telah ditetapkan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTJM).

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	58.828.003.550,45	52.603.177.006,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp58.828.003.550,45 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp52.603.177.006,00, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp6.224.826.544,45 atau 11,83%. Rincian atas Aset Tak Berwujud dijelaskan sebegai berikut.

Tabel 5.115
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Hak Cipta	190.000.000,00	190.000.000	0,00	0,00
2	Kajian	48.846.389.220,45	43.346.322.676	5.500.066.544,45	12,69
3	Lisensi dan Franchise	559.627.274,00	558.627.274,00	1.000.000,00	0,18
4	Software	9.231.987.056,00	8.508.227.056,00	723.760.000,00	8,51
Jumlah		**58.828.003.550,45**	**52.603.177.006,00**	**6.224.826.544,45**	**11,83**

Adapun rincian mutasi penambahan dasan pengurangan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.116
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	**Saldo Awal**	**52.603.177.006,00**
B	**Mutasi Masuk**	
1	Penambahan dari Belanja Modal	1.881.003.468,00
2	Reklas dari BM Gedung dan Bangunan	961.020.900,45
3	Reklas dari Aset Tetap Lainnya - Kajian	981.524.500,00
4	Reklas dari Belanja Peralatan dan Mesin BOP	3.300.000,00
5	Reklas dari Belanja Persediaan	2.528.334.600,00
6	Aset Ekstrakomp Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
Jumlah B		**6.356.313.468,45**
C	**Mutasi Keluar**	
1	Pengurangan Aset Tak Berwujud direklas ke Aset Lain-Lain	69.246.000,00
2	Pengurangan Aset Tak Berwujud karena Pembayaran Hutang Pekerjaan Tahun Lalu	62.240.924,00
Jumlah C		**131.486.924,00**
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud (A+B-C)		**58.828.003.550,45**

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD beserta mutasi penambahan dan Pengurangan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.31**.

5.3.1.4.3	**Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		(42.910.625.458,55)	**(37.309.275.999,00)**

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp42.910.625.458,55) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp37.309.275.999,00), maka terdapat kenaikan saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp5.601.349.459,55 atau 15,01%. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.32**.

5.3.1.4.4	**Aset Lain-Lain**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		119.541.861.882,31	**153.133.187.528,95**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp119.541.861.882,31 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp153.133.187.528,95, maka terdapat penurunan saldo Aset Lain-

lain senilai Rp33.591.325.646,64 atau 21,94%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemindahtanganan aset melalui skema penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaksanaan penghapusan terhadap sebagian objek Aset Lain-lain pada TA 2025. Aset lain-lain selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.33**.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.4.4.1	**Aset Rusak Berat / Usang**	**84.650.692.222,26**	**110.176.748.503,95**

Saldo Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp84.650.692.222,26 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp110.0176.748.503,95, maka terdapat penurunan saldo Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp25.526.056.281,69 atau 23,17%.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.4.4.2	**Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**	**34.891.169.660,05**	**42.956.439.025,00**

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp34.891.169.660,05 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp42.956.439.025,00, maka terdapat penurunan saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah senilai Rp8.065.269.364,95 atau 18,78%. Hal tersebut terjadi akibat Penghapusan atas Aset yang diserahkan ke ke PDAM.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.4.5	**Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**	**(70.301.122.673,68)**	**(72.988.066.674,24)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp70.301.122.673,68) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp72.988.066.674,24), maka terdapat penurunan saldo Akumulasi Penyusutan senilai Rp2.686.944.000,56 atau 3,68%. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.34**.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.4.6	**Kas yang dibatasi Penggunaannya**	**0,00**	**3.709.941.000,00**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.05/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA 2022. Pada akhir tahun 2023, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan

efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar. Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF-TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemda setelah *holding period* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai Nomor 900.1.14.1/7481/keuda perihal Pengeluaran DBH/DAU melalui Fasilitas TDF maka Pemerintah Daerah mengakui sebagai Aset Lainnya. Sesuai rekening lain Bank Indonesia TDF, Saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya/TDF per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.709.941.000,00, maka terdapat penurunan saldo Dana TDF senilai Rp3.709.941.000,00 atau 100,00%.

5.3.2	**Kewajiban**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		243.274.217.607,28	**142.458.748.052,58**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp243.274.217.607,28 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp142.458.748.052,58, maka terdapat kenaikan saldo Kewajiban senilai Rp100.815.469.554,70 atau 70,77%. Kewajiban dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		176.150.459.623,28	**142.458.748.052,58**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp176.150.459.623,28 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp142.458.748.052,58, maka terdapat kenaikan saldo Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp33.691.711.570,70 atau 23,65%. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.117
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.504.952,00	11.344.847,00	(8.839.895,00)	(77,92)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	52.498.817,74	138.745.677,00	(86.246.859,26)	(62,16)
3	Utang Belanja	5.438.651.174,84	8.338.063.528,58	(2.899.412.353,74)	(34,77)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	170.656.804.678,70	133.970.594.000,00	36.686.210.678,70	27,38
Jumlah		**176.150.459.623,28**	**142.458.748.052,58**	**33.691.711.570,70**	**23,65**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	2.504.952,00	11.344.847,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.504.952,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp11.344.847,00, maka terdapat penurunan saldo Utang PFK senilai Rp8.839.895,00 atau 77,92%. Utang tersebut merupakan pajak Bantuan Operasional Penyelenggaraan BLUD dan BOS yang belum tersetor per 31 Desember 2025. Adapun rincian Utang PFK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.118
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Utang PPh 22	0,00	542.753,00	(542.753,00)	(100,00)
	- Utang PFK PPh 22 BLUD (RSUD Ahkmad Berahim)	0,00	542.753,00	(542.753,00)	(100,00)
2	Utang PPh 23	485.560,00	4.716.538,00	(4.230.978,00)	(89,71)
	- Utang PFK PPh 23 BOS (SDN 001)	374.960,00	4.716.538,00	(4.341.578,00)	(92,05)
	- Utang PFK PPh 23 BOP (SDN 001)	110.600,00	0,00	110.600,00	100,00
3	Utang PPN Pusat	2.019.392,00	6.085.556,00	(4.066.164,00)	(66,82)
	- Utang PFK PPn BLUD (RSUD Ahkmad Berahim)	0,00	3.980.186,00	(3.980.186,00)	(100,00)
	- Utang PFK PPn BOS (SDN 020)	0,00	60.760,00	(60.760,00)	(100,00)
	- Utang PFK PPn BOS (SDN TU 1)	330.723,00	0,00	330.723,00	100,00
	- Utang PFK PPn BOS (SDN TU 2)	1.360.669,00	0,00	1.360.669,00	100,00
	- Utang PFK PPn BOP (SDN 001)	328.000,00	2.044.610,00	(1.716.610,00)	(83,96)
Jumlah		**2.504.952,00**	**11.344.847,00**	**(8.839.895,00)**	**(77,92)**

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	52.498.817,74	138.745.677,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp52.498.817,74 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp138.745.677,00, maka terdapat penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp86.246.859,26 atau 62.16%. Penyajian Pendapatan Diterima

Dimuka dalam laporan keuangan dihitung dan diakui secara bertahap setiap bulan berdasarkan porsi layanan atau barang yang telah diserahkan. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.119
Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir TA 2025
Pajak Reklame	0,00	4.973.817,74	0,00	4.973.817,74
Sewa Pasar trans Betayau	22.500.000,00	0,00	6.000.000,00	16.500.000,00
Sewa Bangunan Galeri ATM Pasar Imbayud Taka	0,00	31.025.000,00	0,00	31.025.000,00
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	102.780.102,00	0,00	102.780.102,00	0,00
Jumlah	**125.280.102,00**	**35.998.817,74**	**108.780.102,00**	**52.498.817,74**

Pada Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Diterima dari Pajak Reklame sebanyak 27 Surat Ketetapan yang telah diterbitkan untuk masa pajak TA 2025 dengan akhir masa pajak tahun 2026 senilai Rp4.973.817,74. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 5.35**.

b. Pendapatan Diterima Dimuka berupa sewa Pasar Trans Betayau yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2028 senilai Rp41.250.000,00 dengan Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp16.500.000,00, dan sewa gedung galeri ATM Pasar Imbayud Taka KTT yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 April 2025 dan akan berakhir pada tanggal 28 April 2030 senilai Rp36.500.000,00 dengan Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp31.025.000,00. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka berupa sewa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berupa Sewa per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nama Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Sewa	Pendapatan Pajak Reklame – LO	Pendapatan Diterima di Muka
1	Ruko Betayau	BPD Kaltimtara	41.250.000,00	01/01/2024 s.d. 01/01/2028	8.250.000,00	16.500.000,00
2	ATM Pasar Imbayun	BPD Kaltimtara	36.500.000,00	28/04/2025 s.d. 28/04/2030	5.475.000,00	31.025.000,00
Jumlah			**77.750.000,00**		**13.725.000,00**	**47.525.000,00**

5.3.2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.438.651.174,84	8.338.063.528,58

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.438.651.174,84 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp8.338.063.528,58, maka terdapat penurunan saldo Utang Belanja senilai Rp2.899.412.353,74 atau 34,77%. penjelasan utang tersebut dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.063.078.419,00	3.479.341.372,00

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.063.078.419,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.479.341.372,00, maka terdapat penurunan saldo Utang Belanja Pegawai senilai Rp1.416.262.953,00 atau 40,70%. Penurunan tersebut dikarenakan instansi terkait telah menyalurkan dana untuk membayar hak-hak pegawai yang sebelumnya tercatat sebagai utang. Adapun rincian Utang Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.121
Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.743.560.310,00	(1.743.560.310,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.875.208,00	172.165.162,00	(141.289.954,00)	(82,07)
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	2.032.203.211,00	1.563.615.900,00	468.587.311,00	29,97
Jumlah		**2.063.078.419,00**	**3.479.341.372,00**	**(1.416.262.953,00)**	**(40,70)**

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
814.195.506,10	480.477.384,55

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp814.195.506,10 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp480.477.384,55, maka terdapat kenaikan saldo utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp333.718.121,55 atau 69,46%. Dikarenakan terdapat komitmen pengadaan belanja obat-obatan yang telah terealisasi namun belum diselesaikan proses pembayarannya kepada pihak rekanan. Adapun rincian Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.122

Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan	0,00	185.881.204,00	0,00	185.881.204,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	10.610.623,00	0,00	10.610.623,00
3	Utang Belanja Barang yang Diserahkan	271.762.223,55	266.939.223,93	271.762.223,55	266.939.223,93
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	3.622.698,00	0,00	3.622.698,00	0,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	9.038.848,00	17.100.340,00	9.038.848,00	17.100.340,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	172.847.847,00	308.662.803,00	172.847.847,00	308.662.803,000
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	20.655.768,00	21.589.312,17	20.655.768,00	21.589.312,17
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	0,00	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
Jumlah		**480.477.384,55**	**814.195.506,10**	**480.477.384,55**	**814.195.506,10**

Berdasarkan tabel di atas, rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2025 disajikan pada **Lampiran 5.36**.

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.561.377.249,74	**4.378.244.772,03**

Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.561.377.249,74 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp4.378.244.772,03, maka terdapat penurunan saldo Utang Belanja Modal senilai Rp1.816.867.522,29 atau 41,50%. Adapun rincian Utang Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.123
Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	18.348.957,77	0,00	18.348.957,77
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.263.228.135,48	2.026.870.031,73	1.263.228.135,48	2.026.870.031,73
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.052.775.712,55	455.091.923,56	2.991.709.375,87	516.158.260,24
4	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	62.240.924,00	0,00	62.240.924,00	0,00
Jumlah		**4.378.244.772,03**	**2.500.310.913,06**	**4.317.178.435,35**	**2.561.377.249,74**

Berdasarkan tabel di atas, rincian Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dijelaskan pada **Lampiran 5.37**. Adapun Utang Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.2.1.3.3	**Utang Belanja Modal Tanah**	**18.348.957,77**	**0,00**

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp18.348.957,77 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Belanja Modal Tanah senilai Rp18.348.957,77 atau 100%. Kenaikan tersebut dikarenakan Pematangan Lahan Taman Budaya Kabupaten Tana Tidung belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2025.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.2.1.3.3	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**2.026.870.031,73**	**1.263.228.135,48**

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.026.870.031,73 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.263.228.135,48, maka terdapat kenaikan saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp763.641.896,25 atau 60,45%.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.2.1.3.3	**Utang Belanja Modal Jaringan, Jaringan, dan Irigasi**	**516.158.260,24**	**3.052.775.712,55**

Saldo Utang Belanja Modal Jaringan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp516.158.260,24 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.052.775.712,55, maka terdapat kenaikan saldo Utang Belanja Modal Jaringan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp2.536.617.452,31 atau 83,09%.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.2.1.3.3	**Utang Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud**	**0,00**	**62.240.924,00**

Saldo Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp62.240.924,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka penurunan 100%. Penurunan tersebut dikarenakan instansi terkait telah menyalurkan dana untuk membayarkan kepada rekanan pada tahun pelaporan.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.2.1.4	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**170.656.804.678,70**	**133.970.594.000,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp170.656.804.678,70 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp133.970.594.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp36.686.210.678,70 atau 27,38%. Kenaikan ini mencerminkan adanya kewajiban baru yang sangat signifikan pada tahun berjalan, khususnya yang bersumber dari utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.124
Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	133.970.594.000,00	47.394.581.000,00	11.129.824.000,00	170.235.351.000,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	0,00	421.453.678,70	0,00	421.453.678,70
Total		**133.970.594.000,00**	**47.816.034.678,70**	**11.129.824.000,00**	**170.656.804.678,70**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.2.1.4.1	**Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan**	**170.235.351.000,00**	**133.970.594.000,00**

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Perimbangan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp170.235.351.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp133.970.594.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat yang Berasal dari Dana Perimbangan senilai Rp36.264.757.000,00 atau 27,07%.

Kenaikan tersebut merujuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2025. Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian signifikan atas kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait dana transfer. Adapun rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.125
Rekapitulasi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025

Uraian Dana Bagi Hasil	Lebih Bayar (LB)			
	Saldo Awal Utang TA 2024	Penyelesaian LB s.d. TA 2023	LB s.d. TA 2024	Pembulatan LB s.d. TA 2023
1	2	3	4	5=2+4-3
Pajak	**1.324.559.000,00**	**1.324.559.000,00**	**162.099.000,00**	**162.099.000,00**
Bagian Daerah PBB Panas Bumi	0,00	0,00	162.099.000,00	162.099.000,00
Bagian Daerah Migas	1.123.643.000,00	1.123.643.000,00	0,00	0,00
Bagian Daerah Perkebunan	200.916.000,00	200.916.000,00	0,00	0,00
SDA	**132.646.035.000,00**	**9.805.265.000,00**	**47.232.482.000,00**	**170.073.252.000,00**
Minyak Bumi	3.355.294.000,00	3.355.294.000,00	1.171.410.000,00	1.171.410.000,00
Gas Bumi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Landrent	61.015.000,00	61.015.000,00	38.411.000,00	38.411.000,00
Royalti	123.344.418.000,00	6.388.955.000,00	42.814.634.000,00	159.770.097.000,00
IIUPH	0,00	0,00	0,00	0,00
PSDH	1.799.497.000,00	0,00	0,00	1.799.497.000,00
Perikanan	1.006.057.000,00	0,00	355.564.000,00	1.361.621.000,00
Perkebunan Sawit	3.079.753.000,00	0,00	2.852.463.000,00	5.932.216.000,00
Jumlah	**133.970.594.000,00**	**11.129.824.000,00**	**47.394.581.000,00**	**170.235.351.000,00**

Berdasarkan tabel di atas, adapun rincian Lebih Bayar DBH terdapat pada **Lampiran 5.38**.

5.3.2.1.4.2	**Utang Kelebihan Pembayaran Hibah**	**31 Desember 2025** **421.453.678,70**	**31 Desember 2024** **0,00**

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Hibah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp421.453.678,70 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Kelebihan Pembayaran Hibah senilai Rp421.453.678,70 atau 100,00%. Utang tersebut merupakan kewajiban Pengembalian Sisa Dana Hibah berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) nomor:S-35/MK.7/2024 TA 2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) nomor : PHD-66/MK.7/DTK.03/RR/2024 tanggal 14 November 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung mendapat dana hibah BNPB Senilai Rp17.314.145.000,00 untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan pada tanggal 23 Desember 2024 anggaran tersebut telah di transfer dari RKUN ke RKUD Kabupaten Tana Tidung, dana dimaksud telah termanfaatkan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada TA 2025 untuk kegiatan sebagai berikut.

Tabel 5.126
Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Hibah Tahun 2025

No	Kegiatan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Sisa Tender
1	Rehabilitasi Ruas Jalan Sambungan - Tengku Dacing STA 5+200-5+240 (lokasi 5)	4.967.672.000,00	4.712.998.572,60	254.673.427,40
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Sambungan - Tengku Dacing STA 8+700-8+850 (lokasi 6)	12.346.473.000,00	12.179.692.748,70	166.780.251,30
Jumlah		**17.314.145.000,00**	**16.892.691.321,30**	**421.453.678,70**

Terdapat sisa dana dari sisa tender kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang tidak termanfaatkan oleh Pemerintah KabupatenTana Tidung dan wajib dikembalikan ke RKUN sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Rekonstruksi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	67.123.757.984,00	**0,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.123.757.984,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp67.123.757.984,00 atau 100,00%. Kenaikan dikarenakan Tuntutan dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung didasarkan bahwa selama Tahun 2008 s.d. 2010, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerima pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) senilai 6% dari harga jual batubara/ton yang dilakukan oleh PT PMJ. Total pembayaran kompensasi dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama Tahun 2008 s.d. 2010 tersebut senilai Rp67.123.757.984,00.

Namun demikian, Surat Gubernur Kaltim kepada Bupati Tana Tidung Nomor 545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral, menegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada PT PMJ tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PT PMJ kemudian melakukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta pengembalian dana kompensasi tersebut. Sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung diwajibkan untuk mengembalikan dana KKSDA kepada PT PMJ senilai Rp67.123.757.984,00.

5.3.2.2.1 Utang Kepada Pihak Swasta	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	67.123.757.984,00	**0,00**

Saldo Utang Kepada Pihak Swasta per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.123.757.984,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Kepada Pihak Swasta senilai Rp67.123.757.984,00 atau 100%. Utang Kepada Pihak Swasta atas Utang Pemerintah daerah kepada PT. PMJ berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 22 April 2026 bahwa Pemerintah Tana Tidung akan melaksanakan pembayaran dengan metode cicilan yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tahun 2027 sampai dengan tahun 2036.

5.3.3 Ekuitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	3.942.758.575.746,62	**3.610.370.207.483,78**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo Ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL akhir. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.942.758.575.746,62 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.610.370.207.483,78, maka terdapat kenaikan saldo Ekuitas senilai Rp332.388.368.262,84 atau 9,21%.

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa. Laporan Operasional merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Laporan Operasional TA 2025 disajikan secara komparatif dengan TA 2024.

5.4.1 Pendapatan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.028.473.552.676,30	**983.691.175.744,73**

Pendapatan Laporan Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pendapatan-LO TA 2025 senilai Rp1.028.473.552.676,30. Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO TA 2024 senilai Rp983.691.175.744,73, maka Pendapatan-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp44.782.376.931,57 atau 4,55%, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127
Realisasi Pendapatan-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	53.616.787.939,46	54.566.035.153,48
2	Pendapatan Transfer-LO	970.452.000.024,00	905.103.395.785,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	4.404.764.712,84	24.021.744.806,25
Jumlah		**1.028.473.552.676,30**	**983.691.175.744,73**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
53.616.787.939,46	**54.566.035.153,48**

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 senilai Rp53.616.787.939,46. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 senilai Rp54.566.035.153,48, maka Pendapatan Asli Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp949.247.214,02 atau 1,74%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembayaran TGR tahun sebelumnya yang disetorkan ke RKUD TA 2025 sehingga mengurangi pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Adapun Pendapatan Asli Daerah-LO dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.128
Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah-LO	10.729.155.449,26	7.646.855.773,58	3.082.299.675,68	40,31
2	Retribusi Daerah-LO	9.860.962.650,00	1.283.361.623,00	8.577.601.027,00	668,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.741.723.567,47	5.454.784.626,96	(1.713.061.059,49)	(31,40)
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	29.284.946.272,73	40.181.033.129,94	(10.896.086.857,21)	(27,12)
Jumlah		**53.616.787.939,46**	**54.566.035.153,48**	**(949.247.214,02)**	**(1,74)**

Dari tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO lainnya di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
10.729.155.449,26	**7.646.855.773,58**

Pajak Daerah-LO TA 2025 senilai Rp10.729.155.449,26. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 senilai Rp7.646.855.773,58, maka Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp3.082.299.675,68 atau 40,31%. Kenaikan tersebut dikarenakan PBJT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB baru diberlakukan di TA 2025.

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 5.129
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	53.774.501,00	68.905.819,00	(15.131.318,00)	(21,96)
2	Pajak Restoran	3.896.347.555,00	3.647.520.930,00	248.826.625,00	6,82
3	Pajak Hiburan	3.567.800,00	1.500.000,00	2.067.800,00	137,85
4	Pajak Reklame	28.344.650,26	27.742.448,58	602.201,68	2,17
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	2.310.737.027,00	(2.310.737.027,00)	(100,00)
6	Pajak Air Tanah	7.747.709,00	6.803.950,00	943.759,00	13,87
7	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	566.947.795,00	586.579.495,00	(19.631.700,00)	(3,35)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	812.903.344,00	777.324.494,00	35.578.850,00	4,58
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	214.788.550,00	214.741.610,00	46.940,00	0,02

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bangunan (BPHTB)				
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.338.444.245,00	0,00	2.338.444.245,00	100,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.263.915.500,00	0,00	1.263.915.500,00	100,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.535.373.800,00	0,00	1.535.373.800,00	100,00
Jumlah		**10.729.155.449,26**	**7.646.855.773,58**	**3.082.299.675,68**	**40,31**

Perbedaan pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.130
Pengukuran Pajak Daerah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Pajak Hotel	53.774.501,00	53.774.501,00	0,00	0,00	-
2	Pajak Restoran	3.895.327.555,00	3.896.347.555,00	(1.020.000,00)	1.020.000,00	Piutang Pajak asli daerah TA 2024 dan 2025-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
3	Pajak Hiburan	3.567.800,00	3.567.800,00	0,00	0,00	-
4	Pajak Reklame	18.950.430,00	28.344.650,26	(9.394.220,26)	(5.706.807,17)	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
					13.465.575,00	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
					1.098.651,00	Piutang Pajak asli daerah TA 2024 dan 2025
					732.989,43	koreksi lebih saji atas pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame (Audited)
					(196.188,00)	Koreksi pengakuan atas kurang saji Piutang Pajak Reklame dan MBLB TA 2024 yang tidak tercatat pada LK TA 2024 Audited
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Pajak Air Tanah	7.747.709,00	7.747.709,00	0,00	0,00	-
7	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	Piutang Pajak asli daerah TA 2024 dan 2025
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	576.808.547,00	566.947.795,00	9.860.752,00	(9.625.752,00)	Pembayaran Piutang MBLB

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					(235.000,00)	Pembayaran Piutang MBLB
					18.335.100,00	Laporan piutang pajak asli daerah TA 2024 2025
					(18.335.100,00)	Koreksi pengakuan atas kurang saji Piutang Pajak Reklame dan MBLB TA 2024 yang tidak tercatat pada LK TA 2024 Audited
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	381.340.986,00	812.903.344,00	(431.562.358,00)	(381.340.986,00)	Ketetapan, Pembayaran Pokok dan Penyisihan Piutang PBBP2 TA 2025
					812.903.344,00	
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	214.788.550,00	214.788.550,00	0,00	0,00	-
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.286.782.883,00	2.338.444.245,00	(51.661.362,00)	51.661.362,00	Laporan piutang pajak asli daerah TA 2024 2025
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.263.915.500,00	1.263.915.500,00	0,00	0,00	-
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.535.373.800,00	1.535.373.800,00	0,00	0,00	-
Jumlah		**10.240.378.261,00**	**10.729.155.449,26**	**(488.777.188,26)**	**488.777.188,26**	

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
9.860.962.650,00 **1.283.361.623,00**

Retribusi Daerah-LO TA 2025 senilai Rp9.860.962.650,00. Jika dibandingkan dengan Retribusi Daerah-LO TA 2024 senilai Rp1.283.361.623,00, maka Retribusi Daerah-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.577.601.027,00 atau 668,37%. Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan karena:

a. Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga masih ada di bendahara penerimaan yang terlambat disetorkan ke kas daerah

b. Adanya kesalahan penganggaran penempatan akun yang seharusnya di pendapatan BLUD ke akun retribusi pelayanan kesehatan

Perbedaan pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA mengalami selisih.

Adapun rincian Retribusi Daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 5.131
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.993.248.418,00	658.353.989,00	8.334.894.429,00	1.266,02
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	62.778.000,00	31.788.000,00	30.990.000,00	97,49
3	Retribusi Pelayanan Pasar	75.605.000,00	48.603.000,00	27.002.000,00	55,56
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.950.000,00	3.850.000,00	8.100.000,00	210,39
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.287.200,00	62.669.940,00	(50.382.740,00)	(80,39)
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	157.825.000,00	54.000.000,00	103.825.000,00	192,27
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	411.984.000,00	320.668.000,00	91.316.000,00	28,48
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	89.488.713,00	77.661.500,00	11.827.213,00	15,23
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	21.069.000,00	0,00	21.069.000,00	100,00
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	24.727.319,00	25.767.194,00	(1.039.875,00)	(4,04)
Jumlah		**9.860.962.650,00**	**1.283.361.623,00**	**8.577.601.027,00**	**668,37**

Perbedaan pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.132
Pengukuran Retribusi Daerah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2025		Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.960.041.275,00	8.993.248.418,00	(33.207.143,00)	33.207.143,00	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Pelayanan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	62.778.000,00	62.778.000,00	0,00	0,00	-
3	Retribusi Pelayanan Pasar	75.483.000,00	75.605.000,00	(122.000,00)	45.000,00 77.000,00	Koreksi kurang saji atas Piutang Retribusi - Jasa Umum - Pelayanan Pasar - Los dan Pelataran
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.594.750,00	11.950.000,00	(355.250,00)	355.250,00	Kas dibendahara Penerimaan TA 2025 yang baru disetorkan pada Tahun 2026

No	Uraian	Per 31 Desember 2025		Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.287.200,00	12.287.200,00	0,00	0,00	-
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	157.825.000,00	157.825.000,00	0,00	0,00	-
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	411.984.000,00	411.984.000,00	0,00	0,00	-
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	91.280.713,00	89.488.713,00	1.792.000,00	(1.792.000,00)	Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terlambat setor
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	43.844.000,00	21.069.000,00	22.775.000,00	(26.766.666,67)	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
					6.000.000,00	
					2.250.000,00	Koreksi kurang saji atas pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah - LO atas sewa ruko pada pasar Trans Betayau
					(4.258.333,33)	Koreksi PDD Sewa Gedung Galery ATM Pasar Imbayud Taka KTT
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	24.727.319,00	24.727.319,00	0,00	0,00	-
Jumlah		**9.851.845.257,00**	**9.860.962.650,00**	**(9.117.393,00)**	**9.117.393,00**	

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.1.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**	**3.741.723.567,47**	**5.454.784.626,96**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 senilai Rp3.741.723.567,47. Jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 senilai Rp5.454.784.626,96, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.713.061.059,49 atau 31,40%. Penurunan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada Bankaltimtara dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh tidak dilakukannya penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Penurunan persentase kepemilikan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan proporsi hak atas laba (Dividen) yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, meskipun kinerja keuangan Bankaltimtara secara umum tidak mengalami penurunan yang signifikan, kontribusi dividen menunjukkan tren menurun seiring dengan perubahan komposisi kepemilikan saham.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.1.1.4	**Lain-lain PAD Yang Sah-LO**	**29.284.946.272,73**	**40.181.033.129,94**

Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 senilai Rp29.284.946.272,73. Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2024 senilai Rp40.181.033.129,94, maka Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp10.896.086.857,21 atau 27,12%. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO mengalami penurunan karena berkurangnya pendapatan remunerasi atas penempatan dana pada fasilitas TDF. Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan strategis pengelolaan kas daerah, khususnya melalui percepatan dan peningkatan volume penarikan dana dari instrumen TDF untuk memenuhi belanja program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebagai berikut.

Tabel 5.133
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	258.133.908,00	231.524.500,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	102.780.102,00	113.525.196,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.456.098.561,28	7.609.090.345,26
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	9.967.893,00	8.124.678,63
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.931.498.473,22	14.893.284.569,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	25.553.000,00	0,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.438.881.516,17	10.060.131.401,47
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	59.518.239,39	2.000.000,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.466.745.068,39	243.302.587,58
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.323.042,00	3.048.884,00
11	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	279.639.000,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.196.700,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	74.228.798,00	118.758.853,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	854.336,43	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	24.465.000,00	71.100,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.745.868.516,16	1.874.408,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	699.046.439,51	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.045.922.741,47	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	677.828,00	0,00
20	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.608.547.109,71	6.896.296.607,00
Jumlah		**29.284.946.272,73**	**40.181.033.129,94**

Perbedaan pengukuran Lain-lain PAD Yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD Yang Sah LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.134
Pengukuran Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	258.133.908,00	258.133.908,00	0,00	0,00	-
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	102.780.102,00	(102.780.102,00)	102.780.102,00	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.456.098.561,28	9.456.098.561,28	0,00	0,00	-
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	9.967.893,00	9.967.893,00	0,00	0,00	-
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.931.498.473,22	2.931.498.473,22	0,00	0,00	-
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	25.553.000,00	25.553.000,00	0,00	0,00	-
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.048.483.421,66	9.438.881.516,17	609.601.905,49	(610.561.905,49)	Pengembalian atas Kerugian Daerah yang telah dijurnal koreksi ke Piutang Pendapatan pada saat LKPD Audited 2024
					960.000,00	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	59.518.239,39	59.518.239,39	0,00	0,00	-
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.471.713.241,39	1.466.745.068,39	4.968.173,00	(4.968.173,00)	Pembayaran atas Denda Keterlambatan Pekerjaan tanggal 20 Desember 2023 pada Dinas Kesehatan
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.323.042,00	19.323.042,00	0,00	0,00	-
11	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	279.639.000,00	279.639.000,00	0,00	0,00	-
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.196.700,00	37.196.700,00	0,00	0,00	-
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	74.228.798,00	74.228.798,00	0,00	0,00	
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	179.638.258,79	854.336,43	178.783.922,36	(178.783.922,36)	Piutang Uang Muka atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Menjelutung (MTL) dengan Nomor Kontrak 600.640/SP/T-079.1/CK/XI/2022
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	24.465.000,00	24.465.000,00	0,00	0,00	-
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.745.868.516,16	1.745.868.516,16	0,00	0,00	-
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	699.046.439,51	699.046.439,51	0,00	0,00	-

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.045.922.741,47	1.045.922.741,47	0,00	0,00	-
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	677.828,00	677.828,00	0,00	0,00	-
20	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.157.214.245,71	1.608.547.109,71	548.667.136,00	(20.233.336,00) (528.433.800,00)	Pembayaran atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Akhmad Berahim
Jumlah		**30.524.187.307,58**	**29.284.946.272,73**	**1.239.241.034,85**	**(1.239.241.034,85)**	

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
970.452.000.024,00	**905.103.395.785,00**

Pendapatan Transfer-LO TA 2025 senilai Rp970.452.000.024,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2024 senilai Rp905.103.395.785,00, maka Pendapatan Transfer-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp65.348.604.239,00 atau 7,22%. Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut.

Tabel 5.135
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	925.326.985.171,00	832.161.889.472,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	45.125.014.853,00	72.941.506.313,00
Jumlah		**970.452.000.024,00**	**905.103.395.785,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	925.326.985.171,00	832.161.889.472,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 senilai Rp925.326.985.171,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 senilai Rp832.161.889.472,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp93.165.095.699,00 atau 11,20%. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya perluasan atau peningkatan kinerja penyaluran dana perimbangan dari APBN ke APBD, pemenuhan syarat salur Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun peningkatan bagi hasil pajak akibat membaiknya indikator ekonomi makro di tahun berjalan. Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebagai berikut.

Tabel 5.136
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	918.330.887.171,00	817.997.845.472,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00
Jumlah		**925.326.985.171,00**	**832.161.889.472,00**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	918.330.887.171,00	817.997.845.472,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2025 senilai Rp918.330.887.171,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2024 senilai Rp817.997.845.472,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp100.333.041.699,00 atau 12,27%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebagai berikut.

Tabel 5.137
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil-LO	482.476.199.300,00	351.689.041.319,00	130.787.157.981,00	37,19
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
Jumlah		**918.330.887.171,00**	**817.997.845.472,00**	**100.333.041.699,00**	**12,27**

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	482.476.199.300,00	351.689.041.319,00

Dana Bagi Hasil-LO TA 2025 senilai Rp482.476.199.300,00. Jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil-LO TA 2024 senilai Rp351.689.041.319,00, maka Dana Bagi Hasil-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp130.787.157.981,00 atau 37,19%. Adapun rincian Dana Bagi Hasil-LO sebagai berikut.

Tabel 5.138
Rincian Dana Bagi Hasil-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	183.270.997.800,00	18.912.969.000,00	164.358.028.800,00	869,02
2	Bagi Hasil dari Pasal 21	5.092.377.300,00	65.120.009.401,00	(60.027.632.101,00)	(92,18)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	169.387.200,00	122.031.000,00	47.356.200,00	38,81
4	DBH CHT	0,00	896,00	(896,00)	(100,00)
5	DBH SDA Minyak Bumi	392.475.000,00	363.031.000,00	29.444.000,00	8,11
6	DBH SDA Gas Bumi	156.127.000,00	0,00	156.127.000,00	100,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	274.268.000,00	264.432.000,00	9.836.000,00	3,72
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	286.545.638.000,00	260.557.478.310,00	25.988.159.690,00	9,97
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH	2.323.315.000,00	3.230.801.712,00	(907.486.712,00)	(28,09)
10	DBH SDA Kehutanan-IIUPH	328.325.000,00	0,00	328.325.000,00	100,00
11	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.174.532.000,00	572.319.000,00	602.213.000,00	105,22
12	Bagi Hasil dari Sawit	2.748.757.000,00	2.545.969.000,00	202.788.000,00	7,97
Jumlah		**482.476.199.300,00**	**351.689.041.319,00**	**130.787.157.981,00**	**37,19**

Perbedaan pengukuran Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA-LO dengan Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.139
Pengukuran DBH-Pajak dan DBH-SDA pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	203.634.442.000,00	183.270.997.800,00	20.363.444.200,00	(20.363.444.200,00)	RPKBUN. SPAN-MDRI DBH PPH 21, PPH 25/29, PBB NON MIGAS, PBB PERKEBUNAN, PBB LAINNYA, PBB MIGAS, PBB PERHUTANAN DESEMBER 2025 (RTGS/094913/025)
2	Bagi Hasil dari Pasal 21	5.658.197.000,00	5.092.377.300,00	565.819.700,00	(565.819.700,00)	DBH PBB Februari 2025 (RPKBUN.SPAN-MDRI/RTGS/113201/022)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	188.208.000,00	169.387.200,00	18.820.800,00	(18.820.800,00)	RPKBUN. SPAN-MDRI DBH PPH 21, PPH 25/29, PBB NON MIGAS, PBB PERKEBUNAN, PBB LAINNYA, PBB MIGAS, PBB PERHUTANAN DESEMBER 2025 (RTGS/094913/025)
4	DBH SDA Minyak Bumi	392.475.000,00	392.475.000,00	0,00	0,00	-
5	DBH SDA Gas Bumi	156.127.000,00	156.127.000,00	0,00	0,00	-
6	DBH SDA Mineral dan Batubara Landrent	274.268.000,00	274.268.000,00	0,00	0,00	-
7	DBH SDA Mineral dan Batubara Royalty	286.545.638.000,00	286.545.638.000,00	0,00	0,00	-
8	DBH SDA Kehutanan PSDH	2.323.315.000,00	2.323.315.000,00	0,00	0,00	-
9	DBH SDA Kehutanan IIUPH	328.325.000,00	328.325.000,00	0,00	0,00	-
10	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.174.532.000,00	1.174.532.000,00	0,00	0,00	-
11	Bagi Hasil dari Sawit	2.748.757.000,00	2.748.757.000,00	0,00	0,00	-
Jumlah		**503.424.284.000,00**	**482.476.199.300,00**	**20.948.084.700,00**	**(20.948.084.700,00)**	

5.4.1.2.1.1.2	**Dana Alokasi Umum (DAU)-LO**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		397.312.680.666,00	**425.690.872.922,00**

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2025 senilai Rp397.312.680.666,00. Jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2024 senilai Rp425.690.872.922,00, maka Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp28.378.192.256,00 atau 6,67%. Adapun rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.140
Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	339.966.356.410,00	349.264.548.000,00	(9.298.191.590,00)	(2,66)
2	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	5.381.538.256,00	5.756.624.922,00	(375.086.666,00)	(6,52)
3	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	38.264.051.000,00	25.678.444.000,00	12.585.607.000,00	49,01
4	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	13.700.735.000,00	13.513.380.000,00	187.355.000,00	1,39
5	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	0,00	31.477.876.000,00	(31.477.876.000,00)	(100,00)
Jumlah		**397.312.680.666,00**	**425.690.872.922,00**	**(28.378.192.256,00)**	**(6,67)**

5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
38.542.007.205,00	40.617.931,231,00

Dana Alokasi Khusus-LO TA 2025 senilai Rp38.542.007.205,00. Jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus-LO TA 2024 senilai Rp40.617.931.231,00, maka Dana Alokasi Khusus-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.075.924.026,00 atau 5,11%. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.141
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	9.560.668.240,00	(9.560.668.240,00)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.810.611.370,00	0,00	10.810.611.370,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.247.694.000,00	1.901.850.564,00	345.843.436,00	18,18
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	3.401.703.628,00	(3.401.703.628,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	775.285.700,00	(775.285.700,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	1.601.422.598,00	(1.601.422.598,00)	(100,00)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	960.209.895,00	(960.209.895,00)	(100,00)
8	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	5.776.158.629,00	(5.776.158.629,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	597.500.000,00	(597.500.000,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-TPG PNSD	8.281.449.600,00	6.365.703.000,00	1.915.746.600,00	30,09
11	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	675.000.000,00	296.662.000,00	378.338.000,00	127,53
12	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.500.258.320,00	1.048.181.000,00	452.077.320,00	43,13
13	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.011.530.000,00	971.392.800,00	40.137.200,00	4,13
14	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	310.608.878,00	306.144.300,00	4.464.578,00	1,46
15	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	0,00	303.988.000,00	0,00
16	DAK Non Fisik-BOKB-KB	831.212.900,00	792.301.156,00	38.911.744,00	4,91
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	297.446.000,00	361.791.000,00	(64.345.000,00)	(17,79)
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	5.940.759.247,00	0,00	5.940.759.247,00	0,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	608.500.000,00	0,00	608.500.000,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.451.051.374,00	2.267.923.772,00	1.183.127.602,00	52,17
21	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.209.197.516,00	3.633.032.949,00	(1.423.835.433,00)	(39,19)
22	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00	0,00
Jumlah		**38.542.007.205,00**	**40.617.931.231,00**	**(2.075.924.026,00)**	**(5,11)**

Tabel 5.142
Pengukuran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	10.810.611.370,00	10.810.611.370,00	0,00	0,00	-
2	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	2.247.694.000,00	2.247.694.000,00	0,00	0,00	-
3	DAK Non FisikTPG PNSD	8.281.449.600,00	8.281.449.600,00	0,00	0,00	-

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
4	DAK Non FisikTamsil Guru PNSD	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	0,00	-
5	DAK Non FisikTKG PNSD	1.500.258.320,00	1.500.258.320,00	0,00	0,00	-
6	DAK Non FisikBOP PAUD	1.011.530.000,00	1.011.530.000,00	0,00	0,00	-
7	DAK Non FisikBOP Pendidikan Kesetaraan	310.608.878,00	310.608.878,00	0,00	0,00	-
8	DAK Non FisikBOKKBPengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	303.988.000,00	0,00	0,00	-
9	DAK Non Fisik BOKB KB	831.212.900,00	831.212.900,00	0,00	0,00	-
10	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	297.446.000,00	297.446.000,00	0,00	0,00	-
11	DAK Non Fisik Dana BOSP BOS Reguler	5.940.759.247,00	5.940.759.247,00	0,00	0,00	-
12	DAK Non Fisik Dana BOSP BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	0,00	0,00	-
13	DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota	3.451.051.374,00	3.451.051.374,00	0,00	0,00	-
14	DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Puskesmas	2.209.197.516,00	2.209.197.516,00	0,00	0,00	-
15	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	-
Jumlah		**38.542.007.205,00**	**38.542.007.205,00**	**0,00**	**0,00**	

5.4.1.2.1.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO**	**31 Desember 2025** **6.996.098.000,00**	**31 Desember 2024** **14.164.044.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2025 senilai Rp6.996.098.000,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2024 senilai Rp14.164.044.000,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp7.167.946.000,00 atau 50,61%. Realisasi Insentif Fiskal mengalami penurunan karena secara nasional alokasi anggaran Insentif Fiskal mengalami penurunan.

5.4.1.2.1.2.1 Insentif Fiskal-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00

Insentif Fiskal-LO TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.996.098.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.996.098.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal-LO TA 2024 senilai Rp14.164.044.000,00, Insentif Fiskal-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp7.167.946.000,00 atau 50,61%. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena anggaran Insentif Fiskal-LO TA 2025 disebabkan adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	45.125.014.853,00	72.941.506.313,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 senilai Rp45.125.014.853,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 senilai Rp72.941.506.313,00, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp27.816.491.460,00 atau 38,14%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 5.143
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	43.390.519.601,00	35.037.618.142,00	8.352.901.459,00	23,84
2	Bantuan Keuangan-LO	1.734.495.252,00	37.903.888.171,00	(36.169.392.919,00)	(95,42)
Jumlah		**45.125.014.853,00**	**72.941.506.313,00**	**(27.816.491.460,00)**	**(38,14)**

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	43.390.519.601,00	35.037.618.142,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2025 senilai Rp43.390.519.601,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2024 senilai Rp35.037.618.142,00, maka Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.352.901.459,00 atau 23,84%. Pendapatan Bagi Hasil-LO terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.1.2.2.1.1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO**	**43.390.519.601,00**	**35.037.618.142,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025 senilai Rp43.390.519.601,00 Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2024 senilai Rp35.037.618.142,00, maka Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.352.901.459,00 atau 23,84%. Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebagai berikut.

Tabel 5.144
Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.486.601,00	981.138.634,00
2	Bagi Hasil Dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.747.464,00	1.334.747.398,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.284.778.212,00	31.156.253.282,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	430.926.194,00	167.703.676,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.633.581.130,00	1.397.775.152,00
Jumlah		**43.390.519.601,00**	**35.037.618.142,00**

Perbedaan pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.145
Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.041.729.317,00	21.486.601,00	1.020.242.716,00	(1.020.242.716,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024
2	Bagi Hasil Dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.006.109.112,00	19.747.464,00	986.361.648,00	(986.361.648,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	40.076.502.956,00	39.284.778.212,00	791.724.744,00	(13.306.660.043,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024
					12.535.734.380,00	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2025 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 100.3.3.1/55/2026
					(20.799.081,00)	Salah saji atas pendapatan LO yang seharusnya terjurnal pada akun koreksi ekuitas atas pengakuan kurang bayar (piutang) yang belum diakui pada TA 2024 Audited, sesuai SK Gubernur Nomor 188.44/K.396/2024 tentang Perubahan ats Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah PBBKB
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	445.925.014,00	430.926.194,00	14.998.820,00	(129.358.548,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024
					114.359.728,00	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2025 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 100.3.3.1/55/2026
5	Bagi Hasil Pajak Lainnya/Pajak Rokok	3.633.581.130,00	3.633.581.130,00	0,00	0,00	-
Jumlah		**46.203.847.529,00**	**43.390.519.601,00**	**2.813.327.928,00**	**(2.813.327.928,00)**	

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.734.495.252,00	**37.903.888.171,00**

Bantuan Keuangan-LO TA 2025 terealisasi senilai Rp1.734.495.252,00, jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan-LO TA 2024 senilai Rp37.903.888.171,00, Bantuan Keuangan-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp36.169.392.919,00 atau 95,42%. Penurunan signifikan

tersebut terjadi karena alokasi Bantuan Keuangan Umum-LO TA 2025 nihil atau tidak mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun rincian Bantuan Keuangan-LO sebagai berikut.

Tabel 5.146
Rincian Realisasi Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	29.750.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.734.495.252,00	8.153.888.171,00
Jumlah		**1.734.495.252,00**	**37.903.888.171,00**

Tabel 5.147
Pengukuran Bantuan Keuangan pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	0,00	0,00	-
Jumlah		**1.734.495.252,00**	**1.734.495.252,00**	**0,00**	**0,00**	

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	4.404.764.712,84	24.021.744.806,25

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO TA 2025 senilai Rp4.404.764.712,84. Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO TA 2024 senilai Rp24.021.744.806,25, maka terdapat penurunan senilai Rp19.616.980.093,41 atau 81,66%. Lain-lain Pendapatan Yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	4.332.967.133,84	22.305.690.506,25

Pendapatan Hibah-LO TA 2025 senilai Rp4.332.967.133,84. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2024 senilai Rp22.305.690.506,25, maka Pendapatan Hibah-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp17.972.723.372,41 atau 80,57%. Pendapatan Hibah-LO mengalami penurunan yang signifikan karena tidak adanya alokasi atau transfer dana hibah dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki realisasi

cukup besar. Adapun rincian Pendapatan Hibah-LO disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.148
Pendapatan Hibah-LO

Uraian		SKPD	Jenis Peruntukan Hibah	Nilai
A. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat :				**3.042.274.734,30**
1	**Penambahan Hibah dari Perpustakaan Nasional RI :**			
	Peralatan dan Mesin (057.01.1.531535/2025 Tanggal 13 Agustus 2025)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peralatan Personal Computer	7.543.662,00
			Personal Computer	19.789.801,00
	Aset Tetap Lainnya (Buku) (43625/4.2/PLK.03.07/X.2025 Tanggal 03 November 2025)		Buku Umum	10.457.635,00
			Buku Ilmu Sosial	6.503.398,00
			Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.502.139,00
			Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	483.457,00
			Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.477.571,00
2	Peralatan dan Mesin, dan Rak Buku	PUSKESMAS TIDENG PALE	Buku Umum	7.235.988,00
			Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.498.500,00
		PUSKESMAS TANA LIA	Buku Umum	7.236.181,00
		PUSKESMAS SESAYAP HILIR	Buku Umum	7.254.636,00
			Lemari dan Arsip Pejabat	1.498.500,00
		PUSKESMAS MURUK RIAN	Buku Umum	7.235.988,00
			Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.498.500,00
		PUSKESMAS KUJAU	Buku Umum	7.236.181,00
			Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.299.999,81
3	**Penambahan Hibah dari Kementerian Kesehatan :**			
	Penerimaan dari Kementerian Kesehatan berupa Peralatan dan Mesin	DINAS KESEHATAN	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.658.653,00
			Obat	395.731.075,00
			Bahan Cetak	264.200,00
4	**Penambahan Hibah dari Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal :**			

Uraian		SKPD	Jenis Peruntukan Hibah	Nilai
	Penambahan Aset Tetap terhadap Pendapatan Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan, BAST:000.1.2.3/0166/SPNF.SKB.KTT/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Alat Kantor Lainnya	114.232.000,00
			Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.012.320.000,00
			Komputer Jaringan	7.750.000,00
			Peralatan Jaringan	7.750.000,00
			Peralatan Komputer Lainnya	6.496.000,00
			Personal Komputer	136.416.000,00
			Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00
			Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
			Meubelair	14.600.000,00
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	953.541.309,49
5	**Penambahan Hibah dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :**			
	Peralatan dan Mesin berdasarkan BAST Nomor 1424/PSP.KP/BMN/B/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	277.763.360,00
B. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya :				**1.290.692.399,54**
6	**Penambahan Hibah dari Provinsi Kaltara :**			
	Penerimaan dari Dinkes Prov Kaltara	DINAS KESEHATAN	Obat	1.159.770.404,54
7	Penerimaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	Obat	14.310.597,00
8	Penerimaan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	30.959.398,00
9	Penerimaan dari Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Bahan Cetak	20.364.000,00
			Bahan Cetak	20.364.000,00
			Bahan Cetak	42.284.000,00
			Bahan Komputer	2.640.000,00
Jumlah A + B				**4.332.967.133,84**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.1.3.2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**	**71.797.579,00**	**1.716.054.300,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2025 senilai Rp71.797.579,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%, yang merupakan penurunan dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Penurunan tersebut disebabkan Seluruh Puskesmas TA 2025 Tidak menerima Pendapatan Dana Kapitasi JKN, karena Puskesmas sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/426/K-X11/2024 pada tanggal 24 Desember 2024, Tentang Penerapan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Kabupaten Tana Tidung.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.1.3.2.1	**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO**	**71.797.579,00**	**1.716.054.300,00**

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2025 senilai Rp71.797.579,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%. Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.149
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Puskesmas Tideng Pale	0,00	748.636.237,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	0,00	464.209.583,00
3	Puskesmas Tana Lia	0,00	219.391.136,00
4	Puskesmas Kujau	0,00	211.439.105,00
5	RSUD Akhmad Berahim	0,00	0,00
6	Puskesmas Muruk Rian	0,00	72.378.239,00
7	RSD Pratama Tanjung Keramat	71.797.579,00	0,00
Jumlah		**71.797.579,00**	**1.716.054.300,00**

5.4.2 Beban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	949.881.863.933,31	**1.089.206.567.844,34**

Beban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp949.881.863.933,31, jika dibandingkan dengan realisasi beban pada periode 31 Desember 2024 senilai Rp1.089.206.567.844,34, maka beban pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp139.324.703.911,03 atau 12,79%. Adapun rincian atas beban tersebut adalah sebagai berikut;

5.4.2.1 Beban Operasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	857.922.496.410,31	**983.619.991.794,34**

Beban Operasi TA 2025 senilai Rp857.992.496.410,31. Jika dibandingkan dengan beban operasi TA 2024 senilai Rp983.619.991.794,34 maka Beban Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp125.697.495.384,03 atau 12,78%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.150
Rincian Beban Operasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Pegawai	314.479.737.531,00	316.377.435.083,00	(1.897.697.552,00)	(0,60)
2	Beban Barang dan Jasa	309.331.871.936,46	390.791.123.553,54	(81.459..251.617,08)	(20,84)
3	Beban Hibah	23.075.271.125,00	35.692.558.871,00	(12.617.287.746,00)	(35,35)
4	Beban Bantuan Sosial	243.500.000,00	0,00	243.500.000,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang	1.610.360.246,38	395.946.180,53	1.214.414.065,85	306,71
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	209.181.755.571,47	240.362.928.106,27	(31.181.172.534,80)	(12,97)
Jumlah		**857.922.496.410,31**	**983.619.991.794,34**	**(125.697.495.384,03)**	**(12,78)**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	314.479.737.531,00	**316.377.435.083,00**

Beban Pegawai TA 2025 senilai Rp314.479.737.531,00 Jika dibandingkan dengan beban pegawai TA 2024 senilai Rp316.377.435.083,00, maka beban pegawai TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.897.697.552,00 atau 0,60%. Adapun rincian beban pegawai sebagai berikut.

Tabel 5.151

Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Gaji Pokok ASN	97.800.292.547,00	90.270.482.932,20
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	8.771.897.530,00	8.130.245.506,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.212.650.250,00	3.687.681.140,33
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.002.014.116,00	4.957.275.293,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.006.799.523,00	1.534.644.999,47
6	Beban Tunjangan Beras ASN	5.694.791.230,00	5.201.985.340,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	81.411.066,00	69.389.814,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.508.786,00	1.305.223,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.404.763.534,00	8.833.839.629,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	202.226.745,00	183.364.457,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	606.682.269,00	541.649.973,00
12	Beban Tunjangan Khusus*)	270.108.000,00	66.067.720,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	151.120.270.941,00	160.207.902.502,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.078.547,40	172.165.162,00
15	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	8.281.449.600,00	6.227.057.400,00
16	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.500.258.320,00	1.128.471.300,00
17	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	675.000.000,00	277.500.000,00
18	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	1.377.750.113,00
19	Beban Honorarium	0,00	7.247.456.600,00
20	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	1.114.800.000,00
21	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	450.975.000,00
22	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.975.600,00	54.800.100,00
23	Beban Tunjangan Beras DPRD	54.730.000,00	54.665.000,00
24	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.986.500,00
25	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	653.913.750,00
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.487.575,00	66.137.400,00
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.044.325,00	0,00
28	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	2.520.000.000,00
29	Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	420.000.000,00
30	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.064.520,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
31	Beban Pembulatan Gaji DPRD	12.000,00	12.000,00
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.980.525.916,00	2.967.005.153,00
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.192.000.000,00	3.192.000.000,00
34	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	182.385.000,00
35	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	107.338.560,00	61.332.960,00
36	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.248.000,00	6.864.000,00
37	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
38	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.314.420,00	7.531.680,00
39	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	755.900,00	924.536,00
40	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.860,00	1.000,00
41	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	180.600.000,00
42	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	280.000.000,00
43	Beban Pegawai BOS	2.578.700.000,00	0,00
44	Beban Pegawai BLUD	3.625.233.350,60	3.909.985.900,00
Jumlah		**314.479.737.531,00**	**316.377.435.083,00**

Perbedaan pengukuran Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO senilai Rp1.416.262.953,00 yang disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.152
Pengukuran Belanja dan Beban Pegawai pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
1	Beban Gaji Pokok ASN	97.800.292.547,00	97.800.292.547,00	0,00	0,00	-
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	8.771.897.530,00	8.771.897.530,00	0,00	0,00	-
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.212.650.250,00	3.212.650.250,00	0,00	0,00	-
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.002.014.116,00	6.002.014.116,00	0,00	0,00	-
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.006.799.523,00	2.006.799.523,00	0,00	0,00	-
6	Beban Tunjangan Beras ASN	5.694.791.230,00	5.694.791.230,00	0,00	0,00	-
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	81.411.066,00	81.411.066,00	0,00	0,00	-
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.508.786,00	1.508.786,00	0,00	0,00	-

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.124.869.833,00	9.404.763.534,00	1.720.106.299,00	(33.908.276,00)	Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS TA 2024 di TA 2025 pada RSUD Akhmad Berahim
					23.454.011,00	Utang Kewajiban 4% Iuran Wajib Komponen Jaspel RSUD AB-Iuran Wajib
					(1.709.652.034,00)	Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	202.226.745,00	202.226.745,00	0,00	0,00	-
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	606.682.269,00	606.682.269,00	0,00	0,00	-
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	151.120.270.941,00	151.120.270.941,00	0,00	0,00	-
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.814.894.467,40	10.814.894.467,40	0,00	0,00	-
14	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	0,00	0,00	-
15	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.975.600,00	53.975.600,00	0,00	0,00	-
16	Beban Tunjangan Beras DPRD	54.730.000,00	54.730.000,00	0,00	0,00	-
17	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00	0,00	-
18	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00	0,00	-
19	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.487.575,00	66.487.575,00	0,00	0,00	-
20	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.044.325,00	6.044.325,00	0,00	0,00	-
21	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	0,00	0,00	-
22	Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	-
23	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.064.520,00	66.064.520,00	0,00	0,00	-
24	Beban Pembulatan Gaji DPRD	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-
25	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.980.525.916,00	2.980.525.916,00	0,00	0,00	-

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
26	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.192.000.000,00	3.192.000.000,00	0,00	0,00	-
27	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	107.338.560,00	107.338.560,00	0,00	0,00	-
28	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.248.000,00	7.248.000,00	0,00	0,00	-
29	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00	-
30	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.314.420,00	7.314.420,00	0,00	0,00	-
31	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	755.900,00	755.900,00	0,00	0,00	-
32	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	-
33	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	0,00	-
34	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	-
35	Beban Pegawai BOSP-BOS	2.578.700.000,00	2.578.700.000,00	0,00	0,00	-
36	Beban Pegawai BLUD	3.321.390.004,60	3.625.233.350,60	(303.84ase3.346,00)	(1.563.615.900,00)	Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD TA 2024 di TA 2025 pada RSUD Akhmad Berahim
					(141.289.954,00)	Pembayaran Utang Jasa Pelayanan Dana Kapitasi TA 2024
					1.358.704.536,00	Utang Jaspel RSUD AB-Belanja Pegawai BLUD (Agustus s.d Desember)
					288.013.710,00	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tideng Pale
					178.489.679,00	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sesayap Hilir
					74.016.640,00	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tana Lia
					79.334.802,00	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kujau

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
					30.189.833,00	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Muruk Rian
Jumlah		**315.896.000.484,00**	**314.479.737.531,00**	**1.416.262.953,00**	**(1.416.262.953,00)**	

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
309.331.871.936,46 **390.791.123.553,54**

Beban Barang dan Jasa TA 2025 senilai Rp309.331.871.936,46 Jika dibandingkan beban barang dan jasa TA 2024 senilai Rp390.791.123.553,54, maka beban barang dan jasa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp81.459.251.617,08 atau 20,84%. Beban Barang dan Jasa tersebut mengalami penurunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran TA 2025 melalui Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025. Sehingga penganggaran belanja ke SKPD mengalami rasionalisasi. Adapun rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.153
Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Persediaan	99.864.719.876,95	128.669.933.684,97	(28.805.213.808,02)	(22,39)
2	Beban Dibawah Kapitalisasi	2.401.832.832,67	1.867.793.022,73	534.039.809,94	28,59
3	Beban Jasa	127.798.200.551,80	164.714.317.283,84	(36.916.116.732,04)	(22,41)
4	Beban Pemeliharaan	8.317.122.509,04	9.059.575.017,00	(742.452.507,96)	(8,20)
5	Beban Perjalanan Dinas	70.949.996.166,00	86.479.504.545,00	(15.529.508.379,00)	(17,96)
Jumlah		**309.331.871.936,46**	**390.791.123.553,54**	**(81.459.251.617,08)**	**(20,84)**

Tabel 5.154
Rincian Beban per Jenis Barang dan Jasa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis	99.619.860.966,95	128.385.520.704,97	(28.765.659.738,02)	(22,41)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	244.858.910,00	284.412.980,00	(39.554.070,00)	(13,91)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.401.832.832,67	1.867.793.022,73	534.039.809,94	28,59

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Beban Jasa Kantor	69.076.338.355,37	83.288.611.199,00	(14.212.272.843,63)	(17,06)
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.317.079.745,00	4.247.711.160,00	1.069.368.585,00	25,18
6	Beban Sewa Tanah	30.500.000,00	87.000.000,00	(56.500.000,00)	(64,94)
7	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.642.643.668,00	12.414.002.614,00	(6.771.358.946,00)	(54,55)
8	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.182.276.333,33	3.255.246.066,67	(72.969.733,34)	(2,24)
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
10	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	90.125.000,00	(36.873.000,00)	(40,91)
11	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	758.769.176,60	5.949.138.695,00	(5.190.369.518,40)	(87,25)
12	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.577.482.000,00	912.776.662,00	664.705.338,00	72,82
13	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	171.980.958,00	143.134.600,00	28.846.358,00	20,15
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.463.200.000,00	2.401.100.000,00	2.062.100.000,00	85,88
15	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.067.290.447,00	8.797.181.110,00	1.270.109.337,00	14,44
16	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	236.000.000,00	(236.000.000,00)	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.526.252.611,00	3.924.996.219,00	601.256.392,00	15,32
18	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.785.901.898,04	3.941.413.211,00	(155.511.312,96)	(3,95)
19	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	913.665.587,00	(908.697.587,00)	(99,46)
20	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	43.500.000,00	(43.500.000,00)	(100,00)
21	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.949.996.166,00	86.479.504.545,00	(15.529.508.379,00)	(17,96)
22	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.995.966.179,00	18.179.644.111,00	(13.183.677.932,00)	(72,52)
23	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	673.738.500,00	514.373.400,00	159.365.100,00	30,98
24	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	23.075.520.357,17	(23.075.520.357,17)	(100,00)
25	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.001.896.999,10	0,00	17.001.896.999,10	100,00
26	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.346.000,00	0,00	113.346.000,00	100,00
27	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP	183.023.980,00	0,00	183.023.980,00	100,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	Kesetaraan				
28	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.114.286.516,40	0,00	2.114.286.516,40	100,00
29	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.326.129.694,00	1.358.752.309,00	967.377.385,00	71,20
Total		**309.331.871.936,46**	**390.791.123.553,54**	**(81.459.251.617,08)**	**(20,84)**

Perbedaan pengukuran Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.155
Pengukuran Belanja dan Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Beban Barang Pakai Habis	109.020.916.712,93	99.619.860.966,95	9.401.055.745,98	144.284.476.079,34	Saldo awal persediaan TA 2025 barang pakai habis
					1.686.687.674,54	Hibah dari pemerintah Pusat dan Daerah Menambah beban
					1.321.323.162,85	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD TA 2025 Menambah beban Persediaan
					144.764.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Jasa APBD TA 2025 Menambah beban Persediaan
					4.860.613.252,16	Dana BLUD Menambah beban
					442.944.123,93	Hutang 2025 Menambah beban Persediaan
					423.543.300,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOS TA 2025 Menambah beban Persediaan
					34.515.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOP TA 2025 Menambah beban Persediaan
					1.703.818.502,90	Penambahan Beban Persediaan dari Dana BOS dan BOP

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					33.834.227,00	Menambah beban Persediaan dari Peminjaman Persediaan Obat Ke IFK Bulungan
					989.366.630,60	Menambah beban Persediaan dari Dana BOK
					1.022.320,00	Menambah beban Persediaan dari Pengembalian Peminjaman Persediaan Obat Oleh IFK Bulungan
					93.600.000,00	Reklas Rincian Obyek dari Barang Tak Pakai Habis Ke Barang Pakai Habis
					(14.068.410,00)	Mengurangi Beban persediaan dikarenakan Pengembalian Pinjaman Persediaan Obat ke IFK Bulungan
					(271.117.223,55)	Pengeluaran Beban Persediaan atas pembayaran utang tahun lalu
					(3.353.707.042,58)	Mengurangi Beban persediaan akibat Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Aset Tetap
					(143.868.980,00)	Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					(18.456.623,52)	Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Beban Jasa/Pemeliharaan
					(3.288.636.223,50)	Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap (sisa Bahan Konsruksi tahun lalu yang sudah terpasang 2025)
					(22.539.054.300,00)	Reklasifikasi Persediaan ke Aset Lainnya (Aset Untuk PDAM)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					(1.060.728,00)	Peminjaman Persediaan Obat Oleh IFK Bulungan
					(135.791.594.488,15)	Persediaan Akhir Batang tak pakai habis TA 2025 SKPD yang mengurangi beban persediaan
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	280.265.600,00	244.858.910,00	35.406.690,00	555.323.750,00	SALDO AWAL Persediaan barang tak pakai habis
					198.912.000,00	Reklas dari Belanja Modal
					42.614.010,00	DANA BLUD
					(93.600.000,00)	Reklas Rincian Obyek Barang Tak Pakai Habis Ke Barang Pakai Habis
					(30.000.000,00)	Reklas ke Aset Tetap Exstrakompatabel
					(708.656.450,00)	Persediaan Akhir TA 2025 SKPD yang mengurangi beban persediaan
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	207.966.570,00	2.401.832.832,67	(2.193.866.262,67)	164.268.980,00	Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					1.374.483.676,67	Reklasifikasi dari Belanja Modal TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					21.689.100,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BLUD TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					320.731.600,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOS TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					351.474.979,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOP TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					64.567.327,00	Aset Hibah Aset Tetap yang bernilai dibawah kapitalisasi
					(103.349.400,00)	Reklas ke Aset Tetap
4	Beban Jasa Kantor	69.482.956.701,20	69.076.338.355,37	(406.618.345,83)	263.060.191,17	Pengakuan Utang Tagihan Listrik, PDAM, Internet dan Barjas SKPD TA 2025
					4.800.000,00	Beban Persediaan Rincian Obyek SKPD Kec. Betayau
					99.023.500,00	Belanja modal TA 2025 yang direklasifikasi menjadi Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					3.412.000,00	Utang Pajak Mobil berdasarkan Reviu Inspektorat pada DPU
					(208.715.161,00)	Pekunasan Utang Tagihan Listrik, PDAM, Internet SKPD TA 2024
					(515.798.876,00)	Belanja Barjas menjadi Aset Tetap Modal pada SKPD DISPERINDAGKOP DAN UKM dan BAPPEDA.
					(52.400.000,00)	Belanja Jasa/ Persediaan menjadi Persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.317.079.745,00	5.317.079.745,00	0,00	0,00	-
6	Beban Sewa Tanah	77.000.000,00	30.500.000,00	46.500.000,00	(46.500.000,00)	Reklas Dari beban Sewa Tanah ke Sewa Gedung dan Bangunan
7	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.642.643.668,00	5.642.643.668,00	0,00	0,00	-
8	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.176.033.000,00	3.182.276.333,33	(6.243.333,33)	340.975.000,00	Beban dibayar dimuka TA 2024
					46.500.000,00	Rekals dari beban Sewa Tanah
					(381.231.666,67)	Beban Dibayar di Muka TA 2025
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	-
10	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	53.252.000,00	0,00	0,00	-

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
11	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	844.716.920,60	758.769.176,60	85.947.744,00	(50.455.272,00)	Perencanaan Pembangunan Patok Jalan IPPKH Jalan Simpang Sesayp - Jalan Poros AJP. SP2D 02919
					(35.492.472,00)	Perencanaan Pembangunan Patok Kawasan Vegetasi Pusat Pemerintahan. SP2D 02917
12	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.577.482.000,00	1.577.482.000,00	0,00	0,00	-
13	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	171.980.958,00	171.980.958,00	0,00	0,00	-
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.463.200.000,00	4.463.200.000,00	0,00	0,00	-
15	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.067.290.447,00	10.067.290.447,00	0,00	0,00	-
16	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.609.016.611,00	4.526.252.611,00	82.764.000,00	9.600.000,00	Persediaan mejadi Aset Tetap (Exstrakompatabel)
					(92.364.000,00)	Reklas Beban Persediaan dari Beban Pemeliharaan
17	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.626.839.985,57	3.785.901.898,04	840.938.087,53	531.319.757,69	Belanja modal TA 2025 yang direklasifikasi menjadi Jasa
					13.656.623,52	Reklasifiaksi Persediaan ke Jasa/Pemeliharaan
					(1.385.914.468,74)	Reklasifikasi Belanja Jasa yang menjadi Aset Tetap
18	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	0,00	-
19	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.949.996.166,00	70.949.996.166,00	0,00	0,00	-
20	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.995.966.179,00	4.995.966.179,00	0,00	0,00	-
21	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	623.738.500,00	673.738.500,00	(50.000.000,00)	50.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal yang Menjadi Belanja Jasa SKPD DPU
22	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	18.909.431.502,00	17.001.896.999,10	1.907.534.502,90	(203.716.000,00)	Belanja Persediaan (BOP) yang menjadi Aset Tetap pada DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					(1.703.818.502,90)	Persediaan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
						pada DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
23	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.346.000,00	113.346.000,00	0,00	0,00	-
24	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	183.023.980,00	183.023.980,00	0,00	0,00	-
25	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.103.653.147,00	2.114.286.516,40	989.366.630,60	(989.366.630,60)	Reklas Beban Persediaan (Belanja BLUD dan BOK) pada Puskesmas
26	Beban Barang dan Jasa BLUD	7.145.064.692,16	2.326.129.694,00	4.818.934.998,16	260.297.164,00	Pengakuan Utang Barang dan Jasa pada TA 2025 pada RSUD AAkhmad Berahim
					(5.079.232.162,16)	Reklas Beban Persediaan (Belanja BLUD) pada Puskesmas dan RSUD
Jumlah		**325.696.829.085,46**	**309.331.871.936,46**	**16.364.957.149,00**	**(16.364.957.149,00)**	

Adapun rincian beban barang dan jasa kemudian dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1.2.1 Beban Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
99.864.719.876,95	**128.669.933.684,97**

Beban Persediaan TA 2025 senilai Rp99.864.719.876,95. Jika dibandingkan dengan Beban Persediaan TA 2024 senilai Rp128.669.933.684,97 maka Beban Persediaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp28.805.213.808,02 atau 22,39%. Beban Persediaan mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025. Sehingga penganggaran belanja ke SKPD mengalami rasionalisasi. Adapun rincian Beban Persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.156
Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	348.063.585,00	955.237.503,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	281.681.721,00	226.367.198,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.658.667.450,00	6.085.914.680,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	115.369.400,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.953.600,00	1.366.642.700,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.236.700,00	31.308.700,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	633.192.832,00	367.439.840,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.494.076.915,91	2.923.518.504,28
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.592.407.286,00	1.120.266.443,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	259.905.000,00	190.016.800,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	144.946.438,00	177.708.052,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	590.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	3.678.000,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	21.138.365,00	3.760.600,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	107.839.845,00	47.958.265,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.684.487.982,55	2.184.370.068,46
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.603.741.663,90	1.290.103.098,80
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.224.838.989,10	4.649.141.815,30
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	261.770.775,00	234.083.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	725.584.088,25	947.112.152,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.692.730.378,58	2.135.841.295,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	621.902.935,20	1.105.615.100,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	286.162.128,00	1.184.008.830,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.171.281.030,00	911.088.125,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.287.544.310,00	1.957.702.600,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	245.960.383,00	1.458.879.421,00
27	Beban Obat-Obatan-Obat	3.986.840.642,82	2.987.303.288,78
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	68.409.250,00	1.478.501.175,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.964.515.546,49	24.696.263.458,17
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.447.285.699,19	29.532.011.239,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	17.286.703,00	0,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.520.308.978,96	1.821.452.113,18

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	243.363.000,00	15.625.000,00
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	314.700,00	0,00
35	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	51.937.374,00
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	(2.370.374,00)
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.743.647.040,00	16.993.204.945,00
38	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.080.929.700,00	8.646.193.405,00
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	416.400.500,00
40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.164.672.185,00	5.434.993.550,00
41	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	177.600.000,00	72.200.000,00
42	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	158.000.000,00	176.901.000,00
43	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	71.900.000,00	220.540.000,00
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	415.975.000,00
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	862.877.100,00	814.206.000,00
46	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	20.000.000,00	100.000.000,00
47	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	218.000.000,00	97.110.000,00
48	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	26.850.000,00	0,00
49	Beban Pakaian Adat Daerah	232.300.000,00	627.326.000,00
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	890.322.000,00	678.366.000,00
51	Beban Pakaian Olahraga	1.173.554.620,00	1.400.563.240,00
52	Beban Pakaian Paskibraka	10.400.000,00	152.465.000,00
53	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	48.273.900,00	206.927.450,00
54	Beban Komponen-Attachment	24.500.000,00	0,00
55	Beban Komponen-Komponen Lainnya	116.200.000,00	0,00
56	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	42.910.010,00	52.750.530,00
57	Beban Pipa-Pipa Lainnya	12.975.000,00	24.735.000,00
Jumlah		**99.864.719.876,95**	**128.669.933.684,97**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.2.1.2.2	**Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (Beban Lain-lain)**	**2.401.832.832,67**	**1.867.793.022,73**

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 senilai Rp2.401.832.832,67. Jika dibandingkan dengan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024 senilai Rp1.867.793.022,73 maka Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi mengalami kenaikan senilai Rp534.039.809,94 atau 28,59%. Kenaikan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi terjadi karena TA 2025 sudah menyesuaikan penganggaran dan pemetaan akun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021) tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyesuaian regulasi tersebut mengakibatkan adanya beberapa jenis pengadaan barang yang pada tahun sebelumnya (TA 2024) dikategorikan sebagai Belanja Modal/Aset Tetap, kini di TA 2025 harus dialihkan dan dicatat langsung sebagai beban operasi karena tidak lagi memenuhi nilai minimum kriteria kapitalisasi yang baru. Selain itu kenaikan terjadi disebabkan terdapat belanja patok tanah senilai Rp506.103.863,61 yang pada tahun sebelumnya tidak ada. Adapun rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.157
Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.243.000,00	22.871.500,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	15.988.440,00	0,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	9.790.200,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8.548.300,00	0,00
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	620.000,00
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat	0,00	350.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Ukur/Pembanding		
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	150.000,00
8	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	11.720.332,00
9	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.920.300,00	7.560.000,00
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	500.000,00
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	450.000,00	14.547.400,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	478.263.207,00	261.766.526,00
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	795.721.365,00	894.015.000,00
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	866.400,00	1.074.000,00
15	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.005.000,00	76.800.000,00
16	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	17.071.000,00
17	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	85.817.033,06	74.655.000,00
18	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	15.651.000,00	840.000,00
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	5.820.000,00	0,00
20	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	6.300.000,00	45.200.000,00
21	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	12.805.800,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
22	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	7.820.000,00
23	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	950.000,00
24	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	9.000.000,00
25	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	28.664.684,00	35.635.300,00
26	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	5.919.963,00
27	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	10.257.500,00	4.088.130,00
28	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	931.500,00	0,00
29	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	1.395.600,00	0,00
30	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	7.555.000,00	0,00
31	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.029.553,00	1.175.000,00
32	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.913.750,00	1.800.000,00
33	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	920.000,00
34	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	300.000,00	0,00
35	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	495.000,00	0,00
36	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.197.000,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
37	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	350.000,00
38	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	50.000,00
39	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	150.000,00
40	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.199.910,00	2.200.000,00
41	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	581.000,00
42	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	3.043.620,00	0,00
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	0,00	1.500.000,00
44	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	0,00	7.500.000,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	1.320.000,00
46	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.920.000,00	1.300.000,00
47	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	421.800,00	5.835.000,00
48	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.000.000,00	13.224.000,00
49	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	97.500.000,00
50	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	3.820.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
51	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	506.103.863,61	0,00
52	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	3.952.100,00	45.010.000,00
53	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	357.348.299,00	61.202.435,73
54	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	0,00	1.168.610,00
55	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	0,00	17.653.954,00
56	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	6.568.879,00	18.409.283,00
57	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	0,00	25.796.161,00
58	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	31.974.061,00
59	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.292.320,00	4.057.430,00
60	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	483.457,00	2.958.715,00
61	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.164.952,00	246.122,00
62	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	0,00	2.331.000,00
63	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	145.500,00
64	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	99.600,00
65	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak	0,00	1.765.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya		
Jumlah		**2.401.832.832,67**	**1.867.793.022,73**

Berdasarkan tabel di atas, rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dijelaskan pada **Lampiran 5.39**

5.4.2.1.2.3 Beban Jasa **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
127.798.200.551,80 **164.714.317.283,84**

Beban Jasa TA 2025 senilai Rp127.798.200.551,80. Jika dibandingkan dengan Beban Jasa TA 2024 senilai Rp164.714.317.283,84 maka Beban Jasa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp36.916.116.732,04 atau 22,41%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya Peraturan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 melalui Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025 sehingga penganggaran belanja ke SKPD mengalami rasionalisasi. Adapun rincian Beban Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.158
Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	777.100.000,00	0,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.958.365.000,00	4.028.131.000,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.535.760.000,00	9.604.760.004,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	458.875.000,00	1.367.600.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	6.000.000,00	12.400.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	163.300.000,00	155.250.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	40.800.000,00	35.200.000,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	75.700.000,00	0,00
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	815.300.000,00	829.200.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	2.257.050.000,00	8.369.500.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	6.889.000.000,00	6.142.350.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	195.521.307,00	121.577.698,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	173.910.000,00	454.069.211,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.017.013.000,00	1.229.932.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.360.900.000,00	1.633.700.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	52.800.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	513.300.000,00	564.100.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	350.319.000,00	998.714.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.824.351.871,00	9.355.268.513,00
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	32.450.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	955.200.000,00	1.036.800.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.785.537.675,20	9.072.248.228,00
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.147.027.846,00	9.413.468.893,00
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.165.378.261,00	2.019.400.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Caraka	264.000.000,00	656.400.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Supir	1.033.424.302,00	1.389.800.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	207.872.000,00	270.096.000,00
28	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	13.875.000,00	19.400.000,00
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	358.760.000,00	475.710.000,00
30	Beban Jasa Tata Rias	36.000.000,00	59.760.000,00
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	23.865.000,00	0,00
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.003.583.844,00	753.650.688,00
33	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.743.408.690,00	3.201.031.720,00
34	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00
35	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	129.873.000,00	174.971.000,00
36	Beban Jasa Kalibrasi	83.837.836,00	77.128.110,00
37	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.060.050.000,00	1.287.200.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
38	Beban Tagihan Telepon	7.088.000,00	5.881.500,00
39	Beban Tagihan Air	888.444.129,00	975.327.682,00
40	Beban Tagihan Listrik	3.915.430.852,00	4.153.904.950,00
41	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	624.473.840,00	515.900.000,00
42	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.624.539.499,17	2.313.501.974,00
43	Beban Paket/Pengiriman	35.898.700,00	45.288.800,00
44	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	384.595.003,00	181.501.300,00
45	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	24.330.216,00
46	Beban Medical Check Up	196.316.700,00	134.274.000,00
47	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	4.633.712,00
48	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	6.010.893.000,00	0,00
49	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	855.400.000,00	0,00
50	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	51.000.000,00	0,00
51	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	485.524.248,00	480.647.484,00
52	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	9.298.800,00
53	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.552.059.600,00	3.305.641.640,00
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.127.599,00	134.595.801,00
55	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	160.562.573,00	144.594.694,00
56	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	109.805.725,00	172.932.741,00
57	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.500.000,00	75.000.000,00
58	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	12.000.000,00
59	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	64.847.000,00
60	Beban Sewa Electric Generating Set	126.000.000,00	168.000.000,00
61	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.228.734.700,00	863.097.142,00
62	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.336.000,00	35.190.500,00
63	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	444.715.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
64	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	18.000.000,00
65	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	812.000.000,00	1.218.440.000,00
66	Beban Sewa Alat Ukur Universal	0,00	89.097.936,00
67	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.423.572.968,00	9.423.615.036,00
68	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	21.000.000,00	89.000.000,00
69	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	553.850.000,00	684.406.666,67
70	Beban Sewa Bangunan Gudang	112.416.666,66	89.000.000,00
71	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	330.450.000,00	117.000.000,00
72	Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00	52.800.000,00
73	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	155.000.000,00
74	Beban Sewa Bangunan Parkir	29.250.000,00	27.000.000,00
75	Beban Sewa Asrama	408.150.000,00	328.266.666,67
76	Beban Sewa Hotel	1.560.493.000,00	1.573.647.900,00
77	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	187.666.666,67	228.124.833,33
78	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	49.000.000,00	0,00
79	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	53.252.000,00	90.125.000,00
80	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	1.209.750.000,00
81	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	2.355.134.600,00
82	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	261.915.600,00	1.223.600.202,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	291.592.500,00	1.109.023.893,00
84	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	205.261.076,60	0,00
85	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	51.630.000,00
86	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	196.991.700,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
87	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	124.672.000,00
88	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	477.482.000,00	591.112.962,00
89	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.100.000.000,00	0,00
90	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	171.980.958,00	143.134.600,00
91	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	90.000.000,00
92	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	4.463.200.000,00	2.311.100.000,00
93	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	6.782.560.493,00	7.159.764.810,00
94	Beban Sosialisasi	1.432.269.516,00	0,00
95	Beban Bimbingan Teknis	1.687.570.438,00	1.059.831.300,00
96	Beban Diklat Kepemimpinan	164.890.000,00	577.585.000,00
97	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.644.570.000,00	3.202.391.100,00
98	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	344.952.000,00	193.000.000,00
99	Beban Beasiswa	59.500.000,00	0,00
100	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.946.944.179,00	14.634.253.011,00
101	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	150.000.000,00
102	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	673.738.500,00	221.925.400,00
103	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	292.448.000,00
104	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	23.075.520.357,17
105	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	17.001.896.999,10	0,00
106	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	98.346.000,00	0,00
107	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	0,00
108	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	183.023.980,00	0,00
109	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.114.286.516,40	0,00
110	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.326.129.694,00	1.358.752.309,00
Jumlah		**127.798.200.551,80**	**164.714.317.283,84**

5.4.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	8.317.122.509,04	9.059.575.017,00

Beban Pemeliharaan TA 2025 senilai Rp8.317.122.509,04 Jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan TA 2024 senilai Rp 9.059.575.017,00 maka Beban Pemeliharaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp742.452.507,96 atau 8,20%. Adapun rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.159
Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	236.000.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	99.905.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.405.386.956,00	2.022.197.717,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.585.978.164,00	350.656.500,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	134.400.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.245.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.735.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.600.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	499.202.500,00	624.301.150,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.364.000,00	20.000.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	83.745.491,00	15.394.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	39.980.000,00	39.759.731,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	97.950.000,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	194.377.500,00	224.330.911,00
15	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	114.038.000,00	119.719.210,00
16	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	258.250.000,00	398.502.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
17	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	10.230.000,00
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.159.975.516,83	330.025.600,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	182.482.000,00
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	252.652.600,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	179.226.150,00	2.316.600.827,00
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	35.079.230,00	4.280.000,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	235.632.684,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	195138000
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	75.700.000,00	0,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	78.018.401,21	0,00
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	439.695.100,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	5.250.000,00	237.559.000,00
29	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	913.665.587,00
30	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.968.000,00	0,00
31	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	43.500.000,00
Jumlah		**8.317.122.509,04**	**9.059.575.017,00**

5.4.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
70.949.996.166,00	**86.479.504.545,00**

Beban Perjalanan TA 2025 senilai Rp70.949.996.166,00 Jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas TA 2024 senilai Rp86.479.504.545,00 maka Beban Perjalanan Dinas TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp15.529.508.379,00 atau 17,96%. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.160
Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	59.044.964.066,00	72.216.769.905,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.139.638.100,00	13.525.368.440,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123.530.000,00	121.733.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.641.864.000,00	615.633.200,00
Jumlah		**70.949.996.166,00**	**86.479.504.545,00**

5.4.2.1.3 Beban Hibah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
23.075.271.125,00	**35.692.558.871,00**

Beban Hibah TA 2025 senilai Rp 23.075.271.125,00. Jika dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2024 senilai Rp35.692.558.871,00 maka Beban Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp12.617.287.746,00 atau 35,35%. Adapun rincian Beban Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.161
Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	3.550.000.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	174.825.000,00	479.717.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada BUMD	596.228.675,00	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.166.943.300,00	24.880.426.295,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	847.080.900,00	0,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.725.871.705,00	2.910.932.601,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	205.000.000,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.341.050.820,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.064.668.525,00	915.918.475,00
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	571.378.300,00	1.509.463.642,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.196.300.000,00	967.996.800,00
12	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	273.104.058,00
Jumlah		**23.075.271.125,00**	**35.692.558.871,00**

Tabel 5.162
Pengukuran Belanja dan Beban Hibah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	-
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	174.825.000,00	174.825.000,00	0,00	0,00	-
3	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	596.228.675,00	596.228.675,00	0,00	0,00	-
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.014.024.200,00	11.014.024.200,00	0,00	0,00	-
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.912.698.000,00	5.725.871.705,00	(3.813.173.705,00)	3.813.173.705,00	Jurnal balik Beban dibayar dimuka TA 2024 (Beban Hibah Pilkada) pada SKPD KESBANGPOL
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	140.923.900,00	0,00	0,00	-
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.341.050.820,00	2.341.050.820,00	0,00	0,00	-
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.525,00	1.064.668.525,00	0,00	0,00	-
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	571.378.300,00	571.378.300,00	0,00	0,00	-
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.196.300.000,00	1.196.300.000,00	0,00	0,00	-
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah		**19.262.097.420,00**	**23.075.271.125,00**	**(3.813.173.705,00)**	**3.813.173.705,00**	

Perbedaan pengukuran Beban Hibah dengan Belanja Hibah senilai Rp3.408.136.984,00 atas pengakuan Beban Hibah Pilkada yang telah di setorkan kembali pada TA 2025 yang menambah nilai Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, rincian tambahan nilai beban terdiri atas pengakuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp2.716.048.778,00 dan pengakuan hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp1.097.124.927,00.

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	243.500.000,00	0,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Beban Bantuan Sosial TA 2025 senilai Rp243.500.000,00 Jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2024 senilai Rp0,00, maka Beban Bantuan Sosial TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp243.500.000,00 atau 100,00%. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial dikarenakan terdapat kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/297/K-VII/2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif Individu Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.610.360.246,38	395.946.180,53

Penyisihan Piutang merupakan bagian dari upaya menyajikan akun Piutang yang mendekati kebenaran kemampuan konversinya menjadi Kas. Artinya, nilai Piutang setelah dikurangi Penyisihan Piutang (disebut juga Piutang Neto atau Piutang Bersih) merupakan suatu angka yang berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dapat diperoleh hasil penagihannya.

Beban Penyisihan Piutang/Piutang tidak tertagih yaitu cadangan yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang, sedangkan yang dimaksud dengan kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan Piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Beban Penyisihan Piutang TA 2025 senilai Rp1.610.360.246,38. Jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang TA 2024 senilai Rp395.946.180,53 maka Beban Penyisihan Piutang TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.214.414.065,85 atau 306,71%. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.163
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	5.100,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	(3.092.767,70)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	24.131,12	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	25.000,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.833.510,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	376.513.440,72	395.837.643,55
7	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	258.306,98	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	3.201.304,68
9	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	631.250.000,00	0,00
10	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	600.450.757,56	0,00
Jumlah		**1.610.360.246,38**	**395.946.180,53**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.2.1.6	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**209.181.755.571,47**	**240.362.928.106,27**

Beban Penyusutan dan amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 senilai Rp209.181.755.571,47 Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 senilai Rp240.362.928.106,27, maka Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp31.181.172.534,80 atau 12,97%. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.164
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.578.324.285,76	37.525.689.021,82	3.052.635.263,94	8,13
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.700.886.457,94	28.285.955.068,00	1.414.931.389,94	5,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.740.696.874,88	168.493.382.798,45	(35.752.685.923,57)	(21,22)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	690.601.036,87	251.921.758,00	438.679.278,87	174,13
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	82.337.199,14	476.850.096,00	(394.512.896,86)	(82,73)
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.388.909.716,88	5.329.129.364,00	59.780.352,88	1,12
Jumlah		**209.181.755.571,47**	**240.362.928.106,27**	**(31.181.172.534,80)**	**(12,97)**

5.4.2.2 Beban Tidak terduga

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	**17.620.000,00**

Beban Tidak Terduga TA 2025 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Beban Tidak Terduga periode TA. 2024 senilai Rp17.620.000,00 maka Beban Tidak Terduga TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp17.620.000,00 atau 100,00%. Penurunan tersebut dikarenakan tidak terealisasikan belanja tidak terduga sesuai dengan yang direncanakan untuk pembayaran utang pada PT.Pipit Mutiara Jaya dan Belanja tidak terduga lainnya seperti bencana dan belanja mendesak.

5.4.2.3 Beban Transfer

31 Desember 2025	31 Desember 2024
91.959.367.523,00	**105.568.956.050,00**

Beban Transfer TA 2025 senilai Rp91.959.367.523,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp105.568.956.050,00 maka Beban Transfer TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp13.609.588.527,00 atau 12,89%. Adapun rincian Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.165
Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil	989.949.241,00	533.000.000,00	456.949.241,00	85,73
2	Beban Bantuan Keuangan	90.969.418.282,00	105.035.956.050,00	(14.066.537.768,00)	(13,39)
Jumlah		**91.959.367.523,00**	**105.568.956.050,00**	**(13.609.588.527,00)**	**(12,89)**

5.4.2.3.1 Beban Bagi hasil	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	989.949.241,00	533.000.000,00

Beban Bagi Hasil TA 2025 senilai Rp989.949.241,00, Jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil TA 2024 senilai Rp533.000.000,00, maka Beban Bagi Hasil TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp456.949.241,00 atau 85,73%. Adapun rincian Beban Bagi Hasil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.166
Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	886.812.239,00	460.500.000,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	72.500.000,00
Jumlah		**989.949.241,00**	**533.000.000,00**

5.4.2.3.1.1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	886.812.239,00	460.500.000,00

Beban Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp886.812.239,00, Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp460.500.000,00, maka Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp426,312,239,00 atau 92,58%.

5.4.2.3.1.2 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	103.137.002,00	72.500.000,00

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp103.137.002,00, Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp72.500.000,00, maka Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp30.637.002,00 atau 42,26%.

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	90.969.418.282,00	**105.035.956.050,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp90.969.418.282,00. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp105.035.956.050,00. maka Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp14.066.537.768,00 atau 13,39%. Adapun rincian Beban Bantuan Keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.167
Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	357.000.000,00	(357.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	90.609.418.282,00	104.678.956.050,00	(14.069.537.768,00)	(13,44)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00
Jumlah		**90.969.418.282,00**	**105.035.956.050,00**	**(14.066.537.768,00)**	**(13,39)**

5.4.2.3.2.1 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	**357.000.000,00**

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 senilai Rp357.000.000,00, maka Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp357.000.000,00 atau 100%. Hal ini merupakan dampak dari penyesuaian klasifikasi anggaran, dimana terjadi perubahan kode rekening dan nomenklatur peruntukan anggaran. Alokasi yang sebelumnya ditujukan untuk tingkat desa telah dialihkan / direformasi peruntukannya menjadi anggaran bantuan untuk tingkat Rukun Tetangga (RT).

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.2.3.2.2	**Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Desa**	**90.609.418.282,00**	**104.678.956.050,00**

Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa TA 2025 senilai Rp90.609.418.282,00. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2024 senilai Rp 104.678.956.050,00 maka Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Ke Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp14.069.537.768,00 atau 13,44%.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.2.3.2.3	**Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Desa**	**360.000.000,00**	**0,00**

Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 senilai Rp360.000.000,00, sedangkan pada TA 2024 tidak terdapat realisasi (nihil), sehingga pada TA 2025 terjadi peningkatan senilai Rp360.000.000,00 atau 100%.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.3	**Surplus/Defisit Dari Operasi**	**78.591.688.742,99**	**(105.515.392.099,61)**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit dari Operasi TA 2025 senilai Rp78.591.688.742,99. Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi TA 2024 senilai Rp(105.515.392.099,61), maka TA 2025 mengalami Surplus senilai Rp184.107.080.842,60 atau 174,48%.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.4	**Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**	**261.289.093.923,51**	**(27.941.350.038,67)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2025 senilai Rp261.289.093.923,51 dan TA 2024 senilai Rp(27.941.350.038,67). Pada akhir tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2025 memiliki Surplus Kegiatan Non Operasional Senilai Rp261.289.093.923,51 yang merupakan Surplus penjualan dan penghapusan tahun buku 2025.

Jika dibandingkan Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 maka Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan senilai Rp289.230.443.962,18 atau 1.035,13%

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 dan 2024. Adapun rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.168
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	TA 2025	TA 2024
I	**SURPLUS NON OPERASIONAL**		
1	Persediaan yang dikembalikan	323.589.750.938,00	6.202.824,00
2	Kenaikan Nilai Investasi	1.422.763.865,29	0,00
Jumlah (I)		**325.012.514.803,29**	**6.202.824,00**
II	**DEFISIT NON OPERASIONAL**		
Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan:			
1	Penjualan Peralatan dan Mesin	5.568.750,00	183.700.000,00
2	Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.114.083,00	0,00
3	Penjualan Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	35.732.812,00	0,00
Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan:			
1	Penghapusan Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	6.746.421.300,93	26.009.909.256,67
2	Penghapusan Aset Lain-Lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah)	549.770.308,70	297.930.000,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya:			
1	Pembayaran Utang Belanja BMHP/Kelebihan Pembayaran atas Transfer Pusat	56.362.813.625,15	1.456.013.606,00
Jumlah (II)		**63.723.420.879,78**	**27.947.552.862,67**
Total (I dan II)		**261.289.093.923,51**	**(27.941.350.038,67)**

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tersebut dapat dilihat lebih rinci pada **Lampiran 5.40**.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.4.1	**Surplus Dari Kegiatan Non Operasional**	**325.012.514.803,29**	**6.202.824,00**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 senilai Rp325.012.514.803,29 Jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2024 senilai Rp6.202.824,00 maka Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp 325.006.311.979,29 atau 5.239.650,71%.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	63.723.420.879,78	**27.947.552.862,67**

Defisit Non Operasional TA 2025 senilai Rp63.723.420.879,78. Jika dibandingkan dengan Defisit Non Operasional TA 2024 senilai Rp27.947.552.862,67 maka Defisit Non Operasional TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp35.775.868.017,11 atau 128,01%. Kenaikan disebabkan oleh adanya penghapusan dan penjualan Aset Lain-Lain dalam kondisi Rusak Berat/Usang.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat Pos Luar Biasa.

5.4.6 Surplus / Defisit Laporan Operasional	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	339.880.782.666,50	**(133.456.742.138,28)**

Berdasarkan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami Surplus senilai Rp339.880.782.666,50 dan 31 Desember 2024, diketahui bahwa terjadi defisit Laporan Operasional senilai Rp(133.456.742.138,28). Hal ini menunjukkan kenaikan saldo operasional senilai Rp473.337.524.804,78 atau 354,67%.

5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	298.897.546.503,59	**573.711.239.120,43**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi selama TA 2025 adalah senilai Rp298.897.546.503,59 dan TA 2024 adalah senilai Rp573.711.239.120,43 maka Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami Penurunan senilai Rp274.813.692.616,84 atau 47,90%. Rincian Arus Kas Masuk pada Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi selama TA 2025 senilai Rp1.078.524.318.416,05 dan TA 2024 adalah senilai Rp1.483.668.171.154,45 maka Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp405.143.852.738,40 atau 27,31%. Adapun rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.169
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	10.240.378.261,00	7.812.755.443,00	2.427.622.818,00	31,07
2	Penerimaan Retribusi Daerah	9.851.845.257,00	706.311.634,00	9.145.533.623,00	1.294,83
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.741.723.567,47	4.930.224.687,96	(1.188.501.120,49)	(24,11)
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	30.266.053.399,58	35.931.993.623,49	(5.665.940.223,91)	(15,77)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	506.994.414.300,00	832.040.549.000,00	(325.046.134.700,00)	(39,07)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
8	Penerimaan Dana Alokasi Desa	26.568.977.400,00	29.801.783.000,00	(3.232.805.600,00)	(10,85)
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00	(7.167.946.000,00)	(50,61)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.203.847.529,00	35.037.618.142,00	11.166.229.387,00	31,87
11	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.734.495.252,00	37.903.888.171,00	(36.169.392.919,00)	(95,42)
12	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	17.314.145.000,00	(17.314.145.000,00)	(100,00)
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.797.579,00	1.716.054.300,00	(1.644.256.721,00)	(95,82)
Jumlah		**1.078.524.318.416,05**	**1.483.668.171.154,45**	**(405.143.852.738,40)**	**(27,31)**

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi selama TA 2025 adalah senilai Rp779.626.771.912,46 dan TA 2024 adalah senilai Rp909.956.932.034,02 maka Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp130.330.160.121,56 atau 14,32%. Adapun rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.170
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	315.896.000.484,00	313.541.036.552,00	2.354.963.932,00	0,75
2	Belanja Barang dan Jasa	325.696.829.085,46	422.867.337.627,02	(97.170.508.541,56)	(22,98)
3	Pembayaran Hibah	19.262.097.420,00	38.040.036.933,00	(18.777.939.513,00)	(49,36)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	243.500.000,00	17.620.000,00	225.880.000,00	1.281,95
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	117.538.395.682,00	135.490.900.922,00	(17.952.505.240,00)	(13,25)
6	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	0,00	989.949.241,00	100
7	Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**779.626.771.912,46**	**909.956.932.034,02**	**(130.330.160.121,56)**	**(14,32)**

5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2025 (386.626.267.135,24)	31 Desember 2024 (446.055.065.542,40)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi/Non Keuangan selama TA 2025 adalah senilai Rp(386.626.267.135,24) dan TA 2024 adalah senilai Rp(446.055.065.542,40) maka Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi/Non Keuangan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp59.428.798.407,16 atau 13,32%. Hal ini disebabkan oleh penjualan Aset yang bertambah, yang terdiri dari:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi selama TA 2025 adalah senilai Rp258.133.908,00 dan TA 2024 adalah senilai Rp231.524.500,00 maka Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp26.609.408,00 atau 11,49%; dan

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi selama TA 2025 adalah senilai Rp386.884.401.043,24 dan TA 2024 adalah senilai Rp446.286.590.042,40 maka Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp59.402.188.999,16 atau 13,31%.

Adapun rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.171
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tanah	2.847.964.666,00	0,00	2.847.964.666,00	100,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	35.323.557.737,00	39.818.595.746,00	(4.495.038.009,00)	(11,29)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	233.904.479.133,85	225.324.831.715,40	8.579.647.418,45	3,81
4	Belanja Jalan, Irigasi dan	111.466.199.577,39	179.911.495.381,00	(68.445.295.803,61)	(38,04)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.461.196.461,00	305.796.700,00	1.155.399.761,00	377,83
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	1.881.003.468,00	925.870.500,00	955.132.968,00	103,16
Jumlah		**386.884.401.043,24**	**446.286.590.042,40**	**(59.402.188.999,16)**	**(13,31)**

5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2025 0,00	31 Desember 2024 0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Adapun Arus Kas Masuk, arus kas keluar serta arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan 2024 adalah nihil.

5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2025 (5.246.957,00)	31 Desember 2024 (123.300.850,00)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris selama TA 2025 adalah senilai Rp(5.246.957,00) dan TA 2024 adalah senilai Rp(123.300.850,00) maka Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp118.053.893,00 atau 95,74%. Rincian uraian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris selama TA 2025 adalah senilai Rp83.276.527.552,00 dan TA 2024 adalah senilai Rp96.035.532.796,00 maka Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp12.759.005.244,00 atau 13,29%.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris selama TA 2025 adalah senilai Rp83.281.774.509, dan TA 2024 adalah senilai Rp96.158.833.646,00 maka Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp12.877.059.137,00 atau 13,39%.

Adapun rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.172
Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Arus Kas 2025		Arus Kas 2024	
		Arus Kas Masuk	Arus Kas Keluar	Arus Kas Masuk	Arus Kas Keluar
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.517.598,00	2.517.598,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.760.493,00	6.760.493,00	11.386.681,00	11.386.681,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.124.894,00	8.124.894,00	0,00	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	20.280.726,00	20.280.726,00	32.933.700,00	32.933.700,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.513.509,00	13.513.509,00	0,00	0,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	78.105.886,00	78.105.886,00	191.590.624,00	191.590.624,00
7	Belanja Iuran Wajib Pegawai 3.25%	0,00	0,00	71.061.411,00	71.061.411,00
8	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	0,00	14.510.902,00	14.510.902,00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	193.202.060,00	193.202.060,00	177.053.281,00	177.053.281,00
10	Iuran Jaminan Kematian	579.024.852,00	579.024.852,00	520.946.742,00	520.946.742,00
11	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	3.990.996.866,00	3.990.996.866,00	3.760.479.335,00	3.760.479.335,00
12	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.068.778.014,00	2.068.778.014,00	1.913.950.471,00	1.913.950.471,00
13	Iuran Wajib Pegawai 8%	3.079.067.507,00	3.079.067.507,00	4.111.087.927,00	4.111.087.927,00
14	Pajak Penghasilan Ps 22	901.293.497,00	901.836.250,00	1.137.165.526,00	1.139.648.659,00
15	Pajak Penghasilan Ps 23	1.053.081.803,00	1.052.657.003,00	1.229.820.791,00	1.230.277.971,00
16	Pajak Penghasilan Ps 25	698.181,00	698.181,00	173.109,00	173.109,00
17	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	7.907.779.948,00	7.907.779.948,00	9.482.680.996,00	9.482.680.996,00
18	Pajak Pertambahan Nilai	52.213.425.514,00	52.218.496.646,00	57.577.413.763,00	57.577.411.860,00
19	PPH 21	7.430.657.101,00	7.430.657.101,00	13.525.406.402,00	13.601.794.219,00
20	Taspen	3.729.219.103,00	3.729.219.103,00	2.277.871.135,00	2.277.871.135,00
21	BPJS Kesehatan 1%	0,00	0,00	0,00	14.777.323,00
22	Kas Lainnya 2025	0,00	57.872,00	0,00	29.197.300,00
Jumlah		**83.276.527.552,00**	**83.281.774.509,00**	**96.035.532.796,00**	**96.158.833.646,00**

Dari tabel Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris diatas, dapat disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.173
Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
Arus Masuk	**83.276.527.552,00**	**96.035.532.796,00**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.276.527.552,00	96.035.532.796,00
Koreksi SILPA	0,00	0,00
Pengeluaran Kas Lainnya	0,00	0,00
Arus Keluar	**83.281.774.509,00**	**96.158.833.646,00**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.281.716.637,00	96.129.636.346,00
Koreksi SILPA	0,00	0,00
Pengeluaran Kas Lainnya	57.872,00	29.197.300,00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**(5.246.957,00)**	**(123.300.850,00)**

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(87.733.967.588,65)	**127.532.872.728,03**

Kenaikan/penurunan kas selama TA 2025 adalah senilai Rp(87.733.967.588,65), dan TA 2024 adalah senilai Rp127.532.872.728,03 maka Kenaikan/penurunan kas TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp215.266.840.316,68 atau 168,79% karena terdapat peningkatan belanja aset. Adapun rincian Kenaikan/penurunan kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.174
Rekapitulasi Penurunan Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aktivitas Operasi	298.897.546.503,59	573.711.239.120,43	(274.813.692.616,84)	(47,90)
2	Aktivitas Investasi	(386.626.267.135,24)	(446.055.065.542,40)	59.428.798.407,16	(13,32)
3	Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	(5.246.957,00)	(123.300.850,00)	118.053.893,00	(95,74)
Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas		**(87.733.967.588,65)**	**127.532.872.728,03**	**(215.266.840.316,68)**	**(168,79)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
436.029.832.062,90	**308.496.959.334,87**

Saldo Awal Kas TA 2025 adalah senilai Rp436.029.832.062,90 dan TA 2024 adalah senilai Rp308.496.959.334,87 maka Saldo Awal Kas TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp127.532.872.728,03 atau 41,34%. Adapun rincian Saldo Awal

Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.175
Saldo Awal Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	1-Jan-25	1-Jan-24
1	Kas di Kas Daerah	430.172.961.885,93	304.256.764.871,88
2	Kas di BLUD	4.256.815.368,00	3.149.285.782,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	600.000,00	4.475.000,00
4	Kas Lainnya	2.358.857,00	29.229.017,02
5	Kas Dana Bos	220.303.650,97	294.146.624,97
6	Kas Dana BOSP	37.431.942,00	995.700,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.190.048.036,00	643.060.923,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	149.312.323,00	119.001.416,00
Jumlah		**436.029.832.062,90**	**308.496.959.334,87**

5.5.7 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
348.295.864.474,25	**436.029.832.062,90**

Saldo Akhir Kas TA 2025 adalah senilai Rp348.295.864.474,25 dan TA 2024 adalah senilai Rp436.029.832.062,90 maka Saldo Akhir Kas TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp87.733.967.588,65 atau 20,12%. Adapun rincian Saldo Akhir Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.176
Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Saldo per 31 Desember	
		2025	2024
1	Kas di Kas Daerah	343.429.299.450,43	430.172.961.885,93
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	600.000,00
3	Kas di BLUD	4.161.619.400,95	4.256.815.368,00
4	Kas Dana BOS	401.488.030,97	217.132.552,97
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	238.238,90	149.312.323,00
6	Kas Lainnya	438.600,00	5.529.955,00
7	Kas Dana BOSP	7.246.220,00	37.431.942,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	295.534.533,00	1.190.048.036,00
Jumlah		**348.295.864.474,25**	**436.029.832.062,90**

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berisi tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.177
Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**3.610.370.207.483,78**	**3.742.895.594.401,47**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**339.880.782.666,50**	**(133.456.742.138,28)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	22.382.562.788,56	0,00
Lain-lain	(29.874.977.192,22)	931.355.220,59
EKUITAS AKHIR	**3.942.758.575.746,62**	**3.610.370.207.483,78**

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.610.370.207.483,78	**3.742.895.594.401,47**

Penyajian saldo ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dan 2024 adalah senilai Rp3.610.370.207.483,78 dan Rp3.742.895.594.401,47.

5.6.2 Surplus/Defisit

31 Desember 2025	31 Desember 2024
339.880.782.666,50	**(133.456.742.138,28)**

Berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dan TA 2024 terdapat Surplus/Defisit senilai Rp339.880.782.666,50 dan Rp(133.456.742.138,28) yang menjadi pengurang Ekuitas Awal sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(7.492.414.403,66)	**931.355.220,59**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar atas koreksi ekuitas TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp(7.492.414.403,66) dan Rp931.355.220,59. Adapun rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.178
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Penambah Ekuitas	Pengurang Ekuitas	Saldo Koreksi Ekuitas
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	22.382.562.788,56	0,00	22.382.562.788,56
3	Lain-lain	0,00	29.874.977.192,22	(29.874.977.192,22)
Jumlah		**22.382.562.788,56**	**29.874.977.192,22**	**(7.492.414.403,66)**

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	**0,00**

Koreksi Nilai Persediaan di TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.3.2 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024
22.382.562.788,56	**0,00**

Koreksi Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap di TA 2025 dan2024 senilai Rp22.382.562.788,56 dan Rp0,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi Revaluasi atas Aset Tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung senilai Rp137.560.374.211,44 menjadi senilai Rp159.942.937.000,00 sehingga terdapat penambahan senilai Rp22.382.562.788,56 Berdasarkan Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Sebagai Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Kaltim dan Utara KPKNL Tarakan Nomor LP-0036/1/KNL.1303/2025 Tanggal 4 Juli 2025 dengan luasan tanah dari luasan awal 405 Ha menjadi 404,042 Ha pada DPUPRPKP.

5.6.3.3 Lain-lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(29.874.977.192,22)	**931.355.220,59**

Lain lain di TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp29.874.977.192,22) dan Rp931.355.220,29. Lain-lain merupakan koreksi ekuitas atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Akumulasi dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Kewajiban. Adapun rincian Lain-lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.179
Koreksi Ekuitas Lain-lain

No	Uraian	Penambah Ekuitas	Pengurang Ekuitas	Saldo Koreksi Ekuitas
1	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	0,00	1.353.897.362,00	(1.353.897.362,00)
2	Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	0,00	380.087.119,35	(380.087.119,35)
3	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	0,00	0,02	(0,02)
4	Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28.094.753.071,52	0,00	28.094.753.071,52
5	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	1.130.000,01	0,00	1.130.000,01
6	Koreksi Ekuitas-Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya	0,00	241.292.242,68	(241.292.242,68)
7	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	11.128.174.444,30	0,00	11.128.174.444,30
8	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang	0,00	67.123.757.984,00	(67.123.757.984,00)
Jumlah		**39.224.057.515,83**	**69.099.034.708,05**	**(29.874.977.192,22)**

5.6.3.3.1 Koreksi Aset Lancar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(1.353.897.362,00)	**(137.618.705,96)**

Koreksi Aset Lancar TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp1.353.897.362,00) dan (Rp137.618.705,96). Koreksi tersebut merupakan koreksi Kas Dana BOK Puskesmas, Piutang Pajak, dan Piutang Transfer Pusat dan Daerah. Koreksi Aset Lancar dapat disajikan sebagai berikut.

5.6.3.3.1.1 Koreksi Nilai Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(57.872,00)	**(21,52)**

Koreksi Nilai Kas TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp57.872.00) dan (Rp21,52). Koreksi Nilai Kas tersebut merupakan koreksi nilai kas BOK karena adanya transfer dari dana pribadi ke rekening *virtual account* PMT Lokal BOK Puskesmas Muruk Rian untuk menggenapkan pembayaran ke rekening pihak ketiga pengadaan bahan makanan tambahan sejumlah Rp57.872,00, yang telah dicatat sebagai pendapatan TA 2023 sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T) Nomor 2771/SP3T/DK/2023 namun pada TA 2025 melalui konsultasi kepada Tim Biro Perencanaan Kemenkes, diarahkan untuk dikeluarkan dari SiLPA dana BOK ditegaskan kembalibahwa bagi puskesmas yang rekening gironya masuk dana di luar BOK agar segera dipindahbukukan sehingga pada tanggal 7 Maret 2025, BNI mendebet uang kas diluar dana BOK tersebut ke rekening asal, agar rekonsiliasi kas dana BOK hanya berasal dari transfer dana BOK pusat.

5.6.3.3.1.2 Koreksi Piutang Pajak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(18.531.288,00)	(137.618.684,44)

Koreksi Piutang Pajak TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp18.531.288,00) dan (Rp137.618.684,44). Koreksi piutang pajak merupakan pajak reklame dan pajak MBLB TA 2024 yang baru diakui pada TA 2025.

5.6.3.3.1.3 Piutang Dana Transfer Pusat Dan Dana Transfer Daerah lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(1.372.370.778,00)	0,00

Piutang Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Daerah Lainnya TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp1.372.370.778,00) dan Rp0,00. Koreksi Piutang merupakan penyaluran kurang bayar s.d TA 2023 dan Piutang BH Pajak kepada Provinsi TA 2024 yang baru diakui pada TA 2025. Koreksi nilai piutang TA 2025 sebagai berikut.

a. Penambah ekuitas senilai Rp13.467.395.222,00 atas Kurang Bayar PKB, BBNKB, PBBKB, dan AP yang baru di akui pada TA 2025 sesuai SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/128/2025 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota TA 2024.
b. Pengurang ekuitas senilai Rp14.839.766.000,00 atas penyaluran KB SD TA 2023 sesuai KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada TA 2024.

5.6.3.3.2 Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(380.087.119,35)	1.117.225.376,50

Koreksi Investasi Jangka Panjang TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp380.087.119,35) dan Rp1.117.225.376,50. koreksi Penyertaan Modal Pemerintah merupakan hasil koreksi yang tertuang dalam laporan keuangan PDAM Tirta Sungoi Sesayap hasil dari audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan TA 2025 yang melakukan koreksi atas Laba tahun sebelumnya.

5.6.3.3.3 Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(0,02)	(25.751.449,95)

Terdapat Koreksi Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp0,02 dan Rp25.751.449,95. Koreksi nilai aset tetap tersebut atas perhitungan pembulatan desimal.

5.6.3.3.4 Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	28.094.753.071,52	0,00

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp28.094.753.071,52 dan Rp0,00. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap karena ada koreksi akumulasi penyusutan karena terdapat aset yang belum disusutkan pada tahun sebelumnya dan koreksi akumulasi penyusutan karena perubahan masa manfaat.

5.6.3.3.5 Koreksi Ekuitas-Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.130.000,01	0,00

Terdapat Koreksi Aset Tidak Berwujud TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp1.130.000,01 dan Rp0,00. Koreksi Aset Tidak Berwujud atas Pengakuan ATB yang TA 2024 dicatat sebagai aset Ekstrakompatibel dan dikoreksi kembali menjadi ATB pada TA 2025.

5.6.3.3.6 Koreksi Ekuitas-Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	241.292.242,68	0,00

Terdapat Akumulasi dan Amostisasi Aset Lainnya TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp241.292.242,68 dan Rp0,00.

5.6.3.3.7 Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	11.128.174.444,30	(22.500.000,00)

Koreksi Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024 senilai Rp11.128.174.444,30 dan (Rp22.500.000,00). Koreksi nilai kewajiban TA 2025 sebagai berikut.

a. Penambah ekuitas senilai Rp11.130.424.444,30 merupakan koreksi utang belanja modal, dan utang atas penyaluran lebih bayar. Adapun penambah ekuitas sebagai berikut.
   1) Penambah ekuitas senilai Rp600.444,30 merupakan kewajiban yang telah dihapuskan karena pihak ketiga tidak menuntut untuk dibayarkan dibuktikan dengan berita acara tidak menuntut kembali.
   2) Penambah ekuitas senilai Rp11.129.824.000,00 merupakan pengurangan utang kelebihan pembayaran dana transfer umum sesuai dengan KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.
b. Pengurang ekuitas senilai Rp2.250.000,00 merupakan kewajiban pendapatan diterima dimuka sewa bangunan Ruko pada pasar Trans Betayau oleh Bankaltimtara.

5.6.3.3.8	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		67.123.757.984,00	**(0,00)**

Koreksi ekuitas Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp67.123.757.984,00 merupakan koreksi kewajiban berdasarkan Hasil Keputusan Peninjauan Kembali Nomor 497/PK/Pdt/2016, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung diputuskan untuk membayar ganti rugi materil senilai Rp67.123.757.984,00 kepada PT PMJ sebagai akibat dari tuntutan pengembalian Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Tuntutan dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung didasarkan bahwa selama Tahun 2008 s.d. 2010, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerima pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) senilai 6% dari harga jual batubara/ton yang dilakukan oleh PT PMJ.

5.6.4	Ekuitas Akhir	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		3.942.758.575.746,62	**3.610.370.207.483,78**

Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 diperoleh saldo akhir Ekuitas senilai Rp3.942.758.575.746,62 dan Rp3.610.370.207.483,78.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Informasi Non Keuangan, yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

a. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, yang disetujui pembentukannya pada sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Sejak tahun 2012, Kecamatan ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Kalimantan Timur. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian.

Kabupaten Tana Tidung yang beribukota di Tideng Pale terletak di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah sekitar 4.828,58 (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Delapan) Kilometer Persegi. Kabupaten Tana Tidung terdiri dari lima Kecamatan yaitu Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Betayau. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekatak Kabupaten Nunukan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

b. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dan
6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

1) Tenaga Kerja;
2) Lingkungan Hidup;
3) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4) Perhubungan;
5) Komunikasi & Informatika;
6) Penanaman Modal; dan
7) Perpustakaan.

Urusan Pemerintahan Pilihan:

1) Pariwisata;
2) Pertanian; dan
3) Perindustrian.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

1) Sekretariat Daerah;
    a) Bagian UMUM
    b) Bagian Pemerintahan
    c) Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
    d) Bagian Hukum
    e) Bagian Organisasi
    f) Bagian Administrasi Pembangunan
2) Sekretariat DPRD.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

1) Perencanaan;
2) Keuangan; dan
3) Kepegawaian.

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan:

1) Inspektorat.

Unsur Kewilayahan:

1) Kecamatan
    a) Kecamatan Sesayap;
    b) Kecamatan Sesayap Hilir;
    c) Kecamatan Tana Lia;
    d) Kecamatan Betayau; dan
    e) Kecamatan Muruk Rian.

Unsur Pemerintahan Umum:

1) Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui langkah-langkah seperti:

1) Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
2) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata;
3) Terwujudnya daya saing angkatan kerja lokal dalam seleksi ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Swasta;
4) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil dan berdaya saing; dan
5) Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2021-2026 yaitu:

1) Visi;

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah **"TERWUJUDNYA TANA TIDUNG BERMARTABAT, SEJAHTERA, INDAH DAN HUMANIS (BERSIH)"**

2) Misi;

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, dirumuskan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

a) Meningkatkan SDM yang berkualitas;

b) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang;

c) Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam;

d) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

e) Meningkatkan kemandirian desa;

f) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan

g) Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Tana Tidung memerlukan upaya yang menerus dan berkesinambungan didukung sumber daya yang memadai. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas. Di sisi lain, upaya untuk mengefisienkan belanja pemerintahan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah.

   Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Program Pembangunan Daerah.

   Rencana Strategi Pembangunan Daerah antara lain:

   a) Pengembangan Agro industri;

   b) Pengoptimalan mitigasi gangguan kemandirian pangan;

   c) Peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;

   d) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi; dan

   e) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

   Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2010 pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21.

Asas umum yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi beberapa hal yaitu:

1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;

2) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;

3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;

4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;

5) Anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi; dan

6) Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD dalam hal ini adalah Perumda Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap. Adapun Peraturan Daerah terkait Penyertaan Modal masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah karena masih diperlukan pembahasan terkait isi dari penyertaan modal tersebut. Adapun Laporan Keuangan Perumda Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap TA 2025 dapat dilihat paa **Lampiran 6.1**.

Dari asas umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

(1) Pajak Daerah,

(2) Retribusi Daerah,

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Dana Perimbangan, terdiri dari:

(1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,

(2) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;

b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;

c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;

b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;

c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

a) Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Pembiayaan operasional dan program dasar pada SKPD yang telah dibentuk Kabupaten Tana Tidung, agar setiap SKPD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang khususnya berhubungan dengan tugas – tugas operasional dan program dasar yang memang harus dilaksanakan secara berkesinambungan;

c) Pembiayaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelengkapan organisasi pemerintahan daerah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Tidung;

d) Pembiayaan terhadap kelanjutan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, yang merupakan kebijakan nasional, khususnya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e) Pembiayaan untuk kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah umum, terutama menyangkut kebutuhan pegawai non gaji, seperti halnya biaya perjalanan, barang dan jasa.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2025, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung disebutkan bahwa Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sedangkan entitas akuntansi yaitu perangkat daerah, BLUD, dan PPKD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tana Tidung, tidak termasuk Perusahaan Daerah, dan Entitas Akuntansi Kabupaten Tana Tidung memiliki 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari dua Sekretariat, lima Badan, 15 Dinas, satu Kantor, lima Kecamatan, satu Inspektorat, dan enak BLUD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada dibawahnya. Laporan Keuangan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi kantor-kantor yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai entitas akuntansi dan bagian yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD dan BLUD Rumah Sakit. Khusus untuk PPKD, sebagai entitas pelaporan selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan dari 29 SKPD entitas akuntansi penggabungan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pencapaian target keuangan TA 2025 didasarkan pada target pendapatan Senilai Rp1.027.212.457.453,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat Senilai Rp1.078.782.452.324,05 atau 105,02%. Realisasi tersebut lebih dari target Senilai Rp51.569.994.871,05 atau 5,02%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 Senilai Rp1.483.899.695.654,45 maka tahun 2025 mengalami penurunan pendapatan Senilai Rp405.117.243.330,40 atau 27,30%. Dan Anggaran Belanja Daerah TA 2025 Senilai Rp1.433.234.595.478,90, Realisasi Belanja Daerah TA 2025 Rp1.166.511.172.955,70 atau 81,39%, mengalami penurunan Senilai Rp189.732.349.120,72 atau 13,99%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yaitu Senilai Rp1.356.243.522.076,42. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa di TA 2025 terjadi Defisit Senilai Rp87.728.720.631,65, Defisit ini disebabkan realisasi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Senilai Rp436.022.138.025,90.

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah Senilai Rp348.293.417.394,25. SiLPA TA 2025 mengalami penurunan Senilai Rp87.728.720.631,65 atau 20,12%, jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2024 Senilai Rp436.022.138.025,90. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025.

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PERIODE 31 DESEMBER 2025

SEKTOR : STUNTING
ULTIMATE OUTCOME : MENURUNNYA PREVALENSI STUNTING
INDIKATOR TUJUAN : ANGKA STUNTING (9.0%)

NAMA OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TOTAL PER OPD	PASCA PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	Presentase (%)
1	2					3	4	5	6	7	7	8	9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori BAIK**	**0,9**	**150.000.000,00**	150.000.000,00	**177.010.000,00**	**174.354.000,00**	**98,50**
	5	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase Sasaran kegiatan pemb daerah yang terlaksana melalui pembiayaan lainnya*** ***Persentase Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD***	***80%*** ***90%***	***150.000.000,00***		***177.010.000,00***	***174.354.000,00***	***98,50***
	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	150.000.000,00		177.010.000,00	174.354.000,00	98,50
DINAS KESEHATAN	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus** **Cakupan masyarakat memiliki jaminan kesehatan** **Angka Kematian Neonatal per 100.000 kelahiran hidup** **Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup** **Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)** **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi** **Persentase sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan** **Cakupan kunjungan Ibu hamil K4** **Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**	**100 Per 100000 KH** **100 Persen** **4 Per 1000 KH** **5,5 per 1000 KH** **82 Persen** **85,71 Persen** **85 Persen** **95 Persen** **96,5 Persen**	**3.065.994.924,00**	3.763.996.224,00	**2.342.970.200,00**	**1.854.929.189,00**	**79,17**
	1	***02***	***02***	***2.02***		***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Fasyankes yang terakreditasi*** ***Jumlah puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan UKM dan UKP***	***6 Fasyankes*** ***5 Puskesmas***	***3.065.994.924,00***		**2.342.970.200,00**	**1.854.929.189,00**	**79,17**
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	129.513.500,00		62.285.500,00	40.620.000,00	65,22
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	584 Orang	121.438.000,00		153.656.000,00	142.386.271,00	92,67
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	556 Orang	64.581.200,00		107.277.200,00	79.229.018,00	73,85
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2936 Orang	38.597.000,00		27.807.000,00	13.051.600,00	46,94
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5220 Orang	290.528.200,00		80.676.700,00	59.016.700,00	73,15
	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	1.964.789.924,00		1.070.493.200,00	790.797.600,00	73,87
	1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	198.093.000,00		186.073.000,00	126.615.000,00	68,05
	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92 Dokumen	258.454.100,00		654.701.600,00	603.213.000,00	92,14
	1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif** **Persentase Pelaksanaan Kampanye Germas**	**100 Persen** **80 Persen**	**78.630.800,00**		**72.955.400,00**	**54.939.400,00**	**75,31**
	1	***02***	***05***	***2.02***		***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Pelaksanaan Kampanye Germas***	***2 Kali***	***78.630.800,00***		**72.955.400,00**	**54.939.400,00**	**75,31**
	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	78.630.800,00		72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)** **Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)** **Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)**	**38,46 Persen** **51,5 Persen** **90 Persen**	**516.370.300,00**		**332.400.000,00**	**301.740.570,00**	**90,78**
	2	***14***	***04***	***2.01***		***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	***Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif***	***55 Persen***	***516.370.300,00***		**332.400.000,00**	**301.740.570,00**	**90,78**

NAMA OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TOTAL PER OPD	PASCA PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	Presentase (%)
1	2					3	4	5	6	7	7	8	9
	2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	9 Unit	108.000.000,00		108.000.000,00	105.657.570,00	97,83
	2	14	04	2.01	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	68.580.300,00		-	-	#DIV/0!
	2	14	04	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	96 Orang	115.390.000,00		-	-	#DIV/0!
	2	14	04	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	15 Kelompok	224.400.000,00		224.400.000,00	196.083.000,00	87,38
	2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB**	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19 Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/MCPR**	**16,5 Persen 19 per 1000 WUS 15-19 70 Persen 73 Persen**	**103.000.200,00**		**103.000.200,00**	**102.410.000,00**	**99,43**
	2	***14***	***03***	***2.04***		***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	***Cakupan Kampung KB di Kabupaten***	***10 Kampung***	***55.600.200,00***		**55.600.200,00**	**55.010.000,00**	**98,94**
	2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	10 Kampung	55.600.200,00		55.600.200,00	55.010.000,00	98,94
	2	***14***	***03***	***2.01***		***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal***	***Persentase Kampung KB yang melaksanakan program KKBPK Persentasi Penyuluhan di Balai Penyuluhan KB***	***100 Persen 68 Persen***	***47.400.000,00***		**47.400.000,00**	**47.400.000,00**	100,00
	2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	47.400.000,00		47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN	**3**	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Konsumsi Ikan (Dengan Satuan: Kg/Kap/Tahun)**	**63 Kg/Kap/Tahun**	**135.092.000,00**		**84.128.000,00**	**82.743.950,00**	**98,35**
	3	***25***	***06***	***2.03***		***Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota***	***Cakupan Bina Poklasar (Dengan Satuan:%)***	***7 %***	***135.092.000,00***		**84.128.000,00**	**82.743.950,00**	**98,35**
	3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350 Ton	135.092.000,00		84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Neraca Bahan Pangan (Dengan Satuan:%)**	**84,2 %**	**123.842.700,00**	**258.934.700,00**	**108.274.700,00**	**101.403.000,00**	**93,65**
	2	***09***	***03***	***2.04***		***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi***	***Konsumsi Kalori (Dengan Satuan:Kkal/Kap/Hari)***	***2126 Kkal/Kap/Hari***	***123.842.700,00***		**108.274.700,00**	**101.403.000,00**	**93,65**
	2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	123.842.700,00		108.274.700,00	101.403.000,00	93,65

NAMA OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TOTAL PER OPD	PASCA PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	Presentase (%)
1	2					3	4	5	6	7	7	8	9
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**1**	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin**	**1 Persen**	**288.872.000,00**		**244.193.000,00**	**231.842.120,00**	**94,94**
	1	***06***	***05***	***2.02***		***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota***	***4126 Keluarga***	***288.872.000,00***	**288.872.000,00**	**244.193.000,00**	**231.842.120,00**	**94,94**
	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4126 Keluarga	288.872.000,00		244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**2**	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**	**80 Persentase**	**190.500.000,00**		**217.500.000,00**	**217.300.000,00**	**99,91**
	2	***16***	***02***	***2.01***		***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Kelompok Masyarakat Strategis Mitra Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***4 Kecamatan***	***190.500.000,00***	**190.500.000,00**	**217.500.000,00**	**217.300.000,00**	**99,91**
	2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	190.500.000,00		217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih**	**98 %**	**2.836.249.600,00**		**7.558.325.600,00**	**6.171.264.175,00**	**81,65**
	1	***03***	***03***	***2.01***		***Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Rumah Terlayani SPAM***	***100 Unit***	***2.836.249.600,00***		**7.558.325.600,00**	**6.171.264.175,00**	**81,65**
	1	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	1.418.124.800,00		5.546.153.600,00	4.214.577.500,00	75,99
	1	03	03	2.01	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	1.234.415.000,00		1.894.380.000,00	1.839.346.675,00	97,09
	1	03	03	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR	183.709.800,00		117.792.000,00	117.340.000,00	99,62
	1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Penduduk Bersanitasi (MCK)**	**95 %**	**1.759.385.046,00**	**2.836.249.600,00**	**1.546.551.650,00**	**1.361.248.799,97**	**88,02**
	1	***03***	***05***	***2.01***		***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah SPALD dalam Kondisi Baik***	***95 %***	***1.759.385.046,00***		**1.546.551.650,00**	**1.361.248.799,97**	**88,02**
	1	03	05	2.01	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara	350.994.246,00		189.997.250,00	84.468.540,00	44,46
	1	03	05	2.01	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang	1.408.390.800,00		1.356.554.400,00	1.276.780.259,97	94,12
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APS Pendidikan Dasar** **Indeks Inklusivitas** **Indeks Kebinekaan** **Kompetensi Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional** **Indeks Keamanan** **Kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional**	**100%** **63,25%** **73,60%** **76,22%** **78,13%** **91,92%**	**2.101.485.000,00**		**4.417.270.900,00**	**4.253.776.502,00**	**96,30**

NAMA OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TOTAL PER OPD	PASCA PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	Presentase (%)
1	2					3	4	5	6	7	7	8	9
	1	***01***	***02***	***2.03***		***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	***Angka Partisipasi Sekolah PAUD (APS PAUD) Peningkatan Proporsi Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4***	***100 % 42,00 % 49,00 %***	***2.101.485.000,00***	**2.101.485.000,00**	**4417270900**	**4253776502**	**96,30**
	1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1300 Peserta Didik	500.000.000,00		1198100000	1196300000	99,85
	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	100 Orang	459.078.000,00		1602433200	1545353602	96,44
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	48 Satuan Pendidikan	1.046.632.000,00		1046632000	959082400	91,64
	1	01	02	2.03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	95.775.000,00		570105700	553040500	97,01
ALOKASI ANGGARAN TOTAL									**11.349.422.570,00**	**9.590.037.524,00**	**17.204.579.650,00**	**14.907.951.705,97**	**86,65106622**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
RINCIAN PENDAPATAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
I. PENDAPATAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA					
1	09 Juli 2025	PMBYRN STS TAHAP 1 SENILAI Rp. 5.000.000 ATAS PNGMBALIAN SISA UP/TU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SENILAI Rp. 57.213.000 BERDASARKAN LHP BPK NO. 42.B/LHP/SMD/VII/2012 TGL 19 JULI 2012 (900-1.3.6/586/DPPP/2025)	900-1.3.6/586/DPPP/2025	Rp 5.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
2	15-Sep-25	POTONGAN GAJI SEPT 2025 AN SISWANDI (0016/STS/DISHUT/2025)	0016/STS/DISHUT/2025	Rp 5.553.000,00	Dinas Kehutanan
3	07 Oktober 2025	PENGEMBALIAN TUP TA. 2010 SEBESAR Rp. 57.213.000 PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KTT AN. SISWANDI, S.HUT (0017/STS/DISHUT/2025)	0017/STS/DISHUT/2025	Rp 5.000.000,00	Dinas Kehutanan
4	17-Nov-25	PNGMBALIAN TUP TA. 2010 Rp. 57.213.000,00 PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KTT AN. SISWANDI (0018/STS/DISHUT/2025)	018/STS/DISHUT/2025	Rp 5.000.000,00	Dinas Kehutanan
5	29 Desember 2025	PNGMBALIAN TUP TA. 2010 Rp. 57.213.000 (0018/STS/DISHUT/2025)	0018/STS/DISHUT/2025	Rp 5.000.000,00	Dinas Kehutanan
Jumlah				**Rp 25.553.000,00**	
II. PENDAPATAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN					
1	06 Januari 2025	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 pada Kegiatan Kekurangan Volume Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada Pembangunan Pagar dan Lanscape Gereja Desa Gunawan CV. Fasyabillah Mandiri 44.073.567,42 (03/STS/LS/DPUPRPKP/KTT/I/2025)	03/STS/LS/DPUPRPKP/KTT/I/2025	Rp 2.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	09 Januari 2025	Berdasarkan LHP BPK nomor : 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2023 Pembayaran Pertama Kekuarangan Volume Oekerjaan Kontruksi Pemeliharaan Asrama SMP/SMA Terpadu Unggulan Tana Tidung An. CV. Enggang Mitra Bangun (001/STS/DISDIKBUD/2025) - STS SENILAI Rp4.500.000,00	001/STS/DISDIKBUD/2025	Rp 4.499.277,16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	09 Januari 2025	POTONGAN UTANG KASDA JANUARI 2025 PT. TASPEN (NOVA/11005) 500.000 Hasil Kerjasama Daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POT HUTANG KASDA PERIODE JANUARI 2025 PT. TASPEN	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
4	15 Januari 2025	Berdasarkan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 Terdapat temuan Kelebihan Pembayaran Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Padat Karya (Desa Sebidai) An. CV. SYIFA KONSULTAN Rp. 175.324.500,- (04/STS/DPUPRPKP/KTT/I/2025) Angs. Ke 2	04/STS/DPUPRPKP/KTT/I/2025	Rp 70.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	16 Januari 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan TA. 2023 dan 2024 atas Pelaksanaa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2023 dan 2024 NO. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TGL. 16/12/2024 An. CV. Blue Print Consultant (0004/STS/DPPKU-KTT/I/2025)	0004/STS/DPPKU-KTT/I/2025	Rp 35.064.000,00	Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi Dan UKM
6	16 Januari 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan TA. 2023 dan 2024 atas Pelaksanaa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2023 dan 2024 NO. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TGL. 16/12/2024 An. CV. Artha Caravan Design (0005/STS/DPPKU-KTT/I/2025)	0005/STS/DPPKU-KTT/I/2025	Rp 17.532.450,00	Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi Dan UKM
7	20 Januari 2025	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Masjid SMP/SMA Terpadu Unggulan Berdasarkan LHP BPK No. 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 Tgl. 28/05/2024 CV. Dua Putri Taka (003/STS/DIKNAS/2025)	003/STS/DIKNAS/2025	Rp 18.550.927,53	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8	24 Januari 2025	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Mess Guru SMP/SMA Terpadu Unggulan Berdasarkan LHP BPK No. 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 Tgl. 28 Mei 2024 An. CV. Putra Syakila (004/STS/DIKNAS/2025)	004/STS/DIKNAS/2025	Rp 5.443.618,42	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	31 Januari 2025	Setoran Kelebihan Pembayaran Sewa Speed Tahun 2023 (LHP)		Rp 37.824.624,00	Badan Pemeriksa Keuangan
10	07 Februari 2025	Berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI 69/.B/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 28 Mei 2024 Terdapat Temuan Kekuarangan Volume Pekerjaan Pada Pembangunan Gereja Belayan Ari angsuran I CV. Dua Putri Taka (008/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	008/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 9.748.240,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PNGWSN REKONSTRUKSI JLN TRANS SAMBUNGAN (MTL) Rp. 88.725.000,00 (ANGS KE 1) PT. INDOPLAN INTI PATRIA (028/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	028/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 88.725.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN KANTOR KODIM 0914 Rp. 12.662.325,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (019/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	019/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 4.220.775,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
13	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN KANTOR KODIM 0914 Rp. 10.500.000,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (018/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	018/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 10.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHAN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PNGWSN PEMB. GORONG2 JL MAHARAJA DINDA DS. TNH MERAH BRT Rp. 15.200.000,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (016/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	016/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 5.066.666,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SESAYAP-SENGKONG Rp. 15.584.400,00 (ANGS KE 1) CV. RAGAM JASA NUSANTARA (013/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	013/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 5.194.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SESAYAP-SENGKONG Rp. 6.400.000,00 (ANGS KE 1) CV. RAGAM JASA NUSANTARA (040/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	040/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 6.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PNGWSN PEMB. GEREJA PAROKI ST. PAULUS (MTL) Rp. 21.578.400,00 (ANGS KE 1) CV. IDESPLAN CONSULTING ENGINEERS (032/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	032/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 7.192.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PNGWSN PEMB. GEREJA PAROKI ST. PAULUS (MTL) Rp. 38.661.300,00 (ANGS KE 1) CV. IDESPLAN CONSULTING ENGINEERS (031/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	031/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 12.887.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN TRANS KALTIM-BUONG BARU Rp. 19.480.500,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (015/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	015/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 6.493.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMB. JALAN SESAYAP-SENGKONG STA 11+300 (BANKEU) Rp. 10.500.000,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (020/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	020/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 10.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMB. DRAINASE JALAN TRANS KALTIM-BUONG BARU Rp. 14.000.000,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (014/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	014/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMB. JALAN SESAYAP-SENGKONG STA 11+300 (BANKEU) Rp. 22.402.575,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (021/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	021/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 7.467.525,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PKRJN PNGWSN REKONSTRUKSI JLN SAMBUNGAN TENGKUDACING THP II (MTL) Rp. 54.000.000,00 (ANGS KE 1) PT. INDOPLAN INTI PATRIA (027/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	027/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 54.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71/.B/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat Temuan Kekuarangan Vol Pekerjaan PADA PEKERJAAN PEMB JLN POROS BEBATU-DESA SENGKONG, CV. NABILA N NAYBILA TAHAP II Rp. 513.944.227,13. (ANGS KE 1) (007/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	007/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN REKONSTRUKSI JLN RELOKASI SEDULUN Rp. 19.480.500,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (026/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	026/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 6.493.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26	10 Februari 2025	LHPBPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PNGWSAN REKONSTRUKSI JALAN RELOKASI SEDULUN Rp. 19.480.500,00 (ANGSURAN KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (025/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	025/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 6.493.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BEBATU-SENGKONG Rp. 6.400.000,00 (ANGS KE 1) CV. RAGAM JASA NUSANTARA (039/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	039/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 6.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMB. JALAN SESAYAP-SENGKONG STA 11+300 (BANKEU) Rp. 9.216.666,67 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (034/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	034/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 9.216.666,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BEBATU-SENGKONG Rp. 15.584.400,00 (ANGS KE 1) CV. RAGAM JASA NUSANTARA (010/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	010/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 5.194.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PNGWSN REKONSTRUKSI JLN TRANS SAMBUNGAN (MTL) Rp. 58.500.000,00 (ANGS KE 1) PT. INDOPLAN INTI PATRIA (029/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	029/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 58.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
31	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PNGWSN REKONSTRUKSI JLN BEBATU - SENGKONG (DAK) Rp. 167.832.000,00 (ANGS KE 1) PT. INDOPLAN INTI PATRIA (030/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	030/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 167.832.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BEBATU-SENGKONG Rp. 15.584.400,00 (ANGS KE 1) CV. RAGAM JASA NUSANTARA (011/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	011/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 5.194.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
33	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PNGWSN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SESAYAP-SENGKONG Rp. 15.584.400,00 (ANGS KE 1) CV. RAGAM JASA NUSANTARA (012/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	012/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 5.194.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN REKONSTRUKSI JALAN RELOKASI SEDULUN Rp. 14.000.000,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (035/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	035/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 14.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN WORKSHOP/GUDANG Rp. 14.610.375,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (024/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	024/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 4.870.125,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
36	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN LONGSORAN SP1 - SP2 Rp. 10.500.000,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (022/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	022/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 10.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
37	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PENGAWASAN WORKSHOP/GUDANG Rp. 14.610.375,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (037/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	037/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 14.610.375,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
38	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEREJA RIAN RAYO Rp. 15.584.400,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (033/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	033/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 15.584.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
39	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PMBYRN AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GORONG2 JL MAHARAJA DINDA DS TNH MRH BRT Rp. 20.454.525,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (017/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	017/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 6.818.175,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
40	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PENGAWASAN REHAB MUSHOLLAH RT. 4 DS. MENJELUTUNG Rp. 34.090.875,00 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (036/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	036/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 11.363.625,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41	10 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBRYN PERSONEL SITE ENGINEER PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA GKII SEBIDAI Rp. 34.125.000,00 (ANGS KE 1) CV. UNICORN (038/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	038/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 11.375.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
42	10 Februari 2025	Berdasarkan LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PERSONEL AHLI K3 PADA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMB JLN LONGSORAN SP1-SP2, Rp. 31.168.800 (ANGS KE 1) CV. ART CARAVAN DESIGN (023/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	023/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 10.389.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
43	10 Februari 2025	BERDASARKAN LHP BPK RI TERDAPAT TEMUAN KEKURANGAN VOLUME ATAS PAKET PEKERJAAN PEMB DRAINASE LINGKUNGAN PERUMAHAN KHUSUS DS. LIMBU SEDULUN SEJUMLAH Rp. 18.302.166,36 (ANGSURAN KE 1) CV. KALTARA PRIMA (050/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	050/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
44	10 Februari 2025	POTONGAN UTANG KASDA FEBRUARI 2025 PT. TASPEN (ENO/004-03) 3.215.871 Hasil Kerjasama Daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POT HTG KASDA FEBRUARI 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
45	12 Februari 2025	LHP BPK RI TH. 2024 TRDPAT TEMUAN KEKURNGN VOL. PKRJAAN PD KEG. PMLIHRAAN SARPRAS RTH Rp. 463.268,07 (ANGS KE 1) CV. SEBAWANG GRAHA (041/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	041/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 463.268,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
46	12 Februari 2025	LHP BPK RI 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 TGL 28 MEI 2024 TRDPT KLBHN PMBYRN PD PKRJAAN PNGWSN PEMATNGAN LAHAN DPRD KTT (MTL) Rp. 189.889.920,00 (ANGS KE 2) PT. IDESPLAN CONSULTING ENGINEERS (049/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	049/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
47	12 Februari 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TGL 16 DES 2024 TRDPT TEMUAN KKRNGAN VOL. ATAS PAKET PKRJAAN OPTMLISASI IPLT LIMBU SEDULUN Rp. 8.593.555,32 (ANGS KE 1) CV. MARYAM PAGUN JAYA (052/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	052/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 8.593.555,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
48	12 Februari 2025	LHP BPK RI 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 TGL 28 MEI 2024 TRDPT KLBHN PMBYRN PD PKRJAAN PNGWSN PEMB. GED. DPRD KTT Rp. 469.293.000,00 (ANGS KE 2) PT. ANGELIA OERIP MANDIRI (047/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	047/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
49	12 Februari 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TGL 16 DES 2024 TRDPT TEMUAN KKRNGAN VOL. ATAS PAKET PKRJAAN PMSNGAN PGR SENG SMNTRA GED. GADIS Rp. 15.513.600,32 (ANGS KE 1) CV. SEBAWANG GRAHA (052/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	052/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 15.513.600,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
50	12 Februari 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TGL 16 DES 2024 TRDPT KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 KONSTRUKSI PD PKRJAAN PNGWSN PEMB. GED. DPRD KTT Rp. 68.181.750,00 (ANGS KE 1) PT. ANGELIA OERIP MANDIRI (009/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	009/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 22.727.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51	13 Februari 2025	ONUS 250213 (3.896.100,00) (MB1739429757ZR3) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemb Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 (CV. MUFID CONSULINDO)	018/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.896.100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
52	13 Februari 2025	ONUS 250213 (974.025,00) (MB1739429388FZA) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemugaran Makam Raja Baginda II Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 (CV. MUFID CONSULINDO)		Rp 974.025,00	Badan Pemeriksa Keuangan
53	13 Februari 2025	ONUS 250213 (3.896.100,00) (MB1739429667SJV) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemb Gudang SMP/SMA Terpadu Unggulan Tahap II) Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 (CV. MUFID CONSULINDO)	010/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.896.100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
54	13 Februari 2025	ONUS 250213 (3.298.675,00) (MB1739429451CUS) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemugaran Makam Keramat Belalas Buong Baru Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 ke 1 (CV. MUFID CONSULINDO)	015/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.298.675,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55	13 Februari 2025	ONUS 250213 (3.376.600,00) (MB1739432920PJU)Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemb Gedung Perpustakaan MI Al Khairaat Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 Ke 1 (CV. MUFID CONSULINDO)	014/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.376.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
56	13 Februari 2025	ONUS 250213 (2.600.000,00) (MB1739429598DWB) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pembpagar dan Halaman SDn 019 Tana Tidung (Buong Baru) Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 (CV. MUFID CONSULINDO)		Rp 2.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
57	13 Februari 2025	ONUS 250213 (9.740.250,00) (MB17394297111E0) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemb RKB MI Al Khairaat Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 (CV. MUFID CONSULINDO)		Rp 9.740.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
58	13 Februari 2025	ONUS 250213 (4.195.800,00) (MB1739429554O9E) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemb Rehabilitasi Kantor Pengelola SMPN 1 Terpadu Unggulan Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 (CV. MUFID CONSULINDO)	011/STS/DIKNAS/2025	Rp 4.195.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
59	13 Februari 2025	ONUS 250213 (MB1739429503S50) Kelebihan Pemby Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Pengawasan Pemb Rehabilitasi sedang/berat TK/SD Terpadu Unggulan Berdasarkan LHP No.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 ke 1 (CV. MUFID CONSULINDO)	016/STS/DIKNAS/2025	Rp 4.688.300,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
60	14 Februari 2025	ONUS 250214 (MB1739503375940) Berdasarkan Laporan LPH BPK No. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 terdapat Kelebihan Pemb Personel Site Enginering pada Pkrjn Pengawasan Pemb Drainase Masjid Buong Baru Ke 1 (CV. MUFID CONSULINDO)	046/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 12.662.325,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
61	14 Februari 2025	ONUS 250214 (MB1739503431GCQ) Berdasarkan Laporan LPH BPK No. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 terdapat Kelebihan Pemb Personel Site Enginering pada Pkrjn Pengawasan Pemb Jalan lingkungan Gang Adu Sayang Ds. Sebawang Ke 1 (CV. MUFID CONSULINDO)	044/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 13.636.350,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
62	14 Februari 2025	ONUS 250214 (MB1739503487510) Berdasarkan Laporan LPH BPK No. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 terdapat Kelebihan Pemb Personel Site Enginering pada Pkrjn Pengawasan Pemb Jalan lingkungan Menuju Tambatan Perahu Desa Sedulun Ke 1 (CV. MUFID CONSULINDO)	045/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 13.636.350,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
63	14 Februari 2025	ONUS 250214 (MB1739503538Q57) Berdasarkan Laporan LPH BPK No. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 terdapat Kelebihan Pemby Personel Inspector pada Pekerjaan Pengawasan Pemb lingkungan Menuju Pemakaman Desa Buong Baru Angsuran Ke 1 CV. MUFID CONSULINDO	043/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 13.636.350,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
64	14 Februari 2025	ONUS 250214 (MB1739503638DF7) Berdasarkan Laporan LPH BPK No. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 terdapat Kelebihan Pemby Personel Inspector pada Pekerjaan Pengawasan Pemb Plat Duicker Jl. Menjelutung - linuang Kayam lokasoi I Angsuran ke 1 CV. MUFID CONSULINDO	042/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 633.333,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
65	20 Februari 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat TEMUAN KEKURANGAN VOLUM ATAS PAKET PEKERJAAN PEMB GRJA PAROKI ST PAULUS (MTL) Rp. 197.800.351,04 (ANGS 1) (054/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	054/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
66	26 Februari 2025	LHP BPK RI 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 TGL 28 MEI 2024 TRDPT TEMUAN KKRGN VOL. BLNJA BRG DISRHKAN KPD MASY ATS PKET PKRJAN PEMB LAB DAN BHN KIMIA IPA SEDULUN Rp. 11.210.222,51 (ANGS KE 1) CV. SUPER STAR 99(055/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025)	055/STS/DPUPRPKP/KTT/II/2025	Rp 1.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
67	03 Maret 2025	PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR HONORARIUM KEGIATAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) Hj. EVIHAR (005/BPKAD-KTT/2025)	005/BPKAD-KTT/2025	Rp 8.925.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
68	06 Maret 2025	LHP BPK RI 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 Tgl. 28 Mei 2024 Trdpt klbhan pmbyrn dan ptensi klbhan pmbyrn pd paket pkrjan jasa knsultasi pd pngwsan pmbngnan gedung B Kntr bupati KTT th. 2023 angsuran III, PT. TERASIS EROJAYA (059/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	059/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 77.791.098,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
69	06 Maret 2025	LHP BPK RI 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 Tgl. 28 Mei 2024 Trdpt klbhan pmbyrn dan ptensi klbhan pmbyrn pd paket pkrjan jasa knsultasi pd pngwsan pmbngnan ged. Utma kntr bupati KTT th. 2023 angsuran III, PT. BIRO ARSITEK (058/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	058/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 100.006.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
70	06 Maret 2025	LHP BPK RI 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 Tgl. 28 Mei 2024 Trdpt klbhan pmbyrn dan ptensi klbhan pmbyrn pd paket pkrjan jasa knsultasi pd pngwsan pmtngan lhan kntr bupati KTT th. 2023 angsuran III, CV. MENARA (060/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	060/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
71	10 Maret 2025	LHP BPK RI 71//LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KKRNGAN VOLUM ATAS PKET PKRJAN PEMB JLN LINGKNGAN GG SEMAUN DS SESAYAP Rp. 6.258.915,34 (ANGS KE 1) CV. RAI PAI SALMAH (053/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	053/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 6.258.915,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
72	10 Maret 2025	POTONGAN UTANG KASDA MARET 2025 PT. TASPEN (ENO/003-02) 500.000 Hasil Kerjasama Daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POT HTG KASDA MARET 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
73	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PD PKRJAAN PNGWSN PEMB LAP TMBAK POLRES Rp. 6.818.175,00 (ANGS KE 1) CV. MONALISA ART (073/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	073/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 6.818.175,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
74	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPETOR PD PKRJAAN PNGWSN PEMB SMNISASI GG SINGKONG DS. TIDENG PALE Rp. 1.948.050,00 (ANGS KE 1) CV. MONALISA ART (070/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	070/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 1.948.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
75	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PKRJAAN PNGWSN PEMB JLN BAGNDA Rp. 974.025,00 (ANGS KE 1) CV. MONALISA ART (069/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	069/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 974.025,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
76	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PD PKRJAAN PNGWSN PEMB SMNISASI GG PELANGI DS. TIDENG PALE TIMUR Rp. 3.896.100,00 (ANGS KE 1) CV. MONALISA ART (071/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	071/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 3.896.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
77	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEERING PD PKRJAAN PNGWSN PNGMBNGN JRINGN DSTRBUSI AIR MNUM KEC. SESAYAP THP II Rp. 11.688.300,00 (ANGS KE 1) CV. FORTUNE ENGINEERING (062/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	062/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 11.688.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
78	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PD PKRJAAN PNGWSN PNINGKTN & RHBLTASI JLN AJI MAULANA DS. BUONG BARU Rp. 13.636.350,00 (ANGS KE 1) CV. MENARA (085/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	085/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 13.636.350,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
79	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEERING PD PKRJAAN PNGWSN PEMB & RHBLTASI DRAINASE LING DS. MENDUPO Rp. 10.714.275,00 (ANGS KE 1) CV. FORTUNE ENGINEERING (064/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	064/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 10.714.275,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
80	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PD PKRJAAN PNGWSN PEMB JLN LING MNJU JEBTN GNTUNG DS. KUJAU Rp. 974.025,00 (ANGS KE 1) CV. FORTUNE ENGINEERING (063/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	063/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 974.025,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
81	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PD PKRJAAN PNGWSN PEMB JLN RAJAWALI DS. TIDENG PALE TIMUR Rp. 17.532.450,00 (ANGS KE 1) CV. MENARA (084/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	084/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 17.532.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
82	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PD PKRJAAN PNGWSN RHAB KNTR DPUPRPKP Rp. 23.376.600,00 (ANGS KE 1) CV. GRAHA MITRA NUSANTARA KONSULTAN (092/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	092/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 23.376.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
83	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PD PKRJAAN PNGWSN PEMB DRAINASE LING DS. SAMBUNGAN Rp. 4.870.125,00 (ANGS KE 1) CV. MONALISA ART (075/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	075/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 4.870.125,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
84	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PD PKRJAAN PNGWSN PEMB MUSHOLLA POLRES KTT Rp. 12.662.325,00 (ANGS KE 1) CV. MENARA (083/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	083/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 12.662.325,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
85	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 Terdapat KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PD PKRJAAN PNGWSN PEMB DRAINASE LING DS. SAMBUNGAN Rp. 2.922.075,00 (ANGS KE 1) CV. MONALISA ART (072/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	072/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 2.922.075,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
86	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PKRJAAN PNGWSN PEMB DRAINASE LINK GANG ANGGREK DS. TIDENG PALE TIMUR Rp. 6.818.175,00 (ANGS KE 1) CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING (080/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	080/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 6.818.175,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
87	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 KLBHN PMBYRN PERSONEL AHLI K3 PADA PKRJAAN PNGWSN PEMB SEMENISASI KMPUNG SELOR DS. SEPALA DALUNG Rp. 6.818.175,00 (ANGS KE 1) CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING (077/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	077/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 6.818.175,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
88	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 KLBHN PMBYRN PERSONEL SITE ENGINEER PD PKRJAAN PNGWSN REHAB GDUNG SERBAGUNA Rp. 30.194.775,00 (ANGS KE 1) CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING (076/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	076/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 30.194.775,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
89	21 Maret 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 KLBHN PMBYRN PERSONEL INSPECTOR PD PKRJAAN PNGWSN PEMB & PNINGKTAN JLN LINGKN DS. SAMBUNGAN Rp. 974.025,00 (ANGS KE 1) CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING (078/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025)	078/STS/DPUPRPKP/KTT/III/2025	Rp 974.025,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
90	10-Apr-25	POTONGAN UTANG KASDA april 2025 PT. TASPEN (ENO/012-04) (500.000 TGR AN. Rahmat Santoso)	POT HTG KASDA APRIL 2025	Rp 500.000,00	PT. TASPEN
91	24-Apr-25	PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM NOMOR SK 100.3.3.1/026/K-I/2024 YG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL AN. RENI ANGGRAENI (023/STS/BPKAD/2025)	023/STS/BPKAD/2025	Rp 4.675.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
92	24-Apr-25	PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN BAYAR HONORARIUM TIM PELAKSANAAN TPP ASN PEMDA KTT TAHUN 2024 YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL, AN. JAINAL ABIDIN (022/STS/BPKAD/2025)	022/STS/BPKAD/2025	Rp 1.275.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
93	24-Apr-25	PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBENTUKAN PANITIA KEG. PEMBINAAN DAN FASILITASI URUSAN KEAGAMAAN DI BIDANG BINA MENTAL DAN SPIRITUAL KTT TA. 2024 AN. IBRAHIM ALI (001/STS/SETDA/IV/2025)	001/STS/SETDA/IV/2025	Rp 10.200.000,00	Sekretariat Daerah
94	24-Apr-25	PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBENTUKAN PANITIA KEG. PEMBINAAN DAN FASILITASI URUSAN KEAGAMAAN DI BIDANG BINA MENTAL DAN SPIRITUAL KTT TA. 2024 AN. H. DT IQRO RAMADHAN (002/STS/SETDA/IV/2025)	002/STS/SETDA/IV/2025	Rp 2.550.000,00	Sekretariat Daerah
95	25-Apr-25	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI NO. SK 188.4.55/425/K-XII/2024 TA. 2024 AN. YUDI RAHMATSYAH (007/BPKAD-KTT/2025)	007/BPKAD-KTT/2025	Rp 1.275.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
96	25-Apr-25	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR BIAYA PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN KALTARA TA. 2020 AN. HERSONSYAH (002A?STS/INSP-KTT/IV/2025)	002A?STS/INSP-KTT/IV/2025	Rp 50.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
97	25-Apr-25	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR HONORARIUM TA. 2024 AN. PEBRYANTO ABDI PUTRA (003/STS/INSP-KTT/IV/2025)	003/STS/INSP-KTT/IV/2025	Rp 4.750.000,00	Inspektorat Kabupaten
98	25-Apr-25	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR HONORARIUM TA. 2024 AN. TAJUDIN NOOR (003/STS/INSP-KTT/IV/2025)	003/STS/INSP-KTT/IV/2025	Rp 3.800.000,00	Inspektorat Kabupaten
99	29-Apr-25	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM BOS TAHUN 2024 AN. AHMATSYAH (025/STS/DIKNAS/2025)	025/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
100	29-Apr-25	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM BOP TAHUN 2024 AN. MUHAMMAD SHABIR TAQWA (024/STS/DIKNAS/2025)	024/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
101	29-Apr-25	PENGEMBALIAN HONORAIUM TIM PELAKSANA KEG. BPKAD TA. 2024 AN. IRWANSYAH KADIR (008/BPKAD-KTT/2025)	008/BPKAD-KTT/2025	Rp 8.550.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
102	02 Mei 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 TRDPT KLBHAN BYR ATAS PKRJAAN PKRJAAN PMBNGUNAN JLN LNGKAR PUSPEM Rp. 229.715.619,11 ANGS KE 1 CV. RIAN PERKASA (093/STS/DPUPRPKP/IV/2025)	093/STS/DPUPRPKP/IV/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
103	02 Mei 2025	PNGMBLIAN HONOR TIM PLKSNA KEGIATAN (008/STS/DINKES/2025)	008/STS/DINKES/2025	Rp 1.912.500,00	Dinas Kesehatan
104	02 Mei 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 TRDPT KLBHAN BYR ATAS PKRJAAN PKRJAAN PMBNGUNAN JLN SMPNG SEPUTUK - KAPUAK/RIAN Rp. 248.671.768,74 ANGS KE 1 CV. RIAN PERKASA (094/STS/DPUPRPKP/IV/2025)	094/STS/DPUPRPKP/IV/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
105	02 Mei 2025	PEMBYRN STS PLUNASAN KLBHN BYR HONOR TIM PLKSNA KRG. AN. RUDI API TA. 2023 DAN 2024(900.1.3.6/318/DPPP/2025)	900.1.3.6/318/DPPP/2025	Rp 7.650.000,00	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
106	02 Mei 2025	PNGMBLIAN KLBHN BYR HONOR TIM PLKSNA KEG. TA. 2024 AN. DR LIZANTY (SETORAN LUNAS) (B.900.1.3.6/333/BAPPLITBANG-KTT/IV/2025)	B.900.1.3.6/333/BAPPLITBANG-KTT/IV/2025	Rp 5.100.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
107	02 Mei 2025	PEMBYRN KLBHAN ATS TUMAPNG TINDIH PERJADIN BAG. ADPEM AN. ANDINPRASETYO, JUNAIDI, ABDUL GHAFUR (001/STS.ADPEM/V/2025)	001/STS.ADPEM/V/2025	Rp 3.072.100,00	Bagian Administrasi Pembangunan
108	05 Mei 2025	PMBYRN KLBHN PEMB HONOR TIM PELAKSANA KEG. TA. 2024 AN. UUS RUSMANDA (002/STS/SETDA/V/2025)	002/STS/SETDA/V/2025	Rp 68.382.500,00	Sekretariat Daerah
109	05 Mei 2025	PEMBYRN KLBHN PERJADIN BAG. HUKUM TA. 2024 AN. MUSDALIFAH (T.3/700.1.2.1/HUK-KTT/V/2025)	T.3/700.1.2.1/HUK-KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Bagian Hukum
110	05 Mei 2025	PMBYRN KLBHN JMLH HONOR SK TIM/PANITIA TA. 2024 AN. RISKA TRI UTAMI (T.2/700.1.2.1/HUK-KTT/V/2025)	T.2/700.1.2.1/HUK-KTT/V/2025	Rp 6.412.500,00	Bagian Hukum
111	05 Mei 2025	PNGMBALIAN PERJADIN TA. 2024 AN. ANDI BURHAN (01/STS/DPMPTSP-KTT/2025)	01/STS/DPMPTSP-KTT/2025	Rp 290.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu
112	05 Mei 2025	PMBYRN KLBHN JMLH HONOR SK TIM/PANITIA TA. 2024 AN. BUNTAR ARIF (T.1/700.1.2.1/HUK-KTT/V/2025)	T.1/700.1.2.1/HUK-KTT/V/2025	Rp 54.732.500,00	Bagian Hukum
113	06 Mei 2025	PNGMBLIAN LBH BYR HONOR AN. RAHMAWANI TA. 2024 (T.800.1.10.3/107/DKPS-KTT/V/2025)	T.800.1.10.3/107/DKPS-KTT/V/2025	Rp 4.462.500,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
114	06 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR HONOR KEG. KELMPOK UMUR TA. 2024 (001-031/STS/DISPAPORA-KTT/2025)	001-031/STS/DISPAPORA-KTT/2025	Rp 15.237.500,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
115	07 Mei 2025	PNGMBALIAN HONORARIUM TA. 2024 AN. NUR KHALISAH, CIPTA RIA, DEBORA N, CENDRA L (006/STS/INSP-KTT/V/2025)	006/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 20.212.500,00	Inspektorat Kabupaten
116	07 Mei 2025	PENGMBALIAN KLBHN BYR HONOR TIM TA. 2024 (001/STS/BKBP-KTT/V/2025)	001/STS/BKBP-KTT/V/2025	Rp 5.875.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
117	07 Mei 2025	PNGMBALIAN PEMB BLNJA HONOR TIM PLAKSANA KEG. SISTEM INFORMASI PELAYANAN MENJANGKAU TAHUN 2024 (02/STS/DPMPTSP-KTT/2025)	02/STS/DPMPTSP-KTT/2025	Rp 9.775.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu
118	07 Mei 2025	PENGMBALIAN KLBHAN BYR HONOR TA. 2024 AN. DEWI ASRIANY (005/STS/INSP-KTT/V/2025)	005/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 5.212.500,00	Inspektorat Kabupaten

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
119	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TA. 2024 AN. HENDRIK (009/STS/INSP-KTT/V/2025)	009/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 9.817.500,00	Inspektorat Kabupaten
120	08 Mei 2025	STORAN KLBHAN HONOR PPTK DAN PJBAT PENGADAAN BARJAS BULAN JANUARI S/D DESEMBER TA. 2024 (002/STS/SET-DPRD/V/2025)	002/STS/SET-DPRD/V/2025	Rp 10.260.000,00	Sekretariat DPRD
121	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TA. 2024 AN. SURIANTO (012/STS/INSP-KTT/V/2025)	012/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 4.987.500,00	Inspektorat Kabupaten
122	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TA. 2024 AN. IBRAHIM ALI (008/STS/INSP-KTT/V/2025)	008/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 13.387.500,00	Inspektorat Kabupaten
123	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TA. 2024 AN. MARTHIN (013/STS/INSP-KTT/V/2025)	013/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 2.375.000,00	Inspektorat Kabupaten
124	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. NOVI ARI P (117/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	117/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 1.540.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
125	08 Mei 2025	POTONGAN UTANG KASDA MEI 2025 PT. TASPEN (ENO/001-05) 700.000 Hasil Kerjasama Daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POT HUTANG KASDA PERIODE MEI 2025 PT. TASPEN	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
126	08 Mei 2025	PNGMBALIAN ATAS KLBHAN HONORARIUM TA. 2024 AN. DIDIK DARMADI (01/STS-BPBD/2025)	01/STS-BPBD/2025	Rp 5.737.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
127	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR HONOR PJBAT PNGADAAN ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. HADI CHANDRA (119/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	119/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 8.208.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
128	08 Mei 2025	PNGEMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN (177/STS/DLH/V/2025)	177/STS/DLH/V/2025	Rp 1.930.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
129	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. DENY TRIADI (112/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	112/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 490.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
130	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR HONOR TIM PLKSNA KEGIATAN (178/STS/DLH/V/2025)	178/STS/DLH/V/2025	Rp 9.137.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
131	08 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR HONOR BNDHRA PNRIMAAN AN. BENA GUSTRIANA TA. 2024 (032/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	032/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 8.550.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
132	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. YUNITA PESPARANI P (099/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	099/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 700.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
133	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. HADI ARYANTO (100/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	100/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 990.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
134	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. WIWI GUSPITA (104/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	104/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 170.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
135	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR HONOR ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. IDRIS HENDRO W (098/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	098/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 6.162.500,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
136	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TA. 2024 AN. NANA SUMARNA (011/STS/INSP-KTT/V/2025)	011/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 1.402.500,00	Inspektorat Kabupaten
137	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. INDRI NILAM S (110/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	110/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 170.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
138	08 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TA. 2024 AN. ADITYA (010/STS/INSP-KTT/V/2025)	010/STS/INSP-KTT/V/2025	Rp 21.037.500,00	Inspektorat Kabupaten
139	08 Mei 2025	PNGMBALIAN ATAS BYR HONOR TIM TA. 2024 NO SK: 100.3.3.2/086/K-I/2024 (001/STS/BKBP-KTT/2025)	001/STS/BKBP-KTT/2025	Rp 4.275.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
140	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. RICO ARDIANTO (116/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	116/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 1.290.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
141	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. FITRIAH JUNAENY (111/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	111/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 1.310.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
142	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. M. TRI MUSWIRA P (114/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	114/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 860.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
143	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. JOHARI (B.900.1.3.6/360/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/360/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 340.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
144	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TA. 2024 AN. M. SARIF, BUDI S, ARYANTO, JUMANSYAH, ALIAH, HERI K, RANDHI, ASMAN, MAULANA, VINSENSIUS, ANANTO, SETIAWAN (011/STS/DINKES/2025)	011/STS/DINKES/2025	Rp 19.780.000,00	Dinas Kesehatan
145	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. FRANSISCUS PASILA RATU (B.900.1.3.6/359/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/359/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 510.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
146	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. IRAFIK (101/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	101/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 968.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
147	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. ALI ALATAS (103/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	103/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
148	09 Mei 2025	PMBYRAN KKURNGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN TMUAN BPK TA. 2024 PKRJAAN PMBNGUNAN INTAKE DAN JARINGAN PIPA TRANSMISI AIR BAKU TANA LIA CV. AFKA Rp. 78.890.437,35 (121/STSDPUPRPKP/KTT/V/2025)	121/STSDPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 78.890.437,35	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
149	09 Mei 2025	PNGMBALIAN ATAS KLBHN BYR HONOR TA. 2024 AN. MOHD. IDHAMNUR (003/STS/SETDA/V/2025)	003/STS/SETDA/V/2025	Rp 50.000.000,00	Sekretariat Daerah
150	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. IDRIS HENDRO W (115/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	115/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 1.460.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
151	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. MAISYARAH (107/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	107/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 510.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
152	09 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. BAYU RATDITIA (0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 1.719.110,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
153	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. KAMARIAH (B.900.1.3.6/361/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/361/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 340.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
154	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. ALFIAN (B.900.1.3.6/364/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/364/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
155	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. RIYAWAN TRIWIYANTO (108/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	108/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 1.830.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
156	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR HONOR TA. 2024 AN. ISKANDAR, MUSTAFA, HARIYADI, SYAFRIANSYAH (002/STS/PERPUSTAKAAN-KTT/2025)	002/STS/PERPUSTAKAAN-KTT/2025	Rp 2.785.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
157	09 Mei 2025	PNGMBALIAN BYR BLNJA HONOR PADA DPUPRPKP NO. SK 188.4.55/170/K-II/2023, LHP BPK 2025 AN. ARMAN HAUHARI (03/STS/DPMPTSP-KTT/2025)	03/STS/DPMPTSP-KTT/2025	Rp 6.375.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu
158	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TA. 2024 AN. BERNINCE, BAMBANG EKO, ROYLI, ISKANDAR, ANWAR F (012/STS/DINKES/2025)	012/STS/DINKES/2025	Rp 850.000,00	Dinas Kesehatan
159	09 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. HASAN (0003/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0003/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 1.225.580,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
160	09 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. AGUS SUJANA (0002/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0002/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 479.912,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
161	09 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. M. KAMAL (0001/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0001/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 1.705.940,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
162	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. SAN MARINO (B.900.1.3.6/358/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/358/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 170.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
163	09 Mei 2025	PNGMBALIAN ATAS KLBHN BYR PERJADIN AN. NADIRA (004/STS/SETDA/V/2025)	004/STS/SETDA/V/2025	Rp 430.000,00	Sekretariat Daerah
164	09 Mei 2025	PMBYRAN KKURNGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN TMUAN BPK TA. 2024 PKRJAAN PNGENDALIAN BNJIR KWSAN PUSPEM CV. RIAN PERKASA Rp. 147.070.180, ANGS 1 (120/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	120/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
165	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. HERU KHOERUL HUDA (105/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	105/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 660.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
166	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. ASHARI W (102/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	102/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 810.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
167	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN YG DILAKSANAKAN DLM WAKTU BRSMAAN TA. 2024 AN. JAINAL ABIDIN (03/STS/BPKAD/2025)	03/STS/BPKAD/2025	Rp 530.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
168	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. MIDZUAN MIRANDI (113/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	113/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 960.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
169	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. BAHARUDDIN ALWI (B.900.1.3.6/368/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/368/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
170	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. HALIJAH (B.900.1.3.6/357/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/357/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 340.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
171	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. AJI ROHANIAWATI (B.900.1.3.6/369/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/369/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
172	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. SITTI HALWATIAH (B.900.1.3.6/356/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/356/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 1.582.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
173	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. IMMANUEL PATABANG (106/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	106/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 880.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
174	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR HONOR TA. 2024 AN. YUNGKUL, SAYU L, MUSTAFA, WIDODO, NORMA Y, YUNIAR M, RAHMAYANI, THOMAS H, MENI P, RINALDY AJI P (001/STS/PERPUSTAKAAN-KTT/2025)	001/STS/PERPUSTAKAAN-KTT/2025	Rp 2.725.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
175	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR HONOR TIM PLKSNA KEG. AN. ERWIN DWI MERIANA (B.900.1.3.6/355/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/355/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 2.375.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
176	09 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. RONIE SELAMAT (0004/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0004/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 591.980,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
177	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN BYR PERJADIN TUMPANG TNDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. PUTRA MAHLIGA SAKTI (118/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	118/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 1.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
178	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. MASHUDUL HAQ PRANATA (B.900.1.3.6/365/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/365/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
179	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. ANDRIAN RICO (B.900.1.3.6/363/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/363/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
180	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. ANDRIAN RICO (B.900.1.3.6/362/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/362/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
181	09 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. ABDUL DUMUN (B.900.1.3.6/367/BAPPLITBANG-KTT/V/2025)	B.900.1.3.6/367/BAPPLITBANG-KTT/V/2025	Rp 600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
182	14 Mei 2025	PNGMBLIAN ATAS KLBHN BYR PERJADIN TA. 2024 AN. SUPARMAN (025/STS/PEM/V/2025)	025/STS/PEM/V/2025	Rp 430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
183	14 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. JOHAN WAHYUDI (0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 3.595.042,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
184	14 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. MUH. RAMADHANY (0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 1.310.725,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
185	14 Mei 2025	PNGMBALIAN KLBHN HONOR PPTK AN. SITI LAILAN, PERAMLI (003/STS/BKBP-KTT/V/2025)	003/STS/BKBP-KTT/V/2025	Rp 9.180.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
186	14 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR SPPD TA. 2024 AN. LUSIANA DEWI ARTA (0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 5.599.398,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
187	14 Mei 2025	SETORAN KLBHN BYR PERJADIN TA. 2024 (003/STS/SET-DPRD/V/2025)	003/STS/SET-DPRD/V/2025	Rp 8.793.400,00	Sekretariat DPRD
188	14 Mei 2025	STS ATAS KLBHN BYR PERJADIN AN. ASROK SALAM, ZULIANA K (001/STS/DINSOSPMD/2025)	001/STS/DINSOSPMD/2025	Rp 860.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
189	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. ASARIATI TA. 2024 (034/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	034/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 600.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
190	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. KRISTHINA TA. 2024 (040/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	040/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 430.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
191	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. MEMET HADI SUMANTRI NUR TA. 2024 (037/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	037/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 430.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
192	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. FITRI SARTIKA TA. 2024 (039/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	039/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 430.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
193	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. BETTY PANJAITAN TA. 2024 (033/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	033/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 1.030.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
194	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. JUMADIANSYAH TA. 2024 (038/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	038/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 430.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
195	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. RACHMAWAN NUR TA. 2024 (036/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	036/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 830.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
196	15 Mei 2025	STORAN SISA UANG PNGMBALIAN KLBHAN BYR PERJADIN AN. KRISTIAN TA. 2024 (035/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	035/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 600.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
197	16 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR PERJADIN TA. 2024 KEG. MNDOKUMENTASIKAN BIMTEK PEMELIHARAAN PENYUSUNAN ARSIP DINAS DI LINGKUNGAN PEMKAB KTT DI TARAKAN AN. DHARMAWAN HERMANTARA (000/DISKOMINFO-KTT/V/2025)	000/DISKOMINFO-KTT/V/2025	Rp 701.200,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
198	16 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR PERJADIN TA. 2024 KEG. SOSIALISASI PMBRDYAAN INFORMASI KPD MASY DESA MELALUI KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT DI DS. SAMBUNGAN SELATAN AN. ABDUSYUKUR EKO WISUDANA (000/DISKOMINFO-KTT/V/2025)	000/DISKOMINFO-KTT/V/2025	Rp 490.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
199	16 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR PERJADIN TA. 2024 KEG. PNGAMBILAN VIDEO PMBANGUNAN DI KECAMATAN TANA LIA AN. ALI YUSNI (123/DISKOMINFO-KTT/V/2025)	123/DISKOMINFO-KTT/V/2025	Rp 170.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
200	16 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR PERJADIN TA. 2024 KEG.MONEV KTERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI KALTARA AN. ABDUSYUKUR EKO WISUDANA (125/DISKOMINFO-KTT/V/2025)	125/DISKOMINFO-KTT/V/2025	Rp 430.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
201	16 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKERJAAN BRDSRKAN TEMUAN BPK TA. 2024 ATAS PKRJAAN PMBNGUNAN GEREJA GKPI SEBIDAI CV. SUPER STAR 99 Rp. 10.833.819,49 (129/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	129/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 10.833.819,49	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
202	16 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR PERJADIN TA. 2024 KEG. MELIPT BUPATI MONEV PEMBANGUNAN TH. 2024 DI DS TENGKU DACING AN. RITA (000/DISKOMINFO-KTT/V/2025)	000/DISKOMINFO-KTT/V/2025	Rp 170.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
203	16 Mei 2025	PNGMBALIAN LBH BYR PERJADIN TA. 2024 KEG. PNDAMPINGAN IDENTIFKASI ANALISIS KBTUHAN KMPTENSI ASN (AKPK) KTT DI TANJUNG SELOR AN. RISNAWATI, AHMAD DODI, WAODE SARTIKA, IRMAYATI (000/DISKOMINFO-KTT/V/2025)	000/DISKOMINFO-KTT/V/2025	Rp 1.720.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
204	19 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN PMBANGUNAN MASJID NURUL ISLAM TIDENG PALE TIMUR TAHAP II Rp. 10.805.750 CV. JAYA BANGUN UPUN TAKA (130/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	130/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 10.805.750,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
205	19 Mei 2025	PNGEMBALIAN KLBHAN BYR TUNJANGAN ANAK DAN TUNJANGAN BERAS N. MURJANI (0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0005/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 3.993.796,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
206	19 Mei 2025	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 TRDPAT KKURANGAN VOLUME ATAS PKRJAAN PEMB SEMENISASI MNUJU PEMAKAMAN DS. KAPUAK Rp. 4.364.930,63 CV. LINSAYUNG MITRA ABADI (ANGS 1) (095/STS/DPUPRPKP/KTT/IV/2025)	095/STS/DPUPRPKP/KTT/IV/2025	Rp 4.364.930,63	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
207	19 Mei 2025	PNGEMBALIAN ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN SPPD TA. 2024 AN. CARLENA (900.1.8.1/001/STS/DTKT-KTT/V/2025)	001/STS/DTKT-KTT/V/2025	Rp 2.172.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
208	19 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN REHAB JALAN MENUJUTPU SPALA DALUNG Rp. 6.919.862,33 CV. DEAL (131/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	131/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 3.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
209	20 Mei 2025	PMBYRAN PRTAMA PNGMBALIAN KKURANGAN VOLUME ATAS PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RKB SDN 013 TIDENG PALE CV. KALTARA INTI PRATAMA TA. 2024 (028/STS/DIKNAS/2025)	028/STS/DIKNAS/2025	Rp 75.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
210	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JLN BAGINDA Rp. 47.128.996,70 CV. EMPAT PILAR (138/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	138/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 47.128.996,70	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
211	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JLN SIMPANG SEPUTUK - KAPUAK/RIAN STA 5+989 Rp. 281.457.508,94 CV. ARUNIKA AMERTA ADIKARA (ANGS 1) (134/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	134/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
212	20 Mei 2025	STS KELEBIHAN BYR TEMUAN PERJADIN TA. 2024 AN. EDY HARSONO, PITRIATI, WIWIK SURYANI, EVELINE MALINDA (001/STS/BKPSDM/2025)	001/STS/BKPSDM/2025	Rp 1.520.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
213	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN PMBANGUNAN GEDUNG B KANTOR BUPATI KTT (MTL) Rp. 512.397.041,14 PT. IHYAMULIK BENGKANG TURAN (ANGS 1) (144/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	144/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
214	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JLN DS. BEBATU - BANDAN BIKIS TAHAP II Rp. 636.857.757,14 CV. ALAM BIRU (ANGS 1) (133/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	133/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
215	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN PMBANGUNAN JLN KANTOR POLRES TANA TIDUNG TAHAP II Rp. 66.669.930,02 CV. SEBAWANG GRAHA (137/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	137/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 66.669.930,02	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
216	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JLN SIMPANG SEPUTUK - KAPUAK/RIAN STA 6+787 Rp. 379.791.682,56 CV. AGRAPANA HITA ABADI (ANGS 1) (135/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	135/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 36.434.814,42	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
217	20 Mei 2025	PMBYRAN PRTAMA PNGMBALIAN KKURANGAN VOLUME ATAS PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM PENDIDIKAN CV. KALTARA INTI PRATAMA TA. 2024 (029/STS/DIKNAS/2025)	029/STS/DIKNAS/2025	Rp 75.000.001,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
218	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JLN IR. SOEKARNO BUNDARAN SIMPANG AJP Rp. 217.939.200 CV. PERMATA DUNIA (ANGS 1) (140/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	140/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
219	20 Mei 2025	STS KELEBIHAN BYR TEMUAN SK HONORARIUM TA. 2024 (002/STS/BKPSDM/2025)	002/STS/BKPSDM/2025	Rp 46.300.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
220	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN PMBANGUNAN TROTOAR JLN PERINTIS Rp. 413.597.125,09 CV. ARYAGUNA PERKASA (ANGS 1) (132/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	132/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
221	20 Mei 2025	PNGEMBALIAN LBH BYR PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. HERSONSYAH (026/STS/DIKNAS/2025)	026/STS/DIKNAS/2025	Rp 30.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
222	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN PMBANGUNAN JLN DS. SEBAWANG Rp. 63.565.185,58 CV. AGRAPANA HITA ABADI (136/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	136/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 63.565.185,58	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
223	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JLN SAMBUNGAN - TENGKU DACING TAHAP III Rp. 164.157.150,37 CV. INDIEGO PERKASA (139/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	139/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
224	20 Mei 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN PMBANGUNAN GEDUNG A KANTOR BUPATI KTT Rp. 134.424.611,53 CV. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA (ANGS 1) (142/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	142/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 134.424.611,53	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
225	21 Mei 2025	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan berdasarkan Temuan Pemeriksaan BPK RI TA. 2024 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Bebatu - Bandan Bikis Tahap II Sejumlah Rp. 636.857.757,14 An. CV. Alam Biru (147/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	147/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
226	21 Mei 2025	Pembayaran temuan Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun 2024 An. CV. Bumi Karya (141/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	141/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 249.516.967,29	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
227	21 Mei 2025	Kekurangan Volume Pekerjaan Pengadaan Tanaman Lingkungan RS Akhmad Berahim TA. 2024 (014/STS/DINKES/2025)	014/STS/DINKES/2025	Rp 100.000.000,00	Dinas Kesehatan
228	21 Mei 2025	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan berdasarkan Temuan Pemeriksaan BPK RI TA. 2024 atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Seputuk-Kapuak /Rian STA 6+787 Sejumlah Rp. 379.791.628,56 Ke 2 An. CV. Agrapana Hita Abadi (149/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	149/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
229	21 Mei 2025	Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Pembangaunan Pustu Tanah Merah (Trans Tana Merah) Berdasarkan LHP BPK TA. 2024 (013/STS/DINKES/2025)	013/STS/DINKES/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
230	21 Mei 2025	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan berdasarkan Temuan Pemeriksaan BPK RI TA. 2024 atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Seputuk-Kapuak /Rian STA 5+989 Sejumlah Rp. 281.457.508,94 Ke 2 An. CV. Arunika Amerta Adikarya (148/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	148/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
231	22 Mei 2025	Pengembalian Lebih Bayar SPPD Tahun Anggaran 2024 An. Noorhayati (0009/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0009/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 6.563.833,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
232	22 Mei 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Bappeda Litbang Kab. Tana Tidung TA. 2024 An. Saharin Sebesar Rp. 61.582.500 Ke 1 (391/BAPPLOITBANG-KTT/2025)	391/BAPPLOITBANG-KTT/2025	Rp 17.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
233	22 Mei 2025	Setoran Sisa Uang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras An. Harun Mustafa Disparpora TA. 2024 (041/STS/DISPARPORA-KTT/2025)	041/STS/DISPARPORA-KTT/2025	Rp 1.827.028,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
234	22 Mei 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan atas Gaji ASN TA. 2024 Disperindagkop An. Supiyah (0002/STS-DPPKU-KTT/V/2025)	0002/STS-DPPKU-KTT/V/2025	Rp 2.646.196,00	Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi Dan UKM
235	22 Mei 2025	Pengembalian Lebih Bayar SPPD Tahun Anggaran 2024 An. Wahaf (0012/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025)	0012/STS/DISDAMKARMAT-KTT/2025	Rp 2.233.525,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
236	23 Mei 2025	Pegembalian Lebih Bayar SPPD Tahun Anggaran 2024 An. Budiaji (0012/STS/DISDAMKARMAT/KTT/2025)	0012/STS/DISDAMKARMAT/KTT/2025	Rp 11.721.547,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Keselamatan
237	26 Mei 2025	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Berdasarkan Temuan BPK RI TA. 2024 atas Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Gg. Yaki Unak Tahap II Desa Bandan Bikis Sejumlah Rp. 15.903.853,60 Ke 1 An. CV. Dian Putra Perdana (123/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	123/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
238	27 Mei 2025	Pengembalian atas Pembayaran Honorarium Tim Pemantau Kesbangpol pada Pelaksanaan Kegiatan Hitung Cepat dan Fasilitasi Penelitian Berkas Bankeu pada Parpol Tahun 2024 (005STS/BKBP-KTT/2025)	005STS/BKBP-KTT/2025	Rp 1.700.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
239	27 Mei 2025	Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran D/R Koordinasi Titik lOkasi Algaka di Pesisir Kec. Tana Lia (006/STS/BKBP-KTT/2025)	006/STS/BKBP-KTT/2025	Rp 170.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
240	27 Mei 2025	Pengembalian atas Pembayaran Honorarium Tim Pengkajian Kelayakan dan Verifikasi Pemberian bantuan Sosial dan Hibah (Kesbangpol) Tahun 2024 (004/STS/BKBP-KTT/2025)	004/STS/BKBP-KTT/2025	Rp 4.475.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
241	28 Mei 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran SPPD Tahun Anggaran 2024 An. Tri Agus Damayanto (0002/STS/DISHUB-KTT/2025)	0002/STS/DISHUB-KTT/2025	Rp 1.131.200,00	Dinas Perhubungan
242	28 Mei 2025	Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pustu Tanah Merah Berdasarkan LHP BPK RI TA. 2024 Sebesar Rp. 129.275.560,- Pembayaran pertama Rp. 50.000.000 dan Pelunasan Rp. 79.275.560 (015/STS/DINKES/2025)	015/STS/DINKES/2025	Rp 79.275.560,00	Dinas Kesehatan
243	02 Juni 2025	Pembayaran kelebihan Tunjangan atas Gaji ASN TA. 2024 An. Jahatun (033/STS/DIKNAS/2025)	033/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.044.612,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
244	04 Juni 2025	Pengembalian Kelabihan Pembayaran Honorarium TIM BOP PAUD Tahun 2024 atas Temuan Pemeriksaan BPK RI An. Ali Sadikin, S.Pd (037/STS/DIKNAS/2025)	037/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
245	04 Juni 2025	Pembayaran Kelebihan Tunjangan Atas Gaji ASN TA. 2024 An. Martha, S.Pd (034/STS/DIKNAS/2025)	034/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.122.924,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
246	04 Juni 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalnaan Dinas Pembayaran Hortel atas Temuan BPK RI Tahun 2024 (Pembayaran Pertama) An. Marta Lahang (036/STS/DIKNAS/2025)	036/STS/DIKNAS/2025	Rp 505.200,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
247	05 Juni 2025	Pembayaran Kelebihan Tunjangan Gaji ASN TA. 2024 An. Karel S.Pd (038/STS/DIKNAS/2025)	038/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.920.704,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
248	10 Juni 2025	Potongan Utang Kasda Bulan Juni 2025 PT. TASPEN (eno/007-05) 4.721.400 Hasil Kerjasama Daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POTONGAN HUTANG KASDA BULAN JUNI 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
249	10 Juni 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Anak Tahun 2024 An. Dahriani, SE (023/STS/DINKES/2025)	023/STS/DINKES/2025	Rp 1.899.606,00	Dinas Kesehatan
250	11 Juni 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Perluasan Jaringan dan Penambahan daya listrik RSUD Akhmad TA. 2023 Sebesar Rp. 72.692.550 yang dibayarkan Ke 1 sebesar Rp. 11.000.000 sisa Rp. 61.692.550 (024/STS/DINKES/2025)	024/STS/DINKES/2025	Rp 11.000.000,00	Dinas Kesehatan
251	12 Juni 2025	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Perluasan Jaringan dan Penambahan daya listrik RSUD Akhmad TA. 2023 yang Ke 2 (024a/STS/DINKES/2025)	024a/STS/DINKES/2025	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
252	16 Juni 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM BOP PAUD TAHUN 2024 ATAS TEMUAN BPK KALTARA TA. 2024 AN. SITI KHOTIJAH, S.SOS (042/STS/DIKNAS/2025)	042/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.570.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
253	16 Juni 2025	PEMBAYARAN KELEBIHAN TUNJANGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 AN. NANIK WIHARTATI (039/STS/DIKNAS/2025)	039/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.590.092,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
254	16 Juni 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJADIN KELEBIHAN PEMBAYARAN HOTEL ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. SITI KHOTIJAH, S.SOS (043/STS/DIKNAS/2025)	043/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.774.200,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
255	16 Juni 2025	PEMBAYARAN KELEBIHAN TUNJANGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 AN. ABDUL MANAF (040/STS/DIKNAS/2025)	040/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.867.800,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
256	16 Juni 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK KALTARA TA. 2024 AN. SITI KHOTIJAH, S.SOS (042/STS/DIKNAS/2025)	042/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.630.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
257	16 Juni 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJADIN KELEBIHAN PEMBAYARAN HOTEL ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. SUMIYATI (044/STS/DIKNAS/2025)	044/STS/DIKNAS/2025	Rp 655.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
258	16 Juni 2025	PENGEMBALIAN UANG HONORARIUM ANGGOTA TIM TAPD PERUBAHAN APBD TA. 2015 BERDASARKAN LHP INSPEKTORAT KTT TAHUN 2016 NO. 700/09/LHP-REGULER/IX/2016 TGL 05 SEPT 2016 (001/VI/2025)	001/VI/2025	Rp 4.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
259	17 Juni 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM BUD DAN KUASA BUD NO. 72.B/LHP/XIX.TJS/V/2025 TGL 24 MEI 2025 AN. HJ. EVIHAR Rp. 3.000.000, YUDI RAHMATSYAH Rp. 2.000.000 (009/BPKAD-KTT/2025)	009/BPKAD-KTT/2025	Rp 5.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
260	17 Juni 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN (UH) PERJADIN TGL 04 S/D 8 NOV 2024 AN. INDRA LESMANA (010/BPKAD-KTT/2025)	010/BPKAD-KTT/2025	Rp 530.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
261	17 Juni 2025	PEMBAYARAN KELEBIHAN TUNJANGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 AN. HASKIAH (035/STS/DIKNAS/2025)	035/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.913.388,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
262	19 Juni 2025	BERDASARKAN LHP BPK TERDAPAT TEMUAN KEKURANGAN VOLUME ATAS PAKET PEKERJAAN PEMB DRAINASE LING PERUM KHUSUS DS LIMBU SEDULUN Rp. 18.302.166,36 CV. KALTARA PRIMA ANGS. KE 2 (150/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025)	150/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025	Rp 1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
263	19 Juni 2025	PNGEMBALIAN KLBHAN PMBYRN BLNJA HONOR PEJABAT PNGADAAN ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. EMILIA, S.T Rp. 6.270.000 ANGS KE 1 (152/STS/DPUPRPKP/VI/2025)	152/STS/DPUPRPKP/VI/2025	Rp 4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
264	19 Juni 2025	PNGEMBALIAN KLBHAN PMBYRN BLNJA HONOR PEJABAT PNGADAAN ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. AGUS GATOT WAHYUDI Rp. 6.270.000 ANGS KE 1 (152/STS/DPUPRPKP/VI/2025)	152/STS/DPUPRPKP/VI/2025	Rp 4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
265	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. ASRAWANDI (060/STS/DIKNAS/2025)	060/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.586.500,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
266	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. INDERIYANI (055/STS/DIKNAS/2025)	055/STS/DIKNAS/2025	Rp 455.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
267	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. JUMADILRIANSYAH (052/STS/DIKNAS/2025)	052/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.060.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
268	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. FERRYARDIAFRIANI (058/STS/DIKNAS/2025)	058/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.721.700,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
269	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. AHMATSYAH (057/STS/DIKNAS/2025)	057/STS/DIKNAS/2025	Rp 839.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
270	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. DWI JUMIANTI (056/STS/DIKNAS/2025)	056/STS/DIKNAS/2025	Rp 976.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
271	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN TUMPANG TINDIH DAN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. HASMIATI (051/STS/DIKNAS/2025)	051/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.703.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
272	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. SELLY DAYANI (054/STS/DIKNAS/2025)	054/STS/DIKNAS/2025	Rp 455.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
273	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHN BYR HONOR TIM MENEJEMEN BOP TAHUN 2024 ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. SELLY DAYANI (053/STS/DIKNAS/2025)	053/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
274	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHN BYR HONOR TIM MENEJEMEN BOP TAHUN 2024 ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. HERSONSYAH (048/STS/DIKNAS/2025)	048/STS/DIKNAS/2025	Rp 12.750.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
275	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHN BYR HONOR TIM BOP PAUD ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. MURNI (050/STS/DIKNAS/2025)	050/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
276	20 Juni 2025	KEKURANGAN VOLUME ATAS SEPULUH PAKET PKERJAAN PADA DIKNAS ATAS KONSTRUKSI PEMBANGUN BALAI ADAT KEC. SESAYAP HILIR (MTL) CV. KALTARA INTI PRATAMA (047/STS/DIKNAS/2025)	047/STS/DIKNAS/2025	Rp 40.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
277	20 Juni 2025	KEKURANGAN VOLUME ATAS TIGA PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI ATAS KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RKB SDN 013 TANA TIDUNG (TIDENG PALE) CV. KALTARA INTI PRATAMA (046/STS/DIKNAS/2025)	046/STS/DIKNAS/2025	Rp 30.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
278	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHN BYR HONOR TIM MENEJEMEN BOP TAHUN 2024 ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. INDAH FAJAR SARI (059/STS/DIKNAS/2025)	059/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
279	20 Juni 2025	KEKURANGAN VOLUME ATAS TIGA PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI ATAS PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM PENDIDIKAN CV. KALTARA INTI PRATAMA (045/STS/DIKNAS/2025)	045/STS/DIKNAS/2025	Rp 30.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
280	20 Juni 2025	PENGEMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN TUMPANG TINDIH DAN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. MURNI (049/STS/DIKNAS/2025)	049/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.450.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
281	25 Juni 2025	PMBYRAN KKURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JLN SIMPANG SEPUTUK - KAPUAK/RIAN STA 6+787 Rp. 379.791.682,56 CV. AGRAPANA HITA ABADI (ANGS 3) (156/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025)	156/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
282	25 Juni 2025	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan berdasarkan Temuan Pemeriksaan BPK RI TA. 2024 atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Seputuk-Kapuak /Rian STA 5+989 Sejumlah Rp. 281.457.508,94 Ke 3 An. CV. Arunika Amerta Adikarya (155/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025)	155/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
283	25 Juni 2025	SETORAN KELEBIHAN PMBYRN TUJNANGAN OPERASIONAL (BOP) UNSUR PIMPINAN TA. 2024 AN. HANAFIAH (004/STS/SET-DPRD/VI/2025)	004/STS/SET-DPRD/VI/2025	Rp 7.560.000,00	Sekretariat DPRD
284	25 Juni 2025	PNGEMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TIM KEGIATAN BAPPEDA LITBANG KTT TA. 2024 AN. SAHARIN K Rp. 61.582.500,00 SETORAN LUNAS (B.900.1.3.6/482/BAPPLITBANG-KTT/VI/2025)	B.900.1.3.6/482/BAPPLITBANG-KTT/VI/2025	Rp 44.332.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
285	25 Juni 2025	PNGEMBALIAN KLBHN PMBYRN PEMB LAHAN PARKIR KANTOR BAPPEDA LITBANG KTT TA. 2024 BERDASAR LHP BPK 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 AN. CV. BORNEO ENGINEERING CONSULTANT Rp. 3.500.000,00 LUNAS (B.900.1.3.6/477/BAPPLITBANG-KTT/VI/2025)	B.900.1.3.6/477/BAPPLITBANG-KTT/VI/2025	Rp 3.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
286	25 Juni 2025	PNGEMBALIAN KLBHN PMBYRN REHAB GEDUNG KANTOR BAPPEDA LITBANG KTT TA. 2024 BERDASAR LHP BPK 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TGL 16 DES 2024 SERTA INSTRUKSI KEPALA BAPPEDA NO 463 AN. CV. FIFA MANDIRI Rp. 13.941.511,78 LUNAS (B.900.1.3.6/476/BAPPLITBANG-KTT/VI/2025)	B.900.1.3.6/476/BAPPLITBANG-KTT/VI/2025	Rp 13.941.511,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
287	25 Juni 2025	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan berdasarkan Temuan Pemeriksaan BPK RI TA. 2024 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Bebatu - Bandan Bikis Tahap II Sejumlah Rp. 636.857.757,14 An. CV. Alam Biru ANGS KE 3 (154/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025)	154/STS/DPUPRPKP/KTT/VI/2025	Rp 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
288	25 Juni 2025	PNGEMBALIAN KLBHN PMBYRN PNGAWASAN PEMB REHAB GEDUNG KANTOR BAPPEDA LITBANG KTT TA. 2024 BERDASAR LHP BPK 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 AN. CV. BORNEO ENGINEERING CONSULTANT Rp. 3.500.000,00 LUNAS (B.900.1.3.6/478/BAPPLITBANG-KTT/VI/2025)	B.900.1.3.6/478/BAPPLITBANG-KTT/VI/202	Rp 3.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
289	03 Juli 2025	BRDSARKAN LHP BPK RI NO. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TRDPAT KLBHAN PMBYRAN ATAS PKRJAAN REKONSTRUKSI JLN SMPNG SEPUTUK-KAPUAK/RIAN Sejumlah Rp. 248.671.768,74 An. CV. RIAN PERKASA ANGS KE 2 (160/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025)	160/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
290	03 Juli 2025	BRDSARKAN LHP BPK RI NO. 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TRDPAT KLBHAN PMBYRAN ATAS PKRJAAN PMBGUNAN JLN LINGKAR PUSPEM Sejumlah Rp. 229.715.619,11 An. CV. RIAN PERKASA ANGS KE 2 (161/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025)	161/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
291	03 Juli 2025	PMBYRAN KEKEURANGAN VOLUME PKRJAAN BERDASARKAN TEMUAN BPK TA. 2024 ATAS PKRJAAN PMBNGUNANGEDUNG B KANTOR BUPATI KTT (MTL) Sejumlah Rp. 512.397.041,14 An. CV. IYHAMULIK BENGKANG TURAN ANGS KE 2 (159/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025)	159/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025	Rp 250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
292	08 Juli 2025	Potongan Utang Kasda Bulan JULI 2025 PT. TASPEN (eno/018-06) 5.019.520 Hasil Kerjasama Daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso dan 4.194.520 an. Syamsudin	POTONGAN HUTANG KASDA BULAN JULI 2025	Rp 4.694.520,00	Satuan Polisi Pamong Praja
293	09 Juli 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PMBYRN BLNJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN ATAS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. AGUS GATOT WAHYUDI SEJUMLAH Rp. 6.270.000, ANGS KE 2 (163/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025)	163/STS/DPUPRPKP/KTT/VII/2025	Rp 1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
294	25 Juli 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM MANAJEMEN BOS TAHUN 2024 ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. LUKMANUL HAKIM (061/STS/DIKNAS/2025)	061/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
295	25 Juli 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM MANAJEMEN BOS TAHUN 2024 ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. ERNI HERLIN (062/STS/DIKNAS/2025)	062/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
296	25 Juli 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM MANAJEMEN BOS TAHUN 2024 ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. AMINAH BINTI LAHADING (063/STS/DIKNAS/2025)	063/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
297	30 Juli 2025	PENGEMBALIAN KLBHN PMBYRN BIAYA PERJADIN TUMPANG TINDIH ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN M. NOOR HUDA (109/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025)	109/STS/DPUPRPKP/KTT/V/2025	Rp 1.310.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
298	31 Juli 2025	PENGEMBALIAN KLBHN PMBYRN HONORARIUM BUD DAN KBUD 72.B/LHP/XIX.TJS/V/2025 TGL 24 MEI 2025 AN. EVIHAR (011/BPKAD-KTT/2025)	011/BPKAD-KTT/2025	Rp 16.201.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
299	04 Agustus 2025	LHP BPK RI 2024 TRDPT KKURNGAN VOLUME ATAS PKRJAAN PMBNGUNAN DRAINASE LNGKUNGN PERUM KHUSUS DS SEDULUN ANGS KE 1 CV. KARYA MANDIRI PRATAMA Rp. 2.908.346,00 (096/STS/DPUPRPKP/KTT/IV/2025)	096/STS/DPUPRPKP/KTT/IV/2025	Rp 500.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
300	05 Agustus 2025	PNGEMBALIAN HONOR TIM PEMANTAU KESBANGPOL TA. 2024 AN. BUPATI, WAKIL BUPATI, PJ SEKDA (067/STS/BKBP-KTT/2025)	067/STS/BKBP-KTT/2025	Rp 3.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
301	06 Agustus 2025	PNGEMBALIAN TUNJANGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 AN. RIPA'I (0003/STS/DPPKU-KTT/VIII/2025)	0003/STS/DPPKU-KTT/VIII/2025	Rp 1.156.560,00	Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi Dan UKM
302	08 Agustus 2025	PNGMBALIAN PMBYRAN BLNJA HONORARIUM PJBT PNGADAAN ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. AGUS GATOT W Rp. 6.270.000 ANGS KE 3 (168/STS/DPUPRPKP/KTT/VIII/2025)	168/STS/DPUPRPKP/KTT/VIII/2025	Rp 1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
303	08 Agustus 2025	Potongan Utang Kasda Bulan AGUSTUS 2025 PT. TASPEN (AMEL/1009) 825.000 Hasil Kerjasama Daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POTONGAN HUTANG KASDA BULAN AGUSTUS 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
304	27 Agustus 2025	BELANJA CETAK BUKU KEG PNYSUNAN RNCNGAN PERBUP TENTANG PNJBRAN PRBHAN APBD BERDSAR LHP INSPEKTORAT KTT 2016 (002/VIII/2025)	002/VIII/2025	Rp 3.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
305	08-Sep-25	Potongan Utang Kasda Bulan SEPTEMBER 2025 PT. TASPEN (ERA/14002) 6.407.000 Hasil Kerjasama daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POTONG HTG KASDA SEPTEMBER 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
306	12-Sep-25	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 TRDPT KLBHAN BYR ATAS PKRJAAN PKRJAAN PMTANGAN LHAN KWSN KNTOR BUPATI KTT Rp. 762.554.717,18 LUNAS PT. BERDIKARI INTI SEMESTA (170/STS/DPUPRPKP/IX/2025)	170/STS/DPUPRPKP/IX/2025	Rp 762.554.717,18	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
307	12-Sep-25	LHP BPK RI 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 Tgl. 16 Des 2024 TRDPT KLBHAN BYR ATAS PKRJAAN PKRJAAN PMTANGAN LHAN KWSN KNTOR DPRD KTT Rp. 1.094.493.402,98 LUNAS PT. BERDIKARI INTI SEMESTA (170/STS/DPUPRPKP/IX/2025)	170/STS/DPUPRPKP/IX/2025	Rp 1.094.493.402,98	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
308	17-Sep-25	BRDSR LHP BPK 71/LHP/XIX.TJS/XII/2024 TGL 16 DES 24 PMBYRN KKRNGAN VOL PKRJAAN PMBNGNAN JLN DS BERBATU-BDNBIKIS THP II Rp. 636.857.757,14 CV. ALAM BIRU ANGS 4 (175/STS/DPUPRPKP/KTT/IX/2025)	175/STS/DPUPRPKP/KTT/IX/2025	Rp 136.857.757,14	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
309	25-Sep-25	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN ATAS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ANTON GATOT WAHYUDI Rp. 6.270.000 ANGS KE 4 (LUNAS) (176/STS/DPUPRPKP/KTT/IX/2025)	176/STS/DPUPRPKP/KTT/IX/2025	Rp 270.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
310	26-Sep-25	BELANJA CETAK KEG. PENYUSUNAN RAPERBUP LHP INSPEKTORAT KTT TAHUN 2016 AN. IRWANSYAH KADIR (003/IX/2025)	003/IX/2025	Rp 3.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
311	08 Oktober 2025	PENGEMBALIAN KEKURANNGAN VOLUME TIGA PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI ATAS KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RKB SDN 013 TANA TIDUNG (TIDENG PALE) TA. 2024 CV. KALTARA INTI PRATAMA (068/STS/DIKNAS/2025)	068/STS/DIKNAS/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
312	08 Oktober 2025	KEKURANGAN VOLUME ATAS SEPULUH PAKET PEKERJAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ATAS KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BALAI ADAT KECAMATAN SESAYAP HILIR (MTL) TA. 2024 CV. KALTARA INTI PRATAMA (069/STS/DIKNAS/2025)	069/STS/DIKNAS/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
313	08 Oktober 2025	PENGEMBALIAN KEKURANGAN VOLUME ATAS TIGA PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM PENDIDIKAN TA. 2024 CV. KALTARA INTI PRATAMA (067/STS/DIKNAS/2025)	067/STS/DIKNAS/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
314	09 Oktober 2025	LHP BPK 16 DES 2024 TRDPAT KLBHAN PMBYRAN ATAS PRSONEL AHLI K3 PD PKRJAAN PNGWASAN PMBNGNAN DRAINASE LNGKNGAN PRMHAN KHUSUS DS SEDULUN Rp. 6.818.175,00 CV. BORNEO ENGINEERING CONSULTANT, LUNAS (177/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025)	177/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025	Rp 6.818.175,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
315	15 Oktober 2025	PMBYRAN KKRNGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN LHP BPK RI KALTARA TA. 2024 ATAS PKRJAAN RKNSTRUKSI JLN SMBUNGAN - TNGKU DACING THP III Rp. 164.157.150,37 CV. INDIEGO PERKASA, ANGS KE2 LUNAS (178/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025)	178/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025	Rp 114.157.150,37	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
316	16 Oktober 2025	PMBYRAN KKRNGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN LHP BPK RI KALTARA TA. 2024 ATAS PKRJAAN PMBGUNAN PNGNDLIAN BANJIR KWSAN PUSPEM Rp. 147.070.180,00 CV. RIAN PERKASA, ANGS KE2 (182/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025)	182/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
317	20 Oktober 2025	PMBYRN KKRGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PKRJAAN PMBNGUNAN JLN DS BEBATU-BNDN BKIS THP II Rp. 636.857.757,14 CV.ALAM BIRU, ANGS 5 LUNAS (179/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025)	179/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025	Rp 250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
318	20 Oktober 2025	PMBYRN KKRGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PKRJAAN RKNTRUKSI JLN SMPG SEPUTUK-KAPUAK/RIAN STA 6+787 Rp. 379.971.628,56 CV. AGRAPANA HITA ABADI ANGS 4 LUNAS (181/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025)	181/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025	Rp 243.356.814,14	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
319	20 Oktober 2025	LHP BPK 16 DES 2024 TRDPAT KLBHAN PMBYRAN ATAS PRSONELSITE ENGINEER PD PKRJAAN PNGWASAN PMBNGNAN INLET DAN OUTLET BBI DAN PERSAWAHAN DS LIMBU SEDULUN Rp. 3.896.000,00 PT. MITRA UTAMA KONSULTAN ENGINEER, LUNAS (183/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025)	183/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025	Rp 3.896.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
320	20 Oktober 2025	PMBYRN KKRGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PKRJAAN RKNTRUKSI JLN SMPG SEPUTUK-KAPUAK/RIAN STA 5+989 Rp. 281.457.508,94 CV. ARUNIKA AMERTA ADIKARA ANGS 4 LUNAS (180/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025)	180/STS/DPUPRPKP/KTT/X/2025	Rp 131.457.508,94	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
321	30 Oktober 2025	KEKURANGAN VOLUME PKERJAAN ATAS PMBANGUNAN PUSTU/POSYANDU PRIMA DS RIAN RAYO CV. FIFA MANDIRI Rp. 47.030.308,44 LUNAS (037/STS/DINKES/2025)	037/STS/DINKES/2025	Rp 47.030.308,44	Dinas Kesehatan
322	31 Oktober 2025	KEKURANGAN VOL PEMBANGUNAN BALAI ADAT KEC. SESAYAP HILIR CV. KALTARA INTI PRATAMA (ALYA/025) - STS SENILAI Rp253.243.000,00	071/STS/DIKNAS/2025	Rp 253.242.993,76	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
323	03-Nov-25	KLBHN PMBYRN JASA KONSULTASI PNGAWASAN ATAS PRSONEL PNGWSN DI LPNGN YG MLKUKAN PNGWSN TUMPANG TINDIH PD PKRJAAN PNGWSN PMBNGUNAN UNIT TRNSFUSI DARAH RS (DAK) TA. 2023 CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING (038/STS/DINKES/2025)	038/STS/DINKES/2025	Rp 5.844.150,00	Dinas Kesehatan
324	03-Nov-25	PMBYRN KKRANGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN TEMUAN PMRIKSAAN BPK RI TA. 2024 ATAS PKRJAAN PMBNGUNAN SEMENISASI GG YAKI UNAK TAHAP II DS. BANDAN BIKIS Rp. 15.903.853,60 CV. DIAN PUTRA PERDANA, ANGS KE 2 LUNAS (186/STS/DPUPRPKP/KTT/XI/2025)	186/STS/DPUPRPKP/KTT/XI/2025	Rp 13.903.853,60	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
325	03-Nov-25	KLBHN PMBYRN JASA KONSULTASI PNGAWASAN ATAS PRSONEL PNGWSN DI LPNGN YG MLKUKAN PNGWSN TUMPANG TINDIH PD PKRJAAN PNGWSN PMBNGUNAN KORIDOR LAB. - PANTRY, TMPT PARKIR AMBULAN DAN REHABILITASI AKSES IGD RS TA. 2023 CV. MENARA (039/STS/DINKES/2025)	039/STS/DINKES/2025	Rp 19.480.500,00	Dinas Kesehatan
326	04-Nov-25	PNGMBALIAN KLBHN PMBYRN HNRARIUM TIM KEG. BAPPEDA LITBANG KTT TA. 2024 AN. ALFIAN (LUNAS) (8.900.1.3.6/740/ BAPPLITBANG-KTT/XI/2025)	8.900.1.3.6/740/ BAPPLITBANG-KTT/XI/2025	Rp 8.550.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
327	04-Nov-25	PNGMBALIAN KLBHN PMBYRN SPPD TA. 2024 AN. DARMANSYAH (0003/STS/DISHUB-KTT/2025)	0003/STS/DISHUB-KTT/2025	Rp 170.000,00	Dinas Perhubungan
328	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH Rp. 340.000 DAN KLKBHN BYR HOTEL Rp. 1.910.404 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. MUSAKIR (089/STS/DIKNAS/2025)	089/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.250.404,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
329	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. BUSTAMAN (082/STS/DIKNAS/2025)	082/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.512.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
330	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. SOFIANSYAH (087/STS/DIKNAS/2025)	087/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.282.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
331	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOP 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. INDERIYANTI (074/STS/DIKNAS/2025)	074/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
332	05-Nov-25	BRDSRKN LHP BPK RI KALTARA TRDPT TMUAN KKRNGAN VOL ATS PKT PKRJAAN PMBNGNAN DRAINASE LINKGN PERUM KHUSUS DS LIMBU SEDULUN Rp. 18.302.166,36 CV. KALTARA PRIMA, ANGS 3 (187/STS/DPUPRPKP//KTT/XI/2025)	187/STS/DPUPRPKP//KTT/XI/2025	Rp 2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
333	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. INDAH FAJAR SARI (086/STS/DIKNAS/2025)	086/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.312.100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
334	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOP 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ELVAN HAR (103/STS/DIKNAS/2025)	103/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
335	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. PARAMITA ADHINUL P (091/STS/DIKNAS/2025)	091/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.991.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
336	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. MARTA LAHANG (092/STS/DIKNAS/2025)	092/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.588.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
337	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ELVAN HAR (098/STS/DIKNAS/2025)	098/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.800.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
338	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOS 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. HASMIATI (079/STS/DIKNAS/2025)	079/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
339	05-Nov-25	PNGMBLIAN ATS KLBHN BYR PERJADIN TA. 2024 AN. HADI PURWANTO (02/STS-BPBD/2025)	02/STS-BPBD/2025	Rp 170.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
340	05-Nov-25	PNGMBLIAN ATS KLBHN BYR PERJADIN TA. 2024 AN. SYAHRUL YAKUB (02/STS-BPBD/2025)	02/STS-BPBD/2025	Rp 430.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
341	05-Nov-25	PNGMBLIAN ATS KLBHN BYR PERJADIN TA. 2024 AN. ADI IRAWAN (02/STS-BPBD/2025)	02/STS-BPBD/2025	Rp 430.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
342	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ASRAWANDI (076/STS/DIKNAS/2025) - Kelebihan 430.000 (STS SENILAI 6.593.800)	076/STS/DIKNAS/2025	Rp 6.163.800,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
343	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. JUMADILRIANSYAH (075/STS/DIKNAS/2025)	075/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.940.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
344	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH Rp. 430.000 DAN KLKBHN BYR HOTEL Rp. 1.005.000 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. IRWANSYAH (099/STS/DIKNAS/2025)	099/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.435.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
345	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOS 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. BADARIAH (094/STS/DIKNAS/2025)	094/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
346	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOS 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ZULFIANSYAH (093/STS/DIKNAS/2025)	093/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.550.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
347	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOP 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. DWI JUMIANTI (073/STS/DIKNAS/2025)	073/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
348	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH Rp. 170.000 DAN KLKBHN BYR HOTEL Rp. 1.008.000 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. JAMHARI (083/STS/DIKNAS/2025)	083/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.178.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
349	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOP 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. IRWANSYAH (085/STS/DIKNAS/2025)	085/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
350	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOS 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. PARAMITA ADHINUL P (090/STS/DIKNAS/2025)	090/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
351	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOP 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. NANANG ANGGORO RAHMADI (095/STS/DIKNAS/2025)	095/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
352	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM BOP PAUD 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. MUSAKIR (088/STS/DIKNAS/2025)	088/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
353	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ALI SADIKIN (080/STS/DIKNAS/2025)	080/STS/DIKNAS/2025	Rp 770.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
354	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH Rp. 500.000 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. NANANG MASRANIE (081/STS/DIKNAS/2025)	081/STS/DIKNAS/2025	Rp 500.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
355	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH Rp. 170.000 DAN KLKBHN BYR HOTEL Rp. 626.400 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ZULKARNAEN (072/STS/DIKNAS/2025)	072/STS/DIKNAS/2025	Rp 796.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
356	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH Rp. 430.000 DAN KLKBHN BYR HOTEL Rp. 983.400 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. MASLI (100/STS/DIKNAS/2025)	100/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.413.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
357	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOS 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. MARTHA (077/STS/DIKNAS/2025)	077/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.550.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
358	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. FERI ARDIAFRIANI (097/STS/DIKNAS/2025)	097/STS/DIKNAS/2025	Rp 5.380.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
359	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOP 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. HEDI SUSANTO (078/STS/DIKNAS/2025)	078/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
360	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. WIRYAWAN CHANDRA (101/STS/DIKNAS/2025)	101/STS/DIKNAS/2025	Rp 515.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
361	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. MARTA LAHANG (084/STS/DIKNAS/2025)	084/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.190.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
362	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. ELVAN HAR (102/STS/DIKNAS/2025)	102/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.522.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
363	05-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN TMPNG TNDH Rp. 1.790.000 DAN KLKBHN BYR HOTEL Rp. 1.217.500 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. NANANG ANGGORO RAHMADI (096/STS/DIKNAS/2025)	096/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.007.500,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
364	06-Nov-25	PMBYRN KKRNGAN VOL ATS PKT PKRJAAN PMBNGUNAN JLN LING GG. UMMI DS. TIDENG PALE CV. KARYA MANDIRI PRATAMA BRDSRKAN LHP BPK RI, LUNAS (188/STS/DPUPRPKP/KTT/XI/2025)	188/STS/DPUPRPKP/KTT/XI/2025	Rp 899.980,39	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
365	06-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. IRDIANSYAH (105/STS/DIKNAS/2025)	105/STS/DIKNAS/2025	Rp 587.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
366	06-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN PERJADIN KLKBHN BYR HOTEL ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. AMINAH BINTI LAHADING (104/STS/DIKNAS/2025)	104/STS/DIKNAS/2025	Rp 655.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
367	06-Nov-25	PNGMBLIAN KLBHN BYR HNRARIUM TIM MNJMN BOS 2024 ATS TEMUAN BPK RI KALTARA TA. 2024 AN. IRDIANSYAH (106/STS/DIKNAS/2025)	106/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.570.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
368	18-Nov-25	PMBYRN KKRANGAN VOL PKRJAAN BRDSRKN TEMUAN BPK RI TA. 2024 ATAS PKRJAAN PMBNGN TROTOAR JLN PERINTIS Rp. 413.597.125,09 ANGS 2, CV. ARYAGUNA PERKASA (191/STS/DPUPRPKP/KTT/XI/2025)	191/STS/DPUPRPKP/KTT/XI/2025	Rp 155.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
369	26-Nov-25	PMBYRN KONSTRUKSI TMPT PRKIR GEDUNG SERBAGUNA SMP/SMA TU, LHP BPK 2024 CV. SEBAWANG GRAHA (109/STS/DIKNAS/2025)	109/STS/DIKNAS/2025	Rp 5.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
370	26-Nov-25	PMBYRN PMGWSN RHBLITASI SEDANG/BERAT RUMDIN SDN 006 TT BANDAN BIKIS, LHP BPK 2024 PT. MITRA UTAMA (108/STS/DIKNAS/2025)	108/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.896.100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
371	26-Nov-25	PMBYRN PMBNGUNAN RKB MI AL KHAIRAT, LHP BPK 2024 CV. SEBAWANG GRAHA (108/STS/DIKNAS/2025)	108/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
372	26-Nov-25	PMBYRN KONSTRUKSI PERPUS SDN 013, LHP BPK 2024 CV. SEBAWANG GRAHA (107/STS/DIKNAS/2025)	107/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
373	28-Nov-25	PMBYRN PNGWSN GEDUNG RKB SDN 010 TANA TIDUNG BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 A.N CV. SHYFA CONSULTANT (112/STS/DIKNAS/2025)	112/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
374	04 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRN HONORARIUM BUD TA. 2024 NOMOR 72.B/LHP/XIX.TJS/V/2025 TGL 24 MEI 2025, HJ. EVIHAR Rp. 65.000.000, YUDI RAHMATSYAH Rp. 41.861.500 (019/BPKAD-KTT/2025)	019/BPKAD-KTT/2025	Rp 106.861.500,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
375	05 Desember 2025	PMBYRN KKRANGAN VOL PKRJAAN BRDSRKAN LHP BPK RI TA. 2024 ATAS PKRJAAN OPTIMALISASI IPA BEBATU 5 LTR/DTK Rp. 57.732.187,44 CV. SALEH AAMILAH ESHAN LUNAS (200/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025)	200/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025	Rp 57.732.188,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
376	05 Desember 2025	BLJA CETAK BUKU KEG. PNYUSUNAN RANCANGAN PERBUP TENTANG PNJBRAN PERUBAHAN APBD BRDSRKAN LHP INSPEKTORAT KTT 2016 (004/XII/2025)	004/XII/2025	Rp 4.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
377	05 Desember 2025	PNGMBLIAN KLBHN PMBYRN BLNJA HONORARIUM TIM PLKSNA KEG ATAS TEMUAN PMRIKSAAN BPK TA 2024 AN. HADI ARYANTO Rp. 35.147.500 LUNAS (199/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025)	199/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025	Rp 35.147.500,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
378	09 Desember 2025	STS KELEBIHAN BAYAR DANA OPERASIONAL UNSUR PENGINAPAN DPRD TA. 2024 AN. YAPUR ALATAS 20.160.000, JAMHARI 46.200.000, MARKUS YUTENG 5.040.000, SAMOEL 20.160.000 (066/STS/SET-DPRD/XII/2025)	066/STS/SET-DPRD/XII/2025	Rp 91.560.000,00	Sekretariat DPRD
379	12 Desember 2025	PNGMBLIAN PMBYRN HNORARIUM PPTK KE 2 KESBANGPOL AN. SITI LAILAN (008/STS/BKBP-KTT/XII/2025)	008/STS/BKBP-KTT/XII/2025	Rp 5.554.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
380	15 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR PJBT PNGADAAN ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. EMELIA, ST (206/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025)	206/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025	Rp 2.270.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
381	15 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRN HONOR TA. 2024 AN MOHD. IDHAMNUR, SETORAN II (004/STS/SETDA/XII/2025)	004/STS/SETDA/XII/2025	Rp 5.000.000,00	Sekretariat Daerah
382	16 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHN HONOR TIM PLKSNA ATAS TEMUAN BPK TA 2024 AN. RICO ARDIANTO (207/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025)	207/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025	Rp 3.060.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
383	16 Desember 2025	PMBYRN PNGWSAN REHABILITASI ASRAMA TK/SD TRPDU UNGGULAN BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 AN. CV. MUFID CONSULINDO (116/STS/DIKNAS/2025)	116/STS/DIKNAS/2025	Rp 7.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
384	16 Desember 2025	PMBYRN PNGWSAN PMBNGUNAN RHBLITASI RUANG KELAS SDN 011 BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 AN. CV. MUFID CONSULINDO (118/STS/DIKNAS/2025)	118/STS/DIKNAS/2025	Rp 974.025,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
385	16 Desember 2025	PMBYRN PNGWSAN PMLHRAAN ASRAMA SMP/SMA TRPDU UNGGULAN BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 AN. CV. MUFID CONSULINDO (117/STS/DIKNAS/2025)	117/STS/DIKNAS/2025	Rp 4.870.125,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
386	16 Desember 2025	PMBYRN PNGWSAN PMBNGUNAN RHBLITASI RUANG KELAS SDN 016 BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 AN. CV. MUFID CONSULINDO (118/STS/DIKNAS/2025)	118/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.940.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
387	16 Desember 2025	PMBYRN PNGWSAN PMBNGUNAN RHBLITASI RUANG GURU DAN KPLA SKLAH TK TUNAS MEKAR 03 BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 AN. CV. MUFID CONSULINDO (115/STS/DIKNAS/2025)	115/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.896.100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
388	16 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHN PMBYRAN HONORARIUM TIM MNJMN BOS TA 2024 ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 (113/STS/DIKNAS/2025)	113/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.990.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
389	16 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHN BIAYA PERJADIN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN JUMADILRIANSYAH (114/STS/DIKNAS/2025)	114/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.100.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
390	16 Desember 2025	PNGMBALIAN LHPBPK RI TA. 2024 KLBHN PMBYRN HOTEL AN KATIJO DAMIS (STS/STS/CMT-MR/XII/2025)	STS/STS/CMT-MR/XII/2025	Rp 1.294.000,00	Badan Pemeriksa Keuangan
391	16 Desember 2025	STS KLBHN PMBYRN SEWA KNDRAAN BERMOTOR PENUMPANG KEGIATAN MONITORING (SEWA SPEEDBOAT) TA. 2024 (007/STS/SET-DPRD/XII/2025)	007/STS/SET-DPRD/XII/2025	Rp 39.175.376,00	Sekretariat DPRD
392	16 Desember 2025	KLBHAN PMBYRN GAJI TUNJANGAN ANAK AN. ARMANSYAH TA. 2024 (001/STS-SATPOLPP/2025)	001/STS-SATPOLPP/2025	Rp 1.616.822,00	Satuan Polisi Pamong Praja
393	16 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHN PMBYRN TUNJANGAN ANAK DAN TUNJANGAN BERAS TA. 2024 AN SYAMSUDIN (010/STS/BKBP-KTT/XII/2025)	010/STS/BKBP-KTT/XII/2025	Rp 45.344,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
394	17 Desember 2025	PMBYRN KKRNGAN VOLUME PKRJAAN BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PKRJAAN PNINGKTAN DAN RHBLITASI JLN MNJU TPU SPALDA, CV. DEAL, LUNAS (208/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025) - STS SENILAI Rp3.420.000,00	208/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025	Rp 3.419.862,33	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
395	17 Desember 2025	BLJNA CTK BUKU KEG PNYSUNAN RAPERBUP TNTG PNJBRAN PERUBAHAN APBD BRDSRKN LHP INSPEKTORAT KTT 2016 AN. IRWANSYAH KADIR (020/BPKAD-KTT/2025)	020/BPKAD-KTT/2025	Rp 389.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
396	17 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHN PMBYRN HONOR TA 2024 AN. IBRAHIM ALI (121/STS/DIKNAS/2025)	121/STS/DIKNAS/2025	Rp 7.650.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
397	18 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN HONOR TIM BOS TA. 2024 AN. WARDOYO (124/STS/DIKNAS/2025)	124/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
398	18 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. AHMATSYAH (123/STS/DIKNAS/2025)	123/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.370.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
399	18 Desember 2025	PMBYRN ATAS KLBHN PMBYRAN JASA KNSULTASI PNGAWASAN PMBNGUNAN JMBTAN TAMBAT LABUH NELAYAN BUONG BARU BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 CV. MUFID CONSULINDO (STS/DPPP/2025)	STS/DPPP/2025	Rp 1.948.050,00	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
400	18 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN BIAYA PERJADIN KLBHAN PMBYRN HOTEL ATAS TEMUAN BPK TA. 2024 AN. FREDY PATASIK (126/STS/DIKNAS/2025)	126/STS/DIKNAS/2025	Rp 868.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
401	18 Desember 2025	LHP BPK KLBHAN BYR TNJANGAN ANAK DAN TNJANGAN BERAS ANAK TA. 2024 AN. JAMIATUR RASIDAH (041/STS/DINKES/2025)	041/STS/DINKES/2025	Rp 600.000,00	Dinas Kesehatan
402	18 Desember 2025	PMBYRN KKRANGAN VOLUM BRDSRKN LHP BPK 2024 ATAS PKRJAAN PMBANGUNAN POS JAGA RMH JBTN ESLON LUNAS CV. JAYA BANGUN UPUNTAKA (210/STS/DPUPRPKP/KTT/2025)	210/STS/DPUPRPKP/KTT/2025	Rp 4.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
403	18 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN HONOR TIM BOP TA. 2024 AN. FERI ARDIAFRIANI (125/STS/DIKNAS/2025)	125/STS/DIKNAS/2025	Rp 3.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
404	18 Desember 2025	PMBYRN KKRANGAN VOLUM BRDSRKN LHP BPK 2024 ATAS PKRJAAN PMSNGAN SRING PNAHAN TNAH RMH JBTN ESLON THP II LUNAS CV. JAYA BANGUN UPUNTAKA (211/STS/DPUPRPKP/KTT/2025) - STS SENILAI Rp26.439.000,00	211/STS/DPUPRPKP/KTT/2025	Rp 26.438.170,38	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
405	18 Desember 2025	PNGMBALIAN ATAS KLBHAN PMBYRAN PMBNGUNAN LHN PARKIS GDUNG BAPPEDA LHP BPK TA. 2024 (	B.900.1.3.6/872/BAPPLITBANG-KTT/XII/2025	Rp 1.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
406	18 Desember 2025	PMBYRN KLBIHAN TUNJANGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 AN IDA ROYANA (127/STS/DIKNAS/2025)	127/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.147.636,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
407	18 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN HONOR TIM BOS TA. 2024 AN. AHMATSYAH (122/STS/DIKNAS/2025)	122/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
408	19 Desember 2025	KLBHAN PMBYRN GAJI TUNJANGAN ANAK AN. KAMARUDIN TA. 2024 (002/STS-SATPOLPP/2025)	002/STS-SATPOLPP/2025	Rp 1.616.822,00	Satuan Polisi Pamong Praja
409	22 Desember 2025	PEMBAYARAN KLBHAN TNJAGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 AN. FATMAWATI (120/STS/DIKNAS/2025)	120/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.798.016,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
410	22 Desember 2025	PEMBAYARAN KLBHAN TNJAGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 AN. LILI ORYANTI (152/STS/DIKNAS/2025)	152/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.509.196,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
411	22 Desember 2025	PMBYRAN KAEKURANGAN VOLUM BRDSRKAN LHP BPK TA. 2024 ATAS PKRJAAN REKONSTRUKSI JLN SELOR, CV SEBAWANG GRAHA, LUNAS (209/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025) - STS Senilai Rp71.461.320,00	209/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025	Rp 71.461.319,28	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
412	23 Desember 2025	STS BELANJA CETAK DPA KEG. TAPD PERUBAHAN APBD BERDASARKAN LHP INSPEKTORAT KTT TA. 2016 AN. IRWANSYAH KADIR (005/XII/2025)	005/XII/2025	Rp 15.519.000,00	Inspektorat Kabupaten
413	23 Desember 2025	SEMENTARA TGR KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI TUNJANGAN ANAK AN. ANWAR (003/STS-SATPOLPP/2025)	003/STS-SATPOLPP/2025	Rp 3.230.188,00	Satuan Polisi Pamong Praja
414	23 Desember 2025	SEMENTARA TGR KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI TUNJANGAN ANAK AN. MAIDI MARTIN (003/STS-SATPOLPP/2025)	003/STS-SATPOLPP/2025	Rp 1.616.822,00	Satuan Polisi Pamong Praja
415	24 Desember 2025	PMBYRN PRTMA PNGMBALIAN KLBHAN BIAYA PRJADIN HOTEL TEMUAN BPK 2024 AN. NANANG MASRANIE (170/STS/DIKNAS/2025)	170/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
416	24 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TIM BOP PAUD TA. 2024 ATAS LHP BPK RI 2024 AN. IBAU ELISA (166/STS/DIKNAS/2025)	166/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
417	24 Desember 2025	PMBYRAN KLBIHAN TUNJANGAN GAJI ASN TA. 2024 AN. MASRAH (160/STS/DIKNAS/2025)	160/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.072.052,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
418	24 Desember 2025	PNGMBALIAN KLBHAN PMBYRAN HONOR TIM BOP PAUD TA. 2024 ATAS LHP BPK RI 2024 AN. MASLI (165/STS/DIKNAS/2025)	165/STS/DIKNAS/2025	Rp 2.850.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
419	24 Desember 2025	BRDSRKAN LHP BPK RI 2024 TRDPT TEMUAN KKRANGAN VOLUME ATAS PAKET PKRJAAN PMBGUNAN GRJA PAROKI ST. PAULUS (MTL) CV. SUKSES MAKMUR JAYA ANGS 2 LUNAS (212/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025) - STS SENILAI Rp147.800.352,00	212/STS/DPUPRPKP/KTT/XII/2025	Rp 147.800.351,04	Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
420	29 Desember 2025	PNGMBALIAN LEBIH BAYAR TPP TA. 2023 (0004/STS/DISHUB-KTT/2025)	0004/STS/DISHUB-KTT/2025	Rp 4.000.000,00	Dinas Perhubungan
421	30 Desember 2025	PEMBAYARAN KE- 2 KONTRUKSI TEMPAT PARKIR GEDUNG SERBAGUNA SMP/SMA TERPADU UNGGULAN (PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH) BERDASARKAN LHP BPK N0.69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 TAHUN ANGGARAN 2024 (179/STS/DIKNAS/2025)	179/STS/DIKNAS/2025	Rp 6.455.514,51	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
422	30 Desember 2025	PEMBAYARAN KE- 2 KONTRUKSI RUANGAN PERPUSATAKAAN SDN 018 TANA TIDUNG BERDASARKAN LHP BPK NO.69B/LHP/XIX.TJS/V/2024 TAHUN ANGGARAN 2024 An. CV. SEBAWANG GRAHA (180/STS/DIKNAS/2025)	180/STS/DIKNAS/2025	Rp 6.275.237,79	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
423	30 Desember 2025	PEMBAYARAN KE- 2 PEMBANGUNAN RKB MI AL-KHAIRAT BERDASARKAN LHP BPK NO 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 TAHUN ANGGARAN 2024 An. CV. SEBAWANG GRAHA (181/STS/DIKNAS/2025)	181/STS/DIKNAS/2025	Rp 5.377.243,53	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
424	30 Desember 2025	ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERBUB BELANJA CETAK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA KELEBIHAN SPPD UH TA 2016 (006/XII/2025)	006/XII/2025	Rp 4.103.455,00	BPKAD/Bag.Keuangan 2015
425	31 Desember 2025	PEMBAYARAN KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN KONTRUKSI REHABILITASI SEDANG/BARAT SDN 001 TANA TIDUNG (EKS KPU) ATAS TEMUAN LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024 An. CV. BIKIS JAYA (193/STS/DIKNAS/2025)	193/STS/DIKNAS/2025	Rp 17.786.386,49	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH	OPD
426	31 Desember 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELEBIHAN PEMBAYARAN HOTEL ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024, An. JULKAPLI, A.Ma (205/STS/DIKNAS/2025)	205/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.949.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
427	31 Desember 2025	PEMBAYARAN PERTAMA LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 ATAS KEKURANGAN VOLUME DARI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH TAHUN 2024 An. CV. MANDIRI UTAMA SATU (187/STS/DIKNAS/2025)	187/STS/DIKNAS/2025	Rp 20.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
428	31 Desember 2025	PEMBAYARAN TEMUAN LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 ATAS KELEBIHAN VOLUME PEKERJAAN PEMBANGUNAN RKB SMPN 5 TANA TIDUNG DESA SAPARI TAHUN ANGGARAN 2024 An. CV. INTI MUSTIKA (203/STS/DIKNAS/2025)	203/STS/DIKNAS/2025	Rp 134.990.031,54	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
429	31 Desember 2025	PEMBAYARAN KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN KONTRUKSI PEMBANGUNAN PAGAR DAN HALAMAN SDN 019 TANA TIDUNG (BUONG BARU) ATAS TEMUAN LHP BPK KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024 An. CV. DUA PUTRI TAKA (195/STS/DIKNAS/2025)	195/STS/DIKNAS/2025	Rp 40.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
430	31 Desember 2025	PEMBAYARAN KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN KONTRUKSI REHABILITASI KANTOR PENGELOLA SMPN 1 TERPADU UNGGULAN (TIDENG PALE) ATAS TEMUAN LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024 An. CV. BIKIS JAYA (196/STS/DIKNAS/2025)	196/STS/DIKNAS/2025	Rp 45.566.899,56	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
431	31 Desember 2025	PEMBAYARAN PERTAMA LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 ATAS KEKURANGAN VOLUME DARI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN SERAGAM SEKOLAH TAHUN 2024 An. CV. MANDIRI UTAMA SATU (202/STS/DIKNAS/2025)	202/STS/DIKNAS/2025	Rp 100.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
432	31 Desember 2025	PEMBAYARAN PERTAMA LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 ATAS KEKURANGAN VOLUME DARI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN SERAGAM SEKOLAH TAHUN 2024 An. CV. TANJUNG KERAMAT JAYA (201/STS/DIKNAS/2025)	201/STS/DIKNAS/2025	Rp 140.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
433	31 Desember 2025	PEMBAYARAN PERTAMA LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 ATAS KEKURANGAN VOLUME DARI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN SERAGAM SEKOLAH TAHUN 2024 An. CV TANJUNG KERAMAT JAYA (186/STS/DIKNAS/2025)	186/STS/DIKNAS/2025	Rp 30.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
434	31 Desember 2025	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELEBIHAN PEMBAYARAN HOTEL ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024, An. BUSTAMAN, S.Pd (204/STS/DIKNAS/2025)	204/STS/DIKNAS/2025	Rp 1.500.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
435	31 Desember 2025	KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN PENGADAAN TANAMAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT AKMAD BERAHIM. NILAI TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN PENGADAAN TANAMAN LINGKUNGAN RS AKHMAD BERAHIM TA. 2024 PEMBAYARAN SAAT INI Rp. 159.683.952,71 (042/STS/DINKES/2025)	042/STS/DINKES/2025	Rp 159.683.952,71	Dinas Kesehatan
436	31 Desember 2025	PEMBAYARAN MELEBIHI PROGRES HASIL TEMUAN LHP BPK RI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 ATAS KONTRUKSI PEMELIHARAAN TAMAN DAN HALAMAN SD/SMP TERPADU UNGGULAN TAHUN ANGGARAN 2024 An. PT MAHAMERU GREEN SPACE (191/STS/DIKNAS/2025)	191/STS/DIKNAS/2025	Rp 27.559.294,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
437	07-Oct-25	Potongan Utang Kasda Bulan OKTOBER 2025 PT. TASPEN (ERA/8005) 9.182.770 Hasil Kerjasama daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POT HTG KASDA BLN OKT 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
438	07-Nov-25	Potongan Utang Kasda Bulan NOVEMBER 2025 PT. TASPEN (ERA/9004) 1.325.000 Hasil Kerjasama daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POT HTG KASDA BLN NOV 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
439	09-Dec-25	Potongan Utang Kasda Bulan DESEMBER 2025 PT. TASPEN (ERA/2002) 19.747.400 Hasil Kerjasama daerah dan 500.000 TGR an. Rahman Santoso	POTONGAN HUTANG KASDA DES 2025	Rp 500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
440	21 Mei 2025	Pengembalian Kelebihan Biaya perjalanan Dinas Tumpang tindih atas Temuan Pemeriksaan BPK RI TA. 2024 An. Fredy Patasik, S.Kom	(027/STS/DIKNAS/2025)	Rp 1.340.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
441	09 Oktober 2025	PEMBAYARAN KLBHN TUNJANGAN ATAS GAJI ASN TA. 2024 A.N SANIAH	070/STS/DIKNAS/2025)	Rp 1.845.100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Jumlah				**Rp 10.048.483.421,66**	
TOTAL I + II				**Rp 10.074.036.421,66**	

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
RINCIAN TRANSFER DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Desa	Dana Desa 2025		ANGGARAN DD	REALISASI DD		Pembiayaan DD			
				Total Anggaran 2025	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Jumlah Realisasi DD Tahun 2025	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
		Anggaran	Realisasi				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	TIDENG PALE	1.214.335.000,00	1.214.335.000,00	1.221.313.971,00	90.000.000,00	1.178.685.000,00	6.978.971,00	6.978.971,00	-	-
2	LIMBU SEDULUN	994.724.000,00	994.724.000,00	1.048.589.159,00	48.600.000,00	1.007.183.877,00	53.865.159,00	53.865.159,00	390.430.000,00	390.430.000,00
3	SEBIDAI	975.026.000,00	975.026.000,00	996.630.996,00	32.400.000,00	980.287.600,00	21.604.996,00	21.604.996,00	226.855.000,00	226.855.000,00
4	SEDULUN	838.256.000,00	838.256.000,00	879.749.785,00	50.400.000,00	756.422.000,00	41.493.785,00	41.493.785,00	106.120.105,00	-
5	TIDENG PALE TIMUR	1.066.371.000,00	1.066.371.000,00	1.209.081.611,00	133.200.000,00	999.037.000,00	142.710.611,00	142.710.611,00	328.510.000,00	328.510.000,00
6	GUNAWAN	604.329.000,00	604.329.000,00	671.673.856,00	60.550.000,00	635.789.000,00	67.344.856,00	67.344.856,00	263.790.000,00	263.790.000,00
7	SEBAWANG	604.302.000,00	604.302.000,00	617.257.001,00	64.800.000,00	607.510.000,00	12.955.001,00	12.955.001,00	126.460.000,00	126.460.000,00
8	SESAYAP	1.145.451.000,00	1.145.451.000,00	1.198.291.504,00	169.200.000,00	1.186.136.500,00	52.840.504,00	52.840.504,00	231.041.000,00	231.041.000,00
9	SENGKONG	1.020.864.000,00	1.020.864.000,00	1.123.162.564,00	110.700.000,00	984.884.802,00	102.298.564,00	102.298.564,00	204.173.000,00	204.173.000,00
10	BEBATU	1.069.373.000,00	670.149.200,00	1.219.367.076,00	92.400.000,00	814.500.500,00	149.994.076,00	149.994.076,00	-	-
11	BANDAN BIKIS	1.073.843.000,00	1.073.843.000,00	1.153.156.465,00	158.400.000,00	1.113.965.820,00	79.313.465,00	79.313.465,00	-	-
12	SEPALA DALUNG	1.030.224.000,00	1.030.224.000,00	1.204.957.693,00	122.400.000,00	1.173.844.600,00	174.733.693,00	174.733.693,00	206.050.000,00	206.050.000,00
13	SELUDAU	714.482.000,00	714.482.000,00	820.584.483,00	77.400.000,00	590.736.000,00	106.102.483,00	106.102.483,00	50.000.000,00	-
14	MENJELUTUNG	1.029.035.000,00	1.029.035.000,00	1.076.889.980,00	169.000.000,00	908.412.667,00	47.854.980,00	47.854.980,00	244.587.267,00	244.587.267,00
15	SESAYAP SELOR	714.098.000,00	564.549.200,00	961.747.513,00	46.800.000,00	813.115.400,00	247.649.513,00	247.649.513,00	149.320.000,00	149.320.000,00
16	TANAH MERAH	836.921.000,00	836.921.000,00	884.514.163,00	122.400.000,00	849.762.050,00	47.593.163,00	47.593.163,00	167.540.000,00	167.540.000,00
17	TENGKU DACING	859.488.000,00	690.699.000,00	944.773.305,00	118.800.000,00	768.277.000,00	85.285.305,00	85.285.305,00	-	-
18	SAMBUNGAN	746.334.000,00	746.334.000,00	952.134.160,00	78.435.000,00	890.701.000,00	205.800.160,00	205.800.160,00	161.615.000,00	161.615.000,00
19	TANAH MERAH BARAT	795.482.000,00	696.130.000,00	916.525.691,00	118.800.000,00	845.371.000,00	121.043.691,00	121.043.691,00	164.102.000,00	87.182.000,00
20	SAMBUNGAN SELATAN	946.688.000,00	946.688.000,00	1.008.493.107,00	100.800.000,00	999.053.750,00	61.805.107,00	61.805.107,00	189.338.000,00	189.338.000,00
21	BUONG BARU	1.066.658.000,00	1.066.658.000,00	1.132.470.781,00	104.400.000,00	1.024.360.000,00	65.812.781,00	65.812.781,00	345.345.000,00	295.345.000,00
22	BEBAKUNG	748.826.000,00	748.826.000,00	771.220.451,00	111.600.000,00	734.788.080,00	22.394.451,00	22.394.451,00	150.000.000,00	150.000.000,00

No	Nama Desa	Dana Desa 2025		ANGGARAN DD	REALISASI DD		Pembiayaan DD			
				Total Anggaran 2025	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Jumlah Realisasi DD Tahun 2025	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
		Anggaran	Realisasi				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
23	KUJAU	710.075.000,00	710.075.000,00	812.163.744,00	88.200.000,00	799.059.800,00	102.088.744,00	102.088.744,00	67.195.944,00	67.195.000,00
24	MENDUPO	727.881.000,00	727.881.000,00	773.308.991,00	72.000.000,00	688.050.000,00	45.427.991,00	45.427.991,00	-	-
25	MANING	917.930.000,00	917.930.000,00	1.020.603.651,00	61.200.000,00	929.759.000,00	102.673.651,00	102.673.651,00	-	-
26	PERIUK	725.172.000,00	725.172.000,00	779.459.672,00	28.800.000,00	643.728.000,00	54.287.672,00	54.287.672,00	96.461.512,00	-
27	SEPUTUK	781.494.000,00	781.494.000,00	860.477.134,00	54.000.000,00	726.422.100,00	78.983.134,00	78.983.134,00	230.736.000,00	122.100.000,00
28	RIAN	679.989.000,00	679.989.000,00	739.995.260,00	82.800.000,00	675.887.000,00	60.006.260,00	60.006.260,00	136.000.000,00	136.000.000,00
29	BALAYAN ARI	744.438.000,00	744.438.000,00	780.615.576,00	21.600.000,00	689.245.000,00	36.177.576,00	36.177.576,00	148.888.000,00	148.888.000,00
30	RIAN RAYO	728.445.000,00	728.445.000,00	745.573.985,00	43.200.000,00	716.345.000,00	17.128.985,00	17.128.985,00	-	-
31	KAPUAK	678.660.000,00	678.660.000,00	753.018.600,00	50.400.000,00	715.529.600,00	74.358.600,00	74.358.600,00	145.000.000,00	145.000.000,00
32	SAPARI	596.697.000,00	596.697.000,00	787.341.300,00	36.000.000,00	732.784.000,00	190.644.300,00	190.644.300,00	152.000.000,00	152.000.000,00
TOTAL		**27.385.891.000,00**	**26.568.977.400,00**	**30.065.143.228,00**	**2.719.685.000,00**	**27.179.633.146,00**	**2.679.252.228,00**	**2.679.252.228,00**	**4.681.557.828,00**	**4.193.419.267,00**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
REALISASI PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Uraian	Nama Penerima		Jumlah Hibah		Keterangan (SP2D)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa**				
		1	Tagana (Taruna Siaga Bencana)	Rp	33.000.000,00	65.04/04.0/000034/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/P1/5/2025
		2	Forum PPKH (Program Keluarga Harapan)	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000035/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/P1/5/2025
		3	GOW Kabupaten Tana Tidung	Rp	50.000.000,00	65.04/04.0/000163/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/PPR1/11/2025
		4	HANNA JUNIAR / GOW KABUPATEN TANA TIDUNG	Rp	40.000.000,00	65.04/04.0/000058/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/P1/6/2025
		5	DEDI SUDARDI (KARANG TARUNA)	Rp	30.923.900,00	65.04/04.0/000130/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/PR/10/2025
		6	DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. TANA TIDUNG	Rp	90.000.000,00	65.04/04.0/000148/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/PPR1/11/2025
		7	PKK KABUPATEN TANA TIDUNG	Rp	700.000.000,00	65.04/04.0/000015/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/M/3/2025
		8	PKK KABUPATEN TANA TIDUNG	Rp	100.000.000,00	65.04/04.0/000176/LS/1.06.2.08.2.13.01.0000/PPR1/12/2025
			TOTAL	**Rp**	**1.063.923.900,00**	
		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
		1	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	200.000.000,00	65.04/04.0/000068/LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/P1/7/2025
		2	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	40.000.000,00	65.04/04.0/000101/LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/P1/9/2025
		3	KWARTIR CABANG (KWARCAB) KAB. TANA TIDUNG	Rp	25.000.000,00	65.04/04.0/000103/LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/P1/9/2025
			TOTAL	**Rp**	**265.000.000,00**	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		1	HIBAH BANTUAN KEUANGAN PILKADA	Rp	250.000.000,00	65.04/04.0/000010/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/M/3/2025
		2	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KAB.TANA TIDUNG	Rp	70.000.000,00	65.04/04.0/000036/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/5/2025
		3	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG	Rp	85.981.100,00	65.04/04.0/000062/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/6/2025
		4	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG	Rp	85.843.750,00	65.04/04.0/000063/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/6/2025
		5	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)	Rp	106.240.225,00	65.04/04.0/000067/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/7/2025
		6	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI DEMOKRAT))	Rp	72.726.825,00	65.04/04.0/000066/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/7/2025

NO	Uraian	Nama Penerima		Jumlah Hibah		Keterangan (SP2D)
		7	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI AMANAT NASIONAL))	Rp	308.419.425,00	65.04/04.0/000086/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/7/2025
		8	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI GERINDRA)	Rp	61.326.775,00	65.04/04.0/000091/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/7/2025
		9	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN))	Rp	61.395.450,00	65.04/04.0/000092/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/7/2025
		10	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI NASIONAL DEMOKRAT)	Rp	65.584.625,00	65.04/04.0/000093/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/7/2025
		11	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT/ HANURA)	Rp	124.095.725,00	65.04/04.0/000118/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/8/2025
		12	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA DPRD KAB. TANA TIDUNG (DPC PARTAI SOLIDARITAS INDONESI/ PSI)	Rp	93.054.625,00	65.04/04.0/000123/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/P1/9/2025
		13	PENGADILAN NEGERI	Rp	174.825.000,00	65.04/04.0/000172/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		14	KPU	Rp	341.200.000,00	65.04/04.0/000180/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		15	KPU	Rp	314.528.000,00	65.04/04.0/000179/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		16	KPU	Rp	191.352.900,00	65.04/04.0/000198/LS/8.01.1.05.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
			TOTAL	**Rp**	**2.406.574.425,00**	
		Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat				
		1	BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KAB. TANA TIDUNG	Rp	200.000.000,00	65.04/04.0/000107/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025
		2	PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	1.000.000.000,00	65.04/04.0/000108/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025
		3	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	1.900.000.000,00	65.04/04.0/000149/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025
		4	PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) KAB. TANA TIDUNG	Rp	350.000.000,00	65.04/04.0/000150/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025
		5	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN (LPTQ) KAB. TANA TIDUNG	Rp	1.500.000.000,00	65.04/04.0/000151/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025
		6	DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG TA.2025	Rp	1.700.000.000,00	65.04/04.0/000202/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025
		7	GEREJA GPDI GRACIA BETAYAU KAB. TANA TIDUNG TA.2025	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000222/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025
		8	PONDOK PESANTREN AL-KHAIRAT KAB. TANA TIDUNG TA.2025	Rp	100.000.000,00	65.04/04.0/000221/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025
		9	MUSHOLA ASSAMI BUONG BARU KAB. TANA TIDUNG TA.2025	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000579/LS/4.01.2.10.0.000.01.0000/P2/8/2024
		10	KEPADA MASJID AGUNG AT-TAQWA KAB. TANA TIDUNG TA.2025	Rp	50.000.000,00	65.04/04.0/000307/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025
		11	MUSHOLA AL-FATAH BEBAKUNG KAB. TANA TIDUNG TA.2025	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000321/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025
		12	GEREJA GSJA EFATA CHARISMATIC LIMBU SEDULUN KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000321/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025
		13	MASJID AR-RAUDAH SEPALA DALUNG KAB. TANA TIDUNG	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000367/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025
		14	YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS HIDAYAHTULLAH KAB. TANA	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000368/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025
		15	GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA JEMAAT EL-GIBOR SELUDAU KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000366/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025

NO	Uraian		Nama Penerima	Jumlah Hibah		Keterangan (SP2D)
		16	DPD BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000374/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025
		17	MASJID JAMI IBRAHIMI BEBATU KAB. TANA TIDUNG TA.2025	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000417/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025
		18	MASJID ISTIQOMAH TANA LIA KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000416/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025
		19	YAYASAN DAARUL HUFFADZ UPUNTAKA KAB. TANA TIDUNG	Rp	100.000.000,00	65.04/04.0/000418/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025
		20	MASJID AR-RAHMAN SAMBUNGAN SELATAN KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000430/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025
		21	PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) KAB. TANA TIDUNG	Rp	50.000.000,00	65.04/04.0/000495/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025
		22	MASJID NUR IKHLAS KEBUN SAYUR KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000496/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025
		23	MASJID BESAR DARUL IBAD TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000497/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025
		24	MUSHOLA NURUL JADID LIMBU SEDULUN KABUPATEN TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000506/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025
		25	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN TANA TIDUNG	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000505/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025
		26	MASJID NURUL IMAN MENJELUTUNG KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000536/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025
		27	PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KAB. TANA TIDUNG	Rp	69.000.000,00	65.04/04.0/000535/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025
		28	PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PC NU) KAB.TANA TIDUNG TA.2025	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000539/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025
		29	MASJID DARUN NAIM BANDAN BIKIS KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000538/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025
		30	MASJID BABURRAHMAH TENGKU DACING KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000609/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		31	ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (AGPAI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	100.000.000,00	65.04/04.0/000617/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		32	MASJID FASHTABIQULKHAIRAAT KAB. TANA TIDUNG	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000627/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		33	PERSEKUTUAN GEREJA - GEREJA INDONESIA (PGI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	630.000.000,00	65.04/04.0/000633/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		34	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. TANA TIDUNG	Rp	90.000.000,00	65.04/04.0/000634/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		35	PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	840.000.000,00	65.04/04.0/000635/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		36	MASJID BESAR BAITURRAHMAN SESAYAP KAB. TANA TIDUNG	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000657/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		37	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	90.000.000,00	65.04/04.0/000679/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		38	MASJID AL AMIN SEPALA DALUNG KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000678/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		39	GKII SEBIDAI KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000682/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025
		40	GEREJA KATHOLIK RIAN RAYO KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000711/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		41	MASJID BAITURRAHIM MANING KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000716/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		42	YAYASAN DAARUL HUFFADZ UPUNTAKA KAB. TANA TIDUNG	Rp	100.000.000,00	65.04/04.0/000715/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		43	MASJID AL - IKHLAS TANA LIA KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000717/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		44	GEREJA GKPI SEBIDAI KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000714/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025

NO	Uraian		Nama Penerima		Jumlah Hibah	Keterangan (SP2D)
		45	LANGGAR AL - IKHLAS TIDENG PALE TIMUR KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000718/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		46	GEREJA GKPI EFATA RIAN KAPUAK DESA RIAN KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000713/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		47	GEREJA GKPI SEPUTUK KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000779/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		48	MASJID SHOLIHIN SENGKONG KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000759/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025
		49	MASJID BESAR AL-AMIN BUONG BARU KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000793/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		50	VIHARA DHAMMA PHALA KAB. TANA TIDUNG T	Rp	50.000.000,00	65.04/04.0/000792/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		51	MUSHOLLAH DARUL MUCHLISIN KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000794/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		52	PERSEKUTUAN OIKOUMENE ASN KAB. TANA TIDUNG	Rp	300.000.000,00	65.04/04.0/000791/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		53	MASJID AL-JIHAD TIDENG PALE TIMUR KAB. TANA TIDUNG TA.2	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000790/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		54	VIHARA DHAMMA PHALA KAB. TANA TIDUNG An. Vihara Dhamma Phala	Rp	-	65.04/07.0/000003/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/1/2025
		55	MASJID BAITURRAHMAN KUJAU KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000845/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		56	MUSHOLLAH BAITUL RAHMAN SAMBUNGAN KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000846/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		57	GEREJA GSJA PETRA CHARISMATIK KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000849/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		58	GEREJA KATOLIK STASI ST. FRANSISKUS XAVERIUS BEBAKUNG KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000884/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		59	GEREJA KATHOLIK ST. MARKUS DESA KAPUAK KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/000885/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		60	GEREJA GKII BEBAKUNG KAB. TANA TIDUNG TA.2025	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/001013/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		61	GEREJA GKII GUNAWAN KAB. TANA TIDUNG	Rp	15.000.000,00	65.04/04.0/001012/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		**TOTAL**	**Rp**	**9.874.000.000,00**	
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1	Pembayaran Belanja Hibah dan BOP Daerah (APBD) SMP Swasta Semester 1 (Januari-Juni) Tahun 2025 SP2D 01528	Rp	209.625.000,00	65.04/04.0/000086/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/5/2025
		2	Pembayaran Belanja Hibah dan BOP Daerah (APBD) SD Swasta Semester 1 (Januari-Juni) Tahun 2025 SP2D 01525	Rp	553.150.000,00	65.04/04.0/000083/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/5/2025
		3	Belanja Hibah Kepada Kelompok Kerja Bunda PAUD (POKJA PAUD) Kabupaten Tana Tidung. SP2D 01941	Rp	447.000.000,00	65.04/04.0/000127/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/6/2025
		4	Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada IGTKI Kabupaten Tana Tidung. SP2D 04052	Rp	45.000.000,00	65.04/04.0/000373/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2025
		5	Pembayaran Dana BOP PAUD Daerah Tahun 2025. SP2D 04532	Rp	1.196.300.000,00	65.04/04.0/000432/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2025
		6	Pembayaran Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Himpaudi Kabupaten Tana Tidung SP2D 04636	Rp	45.000.000,00	65.04/04.0/000451/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2025
		7	Pembayaran Belanja Hibah Dana BOP Daerah (APBD) SD Swasta Semester 2 (Juli - Desember) Tahun 2025. SP2D 04795	Rp	390.150.000,00	65.04/04.0/000465/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2025
		8	Pembayaran Belanja Hibah Dana BOP Daerah (APBD) SMP Swasta Semester 2 (Juli - Desember) Tahun 2025. SP2D 04798	Rp	181.975.000,00	65.04/04.0/000468/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2025

NO	Uraian		Nama Penerima		Jumlah Hibah	Keterangan (SP2D)
		9	Pembayaran Bantuan Hibah Uang Kepada Group Kesenian Daerah Selimpot Pagun Taka. SP2D 04985	Rp	50.468.000,00	65.04/04.0/000499/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2025
		10	Belanja Hibah uang Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). SP2D 06383	Rp	100.230.000,00	65.04/04.0/000641/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
		11	Jurnal Penyesuaian Atas Belanja Hibah BOSP Pusat Reguler dan Kinerja PAUD/TK SWASTA	Rp	901.286.000,00	BELANJA HIBAH BOSP (BOP) REGULER/ KINERJA PUSAT PAUD/TK SWASTA
		12	Jurnal Penyesuaian Atas Belanja Hibah BOSP (BOP)Pusat KESETARAAN PKBM MANDIRI SWASTA	Rp	104.864.820,00	BELANJA HIBAH BOSP (BOP) KESETARAAN PKBM MANDIRI SWASTA
		13	Jurnal Penyesuaian atas BOSP-BOS Sekolah SD dan SMP NEGERI TA 2025 Rp5.790.296.270,00 dan HIBAH atas Sekolah Swasta TA 2025 Rp571.378.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Rp	571.378.300,00	JURNAL_BOSP-BOS_SD DAN SMP_NEGERI DAN SWASTA 2025
			TOTAL	**Rp**	**4.796.427.120,00**	
			Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikana			
		1	Pembayaran Belanja Sarana Produksi P2L (APBD) Tahap I Penumbuhan, Karang Taruna Desa Tideng Pale. SP2D 00771 (ANGGUN SETIAWAN)	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000016/LS/3.27.2.09.3.25.01.0000/P1/4/2025
		2	Pembayaran Belanja Sarana Produksi P2L (APBD) Tahap I Pengembangan, KWT Busak Pagun. SP2D 01401 (SURTINA)	Rp	7.500.000,00	65.04/04.0/000024/LS/3.27.2.09.3.25.01.0000/P1/5/2025
		3	Pembayaran Belanja Sarana Produksi P2L (APBD) Tahap II Penumbuhan, Karang Taruna Desa Tideng Pale. SP2D 02156 (ANGGUN SETIAWAN)	Rp	20.000.000,00	65.04/04.0/000048/LS/3.27.2.09.3.25.01.0000/P1/7/2025
		4	Pembayaran Belanja Sarana Produksi P2L (APBD) Tahap II Pengembangan, KWT Busak Pagun SP2D 03863 (SURTINA)	Rp	7.500.000,00	65.04/04.0/000095/LS/3.27.2.09.3.25.01.0000/P1/9/2025
			TOTAL	**Rp**	**55.000.000,00**	
			Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM			
		1	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kab. Tana Tidung	**Rp**	**150.000.000,00**	65.04/04.0/000128/LS/3.31.3.30.2.17.01.0000/PPR1/11/2025
			DINAS KESEHATAN			
		1	Pembayaran atas tagihan pembayaran Dana Hibah Operasional dan kegiatan Markas PMI Tahun 2025. SP2D 05951 (PMI KAB. TANA TIDUNG)	**Rp**	**70.000.000,00**	65.04/04.0/000570/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2025
3	Belanja Hibah PDAM		**Dinas Pekerjaan Umum, PenataanRuang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**			
		1	Pembayaran Pengadaan Bahan kimia PDAM. SP2D 05334 (GUSNAWATI)	**Rp**	**596.228.675,00**	65.04/04.0/000366/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/11/2025
TOTAL KESELURUHAN DANA HIBAH				**Rp**	**19.277.154.120,00**	

NO	Uraian	Nama Penerima		Jumlah Hibah		Keterangan (SP2D)
4	Pengembalian Hibah	1	VIHARA DHAMMA PHALA KAB. TANA TIDUNG An. Vihara Dhamma Phala	Rp	15.000.000,00	65.04/07.0/000003/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/1/2025
		2	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. TANA TIDUNG	Rp	56.700,00	65.04/07.0/000002/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/1/2025
TOTAL PENGEMBALIAN HIBAH				**Rp**	**15.056.700,00**	
TOTAL ANGGARAN HIBAH				**Rp**	**19.667.134.141**	
REALISASI ANGGARAN HIBAH				**Rp**	**19.262.097.420**	

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BELANJA MODAL TANAH PER-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)	KETERANGAN
A	B	C	D	E= (D/C)*100	F
1	Sekretariat Dprd	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan	-	-	-	
3	Bagian Organisasi	-	-	-	
4	Bagian Hukum	-	-	-	
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	
7	Bagian Umum	-	-	-	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	94,43	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Kesehatan	-	-	-	
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-	-	-	
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	-	-	-	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	-	-	-	
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
20	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	
22	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	
31	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	
32	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	
33	Kecamatan Betayau	-	-	-	
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	
Total		**3.015.903.866,00**	**2.847.964.666,00**	**94,43**	**-**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)	KETERANGAN
A	B	C	D	E= (D/C)*100	F
1	Sekretariat DPRD	112.216.800,00	109.780.000,00	97,83	
2	Bagian Pemerintahan	12.481.589,00	11.932.400,00	95,60	
3	Bagian Organisasi	3.743.200,00	3.700.000,00	98,85	
4	Bagian Hukum	-	-	-	
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	8.623.500,00	8.340.000,00	96,71	
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	30.250.609,00	29.170.800,00	96,43	
7	Bagian Umum	4.678.251.604,00	4.259.487.300,00	91,05	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	5.651.971.698,00	5.335.021.149,00	94,39	
9	Dinas Perhubungan	864.930.334,00	758.884.190,00	87,74	
10	Dinas Kesehatan	5.435.457.712,00	5.109.473.146,00	94,00	
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.271.077.585,00	11.777.876.439,00	82,53	
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	172.290.200,00	168.956.700,00	98,07	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	790.322.273,00	787.815.160,00	99,68	
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	553.328.300,00	523.809.250,00	94,67	
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.544.101.536,00	1.466.995.940,00	95,01	
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.049.200,00	7.826.400,00	97,23	
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	229.778.748,00	221.727.320,00	96,50	
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.346.564.192,00	1.324.183.048,00	98,34	
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	269.233.160,00	250.496.650,00	93,04	
20	Inspektorat Kabupaten	767.115.930,00	708.392.200,00	92,34	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	86.823.050,00	84.732.776,00	97,59	
22	Dinas Lingkungan Hidup	329.597.600,00	329.307.000,00	99,91	
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	93.146.420,00	84.136.800,00	90,33	
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	79.452.550,00	77.742.199,00	97,85	
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	169.122.000,00	168.843.000,00	99,84	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	38.393.700,00	38.260.000,00	99,65	
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.333.200,00	40.672.850,00	96,08	
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	19.861.800,00	19.425.000,00	97,80	
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	847.086.289,00	818.999.760,00	96,68	
30	Kecamatan Sesayap	137.398.260,00	137.398.260,00	100,00	
31	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	
32	Kecamatan Tana Lia	556.957.300,00	555.177.000,00	99,68	
33	Kecamatan Betayau	85.967.280,00	85.395.000,00	99,33	
34	Kecamatan Muruk Rian	19.743.000,00	19.600.000,00	99,28	
Total		**39.255.670.619,00**	**35.323.557.737,00**	**89,98**	**-**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)	KETERANGAN
A	B	C	D	E= (D/C)*100	F
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan	-	-	-	
3	Bagian Organisasi	-	-	-	
4	Bagian Hukum	-	-	-	
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	
7	Bagian Umum	157.456.965,00	155.403.842,52	98,70	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	160.903.448.673,00	149.467.430.195,33	92,89	
9	Dinas Perhubungan	986.323.322,00	966.349.000,00	97,97	
10	Dinas Kesehatan	17.383.041.143,00	16.605.805.505,00	95,53	
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	69.056.475.518,39	55.400.860.707,00	80,23	
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	185.884.160,00	183.190.209,00	98,55	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	-	-	-	
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
20	Inspektorat Kabupaten	519.574.400,00	519.212.780,00	99,93	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	
22	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	266.136.800,00	264.344.818,00	99,33	
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.349.980.000,00	10.341.882.077,00	99,92	
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	
31	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	
32	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	
33	Kecamatan Betayau	-	-	-	
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	
Total		**259.808.320.981,39**	**233.904.479.133,85**	**90,03**	**-**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)	KETERANGAN
A	B	C	D	E= (D/C)*100	F
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan	-	-	-	
3	Bagian Organisasi	-	-	-	
4	Bagian Hukum	-	-	-	
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	
7	Bagian Umum	-	-	-	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	108.900.268.784,00	98.800.250.670,42	90,73	
9	Dinas Perhubungan	2.255.665.615,00	2.253.666.300,00	99,91	
10	Dinas Kesehatan	-	-	-	
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	68.470.000,00	36.844.356,00	53,81	
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	-	-	-	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.314.145.000,00	10.375.438.250,97	59,92	
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	-	-	-	
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
20	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pene	-	-	-	
22	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	
31	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	
32	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	
33	Kecamatan Betayau	-	-	-	
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	
Total		**128.538.549.399,00**	**111.466.199.577,39**	**86,72**	**-**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)	KETERANGAN
A	B	C	D	E= (D/C)*100	F
1	Sekretariat Dprd	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan	-	-	-	
3	Bagian Organisasi	-	-	-	
4	Bagian Hukum	-	-	-	
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	
7	Bagian Umum	-	-	-	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Kesehatan	-	-	-	
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.051.748.000,00	1.294.041.879,00	123,04	
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	-	-	-	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	-	-	-	
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	68.949.456,00	68.808.900,00	99,80	
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
20	Inspektorat Kabupaten	59.734.400,00	59.733.000,00	100,00	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	
22	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	200.000.000,00	38.612.682,00	19,31	
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	
31	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	
32	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	
33	Kecamatan Betayau	-	-	-	
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	
Total		**1.380.431.856,00**	**1.461.196.461,00**	**105,85**	**-**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BELANJA MODAL ASET LAINNYA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)	KETERANGAN
A	B	C	D	E= (D/C)*100	F
1	Sekretariat Dprd	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	
3	Bagian Organisasi	-	-	-	
4	Bagian Hukum	-	-	-	
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	
7	Bagian Umum	-	-	-	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.163.333.924,00	1.141.377.468,00	98,11	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Kesehatan	-	-	-	
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	340.400.000,00	236.700.000,00	69,54	
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	-	-	-	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	-	-	-	
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	165.000.000,00	114.420.000,00	69,35	
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
20	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	338.805.300,00	338.106.000,00	99,79	
22	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	
31	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	
32	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	
33	Kecamatan Betayau	-	-	-	
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	
Total		**2.057.939.224,00**	**1.881.003.468,00**	**91,40**	**-**

RINCIAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa Tahun 2025		Dana Desa 2025	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	TIDENG PALE	3.348.764.022,00	3.348.892.927,09	1.214.335.000,00	1.214.335.000,00
2	LIMBU SEDULUN	2.924.636.636,00	2.924.543.367,09	994.724.000,00	994.724.000,00
3	SEBIDAI	2.572.618.726,00	2.572.858.718,09	975.026.000,00	975.026.000,00
4	SEDULUN	2.988.386.112,00	2.988.070.669,09	838.256.000,00	838.256.000,00
5	TIDENG PALE TIMUR	2.717.399.446,00	2.717.084.003,09	1.066.371.000,00	1.066.371.000,00
6	GUNAWAN	2.574.389.556,00	2.574.222.229,09	604.329.000,00	604.329.000,00
7	SEBAWANG	2.420.649.070,00	2.420.926.091,09	604.302.000,00	604.302.000,00
8	SESAYAP	2.729.248.151,00	2.729.969.520,09	1.145.451.000,00	1.145.451.000,00
9	SENGKONG	3.008.718.493,00	3.008.773.340,09	1.020.864.000,00	1.020.864.000,00
10	BEBATU	2.915.169.119,00	2.915.149.908,09	1.069.373.000,00	670.149.200,00
11	BANDAN BIKIS	2.803.894.324,00	2.804.171.345,09	1.073.843.000,00	1.073.843.000,00
12	SEPALA DALUNG	3.262.748.229,00	3.262.580.902,09	1.030.224.000,00	1.030.224.000,00
13	SELUDAU	2.875.852.894,00	2.876.278.031,09	714.482.000,00	714.482.000,00
14	MENJELUTUNG	3.039.357.031,00	3.039.337.820,09	1.029.035.000,00	1.029.035.000,00
15	SESAYAP SELOR	2.879.100.384,00	2.878.933.057,09	714.098.000,00	564.549.200,00
16	TANAH MERAH	2.647.708.026,00	2.647.540.699,09	836.921.000,00	836.921.000,00
17	TENGKU DACING	2.978.407.731,00	2.978.240.404,09	859.488.000,00	690.699.000,00
18	SAMBUNGAN	2.750.358.716,00	2.750.635.737,09	746.334.000,00	746.334.000,00
19	TANAH MERAH BARAT	3.145.803.465,00	3.145.488.022,09	795.482.000,00	696.130.000,00
20	SAMBUNGAN SELATAN	2.927.652.811,00	2.927.633.600,09	946.688.000,00	946.688.000,00
21	BUONG BARU	3.004.672.435,00	3.005.541.920,09	1.066.658.000,00	1.066.658.000,00
22	BEBAKUNG	2.500.532.666,00	2.500.661.571,09	748.826.000,00	748.826.000,00
23	KUJAU	2.444.233.344,00	2.444.066.017,09	710.075.000,00	710.075.000,00
24	MENDUPO	2.735.367.727,00	2.735.052.284,09	727.881.000,00	727.881.000,00
25	MANING	2.499.985.189,00	2.499.817.862,09	917.930.000,00	917.930.000,00
26	PERIUK	3.095.328.621,00	3.095.457.526,09	725.172.000,00	725.172.000,00
27	SEPUTUK	2.926.035.876,00	2.925.868.549,09	781.494.000,00	781.494.000,00
28	RIAN	2.780.413.391,00	2.780.246.064,09	679.989.000,00	679.989.000,00
29	BALAYAN ARI	2.784.377.527,00	2.784.210.200,09	744.438.000,00	744.438.000,00
30	RIAN RAYO	3.050.260.233,00	3.050.537.254,09	728.445.000,00	728.445.000,00
31	KAPUAK	2.788.916.475,00	2.788.749.148,09	678.660.000,00	678.660.000,00
32	SAPARI	2.487.602.474,00	2.487.879.495,09	596.697.000,00	596.697.000,00
TOTAL		**90.608.588.900,00**	**90.609.418.282,00**	**27.385.891.000,00**	**26.568.977.400,00**
Total Bantuan Keuangan Ke Desa					**117.994.479.900,00**
Total Realisasi Anggaran Dana Desa					**117.178.395.682**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Perintis No. 5 Rt. IV KM. I (Mess Guru) Tideng Pale

BERITA ACARA REKONSILIASI SALDO
ANTARA BUKU PEMBANTU KAS DAN REKENING KORAN KAS DAERAH
Nomor : 12/BA/BPKAD-KTT/XII/2025

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulanJanuari Dua Ribu Dua Puluh Enam, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersama BPD Kaltimtara Kantor Cabang Tana Tidung melakukan rekonsiliasi Saldo Daerah Kabupaten Tana Tidung antara Saldo yang tercatat di Rekening Koran dengan Buku Pembantu Kas Daerah Bendahara Umum Daerah. Dari hasil rekonsiliasi tersebut, ternyata terdapat perbedaan nilai saldo akhir Kas sebagai berikut :

Menurut Rekening Koran Saldo Akhir Kas Daerah per 31 Desember 2025	***343.429.299.450,43***
Menurut Buku Pembantu Kas Daerah Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025	***343.428.986.450,43***
Jumlah Selisih	**313.000,00**

No	RK	BPKD	URAIAN
1	*343.429.299.450,43*	343.428.986.450,43	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
3	(Rp313.000,00)		STS Pertanggungjawaban GU NIHIL Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung di Aplikasi Rp.20.257.900 namun di STS kan Rp.20.570.900 terdapat selisih Rp.313.000
	343.428.986.450,43	**343.428.986.450,43**	**TOTAL SALDO BPKD**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk kepentingan kevalidan data Saldo Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN UTARA
CABANG TIDENG PALE
PEMIMPIN

bankaltimtara

ILHAM AKBAR

Tideng Pale , 03 November 2025
Kepala BPKAD

Hj. EVIHAR, S.Sos
NIP. 19740628 200112 2 002

REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI TA 2025
JANUARI S/D DESEMBER 2025

PROGRAM : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	FKTP	RS D PRATAMA TANJUNG KERAMAT						JUMLAH			
		Pendapatan	Seharusnya Masuk	Belanja Jaspel		Belanja Operasional		Pendapatan	Seharusnya Masuk	Belanja Jaspel	Belanja Operasional
				Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah			Jumlah	Jumlah
A	**SALDO AWAL DI REKENING KORAN**							-			
B	DI KAS TUNAI BENDAHARA							-			
C	**SALDO AWAL DI KAS JKN**							-			
D	**SISA JASPEL 2024 (H - N)**							-			
E	**SISA DANA OPERASIONAL 2024 (I - O)**							-			
E.1	JANUARI							-	-	-	-
E.2	FEBRUARI	237.100						**237.100,00**	-	-	-
								-	-	-	-
E.3	MARET	309.100						**309.100,00**	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.4	APRIL	5.681.260						**5.681.260,00**	-		-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.5	MEI	5.933.950,00						**5.933.950,00**	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.6	JUNI	6.738.361,84						**6.738.361,84**	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.7	JULI	6.966.624,80						**6.966.624,80**	-	-	-
								-	-		-
								-	-	-	-
E.8	AGUSTUS	7.733.624,73						**7.733.624,73**	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.9	SEPTEMBER	8.085.796,43				5.1.02.01.01.0024	3.048.100	**8.085.796,43**	-	-	3.048.100,00
						5.1.02.01.01.0025	3.103.000	-	-	-	3.103.000,00
						5.1.02.01.01.0026	2.767.200	-	-	-	2.767.200,00
						5.1.02.01.01.0029	2.780.800	-	-	-	2.780.800,00
						5.1.02.01.01.0030	1.738.500	-	-	-	1.738.500,00
						5.1.02.02.01.0004	1.720.000	-	-	-	1.720.000,00

NO	FKTP	RS D PRATAMA TANJUNG KERAMAT						JUMLAH			
		Pendapatan	Seharusnya Masuk	Belanja Jaspel		Belanja Operasional		Pendapatan	Seharusnya Masuk	Belanja Jaspel	Belanja Operasional
				Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah			Jumlah	Jumlah
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.10	OKTOBER	9.149.026,72						**9.149.026,72**	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.11	NOVEMBER	10.050.839,78				5.1.02.01.01.0026	2.100.000	**10.050.839,78**	-	-	2.100.000,00
						5.1.02.01.01.0030	2.703.500	-	-	-	2.703.500,00
						5.1.02.02.01.0004	6.020.000	-	-	-	6.020.000,00
								-	-	-	-
								-	-	-	-
E.12	DESEMBER	10.932.802,00		5.1.01.02.06.0067	43.078.547	5.1.02.01.01.0026	522.200	**10.932.802,00**	-	43.078.547,40	522.200,00
						5.1.02.01.01.0029	521.400	-	-	-	521.400,00
						5.1.02.01.01.0030	1.477.000	-	-	-	1.477.000,00
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
F	**JUMLAH PENDAPATAN 2025**	**71.818.486,30**						**71.818.486,30**	**-**	**43.078.547,40**	**28.501.700,00**
G	**JUMLAH PENDAPATAN 2024 + 2025 (C + F)**							**71.818.486,30**			
H	**JUMLAH BELANJA JASPEL 2025**						**43.078.547,40**				**43.078.547,40**
I	**JUMLAH BELANJA DANA OPERASIONAL 2025**						**28.501.700,00**				**28.501.700,00**
J	**JUMLAH BELANJA 2025**						**71.580.247,40**				**71.580.247,40**
K	**SALDO KAS DI REKENING KORAN (M - L)**										**(71.580.247,40)**
L	SALDO DI KAS TUNAI BENDAHARA JKN						71.818.486,30				71.818.486,30
M	**SALDO AKHIR DI KAS JKN NERACA SIMDA (G Pendapatan - J)**										**238.238,90**
N	Dana Jaspel 2025 (F Seharusnya Masuk *60%)										-
O	Dana Operasional 2025 (F Seharusnya Masuk *40%)										-
P	Dana Jaspel 2025 (F Pendapatan *60%) + D										43.091.091,78
Q	Dana Operasional 2025 (F Pendapatan *40%) + E										43.091.091,78
R	SISA JASPEL SEHARUSNYA 2024 (N - H)										(43.078.547,40)
S	SISA DANA OPERASIONAL 2024 (O - I)										(28.501.700,00)
T	SISA JASPEL 2024 (P - H)										12.544,38
U	SISA DANA OPERASIONAL 2024 (Q - I)										14.589.391,78

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN DANA BOSP SD DAN SMP TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	Saldo Akhir LKPD 2024	Saldo Akhir Pajak LKPD 2024	Penerimaan			Total Penerimaan (Silpa + Reguler+ Afirmasi)	Realisasi Belanja						Total Belanja + Penyetoran Pajak Temuan BPK	SALDO (BKU)
					BOS Reg		Afirmasi / Kinerja		Pajak Bank	Adm. Bank	Penyetoran pajak temuan BPK sebelumnya	Belanja Operasional	Belanja Modal			
					Tahap I	Tahap II							Peralatan Mesin	Aset Tetep lainnya		
1	SDN TU 1 Tana Tidung	Tana Merah	0,34	-	179.670.000,00	179.670.000,00	50.750.000,00	410.090.000,34	-	-	-	301.125.000,00	50.302.300,00	56.801.100,00	408.228.400,00	1.861.600,34
2	SDN TU 2 Tana Tidung	Sesayap	18.648.600,55	-	136.165.000,00	125.705.400,00	22.500.000,00	303.019.000,55	-	-	-	142.889.150,00	103.562.200,00	36.572.200,00	283.023.550,00	19.995.450,55
3	SDN 001 Tana Tidung	Tideng Pale	24.808.975,00	-	247.470.000,00	233.329.137,00	-	505.608.112,00	-	-	-	231.029.240,00	63.872.000,00	154.462.600,00	449.363.840,00	56.244.272,00
4	SDN 002 Tana Tidung	Sedulun	7.775.570,94	-	79.100.000,00	77.567.430,00	-	164.443.000,94	-	-	-	105.911.659,00	21.400.000,00	26.627.300,00	153.938.959,00	10.504.041,94
5	SDN 003 Tana Tidung	Tengku Dacing	4.605.000,00	-	39.720.000,00	39.160.000,00	22.500.000,00	105.985.000,00	-	-	-	48.567.500,00	37.495.000,00	12.050.000,00	98.112.500,00	7.872.500,00
6	SDN 004 Tana Tidung	Seputuk	722.172,00	-	27.685.000,00	26.285.000,00	677.828,00	55.370.000,00	-	-	-	27.962.800,00	13.800.000,00	5.960.000,00	47.722.800,00	7.647.200,00
7	SDN 005 Tana Tidung	Kapuak	-	-	42.375.000,00	41.527.500,00	-	83.902.500,00	-	-	-	69.305.900,00	3.130.000,00	10.610.600,00	83.046.500,00	856.000,00
8	SDN 006 Tana Tidung	Bandan Bikis	3.216.600,00		54.240.000,00	51.023.400,00	-	108.480.000,00	-	-	-	74.674.750,00	21.000.000,00	9.398.600,00	105.073.350,00	3.406.650,00
9	SDN 007 Tana Tidung	Bebakung	10.390.000,86	-	38.420.000,00	28.030.000,00	-	76.840.000,86	-	-	-	35.245.000,00	8.880.000,00	19.740.000,00	63.865.000,00	12.975.000,86
10	SDN 008 Tana Tidung	Sebidai	0,65	-	68.930.000,00	68.930.000,00	-	137.860.000,65	-	-	-	113.126.300,00	3.650.000,00	14.093.700,00	130.870.000,00	6.990.000,65
11	SDN 009 Tana Tidung	Sambungan	23.296.000,00	-	17.515.000,00	16.719.000,00	22.500.000,00	80.030.000,00	-	-	-	33.793.650,00	31.100.000,00	4.521.700,00	69.415.350,00	10.614.650,00
12	SDN 010 Tana Tidung	Sesayap Hilir	2.766.121,29	-	87.010.000,00	84.243.879,00	-	174.020.000,29	-	-	-	99.092.436,00	49.300.000,00	19.550.000,00	167.942.436,00	6.077.564,29
13	SDN 011 Tana Tidung	Seludau	880.650,00	-	25.990.000,00	25.109.350,00	-	51.980.000,00	-	-	-	23.193.135,00	10.800.000,00	12.799.600,00	46.792.735,00	5.187.265,00
12	SDN 012 Tana Tidung	Sebawang	0,61	-	31.075.000,00	31.075.000,00	-	62.150.000,61	-	-	-	36.346.000,00		24.322.000,00	60.668.000,00	1.482.000,61
15	SDN 013 Tana Tidung	Tideng Pale Timur	1.088.700,09	-	167.805.000,00	166.716.300,00	36.250.000,00	371.860.000,09	-	-	-	308.921.450,00	28.502.000,00	33.527.000,00	370.950.450,00	909.550,09
16	SDN 014 Tana Tidung	Mendupo	600.000,63	-	36.160.000,00	35.560.000,00	-	72.320.000,63	-	-	-	46.092.000,00	17.870.000,00	8.358.000,00	72.320.000,00	0,63
17	SDN 015 Tana Tidung	Sepala Dalung	0,20	-	37.290.000,00	37.290.000,00	-	74.580.000,20	-	-	-	54.217.659,00	10.600.000,00	8.252.500,00	73.070.159,00	1.509.841,20
18	SDN 016 Tana Tidung	Sapari	1.517.250,00	-	15.820.000,00	14.802.750,00	22.500.000,00	54.640.000,00	-	-	-	45.116.710,00	1.500.000,00	7.348.000,00	53.964.710,00	675.290,00
19	SDN 017 Tana Tidung	Sengkong	1.548.900,00	-	23.730.000,00	22.181.100,00	-	47.460.000,00	-	-	-	26.211.000,00	11.800.000,00	4.000.000,00	42.011.000,00	5.449.000,00
20	SDN 018 Tana Tidung	Kujau	8.163,03	-	25.990.000,00	25.990.000,00	22.500.000,00	74.488.163,03	-	-	-	60.853.300,00	5.850.000,00	7.776.700,00	74.480.000,00	8.163,03
21	SDN 019 Tana Tidung	Buong Baru	-	-	42.940.000,00	42.940.000,00	-	85.880.000,00	-	-	-	50.942.000,00	26.350.000,00	-	77.292.000,00	8.588.000,00
22	SDN 020 Tana Tidung	Trans Kujau	1.834,82	-	91.530.000,00	91.530.000,00	50.750.000,00	233.811.834,82	-	-	-	177.158.400,00	35.484.900,00	-	212.643.300,00	21.168.534,82
23	SDN 021 Tana Tidung	Gunawan	4.816.500,00	-	32.770.000,00	27.953.500,00	-	65.540.000,00	-	-	-	38.943.600,00	15.597.200,00	10.504.400,00	65.045.200,00	494.800,00
24	SDN 022 Tana Tidung	Menjelutung	1,68	-	75.468.000,00	75.468.000,00	-	150.936.001,68	-	-	-	124.957.000,00	10.000.000,00	14.933.900,00	149.890.900,00	1.045.101,68
25	SDN 023 Tana Tidung	Bebatu Supa	632.761,82	-	51.415.000,00	50.910.000,00	22.500.000,00	125.457.761,82	-	-	-	105.527.916,00	6.000.000,00	11.752.500,00	123.280.416,00	2.177.345,82
26	SDN 024 Tana Tidung	Rian Rayo	813,00	-	27.120.000,00	27.120.000,00	-	54.240.813,00	-	-	-	23.242.000,00	23.450.000,00	7.548.000,00	54.240.000,00	813,00
27	SDN 025 Tana Tidung	Selor Sesayap Hilir	2.020.000,00	-	40.115.000,00	39.845.000,00	-	81.980.000,00	-	-	-	61.925.000,00	771.000,00	10.074.000,00	72.770.000,00	9.210.000,00
28	SMPN TU 1 Tana Tidung	Tideng Pale	21.084.644,83	-	184.800.000,00	178.953.361,00	-	384.838.005,83	-	-	-	322.500.084,00	4.500.000,00	39.451.000,00	366.451.084,00	18.386.921,83
29	SMPN TU 2 Tana Tidung	Sesayap	14.676.000,00	-	161.700.000,00	158.984.000,00	36.250.000,00	371.610.000,00	-	-	-	279.464.000,00	28.330.400,00	59.988.900,00	367.783.300,00	3.826.700,00
30	SMPN 1 Tana Tidung	Tana Merah	16.913.000,00	-	100.800.000,00	98.650.000,00	35.000.000,00	251.363.000,00	-	-	-	171.881.200,00	45.470.000,00	26.780.500,00	244.131.700,00	7.231.300,00
31	SMPN 2 Tana Tidung	Bandan Bikis	1.412.308,00	-	45.500.000,00	44.088.000,00	36.250.000,00	127.250.308,00	-	-	-	84.771.000,00	3.008.900,00	9.797.000,00	97.576.900,00	29.673.408,00
32	SMPN 3 Tana Tidung	Bebakung	-	-	114.100.000,00	114.100.000,00	50.750.000,00	278.950.000,00	-	-	-	149.197.000,00	101.010.000,00	27.940.000,00	278.147.000,00	803.000,00
33	SMPN 4 Tana Tidung	Tengku Dacing	23.284.000,00	-	49.200.000,00	48.400.000,00	35.000.000,00	155.884.000,00	-	-	-	114.936.200,00	21.514.000,00	14.843.800,00	151.294.000,00	4.590.000,00
34	SMPN 5 Tana Tidung	Sapari	384,06	-	23.100.000,00	23.100.000,00	35.000.000,00	81.200.384,06	-	-	-	67.802.900,00	6.217.800,00	7.109.300,00	81.130.000,00	70.384,06
35	SMPN 6 Tana Tidung	Kapuak	24.444.219,57	-	289.800.000,00	278.005.840,00	35.000.000,00	627.250.059,57	-	-	-	474.735.731,00	6.000.000,00	14.625.000,00	495.360.731,00	131.889.328,57
36	SMPN 7 Tana Tidung	Manjelutung	-	-	49.200.000,00	49.200.000,00	-	98.400.000,00	-	-	-	82.306.700,00	6.250.000,00	9.843.300,00	98.400.000,00	-
PPh Ps. 23 yang disetor melampaui tahun anggaran																**374.960,00**
PPn yang disetor melampaui tahun anggran																**1.691.392,00**
JUMLAH			**211.159.173,97**	**-**	**2.761.718.000,00**	**2.680.162.947,00**	**536.677.828,00**	**6.189.717.948,97**	**-**	**-**	**-**	**4.213.965.370,00**	**834.367.700,00**	**741.963.200,00**	**5.790.296.270,00**	**399.421.678,97**

SIMULASI PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG RETREBUSI BERDASARKAN UMUR PIUTANG

No.	OPD	Uraian	Tanggal	Jatuh Tempo	Bulan	Status	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	< 1 Tahun 0,5% (Lancar)	1 s.d. 2 Tahun 10% (Kurang Lancar)	2 s.d. 5 Tahun 50% (Diragukan)	> 5 Tahun 100% (Macet)	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025 (Unaudited)	Piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
A	**Piutang Pajak**												
1	**Piutang Pajak Restoran**												
	BPKAD	RUMAH MAKAN SEDERHANA	14-Nov-25	31 Desember 2025	2	Lancar	420.000,00	2.100,00				2.100,00	417.900,00
		WR. AMPERA BUNDO	03 Juli 2025	31 Desember 2025	6	Lancar	600.000,00	3.000,00				3.000,00	597.000,00
		Jumlah (1)					**1.020.000,00**	**5.100,00**				**5.100,00**	**1.014.900,00**
2	**Piiutang Pajak Reklame**						392.376,00					-	392.376,00
	BPKAD	PT. GLOBAL JET EXPRESS	19/09/2025	31 Desember 2025	4	Lancar	706.275,00	3.531,38				3.531,38	702.743,63
		PT. PLN CAB. TIDENG PALE	23-04-2025	31 Desember 2025	9	Lancar	196.188,00	980,94				980,94	195.207,06
		PT. PLN CAB. TIDENG PALE	27-02-2024	31 Desember 2025	23	Kurang Lancar	196.188,00	-	19.618,80			19.618,80	176.569,20
		Jumlah (2)					**1.098.651,00**	**4.512,32**	**19.618,80**			**24.131,12**	**1.074.519,89**
3	**Piutang Pajak Yang Dihasilkan**				26.875,08	3.201,80	45.600.520,00	228.002,72	228.230,10				
	BPKAD	JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	12-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	45.476,00	227,38				227,38	45.248,62
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	92.846,00	464,23				464,23	92.381,77
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	556.373,00	2.781,87				2.781,87	553.591,13
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	92.846,00	464,23				464,23	92.381,77
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	556.373,00	2.781,87				2.781,87	553.591,13
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	678.145,00	3.390,73				3.390,73	674.754,27
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	139.035,00	695,18				695,18	138.339,82
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	678.145,00	3.390,73				3.390,73	674.754,27
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	139.035,00	695,18				695,18	138.339,82
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	92.846,00	464,23				464,23	92.381,77
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	556.373,00	2.781,87				2.781,87	553.591,13
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	526.980,00	2.634,90				2.634,90	524.345,10
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	526.980,00	2.634,90				2.634,90	524.345,10
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	526.980,00	2.634,90				2.634,90	524.345,10
		PT. ADINDO INHUTANI LESTARI	14-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	212.052,00	1.060,26				1.060,26	210.991,74
		PT. USAHA KALTIM MANDIRI	20-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	125.972,00	629,86				629,86	125.342,14
		PT. USAHA KALTIM MANDIRI	20-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	94.479,00	472,40				472,40	94.006,60
		PT. USAHA KALTIM MANDIRI	20-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	94.479,00	472,40				472,40	94.006,60
		PT. USAHA KALTIM MANDIRI	20-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	130.171,00	650,86				650,86	129.520,14
		PT. USAHA KALTIM MANDIRI	20-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	97.628,00	488,14				488,14	97.139,86
		PT. USAHA KALTIM MANDIRI	20-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	97.628,00	488,14				488,14	97.139,86
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	18-09-2025	31 Desember 2025	4	Lancar	52.369,00	261,85				261,85	52.107,15
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	769.958,00	3.849,79				3.849,79	766.108,21
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	677.169,00	3.385,85				3.385,85	673.783,15
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	818.384,00	4.091,92				4.091,92	814.292,08
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	756.226,00	3.781,13				3.781,13	752.444,87
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	772.398,00	3.861,99				3.861,99	768.536,01
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	772.829,00	3.864,15				3.864,15	768.964,85
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	732.488,00	3.662,44				3.662,44	728.825,56
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	747.093,00	3.735,47				3.735,47	743.357,53
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	723.395,00	3.616,98				3.616,98	719.778,02
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	673.090,00	3.365,45				3.365,45	669.724,55
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	724.748,00	3.623,74				3.623,74	721.124,26
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	768.611,00	3.843,06				3.843,06	764.767,94
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	753.776,00	3.768,88				3.768,88	750.007,12
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	684.466,00	3.422,33				3.422,33	681.043,67
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	835.953,00	4.179,77				4.179,77	831.773,23
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	828.485,00	4.142,43				4.142,43	824.342,57
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	848.311,00	4.241,56				4.241,56	844.069,44
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	864.591,00	4.322,96				4.322,96	860.268,04
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	629.730,00	3.148,65				3.148,65	626.581,35
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	857.496,00	4.287,48				4.287,48	853.208,52
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.009.249,00	5.046,25				5.046,25	1.004.202,75

No.	OPD	Uraian	Tanggal	Jatuh Tempo	Bulan	Status	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	< 1 Tahun 0,5% (Lancar)	1 s.d. 2 Tahun 10% (Kurang Lancar)	2 s.d. 5 Tahun 50% (Diragukan)	> 5 Tahun 100% (Macet)	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025 (Unaudited)	Piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.162.418,00	5.812,09				5.812,09	1.156.605,91
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	797.087,00	3.985,44				3.985,44	793.101,56
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	845.640,00	4.228,20				4.228,20	841.411,80
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	815.170,00	4.075,85				4.075,85	811.094,15
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	779.294,00	3.896,47				3.896,47	775.397,53
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	930.116,00	4.650,58				4.650,58	925.465,42
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	899.719,00	4.498,60				4.498,60	895.220,40
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	984.837,00	4.924,19				4.924,19	979.912,81
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	958.763,00	4.793,82				4.793,82	953.969,18
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	952.320,00	4.761,60				4.761,60	947.558,40
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.013.837,00	5.069,19				5.069,19	1.008.767,81
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.009.249,00	5.046,25				5.046,25	1.004.202,75
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.162.418,00	5.812,09				5.812,09	1.156.605,91
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.152.846,00	5.764,23				5.764,23	1.147.081,77
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.075.826,00	5.379,13				5.379,13	1.070.446,87
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.083.505,00	5.417,53				5.417,53	1.078.087,47
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.044.825,00	5.224,13				5.224,13	1.039.600,87
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.124.690,00	5.623,45				5.623,45	1.119.066,55
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.121.857,00	5.609,29				5.609,29	1.116.247,71
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.254.700,00	6.273,50				6.273,50	1.248.426,50
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.215.363,00	6.076,82				6.076,82	1.209.286,18
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.232.051,00	6.160,26				6.160,26	1.225.890,74
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.301.329,00	6.506,65				6.506,65	1.294.822,35
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.277.449,00	6.387,25				6.387,25	1.271.061,75
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.377.204,00	6.886,02				6.886,02	1.370.317,98
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.368.892,00	6.844,46				6.844,46	1.362.047,54
		JOB PERTAMINA MEDCO E & P SIMENGGARIS	27-10-2025	31 Desember 2025	3	Lancar	1.358.300,00	6.791,50				6.791,50	1.351.508,50
		Jumlah (3)					**51.661.362,00**	**258.306,98**				**258.306,98**	**51.403.055,02**
	Piutang Pajak Sarang Burung Wallet												
4	BPKAD	LIMAN CHANDRA KWE	07-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	2.500.000,00	12.500,00				12.500,00	2.487.500,00
		Liman Chandra Kwe	07-08-2025	31 Desember 2025	5	Lancar	2.500.000,00	12.500,00				12.500,00	2.487.500,00
		Jumlah (4)					**5.000.000,00**	**25.000,00**				**25.000,00**	**4.975.000,00**
	Piutang Pajak MBLB												
5	**BPKAD**	CV. KARYA UTAMA	02-07-2024	31 Desember 2025	18	Kurang Lancar	18.335.100,00	-	1.833.510,00			1.833.510,00	16.501.590,00
		Jumlah (5)					**18.335.100,00**		**1.833.510,00**			**2.400.123,96**	**129.257.700,04**
		Jumlah Penyisihan Piutang Pajak (6) = (1) + (2) + (3) + (5)					**77.115.113,00**	**292.919,30**	**1.853.128,80**	**0,00**	**0,00**	**2.712.662,06**	**187.725.174,95**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PER 31 DESEMBER 2025

NO	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG 31 DESEMBER 2024 / SALDO AWAL 01 JANUARI 2025	MUTASI TAHUN 2025			JUMLAH PEMBAYARAN POKOK + BUNGA	SALDO PIUTANG 31 DESEMBER 2025 / SALDO AWAL 01 JANUARI 2026	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (%)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 2025	KETERANGAN
			JUMLAH KETETAPAN PBB TAHUN 2025	PEMBAYARAN						
				PEMBAYARAN POKOK DI 2025	PEMBAYARAN BUNGA DI 2025					
	PBB - P2	Rp 2.928.684.715	Rp 812.903.344,00	Rp 381.340.986,00	Rp 19.323.042,00	Rp 400.664.028,00	Rp 3.360.247.073,00		Rp 1.764.900.751,96	
1	2025		Rp 812.903.344,00	Rp 250.702.953,00	Rp 3.159,00	Rp 250.706.112,00	Rp 562.200.391,00	0,5%	Rp 2.811.001,96	
2	2024	Rp 545.909.706		Rp 72.826.856,00	Rp 4.242.202,00	Rp 77.069.058,00	Rp 473.082.850,00	10%	Rp 47.308.285,00	
3	2023	Rp 438.567.822		Rp 20.523.742,00	Rp 4.035.979,00	Rp 24.559.721,00	Rp 418.044.080,00	50%	Rp 209.022.040,00	
4	2022	Rp 431.358.235		Rp 13.438.637,00	Rp 4.052.931,00	Rp 17.491.568,00	Rp 417.919.598,00	50%	Rp 208.959.799,00	
5	2021	Rp 392.894.703		Rp 8.493.647,00	Rp 2.612.666,00	Rp 11.106.313,00	Rp 384.401.056,00	50%	Rp 192.200.528,00	
6	2020	Rp 380.559.575		Rp 5.844.905,00	Rp 1.658.610,00	Rp 7.503.515,00	Rp 374.714.670,00	100%	Rp 374.714.670,00	
7	2019	Rp 386.591.076		Rp 4.387.524,00	Rp 1.300.244,00	Rp 5.687.768,00	Rp 382.203.552,00	100%	Rp 382.203.552,00	
8	2018	Rp 352.803.598		Rp 5.122.722,00	Rp 1.417.251,00	Rp 6.539.973,00	Rp 347.680.876,00	100%	Rp 347.680.876,00	

PENYISIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI

No	Uraian	Nama	Runeg ID	Nomor SKTJM	Tahun	Nilai	< 1 Tahun 0,5% (Lancar)	1 s.d 2 Thn 10% (Kurang Lancar)	>2 s.d. 3 Thn 50% (Diragukan)	>3 Thn 100% (Macet)	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025 (*Unaudited*)	Piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
I. BENDAHARA												
1	Sisa dana TUP TA 2010 sebesar Rp57.213.000,00 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan	SRY, A.Md, (Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan), NIP.198110082009041005, LHP BPK RI Nomor 42.B/LHP/SMD/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012	111215	tidak diketahui	2011	31.660.000,00	-	-	-	31.660.000,00	31.660.000,00	-
2	Sisa UP TA 2010 dan Digunakan Untuk Pembiayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp599.000.000,00	Bendahara Pengeluaran Bappeda TA 2010, LHP BPK RI Nomor 23.C/LHP/SMD/VII/2011 12 Juli 2011	1012149	tidak diketahui	2010	599.590.000,00	-	-	-	599.590.000,00	599.590.000,00	-
Jumlah						**631.250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**631.250.000,00**	**631.250.000,00**	**-**
II. BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN												
1	Pembayaran Tunjangan Tidak Sesuai Ketentuan	JR (RSUD)	10623189	072/SKTJM/INSP-KTT	2025	1.122.112,00	5.610,56	-	-	-	5.610,56	1.116.501,44
2	kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas menyetorkan ke Kas Daerah	IE (DISDIKBUD)	10613177	241/SKTJM/INSP-KTT	2025	170.000,00	850,00	-	-	-	850,00	169.150,00
3	kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas menyetorkan ke Kas Daerah	NM (DISDIKBUD)	10613177	243/SKTJM/INSP-KTT	2025	790.000,00	3.950,00	-	-	-	3.950,00	786.050,00
4	kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas menyetorkan ke Kas Daerah	NM (DISDIKBUD)	10613177	253/SKTJM/INSP-KTT	2025	1.070.400,00	5.352,00	-	-	-	5.352,00	1.065.048,00
5	Penyelesaian Permasalahan Terkait Kejelasan Pendapatan, Belanja Tidak Dipertanggungjawabkan, Kewajaran Nilai SiLPA dan Penyajian Akun Akun yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Tahun Berjalan Belum Memadai (Rekomendasi A)	ISML (Disdik) NIP 19650510 199512 1 005 43.C/LHP/SMD/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013	1037507	041/SKTJM/INSP-KTT/IV/2017	2017	6.803.000,00	-	-	-	6.803.000,00	6.803.000,00	-
6	Penyelesaian Permasalahan Terkait Kejelasan Pendapatan, Belanja Tidak Dipertanggungjawabkan, Kewajaran Nilai SiLPA dan Penyajian Akun Akun yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Tahun Berjalan Belum Memadai (Rekomendasi A)	PA NIP 19710614 200212 1 006 43.C/LHP/SMD/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013	1037507	042/SKTJM/INSP-KTT/I/2019	2019	89.489.000,00	-	-	-	89.489.000,00	89.489.000,00	-
7	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Honorarium, Belanja Jasa Konsultansi, dan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	HRS, ST NIP 19710629 199203 1 007 70C/LHP/XIX.TJS/V/2021 5 Mei 2021	Runeg Baru 10225629 Runeg lama: 1279378	050/SKTJM/INSP-KTT/IX/2022	2022	30.435.000,00	-	-	-	30.435.000,00	30.435.000,00	-
8	Kemahalan Harga pada Pengadaan Printer Sebesar Rp. 16.200.000,00	TG, A.Md (BPKAD) NIP 19750717 200904 1 002 Nomor LHP : 700/04/LHP-Reguler/IV/2015, Tanggal 01 April 2015	1140472	046/SKTJM/INSP-KTT/I/2022	2022	11.200.000,00	-	-	-	11.200.000,00	11.200.000,00	-
9	Belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Ir. H. AF (Kepala Bappeda KTT) LHP BPK RI nomor 30.B/LHP/XIX.SMD/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010	1021905	tidak diketahui	2010	101.777.500,00	-	-	-	101.777.500,00	101.777.500,00	-
10	Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Melebihi Ketentuan	Pimpinan dan Anggota DPRD KTT LHP BPK RI nomor 30.C/LHP/XIX.SMD/VI/2010, 7 Juni 2010	1021908	tidak diketahui	2010	218.672.000,00	-	-	-	218.672.000,00	218.672.000,00	-
11	Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar Rp. 348.620.995,00 tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah serta Pj.Bupati mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan pemotongan TPP melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	PNS a.n. Sdra.H, Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 31.350.000,00 b. PNS a.n. Sdra,Ir. H. AF, Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp.61.490.000,00 c. 23 Pejabat Eselon yang dilantik sebesar Rp.33.162.000,00, dan d. Sdra.Ir.H. ABY sebesar Rp. 137.618.995,00 serta Sdra.Drs. S sebesar Rp. 85.000.000,00. LHP BPK RI nomor 05.C/LHP/XIX.SMD/V/2016, tanggal 12 Mei 2016	1054149	tidak diketahui	2015	142.058.495,00	-	-	-	142.058.495,00	142.058.495,00	-
Jumlah						**603.587.507,00**	**15.762,56**	**-**	**-**	**600.434.995,00**	**600.450.757,56**	**3.136.749,44**
TOTAL I + II						**1.234.837.507,00**	**15.762,56**	**-**	**-**	**1.231.684.995,00**	**1.231.700.757,56**	**3.136.749,44**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Keterangan	Tanggal Kontrak	Lama Kontrak	OPD	1 tahun (LRA)	per bulan	awal perjanjian	Beban Sewa		Beban sewa dibayar dimuka
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = 3 - 7
1	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**				**655.240.000,00**	**54.603.333,33**			**548.016.666,67**	**107.223.333,33**
a	Sewa Rumah Kantor Perwakilan KTT di Tanjung selor	1 Agustus 2025 - 31 Juli 2026	1 tahun	Bagian Umum Setda	105.240.000,00	8.770.000,00	01 August	5	43.850.000,00	61.390.000,00
b	Sewa Rumah Kantor Perwakilan KTT di Jakarta	5 Februari 2025 - 5 Februari 2026	1 tahun	Bagian Umum Setda	550.000.000,00	45.833.333,33	05 February	11	504.166.666,67	45.833.333,33
2	**Belanja Sewa Bangunan Gudang**				**109.000.000,00**	**9.234.848,48**			**44.833.333,33**	**64.166.666,67**
a	Sewa Gedung Arsip/Tempat Penyimpanan Arsip	26 Nov 2025 - 26 Nov 2026	1 tahun	Bagian Perekonomian dan Kesra setda	17.000.000,00	1.416.666,67	26 November	2	2.833.333,33	14.166.666,67
b	Sewa Gudang Logistik	17 Agustus 2025 - 17 Agustus 2026	1 tahun	Bagian Umum Setda	24.000.000,00	2.000.000,00	17 August	5	10.000.000,00	14.000.000,00
c	Sewa Bangunan Gudang Arsip	1 Oktober 2025 - 1 Oktober 2026	1 tahun	Bagian Pemerintahan Setda	24.000.000,00	2.000.000,00	01 October	3	6.000.000,00	18.000.000,00
d	Sewa Bangunan Gudang	27 Oktober 2025 - 27 Oktober 2026	1 tahun	Bagian Hukum Setda	24.000.000,00	2.000.000,00	03 October	3	6.000.000,00	18.000.000,00
e	Sewa Bangunan Gudang Arsip	15 Februari - 31 Desember 2025	11 bulan	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	20.000.000,00	1.818.181,82	18 February	11	20.000.000,00	-
3	**Belanja Sewa Bangunan Parkir**				**27.000.000,00**	**2.250.000,00**			**11.250.000,00**	**15.750.000,00**
a	Sewa Bangunan Tempat Parkir	17 Agustus 2025 - 17 Agustus 2026	1 tahun	Bagian Umum Setda	27.000.000,00	2.250.000,00	17 August	5	11.250.000,00	15.750.000,00
4	**Belanja Sewa Asrama**				**378.850.000,00**	**31.570.833,33**			**260.925.000,00**	**117.925.000,00**
a	Sewa Asrama Mahasiswa Putra KTT di Bulungan	21 April 2025 - 21 April 2026	1 tahun	Bagian Perekonomian dan Kesra	58.300.000,00	4.858.333,33	21 April	9	43.725.000,00	14.575.000,00
b	Sewa Asrama Mahasiswa Putra KTT di Tarakan	1 Juni 2025 -1 Juni 2026	1 tahun	Bagian Perekonomian dan Kesra setda	77.700.000,00	6.475.000,00	01 June	7	45.325.000,00	32.375.000,00
c	Sewa Asrama Mahasiswi Putri KTT di Tarakan	1 April 2025 - 1 April 2026	1 tahun	Bagian Perekonomian dan Kesra setda	100.000.000,00	8.333.333,33	01 April	9	75.000.000,00	25.000.000,00
d	Sewa Asrama Putra KTT I di Samarinda	4 Maret 2025 - 4 Maret 2026	1 tahun	Bagian Perekonomian dan Kesra setda	55.500.000,00	4.625.000,00	04 March	10	46.250.000,00	9.250.000,00
e	Sewa Asrama Putra KTT II di Samarinda	10 Maret 2025 -10 Maret 2026	1 tahun	Bagian Perekonomian dan Kesra setda	49.350.000,00	4.112.500,00	10 March	10	41.125.000,00	8.225.000,00
f	Sewa Asrama Pelajar di Desa Tanah Merah	22 Okt 2025 - 22 Okt 2026	1 tahun	Bagian Perekonomian dan Kesra setda	38.000.000,00	3.166.666,67	22 October	3	9.500.000,00	28.500.000,00
5	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya**				**115.000.000,00**	**10.333.333,33**			**85.333.333,33**	**29.666.666,67**
a	Sewa Rumah Kantor Perwakilan KTT di Tarakan	4 Maret 2025 - 4 Maret 2026	1 tahun	Bagian Umum Setda	70.000.000,00	5.833.333,33	04 March	10	58.333.333,33	11.666.666,67
b	Sewa Gudang Logistik	Juli 2025 - April 2026	10 bulan	Dinsos PMD	45.000.000,00	4.500.000,00	3 July	6	27.000.000,00	18.000.000,00
6	**Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal**				**77.000.000,00**	**6.416.666,67**			**30.500.000,00**	**46.500.000,00**
a	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Tarakan	10 Oktober 2025-10 Oktober 2026	1 tahun	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	4.166.666,67	10 October	3	12.500.000,00	37.500.000,00
b	Sewa Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) di Tanjung Selor	22 Mei 2025 - 22 Mei 2026	1 tahun	Dinas Kesehatan	27.000.000,00	2.250.000,00	22 May	8	18.000.000,00	9.000.000,00
Total					**1.362.090.000,00**	**114.409.015,15**			**980.858.333,33**	**381.231.666,67**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

LAPORAN PERSEDIAAN TAHUN 2025

	KODE REKENING	1.1.7.01.01.01	1.1.7.01.01.02	1.1.7.01.01.04	1.1.7.01.01.05	1.1.7.01.01.1	1.1.7.01.01.12	1.1.7.01.02.01	1.1.7.01.02.03	1.1.7.01.02.04	1.1.7.01.02.07	1.1.7.01.02.1	1.1.7.01.03.01	1.1.7.01.03.02	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.04	1.1.7.01.03.05	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.09	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.12	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	1.1.7.01.04.0	1.1.7.01.05.01	1.1.7.01.07.01	1.1.7.01.09.01	1.1.7.02.01.04	1.1.7.02.02.0	1.1.7.01.07.03	1.1.7.02.02.03	
NO	NAMA OPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG GAS	BAHAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	SUKU CADANG LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK	BENDA POS	PERSEDIAAN DOKUMEN/ ADMINISTRASI TENDER	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	SUVENIR/ CENDERA MATA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT OBATAN LAINNYA	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	NATURA	Persediaan untuk tujuan strategis/Barjaga-Jaga	KOMPONEN RAMBU-RAMBU	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	PIPA BAJA	TOTAL
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	49.911.085	19.607.000	6.585.000	334.500	600.000	-	32.754.000	1.250.000	10.861.200	850.000	-	409.372.878	200.704.495	29.932.000	5.202.000	320.000	44.734.280	183.458.012	53.652.500	22.157.000	84.867.280	3.240.000	67.925.987	20.918.000	229.800	5.110.197.003	8.412.000	-	-	500.000	-	-	6.368.576.019,61
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	1.904.991.203	-	-	-	-	-	47.775.212	30.588.208	4.436.000	8.600.000	-	-	43.762.274	46.882.345	-	-	-	-	5.337.072.704	-	-	181.240.104	-	-	-	-	-	7.605.348.050,27
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14.709.599.350	36.341.400	2.109.000	-	-	-	-	-	-	-	7.770.000	-	-	-	-	-	-	6.313.053	23.078.010	9.869.010	-	-	-	-	-	105.320.070.318	-	-	-	-	-	-	120.115.150.140,52
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000	-	1.181.800	5.721.500	1.275.000	-	-	-	10.050.000	-	-	-	-	228.249.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.717.600,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.296.000	-	-	25.487.000	-	-	-	-	-	2.990.600	52.773.600,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.000	2.588.000	-	-	-	1.362.000	318.100	-	-	-	-	-	-	-	1.809.000	1.575.400	-	-	-	-	-	8.354.500,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000	630.000	-	-	-	1.981.350	1.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	-	-	-	-	-	4.245.350,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.500	1.960.000	5.163.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.197.900,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.023.417	645.000	97.381.125	-	-	251.793.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.843.078,75
11	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000	-	-	-	-	101.826.500	-	-	-	-	-	-	31.434.038	-	-	705.665.850	-	-	-	842.176.388,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.500.000,00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.000	385.000	-	-	-	1.596.000	149.000	1.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.834.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000	-	-	-	-	199.800	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.800,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.328.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.520.000	-	-	-	-	-	-	39.848.300,00
16	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	-	39.021.819	-	-	-	2.733.500	-	-	-	-	-	607.725	4.031.000	-	-	-	2.325.000	1.029.468	1.309.800	1.098.900	-	-	1.892.500	37.161.794	-	124.385.445	-	45.448	-	-	34.585.000	-	250.227.399,00
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.480.000	4.318.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.798.514,00
18	Bagian Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.833.000	4.777.000	6.575.000	-	-	-	20.845.000	5.670.000	-	-	975.000	-	-	-	127.950.000	-	-	-	-	-	-	176.625.000,00
19	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.900	-	-	-	-	-	141.900,00
20	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.035	1.006.800	-	500.000	-	1.417.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.363	-	-	-	-	-	3.574.148,00
22	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	477.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.477.300,00
24	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.171	133.200	-	-	-	-	1.879.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570.746,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.723.000	79.600.000	-	-	101.547.000	39.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.040.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.400	790.000	-	-	-	2.100.000	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.400,00
28	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185.000	1.789.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.974.000,00
29	Kecamatan Sesayap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.009.400	-	-	-	12.879.175	6.163.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.052.354,00
30	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.400	126.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.300,00
31	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00
32	Kecamatan Betayau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.100	-	-	-	-	-	124.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.100	-	876.600,00
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.282.050	2.656.000	-	-	-	4.898.000	1.545.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.381.550,00
	TOTAL	############	94.970.219,00	8.694.000,00	334.500,00	########	1.907.724.703,30	41.754.000,00	1.250.000,00	10.861.200,00	2.090.000,00	#########	482.876.287,80	366.731.503,10	231.931.039,00	##########	320.000,00	426.634.291,75	316.325.761,27	272.188.154,80	33.124.910,00	84.867.280,00	4.215.000,00	322.363.787,00	5.395.152.497,65	229.800,00	############	192.199.767,20	45.448,00	705.665.850,00	500.000,00	35.175.100,00	2.990.600,00	136.500.250.938,15

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERSEDIAAN RUSAK/USANG/KEDALUWARSA
TAHUN 2025

A	INSTALASI FARMASI KABUPATEN						Rp 293.127.152	Obat	
No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah		Kedaluwarsa	Keterangan
1	1.1.7.01.04.01.085	HYDROCHLORTIACID 25 MG	3.700	TABLET	Rp 149	Rp 551.300		Januari 2025	Obat Reguler
2	1.1.7.01.04.01.095	KETOKONAZOL 200MG	1	TABLET	Rp 530	Rp 530		Januari 2025	Obat Reguler
3	1.1.7.01.04.01.095	KETOKONAZOL 200MG	599	TABLET	Rp 440	Rp 263.554		Januari 2025	Obat Reguler
4	1.1.7.01.04.01.095	KETOKONAZOL 200MG	1.000	TABLET	Rp 390	Rp 390.000		Januari 2025	Obat Reguler
5	1.1.7.01.04.01.109	METOCLOPRAMID INJ	1	AMPUL	Rp 1.839	Rp 1.839		Januari 2025	Obat Reguler
6	1.1.7.01.04.02.184	SUCTION CATHETER NO. 14	11	PIECES	Rp 5.214	Rp 57.354		Januari 2025	Obat Reguler
7	1.1.7.01.04.02.184	SUCTION CATHETER NO. 14	2	PIECES	Rp 5.214	Rp 10.428		Januari 2025	Obat Reguler
8	1.1.7.01.04.02.185	SUCTION CATHETER NO. 16	3	PIECES	Rp 5.214	Rp 15.642		Januari 2025	Obat Reguler
9	1.1.7.01.04.01.206	Bisoprolol 5 Mg	3.480	Tablet	Rp 940	Rp 3.271.200		Februari 2025	Obat Reguler
10	1.1.7.01.04.01.206	Bisoprolol 5 Mg	1.530	Tablet	Rp 940	Rp 1.438.200		Februari 2025	Obat Reguler
11	1.1.7.01.04.02.046	DISPOSIBLE 5 ML	200	PIECES	Rp 661	Rp 132.200		Februari 2025	Obat Reguler
12	1.1.7.01.04.02.046	DISPOSIBLE 5 ML	1.780	PIECES	Rp 1.260	Rp 2.242.800		Februari 2025	Obat Reguler
13	1.1.7.01.04.01.132	PREDNISON 5 MG	22.200	TABLET	Rp 112	Rp 2.486.400		Februari 2025	Obat Reguler
14	1.1.7.01.04.01.132	PREDNISON 5 MG	1.600	TABLET	Rp 107	Rp 171.200		Februari 2025	Obat Reguler
15	1.1.7.01.04.01.201	Bisoprolol Fumarat Tab 2,5 Mg	6.200	Tablet	Rp 491	Rp 3.044.200		Maret 2025	Obat Reguler
16	1.1.7.01.04.01.072	FUROSEMIDE 40 MG	18.300	TABLET	Rp 143	Rp 2.609.397		Maret 2025	Obat Reguler
17	1.1.7.01.04.02.033	CATHETER KARET 3 WAY NO.24	2	PIECES	Rp 33.779	Rp 67.558		April 2025	Obat Reguler
18	1.1.7.01.04.01.231	MONSON TB	4	BOTOL	Rp 1.502.180	Rp 6.008.720		April 2025	Obat Reguler
19	1.1.7.01.04.01.168	STESOLID DIAZEPAM ENEMA 5 MG/2,5 ML	105	TUBE	Rp 13.546	Rp 1.422.330		April 2025	Obat Reguler
20	1.1.7.01.04.02.1.032	3M 7423 ETCHANT GEL VIAL 9 ML	3	BOTOL	Rp 230.050	Rp 690.150		Juni 2025	Obat Reguler
21	1.1.7.01.04.02.285	DILUENT M-53 20 LT	2	BOTOL	Rp 2.710.620	Rp 5.421.240		Juni 2025	Obat Reguler
22	1.1.7.01.04.02.285	DILUENT M-53 20 LT	2	BOTOL	Rp 2.710.620	Rp 5.421.240		Juni 2025	Obat Reguler
23	1.1.7.01.04.02.1.109	0-ZYME 5 LITER	3	GALON	Rp 816.000	Rp 2.448.000		Juli 2025	Obat Reguler
24	1.1.7.01.04.02.1.113	HB TEST TRIPS @ 50 STRIPS (KESMAS)	19	BOX	Rp 413.100	Rp 7.848.900		Juli 2025	Obat Reguler
25	1.1.7.01.04.02.1.103	HB TESTING SYSTEM	10	BOX	Rp 976.800	Rp 9.768.000		Juli 2025	Obat Reguler
26	1.1.7.01.04.01.094	KETOKONAZOL CREAM 2 %	175	TUBE	Rp 3.768	Rp 659.479		Juli 2025	Obat Reguler
27	1.1.7.01.04.01.094	KETOKONAZOL CREAM 2 %	50	TUBE	Rp 2.584	Rp 129.200		Juli 2025	Obat Reguler
28	1.1.7.01.04.01.185	Magnesium sulfat injeksi 20%v (i.V)	30	Botol	Rp 4.970	Rp 149.100		Juli 2025	Obat Reguler
29	1.1.7.01.04.01.184	Triheksifenidil 2 mg	7.500	Tablet	Rp 63	Rp 472.500		Juli 2025	Obat Reguler
30	1.1.7.01.04.02.241	Denpro Orafil plus	3	BOX	Rp 76.600	Rp 229.800		Juli 2025	Obat Reguler
31	1.1.7.01.04.02.241	Denpro Orafil plus	3	BOX	Rp 76.600	Rp 229.800		Juli 2025	Obat Reguler
32	1.1.7.01.04.01.135	PYRANTEL 125 MG	2.500	TABLET	Rp 513	Rp 1.282.500		Agustus 2025	Obat Reguler
33	1.1.7.01.04.01.213	COTRIMOXAZOLE FORTE 960 Mg	1.000	TABLET	Rp 408	Rp 408.000		Oktober 2025	Obat Reguler
34	1.1.7.01.04.01.049	CLINDAMICYN 300	1.000	TABLET	Rp 1.390	Rp 1.390.000		Desember 2025	Obat Reguler
35	1.1.7.01.04.02.256	CODEFREE BLLOD GLUCO MONITORING SYSTEM	9	UNIT	Rp 221.000	Rp 1.989.000		Desember 2025	Obat Reguler
36	1.1.7.01.04.02.1.046	DENPRO ZINC F	1	DUS	Rp 215.350	Rp 215.350		Desember 2025	Obat Reguler
37	1.1.7.01.04.01.081	GLUKOSA 5% INFUS	60	FLACON	Rp 8.530	Rp 511.800		Desember 2025	Obat Reguler
38	1.1.7.01.04.01.081	GLUKOSA 5% INFUS	360	FLACON	Rp 8.530	Rp 3.070.800		Desember 2025	Obat Reguler
39	1.1.7.01.04.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	3	AMPUL	Rp 1.776	Rp 5.328		Desember 2025	Obat Reguler
40	1.1.7.01.04.01.170	FLUFENAZINE DEKONAT INJ 25 MG/ML (keswa)	10	AMPUL	Rp 63.500	Rp 635.000		Januari 2025	Obat Program
41	1.1.7.01.04.01.197	Mini Pil @100 BLISTER	300	Blister	Rp 4.017	Rp 1.205.100		Januari 2025	Obat Program
42	1.1.7.01.04.01.197	Mini Pil @100 BLISTER	1.490	Blister	Rp 4.017	Rp 5.985.330		Januari 2025	Obat Program
43	1.1.7.01.04.01.038	Oxitocin Injeksi	35	Ampul	Rp 1.448	Rp 50.680		Januari 2025	Obat Program
44	1.1.7.01.04.01.103	TRIHEXIPENIDIL 2 MG (keswa)	100	TABLET	Rp 63	Rp 6.300		Januari 2025	Obat Program
45	1.1.7.01.04.01.103	TRIHEXIPENIDIL 2 MG (keswa)	700	TABLET	Rp 63	Rp 44.100		Januari 2025	Obat Program
46	1.1.7.01.04.01.290	DHP ANAK (MALARIA)	6	Tablet	Rp 9.800	Rp 58.800		Februari 2025	Obat Program
47	1.1.7.01.04.01.094	Klorokuin 150 mg	600	Tablet	Rp 3.011	Rp 1.806.888		Februari 2025	Obat Program
48	1.1.7.01.04.01.038	Oxitocin Injeksi	228	Ampul	Rp 1.448	Rp 330.144		Februari 2025	Obat Program
49	1.1.7.01.04.01.038	Oxitocin Injeksi	100	Ampul	Rp 3.300	Rp 330.000		Februari 2025	Obat Program
50	1.1.7.01.04.01.001	Tablet tambah darah	100	Tablet	Rp 258	Rp 25.798		Februari 2025	Obat Program
51	1.1.7.01.04.01.236	ANTI DIFTERI SERUM (ADS)	2	VIAL	Rp 1.387.000	Rp 2.774.000		Mei 2025	Obat Program
52	1.1.7.01.04.01.007	Cadtridge GeneXprt	300	Buah	Rp 129.039	Rp 38.711.700		Mei 2025	Obat Program
53	1.1.7.01.04.01.173	LEVOTIROKSIN 50 Mg (KESNAK)	200	tablet	Rp 759	Rp 151.800		Mei 2025	Obat Program
54	1.1.7.01.04.01.173	LEVOTIROKSIN 50 Mg (KESNAK)	100	tablet	Rp 759	Rp 75.900		Mei 2025	Obat Program
55	1.1.7.01.04.01.173	LEVOTIROKSIN 50 Mg (KESNAK)	25	tablet	Rp 2.480	Rp 62.000		Mei 2025	Obat Program
56	1.1.7.01.04.01.055	Primaquin	40	Tablet	Rp 360	Rp 14.400		Mei 2025	Obat Program
57	1.1.7.01.04.01.022	Vitamin A 200.000 IU (Merah)	850	Kapsul	Rp 934	Rp 793.900		Mei 2025	Obat Program
58	1.1.7.01.04.01.123	Benzatin Penicillin 2,4 juta IU	3	Vial	Rp 43.892	Rp 131.676		Mei 2025	Obat Program
59	1.1.7.01.04.01.045	Vitamin K Injeksi (Fitomenadion)	67	Ampul	Rp 3.330	Rp 223.110		Maret 2025	Obat Program
60	1.1.7.01.04.01.045	Vitamin K Injeksi (Fitomenadion)	35	Ampul	Rp 3.818	Rp 133.630		Maret 2025	Obat Program

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
61	1.1.7.01.04.01.045	Vitamin K Injeksi (Fitomenadion)	100	Ampul	Rp 3.330	Rp 333.000	Maret 2025	Obat Program
62	1.1.7.01.04.01.226	ALBENDAZOLE SUSPENSI 10 ML	305	BOTOL	Rp 4.473	Rp 1.364.265	Juni 2025	Obat Program
63	1.1.7.01.04.01.261	AMINOFILIN 24 MG/ML INJEKSI	16	AMPUL	Rp 4.175	Rp 66.800	Juni 2025	Obat Program
64	1.1.7.01.04.01.055	Primaquin	30	Tablet	Rp 545	Rp 16.350	Juni 2025	Obat Program
65	1.1.7.01.04.01.055	Primaquin	100	Tablet	Rp 360	Rp 36.000	Juni 2025	Obat Program
66	1.1.7.01.04.01.050	Ethambutol 400 MG Tablet (TB)	168	Tablet	Rp 561	Rp 94.248	Juli 2025	Obat Program
67	1.1.7.01.04.01.137	MgSo4 20 %	50	Ampul	Rp 4.972	Rp 248.599	Juli 2025	Obat Program
68	1.1.7.01.04.01.066	MgSO4 40%	8	Ampul	Rp 5.661	Rp 45.288	Juli 2025	Obat Program
69	1.1.7.01.04.01.066	MgSO4 40%	30	Ampul	Rp 5.659	Rp 169.770	Juli 2025	Obat Program
70	1.1.7.01.04.01.066	MgSO4 40%	69	Ampul	Rp 5.659	Rp 390.470	Juli 2025	Obat Program
71	1.1.7.01.04.01.173	LEVOTIROKSIN 50 Mg (KESNAK)	25	tablet	Rp 759	Rp 18.975	Juli 2025	Obat Program
72	1.1.7.01.04.01.213	LOPINAVIR 200 MG + RITONAVIR 50 MG	2	BOTOL	Rp 623.618	Rp 1.247.237	Juli 2025	Obat Program
73	1.1.7.01.04.01.024	OAT Kategori I	20	Paket	Rp 679.320	Rp 13.586.400	Juli 2025	Obat Program
74	1.1.7.01.04.01.263	RAPID TEST HBeAG	1	Test	Rp 28.984	Rp 28.984	Juli 2025	Obat Program
75	1.1.7.01.04.01.267	TLD 300/300/50 Mg (HIV)	1	Botol	Rp 100.980	Rp 100.980	Juli 2025	Obat Program
76	1.1.7.01.04.01.031	Vaksin TD	10	Vial	Rp 23.000	Rp 230.003	Juli 2025	Obat Program
77	1.1.7.01.04.01.031	Vaksin TD	20	Vial	Rp 40.331	Rp 806.620	Juli 2025	Obat Program
78	1.1.7.01.04.01.077	Betametason cream	50	Tube	Rp 2.000	Rp 100.000	Agustus 2025	Obat Program
79	1.1.7.01.04.01.170	FLUFENAZINE DEKONAT INJ 25 MG/ML (keswa)	20	AMPUL	Rp 62.000	Rp 1.240.000	Agustus 2025	Obat Program
80	1.1.7.01.04.01.150	Haloperidol Dekanoat Injeksi 50 mg/ml (keswa)	10	Ampul	Rp 109.000	Rp 1.090.000	Agustus 2025	Obat Program
81	1.1.7.01.04.01.037	Mineral Mix	80	Sachet	Rp 4.772	Rp 381.760	Agustus 2025	Obat Program
82	1.1.7.01.04.01.302	RDT ANTIGEN COVID-19	25	TEST	Rp 16.250	Rp 406.250	Agustus 2025	Obat Program
83	1.1.7.01.04.01.098	RDT HIV 3	25	Test	Rp 7.455	Rp 186.372	Agustus 2025	Obat Program
84	1.1.7.01.04.01.256	Chlorpromazine Hcl 100 Mg (Keswa)	900	Tablet	Rp 597	Rp 537.300	Oktober 2025	Obat Program
85	1.1.7.01.04.01.256	Chlorpromazine Hcl 100 Mg (Keswa)	700	Tablet	Rp 520	Rp 364.000	Oktober 2025	Obat Program
86	1.1.7.01.04.01.256	Chlorpromazine Hcl 100 Mg (Keswa)	1.700	Tablet	Rp 597	Rp 1.014.900	Oktober 2025	Obat Program
87	1.1.7.01.04.01.137	MgSo4 20 %	15	Ampul	Rp 5.470	Rp 82.050	Oktober 2025	Obat Program
88	1.1.7.01.04.01.137	MgSo4 20 %	20	Ampul	Rp 4.973	Rp 99.460	Oktober 2025	Obat Program
89	1.1.7.01.04.01.060	Natrium Diklofenak 50 Mg	25	STRIPS	Rp 8.288	Rp 207.200	Oktober 2025	Obat Program
90	1.1.7.01.04.01.102	RDT Sifilis Trepocheck	25	Test	Rp 4.385	Rp 109.625	Oktober 2025	Obat Program
91	1.1.7.01.04.01.236	ANTI DIFTERI SERUM (ADS)	4	VIAL	Rp 1.387.000	Rp 5.548.000	Desember 2025	Obat Program
92	1.1.7.01.04.01.236	ANTI DIFTERI SERUM (ADS)	2	VIAL	Rp 1.390.000	Rp 2.780.000	Desember 2025	Obat Program
93	1.1.7.01.04.01.164	Evafirenz 600Mg	7	Botol	Rp 210.000	Rp 1.470.000	Oktober 2025	Obat Program
94	1.1.7.01.04.01.010	MDT-MB ANAK	12	Blister	Rp 33.282	Rp 399.384	Oktober 2025	Obat Program
95	1.1.7.01.04.01.043	Oxitetrasiklin Salep Mata	6	Tube	Rp 4.934	Rp 29.604	Oktober 2025	Obat Program
96	1.1.7.01.04.01.223	Rapid test Urine	75	Test	Rp 52.000	Rp 3.900.000	Oktober 2025	Obat Program
97	1.1.7.01.04.01.303	RDT FRAMBUSIA (SYPHILIS) (KUSTA)	25	TEST	Rp 6.100	Rp 152.500	Oktober 2025	Obat Program
98	1.1.7.01.04.01.303	RDT FRAMBUSIA (SYPHILIS) (KUSTA)	50	TEST	Rp 4.300	Rp 215.000	Oktober 2025	Obat Program
99	1.1.7.01.04.01.015	RDT HIV I	275	Test	Rp 6.565	Rp 1.805.257	Oktober 2025	Obat Program
100	1.1.7.01.04.01.015	RDT HIV I	150	Test	Rp 6.400	Rp 960.000	Oktober 2025	Obat Program
101	1.1.7.01.04.01.102	RDT Sifilis Trepocheck	625	Test	Rp 4.385	Rp 2.740.625	Oktober 2025	Obat Program
102	1.1.7.01.04.01.045	Vitamin K Injeksi (Fitomenadion)	15	Ampul	Rp 3.818	Rp 57.270	Oktober 2025	Obat Program
103	1.1.7.01.04.01.269	BAHAN PEMERIKSAAN MALARIA	4	PAKET	Rp 784.800	Rp 3.139.200	Desember 2025	Obat Program
104	1.1.7.01.04.01.250	Lidocain 2 % injeksi (KB)	18	Ampul	Rp 1.790	Rp 32.220	Desember 2025	Obat Program
105	1.1.7.01.04.01.250	Lidocain 2 % injeksi (KB)	9	Ampul	Rp 1.790	Rp 16.110	Desember 2025	Obat Program
106	1.1.7.01.04.01.245	Rapid Test Anti HBS	375	Test	Rp 3.875	Rp 1.453.125	Desember 2025	Obat Program
107	1.1.7.01.04.01.223	Rapid test Urine	100	Test	Rp 52.000	Rp 5.200.000	Desember 2025	Obat Program
108	1.1.7.01.04.01.053	RDT HIV 2	25	Test	Rp 6.400	Rp 160.000	Desember 2025	Obat Program
109	1.1.7.01.04.01.279	RDT LEPTOSPIRA IGM (ZOONOSIS)	20	TEST	Rp 21.143	Rp 422.857	Desember 2025	Obat Program
110	1.1.7.01.04.01.011	Reagen Zn	1	Paket	Rp 180.600	Rp 180.600	Desember 2025	Obat Program
111	1.1.7.01.04.01.052	Vitamin B6 25 mg (HIV)	500	Tablet	Rp 252	Rp 126.000	Desember 2025	Obat Program
112	1.1.7.01.04.01.052	Vitamin B6 25 mg (HIV)	300	Tablet	Rp 272	Rp 81.600	Desember 2025	Obat Program
113	1.1.7.01.04.01.141	Fenobarbital Injeksi 50mg/ml	18	Ampul	Rp 1.700	Rp 30.600	Desember 2025	Obat Program
114	1.1.7.01.04.01.141	Fenobarbital Injeksi 50mg/ml	20	Ampul	Rp 3.885	Rp 77.700	Desember 2025	Obat Program
115	1.1.7.01.04.01.198	Suntik 3 Bulan 1 cc	500	Vial	Rp 4.825	Rp 2.412.500	Desember 2025	Obat Program
116	1.1.7.01.04.01.021	Vitamin A 100.000 IU (Biru)	100	Kapsul	Rp 423	Rp 42.300	Desember 2025	Obat Program
117	1.1.7.01.04.01.023	Oseltamivir 75mg	480	Kapsul	Rp 7.000	Rp 3.360.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
118	1.1.7.01.04.01.023	Oseltamivir 75mg	10.000	Kapsul	Rp 7.000	Rp 70.000.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
119	1.1.7.01.04.01.023	Oseltamivir 75mg	3.000	Kapsul	Rp 7.000	Rp 21.000.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
120	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	1.000	Pieces	Rp 1.185	Rp 1.185.000	November 2025	Obat Ex Covid
121	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	1.900	Pieces	Rp 1.185	Rp 2.251.500	November 2025	Obat Ex Covid
122	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	200	Pieces	Rp 1.185	Rp 237.000	November 2025	Obat Ex Covid
123	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	800	Pieces	Rp 1.185	Rp 948.000	November 2025	Obat Ex Covid
124	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	400	Pieces	Rp 1.185	Rp 474.000	November 2025	Obat Ex Covid
125	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	200	Pieces	Rp 1.185	Rp 237.000	November 2025	Obat Ex Covid

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
126	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	900	Pieces	Rp 1.050	Rp 945.000	Desember 2025	Obat Ex Covid
127	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	1.000	Pieces	Rp 1.185	Rp 1.185.000	Desember 2025	Obat Ex Covid
128	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	4.200	Pieces	Rp 1.185	Rp 4.977.000	Desember 2025	Obat Ex Covid
129	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	200	Pieces	Rp 1.185	Rp 237.000	Desember 2025	Obat Ex Covid
130	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	700	Pieces	Rp 1.050	Rp 735.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
131	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	2.900	Pieces	Rp 1.050	Rp 3.045.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
132	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	1.600	Pieces	Rp 1.050	Rp 1.680.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
133	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	400	Pieces	Rp 1.050	Rp 420.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
134	1.1.7.01.04.02.090	ADS 0,5 ml	2.000	Pieces	Rp 1.050	Rp 2.100.000	Juli 2025	Obat Ex Covid
B	**RUMAH SAKIT TANJUNG KERAMAT**					**Rp 15.727.166**	**Obat**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**	**Kedaluwarsa**	
1	1.1.7.01.04.02.239	AUTOCHECK URIC ACID STRIPS	50	STRIPS	Rp 3.920	Rp 196.000	Desember 2025	Gudang
2	1.1.7.01.04.01.081	GLUKOSA 5% INFUS	17	FLACON	Rp 8.530	Rp 145.010	November 2025	Gudang
3	1.1.7.01.04.01.081	GLUKOSA 5% INFUS	1	FLACON	Rp 8.530	Rp 8.530	November 2025	Gudang
4	1.1.7.01.04.01.081	GLUKOSA 5% INFUS	40	FLACON	Rp 8.530	Rp 341.200	November 2025	Gudang
5	1.1.7.01.04.01.081	GLUKOSA 5% INFUS	10	FLACON	Rp 8.530	Rp 85.300	November 2025	Gudang
6	1.1.7.01.04.01.030	BETAMETHASONE KRIM 0,1 %	25	TUBE	Rp 2.800	Rp 70.000	Oktober 2025	Gudang
7	1.1.7.01.04.01.030	BETAMETHASONE KRIM 0,1 %	25	TUBE	Rp 2.750	Rp 68.750	Oktober 2025	Gudang
8	1.1.7.01.04.02.1.046	DENPRO ZINC F	1	DUS	Rp 215.350	Rp 215.350	Oktober 2025	Gudang
9	1.1.7.01.04.01.131	PIROXICAM 20 MG	500	TABLET	Rp 134	Rp 67.000	September 2025	Gudang
10	1.1.7.01.04.02.1.045	DENPRO ENDOSEAL	2	DUS	Rp 167.600	Rp 335.200	Agustus 2025	Gudang
11	1.1.7.01.04.01.092	KALSIUM GLUKONAT INJ	6	AMPUL	Rp 5.775	Rp 34.650	Agustus 2025	Gudang
12	1.1.7.01.04.01.186	Magnesium Sulfat Injeksi 40%v (i.v)	10	Botol	Rp 5.659	Rp 56.590	Agustus 2025	Gudang
13	1.1.7.01.04.01.186	Magnesium Sulfat Injeksi 40%v (i.v)	4	Botol	Rp 5.659	Rp 22.636	Agustus 2025	Gudang
14	1.1.7.01.04.01.024.1	OAT Kategori I	2	Paket	Rp 579.975	Rp 1.159.950	Agustus 2025	Gudang
15	1.1.7.01.04.01.139.1	RDT DBD IgG/IgM (VIROTEC)	20	TEST	Rp 37.670	Rp 753.400	Agustus 2025	Gudang
16	1.1.7.01.04.02.1.112	BIODINAMIKA TRICRESOLFORMALINA	1	BOX	Rp 82.150	Rp 82.150	Juli 2025	Gudang
17	1.1.7.01.04.01.071	FENOL GLYCEROL TT 10 %	15	BOTOL	Rp 6.095	Rp 91.425	Juli 2025	Gudang
18	1.1.7.01.04.01.135	PYRANTEL 125 MG	100	TABLET	Rp 513	Rp 51.300	Juli 2025	Gudang
19	1.1.7.01.04.02.241	Denpro Orafil plus	1	BOX	Rp 55.700	Rp 55.700	Juni 2025	Gudang
20	1.1.7.01.04.02.1.104	HB TEST STRIPS	1	BOX	Rp 413.000	Rp 413.000	Juni 2025	Gudang
21	1.1.7.01.04.01.185	Magnesium sulfat injeksi 20%v (i.V)	10	Botol	Rp 4.970	Rp 49.700	Juni 2025	Gudang
22	1.1.7.01.04.01.185	Magnesium sulfat injeksi 20%v (i.V)	9	Botol	Rp 4.970	Rp 44.730	Juni 2025	Gudang
23	1.1.7.01.04.02.1.109.1	O-ZYME 5 LITER	2	GALON	Rp 816.000	Rp 1.632.000	Juni 2025	Gudang
24	1.1.7.01.04.01.121	OXITOCIN INJEKSI	15	AMPUL	Rp 1.448	Rp 21.720	Juni 2025	Gudang
25	1.1.7.01.04.01.184	Triheksifenidil 2 mg	300	Tablet	Rp 63	Rp 18.900	Juni 2025	Gudang
26	1.1.7.01.04.01.226.1	ALBENDAZOLE SUSPENSI 10 ML	15	BOTOL	Rp 4.473	Rp 67.095	Mei 2025	Gudang
27	1.1.7.01.04.01.010	AMINOPHYLLIN INJ	10	INJEKSI	Rp 4.175	Rp 41.750	Mei 2025	Gudang
28	1.1.7.01.04.01.087.1	DIAZEPAM INJEKSI 5 MG/ML	3	AMPUL	Rp 1.545	Rp 4.635	Mei 2025	Gudang
29	1.1.7.01.04.02.072	GEL DOPLER	1	BOTOL	Rp 15.760	Rp 15.760	Mei 2025	Gudang
30	1.1.7.01.04.02.072	GEL DOPLER	3	BOTOL	Rp 15.760	Rp 47.280	Mei 2025	Gudang
31	1.1.7.01.04.01.168	STESOLID DIAZEPAM ENEMA 5 MG/2,5 ML	15	TUBE	Rp 13.546	Rp 203.190	Mei 2025	Gudang
32	1.1.7.01.04.01.138.1	AMPISILIN INJ	10	VIAL	Rp 10.340	Rp 103.400	April 2025	Gudang
33	1.1.7.01.04.02.033	CATHETER KARET 3 WAY NO.24	2	PIECES	Rp 33.779	Rp 67.558	April 2025	Gudang
34	1.1.7.01.04.01.032.1	CETERIZIN SIRUP	13	BOTOL	Rp 7.315	Rp 95.095	April 2025	Gudang
35	1.1.7.01.04.01.039	DHP	18	Tablet	Rp 2.851	Rp 51.318	April 2025	Gudang
36	1.1.7.01.04.01.087.1	DIAZEPAM INJEKSI 5 MG/ML	2	AMPUL	Rp 1.545	Rp 3.090	April 2025	Gudang
37	1.1.7.01.04.01.087.1	DIAZEPAM INJEKSI 5 MG/ML	2	AMPUL	Rp 1.876	Rp 3.752	April 2025	Gudang
38	1.1.7.01.04.01.055.1	Primaquin	30	Tablet	Rp 375	Rp 11.250	April 2025	Gudang
39	1.1.7.01.04.02.1.098	4931 F ESPE SUFLAX COUNTHING	2	BAG	Rp 116.700	Rp 233.400	Maret 2025	Gudang
40	1.1.7.01.04.02.1.098	4931 F ESPE SUFLAX COUNTHING	1	BAG	Rp 116.700	Rp 116.700	Maret 2025	Gudang
41	1.1.7.01.04.01.048.1	Artesunate Injeksi	2	Vial	Rp 88.989	Rp 177.978	Maret 2025	Gudang
42	1.1.7.01.04.01.200	Atorvastatin Film Coated 20 mg	300	Tablet	Rp 775	Rp 232.500	Maret 2025	Gudang
43	1.1.7.01.04.01.200	Atorvastatin Film Coated 20 mg	180	Tablet	Rp 775	Rp 139.500	Maret 2025	Gudang
44	1.1.7.01.04.01.201	BISOPROLOL FUMARAT TAB 2,5MG	300	TABLET	Rp 491	Rp 147.300	Maret 2025	Gudang
45	1.1.7.01.04.01.201	BISOPROLOL FUMARAT TAB 2,5MG	300	TABLET	Rp 491	Rp 147.300	Maret 2025	Gudang
46	1.1.7.01.04.01.201	BISOPROLOL FUMARAT TAB 2,5MG	100	TABLET	Rp 491	Rp 49.100	Maret 2025	Gudang
47	1.1.7.01.04.01.033	CAPTOPRIL 25 MG	100	TABLET	Rp 132	Rp 13.200	Maret 2025	Gudang
48	1.1.7.01.04.01.033	CAPTOPRIL 25 MG	500	TABLET	Rp 200	Rp 100.000	Maret 2025	Gudang
49	1.1.7.01.04.01.033	CAPTOPRIL 25 MG	200	TABLET	Rp 132	Rp 26.400	Maret 2025	Gudang
50	1.1.7.01.04.01.033	CAPTOPRIL 25 MG	300	TABLET	Rp 132	Rp 39.600	Maret 2025	Gudang
51	1.1.7.01.04.01.033	CAPTOPRIL 25 MG	300	TABLET	Rp 132	Rp 39.600	Maret 2025	Gudang
52	1.1.7.01.04.01.039	DHP	9	Tablet	Rp 2.851	Rp 25.659	Maret 2025	Gudang
53	1.1.7.01.04.01.069	FENITOIN INJ 50 MG/ML	10	AMPUL	Rp 4.015	Rp 40.150	Maret 2025	Gudang
54	1.1.7.01.04.01.072	FUROSEMIDE 40 MG	1400	TABLET	Rp 143	Rp 199.626	Maret 2025	Gudang
55	1.1.7.01.04.01.247	GENTAMICIN SALEP MATA	4	TUBE	Rp 17.750	Rp 71.000	Maret 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
56	1.1.7.01.04.01.045.1	VITAMIN K INJ(Fitomenadion)	20	AMPUL	Rp 3.330	Rp 66.600	Maret 2025	Gudang
57	1.1.7.01.04.01.045.1	VITAMIN K INJ(Fitomenadion)	7	AMPUL	Rp 3.330	Rp 23.310	Maret 2025	Gudang
58	1.1.7.01.04.02.1.088.1	1370A3 Espe Filtek Z250 UNIVERSAL RESTORATIVE	2	PIECES	Rp 226.100	Rp 452.200	Februari 2025	Gudang
59	1.1.7.01.04.02.1.036.1	3M 1470A3 Z250 XT REST SYR 3G LA/APAC/MEA	3	DUS	Rp 151.567	Rp 454.700	Februari 2025	Gudang
60	1.1.7.01.04.02.1.038.1	3M 51202 SINGLE BOND 2 RF LA/APAC	3	BOTOL	Rp 246.433	Rp 739.300	Februari 2025	Gudang
61	1.1.7.01.04.02.1.089	8100A3 ESPE FILTEK P60 RESTORATIVE SYSTEM	3	PIECES	Rp 171.100	Rp 513.300	Februari 2025	Gudang
62	1.1.7.01.04.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	30	AMPUL	Rp 1.199	Rp 35.970	Februari 2025	Gudang
63	1.1.7.01.04.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	14	AMPUL	Rp 1.199	Rp 16.786	Februari 2025	Gudang
64	1.1.7.01.04.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	2	AMPUL	Rp 1.199	Rp 2.398	Februari 2025	Gudang
65	1.1.7.01.04.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	15	AMPUL	Rp 1.776	Rp 26.640	Februari 2025	Gudang
66	1.1.7.01.04.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	10	AMPUL	Rp 1.199	Rp 11.990	Februari 2025	Gudang
67	1.1.7.01.04.02.046	DISPOSIBLE 5 ML	300	PIECES	Rp 1.260	Rp 378.000	Februari 2025	Gudang
68	1.1.7.01.04.02.046	DISPOSIBLE 5 ML	89	PIECES	Rp 1.260	Rp 112.140	Februari 2025	Gudang
69	1.1.7.01.04.02.081	GUEDEL AIRWAY 60 MM	1	PIECES	Rp 15.089	Rp 15.089	Februari 2025	Gudang
70	1.1.7.01.04.02.1.006	LORNE LABORATORIES SALMONELLA T H WIDAL TEST (VIAL 5 ML)	1	VIAL	Rp 124.598	Rp 124.598	Februari 2025	Gudang
71	1.1.7.01.04.02.1.005	LORNE LABORATORIES SALMONELLA T O WIDAL TEST (VIAL 5 ML)	1	VIAL	Rp 124.598	Rp 124.598	Februari 2025	Gudang
72	1.1.7.01.04.01.024.1	OAT Kategori I	1	Paket	Rp 579.975	Rp 579.975	Februari 2025	Gudang
73	1.1.7.01.04.01.233	Paracetamol infus	4	Botol	Rp 13.000	Rp 52.000	Februari 2025	Gudang
74	1.1.7.01.04.01.233	Paracetamol infus	2	Botol	Rp 16.437	Rp 32.874	Februari 2025	Gudang
75	1.1.7.01.04.01.132	PREDNISON 5 MG	1800	TABLET	Rp 112	Rp 201.600	Februari 2025	Gudang
76	1.1.7.01.04.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	500	TABLET	Rp 95	Rp 47.500	Februari 2025	Gudang
77	1.1.7.01.04.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	300	TABLET	Rp 95	Rp 28.500	Februari 2025	Gudang
78	1.1.7.01.04.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	500	TABLET	Rp 95	Rp 47.500	Februari 2025	Gudang
79	1.1.7.01.04.02.1.039.1	3M 7510MP ESPE VITREBOND LIGHT CURE GLASS ION LINE/BASE	4	BOTOL	Rp 506.333	Rp 2.025.334	Januari 2025	Gudang
80	1.1.7.01.04.01.028	ATROPINE INJEKSI 0,25 MG / ML	5	AMPUL	Rp 1.718	Rp 8.590	Januari 2025	Gudang
81	1.1.7.01.04.01.085	HYDROCHLORTIACID 25 MG	500	TABLET	Rp 186	Rp 93.000	Januari 2025	Gudang
82	1.1.7.01.04.01.091	ISOSORBID DINITRATE 5 MG	200	TABLET	Rp 103	Rp 20.600	Januari 2025	Gudang
83	1.1.7.01.04.01.095	KETOKONAZOL 200MG	200	TABLET	Rp 440	Rp 87.998	Januari 2025	Gudang
84	1.1.7.01.04.01.095	KETOKONAZOL 200MG	100	TABLET	Rp 440	Rp 43.999	Januari 2025	Gudang
85	1.1.7.01.04.02.1.007	LORNE LABORATORIES ANTI-A MONOCLONAL GOL.DARAH (VIAL 10 ML)	1	VIAL	Rp 131.550	Rp 131.550	Januari 2025	Gudang
86	1.1.7.01.04.02.1.008	LORNE LABORATORIES ANTI-B MONOCLONAL GOL.DARAH (VIAL 10 ML)	1	VIAL	Rp 131.550	Rp 131.550	Januari 2025	Gudang
87	1.1.7.01.04.02.184	SUCTION CATHETER NO. 14	2	PIECES	Rp 5.214	Rp 10.428	Januari 2025	Gudang
88	1.1.7.01.04.02.184	SUCTION CATHETER NO. 14	1	PIECES	Rp 5.214	Rp 5.214	Januari 2025	Gudang
89	1.1.7.01.04.01.049	CLINDAMICYN 300	140	TABLET	Rp 1.390	Rp 194.600	November 2025	Apotek
90	1.1.7.01.04.01.049	CLINDAMICYN 300	60	TABLET	Rp 1.390	Rp 83.400	November 2025	Apotek
91	1.1.7.01.04.01.030	BETAMETHASONE KRIM 0,1 %	1	TUBE	Rp 2.800	Rp 2.800	Oktober 2025	Apotek
92	1.1.7.01.04.01.030	BETAMETHASONE KRIM 0,1 %	14	TUBE	Rp 2.750	Rp 38.500	Oktober 2025	Apotek
93	1.1.7.01.04.01.135	PYRANTEL 125 MG	69	TABLET	Rp 513	Rp 35.397	Oktober 2025	Apotek
94	1.1.7.01.04.01.131	PIROXICAM 20 MG	71	TABLET	Rp 134	Rp 9.514	September 2025	Apotek
95	1.1.7.01.04.01.226.1	ALBENDAZOLE SUSPENSI 10 ML	10	BOTOL	Rp 4.473	Rp 44.730	Mei 2025	Apotek
96	1.1.7.01.04.01.201	BISOPROLOL FUMARAT TAB 2,5MG	60	TABLET	Rp 491	Rp 29.460	Maret 2025	Apotek
97	1.1.7.01.04.01.032.1	CETERIZIN SIRUP	2	BOTOL	Rp 5.396	Rp 10.793	Maret 2025	Apotek
98	1.1.7.01.04.01.076	GENTAMICIN SM (GENOINT)	1	BOTOL	Rp 17.750	Rp 17.750	Maret 2025	Apotek
99	1.1.7.01.04.01.045.1	VITAMIN K INJ(Fitomenadion)	3	AMPUL	Rp 3.330	Rp 9.990	Maret 2025	Apotek
100	1.1.7.01.04.01.132	PREDNISON 5 MG	65	TABLET	Rp 112	Rp 7.280	Februari 2025	Apotek
101	1.1.7.01.04.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	10	TABLET	Rp 95	Rp 950	Februari 2025	Apotek
102	1.1.7.01.04.01.085	HYDROCHLORTIACID 25 MG	100	TABLET	Rp 186	Rp 18.600	Januari 2025	Apotek
103	1.1.7.01.04.01.091	ISOSORBID DINITRATE 5 MG	99	TABLET	Rp 103	Rp 10.197	Januari 2025	Apotek
104	1.1.7.01.04.01.095	KETOKONAZOL 200MG	75	TABLET	Rp 440	Rp 32.999	Januari 2025	Apotek
C	**RSUD AKHMAD BERAHIM**					**Rp 438.676.441**	**Obat**	
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**	**Kedaluwarsa**	**Keterangan**
1	1.1.7.01.04.01.239	ACYCLOVIR 400 MG	400	Tablet	Rp 600	Rp 240.000	Januari 2025	Gudang
2	1.1.7.01.04.01.06	AMBROXOL 30 MG TAB	1500	TABLET	Rp 312	Rp 468.270	Januari 2025	Gudang
3	1.1.7.01.04.01.245	ANTASIDA TAB KUNYAH : KOMBINASI : ALUMINIUM HIDROKSIDA 200 MG + MAGNESIUM HIDROKSIDA 200 MG	800	TABLET	Rp 216	Rp 172.816	Januari 2025	Gudang
4	1.1.7.01.04.01.29	ASAM ASKORBAT (VIT. C) TAB 50 MG	4300	TABLET	Rp 70	Rp 301.000	Januari 2025	Gudang
5	1.1.7.01.04.01.288	CANDESARTAN TABLET 8 MG	1500	TABLET	Rp 1.277	Rp 1.915.500	Januari 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
6	1.1.7.01.04.01.288	CANDESARTAN TABLET 8 MG	6200	TABLET	Rp 1.277	Rp 7.917.400	Januari 2025	Gudang
7	1.1.7.01.04.01.401	COLCHICINE (RECOLFAR) TABLET 0.5MG	99	TABLET	Rp 2.000	Rp 197.994	Januari 2025	Gudang
8	1.1.7.01.04.01.401	COLCHICINE (RECOLFAR) TABLET 0.5MG	1	TABLET	Rp 2.003	Rp 2.003	Januari 2025	Gudang
9	1.1.7.01.04.01.401	COLCHICINE (RECOLFAR) TABLET 0.5MG	150	TABLET	Rp 6.660	Rp 999.000	Januari 2025	Gudang
10	1.1.7.01.04.01.401	COLCHICINE (RECOLFAR) TABLET 0.5MG	260	TABLET	Rp 1.998	Rp 519.480	Januari 2025	Gudang
11	1.1.7.01.04.01.299	DOXYCYCLINE 100 MG (INTERDOXIN)	140	TABLET	Rp 8.891	Rp 1.244.754	Januari 2025	Gudang
12	1.1.7.01.04.01.248	KETOKONASOL TAB 200 MG	900	TABLET	Rp 340	Rp 305.991	Januari 2025	Gudang
13	1.1.7.01.04.01.148	METILERGOMETRIN MALEAT INJEKSI 0,200 MG	25	AMPUL	Rp 2.255	Rp 56.375	Januari 2025	Gudang
14	1.1.7.01.04.01.260	METOCLOPRAMIDE TABLET 10 MG	2100	TABLET	Rp 122	Rp 256.179	Januari 2025	Gudang
15	1.1.7.01.04.01.59	SPIRONOLACTONE 100 MG	300	TABLET	Rp 850	Rp 255.000	Januari 2025	Gudang
16	1.1.7.01.04.01.411	VITAMIN D3 KAPSUL	240	KAPSUL	Rp 2.775	Rp 666.000	Januari 2025	Gudang
17	1.1.7.01.04.01.411	VITAMIN D3 KAPSUL	6030	KAPSUL	Rp 1.832	Rp 11.043.945	Januari 2025	Gudang
18	1.1.7.01.04.01.213	CEFOTAKSIM SERB INJ 1.000 MG	800	VIAL	Rp 6.660	Rp 5.328.000	Januari 2025	Gudang
19	1.1.7.01.04.01.14	CLONIDINE 0.15	1200	Tablet	Rp 175	Rp 210.000	Januari 2025	Gudang
20	1.1.7.01.04.01.342	CO-AMOXICLAV INJ	70	AMPUL	Rp 36.999	Rp 2.589.896	Januari 2025	Gudang
21	1.1.7.01.04.01.36	DIAZEPAM 5 MG	700	TABLET	Rp 216	Rp 151.193	Januari 2025	Gudang
22	1.1.7.01.04.01.289	DOBUTAMIN INJEKSI 50 MG/ML	90	AMPUL	Rp 16.850	Rp 1.516.482	Januari 2025	Gudang
23	1.1.7.01.04.01.75	FARGOXIN INJEKSI - DIGOKSIN INJEKSI 0,25 MG/ML	75	AMPUL	Rp 27.750	Rp 2.081.250	Januari 2025	Gudang
24	1.1.7.01.04.01.332	HERBESSER INJ	70	VIAL	Rp 170.403	Rp 11.928.210	Januari 2025	Gudang
25	1.1.7.01.04.01.137	HES 130	70	PLABOT	Rp 49.950	Rp 3.496.500	Januari 2025	Gudang
26	1.1.7.01.04.01.119	IRBESARTAN 150 MG	1	TABLET	Rp 694	Rp 694	Januari 2025	Gudang
27	1.1.7.01.04.01.119	IRBESARTAN 150 MG	480	TABLET	Rp 767	Rp 367.978	Januari 2025	Gudang
28	1.1.7.01.04.01.119	IRBESARTAN 150 MG	299	TABLET	Rp 689	Rp 205.885	Januari 2025	Gudang
29	1.1.7.01.04.01.152	METILPREDNISOLON INJEKSI 125 MG/2 ML	99	VIAL	Rp 11.440	Rp 1.132.560	Januari 2025	Gudang
30	1.1.7.01.04.01.152	METILPREDNISOLON INJEKSI 125 MG/2 ML	1	VIAL	Rp 11.192	Rp 11.192	Januari 2025	Gudang
31	1.1.7.01.04.01.152	METILPREDNISOLON INJEKSI 125 MG/2 ML	7	VIAL	Rp 11.011	Rp 77.078	Januari 2025	Gudang
32	1.1.7.01.04.01.177	OTSU MGSO4 INJEKSI 20 %	18	AMPUL	Rp 4.973	Rp 89.510	Januari 2025	Gudang
33	1.1.7.01.04.01.80	PHENOBARBITAL 30 MG	100	TABLET	Rp 209	Rp 20.900	Januari 2025	Gudang
34	1.1.7.01.04.01.212	SEVOFLURANE INH	4	BOTOL	Rp 887.911	Rp 3.551.645	Januari 2025	Gudang
35	1.1.7.01.04.01.122	KETAMIN INJEKSI (KETAMIN HAMELN)	19	VIAL	Rp 42.180	Rp 801.420	Februari 2025	Gudang
36	1.1.7.01.04.01.122	KETAMIN INJEKSI (KETAMIN HAMELN)	1	VIAL	Rp 42.181	Rp 42.181	Februari 2025	Gudang
37	1.1.7.01.04.01.165	NICARDIPIN INJ 10 MG	30	VIAL	Rp 21.062	Rp 631.860	Februari 2025	Gudang
38	1.1.7.01.04.01.15	AMOXICILLIN TABLET 500 MG	2399	Tablet	Rp 551	Rp 1.321.825	Maret 2025	Gudang
39	1.1.7.01.04.01.15	AMOXICILLIN TABLET 500 MG	1	Tablet	Rp 581	Rp 581	Maret 2025	Gudang
40	1.1.7.01.04.01.15	AMOXICILLIN TABLET 500 MG	2600	Tablet	Rp 380	Rp 988.078	Maret 2025	Gudang
41	1.1.7.01.04.01.336	AZITROMISIN 500 MG	2940	TABLET	Rp 1.778	Rp 5.227.320	Maret 2025	Gudang
42	1.1.7.01.04.01.78	FENITOIN INJEKSI 50 MG/ML (100 MG/2 ML)	20	AMPUL	Rp 4.015	Rp 80.300	Maret 2025	Gudang
43	1.1.7.01.04.01.83	FERO FUMARAT 60 MG + AS.FOLAT 0,4 MG TABLET SALUT GULA	1	TABLET	Rp 268	Rp 268	Maret 2025	Gudang
44	1.1.7.01.04.01.83	FERO FUMARAT 60 MG + AS.FOLAT 0,4 MG TABLET SALUT GULA	900	TABLET	Rp 266	Rp 239.400	Maret 2025	Gudang
45	1.1.7.01.04.01.83	FERO FUMARAT 60 MG + AS.FOLAT 0,4 MG TABLET SALUT GULA	399	TABLET	Rp 180	Rp 71.816	Maret 2025	Gudang
46	1.1.7.01.04.01.83	FERO FUMARAT 60 MG + AS.FOLAT 0,4 MG TABLET SALUT GULA	1	TABLET	Rp 218	Rp 218	Maret 2025	Gudang
47	1.1.7.01.04.01.83	FERO FUMARAT 60 MG + AS.FOLAT 0,4 MG TABLET SALUT GULA	4999	TABLET	Rp 266	Rp 1.329.734	Maret 2025	Gudang
48	1.1.7.01.04.01.435	HEPARIN SODIUM INJEKSI	70	VIAL	Rp 49.950	Rp 3.496.500	Maret 2025	Gudang
49	1.1.7.01.04.01.111	IBUPROFEN TABLET 400 MG	1	TABLET	Rp 321	Rp 321	Maret 2025	Gudang
50	1.1.7.01.04.01.111	IBUPROFEN TABLET 400 MG	19200	TABLET	Rp 222	Rp 4.262.400	Maret 2025	Gudang
51	1.1.7.01.04.01.111	IBUPROFEN TABLET 400 MG	199	TABLET	Rp 311	Rp 61.887	Maret 2025	Gudang
52	1.1.7.01.04.01.128	KLORAMFENIKOL TETES MATA	25	BOTOL	Rp 23.588	Rp 589.688	Maret 2025	Gudang
53	1.1.7.01.04.01.150	METILPREDNISOLON TABLET 8 MG	200	TABLET	Rp 690	Rp 138.000	Maret 2025	Gudang
54	1.1.7.01.04.01.150	METILPREDNISOLON TABLET 8 MG	4300	TABLET	Rp 440	Rp 1.892.000	Maret 2025	Gudang
55	1.1.7.01.04.01.158	MIKONAZOL KRIM/SALEP 2 % (NITRAT)	48	TUBE	Rp 971	Rp 46.618	Maret 2025	Gudang
56	1.1.7.01.04.01.285	NACL 3 % (SALIN 3)	430	BOTOL	Rp 34.296	Rp 14.747.280	Maret 2025	Gudang
57	1.1.7.01.04.01.165	NICARDIPIN INJ 10 MG	20	VIAL	Rp 21.062	Rp 421.240	Maret 2025	Gudang
58	1.1.7.01.04.01.165	NICARDIPIN INJ 10 MG	20	VIAL	Rp 24.420	Rp 488.400	Maret 2025	Gudang
59	1.1.7.01.04.01.165	NICARDIPIN INJ 10 MG	500	VIAL	Rp 21.000	Rp 10.500.000	Maret 2025	Gudang
60	1.1.7.01.04.01.172	OMEPRAZOL INJEKSI 40 MG/10 ML	1230	VIAL	Rp 13.200	Rp 16.236.000	Maret 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
61	1.1.7.01.04.01.81	PERMETHRIN 5%	125	TUBE	Rp 6.957	Rp 869.685	Maret 2025	Gudang
62	1.1.7.01.04.01.378	PIOGLITAZONE HCL 30 MG	660	TABLET	Rp 822	Rp 542.520	Maret 2025	Gudang
63	1.1.7.01.04.01.385	RANITIDINE TABLET 150MG	800	TABLET	Rp 375	Rp 300.000	Maret 2025	Gudang
64	1.1.7.01.04.01.385	RANITIDINE TABLET 150MG	100	TABLET	Rp 583	Rp 58.275	Maret 2025	Gudang
65	1.1.7.01.04.01.303	TRILAC TRIAMCINOLONE ACETONIDE/TRIAMSINOLON ASETONID INJ 10 MG/ML	2	VIAL	Rp 33.300	Rp 66.600	Maret 2025	Gudang
66	1.1.7.01.04.01.398	DOPAMIN INJECTION 40MG @10	70	AMPUL	Rp 9.580	Rp 670.600	Maret 2025	Gudang
67	1.1.7.01.04.01.123	KETOCONAZOLE KRIM 2 %	52	TUBE	Rp 7.631	Rp 396.825	Maret 2025	Gudang
68	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	2200	TABLET	Rp 306	Rp 673.200	Maret 2025	Gudang
69	1.1.7.01.04.01.273	CEFAZOLIN INJ 1G	150	VIAL	Rp 9.490	Rp 1.423.500	April 2025	Gudang
70	1.1.7.01.04.01.374	DIAZEPAM INJEKSI	420	AMPUL	Rp 1.545	Rp 648.904	April 2025	Gudang
71	1.1.7.01.04.01.289	DOBUTAMIN INJEKSI 50 MG/ML	100	AMPUL	Rp 16.850	Rp 1.684.980	April 2025	Gudang
72	1.1.7.01.04.01.289	DOBUTAMIN INJEKSI 50 MG/ML	20	AMPUL	Rp 16.850	Rp 336.996	April 2025	Gudang
73	1.1.7.01.04.01.289	DOBUTAMIN INJEKSI 50 MG/ML	40	AMPUL	Rp 16.850	Rp 674.000	April 2025	Gudang
74	1.1.7.01.04.01.349	FLUCONAZOLE INFUS	20	BOTOL	Rp 23.100	Rp 462.000	April 2025	Gudang
75	1.1.7.01.04.01.109	HYDROCORTISON KRIM 2,5%	24	TUBE	Rp 2.556	Rp 61.344	April 2025	Gudang
76	1.1.7.01.04.01.513	LACOLDIN SYR	175	BOTOL	Rp 26.587	Rp 4.652.676	April 2025	Gudang
77	1.1.7.01.04.01.513	LACOLDIN SYR	106	BOTOL	Rp 26.587	Rp 2.818.192	April 2025	Gudang
78	1.1.7.01.04.01.513	LACOLDIN SYR	1	BOTOL	Rp 26.587	Rp 26.587	April 2025	Gudang
79	1.1.7.01.04.01.140	LANOS DROP	55	BOTOL	Rp 46.329	Rp 2.548.075	April 2025	Gudang
80	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	1200	TABLET	Rp 306	Rp 367.200	April 2025	Gudang
81	1.1.7.01.04.01.152	METILPREDNISOLON INJEKSI 125 MG/2 ML	504	VIAL	Rp 11.440	Rp 5.765.760	April 2025	Gudang
82	1.1.7.01.04.01.388	NACL 100ML	40	PLABOT	Rp 7.125	Rp 285.000	April 2025	Gudang
83	1.1.7.01.04.01.388	NACL 100ML	3880	PLABOT	Rp 6.769	Rp 26.263.720	April 2025	Gudang
84	1.1.7.01.04.01.229	ROCURONIUM INJ 10MG/ML	40	AMPUL	Rp 35.075	Rp 1.403.000	April 2025	Gudang
85	1.1.7.01.04.01.211	SALBUTAMOL INHALASI 0,1%	240	VIAL	Rp 5.280	Rp 1.267.200	April 2025	Gudang
86	1.1.7.01.04.01.216	WARFARIN TABLET 2MG	3400	TABLET	Rp 704	Rp 2.394.824	April 2025	Gudang
87	1.1.7.01.04.01.210	CEFIXIME DRY SYRUP	760	BOTOL	Rp 9.262	Rp 7.039.120	Mei 2025	Gudang
88	1.1.7.01.04.01.220	DIAZEPAM 5 MG/2,5 ML RECTAL TUBE	40	TUBE	Rp 13.665	Rp 546.600	Mei 2025	Gudang
89	1.1.7.01.04.01.518	INADRYL 100 ML SYR	165	BOTOL	Rp 22.000	Rp 3.629.993	Mei 2025	Gudang
90	1.1.7.01.04.01.519	PRONEURON TAB (METAMIZOLE SODIUM 500 MG + DIAZEPAM 2 MG)	200	KAPLET	Rp 1.399	Rp 279.720	Mei 2025	Gudang
91	1.1.7.01.04.01.34	ASAM TRANEKSAMAT TAB 500 MG	1300	TABLET	Rp 1.941	Rp 2.523.300	Juni 2025	Gudang
92	1.1.7.01.04.01.43	BETAMETASON KRIM 0,1 %	25	TUBE	Rp 2.009	Rp 50.228	Juni 2025	Gudang
93	1.1.7.01.04.01.43	BETAMETASON KRIM 0,1 %	300	TUBE	Rp 2.200	Rp 660.006	Juni 2025	Gudang
94	1.1.7.01.04.01.521	CHLORAMFECORT CREAM	76	TUBE	Rp 12.271	Rp 932.600	Juni 2025	Gudang
95	1.1.7.01.04.01.374	DIAZEPAM INJEKSI	200	AMPUL	Rp 1.545	Rp 309.002	Juni 2025	Gudang
96	1.1.7.01.04.01.21	FORTANEST (MIDAZOLAM) INJ	130	AMPUL	Rp 27.750	Rp 3.607.500	Juni 2025	Gudang
97	1.1.7.01.04.01.109	HYDROCORTISON KRIM 2,5%	72	TUBE	Rp 3.080	Rp 221.778	Juni 2025	Gudang
98	1.1.7.01.04.01.114	ISOSORBID DINITRAT 5 MG (CEDOCARD)	8100	TABLET	Rp 104	Rp 841.914	Juni 2025	Gudang
99	1.1.7.01.04.01.370	KALIUM DIKLOFENAK 50MG	2999	TABLET	Rp 350	Rp 1.049.590	Juni 2025	Gudang
100	1.1.7.01.04.01.370	KALIUM DIKLOFENAK 50MG	1	TABLET	Rp 359	Rp 359	Juni 2025	Gudang
101	1.1.7.01.04.01.370	KALIUM DIKLOFENAK 50MG	600	TABLET	Rp 679	Rp 407.238	Juni 2025	Gudang
102	1.1.7.01.04.01.123	KETOCONAZOLE KRIM 2 %	1	TUBE	Rp 7.770	Rp 7.770	Juni 2025	Gudang
103	1.1.7.01.04.01.123	KETOCONAZOLE KRIM 2 %	47	TUBE	Rp 6.358	Rp 298.809	Juni 2025	Gudang
104	1.1.7.01.04.01.138	LANSOPRAZOL TABLET 30 MG	4500	TABLET	Rp 1.035	Rp 4.657.500	Juni 2025	Gudang
105	1.1.7.01.04.01.297	MELOXICAM 7,5 MG	1300	TABLET	Rp 378	Rp 491.400	Juni 2025	Gudang
106	1.1.7.01.04.01.152	METILPREDNISOLON INJEKSI 125 MG/2 ML	6	VIAL	Rp 20.380	Rp 122.278	Juni 2025	Gudang
107	1.1.7.01.04.01.372	OSELTAMIVIR 75 MG	100	TABLET	Rp 8.900	Rp 890.000	Juni 2025	Gudang
108	1.1.7.01.04.01.176	OTSU KCL 7,46 % 25 ML	414	AMPUL	Rp 3.790	Rp 1.569.060	Juni 2025	Gudang
109	1.1.7.01.04.01.314	PARACETAMOL INFUS	320	BOTOL	Rp 16.437	Rp 5.259.802	Juni 2025	Gudang
110	1.1.7.01.04.01.461	RIFAMPISIN 450 MG	200	TABLET	Rp 2.167	Rp 433.342	Juni 2025	Gudang
111	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	99	TABLET	Rp 242	Rp 23.957	Juni 2025	Gudang
112	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	1	TABLET	Rp 272	Rp 272	Juni 2025	Gudang
113	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	300	TABLET	Rp 207	Rp 62.157	Juni 2025	Gudang
114	1.1.7.01.04.01.227	TRAMADOL INJEKSI 50 MG/ML	710	AMPUL	Rp 3.000	Rp 2.130.000	Juni 2025	Gudang
115	1.1.7.01.04.01.265	TRIHEXYPHENIDYL @100	1000	TABLET	Rp 64	Rp 63.570	Juni 2025	Gudang
116	1.1.7.01.04.01.07	AMBROXOL SYR	380	Botol	Rp 4.300	Rp 1.634.000	Juli 2025	Gudang
117	1.1.7.01.04.01.167	AMPICILLIN SODIUM/SULBACTAM SODIUM	500	VIAL	Rp 23.163	Rp 11.581.740	Juli 2025	Gudang
118	1.1.7.01.04.01.167	AMPICILLIN SODIUM/SULBACTAM SODIUM	810	VIAL	Rp 23.163	Rp 18.762.419	Juli 2025	Gudang
119	1.1.7.01.04.01.410	BROMHEXINE (FARMAVON) INJ	430	AMPUL	Rp 46.620	Rp 20.046.600	Juli 2025	Gudang
120	1.1.7.01.04.01.213	CEFOTAKSIM SERB INJ 1.000 MG	1920	VIAL	Rp 6.900	Rp 13.248.000	Juli 2025	Gudang
121	1.1.7.01.04.01.203	DIAZEPAM 10MG/2.5ML RECTAL TUBE	20	TUBE	Rp 19.870	Rp 397.400	Juli 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
122	1.1.7.01.04.01.66	DIMENHIDRINAT TABLET 50 MG	3700	TABLET	Rp 159	Rp 588.263	Juli 2025	Gudang
123	1.1.7.01.04.01.69	METHISOPRINOL 250 MG/ 5 ML SYR	27	BOTOL	Rp 55.500	Rp 1.498.500	Juli 2025	Gudang
124	1.1.7.01.04.01.205	RINGER LAKTAT LAR INF 500ML	1540	PLABOT	Rp 8.498	Rp 13.087.166	Juli 2025	Gudang
125	1.1.7.01.04.01.490	BISOPROLOL TAB 2,5 MG	1000	TABLET	Rp 145	Rp 145.000	Agustus 2025	Gudang
126	1.1.7.01.04.01.47	CAPTOPRIL 25 MG	400	TABLET	Rp 132	Rp 52.800	Agustus 2025	Gudang
127	1.1.7.01.04.01.107	KETOPROFEN INJ	49	AMPUL	Rp 4.000	Rp 196.000	Agustus 2025	Gudang
128	1.1.7.01.04.01.107	KETOPROFEN INJ	1	AMPUL	Rp 4.000	Rp 4.000	Agustus 2025	Gudang
129	1.1.7.01.04.01.508	MECOBALAMIN INJ GENERIK	210	AMPUL	Rp 9.697	Rp 2.036.362	Agustus 2025	Gudang
130	1.1.7.01.04.01.285	NACL 3 % (SALIN 3)	40	BOTOL	Rp 34.296	Rp 1.371.840	Agustus 2025	Gudang
131	1.1.7.01.04.01.488	PIRACETAM INJ	80	AMPUL	Rp 9.890	Rp 791.200	Agustus 2025	Gudang
132	1.1.7.01.04.01.265	TRIHEXYPHENIDYL @100	1500	TABLET	Rp 64	Rp 95.355	Agustus 2025	Gudang
133	1.1.7.01.04.01.313	AMIODARON INJ 50 MG/ML (150 MG/3 ML)	25	AMPUL	Rp 11.799	Rp 294.975	September 2025	Gudang
134	1.1.7.01.04.01.245	ANTASIDA TAB KUNYAH : KOMBINASI : ALUMINIUM HIDROKSIDA 200 MG + MAGNESIUM HIDROKSIDA 200 MG	100	TABLET	Rp 100	Rp 10.000	September 2025	Gudang
135	1.1.7.01.04.01.383	BETASON N CREAM	130	TUBE	Rp 16.484	Rp 2.142.855	September 2025	Gudang
136	1.1.7.01.04.01.213	CEFOTAKSIM SERB INJ 1.000 MG	70	VIAL	Rp 8.834	Rp 618.414	September 2025	Gudang
137	1.1.7.01.04.01.213	CEFOTAKSIM SERB INJ 1.000 MG	1930	VIAL	Rp 6.900	Rp 13.316.537	September 2025	Gudang
138	1.1.7.01.04.01.62	DEXAMETASON TABLET 0,5 MG	2200	TABLET	Rp 69	Rp 151.778	September 2025	Gudang
139	1.1.7.01.04.01.398	DOPAMIN INJECTION 40MG @10	90	AMPUL	Rp 10.529	Rp 947.651	September 2025	Gudang
140	1.1.7.01.04.01.363	ISOSORBIDE DINITRATE INJ	100	AMPUL	Rp 32.051	Rp 3.205.100	September 2025	Gudang
141	1.1.7.01.04.01.363	ISOSORBIDE DINITRATE INJ	64	AMPUL	Rp 32.051	Rp 2.051.264	September 2025	Gudang
142	1.1.7.01.04.01.69	METHISOPRINOL 250 MG/ 5 ML SYR	35	BOTOL	Rp 55.500	Rp 1.942.500	September 2025	Gudang
143	1.1.7.01.04.01.69	METHISOPRINOL 250 MG/ 5 ML SYR	180	BOTOL	Rp 55.500	Rp 9.990.000	September 2025	Gudang
144	1.1.7.01.04.01.157	METRONIDAZOL SIRUP 125 MG /5ML	295	BOTOL	Rp 3.835	Rp 1.131.340	September 2025	Gudang
145	1.1.7.01.04.01.158	MIKONAZOL KRIM/SALEP 2 % (NITRAT)	192	TUBE	Rp 971	Rp 186.472	September 2025	Gudang
146	1.1.7.01.04.01.519	PRONEURON TAB (METAMIZOLE SODIUM 500 MG + DIAZEPAM 2 MG)	800	KAPLET	Rp 1.399	Rp 1.118.880	September 2025	Gudang
147	1.1.7.01.04.01.519	PRONEURON TAB (METAMIZOLE SODIUM 500 MG + DIAZEPAM 2 MG)	200	KAPLET	Rp 1.399	Rp 279.720	September 2025	Gudang
148	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	2300	TABLET	Rp 242	Rp 556.577	September 2025	Gudang
149	1.1.7.01.04.01.59	SPIRONOLACTONE 100 MG	500	TABLET	Rp 850	Rp 425.000	September 2025	Gudang
150	1.1.7.01.04.01.436	VAGIZOL OVULA (METRONIDAZOL OVULA)	90	SUPPOSITORIA	Rp 3.810	Rp 342.896	September 2025	Gudang
151	1.1.7.01.04.01.430	VITAMIN C 500 MG	100	KAPLET	Rp 400	Rp 39.999	September 2025	Gudang
152	1.1.7.01.04.01.08	AMIKASIN INJ 250 MG/ML	99	Vial	Rp 16.200	Rp 1.603.799	Oktober 2025	Gudang
153	1.1.7.01.04.01.08	AMIKASIN INJ 250 MG/ML	1	Vial	Rp 16.200	Rp 16.200	Oktober 2025	Gudang
154	1.1.7.01.04.01.50	CEFADROXIL SYR KERING 125 MG/5 ML	12	BOTOL	Rp 8.500	Rp 102.000	Oktober 2025	Gudang
155	1.1.7.01.04.01.50	CEFADROXIL SYR KERING 125 MG/5 ML	47	BOTOL	Rp 13.181	Rp 619.519	Oktober 2025	Gudang
156	1.1.7.01.04.01.374	DIAZEPAM INJEKSI	220	AMPUL	Rp 1.545	Rp 339.902	Oktober 2025	Gudang
157	1.1.7.01.04.01.01	HERBESSER 100 MG (DILTIAZEM) KAPS	700	KAPSUL	Rp 4.793	Rp 3.355.100	Oktober 2025	Gudang
158	1.1.7.01.04.01.286	IBUPROFEN 400 MG (PEINLOS) INJ	100	AMPUL	Rp 63.936	Rp 6.393.600	Oktober 2025	Gudang
159	1.1.7.01.04.01.286	IBUPROFEN 400 MG (PEINLOS) INJ	445	AMPUL	Rp 71.040	Rp 31.612.800	Oktober 2025	Gudang
160	1.1.7.01.04.01.286	IBUPROFEN 400 MG (PEINLOS) INJ	200	AMPUL	Rp 63.936	Rp 12.787.200	Oktober 2025	Gudang
161	1.1.7.01.04.01.144	MANNITOL	18	BOTOL	Rp 29.994	Rp 539.899	Oktober 2025	Gudang
162	1.1.7.01.04.01.144	MANNITOL	20	BOTOL	Rp 39.650	Rp 793.006	Oktober 2025	Gudang
163	1.1.7.01.04.01.144	MANNITOL	5	BOTOL	Rp 29.996	Rp 149.978	Oktober 2025	Gudang
164	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	2399	TABLET	Rp 162	Rp 388.614	Oktober 2025	Gudang
165	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	1	TABLET	Rp 261	Rp 261	Oktober 2025	Gudang
166	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	4000	TABLET	Rp 195	Rp 781.440	Oktober 2025	Gudang
167	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	13900	TABLET	Rp 306	Rp 4.253.400	Oktober 2025	Gudang
168	1.1.7.01.04.01.379	METHISOPRINOL 500 MG (MAXPRINOL)	120	TABLET	Rp 10.490	Rp 1.258.740	Oktober 2025	Gudang
169	1.1.7.01.04.01.191	PIRANTEL PAMOAT SUSP 125 MG/5 ML	45	BOTOL	Rp 14.164	Rp 637.362	Oktober 2025	Gudang
170	1.1.7.01.04.01.525	PROVAGIN OVULA	10	OVULA	Rp 13.487	Rp 134.865	Oktober 2025	Gudang
171	1.1.7.01.04.01.525	PROVAGIN OVULA	10	OVULA	Rp 14.236	Rp 142.358	Oktober 2025	Gudang
172	1.1.7.01.04.01.208	SALBUTAMOL SIRUP	45	BOTOL	Rp 7.150	Rp 321.728	Oktober 2025	Gudang
173	1.1.7.01.04.01.235	ZINC TAB	800	TABLET	Rp 355	Rp 284.000	Oktober 2025	Gudang
174	1.1.7.01.04.01.67	BUNASCAN EPIDURAL 0,5% INJ	40	AMPUL	Rp 58.275	Rp 2.331.000	Desember 2025	Gudang
175	1.1.7.01.04.01.224	CIPROFLOKSASIN TAB SCORED 500 MG	1	TABLET	Rp 270	Rp 270	Desember 2025	Gudang
176	1.1.7.01.04.01.224	CIPROFLOKSASIN TAB SCORED 500 MG	2900	TABLET	Rp 270	Rp 783.000	Desember 2025	Gudang
177	1.1.7.01.04.01.224	CIPROFLOKSASIN TAB SCORED 500 MG	4999	TABLET	Rp 270	Rp 1.349.730	Desember 2025	Gudang
178	1.1.7.01.04.01.61	DESOKSIMETASONE KRIM 0,25 MG	24	TUBE	Rp 13.800	Rp 331.200	Desember 2025	Gudang
179	1.1.7.01.04.01.62	DEXAMETASON TABLET 0,5 MG	299	TABLET	Rp 70	Rp 20.927	Desember 2025	Gudang
180	1.1.7.01.04.01.62	DEXAMETASON TABLET 0,5 MG	1	TABLET	Rp 103	Rp 103	Desember 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
181	1.1.7.01.04.01.62	DEXAMETASON TABLET 0,5 MG	100	TABLET	Rp 69	Rp 6.899	Desember 2025	Gudang
182	1.1.7.01.04.01.358	DIGOXIN TAB 0.25 MG	600	TABLET	Rp 189	Rp 113.400	Desember 2025	Gudang
183	1.1.7.01.04.01.138	LANSOPRAZOL TABLET 30 MG	400	TABLET	Rp 655	Rp 261.996	Desember 2025	Gudang
184	1.1.7.01.04.01.476	LEVOFLOXACIN 500MG	300	TABLET	Rp 833	Rp 249.900	Desember 2025	Gudang
185	1.1.7.01.04.01.264	LIDOCAINE INJEKSI 2%	100	AMPUL	Rp 979	Rp 97.900	Desember 2025	Gudang
186	1.1.7.01.04.01.439	LISINOPRIL 5MG	1	TABLET	Rp 210	Rp 210	Desember 2025	Gudang
187	1.1.7.01.04.01.439	LISINOPRIL 5MG	99	TABLET	Rp 210	Rp 20.790	Desember 2025	Gudang
188	1.1.7.01.04.01.27	MELIDOX TAB	1000	Tablet	Rp 1.099	Rp 1.098.900	Desember 2025	Gudang
189	1.1.7.01.04.01.458	MEYLON 8,4% 25 ML	12	AMPUL	Rp 7.550	Rp 90.600	Desember 2025	Gudang
190	1.1.7.01.04.01.25	RAMIPRIL 2,5 MG TAB	2700	TABLET	Rp 264	Rp 712.800	Desember 2025	Gudang
191	1.1.7.01.04.01.192	VITAMIN B6 10MG	1800	TABLET	Rp 121	Rp 217.368	Desember 2025	Gudang
192	1.1.7.01.04.01.06	AMBROXOL 30 MG TAB	145	TAB	Rp 312	Rp 45.266	Februari 2025	Apotek
193	1.1.7.01.04.01.29	ASAM ASKORBAT (VIT. C) TAB 50 MG	185	TABLET	Rp 70	Rp 12.950	Februari 2025	Apotek
194	1.1.7.01.04.01.299	DOXYCYCLINE 100 MG	100	TABLET	Rp 8.891	Rp 889.110	Februari 2025	Apotek
195	1.1.7.01.04.01.299	DOXYCYCLINE 100 MG	5	TABLET	Rp 8.891	Rp 44.456	Februari 2025	Apotek
196	1.1.7.01.04.01.306	FUCILEX KRIM SODIUM FUSIDATE/FUSIDIC ACID/NATRIUM FUSIAT KRIM 20 % (20 MG/G)	2	TUBE	Rp 8.250	Rp 16.499	Februari 2025	Apotek
197	1.1.7.01.04.01.513	LACOLDIN SYR	11	BOTOL	Rp 26.587	Rp 292.454	Februari 2025	Apotek
198	1.1.7.01.04.01.182	OXYTETRACYCLINE SALEP KULIT	2	TUBE	Rp 2.088	Rp 4.176	Februari 2025	Apotek
199	1.1.7.01.04.01.182	OXYTETRACYCLINE SALEP KULIT	1	TUBE	Rp 2.036	Rp 2.036	Februari 2025	Apotek
200	1.1.7.01.04.01.182	OXYTETRACYCLINE SALEP KULIT	10	TUBE	Rp 2.036	Rp 20.357	Februari 2025	Apotek
201	1.1.7.01.04.01.192	PIRIDOKSIN (VITAMIN B6) TABLET 10 MG	265	TABLET	Rp 95	Rp 25.175	Februari 2025	Apotek
202	1.1.7.01.04.01.205	RINGER LAKTAT LAR INF	9	BOTOL 500ML	Rp 8.073	Rp 72.657	Februari 2025	Apotek
203	1.1.7.01.04.01.150	METILPREDNISOLON TABLET 8 MG	157	TABLET	Rp 407	Rp 63.899	Februari 2025	Apotek
204	1.1.7.01.04.01.150	METILPREDNISOLON TABLET 8 MG	1	TABLET	Rp 439	Rp 439	Februari 2025	Apotek
205	1.1.7.01.04.01.150	METILPREDNISOLON TABLET 8 MG	299	TABLET	Rp 440	Rp 131.560	Februari 2025	Apotek
206	1.1.7.01.04.01.314	PARACETAMOL INFUS	2	BOTOL	Rp 10.000	Rp 20.000	Februari 2025	Apotek
207	1.1.7.01.04.01.80	PHENOBARBITAL 30 MG	299	TABLET	Rp 209	Rp 62.491	Februari 2025	Apotek
208	1.1.7.01.04.01.80	PHENOBARBITAL 30 MG	1	TABLET	Rp 210	Rp 210	Februari 2025	Apotek
209	1.1.7.01.04.01.401	RECOLFAR: KOLKISIN TABLET 0,5MG	210	TABLET	Rp 1.998	Rp 419.580	Februari 2025	Apotek
210	1.1.7.01.04.01.401	RECOLFAR: KOLKISIN TABLET 0,5MG	34	TABLET	Rp 1.998	Rp 67.932	Februari 2025	Apotek
211	1.1.7.01.04.01.499	SALIN 3%	16	BOTOL	Rp 34.296	Rp 548.736	Februari 2025	Apotek
212	1.1.7.01.04.01.59	SPIRONOLACTONE 100 MG	200	TABLET	Rp 850	Rp 170.000	Februari 2025	Apotek
213	1.1.7.01.04.01.59	SPIRONOLACTONE 100 MG	55	TABLET	Rp 850	Rp 46.750	Februari 2025	Apotek
214	1.1.7.01.04.01.245	ANTASIDA TAB KUNYAH : KOMBINASI : ALUMINIUM HIDROKSIDA 200 MG + MAGNESIUM HIDROKSIDA 200 MG	310	TABLET	Rp 371	Rp 115.010	Maret 2025	Apotek
215	1.1.7.01.04.01.385	RANITIDINE TABLET 150MG	66	TABLET	Rp 583	Rp 38.462	Maret 2025	Apotek
216	1.1.7.01.04.01.385	RANITIDINE TABLET 150MG	170	TABLET	Rp 583	Rp 99.068	Maret 2025	Apotek
217	1.1.7.01.04.01.239	ACYCLOVIR 400 MG	140	Tablet	Rp 600	Rp 84.000	Maret 2025	Apotek
218	1.1.7.01.04.01.15	AMOKSISILIN TABLET 500 MG	200	Tablet	Rp 380	Rp 76.006	Maret 2025	Apotek
219	1.1.7.01.04.01.15	AMOKSISILIN TABLET 500 MG	24	Tablet	Rp 380	Rp 9.121	Maret 2025	Apotek
220	1.1.7.01.04.01.52	CENDO PANTOCAIN 0,5%	1	BOTOL	Rp 13.457	Rp 13.457	Maret 2025	Apotek
221	1.1.7.01.04.01.52	CENDO PANTOCAIN 0,5%	6	BOTOL	Rp 13.459	Rp 80.754	Maret 2025	Apotek
222	1.1.7.01.04.01.231	CENDO PANTOCAIN 2%	7	BOTOL	Rp 14.708	Rp 102.953	Maret 2025	Apotek
223	1.1.7.01.04.01.66	DIMENHIDRINAT TABLET 50 MG	89	TABLET	Rp 166	Rp 14.774	Maret 2025	Apotek
224	1.1.7.01.04.01.140	LANOS DROP	23	BOTOL 60 ML	Rp 44.955	Rp 1.033.965	Maret 2025	Apotek
225	1.1.7.01.04.01.158	MIKONAZOL KRIM/SALEP 2 % (NITRAT)	1	TUBE	Rp 966	Rp 966	Maret 2025	Apotek
226	1.1.7.01.04.01.158	MIKONAZOL KRIM/SALEP 2 % (NITRAT)	12	TUBE	Rp 971	Rp 11.655	Maret 2025	Apotek
227	1.1.7.01.04.01.166	NIFEDIPIN TABLET 10 MG	25	TABLET	Rp 220	Rp 5.504	Maret 2025	Apotek
228	1.1.7.01.04.01.108	NITROKAF RETARD	5	KAPSUL	Rp 1.903	Rp 9.515	Maret 2025	Apotek
229	1.1.7.01.04.01.378	PIOGLITAZONE HCL 30 MG	300	TABLET	Rp 822	Rp 246.600	Maret 2025	Apotek
230	1.1.7.01.04.01.378	PIOGLITAZONE HCL 30 MG	28	TABLET	Rp 822	Rp 23.016	Maret 2025	Apotek
231	1.1.7.01.04.01.270	PIROXICAM 10 MG TAB	300	TAB	Rp 208	Rp 62.436	Maret 2025	Apotek
232	1.1.7.01.04.01.270	PIROXICAM 10 MG TAB	25	TAB	Rp 208	Rp 5.203	Maret 2025	Apotek
233	1.1.7.01.04.01.336	AZITROMISIN 500 MG	121	TABLET	Rp 1.778	Rp 215.138	April 2025	Apotek
234	1.1.7.01.04.01.426	EPERISON 50 MG	90	TABLET	Rp 1.658	Rp 149.251	April 2025	Apotek
235	1.1.7.01.04.01.426	EPERISON 50 MG	17	TABLET	Rp 1.658	Rp 28.192	April 2025	Apotek
236	1.1.7.01.04.01.82	FLUCONAZOLE 150 MG	59	TABLET	Rp 19.250	Rp 1.135.750	April 2025	Apotek
237	1.1.7.01.04.01.104	HUMAN TETANUS IMUNOGLOBULINN INJ (TETAGAM)	2	KOTAK	Rp 148.135	Rp 296.270	April 2025	Apotek
238	1.1.7.01.04.01.109	HYDROCORTISON KRIM 2,5%	14	TUBE	Rp 2.556	Rp 35.784	April 2025	Apotek
239	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	110	TABLET	Rp 306	Rp 33.660	April 2025	Apotek
240	1.1.7.01.04.01.181	OMEPRAZOL KAPSUL/KAPLET 20 MG	47	TABLET	Rp 555	Rp 26.085	April 2025	Apotek

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
241	1.1.7.01.04.01.388	OTSU NS NACL 100ML	14	PLABOT	Rp 6.769	Rp 94.766	April 2025	Apotek
242	1.1.7.01.04.01.81	PERMETHRIN 5%	10	TUBE	Rp 6.957	Rp 69.575	April 2025	Apotek
243	1.1.7.01.04.01.531	Q-FOLIC (ASAM FOLAT) 400 MCG	300	TABLET	Rp 2.775	Rp 832.500	April 2025	Apotek
244	1.1.7.01.04.01.272	REBAMIPIDE 100MG	220	TABLET	Rp 1.300	Rp 285.998	April 2025	Apotek
245	1.1.7.01.04.01.211	SALBUTAMOL CAIRAN INHALASI 0,1%	10	NEBULES	Rp 5.280	Rp 52.800	April 2025	Apotek
246	1.1.7.01.04.01.216	WARFARIN TABLET 2MG @100	150	TABLET	Rp 704	Rp 105.654	April 2025	Apotek
247	1.1.7.01.04.01.210	CEFIXIME DRY SYRUP	10	BOTOL	Rp 9.262	Rp 92.620	Mei 2025	Apotek
248	1.1.7.01.04.01.210	CEFIXIME DRY SYRUP	4	BOTOL	Rp 9.262	Rp 37.048	Mei 2025	Apotek
249	1.1.7.01.04.01.203.	DIAZEPAM 10MG/2.5ML RECTAL TUBE	5	TUBE	Rp 19.870	Rp 99.350	Mei 2025	Apotek
250	1.1.7.01.04.01.518	INADRYL 100 ML SYR	22	BOTOL	Rp 22.000	Rp 483.999	Mei 2025	Apotek
251	1.1.7.01.04.01.512	LACOLDIN TABLET	300	TABLET	Rp 2.393	Rp 717.948	Mei 2025	Apotek
252	1.1.7.01.04.01.512	LACOLDIN TABLET	5	TABLET	Rp 2.393	Rp 11.966	Mei 2025	Apotek
253	1.1.7.01.04.01.297	MELOXICAM 7,5 MG	170	TABLET	Rp 378	Rp 64.260	Mei 2025	Apotek
254	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	91	TABLET	Rp 306	Rp 27.846	Mei 2025	Apotek
255	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	345	TABLET	Rp 306	Rp 105.570	Mei 2025	Apotek
256	1.1.7.01.04.01.519	PRONEURON TAB (METAMIZOLE SODIUM 500 MG + DIAZEPAM 2 MG)	120	TABLET	Rp 1.399	Rp 167.832	Mei 2025	Apotek
257	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	300	TABLET	Rp 207	Rp 62.157	Mei 2025	Apotek
258	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	300	TABLET	Rp 207	Rp 62.157	Mei 2025	Apotek
259	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	51	TABLET	Rp 207	Rp 10.567	Mei 2025	Apotek
260	1.1.7.01.04.01.219	SIMVASTATIN SCORED TABLET 20 MG	200	TABLET	Rp 207	Rp 41.438	Mei 2025	Apotek
261	1.1.7.01.04.01.220	STESOLID 5 MG DIAZEPAM ENEMA : DIAZEPAM 5 MG/2,5 ML	5	TUBE	Rp 13.665	Rp 68.325	Mei 2025	Apotek
262	1.1.7.01.04.01.43	BETAMETASON KRIM 0,1 %	7	TUBE	Rp 2.200	Rp 15.400	Juni 2025	Apotek
263	1.1.7.01.04.01.461	RIFAMPISIN 450 MG	40	TABLET	Rp 5.460	Rp 218.400	Juni 2025	Apotek
264	1.1.7.01.04.01.461	RIFAMPISIN 450 MG	11	TABLET	Rp 2.167	Rp 23.834	Juni 2025	Apotek
265	1.1.7.01.04.01.07	AMBROXOL SYR	1	Botol	Rp 4.300	Rp 4.300	Juli 2025	Apotek
266	1.1.7.01.04.01.07	AMBROXOL SYR	37	Botol	Rp 4.300	Rp 159.100	Juli 2025	Apotek
267	1.1.7.01.04.01.34	ASAM TRANEKSAMAT TAB	36	TABLET	Rp 1.941	Rp 69.876	Juli 2025	Apotek
268	1.1.7.01.04.01.116.	ATTAPULGITE (ARCAPEC)	118	TABLET	Rp 343	Rp 40.440	Juli 2025	Apotek
269	1.1.7.01.04.01.490	BISOPROLOL TAB 2,5 MG	354	TABLET	Rp 145	Rp 51.330	Juli 2025	Apotek
270	1.1.7.01.04.01.490	BISOPROLOL TAB 2,5 MG	300	TABLET	Rp 145	Rp 43.500	Juli 2025	Apotek
271	1.1.7.01.04.01.36	DIAZEPAM 5 MG	92	TABLET	Rp 216	Rp 19.871	Juli 2025	Apotek
272	1.1.7.01.04.01.36	DIAZEPAM 5 MG	1	TABLET	Rp 220	Rp 220	Juli 2025	Apotek
273	1.1.7.01.04.01.114	ISOSORBID DINITRAT 5 MG (CEDOCARD)	180	TABLET	Rp 104	Rp 18.709	Juli 2025	Apotek
274	1.1.7.01.04.01.143	KALNEX 500MG TAB @100	132	TABLET	Rp 4.881	Rp 644.231	Juli 2025	Apotek
275	1.1.7.01.04.01.123	KETOCONAZOLE KRIM 2 %	13	TUBE	Rp 6.358	Rp 82.649	Juli 2025	Apotek
276	1.1.7.01.04.01.128	KLORAMFENIKOL TETES MATA	9	BOTOL	Rp 23.588	Rp 212.288	Juli 2025	Apotek
277	1.1.7.01.04.01.427	L-BIO SACHET	7	SACHET	Rp 8.991	Rp 62.937	Juli 2025	Apotek
278	1.1.7.01.04.01.372	OSELTAMIVIR 75 MG	85	TABLET	Rp 14.300	Rp 1.215.500	Juli 2025	Apotek
279	1.1.7.01.04.01.265	TRIHEXYPHENIDYL @100	50	TAB	Rp 64	Rp 3.179	Juli 2025	Apotek
280	1.1.7.01.04.01.233	ZINC SIR 20 MG/5 ML (ZIRCUM KID)	42	BOTOL	Rp 10.545	Rp 442.890	Juli 2025	Apotek
281	1.1.7.01.04.01.254	ANTASIDA SUSPENSI, KOMBINASI : ALUMINIUM HIDROKSIDA 200 MG + MAGNESIUM HIDROKSIDA 200 MG	17	BOTOL	Rp 5.958	Rp 101.294	Agustus 2025	Apotek
282	1.1.7.01.04.01.47	CAPTOPRIL 25 MG	50	TABLET	Rp 132	Rp 6.600	Agustus 2025	Apotek
283	1.1.7.01.04.01.50	CEFADROXIL SYR KERING 125 MG/5 ML	2	BOTOL	Rp 13.181	Rp 26.363	Agustus 2025	Apotek
284	1.1.7.01.04.01.68	DOMPERIDON SUSP/SIRUP 5 MG/5ML	46	BOTOL	Rp 5.411	Rp 248.918	Agustus 2025	Apotek
285	1.1.7.01.04.01.25	RAMIPRIL 2,5 MG	1	TABLET	Rp 264	Rp 264	Agustus 2025	Apotek
286	1.1.7.01.04.01.25	RAMIPRIL 2,5 MG	291	TABLET	Rp 264	Rp 76.824	Agustus 2025	Apotek
287	1.1.7.01.04.01.499	SALIN 3%	17	BOTOL	Rp 34.296	Rp 583.032	Agustus 2025	Apotek
288	1.1.7.01.04.01.265	TRIHEXYPHENIDYL @100	240	TAB	Rp 64	Rp 15.257	Agustus 2025	Apotek
289	1.1.7.01.04.01.245	ANTASIDA TAB KUNYAH : KOMBINASI : ALUMINIUM HIDROKSIDA 200 MG + MAGNESIUM HIDROKSIDA 200 MG	129	TABLET	Rp 354	Rp 45.666	Agustus 2025	Apotek
290	1.1.7.01.04.01.383.	BETASON N CREAM	14	TUBE	Rp 16.484	Rp 230.769	September 2025	Apotek
291	1.1.7.01.04.01.01	HERBESSER 100 MG	200	Tablet	Rp 4.793	Rp 958.600	September 2025	Apotek
292	1.1.7.01.04.01.01	HERBESSER 100 MG	259	Tablet	Rp 4.793	Rp 1.241.387	September 2025	Apotek
293	1.1.7.01.04.01.147	METFORMIN HCL TABLET 500 MG	550	TABLET	Rp 306	Rp 168.300	September 2025	Apotek
294	1.1.7.01.04.01.158	MIKONAZOL KRIM/SALEP 2 % (NITRAT)	16	TUBE	Rp 971	Rp 15.539	September 2025	Apotek
295	1.1.7.01.04.01.525	PROVAGIN OVULA	11	OVULA	Rp 13.487	Rp 148.352	September 2025	Apotek
296	1.1.7.01.04.01.208	SALBUTAMOL SIRUP	5	BOTOL	Rp 7.150	Rp 35.748	September 2025	Apotek
297	1.1.7.01.04.01.430	VITAMIN C 500 MG	120	KAPLET	Rp 400	Rp 47.999	September 2025	Apotek
298	1.1.7.01.04.01.62	DEKSAMETASON TABLET 0,5 MG	161	TABLET	Rp 69	Rp 11.107	Oktober 2025	Apotek
299	1.1.7.01.04.01.69	METHISOPRINOL 250 MG/ 5 ML SYR	20	BOTOL	Rp 55.500	Rp 1.110.000	Oktober 2025	Apotek

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
300	1.1.7.01.04.01.69	METHISOPRINOL 250 MG/ 5 ML SYR	5	BOTOL	Rp 55.500	Rp 277.500	Oktober 2025	Apotek
301	1.1.7.01.04.01.446	MICROGEST - PROGESTERON 200 mg	23	KAPSUL LUNAK	Rp 21.978	Rp 505.494	Oktober 2025	Apotek
302	1.1.7.01.04.01.243	NISTATIN TABLET SALUT GULA 100.000 IU	93	TABLET	Rp 1.832	Rp 170.330	Oktober 2025	Apotek
303	1.1.7.01.04.01.519	PRONEURON TAB (METAMIZOLE SODIUM 500 MG + DIAZEPAM 2 MG)	185	TABLET	Rp 1.399	Rp 258.741	Oktober 2025	Apotek
304	1.1.7.01.04.01.235	ZINC TAB	180	Tablet	Rp 355	Rp 63.900	Oktober 2025	Apotek
305	1.1.7.01.04.01.50	CEFADROXIL SYR KERING 125 MG/5 ML	2	BOTOL	Rp 8.500	Rp 17.000	Oktober 2025	Apotek
306	1.1.7.01.04.01.416	CENDO XYTROL 5ML TETES MATA	8	BOTOL	Rp 28.130	Rp 225.041	Oktober 2025	Apotek
307	1.1.7.01.04.01.119	IRBESARTAN 150 MG	275	TABLET	Rp 689	Rp 189.360	Oktober 2025	Apotek
308	1.1.7.01.04.01.138	LANSOPRAZOL TABLET 30 MG	10	TABLET	Rp 655	Rp 6.550	Oktober 2025	Apotek
309	1.1.7.01.04.01.138	LANSOPRAZOL TABLET 30 MG	200	TABLET	Rp 655	Rp 130.998	Oktober 2025	Apotek
310	1.1.7.01.04.01.439	LISINOPRIL 5MG	47	TABLET	Rp 220	Rp 10.340	Oktober 2025	Apotek
311	1.1.7.01.04.01.446	MICROGEST - PROGESTERON 200 mg	5	KAPSUL LUNAK	Rp 21.978	Rp 109.890	Oktober 2025	Apotek
312	1.1.7.01.04.01.446	MICROGEST - PROGESTERON 200 mg	25	KAPSUL LUNAK	Rp 21.978	Rp 549.450	Oktober 2025	Apotek
313	1.1.7.01.04.01.409	ONDANSETRON 4 MG TABLET	135	TABLET	Rp 3.122	Rp 421.452	Oktober 2025	Apotek
314	1.1.7.01.04.01.50	CEFADROXIL SYR KERING 125 MG/5 ML	1	BOTOL	Rp 8.500	Rp 8.500	Desember 2025	Apotek
315	1.1.7.01.04.01.27	MELIDOX TAB	175	Tablet	Rp 1.099	Rp 192.308	Desember 2025	Apotek
316	1.1.7.01.04.01.192	PIRIDOKSIN (VITAMIN B6) TABLET 10 MG	265	TABLET	Rp 121	Rp 32.001	Desember 2025	Apotek
317	1.1.7.01.04.01.478	RAMIPRIL 10 MG	270	TABLET	Rp 781	Rp 210.867	Desember 2025	Apotek
318	1.1.7.01.04.01.170	RENABETIC (GLIBENCLAMID) 5 MG TAB	280	TABLET	Rp 200	Rp 56.000	Desember 2025	Apotek
319	1.1.7.01.04.01.225	THIAMPHENIKOL KAPSUL	156	KAPSUL	Rp 1.528	Rp 238.441	Desember 2025	Apotek
D	**RSUD AKHMAD BERAHIM**					**Rp 26.947.948**	**BAHAN LAINNYA**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**		
1	1.1.7.01.01.012.470	CONDOM CATHETER L	18	PCS	Rp 6.960	Rp 125.280	Januari 2025	BMHP Gudang
2	1.1.7.01.01.012.471	CONDOM CATHETER M	20	PCS	Rp 6.960	Rp 139.200	Januari 2025	BMHP Gudang
3	1.1.7.01.01.012.477	FOLLEY CATHETER 2WAY NO.20	15	PIECE	Rp 9.351	Rp 140.263	Januari 2025	BMHP Gudang
4	1.1.7.01.01.012.385	MASTER BOND	1	SET	Rp 295.000	Rp 295.000	Januari 2025	BMHP Gudang
5	1.1.7.01.01.012.318	MUCUS EXTRACTOR BAYI	90	PCS	Rp 8.340	Rp 750.599	Januari 2025	BMHP Gudang
6	1.1.7.01.01.012.330	STOMACH TUBE NO. 14	2	PCS	Rp 9.293	Rp 18.586	Januari 2025	BMHP Gudang
7	1.1.7.01.01.012.76	WING NEEDLE 27 G X 3/4 INCH	30	PIECES	Rp 1.667	Rp 50.000	Januari 2025	BMHP Gudang
8	1.1.7.01.01.012.503	RDT ANTIGEN COVID 19	25	TEST	Rp 57.200	Rp 1.430.000	Maret 2025	BMHP Gudang
9	1.1.7.01.01.012.503	RDT ANTIGEN COVID 19	25	TEST	Rp 17.094	Rp 427.350	Maret 2025	BMHP Gudang
10	1.1.7.01.01.012.21	CERVICAL COLLAR UK. L	4	KOTAK	Rp 173.950	Rp 695.800	April 2025	BMHP Gudang
11	1.1.7.01.01.012.21	CERVICAL COLLAR UK. L	1	KOTAK	Rp 173.950	Rp 173.950	April 2025	BMHP Gudang
12	1.1.7.01.01.012.529	PROBE CLEANSER 50 ML 5 DIFF M-53	15	BOTOL	Rp 499.500	Rp 7.492.500	Mei 2025	BMHP Gudang
13	1.1.7.01.01.012.152	HI OXYGEN MASKER DEWASA	50	PIECE	Rp 23.976	Rp 1.198.800	Juli 2025	BMHP Gudang
14	1.1.7.01.01.012.460	NOUSMED OXYGEN MASK ANAK	100	PIECES	Rp 9.940	Rp 993.960	Juli 2025	BMHP Gudang
15	1.1.7.01.01.012.444	ARKAN MEDIKAL MICRO TUBE BLOOD COLLECTION K3 EDTA 0,5 ML	950	PCS	Rp 1.361	Rp 1.292.561	Agustus 2025	BMHP Gudang
16	1.1.7.01.01.012.260	AUTOCHECK Total Cholesterol Test Strip 25 Strips/Box	10	BOX	Rp 386.851	Rp 3.868.511	September 2025	BMHP Gudang
17	1.1.7.01.01.012.219	GUEDEL AIRWAY 80 MM DISP. STERIL	3	PIECE	Rp 15.089	Rp 45.268	September 2025	BMHP Gudang
18	1.1.7.01.01.012.219	GUEDEL AIRWAY 80 MM DISP. STERIL	17	PIECE	Rp 15.089	Rp 256.509	September 2025	BMHP Gudang
19	1.1.7.01.01.012.327	BIOSENS - TEST DENGUE IGG/IGM 25S	5	BOX	Rp 610.333	Rp 3.051.667	Oktober 2025	BMHP Gudang
20	1.1.7.01.01.012.20	CERVICAL COLLAR UK. M	4	BOX	Rp 173.950	Rp 695.800	Oktober 2025	BMHP Gudang
21	1.1.7.01.01.012.20	CERVICAL COLLAR UK. M	1	BOX	Rp 173.950	Rp 173.950	Oktober 2025	BMHP Gudang
22	1.1.7.01.01.012.19	CERVICAL COLLAR UK. S	4	BOX	Rp 173.950	Rp 695.800	Oktober 2025	BMHP Gudang
23	1.1.7.01.01.012.19	CERVICAL COLLAR UK. S	1	BOX	Rp 173.950	Rp 173.950	Oktober 2025	BMHP Gudang
24	1.1.7.01.01.012.64	GUEDEL AIRWAY 60 MM DISP. STERIL	5	PIECE	Rp 15.089	Rp 75.444	Oktober 2025	BMHP Gudang
25	1.1.7.01.01.012.376	POVIDONE IODIN 1 L	15	BOTOL	Rp 74.925	Rp 1.123.875	Oktober 2025	BMHP Gudang
26	1.1.7.01.01.012.90	TEST KEHAMILAN (PPTS/HCG TEST)	150	PIECE	Rp 2.498	Rp 374.625	Oktober 2025	BMHP Gudang
27	1.1.7.01.01.012.2	ALCOHOL SWAB	2	BOX	Rp 10.656	Rp 21.312	Februari 2025	BMHP Apotek
28	1.1.7.01.01.012.451	GYPSONA NO. 6 3.5M X 15CM	6	ROLL	Rp 75.480	Rp 452.880	Februari 2025	BMHP Apotek
29	1.1.7.01.01.012.101	JAYAMAS STERA INFUSION SET ANAK	50	PIECE	Rp 4.071	Rp 203.572	Februari 2025	BMHP Apotek
30	1.1.7.01.01.012.108.	FOLLEY CATHETER 3 WAY NO. 22	10	PIECE	Rp 39.694	Rp 396.936	Juli 2025	BMHP Apotek
31	1.1.7.01.01.012.150	SARUNG TANGAN OBGYN	5	PASANG	Rp 22.800	Rp 114.000	Agustus 2025	BMHP Apotek
E	**PUSKESMAS TANA LIA**					**Rp 84.605.509**	**Obat**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**		
1	1.1.7.01.04.01.102	HYDROCHLORTIACID 25 MG	100	TABLET	Rp 149	Rp 14.900	Januari 2025	Gudang
2	1.1.7.01.04.01.102	HYDROCHLORTIACID 25 MG	200	TABLET	Rp 186	Rp 37.200	Januari 2025	Gudang
3	1.1.7.01.04.01.102	HYDROCHLORTIACID 25 MG	200	TABLET	Rp 186	Rp 37.200	Januari 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
4	1.1.7.01.04.01.102	HYDROCHLORTIACID 25 MG	400	TABLET	Rp 186	Rp 74.400	Januari 2025	Gudang
5	1.1.7.01.04.01.105	HYOSCINE-N-BUTILBROMIDE INJEKSI 20 MG/ML	10	AMPUL	Rp 7.488	Rp 74.880	Januari 2025	Gudang
6	1.1.7.01.04.01.105	HYOSCINE-N-BUTILBROMIDE INJEKSI 20 MG/ML	12	AMPUL	Rp 7.488	Rp 89.856	Januari 2025	Gudang
7	1.1.7.01.04.01.114	KETOKONAZOL 200MG	150	TABLET	Rp 440	Rp 65.999	Januari 2025	Gudang
8	1.1.7.01.04.01.195	TRIHEXIPHENIDIL 2 MG	100	TABLET	Rp 63	Rp 6.300	Januari 2025	Gudang
9	1.1.7.01.04.01.03.090	ADS 0,5 ml (COVID)	300	PIECES	Rp 1.050	Rp 315.000	November 2025	Gudang
10	1.1.7.01.04.01.565	CANDESARTAN 16 MG	180	ABLET @ 30 TA	Rp 504	Rp 90.720	November 2025	Gudang
11	1.1.7.01.04.02.01.256	CODEFREE BLOOD GLUCO MONITORING SYSTEM	1	UNIT	Rp 221.000	Rp 221.000	November 2025	Gudang
12	1.1.7.01.04.02.01.098	GLUKOSA 5% INFUS	13	FLAKON	Rp 8.530	Rp 110.890	November 2025	Gudang
13	1.1.7.01.04.02.01.103	Hb Testing System	1	box	Rp 920.899	Rp 920.899	November 2025	Gudang
14	1.1.7.01.04.01.02.301	RIFAMPICIN/ISONIAZID 75/50 MG @ 84 TAB	84	TABLET	Rp 847	Rp 71.148	November 2025	Gudang
15	1.1.7.01.04.01.02.052	VITAMIN B6 25 MG (HIV)	200	TABLET	Rp 272	Rp 54.400	November 2025	Gudang
16	1.1.7.01.04.01.036	BETAMETHASONE 0,1 %	35	TUBE	Rp 2.750	Rp 96.250	Oktober 2025	Gudang
17	1.1.7.01.04.01.092	GENTAMICIN INJEKSI 40 MG/ML	3	AMPUL	Rp 3.134	Rp 9.402	Oktober 2025	Gudang
18	1.1.7.01.04.01.02.043	OXYTETRACYCLINE SM 1% (PROGRAM)	9	Tube	Rp 3.531	Rp 31.779	Oktober 2025	Gudang
19	1.1.7.01.04.01.02.294	SET TRUENAT MTB PLUS	10	SET	Rp 5.339.365	Rp 53.393.650	Oktober 2025	Gudang
20	1.1.7.01.04.02.01.190	SUCTION CATHETER NO.10	2	PCS	Rp 5.214	Rp 10.428	Oktober 2025	Gudang
21	1.1.7.01.04.02.01.190	SUCTION CATHETER NO.10	2	PCS	Rp 5.214	Rp 10.428	Oktober 2025	Gudang
22	1.1.7.01.04.02.01.190	SUCTION CATHETER NO.10	3	PCS	Rp 5.214	Rp 15.642	Oktober 2025	Gudang
23	1.1.7.01.04.01.02.295	TRUENAT MTB RIF	5	KIT	Rp 2.162.781	Rp 10.813.905	Oktober 2025	Gudang
24	1.1.7.01.04.01.207	VITAMIN K INJ	9	AMPUL	Rp 3.818	Rp 34.362	Oktober 2025	Gudang
25	1.1.7.01.04.01.207	VITAMIN K INJ	10	AMPUL	Rp 3.818	Rp 38.180	Oktober 2025	Gudang
26	1.1.7.01.04.01.207	VITAMIN K INJ	4	AMPUL	Rp 3.818	Rp 15.272	Oktober 2025	Gudang
27	1.1.7.01.04.01.03.090	ADS 0,5 ml (COVID)	200	PIECES	Rp 1.050	Rp 210.000	September 2025	Gudang
28	1.1.7.01.04.01.03.090	ADS 0,5 ml (COVID)	200	PIECES	Rp 1.050	Rp 210.000	September 2025	Gudang
29	1.1.7.01.04.01.03.090	ADS 0,5 ml (COVID)	300	PIECES	Rp 1.050	Rp 315.000	September 2025	Gudang
30	1.1.7.01.04.01.03.090	ADS 0,5 ml (COVID)	200	PIECES	Rp 1.050	Rp 210.000	September 2025	Gudang
31	1.1.7.01.04.01.241	ASPILET	400	TABLET	Rp 537	Rp 214.800	September 2025	Gudang
32	1.1.7.01.04.01.02.109	NATRIUM DICLOFENAK 25 MG (KB)	10	STRIPS	Rp 8.288	Rp 82.880	September 2025	Gudang
33	1.1.7.01.04.01.160	PIROXICAM 20 MG	100	TABLET	Rp 134	Rp 13.400	September 2025	Gudang
34	1.1.7.01.04.02.01.090	8100B2 ESPE FILTEK P60 RESTORATIVE SYSTEM	1	PIECES	Rp 435.100	Rp 435.100	Agustus 2025	Gudang
35	1.1.7.01.04.02.01.070	GEL DOPLER	1	BOTOL	Rp 36.976	Rp 36.976	Agustus 2025	Gudang
36	1.1.7.01.04.02.01.070	GEL DOPLER	1	BOTOL	Rp 36.976	Rp 36.976	Agustus 2025	Gudang
37	1.1.7.01.04.01.4092	KALSIUM GLUKONAT INJ	2	AMPUL	Rp 5.775	Rp 11.550	Agustus 2025	Gudang
38	1.1.7.01.04.01.4186	MgSO4 40%	10	BOTOL	Rp 5.660	Rp 56.600	Agustus 2025	Gudang
39	1.1.7.01.04.01.165	PYRANTEL 125 MG	200	TABLET	Rp 513	Rp 102.600	Agustus 2025	Gudang
40	1.1.7.01.04.01.165	PYRANTEL 125 MG	100	TABLET	Rp 513	Rp 51.300	Agustus 2025	Gudang
41	1.1.7.01.04.01.02.139	RDT DBD IgG/IgM (VIROTEC)	50	TEST	Rp 37.670	Rp 1.883.500	Agustus 2025	Gudang
42	1.1.7.01.04.01.02.139	RDT DBD IgG/IgM (VIROTEC)	10	TEST	Rp 37.670	Rp 376.700	Agustus 2025	Gudang
43	1.1.7.01.04.01.088	FENOL GLYCEROL TT 10 %	24	BOTOL	Rp 6.095	Rp 146.280	Juli 2025	Gudang
44	1.1.7.01.04.01.094	GENTAMICYN TM	14	BOTOL	Rp 9.363	Rp 131.084	Juli 2025	Gudang
45	1.1.7.01.04.01.094	GENTAMICYN TM	24	BOTOL	Rp 9.363	Rp 224.716	Juli 2025	Gudang
46	1.1.7.01.04.01.126	METHYL ERGOMETRIN INJ	4	ampul	Rp 8.214	Rp 32.856	Juli 2025	Gudang
47	1.1.7.01.04.01.02.040	RDT Malaria (PROGRAM)	50	Test	Rp 11.488	Rp 574.400	Juli 2025	Gudang
48	1.1.7.01.04.01.02.267	TLD 300/300/50 Mg (HIV)	1	BOTOL	Rp 84.150	Rp 84.150	Juli 2025	Gudang
49	1.1.7.01.04.01.02.267	TLD 300/300/50 Mg (HIV)	2	BOTOL	Rp 84.150	Rp 168.300	Juli 2025	Gudang
50	1.1.7.01.04.01.02.031	VAKSIN TD @10 DS	15	VIAL	Rp 23.000	Rp 345.005	Juli 2025	Gudang
51	1.1.7.01.04.01.113	KETOKONAZOL CREAM 2 %	25	TUBE	Rp 2.584	Rp 64.600	Juni 2025	Gudang
52	1.1.7.01.04.01.113	KETOKONAZOL CREAM 2 %	25	TUBE	Rp 2.584	Rp 64.600	Juni 2025	Gudang
53	1.1.7.01.04.02.01.020	MASKER NEBULIZER SET DEWASA	1	BUAH	Rp 21.482	Rp 21.482	Juni 2025	Gudang
54	1.1.7.01.04.02.01.109	O-ZYME 5 LITER	1	GALON	Rp 816.000	Rp 816.000	Juni 2025	Gudang
55	1.1.7.01.04.02.01.010	3M 7423 ETCHANT GEL VIAL 9 ML	1	BOTOL	Rp 209.800	Rp 209.800	Mei 2025	Gudang
56	1.1.7.01.04.02.01.010	3M 7423 ETCHANT GEL VIAL 9 ML	2	BOTOL	Rp 209.800	Rp 419.600	Mei 2025	Gudang
57	1.1.7.01.04.01.005	ALBENDAZOL SUSPENSI	20	TABLET	Rp 4.473	Rp 89.460	Mei 2025	Gudang
58	1.1.7.01.04.01.012	AMINOPHYLLIN INJ	4	AMPUL	Rp 4.175	Rp 16.700	Mei 2025	Gudang
59	1.1.7.01.04.01.027	ARTESUNAT INJE	2	AMPUL	Rp 69.898	Rp 139.796	Mei 2025	Gudang
60	1.1.7.01.04.02.01.227	CAT GUT CHROMIC 4/0 HR 30 MM	1	BOX	Rp 406.428	Rp 406.428	Mei 2025	Gudang
61	1.1.7.01.04.02.01.091	INFUSET MIKRO	20	PCS	Rp 4.071	Rp 81.429	Mei 2025	Gudang
62	1.1.7.01.04.02.01.091	INFUSET MIKRO	80	PCS	Rp 7.199	Rp 575.920	Mei 2025	Gudang
63	1.1.7.01.04.01.191.2	OMEPRAZOLE INJ 40 MG	18	AMPUL	Rp 6.000	Rp 108.000	Mei 2025	Gudang
64	1.1.7.01.04.02.01.184	SUCTION CATHETER NO. 14	1	PCS	Rp 5.214	Rp 5.214	Mei 2025	Gudang
65	1.1.7.01.04.02.01.185	SUCTION CATHETER NO.16	1	PCS	Rp 5.214	Rp 5.214	Mei 2025	Gudang
66	1.1.7.01.04.01.02.030	VAKSIN MR @ 10 DS	5	VIAL	Rp 203.310	Rp 1.016.550	Mei 2025	Gudang
67	1.1.7.01.04.01.02.030	VAKSIN MR @ 10 DS	2	VIAL	Rp 244.801	Rp 489.602	Mei 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
68	1.1.7.01.04.01.020	ANTASIDA SYRUP	5	BOTOL	Rp 3.450	Rp 17.250	April 2025	Gudang
69	1.1.7.01.04.01.02.039	DHP	27	TABLET	Rp 2.851	Rp 76.977	April 2025	Gudang
70	1.1.7.01.04.02.01.041	DISPOSIBLE 5 ML	100	PCS	Rp 1.260	Rp 126.000	April 2025	Gudang
71	1.1.7.01.04.02.01.041	DISPOSIBLE 5 ML	100	PCS	Rp 1.260	Rp 126.000	April 2025	Gudang
72	1.1.7.01.04.02.01.041	DISPOSIBLE 5 ML	70	PCS	Rp 1.260	Rp 88.200	April 2025	Gudang
73	1.1.7.01.04.02.01.066	EUGENOL	1	BOTOL	Rp 20.175	Rp 20.175	April 2025	Gudang
74	1.1.7.01.04.02.01.066	EUGENOL	2	BOTOL	Rp 20.175	Rp 40.350	April 2025	Gudang
75	1.1.7.01.04.02.01.073	GLUCO PROTEIN TEST URINE 10S OM	10	PIECES	Rp 1.254	Rp 12.540	April 2025	Gudang
76	1.1.7.01.04.02.01.091	INFUSET MIKRO	20	PCS	Rp 7.199	Rp 143.980	April 2025	Gudang
77	1.1.7.01.04.01.02.231	MONSON TB (PROGRAM)	3	BOTOL	Rp 1.500.751	Rp 4.502.254	April 2025	Gudang
78	1.1.7.01.04.02.01.138	NaCl INFUS (REGULER)	3	FLAKON	Rp 7.670	Rp 23.010	April 2025	Gudang
79	1.1.7.01.04.01.02.055	Primaquin	30	Tablet	Rp 375	Rp 11.250	April 2025	Gudang
80	1.1.7.01.04.01.178	SALBUTAMOL VENTOLIN NEBULES	7	AMPUL	Rp 5.280	Rp 36.960	April 2025	Gudang
81	1.1.7.01.04.01.037	BISAKODIL 10 MG SUPP (STOLAX)	10	SUPP	Rp 4.325	Rp 43.250	Maret 2025	Gudang
82	1.1.7.01.04.02.01.010	Duk Lubang Steril 50 x 50 cm	5	pieces	Rp 10.356	Rp 51.780	Maret 2025	Gudang
83	1.1.7.01.04.01.089	FUROSEMIDE 40 MG	600	TABLET	Rp 143	Rp 85.554	Maret 2025	Gudang
84	1.1.7.01.04.01.089	FUROSEMIDE 40 MG	400	TABLET	Rp 143	Rp 57.036	Maret 2025	Gudang
85	1.1.7.01.04.01.103	HYDROCORTISON CREAM	24	TUBE	Rp 3.080	Rp 73.920	Maret 2025	Gudang
86	1.1.7.01.04.01.147	OXITOCIN INJEKSI	20	AMPUL	Rp 1.448	Rp 28.960	Maret 2025	Gudang
87	1.1.7.01.04.01.147	OXITOCIN INJEKSI	20	AMPUL	Rp 1.448	Rp 28.960	Maret 2025	Gudang
88	1.1.7.01.04.01.147	OXITOCIN INJEKSI	10	AMPUL	Rp 1.448	Rp 14.480	Maret 2025	Gudang
89	1.1.7.01.04.01.02.045	VITAMIN K INJEKSI (PROGRAM)	5	AMPUL	Rp 3.330	Rp 16.650	Maret 2025	Gudang
90	1.1.7.01.04.01.02.045	VITAMIN K INJEKSI (PROGRAM)	5	AMPUL	Rp 1.386	Rp 6.930	Maret 2025	Gudang
91	1.1.7.01.04.01.02.045	VITAMIN K INJEKSI (PROGRAM)	3	AMPUL	Rp 1.609	Rp 4.827	Maret 2025	Gudang
92	1.1.7.01.04.01.02.045	VITAMIN K INJEKSI (PROGRAM)	20	AMPUL	Rp 3.330	Rp 66.600	Maret 2025	Gudang
93	1.1.7.01.04.02.01.018	CAT GUT CHROMIC 2/0 30 mm	1	BOX	Rp 312.432	Rp 312.432	Februari 2025	Gudang
94	1.1.7.01.04.01.065	DEXAMETHASON INJEKSI	10	AMPUL	Rp 1.199	Rp 11.990	Februari 2025	Gudang
95	1.1.7.01.04.01.065	DEXAMETHASON INJEKSI	5	AMPUL	Rp 1.199	Rp 5.995	Februari 2025	Gudang
96	1.1.7.01.04.01.072	DIPHENHYDRAMINE INJ	10	AMPUL	Rp 2.220	Rp 22.200	Februari 2025	Gudang
97	1.1.7.01.04.02.01.104	Hb Test Strips	1	box	Rp 431.682	Rp 431.682	Februari 2025	Gudang
98	1.1.7.01.04.02.01.104	Hb Test Strips	2	box	Rp 413.100	Rp 826.200	Februari 2025	Gudang
99	1.1.7.01.04.02.01.126	MASKER TIE ON (IKAT)	5	BOX	Rp 21.532	Rp 107.660	Februari 2025	Gudang
100	1.1.7.01.04.01.161	PREDNISON 5 MG	400	TABLET	Rp 112	Rp 44.800	Februari 2025	Gudang
F	**PUSKESMAS TIDENG PALE**					**Rp 10.131.021**	**Obat**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**	**Kedaluwarsa**	
1	1.1.7.01.04.01.01.095	KETOKONAZOL 200MG	100	TABLET	Rp 440	Rp 43.999	Januari 2025	Gudang
2	1.1.7.01.04.01.01.133	PRIMAQUIN 15 MG	40	TABLET	Rp 375	Rp 15.000	Januari 2025	Gudang
3	1.1.7.01.04.01.01.133	PRIMAQUIN 15 MG	20	TABLET	Rp 242	Rp 4.840	Januari 2025	Gudang
4	1.1.7.01.04.01.01.133	PRIMAQUIN 15 MG	6	TABLET	Rp 242	Rp 1.452	Januari 2025	Gudang
5	1.1.7.01.04.02.01.038	3M 51202 SINGLE BOND 2 RF LA/APAC	1	BOTOL	Rp 1.031.200	Rp 1.031.200	Februari 2025	Gudang
6	1.1.7.01.04.01.01.031	BISAKODIL 10 MG SUPP (DULCOLAX)	25	SUPP	Rp 4.325	Rp 108.125	Februari 2025	Gudang
7	1.1.7.01.04.01.01.219	BISOPROLOL 2.5MG	100	TABLET	Rp 491	Rp 49.100	Februari 2025	Gudang
8	1.1.7.01.04.01.01.219	BISOPROLOL 2.5MG	200	TABLET	Rp 491	Rp 98.200	Februari 2025	Gudang
9	1.1.7.01.04.01.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	4	AMPUL	Rp 1.199	Rp 4.796	Februari 2025	Gudang
10	1.1.7.01.04.01.01.059	DIFENHIDRAMIN INJ	18	AMPUL	Rp 1.800	Rp 32.400	Februari 2025	Gudang
11	1.1.7.01.04.02.046	DISPOSIBLE 5 ML	57	PIECES	Rp 1.260	Rp 71.820	Februari 2025	Gudang
12	1.1.7.01.04.02.046	DISPOSIBLE 5 ML	195	PIECES	Rp 1.260	Rp 245.700	Februari 2025	Gudang
13	1.1.7.01.04.02.01.005	LORNE LABORATORIES SALMONELLA T O WIDAL TEST (VIAL 5 ML)	1	VIAL	Rp 124.598	Rp 124.598	Februari 2025	Gudang
14	1.1.7.01.04.01.01.114	NaCl INFUS	5	FLACON	Rp 7.670	Rp 38.350	Februari 2025	Gudang
15	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	300	TABLET	Rp 95	Rp 28.500	Februari 2025	Gudang
16	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	200	TABLET	Rp 95	Rp 19.000	Februari 2025	Gudang
17	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	300	TABLET	Rp 95	Rp 28.500	Februari 2025	Gudang
18	1.1.7.01.04.01.01.072	FUROSEMIDE 40 MG	200	TABLET	Rp 143	Rp 28.518	Maret 2025	Gudang
19	1.1.7.01.04.01.01.171	MINIASPI 80 ASAM ASETILSALISILAT(ASETOSAL)	200	TABLET	Rp 537	Rp 107.400	Maret 2025	Gudang
20	1.1.7.01.04.01.02.055	OSELTAMIVIR 75 MG	520	KAPSUL	Rp 8.900	Rp 4.628.000	Maret 2025	Gudang
21	1.1.7.01.04.01.01.165	VITAMIN K INJ	2	AMPUL	Rp 3.330	Rp 6.660	Maret 2025	Gudang
22	1.1.7.01.04.01.01.168	STESOLID DIAZEPAM ENEMA 5 MG/2,5 ML	5	TUBE	Rp 13.546	Rp 67.730	April 2025	Gudang
23	1.1.7.01.04.01.01.010	AMINOPHYLLIN INJ	5	INJEKSI	Rp 2.968	Rp 14.840	Mei 2025	Gudang
24	1.1.7.01.04.01.01.010	AMINOPHYLLIN INJ	2	INJEKSI	Rp 4.175	Rp 8.350	Mei 2025	Gudang
25	1.1.7.01.04.01..762	PLESTERIN GEL HYDROGEL	3	TUBE	Rp 42.968	Rp 128.905	Mei 2025	Gudang
26	1.1.7.01.04.01.01.230	ASAM TRANEKSAMAT 500 MG	500	TABLET	Rp 1.940	Rp 970.000	Juni 2025	Gudang
27	1.1.7.01.04.01.01.094	KETOKONAZOL CREAM 2 %	15	TUBE	Rp 2.584	Rp 38.760	Juni 2025	Gudang
28	1.1.7.01.04.01.01.096	KETOROLAC INJ	5	AMPUL	Rp 1.879	Rp 9.395	Juni 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
29	1.1.7.01.04.01.01.214	MgSO4 20 %	5	ampul	Rp 4.970	Rp 24.850	Juni 2025	Gudang
30	1.1.7.01.04.01.01.214	MgSO4 20 %	5	ampul	Rp 4.970	Rp 24.850	Juni 2025	Gudang
31	1.1.7.01.04.01.01.120	OTSU MgSO4	1	BOTOL	Rp 5.660	Rp 5.660	Juni 2025	Gudang
32	1.1.7.01.04.01.01.120	OTSU MgSO4	1	BOTOL	Rp 4.339	Rp 4.339	Juni 2025	Gudang
33	1.1.7.01.04.01.01.121	OXITOCIN INJEKSI	1	AMPUL	Rp 1.448	Rp 1.448	Juni 2025	Gudang
34	1.1.7.01.04.01.01.142	RINGER LACTATE INFUS	4	FLACON	Rp 7.703	Rp 30.812	Juni 2025	Gudang
35	1.1.7.01.04.01.01.142	RINGER LACTATE INFUS	17	FLACON	Rp 8.490	Rp 144.330	Juni 2025	Gudang
36	1.1.7.01.04.01.01.071	FENOL GLYCEROL TT 10 %	20	BOTOL	Rp 6.095	Rp 121.900	Juli 2025	Gudang
37	1.1.7.01.04.01.01.103	METHYL ERGOMETRIN INJ	2	AMPUL	Rp 8.214	Rp 16.428	Juli 2025	Gudang
38	1.1.7.01.04.01.01.255	TLD 300/300/50 MG (HIV)	3	BOTOL	Rp 84.150	Rp 252.450	Juli 2025	Gudang
39	1.1.7.01.04.02.01.070	8100B2 ESPE FILTEK P60 RESTORATIVE SYS	1	PIECES	Rp 481.467	Rp 481.467	Agustus 2025	Gudang
40	1.1.7.01.04.02.01.079	BIODINAMIKA TRICRESOLFORMALINA	1	BOX	Rp 82.150	Rp 82.150	Agustus 2025	Gudang
41	1.1.7.01.04.01.01.135	PYRANTEL 125 MG	60	TABLET	Rp 513	Rp 30.780	Agustus 2025	Gudang
42	1.1.7.01.04.02.01.057	BIODINAMICA PARAMONO CLOROFENOL	1	DUS	Rp 76.600	Rp 76.600	September 2025	Gudang
43	1.1.7.01.04.02.01.046	DENPRO ZINC F	2	DUS	Rp 215.350	Rp 430.700	September 2025	Gudang
44	1.1.7.01.04.02.01.046	DENPRO ZINC F	1	DUS	Rp 145.833	Rp 145.833	September 2025	Gudang
45	1.1.7.01.04.01.01.165	VITAMIN K INJ	2	AMPUL	Rp 3.818	Rp 7.636	Oktober 2025	Gudang
46	1.1.7.01.04.01.01.165	VITAMIN K INJ	5	AMPUL	Rp 3.330	Rp 16.650	Oktober 2025	Gudang
47	1.1.7.01.04.01.01.198	CLINDAMICYN 300 MG	200	TABLET	Rp 1.390	Rp 278.000	Desember 2025	Gudang
G	**PUSKESMAS SESAYAP HILIR**					**Rp 5.406.272**	**Obat**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**	**Kedaluwarsa**	
1	1.1.7.01.04.01.01.003	ACYCLOVYR 400	900	Tablet	Rp 792	Rp 712.800	Januari 2025	Gudang
2	1.1.7.01.04.01.01.085	HYDROCHLORTIACID 25 MG	200	TABLET	Rp 186	Rp 37.200	Januari 2025	Gudang
3	1.1.7.01.04.01.01.085	HYDROCHLORTIACID 25 MG	1000	TABLET	Rp 186	Rp 186.000	Januari 2025	Gudang
4	1.1.7.01.04.01.01.085	HYDROCHLORTIACID 25 MG	700	TABLET	Rp 186	Rp 130.200	Januari 2025	Gudang
5	1.1.7.01.04.01.01.103	METHYL ERGOMETRIN INJ	5	AMPUL	Rp 8.214	Rp 41.070	Januari 2025	Gudang
6	1.1.7.01.04.01.01.132	PREDNISON 5 MG	100	TABLET	Rp 112	Rp 11.200	Januari 2025	Gudang
7	1.1.7.01.04.01.01.132	PREDNISON 5 MG	350	TABLET	Rp 112	Rp 39.200	Januari 2025	Gudang
8	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	100	TABLET	Rp 95	Rp 9.500	Januari 2025	Gudang
9	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	500	TABLET	Rp 74	Rp 37.000	Januari 2025	Gudang
10	1.1.7.01.04.01.01.152	TABLET TAMBAH DARAH	500	TABLET	Rp 258	Rp 128.990	Januari 2025	Gudang
11	1.1.7.01.04.01.01.033	CAPTOPRIL 25 MG	300	TABLET	Rp 132	Rp 39.600	Februari 2025	Gudang
12	1.1.7.01.04.01.01.046	DISPOSIBLE 5 ML	190	PIECES	Rp 1.260	Rp 239.400	Februari 2025	Gudang
13	1.1.7.01.04.01.01.072	FUROSEMIDE 40 MG	300	TABLET	Rp 143	Rp 42.777	Februari 2025	Gudang
14	1.1.7.01.04.01.01.072	FUROSEMIDE 40 MG	200	TABLET	Rp 143	Rp 28.518	Februari 2025	Gudang
15	1.1.7.01.04.01.01.091	ISOSORBID DINITRATE 5 MG	300	TABLET	Rp 103	Rp 30.900	Februari 2025	Gudang
16	1.1.7.01.04.01.01.095	KETOKONAZOL 200MG	100	TABLET	Rp 390	Rp 39.000	Februari 2025	Gudang
17	1.1.7.01.04.01.01.095	KETOKONAZOL 200MG	500	TABLET	Rp 440	Rp 219.995	Februari 2025	Gudang
18	1.1.7.01.04.01.01.095	KETOKONAZOL 200MG	100	TABLET	Rp 270	Rp 27.000	Februari 2025	Gudang
19	1.1.7.01.04.01.01.121	OXITOCIN INJEKSI	15	AMPUL	Rp 1.448	Rp 21.720	Februari 2025	Gudang
20	1.1.7.01.04.01.01.004	ALBENDAZOL SUSPENSI	9	BOTOL	Rp 4.473	Rp 40.257	April 2025	Gudang
21	1.1.7.01.04.01.01.010	AMINOPHYLLIN INJ	3	INJEKSI	Rp 4.175	Rp 12.525	April 2025	Gudang
22	1.1.7.01.04.01.01.010	AMINOPHYLLIN INJ	1	INJEKSI	Rp 4.175	Rp 4.175	April 2025	Gudang
23	1.1.7.01.04.01.01.033	CATHETER KARET 3 WAY NO.24	5	PIECES	Rp 33.779	Rp 168.894	April 2025	Gudang
24	1.1.7.01.04.01.01.023	CATHETER KARET PED NO.10	2	PIECES	Rp 35.858	Rp 71.716	April 2025	Gudang
25	1.1.7.01.04.01.01.023	CATHETER KARET PED NO.10	2	PIECES	Rp 28.840	Rp 57.680	April 2025	Gudang
26	1.1.7.01.04.01.01.023	CATHETER KARET PED NO.10	1	PIECES	Rp 28.840	Rp 28.840	April 2025	Gudang
27	1.1.7.01.04.01.01.022	CATHETER KARET PED NO.8	2	PIECES	Rp 28.840	Rp 57.680	April 2025	Gudang
28	1.1.7.01.04.01.01.132	PREDNISON 5 MG	450	TABLET	Rp 112	Rp 50.400	April 2025	Gudang
29	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	600	TABLET	Rp 74	Rp 44.400	April 2025	Gudang
30	1.1.7.01.04.01.01.152	TABLET TAMBAH DARAH	500	TABLET	Rp 258	Rp 128.990	April 2025	Gudang
31	1.1.7.01.04.01.01.247	ASAM TRANEKSAMAT 100 MG/ML	10	VIAL	Rp 3.440	Rp 34.400	Mei 2025	Gudang
32	1.1.7.01.04.01.01.247	ASAM TRANEKSAMAT 100 MG/ML	10	VIAL	Rp 3.440	Rp 34.400	Mei 2025	Gudang
33	1.1.7.01.04.01.01.072	GEL DOPLER	5	BOTOL	Rp 36.976	Rp 184.880	Mei 2025	Gudang
34	1.1.7.01.04.01.01 .041	IUD COVER T	3	UNIT	Rp 11.800	Rp 35.400	Mei 2025	Gudang
35	1.1.7.01.04.01.01.237	OAT Kategori Anak	1	Paket	Rp 391.234	Rp 391.234	Mei 2025	Gudang
36	1.1.7.01.04.01.01 .206	ALAT SUNTIK ADS 0,5ML	100	PIECES	Rp 1.050	Rp 105.000	Juni 2025	Gudang
37	1.1.7.01.04.01.01 .206	ALAT SUNTIK ADS 0,5ML	200	PIECES	Rp 1.050	Rp 210.000	Juni 2025	Gudang
38	1.1.7.01.04.01.01 .206	ALAT SUNTIK ADS 0,5ML	100	PIECES	Rp 1.050	Rp 105.000	Juni 2025	Gudang
39	1.1.7.01.04.01.01 .206	ALAT SUNTIK ADS 0,5ML	200	PIECES	Rp 1.050	Rp 210.000	Juni 2025	Gudang
40	1.1.7.01.04.01.01.133	PRIMAQUIN 15 MG	1	TABLET	Rp 360	Rp 360	Juni 2025	Gudang
41	1.1.7.01.04.01.01.248	halloperidol 5 mg	300	tablet	Rp 54	Rp 16.200	Juli 2025	Gudang
42	1.1.7.01.04.01.01.248	halloperidol 5 mg	180	tablet	Rp 61	Rp 10.980	Juli 2025	Gudang
43	1.1.7.01.04.01.01.347	CHLORPROMAZINE HCL 100 MG (KESWA)	300	TABLET	Rp 597	Rp 179.100	Agustus 2025	Gudang

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
44	1.1.7.01.04.01.01.347	CHLORPROMAZINE HCL 100 MG (KESWA)	253	TABLET	Rp 597	Rp 151.041	Agustus 2025	Gudang
45	1.1.7.01.04.01.01.347	CHLORPROMAZINE HCL 100 MG (KESWA)	80	TABLET	Rp 597	Rp 47.760	Agustus 2025	Gudang
46	1.1.7.01.04.01.01.342	ISONIAZID 100 MG (TBC)	100	TABLET	Rp 1.527	Rp 152.700	September 2025	Gudang
47	1.1.7.01.04.01.01.030	BETAMETHASONE 0,1 %	24	TUBE	Rp 2.750	Rp 66.000	Oktober 2025	Gudang
48	1.1.7.01.04.01.01.049	CLINDAMICYN 300	350	TABLET	Rp 1.390	Rp 486.500	November 2025	Gudang
49	1.1.7.01.04.01.01.049	CLINDAMICYN 300	200	TABLET	Rp 1.390	Rp 278.000	November 2025	Gudang
50	1.1.7.01.04.01.01.321	LIDOCAIN 2% INJEKSI (KB)	11	AMPUL	Rp 1.790	Rp 19.690	November 2025	Gudang
H	**PUSKESMAS MURUK RIAN**					**Rp 8.791.913**	**Obat**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**	**Kedaluwarsa**	
1	1.1.7.01.04.01.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	5	AMPUL	Rp 1.776	Rp 8.880	Januari 2025	
2	1.1.7.01.04.01.01.055	DEXAMETHASON INJEKSI	3	AMPUL	Rp 1.199	Rp 3.597	Januari 2025	
3	1.1.7.01.04.01.01.085	HYDROCHLORTIACID 25 MG	400	TABLET	Rp 186	Rp 74.400	Januari 2025	
4	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	500	TABLET	Rp 95	Rp 47.500	Januari 2025	
5	1.1.7.01.04.01.01.144	SALBUTAMOL 2 MG	200	TABLET	Rp 95	Rp 19.000	Januari 2025	
6	1.1.7.01.04.01.01.274	ASAM TRANEKSAMAT 500 MG	20	TABLET	Rp 1.900	Rp 38.000	Oktober 2025	
7	1.1.7.01.04.01.01.257	RDT HIV I	25	TEST	Rp 8.391	Rp 209.775	Oktober 2025	
8	1.1.7.01.04.01.01.257	RDT HIV I	25	TEST	Rp 7.879	Rp 196.975	Oktober 2025	
9	1.1.7.01.04.01.01.257	RDT HIV I	25	TEST	Rp 7.879	Rp 196.975	Oktober 2025	
10	1.1.7.01.04.01.01.257	RDT HIV I	25	TEST	Rp 6.564	Rp 164.100	Oktober 2025	
11	1.1.7.01.04.01.01.257	RDT HIV I	25	TEST	Rp 6.564	Rp 164.100	Oktober 2025	
12	1.1.7.01.04.01.01.030	BETAMETHASONE 0,1 %	30	TUBE	Rp 2.750	Rp 82.500	September 2025	
13	1.1.7.01.04.01.01.030	BETAMETHASONE 0,1 %	20	TUBE	Rp 2.750	Rp 55.000	September 2025	
14	1.1.7.01.04.01.01.139	RDT DBD	30	Test	Rp 37.670	Rp 1.130.100	September 2025	
15	1.1.7.01.04.01.01.139	RDT DBD	30	Test	Rp 37.670	Rp 1.130.100	September 2025	
16	1.1.7.01.04.01.01.139	RDT DBD	10	Test	Rp 45.366	Rp 453.660	September 2025	
17	1.1.7.01.04.01.01.259	RDT SIFILIS TREPOCHECK	25	TEST	Rp 8.096	Rp 202.400	September 2025	
18	1.1.7.01.04.01.01.259	RDT SIFILIS TREPOCHECK	25	TEST	Rp 4.385	Rp 109.625	September 2025	
19	1.1.7.01.04.01.01.165	VITAMIN K INJ	10	AMPUL	Rp 3.818	Rp 38.180	September 2025	
20	1.1.7.01.04.01.01.242	KALSIUM GLUKONAS INJEKSI	5	AMPUL	Rp 5.775	Rp 28.875	Agustus 2025	
21	1.1.7.01.04.01.01.186	MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 40%v (i.v)	3	botol	Rp 5.660	Rp 16.980	Agustus 2025	
22	1.1.7.01.04.01.01.131	PIROXICAM 20 MG	200	TABLET	Rp 134	Rp 26.800	Agustus 2025	
23	1.1.7.01.04.01.01.135	PYRANTEL 125 MG	100	TABLET	Rp 513	Rp 51.300	Agustus 2025	
24	1.1.7.01.04.01.01.135	PYRANTEL 125 MG	60	TABLET	Rp 513	Rp 30.780	Agustus 2025	
25	1.1.7.01.04.01.01.071	FENOL GLYCEROL TT 10 %	3	BOTOL	Rp 6.095	Rp 18.285	Juli 2025	
26	1.1.7.01.04.01.01.185	MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 20%V (i.v)	5	BOTOL	Rp 4.970	Rp 24.850	Juli 2025	
27	1.1.7.01.04.01.01.185	MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 20%V (i.v)	5	BOTOL	Rp 3.328	Rp 16.640	Juli 2025	
28	1.1.7.01.04.01.01.186	MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 40%v (i.v)	4	botol	Rp 5.660	Rp 22.640	Juli 2025	
29	1.1.7.01.04.01.01.186	MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 40%v (i.v)	5	botol	Rp 5.660	Rp 28.300	Juli 2025	
30	1.1.7.01.04.01.01.244	RDT MALARIA	7	TEST	Rp 11.488	Rp 80.416	Juli 2025	
31	1.1.7.01.04.01.01.104	HB TEST STRIPS	1	BOX	Rp 413.100	Rp 413.100	Juni 2025	
32	1.1.7.01.04.01.01.133	PRIMAQUIN 15 MG	30	TABLET	Rp 375	Rp 11.250	Juni 2025	
33	1.1.7.01.04.01.01.251	ALBENDAZOL 400 MG	30	TABLET	Rp 527	Rp 15.810	Mei 2025	
34	1.1.7.01.04.01.01.004	ALBENDAZOL SUSPENSI	18	BOTOL	Rp 4.473	Rp 80.514	Mei 2025	
35	1.1.7.01.04.01.01.010	AMINOPHYLLIN INJ	4	AMPUL	Rp 4.175	Rp 16.700	Mei 2025	
36	1.1.7.01.04.01.01.072	FUROSEMIDE 40 MG	400	TABLET	Rp 143	Rp 57.036	Mei 2025	
37	1.1.7.01.04.01.01.072	FUROSEMIDE 40 MG	100	TABLET	Rp 143	Rp 14.259	Mei 2025	
38	1.1.7.01.04.01.01.088	HYOSCINE-N-BUTILBROMIDE INJEKSI 20 MG/ML	2	AMPUL	Rp 7.488	Rp 14.976	Mei 2025	
39	1.1.7.01.04.01.01.088	HYOSCINE-N-BUTILBROMIDE INJEKSI 20 MG/ML	3	AMPUL	Rp 7.488	Rp 22.464	Mei 2025	
40	1.1.7.01.04.01.01.088	HYOSCINE-N-BUTILBROMIDE INJEKSI 20 MG/ML	1	AMPUL	Rp 7.488	Rp 7.488	Mei 2025	
41	1.1.7.01.04.01.01.258	OMEPRAZOLE INJECTION 40 MG	8	AMPUL	Rp 6.000	Rp 48.000	Mei 2025	
42	1.1.7.01.04.01.01.247	ADS 0,3 ML	150	PIECES	Rp 1.255	Rp 188.250	Maret 2025	
43	1.1.7.01.04.01.01.090	ADS 0,5 ML	100	PIECES	Rp 1.190	Rp 119.000	Maret 2025	
44	1.1.7.01.04.01.01.090	ADS 0,5 ML	100	PIECES	Rp 1.190	Rp 119.000	Maret 2025	
45	1.1.7.01.04.01.01.130	ASEPTAN 500CC ONEMED	20	BOTOL	Rp 42.650	Rp 853.000	Maret 2025	
46	1.1.7.01.04.01.01.128	METANOL	1	BOTOL	Rp 28.875	Rp 28.875	Maret 2025	
47	1.1.7.01.04.01.01.120	OTSU MgSO4	5	BOTOL	Rp 4.972	Rp 24.860	Maret 2025	
48	1.1.7.01.04.01.01.084	OZYME 5 L	1	JRIGEN	Rp 1.099.637	Rp 1.099.637	Maret 2025	
49	1.1.7.01.04.01.01.165	VITAMIN K INJ	5	AMPUL	Rp 3.330	Rp 16.650	Maret 2025	
50	1.1.7.01.04.01.01.021	AQUA PRO INJEKSI 25 ML	15	AMPUL	Rp 2.955	Rp 44.325	Februari 2025	
51	1.1.7.01.04.01.01.139	ASEPTAN SPRAY 100 ML	20	BOTOL	Rp 21.875	Rp 437.500	Februari 2025	
52	1.1.7.01.04.01.01.057	DIAZEPAM INJ 5 MG/ML/STESOLID	9	AMPUL	Rp 1.545	Rp 13.905	Februari 2025	
53	1.1.7.01.04.01.01.046	DISPOSIBLE 5 ML	74	PIECES	Rp 1.260	Rp 93.240	Februari 2025	

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
54	1.1.7.01.04.01.01.046	DISPOSIBLE 5 ML	100	PIECES	Rp 1.260	Rp 126.000	Februari 2025	
55	1.1.7.01.04.01.01.075	GLYCERIN 1000 ML	1	BOTOL	Rp 99.000	Rp 99.000	Februari 2025	
56	1.1.7.01.04.01.01.094	HCl 0.1N 100 ML	1	BOTOL	Rp 13.200	Rp 13.200	Februari 2025	
57	1.1.7.01.04.01.01.103	IV CATHETER NO.20	140	PIECES	Rp 630	Rp 88.200	Februari 2025	
58	1.1.7.01.04.01.01.103	IV CATHETER NO.20	10	PIECES	Rp 4.400	Rp 44.000	Februari 2025	
59	1.1.7.01.04.01.01.121	OXITOCIN INJEKSI	2	AMPUL	Rp 1.448	Rp 2.896	Februari 2025	
60	1.1.7.01.04.01.01.165	VITAMIN K INJ	5	AMPUL	Rp 1.609	Rp 8.045	Februari 2025	
I	**PUSKESMAS KUJAU**					**Rp 7.613.954**	**Obat**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**		
1	1.1.7.01.04.01.005	ALBENDAZOL 400 MG	100	TABLET	Rp 527	Rp 52.700	Mei 2025	
2	1.1.7.01.04.01.011	AMINOPHYLLIN INJ	3	VIAL	Rp 4.175	Rp 12.525	Mei 2025	
3	1.1.7.01.04.01.011	AMINOPHYLLIN INJ	5	VIAL	Rp 4.175	Rp 20.875	Mei 2025	
4	1.1.7.01.04.01.011	AMINOPHYLLIN INJ	3	VIAL	Rp 4.175	Rp 12.525	Mei 2025	
5	1.1.7.01.04.01.167	DIAZEPAM INJ	2	AMPUL	Rp 1.545	Rp 3.090	Mei 2025	
6	1.1.7.01.04.01.059	DIAZEPAM REKTAL/STESOLID	5	TUBE	Rp 13.546	Rp 67.730	Mei 2025	
7	1.1.7.01.04.01.059	DIAZEPAM REKTAL/STESOLID	2	TUBE	Rp 13.546	Rp 27.092	Mei 2025	
8	1.1.7.01.04.01.162	VITAMIN K INJ	15	AMPUL	Rp 3.818	Rp 57.270	Oktober 2025	
9	1.1.7.01.04.01.162	VITAMIN K INJ	14	AMPUL	Rp 3.330	Rp 46.620	Maret 2025	
10	1.1.7.01.04.01.088	KALSIUM GLUKONAT INJ	2	AMPUL	Rp 6.255	Rp 12.510	Agustus 2025	
11	1.1.7.01.04.01.088	KALSIUM GLUKONAT INJ	17	AMPUL	Rp 12.000	Rp 204.000	Agustus 2025	
12	1.1.7.01.04.01.196	OTSU MgSO4 40%	9	VIAL	Rp 5.660	Rp 50.940	Agustus 2025	
13	1.1.7.01.04.01.131	PYRANTEL 125 MG	56	TABLET	Rp 513	Rp 28.728	Agustus 2025	
14	1.1.7.01.04.01.100	METHYL ERGOMETRIN INJ	3	AMPUL	Rp 8.214	Rp 24.642	Juli 2025	
15	1.1.7.01.04.01.100	METHYL ERGOMETRIN INJ	4	AMPUL	Rp 8.214	Rp 32.856	Juli 2025	
16	1.1.7.01.04.02.291	RDT MALARIA 25@TEST	2	PEACES	Rp 287.200	Rp 574.400	Juli 2025	
17	1.1.7.01.04.02.291	RDT MALARIA 25@TEST	98	PEACES	Rp 11.488	Rp 1.125.824	Juli 2025	
18	1.1.7.01.04.01.317	OAT Kategori Anak	1	PAKET	Rp 391.234	Rp 391.234	Juni 2025	
19	1.1.7.01.04.01.317	OAT Kategori Anak	2	PAKET	Rp 352.664	Rp 705.328	Juni 2025	
20	1.1.7.01.04.01.374	OAT Kategori I	7	PAKET	Rp 579.975	Rp 4.059.825	Juni 2025	
21	1.1.7.01.04.01.117	OTSU MgSO4 20 %	17	VIAL	Rp 4.970	Rp 84.490	Juni 2025	
22	1.1.7.01.04.01.129	PRIMAQUINE 15 MG	50	TABLET	Rp 375	Rp 18.750	April 2025	
J	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**					**Rp 9.671.730**	**Bahan Cetak**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**		
1	1.1.7.01.03.03.343	Karcis Retribusi Persampahan Kios / Warung	1144	Lembar	Rp 250	Rp 286.000		Karcis Nilai Retribusi Sudah Tidak Sesuai Perda yang berlaku
2	1.1.7.01.03.03.343	Karcis Retribusi Persampahan Kios / Warung	1360	Lembar	Rp 340	Rp 462.400		
3	1.1.7.01.03.03.343	Karcis Retribusi Persampahan Kios / Warung	7201	Lembar	Rp 250	Rp 1.800.250		
4	1.1.7.01.03.03.341	Karcis Retribusi Persampahan Rumah Tangga	2504	Lembar	Rp 250	Rp 626.000		
5	1.1.7.01.03.03.341	Karcis Retribusi Persampahan Rumah Tangga	481	Lembar	Rp 340	Rp 163.540		
6	1.1.7.01.03.03.341	Karcis Retribusi Persampahan Rumah Tangga	20039	Lembar	Rp 250	Rp 5.009.750		
7	1.1.7.01.03.03.342	Karcis Retribusi Persampahan Toko / Ruko	956	Lembar	Rp 340	Rp 325.040		
8	1.1.7.01.03.03.342	Karcis Retribusi Persampahan Toko / Ruko	3486	Lembar	Rp 250	Rp 871.500		
9	1.1.7.01.03.03.342	Karcis Retribusi Persampahan Toko / Ruko	509	Lembar	Rp 250	Rp 127.250		
K	**DINAS PERHUBUNGAN**					**Rp 7.354.657**	**Bahan Cetak**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**		
1	1.1.7.01.03.03.006	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Dua (2) atau Tiga (3) / unit	208	Lembar	Rp 250	Rp 52.000		Karcis Nilai Retribusi Sudah Tidak Sesuai Perda yang berlaku
2	1.1.7.01.03.03.006	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Dua (2) atau Tiga (3) / unit	1792	Lembar	Rp 250	Rp 448.000		
3	1.1.7.01.03.03.007	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Empat (4) / unit	94	Lembar	Rp 340	Rp 31.960		
4	1.1.7.01.03.03.007	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Empat (4) / unit	348	Lembar	Rp 250	Rp 87.000		
5	1.1.7.01.03.03.007	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Empat (4) / unit	2947	Lembar	Rp 250	Rp 736.750		
6	1.1.7.01.03.03.007	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Empat (4) / unit	44	Lembar	Rp 299	Rp 13.176		
7	1.1.7.01.03.03.007	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Empat (4) / unit	13	Lembar	Rp 250	Rp 3.250		
8	1.1.7.01.03.03.007	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Empat (4) / unit	271	Lembar	Rp 299	Rp 81.151		
9	1.1.7.01.03.03.008	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Enam (6) / unit	3500	Lembar	Rp 250	Rp 875.000		
10	1.1.7.01.03.03.008	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Enam (6) / unit	64	Lembar	Rp 250	Rp 16.000		
11	1.1.7.01.03.03.008	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Enam (6) / unit	17	Lembar	Rp 250	Rp 4.250		

No	Kode Rekening Persediaan	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Kedaluwarsa	Keterangan
12	1.1.7.01.03.03.008	Karcis Bongkar Muat Kendaraan Roda Enam (6) / unit	230	Lembar	Rp 250	Rp 57.500		
13	1.1.7.01.03.03.001	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT 1-3	8	Lembar	Rp 250	Rp 2.000		
14	1.1.7.01.03.03.001	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT 1-3	100	Lembar	Rp 250	Rp 25.000		
15	1.1.7.01.03.03.003	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT 8-49	39	Lembar	Rp 250	Rp 9.750		
16	1.1.7.01.03.03.003	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT 8-49	253	Lembar	Rp 250	Rp 63.250		
17	1.1.7.01.03.03.003	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT 8-49	903	Lembar	Rp 250	Rp 225.750		
18	1.1.7.01.03.03.004	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT >50	86	Lembar	Rp 250	Rp 21.500		
19	1.1.7.01.03.03.004	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT >50	20	Lembar	Rp 250	Rp 5.000		
20	1.1.7.01.03.03.004	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT >50	146	Lembar	Rp 250	Rp 36.500		
21	1.1.7.01.03.03.004	Karcis Kapal / Speed Boat Uk. GT >50	2830	Lembar	Rp 250	Rp 707.500		
22	1.1.7.01.03.03.015	Karcis KIOS Uk. 4x4 M2 x Rp. 5.000	42	Lembar	Rp 250	Rp 10.500		
23	1.1.7.01.03.03.014	Karcis LOKET Uk. 2x3 M2 x Rp. 5.000	64	Lembar	Rp 250	Rp 16.000		
24	1.1.7.01.03.03.005	Karcis Orang Masuk Dermaga / Pelabuhan	6490	Lembar	Rp 250	Rp 1.622.500		
25	1.1.7.01.03.03.005	Karcis Orang Masuk Dermaga / Pelabuhan	957	Lembar	Rp 250	Rp 239.250		
26	1.1.7.01.03.03.010	Karcis Parkir Bus, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya	1365	Lembar	Rp 299	Rp 408.749		
27	1.1.7.01.03.03.010	Karcis Parkir Bus, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya	225	Lembar	Rp 340	Rp 76.500		
28	1.1.7.01.03.03.012	Karcis Parkir Sepeda Motor	1599	Lembar	Rp 299	Rp 478.821		
29	1.1.7.01.03.03.009	Karcis Parkir Taxi, Mobil, dan Sejenisnya	100	Lembar	Rp 340	Rp 34.000		
30	1.1.7.01.03.03.009	Karcis Parkir Taxi, Mobil, dan Sejenisnya	1599	Lembar	Rp 299	Rp 478.821		
31	1.1.7.01.03.03.011	Karcis Parkir Truck	200	Lembar	Rp 340	Rp 68.000		
32	1.1.7.01.03.03.011	Karcis Parkir Truck	1400	Lembar	Rp 299	Rp 419.230		
L	**BAGIAN UMUM SETDA**					**Rp 24.990.000**	**Bahan Cetak**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**		
1	1.1.7.01.03.03.0.317	Belanja cetak sppd bupati/wakil bupati	28	blok	Rp 200.000	Rp 5.600.000		Pengadaan 2017, Sekarang Sudah menggunakan Aplikasi
2	1.1.7.01.03.03.0.317	Belanja cetak sppd bupati/wakil bupati	25	blok	Rp 200.000	Rp 5.000.000		
3	1.1.7.01.03.03.0.317	Belanja cetak sppd bupati/wakil bupati	6	blok	Rp 200.000	Rp 1.200.000		
4	1.1.7.01.03.03.0.251	blangko Cetak SPPD setda	19	blok	Rp 200.000	Rp 3.800.000		
5	1.1.7.01.03.03.0.251	blangko Cetak SPPD setda	27	blok	Rp 200.000	Rp 5.400.000		
6	1.1.7.01.03.03.0.316	buku stock opname (buku persediaan bagian umum)	42	buku	Rp 95.000	Rp 3.990.000		
M	**BAGIAN UMUM SETDA**					**Rp 689.000**	**Bahan Cetak**	**Keterangan**
No	**Kode Rekening Persediaan**	**Uraian**	**Qty**	**Satuan**	**Harga**	**Jumlah**		
1	1.1.7.01.03.03.335	Karcis Lapangan Bulu Tangkis	400	Lembar	Rp 340	Rp 136.000		Karcis Nilai Retribusi Sudah Tidak Sesuai Perda yang berlaku
2	1.1.7.01.03.03.336	Karcis Lapangan Tenis	400	Lembar	Rp 340	Rp 136.000		
3	1.1.7.01.03.03.342	Karcis Parkir Truck Gandeng, dan Sejenisnya	400	Lembar	Rp 340	Rp 136.000		
4	1.1.7.01.03.03.251	Karcis Sampah	200	lembar	Rp 300	Rp 60.000		
5	1.1.7.01.03.03.250	Karcis Tempat Khusus Parkir	650	lembar	Rp 340	Rp 221.000		
TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M						**Rp 933.732.763**		

PENAMBAHAN PERSEDIAAN DIKARENAKAN KESALAHAN PENGANGGARAN

31-Dec-25

	KODE REKENING	1.1.7.01.01.10	1.1.7.01.02.11	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.05.01	1.1.7.02.01.04	
NO	NAMA OPD	ISI TABUNG GAS	SUKU CADANG LAINNYA	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	KOMPONEN RAMBU-RAMBU	TOTAL
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				19.611.360,00	34.285.680,00	3.477.600,00	0,00	16.912.000,00			74.286.640,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman					5.182.517,85	-	0,00	0,00	1.027.375.705,00		1.032.558.222,85
3	Dinas Perhubungan										198.912.000,00	198.912.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		17.500.000,00									17.500.000,00
TOTAL		**0,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**19.611.360,00**	**39.468.197,85**	**3.477.600,00**	**0,00**	**16.912.000,00**	**1.027.375.705,00**	**198.912.000,00**	**1.323.256.862,85**

A. **Salah Pos Belanja Jasa (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)**

	KODE REKENING	1.1.7.01.01.10	1.1.7.01.02.11	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.05.01	1.1.7.02.01.04	
NO	NAMA OPD	ISI TABUNG GAS	SUKU CADANG LAINNYA	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	KOMPONEN RAMBU-RAMBU	TOTAL
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan						52.400.000,00					52.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	92.364.000,00										92.364.000,00
TOTAL		**92.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.764.000,00**

B. **Salah Pos Belanja Modal BOP (Seharusnya Belanja Barang Persediaan BOP)**

	KODE REKENING	1.1.7.01.01.10	1.1.7.01.02.11	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.05.01	1.1.7.02.01.04	
NO	NAMA SEKOLAH	ISI TABUNG GAS	SUKU CADANG LAINNYA	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERELNGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KANTOR LAINNYA	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHKA KETIGA	KOMPONEN RAMBU-RAMBU	TOTAL
1	SDN TERPADU UNGGULAN 2							700.000,00				700.000,00
2	SDN 001 TT								2.100.000,00			2.100.000,00
3	SDN 003 TT								2.600.000,00			2.600.000,00
4	SDN 006 TT						2.400.000,00					2.400.000,00
5	SDN 007 TT						2.000.000,00					2.000.000,00
6	SDN 010 TT								1.950.000,00			1.950.000,00
7	SDN 012 TT					3.600.000,00						3.600.000,00
8	SDN 013 TT						2.180.000,00					2.180.000,00
9	SDN 014 TT					2.000.000,00		2.600.000,00				4.600.000,00
10	SDN 020 TT						2.400.000,00					2.400.000,00
11	SMPN 1 TT								2.000.000,00			2.000.000,00
12	SMPN 3 TT							1.000.000,00				1.000.000,00
13	SKB NEGERI						2.735.000,00			4.250.000,00		6.985.000,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600.000,00**	**11.715.000,00**	**4.300.000,00**	**8.650.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**34.515.000,00**

C. **Salah Pos Belanja Modal BOS (Seharusnya Belanja Barang Persediaan BOS)**

	KODE REKENING	1.1.7.01.01.10	1.1.7.01.02.11	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.05.01	1.1.7.02.01.04	
NO	NAMA SEKOLAH	ISI TABUNG GAS	SUKU CADANG LAINNYA	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERELNGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KANTOR LAINNYA	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHKA KETIGA	KOMPONEN RAMBU-RAMBU	TOTAL
1	SDN TERPADU UNGGULAN 1			0,00		0,00			0,00	52.801.100,00		52.801.100,00
2	SDN 001 TT			0,00		0,00			3.600.000,00	154.462.600,00		158.062.600,00
3	SDN 002 TT			-		-			-	26.627.300,00		26.627.300,00
4	SDN 003 TT			0,00		0,00			0,00	12.050.000,00		12.050.000,00
5	SDN 006 TT			-		-			-	5.398.600,00		5.398.600,00
6	SDN 007 TT			0,00		0,00			0,00	14.070.200,00		14.070.200,00
7	SDN 008 TT			0,00		0,00			650.000,00	13.376.700,00		14.026.700,00
8	SDN 009 TT			0,00		0,00			360.000,00	4.161.700,00		4.521.700,00
9	SDN 010 TT			0,00		0,00			0,00	19.550.000,00		19.550.000,00
10	SDN 011 TT			0,00		0,00			0,00	12.799.600,00		12.799.600,00
11	SDN 012 TT			360.000,00		0,00			0,00	23.962.000,00		24.322.000,00
12	SDN 013 TT			0,00		552.000,00			0,00	0,00		552.000,00
13	SDN 014 TT			0,00		0,00			900.000,00	6.358.000,00		7.258.000,00
14	SDN 015 TT			0,00		0,00			0,00	8.252.500,00		8.252.500,00
15	SDN 018 TT			0,00		0,00			0,00	7.776.700,00		7.776.700,00
16	SDN 021 TT			0,00		0,00			0,00	10.504.400,00		10.504.400,00
17	SDN 022 TT			0,00		0,00			0,00	13.741.900,00		13.741.900,00
18	SDN 023 TT			0,00		0,00			0,00	7.752.500,00		7.752.500,00
19	SDN 025 TT			0,00		0,00			0,00	9.395.000,00		9.395.000,00
20	SMPN TERPADU UNGGULAN 1			0,00		0,00			800.000,00	0,00		800.000,00
21	SMPN 1 TT			0,00		0,00			0,00	12.680.500,00		12.680.500,00
22	SMPN 2 TT			600.000,00		0,00			0,00	0,00		600.000,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**960.000,00**	**0,00**	**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.310.000,00**	**415.721.300,00**	**0,00**	**423.543.300,00**
TOTAL A+B+C+D		**92.364.000,00**	**17.500.000,00**	**960.000,00**	**19.611.360,00**	**45.620.197,85**	**67.592.600,00**	**4.300.000,00**	**31.872.000,00**	**1.447.347.005,00**	**198.912.000,00**	**1.926.079.162,85**

PENGURANGAN PERSEDIAAN DIKARENAKAN KESALAHAN PENGANGGARAN
31-Des-2025

A. **Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)**

Kode Rekening		1.1.7.01.01.01	1.1.7.01.02.01	1.1.7.01.02.07	1.1.7.01.03.01	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.09	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	1.1.7.01.05.01	1.1.7.01.07.01	1.1.7.02.01.05	TOTAL
No	NAMA OPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	ALAT TULIS KANTOR	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	NATURA	ATTACHMENT	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan					34.871.840								61.005.600			95.877.440,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman		126.448.800											3.108.667.103			3.235.115.902,58
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1.233.100	6.800.000											8.033.100,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga										8.070.000						8.070.000,00
5	Kecamatan Betayau			5.010.600				1.600.000									6.610.600,00
TOTAL		0,00	126.448.800,00	5.010.600,00	1.233.100,00	41.671.840,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	8.070.000,00	0,00	0,00	3.169.672.702,58	0,00	0,00	3.353.707.042,58

B. **Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Kapitalisasi (Exstrakompatabel))**

Kode Rekening		1.1.7.01.01.01	1.1.7.01.02.01	1.1.7.01.02.07	1.1.7.01.03.01	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.09	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	1.1.7.01.05.01	1.1.7.01.07.01	1.1.7.02.01.05	TOTAL
No	NAMA OPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	ALAT TULIS KANTOR	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	NATURA	ATTACHMENT	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-				99.020.880		-									99.020.880,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	14.185.800						9.600.000						2.650.000			26.435.800,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	-						-	1.210.000								1.210.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	-						-			1.920.000					30.000.000	31.920.000,00
5	Bagian Umum	1.300.000						-									1.300.000,00
6	Kecamatan Betayau	-		2.425.800				5.256.500									7.682.300,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-						6.300.000									6.300.000,00
TOTAL		15.485.800,00	0,00	2.425.800,00	0,00	99.020.880,00	0,00	21.156.500,00	1.210.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	30.000.000,00	173.868.980,00

C **Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Jasa)**

Kode Rekening		1.1.7.01.01.01	1.1.7.01.02.01	1.1.7.01.02.07	1.1.7.01.03.01	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.09	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	1.1.7.01.05.01	1.1.7.01.07.01	1.1.7.02.01.05	TOTAL
No	NAMA OPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	ALAT TULIS KANTOR	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	NATURA	ATTACHMENT	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman													13.656.624			13.656.623,52
2	Kecamatan Betayau														4.800.000		4.800.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656.623,52	4.800.000,00	0,00	18.456.623,52

D **Salah Pos Belanja Barang Persediaan BOP (Seharusnya Belanja Modal dan Barang Exstakompatabel BOP)**

Kode Rekening		1.1.7.01.01.01	1.1.7.01.02.01	1.1.7.01.02.07	1.1.7.01.03.01	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.09	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	1.1.7.01.05.01	1.1.7.01.07.01	1.1.7.02.01.05	TOTAL
No	NAMA OPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	ALAT TULIS KANTOR	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	NATURA	ATTACHMENT	
1	SDN 003 TT		600.000											3.000.000			3.600.000,00
2	SDN 006 TT	-						-				3.000.000					3.000.000,00
3	SDN 010 TT	-						-				2.450.000					2.450.000,00
4	SDN 013 TT	11.000.000						-				-					11.000.000,00
5	SDN 017 TT	-			300.000			3.745.000	500.000			10.500.000					15.045.000,00
6	SDN 018 TT	-						450.000				1.500.000					1.950.000,00
7	SMPN TERPADU UNGGULAN 1	-						-		39.000.000		-					39.000.000,00
8	SKB NEGERI	-						4.800.000				650.000					5.450.000,00
TOTAL		11.000.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	8.995.000,00	500.000,00	39.000.000,00	0,00	18.100.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	81.495.000,00

E **Salah Pos Belanja Barang Persediaan BOS (Seharusnya Belanja Modal dan Barang Exstakompatabel BOS)**

Kode Rekening		1.1.7.01.01.01	1.1.7.01.02.01	1.1.7.01.02.07	1.1.7.01.03.01	1.1.7.01.03.03	1.1.7.01.03.06	1.1.7.01.03.07	1.1.7.01.03.08	1.1.7.01.03.09	1.1.7.01.03.11	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	1.1.7.01.05.01	1.1.7.01.07.01	1.1.7.02.01.05	TOTAL
No	NAMA OPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	ALAT TULIS KANTOR	BAHAN CETAK	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	NATURA	ATTACHMENT	
1	TKN TERPADU				-		-	800.000	-	-	-	3.000.000	-	-			3.800.000,00
2	SDN TERPADU UNGGULAN 1				-		-	-	1.050.000	-	24.000.000	19.595.000	-	-			44.645.000,00
3	SDN TERPADU UNGGULAN 2				-		850.000	-	-	-	-	-	-	-			850.000,00
4	SDN 001 TT				-		-	5.000.000	-	-	-	-	-	-			5.000.000,00
5	SDN 002 TT				-		-	1.100.000	-	4.400.000	-	-	-	-			5.500.000,00
6	SDN 003 TT				-		-	650.000	-	-	-	-	-	-			650.000,00
7	SDN 005 TT				-		-	-	-	6.000.000	-	756.400	-	-			6.756.400,00
8	SDN 006 TT				-		-	-	-	-	-	-	-	6.000.000			6.000.000,00
9	SDN 008 TT				352.300		-	4.000.000	-	-	-	500.000	-	-			4.852.300,00
10	SDN 012 TT				-		-	930.000	-	-	-	-	-	-			930.000,00
11	SDN 013 TT				-		-	1.270.000	-	-	-	570.000	-	-			1.840.000,00
12	SDN 014 TT				-		-	1.500.000	-	-	-	-	-	-			1.500.000,00
13	SDN 016 TT				-		-	-	-	-	-	6.900.000	-	-			6.900.000,00
14	SDN 017 TT				400.000		-	-	-	-	-	-	-	-			400.000,00
15	SDN 018 TT				-		-	5.430.000	-	-	-	5.580.000	-	-			11.010.000,00
16	SDN 019 TT				-		-	10.200.000	-	-	-	-	-	-			10.200.000,00
17	SDN 020 TT				-		-	-	-	8.700.000	8.290.000	2.432.400	-	-			19.422.400,00
18	SDN 021 TT				-		-	-	1.300.000	-	-	-	-	-			1.300.000,00
19	SDN 023 TT				-		-	-	-	5.000.000	-	-	-	-			5.000.000,00
20	SDN 025 TT	6.950.000			-		-	-	-	-	1.980.000	-	-	-			8.930.000,00
21	SMPN TERPADU UNGGULAN 1				-		-	350.000	-	6.450.000	-	600.000	-	-			7.400.000,00
22	SMPN TERPADU UNGGULAN 2				200.000		-	-	-	8.000.000	14.000.000	3.000.000	680.000	-			25.880.000,00
23	SMPN 1 TT				-		-	6.900.000	-	-	-	-	-	-			6.900.000,00
24	SMPN 2 TT				-		-	-	-	-	1.440.000	-	-	6.000.000			7.440.000,00
25	SMPN 3 TT				-		3.000.000	-	-	-	4.500.000	16.000.000	-	-			23.500.000,00
26	SMPN 4 TT				-		-	-	-	-	1.000.000	5.880.000	-	-			6.880.000,00
27	SMPN 5 TT				436.600		-	-	-	-	-	400.000	-	-			836.600,00
28	SMPN 7 TT				-		-	2.450.000	-	11.250.000	750.000	-	-	-			14.450.000,00
29	SKB NEGERI				-		-	3.185.000	800.000	-	-	2.880.000	-	2.636.000			9.501.000,00
TOTAL		6.950.000,00	0,00	0,00	1.388.900,00	0,00	3.850.000,00	43.765.000,00	3.150.000,00	49.800.000,00	55.960.000,00	68.093.800,00	680.000,00	14.636.000,00	0,00	0,00	248.273.700,00
TOTAL A+B+C+D+E		33.435.800,00	127.048.800,00	7.436.400,00	2.922.000,00	140.692.720,00	3.850.000,00	75.516.500,00	4.860.000,00	88.800.000,00	65.950.000,00	86.193.800,00	680.000,00	3.203.615.326,10	4.800.000,00	30.000.000,00	3.875.801.346,10

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per, 31Desember 2025
(Disajikan dalam rupiah)

ASET

	Catatan	2025
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	03	1.171.841.692,74
Piutang Usaha	04	1.348.478.400,70
Cadangan Penyisihan Piutang	05	(67.423.920,04)
Piutang Lain-lain	06	257.404.806,00
Uang Muka Pajak	07	-
Biaya Dibayar Di Muka	08	-
Persediaan	09	890.264.575,68
Jumlah Aset Lancar		**3.600.565.555,09**
ASET TETAP		
Nilai Perolehan (Aset Tetap dan Inventaris)	10	47.322.918.346,63
Akumulasi Penyusutan		(2.394.937.510,61)
Jumlah Aset Tidak Lancar		**44.927.980.836,02**
JUMLAH ASET		**48.528.546.391,11**

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Usaha	11	-
Hutang Lain-Lain	12	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	13	-
Hutang Pajak	14	35.099.349,00
Jumlah Kewajiban Lancar		**35.099.349,00**
E K U I T A S		
Modal Setelah pisah dari PDAM Bulungan	16	288.017.577,00
Modal Hibah	15	16.000.000.000,00
Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	17	43.859.863.686,63
Tambahan Modal Disetor	18	67.790.000,00
Jumlah Modal dan Hibah		**60.215.671.263,63**
Laba/Rugi Tahun Lalu	19	(13.144.988.086,86)
Laba/Rugi Tahun Berjalan		1.422.763.865,34
Jumlah Laba/Rugi		**(11.722.224.221,53)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**48.528.546.391,11**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIP LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	2025
I	**PENDAPATAN USAHA**	20	
	- Pendapatan Penjualan Air		5.107.031.758,82
	- Pendapatan Non Air		326.864.573,53
	- Pendapatan Hibah Kimia dari Pemda Tana Tidung Tahun 2025		596.228.675,00
	Jumlah		**6.030.125.007,35**
II	**BEBAN USAHA**	21	
	- Beban Operasi		1.894.855.208,00
	- Beban Pengolahan Air		875.230.045,32
	- Beban Transmisi dan Distribusi		560.967.587,00
	- Beban (HPP) Sambungan Baru		-
	Jumlah		**3.331.052.840,32**
III	**LABA / RUGI KOTOR**		**2.699.072.167,03**
IV	**BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**	21	**1.278.239.536,30**
V	**LABA / RUGI OPERASIONAL**		**1.420.832.630,74**
VI	**PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**	22	
	- Pendapatan Lain-lain		5.337.597,16
	- Beban Lain-lain		(3.406.362,56)
	Jumlah		**1.931.234,60**
VII	**LABA / RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK**		**1.422.763.865,34**
VIII	**BEBAN PAJAK PENGHASILAN**		
	- Pajak Kini		-
	- Beban Pajak Ditangguhkan		-
	Jumlah		**-**
IX	**LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN**		**1.422.763.865,34**
X	**(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIP LAIN**		
	Pos-pos yang Tidak Akan Direklafikasi ke Laba Rugi :		
1	Surplus Revaluasi Tanah/Aset Tidak Lancar		-
2	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		-
3	Beban Pajak Penghasilan Terkait		-
4	Penghasilan Komprehensip Lain Tahun Berjalan		-
	Jumlah		**-**

XI	**JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIP TAHUN BERJALAN**	**1.422.763.865,34**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIP LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	2025
I	**PENDAPATAN USAHA**	20	
	- Pendapatan Penjualan Air		5.107.031.758,82
	- Pendapatan Non Air		326.864.573,53
	- Pendapatan Hibah Kimia dari Pemda Tana Tidung Tahun 2025		596.228.675,00
	Jumlah		**6.030.125.007,35**
II	**BEBAN USAHA**	21	
	- Beban Operasi		1.894.855.208,00
	- Beban Pengolahan Air		875.230.045,32
	- Beban Transmisi dan Distribusi		560.967.587,00
	- Beban (HPP) Sambungan Baru		-
	Jumlah		**3.331.052.840,32**
III	**LABA / RUGI KOTOR**		**2.699.072.167,03**
IV	**BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**	21	**1.278.239.536,30**
V	**LABA / RUGI OPERASIONAL**		**1.420.832.630,74**
VI	**PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**	22	
	- Pendapatan Lain-lain		5.337.597,16
	- Beban Lain-lain		(3.406.362,56)
	Jumlah		**1.931.234,60**
VII	**LABA / RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK**		**1.422.763.865,34**
VIII	**BEBAN PAJAK PENGHASILAN**		
	- Pajak Kini		-
	- Beban Pajak Ditangguhkan		-
	Jumlah		**-**
IX	**LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN**		**1.422.763.865,34**
X	**(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIP LAIN**		
	Pos-pos yang Tidak Akan Direklafikasi ke Laba Rugi :		
1	Surplus Revaluasi Tanah/Aset Tidak Lancar		-
2	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		-
3	Beban Pajak Penghasilan Terkait		-
4	Penghasilan Komprehensip Lain Tahun Berjalan		-

	Jumlah	-
XI	**JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIP TAHUN BERJALAN**	**1.422.763.865,34**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

No	URAIAN	2025
I	**Saldo Awal**	
1	Modal	
	- Modal setelah dipisah dari PDAM Kab. Bulungan	288.017.577,00
	- Modal Hibah	16.000.000.000,00
	- Modal Hibah Kimia	679.662.000,00
	- Tambahan Modal Disetor	67.790.000,00
	Saldo awal Modal	**17.035.469.577,00**
2	**Laba/Rugi**	
	- Rugi tahun sebelumnya	(13.669.548.025,86)
	- Koreksi Rugi	-
	- Rugi tahun berjalan	524.559.939,00
	Saldo Laba/Rugi ditahan	**(13.144.988.086,86)**
	Saldo awal Ekuitas	**3.890.481.490,14**
II	**Mutasi Tahun Berjalan**	
1	Modal	
	- Modal setelah dipisah dari PDAM Kab. Bulungan	288.017.577,00
	- Modal Hibah	16.000.000.000,00
	- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	43.859.863.686,63
	- Tambahan Modal Disetor	67.790.000,00
	Jumlah	**60.215.671.263,63**
2	**Laba/Rugi**	
	- Rugi tahun sebelumnya	(13.144.988.086,86)
	- Laba/Rugi tahun berjalan	1.422.763.865,34
	Saldo Laba/Rugi ditahan	**(11.722.224.221,53)**
	Jumlah Mutasi Ekuitas	**48.493.447.042,11**
III	**Saldo Akhir**	
1	Modal	
	- Modal setelah dipisah dari PDAM Kab. Bulungan	288.017.577,00
	- Modal Hibah	16.000.000.000,00
	- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	43.859.863.686,63
	- Tambahan Modal Disetor	67.790.000,00
	Jumlah	**60.215.671.263,63**
2	**Laba/Rugi**	
	- Rugi tahun sebelumnya	(13.144.988.086,86)
	- Koreksi	-
	- Laba / Rugi tahun berjalan	1.422.763.865,34
	Jumlah	**(11.722.224.221,53)**
	Saldo Akhir Ekuitas	**48.493.447.042,11**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR ASET TETAP
TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2025		SALDO AKHIR
		31-Dec-24	MASUK	KELUAR	31-Dec-25
A	B	C	D	E	F
					C+D-E
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan	7.980.213.000,00	-	15.400.000,00	7.964.813.000,00
3	Bagian Organisasi	-	-	-	-
4	Bagian Hukum	-	-	-	-
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	-
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
7	Bagian Umum	7.493.599.000,00	-	-	7.493.599.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	321.259.923.180,47	35.513.020.427,56	1.515.654.656,63	355.257.288.951,40
9	Dinas Perhubungan	821.375.000,00	-	-	821.375.000,00
10	Dinas Kesehatan	6.203.533.693,63	836.305.019,00	40.477.163,16	6.999.361.549,47
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	25.810.656.006,14	1.498.183.982,00	-	27.308.839.988,14
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	1.235.760.440,00	-	-	1.235.760.440,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.328.989.090,00	-	-	25.328.989.090,00
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	-
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.269.333.680,00	-	-	1.269.333.680,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20	Inspektorat Kabupaten	149.760.000,00	-	-	149.760.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	-
22	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	28.067.856.588,00	-	-	28.067.856.588,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-
26	Satuan Polisi Pamong Praja	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	196.336.578,00	-	-	196.336.578,00
30	Kecamatan Sesayap	9.468.156.112,37	-	131.100.000,00	9.337.056.112,37
31	Kecamatan Sesayap Hilir	7.137.701.000,00	-	-	7.137.701.000,00
32	Kecamatan Tana Lia	452.022.530,00	-	-	452.022.530,00
33	Kecamatan Betayau	613.227.000,00	-	-	613.227.000,00
34	Kecamatan Muruk Rian	611.179.000,00	-	-	611.179.000,00
Total		**444.105.621.898,61**	**37.847.509.428,56**	**1.702.631.819,79**	**480.250.499.507,38**

RINCIAN PENYERTAAN MODAL ASET TANAH KE PDAM

No	OPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga	Keterangan
1	Kecamatan Tana Lia	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	01.01.01.04.026	4	Desa Tanah Merah, Kec.Tana Lia,Kabupaten Tana Tidung	12.500.000,00	Rencana Lokasi Pembanguna PDAM di Desa Tanah Merah Kec.Tana Lia (Hibah dari Imam Syafi'i)
2	Kecamatan Tana Lia	Tanah Persil Lainnya	01.01.01.07.01	2	Jl Pangeran Temanggung RT002/RW 01 Desa Tanah Merah Barat Kec Tana Lia Kab Tana Tidung Prov Kaltara	6.125.000,00	Hibah dari Syahrin
3	Kecamatan Tana Lia	Tanah Bangunan untuk Air Irigasi	01.01.03.08.01	1	Jl.Pangeran Temanggung RT002/RW 01 Desa Tanah	1.125.000,00	Hibah dari Jailani
4	BAGIAN PEMERINTAHAN	Tanah untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/Air Baku	01.01.03.09.01	1	Jl. Desa Limbu Sedulun Kecamatan Sesayap	50.000.000,00	Hibah dari masyarakat (Bpk. Roben) - Tanah Bangunan IPA
Jumlah						**69.750.000,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2025		SALDO AKHIR
		PER 31 DESEMBER 2024	MASUK	KELUAR	31-Dec-25
A	B	C	D	E	F
					C+D-E
1	Sekretariat Dprd	7.895.288.918,00	109.780.000,00	-	8.005.068.918,00
2	Bagian Pemerintahan	1.025.838.714,29	11.932.400,00	-	1.037.771.114,29
3	Bagian Organisasi	571.765.925,00	3.700.000,00	-	575.465.925,00
4	Bagian Hukum	384.188.000,00	-	-	384.188.000,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	3.028.429.792,29	8.340.000,00	-	3.036.769.792,29
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	1.167.480.575,00	29.170.800,00	-	1.196.651.375,00
7	Bagian Umum	40.598.049.682,29	4.414.891.142,52	1.568.154.000,00	43.444.786.824,81
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	28.122.270.186,00	6.104.166.503,46	7.221.573,06	34.219.215.116,40
9	Dinas Perhubungan	5.473.908.324,29	1.874.626.190,00	198.912.000,00	7.149.622.514,29
10	Dinas Kesehatan	112.005.454.245,96	6.817.926.563,81	1.724.067.202,00	117.099.313.607,77
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	75.990.626.423,09	18.011.844.350,00	6.257.618.116,00	87.744.852.657,09
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	3.090.511.400,00	168.956.700,00	53.866.000,00	3.205.602.100,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.740.508.333,57	795.848.260,00	-	4.536.356.593,57
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.292.122.662,29	523.809.250,00	-	1.815.931.912,29
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.733.831.200,00	1.466.995.940,00	31.639.440,00	8.169.187.700,00
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.919.570.931,00	7.826.400,00	109.307.300,00	4.818.090.031,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	7.463.542.929,66	569.798.080,00	94.723.333,34	7.938.617.676,32
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	8.830.479.289,17	1.324.183.048,00	951.163.036,50	9.203.499.300,67
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.539.319.815,00	250.496.650,00	276.588.500,00	2.513.227.965,00
20	Inspektorat Kabupaten	7.596.770.460,29	708.392.200,00	1.421.897.714,29	6.883.264.946,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	6.125.753.614,29	84.732.776,00	-	6.210.486.390,29
22	Dinas Lingkungan Hidup	7.981.439.410,00	329.307.000,00	-	8.310.746.410,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	3.389.176.666,67	92.206.800,00	-	3.481.383.466,67
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.053.127.534,00	77.742.199,00	-	2.130.869.733,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.139.030.275,67	168.843.000,00	-	1.307.873.275,67
26	Satuan Polisi Pamong Praja	3.638.906.614,00	38.260.000,00	4.960.000,00	3.672.206.614,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.556.403.556,00	40.672.850,00	584.885.000,00	3.012.191.406,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.527.053.691,29	19.425.000,00	245.210.000,00	6.301.268.691,29
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.804.346.658,00	846.333.223,00	38.247.098,00	2.612.432.783,00
30	Kecamatan Sesayap	1.157.198.672,72	137.398.260,00	313.207.960,00	981.388.972,72
31	Kecamatan Sesayap Hilir	2.469.119.000,00	-	15.750.000,00	2.453.369.000,00
32	Kecamatan Tana Lia	2.044.272.131,00	555.177.000,00	-	2.599.449.131,00
33	Kecamatan Betayau	2.930.709.060,00	90.405.600,00	420.358.000,00	2.600.756.660,00
34	Kecamatan Muruk Rian	1.656.108.366,00	19.600.000,00	-	1.675.708.366,00
Total		**368.942.603.056,79**	**45.702.788.185,79**	**14.317.776.273,19**	**400.327.614.969,40**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR ASET TETAP
GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2025		SALDO AKHIR
		PER 31 DESEMBER 2024	MASUK	KELUAR	46.022,00
A	B	C	D	E	F
					C+D-E
1	Sekretariat Dprd	4.947.796.418,32	-	-	4.947.796.418,32
2	Bagian Pemerintahan	414.285.000,00	-	-	414.285.000,00
3	Bagian Organisasi	0,00	-	-	0,00
4	Bagian Hukum	0,00	-	-	0,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	0,00	-	-	0,00
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	-	-	0,00
7	Bagian Umum	54.376.142.937,42	155.403.842,52	155.403.842,52	54.376.142.937,42
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	34.493.995.033,00	357.459.767.336,56	130.929.070.623,17	261.024.691.746,39
9	Dinas Perhubungan	21.799.569.771,63	2.156.341.800,00	324.713.000,00	23.631.198.571,63
10	Dinas Kesehatan	289.109.006.308,53	22.715.376.102,77	11.171.126.789,77	300.653.255.621,53
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	872.724.576.341,90	71.217.001.334,28	43.098.921.113,05	900.842.656.563,13
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	30.885.661.559,46	183.190.209,00	183.190.209,00	30.885.661.559,46
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.400.000,00	-	-	59.400.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	-	-	0,00
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	8.748.868.004,00	-	-	8.748.868.004,00
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	-	-	0,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	16.867.109.122,00	-	-	16.867.109.122,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	99.700.000,00	-	-	99.700.000,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	-	-	0,00
20	Inspektorat Kabupaten	13.272.335.199,08	519.212.780,00	-	13.791.547.979,08
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	0,00	-	-	0,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	24.360.161.831,00	-	-	24.360.161.831,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	42.997.299.036,28	264.344.818,00	-	43.261.643.854,28
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	-	-	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	-	-	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	264.035.970,00	-	-	264.035.970,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	-	-	0,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	-	-	0,00
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	10.652.127.077,00	99.967.044,00	10.552.160.033,00
30	Kecamatan Sesayap	6.249.403.103,50	125.299.360,00	-	6.374.702.463,50
31	Kecamatan Sesayap Hilir	8.620.147.291,00	-	-	8.620.147.291,00
32	Kecamatan Tana Lia	6.172.420.726,03	-	-	6.172.420.726,03
33	Kecamatan Betayau	10.421.800.108,00	1.600.000,00	-	10.423.400.108,00
34	Kecamatan Muruk Rian	7.433.899.001,78	-	-	7.433.899.001,78
Total		**1.454.317.612.762,93**	**465.449.664.660,13**	**185.962.392.621,51**	**1.733.804.884.801,55**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR ASET TETAP
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2025		SALDO AKHIR
		PER 31 DESEMBER 2024	MASUK	KELUAR	31 DESEMBER 2025
A	B	C	D	E	F
					C+D-E
1	Sekretariat Dprd	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	131.500.000,00	0,00	0,00	131.500.000,00
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	2.286.572.478.108,06	144.354.975.999,49	75.803.689.069,99	2.355.123.765.037,56
9	Dinas Perhubungan	28.063.068.300,00	2.253.666.300,00	2.058.361.800,00	28.258.372.800,00
10	Dinas Kesehatan	2.342.104.665,00	6.250.628.000,00	3.125.314.000,00	5.467.418.665,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.783.218.741,00	80.838.356,00	0,00	1.864.057.097,00
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	1.198.955.000,00	186.437.627,00	0,00	1.385.392.627,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.960.650.011,00	10.375.438.250,97	10.375.438.250,97	9.960.650.011,00
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.804.668.725,00	0,00	0,00	1.804.668.725,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	9.790.000,00	0,00	0,00	9.790.000,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	427.304.000,00	0,00	0,00	427.304.000,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	962.992.500,00	0,00	0,00	962.992.500,00
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Sesayap	78.600.000,00	0,00	0,00	78.600.000,00
31	Kecamatan Sesayap Hilir	33.032.800,00	0,00	33.032.800,00	0,00
32	Kecamatan Tana Lia	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Betayau	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Muruk Rian	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**2.333.413.362.850,06**	**163.501.984.533,46**	**91.395.835.920,96**	**2.405.519.511.462,56**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR ASET TETAP
ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2025		SALDO AKHIR
		PER 31 DESEMBER 2024	MASUK	KELUAR	31-Dec-25
A	B	C	D	E	F C+D-E
1	Sekretariat Dprd	356.175.000,00	-	-	356.175.000,00
2	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-
3	Bagian Organisasi	1.520.000,00	-	-	1.520.000,00
4	Bagian Hukum	81.540.000,00	-	-	81.540.000,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	-
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	2.575.000,00	-	-	2.575.000,00
7	Bagian Umum	1.294.025.000,00	-	-	1.294.025.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	17.914.393.038,03	962.529.876,48	-	18.876.922.914,51
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
10	Dinas Kesehatan	28.465.000,00	36.198.974,00	36.198.974,00	28.465.000,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	7.831.000.677,87	1.627.268.634,00	1.853.333.994,00	7.604.935.317,87
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	-
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.124.350,00	-	-	81.124.350,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	262.276.000,00	-	-	262.276.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	152.676.075,00	68.808.900,00	120.816.075,00	100.668.900,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.514.442,40	-	-	198.514.442,40
20	Inspektorat Kabupaten	54.000.000,00	59.733.000,00	-	113.733.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	31.601.834,00	-	-	31.601.834,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	1.123.085.000,00	-	-	1.123.085.000,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	138.336.000,00	-	-	138.336.000,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-
26	Satuan Polisi Pamong Praja	174.000.000,00	-	-	174.000.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	215.170.330,00	70.036.882,00	28.650.653,00	256.556.559,00
30	Kecamatan Sesayap	8.820.000,00	-	-	8.820.000,00
31	Kecamatan Sesayap Hilir	33.850.000,00	-	-	33.850.000,00
32	Kecamatan Tana Lia	14.200.000,00	-	-	14.200.000,00
33	Kecamatan Betayau	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
34	Kecamatan Muruk Rian	32.202.000,00	-	-	32.202.000,00
Total		**30.049.549.747,30**	**2.824.576.266,48**	**2.038.999.696,00**	**30.835.126.317,78**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR ASET TETAP
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2025		SALDO AKHIR
		PER 31 DESEMBER 2024	MASUK	KELUAR	31-Dec-25
A	B	C	D	E	F
					C+D-E
1	Sekretariat Dprd	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-
3	Bagian Organisasi	-	-	-	-
4	Bagian Hukum	-	-	-	-
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	-
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
7	Bagian Umum	-	-	-	-
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	322.941.296.188,38	174.359.796.812,10	228.948.154.068,68	268.352.938.931,81
9	Dinas Perhubungan	1.014.296.434,00	516.463.000,00	439.123.000,00	1.091.636.434,00
10	Dinas Kesehatan	2.232.145.449,77	3.929.071.953,50	1.588.559.005,77	4.572.658.397,50
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	26.969.260.897,09	41.662.884.422,07	13.956.411.054,05	54.675.734.265,11
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	140.627.232,00	-	-	140.627.232,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.800.000,00	10.959.304.048,43	-	11.009.104.048,43
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	-
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	212.615.000,00	-	-	212.615.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20	Inspektorat Kabupaten	49.005.000,00	-	-	49.005.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	-
22	Dinas Lingkungan Hidup	198.594.000,00	-	-	198.594.000,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.916.052.200,00	-	-	1.916.052.200,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	310.245.000,00	99.967.044,00	310.245.000,00	99.967.044,00
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	-
31	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	-
32	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	-
33	Kecamatan Betayau	-	-	-	-
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	-
Total		**356.033.937.401,24**	**231.527.487.280,10**	**245.242.492.128,50**	**342.318.932.552,84**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
RINCIAN ASET LAINNYA BELUM DISERAHKAN KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	OPD	URAIAN	KODE BARANG	NO REG	TAHUN	HARGA	KETERANGAN
1+5:22	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	21	2010	7.920.000,00	-
2	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	22	2010	7.920.000,00	-
3	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	23	2010	7.920.000,00	`
4	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	24	2010	7.920.000,00	-
5	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	25	2010	7.920.000,00	-
6	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	26	2010	7.920.000,00	-
7	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	27	2010	7.920.000,00	-
8	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	28	2010	7.920.000,00	-
9	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	29	2010	7.920.000,00	-
10	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	1	2010	6.490.000,00	-
11	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	2	2010	6.490.000,00	-
12	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	3	2010	8.800.000,00	-
13	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	2	2010	1.760.000,00	-
14	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	1	2012	1.600.000,00	Printer Canon Pixma 377 (BOP)
15	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	2	2012	1.600.000,00	Printer Canon Pixma 377 (BOP)
16	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sepeda Motor	1.3.2.2.1.4.1	1	2010	16.995.000,00	Kepala Sekolah
17	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1.3.2.5.1.1.2	1	2015	2.750.000,00	APBN bosnas
18	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Camera Video	1.3.2.5.2.6.21	1	2010	2.700.000,00	Wasis
19	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Bak Air	1.3.2.8.3.4.18	1	2012	1.375.000,00	Profil Tank 1100 (BOP)
20	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	1.3.5.1.1.4.11	1	2015	130.000,00	UN SMA IPS, Bosnas
21	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	1.3.5.1.1.4.11	2	2015	130.000,00	UN SMA IPS, Bosnas
22	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	1.3.5.1.1.4.11	3	2015	130.000,00	UN SMA IPS, Bosnas
23	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	13	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
24	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	14	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
25	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	15	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
26	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	16	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
27	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	17	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
28	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	18	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
29	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	19	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
30	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	20	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
31	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	21	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
32	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	22	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
33	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	23	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
34	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	24	2015	125.000,00	SPM Ekonomi, Bosnas
35	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	25	2016	110.000,00	BOSNAS ekonomi SMA jilid 2
36	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	26	2016	110.000,00	BOSNAS ekonomi SMA jilid 2
37	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	27	2016	110.000,00	BOSNAS ekonomi SMA jilid 2
38	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Ekonomi	1.3.5.1.1.4.4	28	2016	110.000,00	BOSNAS ekonomi SMA jilid 2
39	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Pengetahuan Bahasa Indonesia	1.3.5.1.1.5.2	4	2015	113.000,00	Kamus lengkap BHS. Indonesia Kecil
40	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Pengetahuan Bahasa Indonesia	1.3.5.1.1.5.2	5	2015	113.000,00	Kamus lengkap BHS. Indonesia Kecil
41	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Pengetahuan Bahasa Inggris	1.3.5.1.1.5.3	3	2015	110.000,00	Kamus lengkap BHS. Inggris, Bosnas
42	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Pengetahuan Bahasa Inggris	1.3.5.1.1.5.3	4	2015	110.000,00	Kamus lengkap BHS. Inggris, Bosnas
43	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	23	2016	120.000,00	BOSNAS Matematika jilid 3
44	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	24	2016	120.000,00	BOSNAS Matematika jilid 3
45	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	25	2016	120.000,00	BOSNAS Matematika jilid 3
46	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	26	2016	120.000,00	BOSNAS Matematika jilid 3
47	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	27	2016	120.000,00	BOSNAS Matematika jilid 3
48	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	13	2016	115.000,00	BOSNAS / Matemeatika jilid 2
49	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	14	2016	115.000,00	BOSNAS / Matemeatika jilid 2
50	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	15	2016	115.000,00	BOSNAS / Matemeatika jilid 2
51	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	16	2016	115.000,00	BOSNAS / Matemeatika jilid 2
52	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	17	2016	115.000,00	BOSNAS / Matemeatika jilid 2
53	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	18	2016	115.000,00	BOSNAS / Matemeatika jilid 2
54	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Matematika	1.3.5.1.1.6.1	19	2016	115.000,00	BOSNAS / Matemeatika jilid 2
55	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	1.3.5.1.1.6.10	1	2015	130.000,00	UN SMA IPA, Bosnas
56	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	1.3.5.1.1.6.10	2	2015	130.000,00	UN SMA IPA, Bosnas
57	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	1.3.5.1.1.6.10	3	2015	130.000,00	UN SMA IPA, Bosnas
58	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	1.3.5.1.1.6.10	4	2015	130.000,00	UN SMA IPA, Bosnas
59	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	1.3.5.1.1.6.10	5	2015	130.000,00	UN SMA IPA, Bosnas
60	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	26	2016	150.000,00	BOSNAS / Fisika SMA jilid 3

NO	OPD	URAIAN	KODE BARANG	NO REG	TAHUN	HARGA	KETERANGAN
61	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	27	2016	150.000,00	BOSNAS / Fisika SMA jilid 3
62	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	28	2016	150.000,00	BOSNAS / Fisika SMA jilid 3
63	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	29	2016	150.000,00	BOSNAS / Fisika SMA jilid 3
64	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	25	2016	130.000,00	BOSNAS / fisika SMA jilid 2
65	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	36	2016	130.000,00	BOSNAS / fisika SMA jilid 2
66	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	37	2016	130.000,00	BOSNAS / fisika SMA jilid 2
67	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	38	2016	130.000,00	BOSNAS / fisika SMA jilid 2
68	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	39	2016	130.000,00	BOSNAS / fisika SMA jilid 2
69	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	40	2016	130.000,00	BOSNAS / fisika SMA jilid 2
70	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	19	2015	115.000,00	SPM Fisiska, Bosnas
71	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	20	2015	115.000,00	SPM Fisiska, Bosnas
72	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	21	2015	115.000,00	SPM Fisiska, Bosnas
73	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	22	2015	115.000,00	SPM Fisiska, Bosnas
74	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	23	2015	115.000,00	SPM Fisiska, Bosnas
75	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Fisika dan Mekanika	1.3.5.1.1.6.3	24	2015	115.000,00	SPM Fisiska, Bosnas
76	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	25	2016	110.000,00	BOSNAS kimia SMA jilid 2
77	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	26	2016	110.000,00	BOSNAS kimia SMA jilid 2
78	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	27	2016	110.000,00	BOSNAS kimia SMA jilid 2
79	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	14	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
80	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	15	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
81	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	16	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
82	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	17	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
83	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	18	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
84	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	19	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
85	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	20	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
86	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	21	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
87	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	22	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
88	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	23	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
89	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Kimia	1.3.5.1.1.6.4	24	2015	102.000,00	SPM Kimia, Bosnas
90	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	21	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
91	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	22	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
92	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	23	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
93	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	24	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
94	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	25	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
95	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	26	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
96	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	27	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
97	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Biologi, Antropologi	1.3.5.1.1.6.7	28	2015	107.000,00	SPM Biologi, Bosnas
98	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	18	2016	110.000,00	BOSNAS
99	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	19	2016	110.000,00	BOSNAS
100	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	20	2016	110.000,00	BOSNAS
101	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	21	2016	110.000,00	BOSNAS
102	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	22	2016	110.000,00	BOSNAS
103	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	23	2016	110.000,00	BOSNAS
104	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	24	2016	110.000,00	BOSNAS
105	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	25	2016	110.000,00	BOSNAS
106	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	26	2016	110.000,00	BOSNAS
107	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	27	2016	110.000,00	BOSNAS
108	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	Sejarah	1.3.5.1.1.9.3	28	2016	110.000,00	BOSNAS
109	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	15	2010	7.920.000,00	-
110	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	16	2010	7.920.000,00	-
111	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	17	2010	7.920.000,00	-
112	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	18	2010	7.920.000,00	-
113	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	19	2010	7.920.000,00	-
114	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	20	2010	7.920.000,00	-
115	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	21	2010	7.920.000,00	-
116	SMA Negeri 001 Tana Lia	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	22	2010	7.920.000,00	-
117	SMA Negeri 001 Tana Lia	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	11	2010	11.880.000,00	-
118	SMA Negeri 001 Tana Lia	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	4	2016	6.820.000,00	BOS - BPK
119	SMA Negeri 001 Tana Lia	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	25	2015	2.450.000,00	Printer Scaner L210 (BOP)
120	SMA Negeri 001 Tana Lia	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	2	2013	1.980.000,00	Printer
121	SMA Negeri 001 Tana Lia	Sepeda Motor	1.3.2.2.1.4.1	1	2010	16.995.000,00	Kepala Sekolah
122	SMA Negeri 001 Tana Lia	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.3.2.5.2.6.29	1	2012	1.000.000,00	Gambar Pres,Wapres & Garuda
123	SMA Negeri 001 Tana Lia	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.3.2.5.2.6.29	2	2012	1.000.000,00	Gambar Pres,Wapres & Garuda
124	SMA Negeri 001 Tana Lia	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.3.2.5.2.6.29	3	2012	1.000.000,00	Gambar Pres,Wapres & Garuda
125	SMA Negeri 001 Tana Lia	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.3.2.5.2.6.29	4	2012	1.000.000,00	Gambar Pres,Wapres & Garuda
126	SMA Negeri 001 Tana Lia	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.3.2.5.2.6.29	5	2012	1.000.000,00	Gambar Pres,Wapres & Garuda
127	SMA Negeri 001 Tana Lia	Compact Disc	1.3.2.5.2.6.9	1	2011	2.200.000,00	Pembelian DVD Compo dari Dana BOP SMAN 1 Tana Lia

NO	OPD	URAIAN	KODE BARANG	NO REG	TAHUN	HARGA	KETERANGAN
128	SMA Negeri 001 Tana Lia	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	3	2015	6.800.000,00	Invocus Proyektor (BOP)
129	SMA Negeri 001 Tana Lia	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	1	2012	5.150.000,00	LCD Proyektor
130	SMA Negeri 001 Tana Lia	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	2	2013	4.500.000,00	Proyektor
131	SMA Negeri 001 Tana Lia	Distiling Apparatus	1.3.2.8.1.41.62	5	2010	6.490.000,00	-
132	SMA Negeri 001 Tana Lia	Distiling Apparatus	1.3.2.8.1.41.62	6	2010	6.490.000,00	-
133	SMA Negeri 001 Tana Lia	recorder display lainnya (dst)	1.3.2.8.4.4.8	1	2015	2.450.000,00	Printer Scanner L210 (Canon)/BOP
134	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1.3.2.19.1.6.5	2	2015	1.000.000,00	BOP- Jaring Futsal
135	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1.3.2.19.1.6.5	3	2015	1.000.000,00	BOP- Jaring Futsal
136	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1.3.2.19.1.6.5	4	2015	1.000.000,00	BOS - Jaring Futsal
137	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Maket/Peta	1.3.2.5.3.2.12	1	2015	1.132.000,00	Maket Miniatur Ka'bah
138	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Examination Lamp	1.3.2.7.1.1.64	1	2016	1.243.000,00	bop
139	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Examination Lamp	1.3.2.7.1.1.64	2	2016	1.243.000,00	bop
140	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1.3.2.8.1.41.4	1	2016	1.252.978,00	Alat Pemadam Api 3 Kg (Lab IPA) (Disdik)
141	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Papan Pengumuman	1.3.2.5.1.5.77	2	2011	1.300.000,00	Pembelian Papan PMR Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
142	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Microphone/Wireless MIC	1.3.2.6.1.1.36	4	2013	1.400.000,00	-
143	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Televisi	1.3.2.5.2.6.2	1	2006	1.408.000,00	-
144	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Microphone/Wireless MIC	1.3.2.6.1.1.36	3	2013	1.500.000,00	-
145	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.5.3.3.9	1	2015	1.540.000,00	BOS
146	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Gitar Elastrik	1.3.2.8.3.10.2	1	2011	1.700.000,00	Pembelian Gambus Elektrik Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
147	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.5.1.5.88	1	2015	1.725.000,00	BOP
148	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	1	2010	1.760.000,00	-
149	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	37	2012	1.760.000,00	Printer Brother DCP-J125 (BOP)
150	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Boneka	1.3.2.7.2.3.3	1	2015	1.800.000,00	BOS - Boneka Perawatan Jenazah Laki-laki
151	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Boneka	1.3.2.7.2.3.3	2	2015	1.860.000,00	BOS - Boneka perawatan jenazah Perempuan
152	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.5.3.3.9	3	2016	1.970.000,00	Kursi Kerja Guru (Disdik)
153	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.5.3.3.9	7	2016	1.970.000,00	Kursi Kerja Guru (Disdik)
154	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.5.3.3.9	8	2016	1.970.000,00	Kursi Kerja Guru (Disdik)
155	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Tandu dorong	1.3.2.2.2.2.3	1	2015	1.983.000,00	BOS - Keranda
156	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	5	2016	2.340.007,00	Printer Multi Fungsi (Lab. Bahasa)-(Disdik)
157	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Tenda	1.3.2.15.3.2.5	2	2015	2.350.000,00	BOS
158	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Tenda	1.3.2.15.3.2.5	3	2015	2.350.000,00	BOS
159	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.5.3.1.8	1	2010	2.387.000,00	-
160	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.5.3.1.8	12	2010	2.387.000,00	-
161	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.5.3.1.8	13	2010	2.387.000,00	-
162	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.5.3.1.8	14	2010	2.387.000,00	-
163	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.5.3.1.8	15	2010	2.387.000,00	-
164	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Tenda	1.3.2.15.3.2.5	4	2015	2.400.000,00	BOS
165	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Sound System	1.3.2.5.2.6.8	2	2011	2.415.000,00	Pembelian Sound Bass Melody Laney Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
166	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	21	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
167	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	22	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
168	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	23	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
169	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	24	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
170	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	25	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
171	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	26	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
172	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	27	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
173	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	28	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
174	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	29	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)
175	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	30	2016	2.475.000,00	Meja Kerja Guru (Disdik)

NO	OPD	URAIAN	KODE BARANG	NO REG	TAHUN	HARGA	KETERANGAN
176	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Sound System	1.3.2.5.2.6.8	1	2011	2.530.000,00	Pembelian Sound Bass Fender Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
177	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Gitar Elastrik	1.3.2.8.3.10.2	3	2011	2.530.000,00	Pembelian Gitar Melody Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
178	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.5.2.6.77	13	2015	2.745.000,00	BOS
179	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.5.2.6.77	12	2015	2.750.000,00	BOS - Tas PP Ransel Complete isi
180	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	76	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
181	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	77	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
182	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	78	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
183	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	79	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
184	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	80	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
185	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	81	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
186	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	82	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
187	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	83	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
188	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	84	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
189	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	85	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
190	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	86	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
191	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	87	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
192	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	88	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
193	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	89	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
194	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	90	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
195	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	91	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
196	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	92	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
197	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	93	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
198	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	94	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
199	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	95	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
200	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	96	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
201	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	97	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
202	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	98	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
203	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	99	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
204	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	100	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
205	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	101	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
206	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	102	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
207	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	103	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
208	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	104	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
209	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	105	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
210	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	106	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
211	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	107	2016	2.765.463,00	Monitor Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
212	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	White Board	1.3.2.5.1.5.5	24	2016	2.802.850,00	White Board (Disdik)
213	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lemari Kayu	1.3.2.5.1.4.2	2	2010	3.029.073,00	-
214	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lemari Kayu	1.3.2.5.1.4.2	9	2010	3.029.073,00	-
215	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lemari Kayu	1.3.2.5.1.4.2	10	2010	3.029.073,00	-
216	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lemari Kayu	1.3.2.5.1.4.2	11	2010	3.029.073,00	-
217	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Tenda	1.3.2.15.3.2.5	6	2016	3.520.000,00	bop
218	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.3.2.6.1.1.48	35	2016	3.545.465,00	UPS (Lab. Bahasa)-(Disdik)
219	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Televisi	1.3.2.5.2.6.2	2	2012	3.800.000,00	Televisi 32 Inch LED (BOP)
220	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.3.2.6.1.1.48	36	2016	3.850.000,00	bop
221	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.3.2.6.1.1.48	37	2016	3.850.000,00	bop
222	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	A.C. Split	1.3.2.5.2.4.4	1	2011	3.946.750,00	Pembelian Air Contioner Samsung Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap

NO	OPD	URAIAN	KODE BARANG	NO REG	TAHUN	HARGA	KETERANGAN
223	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	A.C. Split	1.3.2.5.2.4.4	2	2011	3.946.750,00	Pembelian Air Contioner Samsung Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
224	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	2	2015	4.000.000,00	BANSOS APBN
225	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Tenda	1.3.2.15.3.2.5	5	2015	4.000.000,00	BOS
226	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	7	2013	4.460.000,00	-
227	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Gitar Elastrik	1.3.2.8.3.10.2	2	2011	4.650.000,00	Pembelian Gitar Bass Fender Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
228	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Note Book	1.3.2.10.1.2.3	1	2013	4.794.500,00	-
229	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	1	2012	4.795.000,00	LCD Projector (BOP)
230	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	2	2012	4.795.000,00	LCD Projector (BOP)
231	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1.3.2.19.1.6.5	5	2016	4.950.000,00	ring basket (bop)
232	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1.3.2.19.1.6.5	6	2016	4.950.000,00	ring basket (bop)
233	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Meja Kerja Kayu	1.3.2.5.2.1.2	31	2016	4.963.651,00	Meja Guru (Alat Lab Bahasa)-(Disdik)
234	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	4	2013	5.296.000,00	-
235	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	5	2013	5.296.000,00	-
236	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	8	2013	5.296.000,00	-
237	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Layar Film/Projector	1.3.2.6.1.2.105	9	2013	5.296.000,00	-
238	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Mesin Jahit	1.3.2.5.2.6.24	1	2016	5.390.000,00	bop
239	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	1	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
240	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	2	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
241	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	3	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
242	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	4	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
243	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	5	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
244	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	6	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
245	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	7	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
246	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	8	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
247	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	9	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
248	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	10	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
249	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	11	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
250	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	12	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
251	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	13	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
252	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	14	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
253	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	15	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
254	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	16	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
255	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	17	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
256	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	18	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
257	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	19	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
258	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	20	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
259	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	21	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
260	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	22	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
261	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	23	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
262	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	24	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
263	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	25	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
264	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	26	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
265	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	27	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
266	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	28	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
267	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	29	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
268	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	30	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
269	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	31	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)

NO	OPD	URAIAN	KODE BARANG	NO REG	TAHUN	HARGA	KETERANGAN
270	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Peralatan Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.2.3.18	32	2016	5.672.744,00	Terminal Siswa (Lab. Bahasa)-(Disdik)
271	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Camera Video	1.3.2.5.2.6.21	1	2013	6.200.000,00	-
272	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	15	2012	6.286.000,00	Laptop Sony Vaio (BOP)
273	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	14	2012	6.300.000,00	Laptop Toshiba no Seri C840
274	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Tenda	1.3.2.15.3.2.5	1	2011	6.357.000,00	Pembelian Tenda Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
275	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Distiling Apparatus	1.3.2.8.1.41.62	22	2010	6.490.000,00	-
276	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Distiling Apparatus	1.3.2.8.1.41.62	23	2010	6.490.000,00	-
277	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	1	2010	7.920.000,00	-
278	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	2	2010	7.920.000,00	-
279	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	3	2010	7.920.000,00	-
280	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	4	2010	7.920.000,00	-
281	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	5	2010	7.920.000,00	-
282	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	6	2010	7.920.000,00	-
283	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	7	2010	7.920.000,00	-
284	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	8	2010	7.920.000,00	-
285	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	9	2010	7.920.000,00	-
286	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	10	2010	7.920.000,00	-
287	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	11	2010	7.920.000,00	-
288	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	12	2010	7.920.000,00	-
289	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	13	2010	7.920.000,00	-
290	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	14	2010	7.920.000,00	-
291	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	15	2010	7.920.000,00	-
292	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	16	2010	7.920.000,00	-
293	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	17	2010	7.920.000,00	-
294	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	18	2010	7.920.000,00	-
295	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	19	2010	7.920.000,00	-
296	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	20	2010	7.920.000,00	-
297	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	21	2010	7.920.000,00	-
298	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	22	2010	7.920.000,00	-
299	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	23	2010	7.920.000,00	-
300	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	24	2010	7.920.000,00	-
301	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	25	2010	7.920.000,00	-
302	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	26	2010	7.920.000,00	-
303	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	27	2010	7.920.000,00	-
304	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	28	2010	7.920.000,00	-
305	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	29	2010	7.920.000,00	-
306	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	30	2010	7.920.000,00	-
307	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	31	2010	7.920.000,00	-
308	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	32	2010	7.920.000,00	-
309	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	33	2010	7.920.000,00	-
310	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	34	2010	7.920.000,00	-
311	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	6	2010	8.635.000,00	-
312	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	7	2010	8.635.000,00	-
313	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	35	2015	8.700.000,00	BOS
314	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	36	2015	8.700.000,00	BANSOS APBN
315	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	37	2015	8.700.000,00	BANSOS APBN
316	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	38	2015	8.700.000,00	BANSOS APBN
317	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	39	2015	8.700.000,00	BANSOS APBN

NO	OPD	URAIAN	KODE BARANG	NO REG	TAHUN	HARGA	KETERANGAN
318	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	P.C Unit	1.3.2.10.1.2.1	40	2015	8.700.000,00	BANSOS APBN
319	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.2.3.3	2	2010	8.800.000,00	-
320	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	8	2010	11.880.000,00	-
321	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	9	2010	11.880.000,00	-
322	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	10	2010	11.880.000,00	-
323	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	11	2010	11.880.000,00	-
324	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	12	2010	11.880.000,00	-
325	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Lap Top	1.3.2.10.1.2.2	13	2010	11.880.000,00	-
326	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1.3.2.10.2.1.13	1	2011	13937000	pembelian Keyboard Yamaha Dari Dana BOSDA 2011 SMA N 1 Sesayap
327	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Sepeda Motor	1.3.2.2.1.4.1	1	2010	16.995.000,00	Kepala Sekolah
328	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.5.1.5.88	1	2015	19.200.000,00	BOP - Sampul Rapot dan Ijazah
						1.258.853.867,00	

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
ASET TAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI ASET TAHUN 2025			NILAI PER 31 DESEMBER 2025
			MASUK	KELUAR	PENGHAPUSAN	G
A	B	C	D	E	F	C+D-E-F
1	Sekretariat DPRD	279.860.000,00	-	-	-	279.860.000,00
2	Bagian Pemerintahan	45.236.363,00	50.400.000,00	-	-	95.636.363,00
3	Bagian Organisasi	260.687.000,00	-	69.246.000,00	-	191.441.000,00
4	Bagian Hukum	307.518.650,00	-	-	-	307.518.650,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	982.879.800,00	-	-	-	982.879.800,00
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
7	Bagian Umum	-	-	-	-	-
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	35.628.235.404,00	4.630.732.968,45	62.240.924,00	-	40.196.727.448,45
9	Dinas Perhubungan	4.094.464.272,00	-	-	-	4.094.464.272,00
10	Dinas Kesehatan	440.158.034,00	-	-	-	440.158.034,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.930.422.183,00	1.222.654.500,00	-	-	3.153.076.683,00
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	335.265.000,00	-	-	-	335.265.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	609.182.100,00	-	-	-	609.182.100,00
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	-	-
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	152.200.000,00	-	-	-	152.200.000,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	374.218.000,00	-	-	-	374.218.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.891.004.000,00	114.420.000,00	-	-	2.005.424.000,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.900.000,00	-	-	-	96.900.000,00
20	Inspektorat Kabupaten	419.000.000,00	-	-	-	419.000.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	293.706.000,00	338.106.000,00	-	-	631.812.000,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	2.479.060.900,00	-	-	-	2.479.060.900,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	67.432.500,00	-	-	-	67.432.500,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	218.032.500,00	-	-	-	218.032.500,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45.236.000,00	-	-	-	45.236.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	99.733.500,00	-	-	-	99.733.500,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	564.480.000,00	-	-	-	564.480.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	743.065.000,00	-	-	-	743.065.000,00
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Sesayap Hilir	119.699.800,00	-	-	-	119.699.800,00
32	Kecamatan Tana Lia	56.500.000,00	-	-	-	56.500.000,00
33	Kecamatan Betayau	69.000.000,00	-	-	-	69.000.000,00
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	-	-
Total		**52.603.177.006,00**	**6.356.313.468,45**	**131.486.924,00**	**-**	**58.828.003.550,45**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
AKUMULASI AMORTISASI
ASET TAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI ASET TAHUN 2025			NILAI PER 31 DESEMBER 2025
			MASUK	KELUAR	PENGHAPUSAN	G
A	B	C	D	E	F	C+D-E-F
1	Sekretariat DPRD	228.860.000,00	18.000.000,00	-	-	246.860.000,00
2	Bagian Pemerintahan	11.309.090,00	10.727.273,00	-	-	22.036.363,00
3	Bagian Organisasi	194.014.500,00	10.439.400,00	28.852.500,00		175.601.400,00
4	Bagian Hukum	273.053.150,00	8.991.000,00	-	-	282.044.150,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	790.196.581,00	51.791.460,00	-	-	841.988.041,00
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
7	Bagian Umum	-	-	-	-	-
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	27.012.146.248,00	3.240.470.754,34		-	30.252.617.002,34
9	Dinas Perhubungan	768.481.480,00	758.986.862,00	-	-	1.527.468.342,00
10	Dinas Kesehatan	194.374.521,00	85.235.407,00	-	-	279.609.928,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.448.394.181,00	624.899.508,00	14.260.000,00	-	2.059.033.689,00
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	307.815.000,00	7.320.000,00	-	-	315.135.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	558.416.925,00	50.765.175,00	-	-	609.182.100,00
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	-	-
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	28.735.001,00	30.440.002,00	-	-	59.175.003,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	351.718.000,00	10.000.000,00	-	-	361.718.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.356.432.101,00	296.316.177,63	102.178.431,42	-	1.550.569.847,21
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.900.000,00	-	-	-	96.900.000,00
20	Inspektorat Kabupaten	307.833.334,00	38.000.000,00	-	-	345.833.334,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	88.052.600,00	71.017.800,00	-	-	159.070.400,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	2.287.605.640,00	140.389.713,00	-	-	2.427.995.353,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	14.610.375,00	13.486.500,00	-	-	28.096.875,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	58.109.500,00	43.606.499,00	-	-	101.715.999,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.309.000,00	9.047.200,00	-	-	20.356.200,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	23.271.150,00	19.946.700,00	-	-	43.217.850,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	319.645.000,00	65.670.000,00	-	-	385.315.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	414.121.083,00	105.853.000,00	-	-	519.974.083,00
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Sesayap	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Sesayap Hilir	77.129.873,00	23.939.960,00	-	-	101.069.833,00
32	Kecamatan Tana Lia	17.741.666,00	11.300.000,00	-	-	29.041.666,00
33	Kecamatan Betayau	69.000.000,00	-	-	-	69.000.000,00
34	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	-	-
Total		**37.309.275.999,00**	**5.746.640.390,97**	**145.290.931,42**	**-**	**42.910.625.458,55**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI ASET TAHUN 2025			NILAI PER 31 DESEMBER 2025
			MASUK	KELUAR	PENGHAPUSAN	G
A	B	C	D	E	F	C+D-E-F
1	Sekretariat DPRD	3.762.668.415,01	-	-	-	3.762.668.415,01
2	Bagian Pemerintahan	312.625.000,00	15.400.000,00	-	15.400.000,00	312.625.000,00
3	Bagian Organisasi	590.563.300,00	69.246.000,00	-	-	659.809.300,00
4	Bagian Hukum	562.760.000,00	-	-	32.450.000,00	530.310.000,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	178.140.941,00	-	-	-	178.140.941,00
6	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	260.285.000,00	-	-	-	260.285.000,00
7	Bagian Umum	10.631.186.983,67	1.564.754.000,00	-	2.755.184.428,67	9.440.756.555,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	75.905.261.411,00	20.010.719.700,00	-	51.628.202.985,00	44.287.778.126,00
9	Dinas Perhubungan	2.370.710.893,00	-	-	-	2.370.710.893,00
10	Dinas Kesehatan	3.910.141.000,00	-	-	650.000.000,00	3.260.141.000,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8.661.563.835,09	467.715.757,85	467.715.757,85	467.715.757,85	8.193.848.077,24
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	1.693.481.500,00	53.866.000,00	-	197.783.000,00	1.549.564.500,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	181.062.500,00	-	-	28.570.000,00	152.492.500,00
15	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.193.622.500,00	-	-	-	1.193.622.500,00
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	293.276.700,00	109.307.300,00	-	-	402.584.000,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	13.702.114.819,93	94.723.333,34	-	259.456.666,67	13.537.381.486,60
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.786.943.724,50	933.663.036,50	-	1.028.392.986,50	4.692.213.774,50
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.758.000,00	276.588.500,00	-	-	322.346.500,00
20	Inspektorat Kabupaten	449.786.000,00	1.421.897.714,29	-	-	1.871.683.714,29
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	886.797.800,00	-	-	207.820.000,00	678.977.800,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	139.156.100,00	-	-	-	139.156.100,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	19.100.000,00	-	-	-	19.100.000,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	924.182.146,00	-	-	-	924.182.146,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	745.030.000,00	-	-	-	745.030.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	998.055.000,00	-	-	-	998.055.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	452.476.300,00	584.885.000,00	-	27.485.150,00	1.009.876.150,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	409.444.660,00	245.210.000,00	-	245.210.000,00	409.444.660,00
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Sesayap	3.440.105.856,08	319.008.600,00	-	1.886.627.856,08	1.872.486.600,00
31	Kecamatan Sesayap Hilir	4.241.606.975,00	48.782.800,00	-	290.786.800,00	3.999.602.975,00
32	Kecamatan Tana Lia	9.578.764.374,67	-	-	-	9.578.764.374,67
33	Kecamatan Betayau	618.942.800,00	420.358.000,00	-	38.650.000,00	1.000.650.800,00
34	Kecamatan Muruk Rian	1.187.572.994,00	-	-	-	1.187.572.994,00
Total		**153.133.187.528,95**	**26.636.125.741,98**	**467.715.757,85**	**59.759.735.630,77**	**119.541.861.882,30**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI ASET TAHUN 2025		NILAI PER 31 DESEMBER 2025
			MASUK	KELUAR	F
A	B	C	D	E	C+D-E
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(8.194.911.181,75)	431.123.560,00		(7.763.787.621,75)
2	Dinas Kesehatan	(2.813.053.473,00)	184.166.667,00		(2.628.886.806,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	(10.612.029.307,00)	2.613.704.908,00	55.107.832,50	(8.053.432.231,50)
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(1.140.246.167,00)			(1.140.246.167,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(962.324.148,00)			(962.324.148,00)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(916.538.946,00)			(916.538.946,00)
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(177.986.667,00)	27.827.500,00		(150.159.167,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(97.777.956,00)			(97.777.956,00)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(263.628.366,00)		109.307.300,00	(372.935.666,00)
11	Dinas Perhubungan	(2.097.867.122,00)			(2.097.867.122,00)
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(370.789.900,00)	217.625.335,00	217.625.335,00	(370.789.900,00)
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(45.758.000,00)		276.588.500,00	(322.346.500,00)
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-			-
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	(16.912.500,00)			(16.912.500,00)
16	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	(10.288.020.321,32)	253.887.916,67	94.723.333,34	(10.128.855.737,99)
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	(1.600.955.193,00)	168.050.132,00	47.660.791,33	(1.480.565.852,33)
18	Bagian Umum	(8.794.921.955,67)	2.174.221.094,67	1.564.754.000,00	(8.185.454.861,00)
19	Bagian Pemerintahan	(243.268.667,00)			(243.268.667,00)
20	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	(257.993.334,00)			(257.993.334,00)
21	Bagian Hukum	(560.870.000,00)	31.760.000,00		(529.110.000,00)
22	Bagian Organisasi	(559.710.134,00)		42.701.700,00	(602.411.834,00)
23	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	(178.140.941,00)			(178.140.941,00)
24	Inspektorat Kabupaten	(415.961.552,00)		1.418.873.547,29	(1.834.835.099,29)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	(840.406.108,00)	168.945.523,00		(671.460.585,00)
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	(4.404.150.474,50)	661.875.736,50	933.663.036,50	(4.675.937.774,50)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(431.258.246,00)	27.485.150,00	570.404.999,67	(974.178.095,67)
28	Sekretariat Dprd	(3.624.765.938,01)			(3.624.765.938,01)
29	Kecamatan Sesayap	(2.680.581.416,00)	1.381.824.288,00	187.908.600,00	(1.486.665.728,00)
30	Kecamatan Sesayap Hilir	(2.462.927.101,00)	263.622.717,00	25.668.717,00	(2.224.973.101,00)
31	Kecamatan Tana Lia	(5.624.601.656,00)			(5.624.601.656,00)
32	Kecamatan Betayau	(478.820.420,00)	35.744.166,00	409.933.000,64	(853.009.254,64)
33	Kecamatan Muruk Rian	(1.145.852.837,00)			(1.145.852.837,00)
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(685.036.646,00)			(685.036.646,00)
Total		**(72.988.066.674,24)**	**8.641.864.693,84**	**5.954.920.693,26**	**(70.301.122.673,67)**

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA ATAS PAJAK REKLAME TA 2025

No	Nama Wajib Pajak	Uraian	Tanggal Penetapan	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Jumlah Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Tanggal Pelaporan	Nilai Pajak/bulan (Rp)	Jumlah bulan s.d. 31 des 2025	pendapatan pajak reklame - LO (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Jumlah Bulan)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 : 7	11	12 = 10 x 11	13 = 7 -11	14
1	APOTEK ANNISA FARMA	Reklame Neon Sigh/Box	18/02/2025	18/02/2025	17/02/2026	12	127.750,00	31/12/2025	10.645,83	11	117.104,13	1	10.645,83
2	APOTEK DAN KOSMETIK RAFISQI FARMA	Reklame Neon Sigh/Box	18/02/2025	18/02/2025	17/02/2026	12	47.907,00	31/12/2025	3.992,25	11	43.914,75	1	3.992,25
3	GALLERY GAUDETE ROEMAH TARA ACCESSORIES DAN CRAFT	Reklame Spanduk	18/02/2025	18/02/2025	17/02/2026	12	159.688,00	31/12/2025	13.307,33	11	146.380,63	1	13.307,33
4	RUMAH MAKAN SEDERHANA MASAKAN PADANG	Reklame Neon Sigh/Box	18/02/2025	18/02/2025	17/02/2026	12	297.840,00	31/12/2025	24.820,00	11	273.020,00	1	24.820,00
5	HAYZISKIN SKINCARE.KOSMETIK DAN AKSESORIS	Reklame Neon Sigh/Box	18/02/2025	18/02/2025	17/02/2026	12	114.975,00	31/12/2025	9.581,25	11	105.393,75	1	9.581,25
6	APOTEK BAIS	Reklame Neon Sigh/Box	18/02/2025	18/02/2025	17/02/2026	12	111.782,00	31/12/2025	9.315,17	11	102.466,87	1	9.315,17
7	BRI	Reklame Neon Sigh/Box	24/04/2025	11/03/2025	10/03/2026	12	903.375,00	31/12/2025	75.281,25	10	752.812,50	2	150.562,50
8	BNI 46	Reklame Bill Board	24/04/2025	11/03/2025	10/03/2026	12	172.463,00	31/12/2025	14.371,92	10	143.719,20	2	28.743,84
9	PT.PEGADAIAN (PERSERO)	Reklame Bill Board	24/04/2025	10/03/2025	11/03/2026	13	322.204,00	31/12/2025	24.784,92	10	247.849,20	3	74.354,76
10	PENGINAPAN FITRIANI	Reklame Papan	28/04/2025	24/04/2025	23/04/2026	12	56.461,00	31/12/2025	4.705,08	9	42.345,72	3	14.115,24
11	DZAKY RELOAD	Reklame Neon Sigh/Box	10/06/2025	02/06/2025	02/07/2026	14	186.150,00	31/12/2025	13.296,43	7	93.075,01	7	93.075,01
12	SINAR LANCAR	Reklame Papan	10/06/2025	02/06/2025	02/07/2026	14	800.719,00	31/12/2025	57.194,21	7	400.359,47	7	400.359,47
13	HANNY BATIK	Reklame Papan	10/06/2025	02/06/2025	02/07/2026	14	232.688,00	31/12/2025	16.620,57	7	116.343,99	7	116.343,99
14	PT. BPD KALTIM KALTARA	Reklame Berjalan	10/06/2025	02/06/2025	02/07/2026	14	3.512.030,00	31/12/2025	250.859,29	7	1.756.015,03	7	1.756.015,03
15	BETHRIES BAKERY	Reklame Neon Sigh/Box	10/06/2025	02/06/2025	02/07/2026	14	86.870,00	31/12/2025	6.205,00	7	43.435,00	7	43.435,00
16	CITRA INDAH	Reklame Papan	13/06/2025	13/06/2025	13/07/2026	14	382.566,00	31/12/2025	27.326,14	7	191.282,98	7	191.282,98
17	PAGUNTAKA JAYA ATK	Reklame Neon Sigh/Box	13/06/2025	13/06/2025	13/07/2026	14	192.173,00	31/12/2025	13.726,64	7	96.086,48	7	96.086,48
18	APOTEK MULYA	Reklame Neon Sigh/Box	13/06/2025	13/06/2025	13/07/2026	14	156.950,00	31/12/2025	11.210,71	7	78.474,97	7	78.474,97
19	RAHMA BAKERY	Reklame Papan	13/06/2025	13/06/2025	13/07/2026	14	33.877,00	31/12/2025	2.419,79	7	16.938,53	7	16.938,53
20	SINAR LANCAR	Reklame Papan	13/06/2025	13/06/2025	13/07/2026	14	277.172,00	31/12/2025	19.798,00	7	138.586,00	7	138.586,00
21	BONJUR CAKES	Reklame Neon Sigh/Box	12/08/2025	12/08/2025	11/08/2026	12	177.938,00	31/12/2025	14.828,17	5	74.140,85	7	103.797,19
22	TOKO 99 CELL	Reklame Neon Sigh/Box	19/08/2025	18/08/2025	17/08/2026	12	1.275.219,00	31/12/2025	106.268,25	5	531.341,25	7	743.877,75
23	JNE	Reklame Neon Sigh/Box	22/08/2025	22/08/2025	21/08/2026	12	217.175,00	31/12/2025	18.097,92	5	90.489,60	7	126.685,44
24	TOKO 3 PUTRI	Reklame Papan	25/09/2025	24/09/2025	24/09/2026	13	129.347,00	31/12/2025	9.949,77	4	39.799,08	9	89.547,93
25	PT. BPD KALTIM KALTARA	Reklame Neon Sigh/Box	10/10/2025	10/10/2025	12/10/2026	13	415.918,00	31/12/2025	31.993,69	3	95.981,07	10	319.936,90
26	PT. BPD KALTIM KALTARA	Reklame Neon Sigh/Box	10/10/2025	10/10/2025	12/10/2026	13	415.918,00	31/12/2025	31.993,69	3	95.981,07	10	319.936,90
27	CV. ARIAL WIDYA GRAFIKA	Reklame Kain	24/12/2025	30/12/2025	28/01/2026	1	132.000,00	31/12/2025	132.000,00	1	132.000,00	0	-
Jumlah							**10.939.155,00**				**5.965.337,13**		**4.973.817,74**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
PERIODE 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Utang Belanja Barang dan Jasa										Keterangan
		Utang Belanja Obat-Belanja Obat-obatan	Utang Belanja BMHP-Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Barang Diserahkan	Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Kalibrasi	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	Utang Pajak, Bea dan Perizinan	Total	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
2	DINAS KESEHATAN	20.486.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.151.524,00	6.037.075,00	0,00	83.675.526,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	266.939.223,93	0,00	0,00	0,00	23.950.774,00	0,00	3.412.000,00	294.301.997,93	
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.550,00	0,00	760.550,00	
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.851,00	0,00	0,00	0,00	130.851,00	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.370,00	0,00	654.370,00	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.750,00	0,00	0,00	1.633.750,00	
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.368,00	0,00	0,00	0,00	169.368,00	
11	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.236,00	0,00	0,00	0,00	1.765.236,00	
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
16	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.480,00	0,00	0,00	0,00	487.480,00	
17	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897.952,00	0,00	0,00	0,00	9.897.952,00	
18	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.187.764,00	0,00	0,00	47.187.764,00	
19	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
20	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.612,00	1.325.829,00	0,00	0,00	5.032.441,00	
21	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
22	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil

No	OPD	Utang Belanja Barang dan Jasa										Keterangan
		Utang Belanja Obat-Belanja Obat-obatan	Utang Belanja BMHP-Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Barang Diserahkan	Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Kalibrasi	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	Utang Pajak, Bea dan Perizinan	Total	
23	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
24	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.201,00	6.017.000,00	0,00	0,00	6.897.201,00	
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.961.181,00	0,00	0,00	86.961.181,00	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257.232,17	0,00	10.257.232,17	
28	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
29	KECAMATAN SESAYAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640,00	1.813.499,00	688.480,00	0,00	2.564.619,00	
30	KECAMATAN SESAYAP HILIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.823,00	0,00	1.520.823,00	
31	KECAMATAN TANA LIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
32	KECAMATAN BETAYAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
33	KECAMATAN MURUK RIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
34	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Nihil
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM	165.394.277,00	10.610.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.621.482,00	1.670.782,00	0,00	260.297.164,00	
Total		185.881.204,00	10.610.623,00	266.939.223,93	-	-	17.100.340,00	308.662.803,00	21.589.312,17	3.412.000,00	814.195.506,10	

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
UTANG ASET TETAP TA 2025
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	PENYEDIA	NILAI KONTRAK/ADDENDUM	TOTAL	NILAI ASET		UTANG TA 2025		PIUTANG UANG MUKA TA 2025		Sisa Yg Harus Dibayar ke Penyedia (jika Aset/Persd 100%)	KET
					%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)												
1	Rehabilitasi Pascabencana Longsor Jalan Desa Sambungan-Tengku Dacing Lokasi 5 (STA 5+200-5+240)	CV. INTI MANDIRI SUKSES	4.712.998.572,60	2.824.028.746,00	62,087%	2.926.159.423,77		102.130.677,77			1.888.969.826,60	
2	Rehabilitasi Pascabencana Longsor Jalan Desa Sambungan-Desa Tengku Dacing Lokasi 6 (STA 8+700-8+850)	CV. INTI MANDIRI SUKSES	12.179.692.748,70	7.551.409.504,97	62,035%	7.555.672.396,66		4.262.891,69			4.628.283.243,73	
Total BPBD			**16.892.691.321,30**	**10.375.438.250,97**		**10.481.831.820,43**		**106.393.569,46**			**6.517.253.070,33**	
Dinas Kesehatan												
1	Lanjutan Relokasi Puskesmas Tideng Pale Tahap 2	CV. Sinar Tanjung	3.902.489.000,00	3.602.777.844,00	98,15%	3.830.292.953,50		227.515.109,50			299.711.156,00	
Total Dinas Kesehatan			**3.902.489.000,00**	**3.602.777.844,00**		**3.830.292.953,50**		**227.515.109,50**			**299.711.156,00**	
Dinas Pendidikan												
1	Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Pendidikan Tahap 2	PT. Lestrari Asi Sejahtera	24.781.419.800,00	21.782.867.125,00	88,17%	21.849.777.837,66		66.910.712,66		-	2.998.552.675,00	
2	Konstruksi Landscape Areal Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan	CV. Pajar Supa Lestari	969.150.100,00	940.075.597,00	97,10%	941.044.747,10		969.150,10			29.074.503,00	
3	Pematangan Lahan Taman Budaya Kabupaten Tana Tidung	CV. Bumi Paguntaka Nusantara	12.232.639.069,00	11.376.354.335,00	93,15%	11.394.703.292,77		18.348.957,77			856.284.734,00	
4	Pembangunan Konstruksi Pagar dan Landscape Balai Adat Sesayap Hilir (Lanjutan)	CV. Bumi Paguntaka Utama	2.075.652.691,00	1.971.870.057,00	95,10%	1.973.945.709,14		2.075.652,14			103.782.634,00	
5	Konstruksi Pembangunan Toilet SDN 012 Tana Tidung (Sebawang)	CV. Kaltara Bumi Pertiwi	198.742.000,00	188.804.900,00	96,72%	192.223.262,40		3.418.362,40			9.937.100,00	
6	Pembangunan Pagar SDN 010 Tana Tidung (Sesayap)	CV. Arya Guna Perkasa	198.968.800,00	179.071.920,00	90,83%	180.723.361,04		1.651.441,04			19.896.880,00	
Total Dinas Pendidikan			**40.456.572.460,00**	**36.439.043.934,00**		**36.532.418.210,11**		**93.374.276,11**			**4.017.528.526,00**	
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP)												
1	Pembangunan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD)	CV. ALAM BIRU	11.944.653.377,85	10.901.885.137,96	91,27%	10.901.885.137,96		0,00		-	1.042.768.239,89	
2	Pembangunan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan Zona 2	CV. ALAM BIRU	6.942.315.001,84	6.420.947.145,20	92,49%	6.420.947.145,20		0,00			521.367.856,64	
3	Pembangunan Jalan Lingkar Pusat Pemerintahan Tahap II	CV. INTI MANDIRI SUKSES	3.149.984.218,20	2.774.191.100,97	88,07%	2.774.191.100,97		- 0,00		-	375.793.117,23	
4	Pembangunan Trotoar Jalan Perintis Tahap II	CV. BIKIS JAYA	1.552.404.809,25	1.179.827.655,03	76,17%	1.182.466.743,21		2.639.088,18		-	372.577.154,22	
5	Pemeliharaan dan Rehab Jalan Lingkungan Kantor	CV. ALAM BIRU	1.684.380.721,38	1.314.827.591,11	78,06%	1.314.827.591,11		- 0,00			369.553.130,27	
6	Rekonstruksi Jalan M. Hatta (Bundaran - Simpang Pelabuhan Nusantara) Tahap II	PT. GRAHA MAS JAYA	29.119.512.756,45	27.739.247.851,79	95,26%	27.739.247.851,79		0,00		-	1.380.264.904,66	
7	Pengawasan Pembangunan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan	PT. MITRA UTAMA KONSULTAN ENGINEER	436.215.015,00	392.637.135,00	100,00%	436.215.015,00		43.577.880,00			43.577.880,00	Utang TA 2024: 22.377.830,271, Tambahan Utang di TA 2025: 21.200.049,729

NO	URAIAN KEGIATAN	PENYEDIA	NILAI KONTRAK/ADDENDUM	TOTAL	NILAI ASET		UTANG TA 2025		PIUTANG UANG MUKA TA 2025		Sisa Yg Harus Dibayar ke Penyedia (jika Aset/Persd 100%)	KET
					%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai		
8	Pembangunan Jalana Poros Bebatu - Desa Sengkon Tahap III	CV. INDIEGO PERKASA	5.592.780.000,00	3.635.307.000,00	68,77%	3.846.266.661,60		210.959.661,60		-	1.957.473.000,00	Utang TA 2024: 37.080.131,40 Tambahan Utang di TA 2025: 173.879.530,2
9	Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Bebatu-Desa Sengkong Tahap III	CV. UNICON	242.590.500,00	157.683.825,00	100,00%	242.590.500,00		84.906.675,00			84.906.675,00	Utang TA 2024:1.608.375,02, Tambahan Utang di TA 2025: 83.298.299,985
10	Pembangunan Gedung B Kantor Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahap II	PT. WIJAYA BERLIAN TETANINDO	12.656.474.313,83	12.023.650.598,14	95,88%	12.135.027.572,10		111.376.973,96		-	632.823.715,69	
11	Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung Tahap II	PT. MAHAMERU GREEN SPACE	47.968.780.300,00	45.570.341.285,00	96,02%	46.059.622.844,06		489.281.559,06		-	2.398.439.015,00	
12	Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahap II	PT. EKA MAKMUR BERSAMA	40.547.302.000,00	38.519.936.900,00	96,91%	39.292.768.476,12		772.831.576,12		-	2.027.365.100,00	
13	Pembangunan Landscape Kantor DPRD Tahap II	CV. SINAR TANJUNG	5.900.543.800,00	4.130.380.660,00	73,96%	4.364.042.194,48		233.661.534,48		-	1.770.163.140,00	
14	Pembangunan Landscape Kawasan Kantor Bupati	CV. BUMI PAGUNTAKA UTAMA	5.753.820.300,00	5.466.129.285,00	95,00%	5.466.129.285,00		-		-	287.691.015,00	
15	Rekonstruksi Rumah Jabatan Camat Sesayap Tahap II	CV. ARYAGUNA PERKASA	1.526.122.000,00	1.449.815.900,00	95,77%	1.461.567.039,40		11.751.139,40			76.306.100,00	
16	Pembangunan Siring Stadion Mini	PT. TETA TOTAL BERKARYA	5.263.134.300,00	4.210.507.440,00	80,09%	4.215.244.260,87		4.736.820,87		-	1.052.626.860,00	
17	Rehabilitasi Gedung Serbaguna DPRD	CV. PERDANA ALAM MANDIRI	300.690.000,00	200.000.000,00	100,00%	300.690.000,00		100.690.000,00			100.690.000,00	
18	Pembangunan Drainase Bhayangkara Desa Tideng Pale Timur	CV. INTI MUSTIKA	177.150.500,00	135.359.864,00	100,00%	177.150.500,00		41.790.636,00			41.790.636,00	
19	Pengawasan Drainase Bhayangkara Desa Tideng Pale Timur	CV. BLUE PRINT CONSULTANT	25.890.750,00	-	100,00%	25.890.750,00		25.890.750,00			25.890.750,00	
Total DPUPRPKP			**180.784.744.663,80**	**166.222.676.374,20**		**168.356.770.668,87**		**2.134.094.294,67**		**-**	**14.562.068.289,60**	
TOTAL			**242.036.497.445,10**	**216.639.936.403,17**		**219.201.313.652,91**		**2.561.377.249,74**			**25.396.561.041,93**	

PENYALURAN KURANG BAYAR DAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR
DANA BAGI HASIL SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN TANA TIDUNG

KODE		URAIAN	PAGU (NO 44/KM.7/2024) KB TAHUN 2023	TRANSFER TAHUN 2025 (TAHAP 1)	KURANG BAYAR			LEBIH BAYAR		
					SISA KB TAHUN 2023	KB TAHUN 2024	KB Th 2023 + Th 2024	SISA LB TAHUN 2023	LB TAHUN 2024	LB Th 2023 + Th 2024
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak PPH	611111	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 (KB TA 2023)	724.410.000,00	311.863.000,00	412.547.000,00	3.465.944.000,00	3.878.491.000,00			-
	611112	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP (KB Tahun 2023)	8.315.000,00	3.580.000,00	4.735.000,00	419.336.000,00	424.071.000,00			-
Pajak PBB	611212	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah - Kabupaten/Kota							162.099.000,00	162.099.000,00
	611212	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota				5.527.042.000,00	5.527.042.000,00			-
	611212	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	47.341.486.000,00	20.380.787.000,00	26.960.699.000,00	306.638.899.000,00	333.599.598.000,00			-
	611212	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	149.902.000,00	64.534.000,00	85.368.000,00	1.926.028.000,00	2.011.396.000,00			-
	611212	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota				384.764.000,00	384.764.000,00			-
	611212	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	55.017.000,00	23.685.000,00	31.332.000,00	222.328.000,00	253.660.000,00			-
SDA	612211	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi							1.171.410.000,00	1.171.410.000,00
		612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	55.343.000,00	23.825.000,00	31.518.000,00	1.420.783.000,00	1.452.301.000,00			-
		612211 Belanja Dana Bagi Hasil Landrent							38.411.000,00	38.411.000,00
		612211 Belanja Dana Bagi Hasil Royalti						116.955.463.000,00	42.814.634.000,00	159.770.097.000,00
		612211 Belanja Dana Bagi Hasil Kehuatan (IIUPH)				718.392.000,00	718.392.000,00			-
		612211 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan (PSDH)				1.029.481.000,00	1.029.481.000,00	1.799.497.000,00		1.799.497.000,00
		612211 Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan						1.006.057.000,00	355.564.000,00	1.361.621.000,00
		612211 Belanja Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit						3.079.753.000,00	2.852.463.000,00	5.932.216.000,00
TOTAL			**48.334.473.000,00**	**20.808.274.000,00**	**27.526.199.000,00**	**321.752.997.000,00**	**349.279.196.000,00**	**122.840.770.000,00**	**47.394.581.000,00**	**170.235.351.000,00**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BEBAN ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI (BEBAN LAIN-LAIN)
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.488.428.024,00
2	Dinas Kesehatan	-
3	Puskesmas Tideng Pale	22.056.238,00
4	Puskesmas Sesayap Hilir	7.254.636,00
5	Puskesmas Tana Lia	58.179.950,00
6	Puskesmas Kujau	7.236.181,00
7	Puskesmas Muruk Rian	23.901.905,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	7.601.751,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	530.161.236,67
10	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	31.639.440,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.522.800,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	4.960.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	3.490.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.897.751,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	31.920.000,00
16	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	3.043.620,00
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	3.990.000,00
18	Bagian Umum	14.200.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	19.416.000,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.401.000,00
21	Inspektorat Kabupaten	750.000,00
22	Kecamatan Betayau	7.682.300,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.100.000,00
TOTAL		**2.401.832.832,67**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
I	**Surplus Non Lancar**		
1	**Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**	**323.589.750.938,00**	**6.202.824,00**
	Dinas Kesehatan	645.000,00	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	323.589.105.938,00	
2	**Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi**	**1.422.763.865,29**	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.422.763.865,29	
TOTAL		**325.012.514.803,29**	**6.202.824,00**
II	**Defisit Aset non lancar**		
Penjualan BMD Yang di Pisahkan:			
1	Penjualan Peralatan dan Mesin	5.568.750,00	183.700.000,00
	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	5.568.750,00	
2	Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**23.114.083,00**	-
	Kecamatan Sesayap Hilir	23.114.083,00	
3	Penjualan Aset Lain-lain (Rusak Berat)	**35.732.812,00**	-
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	35.732.812,00	-
Penghapusan BMD Yang di Pisahkan:		-	-
1	Penghapusan Aset Lain-lain Rusak Berat	**6.746.421.300,93**	**26.009.909.256,67**
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	366.517.250,00	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	3.141.665,00	
	Bagian Hukum	690.000,00	
	Bagian Pemerintahan	15.400.000,00	
	Bagian Umum	580.963.334,00	
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	27.584.665,00	
	DPUPRPKP	5.173.297.419,00	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.592.197,85	
	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	29.732.868,00	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	742.500,00	
	Kecamatan Betayau	2.905.834,00	
	Kecamatan Sesayap	504.803.568,08	
	Kecamatan Sesayap Hilir	4.050.000,00	
2	Penghapusan Aset Lain-Lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah)	**549.770.308,70**	**297.930.000,00**
	DPUPRPKP	465.833.333,00	
	Dinas Kesehatan	83.936.975,70	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
1	Pembayaran Utang Belanja BMHP/Kelebihan Pembayaran atas Transfer Pusat	**759.518,00**	**1.456.013.606,00**
	Dinas Kesehatan	759.518,00	
2	Transfer Pusat	**56.464.654.111,48**	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.464.654.111,48	
3	Penyertaan Modal	**- 102.600.004,33**	
	Bagian Pemerintahan	- 15.400.000,00	
	Kecamatan Sesayap	- 87.200.004,33	
TOTAL (II)		**63.723.420.879,78**	**27.947.552.862,67**
TOTAL (I dan II)		**261.289.093.923,51**	**(27.941.350.038,67)**

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Atas Laporan Keuangan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA
SUNGOI SESAYAP
Per 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SUNGOI SESAYAP
Jalan Wisma Desa Limbu Sedulun Kec. Sesayap , Kode Pos 77152

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TEDI KONGSO SUSENO, SE

Jabatan : PLT DIREKTUR

Alamat Kantor : JLN. WISMA, SEDULUN

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG
2. Laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG
5. Sampai saat ini baik perusahaan, dan Direksi tidak sedang menghadapi masalah tuntutan hukum dari pihak lain

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tana Tidung, 20 Februari 2026
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG

TEDI KONGSO SUSENO, SE
PLT DIREKTUR

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00008/2.1084/AU.8/10/0799-1/1/II/2026

Kepada Yth.
Direksi, Pemegang Saham, dan Komisaris
PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali dampak dari hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian

Laporan keuangan PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adapun beberapa catatan telah dijelaskan di dalam CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN di Paragraf terakhir.
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi Opini Wajar dengan Pengecualian kami.
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi Opini Wajar dengan Pengecualian kami.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnuscpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan professional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
KHAIRUNNAS

Drs. Khairunnas DS, Ak., CA., CPA., CFL, Asean CPA
Izin Akuntan Publik: 0799

Mataram, 20 Februari 2026

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

	Hal
I. DAFTAR ISI	i
II. LAPORAN KEUANGAN	
- Laporan Posisi Keuangan	1
- Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensip Lain	2
- Laporan Perubahan Ekuitas	3
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
IV. LAMPIRAN	
- Daftar Aset Tetap	

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per, 31Desember 2025
(Disajikan dalam rupiah)

ASET

	Catatan	2025
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	03	1.171.841.692,74
Piutang Usaha	04	1.348.478.400,70
Cadangan Penyisihan Piutang	05	(67.423.920,04)
Piutang Lain-lain	06	257.404.806,00
Uang Muka Pajak	07	-
Biaya Dibayar Di Muka	08	-
Persediaan	09	890.264.573,68
Jumlah Aset Lancar		**3.600.565.555,09**
ASET TETAP		
Nilai Perolehan (Aset Tetap dan Inventaris)	10	47.322.918.346,63
Akumulasi Penyusutan		(2.394.937.510,61)
Jumlah Aset Tidak Lancar		**44.927.980.836,02**
JUMLAH ASET		**48.528.546.391,11**

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Usaha	11	-
Hutang Lain-Lain	12	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	13	-
Hutang Pajak	14	35.099.349,00
Jumlah Kewajiban Lancar		**35.099.349,00**
EKUITAS		
Modal Setelah pisah dari PDAM Bulungan	16	288.017.577,00
Modal Hibah	15	16.000.000.000,00
Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	17	43.859.863.686,63
Tambahan Modal Disetor	18	67.790.000,00
Jumlah Modal dan Hibah		**60.215.671.263,63**
Laba/Rugi Tahun Lalu	19	(13.144.988.086,86)
Laba/Rugi Tahun Berjalan		1.422.763.865,34
Jumlah Laba/Rugi		**(11.722.224.221,53)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**48.528.546.391,11**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIP LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	2025
I	**PENDAPATAN USAHA**	20	
	- Pendapatan Penjualan Air		5.107.031.758,82
	- Pendapatan Non Air		326.864.573,53
	- Pendapatan Hibah Kimia dari Pemda Tana Tidung Tahun 2025		596.228.675,00
	Jumlah		**6.030.125.007,35**
II	**BEBAN USAHA**	21	
	- Beban Operasi		1.894.855.208,00
	- Beban Pengolahan Air		875.230.045,32
	- Beban Transmisi dan Distribusi		560.967.587,00
	- Beban (HPP) Sambungan Baru		-
	Jumlah		**3.331.052.840,32**
III	**LABA / RUGI KOTOR**		**2.699.072.167,03**
IV	**BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**	21	**1.278.239.536,30**
V	**LABA / RUGI OPERASIONAL**		**1.420.832.630,74**
VI	**PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**	22	
	- Pendapatan Lain-lain		5.337.597,16
	- Beban Lain-lain		(3.406.362,56)
	Jumlah		**1.931.234,60**
VII	**LABA / RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK**		**1.422.763.865,34**
VIII	**BEBAN PAJAK PENGHASILAN**		
	- Pajak Kini		-
	- Beban Pajak Ditangguhkan		-
	Jumlah		-
IX	**LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN**		**1.422.763.865,34**
X	**(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIP LAIN**		
	Pos-pos yang Tidak Akan Direklafikasi ke Laba Rugi :		
1	Surplus Revaluasi Tanah/Aset Tidak Lancar		-
2	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		-
3	Beban Pajak Penghasilan Terkait		-
4	Penghasilan Komprehensip Lain Tahun Berjalan		-
	Jumlah		-
XI	**JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIP TAHUN BERJALAN**		**1.422.763.865,34**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

No	URAIAN	2025
I	**Saldo Awal**	
	1 Modal	
	- Modal setelah dipisah dari PDAM Kab. Bulungan	288.017.577,00
	- Modal Hibah	16.000.000.000,00
	- Modal Hibah Kimia	679.662.000,00
	- Tambahan Modal Disetor	67.790.000,00
	Saldo awal Modal	**17.035.469.577,00**
	2 **Laba/Rugi**	
	- Rugi tahun sebelumnya	(13.669.348.025,86)
	- Koreksi Rugi	-
	- Rugi tahun berjalan	524.359.939,00
	Saldo Laba/Rugi ditahan	**(13.144.988.086,86)**
	Saldo awal Ekuitas	**3.890.481.490,14**
II	**Mutasi Tahun Berjalan**	
	1 Modal	
	- Modal setelah dipisah dari PDAM Kab. Bulungan	288.017.577,00
	- Modal Hibah	16.000.000.000,00
	- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	43.859.863.686,63
	- Tambahan Modal Disetor	67.790.000,00
	Jumlah	**60.215.671.263,63**
	2 **Laba/Rugi**	
	- Rugi tahun sebelumnya	(13.144.988.086,86)
	- Laba/Rugi tahun berjalan	1.422.763.865,34
	Saldo Laba/Rugi ditahan	**(11.722.224.221,53)**
	Jumlah Mutasi Ekuitas	**48.493.447.042,11**
III	**Saldo Akhir**	
	1 Modal	
	- Modal setelah dipisah dari PDAM Kab. Bulungan	288.017.577,00
	- Modal Hibah	16.000.000.000,00
	- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	43.859.863.686,63
	- Tambahan Modal Disetor	67.790.000,00
	Jumlah	**60.215.671.263,63**
	2 **Laba/Rugi**	
	- Rugi tahun sebelumnya	(13.144.988.086,86)
	- Koreksi	-
	- Laba / Rugi tahun berjalan	1.422.763.865,34
	Jumlah	**(11.722.224.221,53)**
	Saldo Akhir Ekuitas	**48.493.447.042,11**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

01. PENJELASAN UMUM

- Uraian Ringkas Kegiatan Perusahaan

Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Tana Tidung didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung No. 1 tahun 2013 tanggal 7 Maret 2013. PDAM Kabupaten Tana Tidung merupakan pecahan dari PDAM Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, yang beroperasi sejak tahun 1980. Instalasi pertama yang ada saat itu adalah instalasi di Tideng Pale kapasitas 10 liter/per detik dan instalasi kedua instalasi Sedulun dengan kapasitas 20 liter/per detik yang merupakan bantuan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan surat kesepakatan dan Berita Acara tentang penyerahan aset dan pengelolaan PDAM Kabupaten Bulungan yang berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung Tanggal 20 April 2009, maka PDAM Kabupaten Tana Tidung efektif berdiri sendiri dan masuk ke dalam kepemilikan dan pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pendirian PDAM adalah dalam rangka pelayanan umum berupa penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Tana Tidung berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 21 Februari 2022.

Kantor Perumda Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung berada di Jl. Wisma, Limbu Sedulun, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara. Telepon 0823-5121-9956.

Saat ini Perumda Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung mempunyai 5 (Lima) Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA Sedulun, IPA Tana Lia, IPA Bebatu Supa, IPA Sesayap, dan IPA Sesayap Hilir.

- Maksud dan Tujuan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung, maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah :

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum;
- Meningkatkan keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
- Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan air bersih di Daerah.

Adapun Kegiatan Usaha Perumda Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung melakukan kegiatan usaha di bidang :

- Pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum;
- Pengelolaan sanitasi dan air limbah; dan
- Usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

- Struktur Organisasi

Organisasi Perumda Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 21 Februari 2022 tentang Perumda Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung, sebagai berikut :

a. KPM
b. Dewan Pengawas
c. Direksi

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

- **Struktur Organisasi - Lanjutan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung, terdiri dari :

a. Bupati
b. Dewan Pengawas
c. Direktur
d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi :
   1. Sub Bagian Keuangan dan Bendahara;
   2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
   3. Sub Bagian Hubungan Langganan/Logistik/Gudang.
e. Bagian Teknik, membawahi :
   1. Sub Bagian Produksi;
   2. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan;
   3. Sub Bagian Perencanaan;

Bentuk organisasi Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Bupati Tana tidung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumda Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung melalui Keputusan Nomor 100.3.3.2/010/K-I/2025 tanggal 2 Januari 2025, yaitu Tedi Kongso Suseno, S.E.

Perusahaan saat ini tidak memiliki Dewan Pengawas Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung harus memenuhi syarat sebagai kelengkapan organisasi.

Susunan Organisasi Perusahaan Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1.	Plt. Direktur	Tedi Kongso Suseno, S.E
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Khartina
3.	Kepala Sub Bagian Produksi	Jalnuddin
4.	Kepala Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan	Imransyah
5.	Pelaksana Operator	Heriadra
6.	Pelaksana Bendahara	Ani Sudiawati
7.	Pelaksana Operator	Inwansyah
8.	Pelaksana Operator	Ilham Umar
9.	Pelaksana Catat Meter	Hendra Susanto
10.	Pelaksana Catat Meter	Hendi Yanto
11.	Staf Gudang	Edia Nursujana
12.	Staf Keuangan	Riza Arbiawati
13.	Staf Kasir	Bela
14.	Pelaksana Operator	Sarakal Ribrianto
15.	Pelaksana Operator	Old
16.	Pelaksana Operator	Bakran
17.	Staf Distribusi	Yusran
18.	Staf Hublang	Fauzi Rahmani
19.	Staf Kepegawaian	Sinta Tri Anggraini
20.	Perbantuan IT	Agus Firgianto

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

- **Struktur Organisasi - Lanjutan**

Sampai dengan 31 Desember 2025 perusahaan memiliki karyawan sebanyak 20 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Tetap, 8 orang Pegawai Kontrak, dan 1 orang Pegawai Tenaga Perbantuan. Kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Pendidikan	Quantity	Persentase
S1	6	30
D3	1	5
SLTA	13	65
SLTP	0	0
Jumlah	20	100

02. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi perusahaan didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang mulai diterapkan untuk pertama kalinya pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Penerapan SAK EP diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2025. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP ditujukan untuk entitas privat, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

a. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan air diakui dan dicatat berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang berangkutan.

Pendapatan penjualan non air diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan, sebagai

- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara tunai, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara angsuran, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat dokumen tagihan diterbitkan atau saat kontrak sambungan baru ditandatangani.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda diterima.

Pengakuan Beban

Beban dibukukan atas dasar akrual. Pembebanan biaya yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi, harus dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan atau telah dibayar dimuka. Kecuali untuk beban listrik dan beban telepon dibukukan atas dasar tagihan.

b. Penilaian Piutang

Piutang Usaha diakui dengan Daftar Rekening Ditagih (DRD) Air dan Daftar Piutang/Tagihan Non Air. Piutang usaha rekening air dicatat sebesar tagihan pemakaian air kepada pelanggan yang tertera dalam DRD Air, sedangkan piutang usaha non air dicatat sebesar tagihan non air.

Piutang usaha disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasi.

Atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha, dibentuk cadangan penyisihan kerugian piutang berdasarkan prosentase rata-rata piutang yang tidak tertagih selama lebih dari 24 bulan.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

02. KEBIJAKAN AKUNTANSI - LANJUTAN

Umur Piutang	Persentase Penyisihan (%)
Kurang dari atau sama dengan 3 bulan	0%
3 bulan sampai dengan 6 bulan	30%
Lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan	50%
Lebih dari 12 bulan sampai dengan 24 bulan	75%
Lebih dari 24 bulan	100%

Penyisihan kerugian piutang non usaha dilakukan secara individual, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Besarnya penyisihan kerugian piutang non usaha ditentukan berdasarkan kemampuan membayar debitur.

Khusus untuk Piutang Usaha dengan pelanggan yang berstatus "Putus", disishkan sebesar 100%.

Untuk penyisihan piutang Manajemen tidak menggunakan kebijakan di atas hanya memperhitungkan sebesar 5 % dari total saldo Piutang 31 Desember 2025, dikarenakan Manajemen belum melakukan audit khusus piutang pelanggan, yang seharusnya manajemen melakukan penghapusan dari tahun 2018, apabila manajemen mengikuti kebijakan di atas, berdampak pada beban penyisihan piutang terlalu besar dan akan mengganggu kinerja secara operasional.

c ***Penilaian Persediaan***

- Penilaian persediaan dilakukan atas dasar biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah.
- Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.
- Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat direstitusi kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, Diskon, potongan, dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
- Persediaan dikelompokan ke dalam Persediaan Bahan Kimia, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Bahan Instalasi.
- Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain, misalnya persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Alokasi persediaan ke aset tetap/lain diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut.
- Jika persediaan bahan operasi (bahan kimia/BBM/operasi lainnya) digunakan dalam proses produksi maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui. Penggunaan persediaan bahan instalasi (kecuali water meter) untuk pemeliharaan/penggantian IPA maupun jaringan transmisi dan distribusi juga diakui sebagai beban periode berjalan.
- Penggunaan persediaan water meter untuk penggantian water meter pelanggan diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Transmisi dan Distribusi. Sedangkan penggantian water meter karena sebab kerusakan/kelalaian oleh pelanggan dicatat sebagai beban dan masuk dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan.
- Besarnya biaya sambungan langganan baru yang dibebankan kepada pelanggan, tidak dikaitkan dengan nilai water metemya maupun pipa dan asesorisnya. Penggunaan persediaan bahan instalasi untuk sambungan langganan baru (Water meter, pipa dan asesoris), dicatat sebagai penambahan aset tetap instalasi transmisi dan distribusi dan mengurangi nilai persediaan.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Dibajikan dalam rupiah)

c **Penilaian Persediaan - Lanjutan**

- Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpectual.
- Pembebanan pemakaian bahan instalasi dan kimia ke dalam pos biaya dicatat dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP/FIFO).
- Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak atau usang. Jika suatu jenis (atau kelompok jenis) dari persediaan menurun nilainya, maka persediaan diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai Persediaan" dengan perkiraan lawan (kredit) "Akumulasi penurunan nilai persediaan".
- Jika situasi pada periode sebelumnya yang menyebabkan persediaan turun nilainya tidak ada lagi atau adanya bukti nyata kenaikan dari harga jual dikurangi biaya untuk menjual karena perubahan kondisi ekonomi, maka dilakukan pemulihan terhadap jumlah penurunan nilai sebelumnya (pemulihan dibatasi sebesar jumlah awal kerugian penurunan nilai) sehingga jumlah tercatat baru adalah nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual yang telah direvisi.

d **Aktiva Tetap dan Penyusutan**

- Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan.
- menggunakan Metode Saldo Menurun Berganda (Double Declining Method) kecuali untuk bangunan menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan penggolongan penyusutan sebagai berikut:

Golongan I	:	50%	dari nilai buku (4 tahun)
Golongan 2	:	25%	dari nilai buku (8 tahun)
Golongan 3	:	12,50%	dari nilai buku (16 tahun)
Golongan Bangunan Permanen	:	5%	dari nilai perolehan
Golongan Bangunan Non Permanen	:	10%	dari nilai perolehan

- Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat lebih dari satu tahun atau yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja akan menambah nilai aset tetap tersebut.
- Beban pemeliharaan dan perbaikan aset sehari-hari diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi periode terjadinya.
- Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari aset tetap yang beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai aset tetap tersebut dinyatakan beroperasi komersil.
- Penyusutan dimulai ketika aset telah digunakan dan berakhir ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya (aset tidak produktif), kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Beban penyusutan harus diakui dalam Laporan Laba Rugi.
- Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penilaian terhadap kemungkinan adanya indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

e. Hutang Pajak

Penyajian hutang pajak dalam neraca menggambarkan jumlah taksiran kewajiban pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan perpajakan.

f. Perpajakan

Pada tanggal 23 Desember 1997, Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan PSAK No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan". Yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan terbuka dan 1 Januari 2001 untuk perusahaan tertutup. Menurut PSAK No. 46, antara lain pengakuan dan pengukuran atas aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) dan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) atas dampak pajak dimasa yang akan datang dari kejadian-kejadian di laporan keuangan termasuk saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Jumlah yang diakibatkan dari dampak penerapan PSAK baru tersebut atas laporan keuangan belum ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan telah melakukan perhitungan sendiri atas pajak penghasilan pasal 25/29 tahun buku 2012, dan atas pajak-pajak perusahaan kami tidak melakukan penelaahan lebih lanjut.

03. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri dari :	2025
- Kas	6.146.990,00
- Bank Kaltimtara Cabang Tana Tidung Rek. 0141401467	468.817.068,14
- Bank Kaltimtara Cabang Tana Tidung Rek. 0141400185	-
- Bank BNI Cabang Tana Tidung Rek. 3366612340	628.937.056,00
- Bank BRI Cabang Tana Tidung Rek. 760301000093309	67.940.578,60
Jumlah	**1.171.841.692,74**

04. PIUTANG USAHA

Terdiri dari :	2025
- Piutang Rekening Air	
- Sosial	23.402.608,66
- Niaga Kecil	172.273.627,90
- Niaga Besar	10.537.713,50
- Rumah Tangga 1	14.404.883,44
- Rumah Tangga 2	1.017.329.367,20
Jumlah	**1.237.968.400,70**
- Piutang Rekening Non Air	
- Administrasi	8.565.000,00
- Abodemen	34.260.000,00
- Denda	67.685.000,00
Jumlah	**110.510.000,00**
Jumlah Piutang Usaha	**1.348.478.400,70**

05. CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG USAHA

Terdiri dari :	2025
- Penyisihan Piutang Rekening Air	67.423.920,04
Jumlah	**67.423.920,04**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

06. PIUTANG LAIN-LAIN

Terdiri dari :	2025
- Pegawai	19.912.000,00
- Imransyah	105.793.986,00
- Khartina	7.576.400,00
- Marsalin AT	80.072.220,00
- Syarul. K	18.410.200,00
- Jahruddin	5.000.000,00
- Japuri	-
- Saplan	11.000.000,00
- Hendra	350.000,00
- Suryadinata	1.390.000,00
- Syamsul	5.000.000,00
- Drs.Tajuddin Noor	-
- Irwansyah	1.700.000,00
- Syarakal F	1.000.000,00
Jumlah	**257.404.806,00**

07. UANG MUKA PAJAK

Terdiri dari	2025
- PPN	-
- PPh 25	-
Jumlah	**-**

08. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Terdiri dari	2025
- Sewa Dibayar Di Muka	-
- Iuran Pensiun Dibayar Dimuka	-
- Uang Muka Pekerjaan Lainnya	-
Jumlah	**-**

09. PERSEDIAAN

Terdiri dari :	2025
- Tawas	66.960.000,00
- Kaporit	7.844.754,00
- Soda Ash	162.852.539,68
- PAC	343.111.086,00
- Bahan Instalasi dan Aksesoris	309.496.196,00
Jumlah	**890.264.575,68**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

10. ASET TETAP

Terdiri dari :	2025
Harga Perolehan	
- Tanah	50.000.000,00
- Bangunan	124.419.000,00
- Instalasi Sumber Air	11.920.100,00
- Intalasi Pompa	408.237.500,00
- Instalasi Pengolahan Air	233.391.312,00
- Instalasi Trans & Dis	909.650.628,00
- Kendaraan	779.394.950,00
- Peralatan & Perlengkapan	38.974.500,00
- Inventaris Kantor	759.207.940,00
- Aset Lainnya	147.858.730,00
- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	43.859.863.686,63
Jumlah	**47.322.918.346,63**
Akumulasi Penyusutan	
- Bangunan	34.533.345,50
- Instalasi Sumber Air	11.920.099,00
- Intalasi Pompa	303.724.978,12
- Instalasi Pengolahan Air	124.186.738,35
- Instalasi Trans & Dis	305.367.035,88
- Kendaraan	776.590.866,25
- Peralatan & Perlengkapan	29.616.860,50
- Inventaris Kantor	398.301.860,00
- Aset Lainnya	10.695.727,00
- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	-
Jumlah	**2.394.937.510,61**
Nilai Buku	
- Tanah	50.000.000,00
- Bangunan	89.885.654,50
- Instalasi Sumber Air	1,00
- Intalasi Pompa	104.512.521,88
- Instalasi Pengolahan Air	109.204.573,65
- Instalasi Trans & Dis	404.283.592,12
- Kendaraan	2.804.083,75
- Peralatan & Perlengkapan	9.357.639,50
- Inventaris Kantor	160.906.080,00
- Aset Lainnya	137.163.003,00
- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	43.859.863.686,63
Jumlah	**44.927.980.836,02**

11. HUTANG USAHA

Terdiri dari :	2025
- CV. Aji Setia	-
- UD. Indonesia Jaya	-
Jumlah	**-**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

12. HUTANG LAIN-LAIN

Terdiri dari :	2025
- Syamsul Munawar	-
- Drs. Tajuddin Noor	-
- Jalnuddin	-
- Japuri	-
- Jusman	-
- Utang Lain-lain (Kelebihan Potong PPh Pasal 21)	-
Jumlah	**-**

13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Terdiri dari :	2025
- Beban Gaji Karyawan	-
- Beban Audit Tahun 2023	-
Jumlah	**-**

14. HUTANG PAJAK

Terdiri dari	2025
- Hutang PPH	35.099.349,00
Jumlah	**35.099.349,00**

15. MODAL HIBAH PEMDA TANA TIDUNG

Jumlah tersebut merupakan saldo modal penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung kepada PDAM Kabupaten Tana Tidung, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai	Dasar Hukum
2009	500.000.000,00	
2011	500.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2011 No. 017/SOS/HD/XI/2011
2012	700.000.000,00	
2013	1.500.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2013 No. 13/BKR-HD/V/2013
2014	4.500.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2014 No. 29/BKR-HD/VII/2014
2015	2.000.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2015 No. 094/BKR-HD/XII/2015
2017	1.500.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2018 No. 400/006/BKR-HD/II/2017
2018	1.500.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2018 No. 400/007/BKR-HD/III/2018
2019	1.000.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2018 No. 400/019/BKR-HD/V/2019
2020	1.600.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2018 No. 400/003/BKR-HD/II/2020
2021	500.000.000,00	Dana Hibah Tahun 2018 No. 003/BKR-HD/XI/2021
2022	200.000.000,00	
Jumlah	**16.000.000.000,00**	

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

16. MODAL SETELAH PISAH DARI PEMDA BULUNGAN

Merupakan saldo modal pada saat pemecahan dari PDAM Kabupaten Bulungan, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PDAM Bulungan ke PDAM Tana Tidung tanggal 20 April 2009 adalah sebesar Rp. 288.017.577,00.

17. PENYERTAAN MODAL PEMDA KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

Terdiri dari :	2025
- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	43,859,863,686.63
Jumlah	**43.859.863.686,63**

MODAL HIBAH KIMIA DARI DPU

Terdiri dari :	2025
- Hibah Kimia Pemda Tana Tidung Tahun 2025	396.228.675,00
Jumlah	**396.228.675,00**

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Terdiri dari :	2025
- Tambahan modal disetor (Tax Amnesti)	67.790.000,00
Jumlah	**67.790.000,00**

19. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Terdiri dari :	2025
- Pendapatan	6.032.056.241,95
- Beban	(4.609.292.376,62)
Laba (Rugi)	**1.422.763.865,33**

20. PENDAPATAN USAHA

Terdiri dari :	2025
- Pendapatan Rekening Air	5,107,031,758,82
- Pendapatan Rekening Non Air	326.864.573,33
- Pendapatan Hibah Kimia Pemda Tana Tidung Tahun 2025	396.228.675,00
Jumlah	**6.030.125.007,35**

Pendapatan Rekening Air Terdiri Dari :

- Kelompok Air Pelanggan Sosial	146.463.542,66
- Kelompok Air Pelanggan Rumah Tangga 1	121.929.343,20
- Kelompok Air Pelanggan Rumah Tangga 2	3.689.318.461,16
- Kelompok Air Pelanggan Niaga Kecil	726.980.018,30
- Kelompok Air Pelanggan Niaga Besar	73.113.393,50
- Pendapatan Administrasi	31.318.000,00
- Pendapatan Abodemen	126,260.000,00
- Pendapatan Denda	179.975.000,00
- Pendapatan Air Lain-Lain	5.324.000,00
- Pendapatan Air Tangki	6.150.000,00
Jumlah	**5.107.031.758,82**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

Pendapatan Rekening Non Air Terdiri Dari :

- Pendapatan SR Baru	300.069.000,00
- Pendapatan Penyambungan Kembali	13.400.000,00
- Pendapatan Balik Nama	700.000,00
- Pendapatan Non Air Lain-Lain	12.695.573,53
Jumlah	**326.864.573,53**

21. BEBAN USAHA

Terdiri dari :	2025
- Beban Pegawai	1.249.967.753,00
- Beban BBM	62.528.000,00
- Beban Listrik	382.359.455,00
- Beban Bahan Kimia	860.540.145,32
- Beban Bahan Pembantu	-
- Beban Pemeliharaan	360.967.387,00
- Beban Air Baku	14.689.900,00
- Beban Penyusutan	318.839.649,26
- Beban Operasi Lainnya	959.399.887,04
Jumlah	**4.609.292.376,62**

Adapun rincian beban usaha masing-masing bagian sebagai berikut:

- Beban Pegawai

Terdiri dari :	2025
- Gaji/Honor Direktur dan Pegawai	934.147.144,00
- Insentif	20.544.415,00
- Dana Pensiun	66.027.774,00
- Tunjangan Hari Raya	50.995.528,00
- BPJS Kesehatan	34.946.900,00
- BPJS Ketenagakerjaan	38.305.990,00
- Pendidikan dan Latihan	-
- Bantuan dan Sumbangan	-
- Rupa-rupa Beban Pegawai	64.800.000,00
Jumlah	**1.249.967.753,00**

- Beban Bahan Bakar Minyak

Terdiri dari :	2025
- Pemakaian Bahan Bakar	62.528.000,00
- Pemakaian Bahan Pelumas	-
Jumlah	**62.528.000,00**

- Beban Listrik

Terdiri dari :	2025
- Listrik untuk Intakasi Pengolahan	368.962.805,00
- Listrik untuk Perkantoran	13.396.650,00
Jumlah	**382.359.455,00**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

- Beban Bahan Kimia

Terdiri dari :	2025
- Pemakaian Kaporit	45.463.618,28
- Pemakaian Aluminium Sulfat Powder	171.250.200,00
- Pemakaian Soda Ash	227.518.460,00
- Biaya pemakaian Poly Alumunium Chlorine(PAC)	416.307.867,04
Jumlah	**860.540.145,32**

- Beban Bahan Pembantu

Terdiri dari :	2025
- Pemakaian Asesoris Pipa	-
- Pemakaian Bahan Pembantu	-
- Pemakaian Bahan dan Perlengkapan	-
- Pemakaian Pipa Pensi	-
- Pemasangan DAK	-
Jumlah	**-**

- Beban Pemeliharaan

Terdiri dari :	2025
- Pemeliharaan Trans/Dis	187.046.050,00
- Pemeliharaan Danau dan Sungai	-
- Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	307.297.037,00
- Pemeliharaan Umum dan Administrasi	66.624.300,00
Jumlah	**560.967.387,00**

- Beban Air Baku

Terdiri dari :	2025
- Retribusi Air Baku	14.689.900,00
Jumlah	**14.689.900,00**

- Beban Penyusutan

Terdiri dari :	2025
- Instalasi Sumber Air	-
- Instalasi Pompa Air	34.837.504,31
- Instalasi Pengolahan Air	36.401.524,22
- Instalasi Trans & Dis	134.761.188,72
- Gedung	9.172.562,00
- Peralatan/Perlengkapan	3.119.208,83
- Kendaraan	2.804.081,73
- Inventaris/Perabotan Kantor	92.677.162,40
- Aset Lainnya	5.066.397,00
- Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung Tahun 2025	-
Jumlah	**318.839.649,26**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

- Beban Operasi Lainnya

Terdiri dari:	2025
- Beban ATK dan Foto Copy	17.781.300,00
- Beban Perlengkapan Komputer	-
- Beban Telepon dan Internet	9.531.350,00
- Beban Rapat dan Tamu	25.302.000,00
- Beban Benda Pos dan Materai	1.917.850,00
- Rupa-rupa Beban Kantor	31.711.621,00
- Beban Pencetakan/Pengolahan Rekening	3.940.500,00
- Beban Pengolahan/penerbitan rekening	17.500.000,00
- Beban Promosi / Iklan	-
- Beban Iuran Keanggotaan	-
- Beban Perjalanan Dinas	402.826.308,00
- Beban Audit	-
- Beban Pajak Bumi dan Bangunan	-
- Rupa-rupa Beban Umum Lainnya	227.200.633,00
- Beban System/Aplikasi	60.000.000,00
- Beban PPh 21	4.181.363,00
- Beban Penyisihan Piutang	67.423.920,04
- Rupa-rupa Beban Operasi	90.083.000,00
Jumlah	**939.399.887,04**

22. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Terdiri dari:	2025
- Pendapatan Jasa Giro	3.337.297,16
- Pendapatan Bunga Deposito	-
- Pendapatan Penjualan Barang-Barang Bekas	-
- Pendapatan Piutang Yang Sudah Dihapuskan	-
- Rupa-Rupa Pendapatan Diluar Usaha	-
- Pendapatan Hibah	-
- Jasa Tagihan Rek.Air 7,5% (Perpamsi)	-
- Beban Pajak Jasa Giro	(645.942,40)
- Beban Adm Bank	(2.485.420,16)
- Beban Lain-lain	(275.000,00)
- Beban Lain-lain Luar Usaha	-
Jumlah	**1.931.234,60**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam rupiah)

CATATAN :

- Belanja barang dengan penyedia :
  - Tidak tertampil kode billing pembayaran

- Surat perintah kerja (SPK) :
  - Belum ada referensi bank (yang menyatakan bahwa perusahaan adalah nasabah)
  - Jaminan bila vendor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi)

- Mou :
  - Mou Bank BRI masih berupa fotocopy
  - Mou Bank BPD asli belum ada tandatangan hanya dalam bentuk scan yg sudah ditandatangani
  - Masa berlaku mou yang perlu diperhatikan kembali.

- Piutang lain-lain karyawan sebesar Rp. 237.404.806,- masih diakui tetapi berkas/data (bentuk hardcopy) tidak ada fisiknya.

- Perjalanan dinas :
  - Tidak ada dokumentasi kegiatan

- SK modal hibah dari pemda tana tidung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 belum ada hardcopy (asli fisik surat) maupun dalam bentuk softcopy.

- Barang-barang inventaris kantor (kantor induk/pusat) :
  - Ruang direktur belum ada kartu inventaris barang dan tempelan stiker
  - Ruang loket pembayaran belum ada kartu inventaris barang dan tempelan stiker
  - Ruang adm & umum belum ada kartu inventaris barang dan tempelan stiker
  - Ruang pantry belum ada kartu inventaris barang dan tempelan stiker

- Barang-barang inventaris kantor (Kantor IPA Ahmad Yani) :
  - Belum ada kartu inventaris dan tempelan stiker

- Bagian gudang :
  - Kartu stok belum update
  - Penempatan barang-barang di gudang perlu perhatian lebih
  - Edukasi kepada rekan-rekan kerja fungsi surat permintaan barang

- Bagian Bendahara :
  - Cash on hand tidak dilengkapi dengan rincian/rekapan belanja barang-barang
  - Penarikan uang di bank belum ada rincian/rekapan mengenai penggunaannya
  - Belum ada Mutasi Kas

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SUNGOI SESAYAP
Jl. Wisma, Desa Sedulun 77152
SEDULUN

DATA ASET PENYERTAAN MODAL
Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU PENYERAHAN DARI PEMDA PER 31 DESEMBEER 2025
1	Rehab Ruang Kantor PDAM Kab. Tana Tidung	2017	Rp 239.242.000,00	Rp -	Rp 239.242.000,00
2	Pembangunan Kantor PDAM	2018	Rp 213.738.000,00	Rp -	Rp 213.738.000,00
3	Pembangunan Air Bersih Tideng Pale (Jaringan Distribusi)	2019	Rp 1.726.035.000,00	Rp -	Rp 1.726.035.000,00
4	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Seimanga, Kec. Sesayap Hilir (DAK)	2021	Rp 1.254.055.750,00	Rp -	Rp 1.254.055.750,00
5	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Sepala Dalang, Kec. Sesayap Hilir (DAK)	2021	Rp 1.241.249.000,00	Rp -	Rp 1.241.249.000,00
6	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Sebaha, Kec. Sesayap Hilir (DAK)	2021	Rp 415.050.004,00	Rp -	Rp 415.050.004,00
7	Pengembangan Jaringan Air Minum Sesayap	2021	Rp 223.800.000,00	Rp -	Rp 223.800.000,00
8	Pengembangan Jaringan Air Minum Sesayap Hilir	2021	Rp 223.800.000,00	Rp -	Rp 223.800.000,00
9	Pembayaran Studi Optimalisasi IPA Bebatu	2022	Rp 98.790.000,00	Rp -	Rp 98.790.000,00
10	Pembayaran Perencanaan Jaringan Distribusi IPA Bebatu	2022	Rp 89.012.000,00	Rp -	Rp 89.012.000,00
11	Optimalisasi IPA Bebatu	2023	Rp 1.574.300.000,00	Rp -	Rp 1.574.300.000,00
12	Optimalisasi IPA Bebatu 5 Liter/Detik	2023	Rp 441.306.020,00	Rp -	Rp 441.306.020,00
13	Optimalisasi IPA Bebatu 5 Liter/Detik	2024	Rp 348.259.000,00	Rp -	Rp 348.259.000,00
14	Pembangunan Flat Duduk IPA Bebatu	2024	Rp 119.618.000,00	Rp -	Rp 119.618.000,00
15	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Desa Bebatu - Simpang Sikia	2024	Rp 3.167.678.400,00	Rp -	Rp 3.167.678.400,00
16	Pembangunan Jembatan Kaya Intake PDAM Bebatu	2024	Rp 579.168.339,00	Rp -	Rp 579.168.339,00
17	Pembayaran Pengadaan Mixer Mesin Pengaduk IPA Bebatu	2024	Rp 49.911.000,00	Rp -	Rp 49.911.000,00
18	Pembayaran Pengawasan Optimalisasi IPA Ahmad Yani	2022	Rp 20.981.700,00	Rp -	Rp 20.981.700,00
19	Optimalisasi IPA Ahmad Yani	2022	Rp 180.071.100,00	Rp -	Rp 180.071.100,00
20	Perencanaan Optimalisasi IPA Ahmad Yani	2022	Rp 35.799.700,00	Rp -	Rp 35.799.700,00
21	Pompa Dosing Kimia IPA Ahmad Yani	2024	Rp 99.811.200,00	Rp -	Rp 99.811.200,00
22	Pembayaran Pengadaan Mixer Mesin Pengaduk IPA Ahmad Yani	2024	Rp 49.911.000,00	Rp -	Rp 49.911.000,00
23	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuha	2022	Rp 66.710.100,00	Rp -	Rp 66.710.100,00
24	Pembayaran Termin Terakhir Atas Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuha (DAK Air Minum)	2022	Rp 29.458.800,00	Rp -	Rp 29.458.800,00
25	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuha (DAK Air Minum)	2022	Rp 165.825.000,00	Rp -	Rp 165.825.000,00
26	Pembayaran Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuha (DAK Air Minum)	2022	Rp 468.016.200,00	Rp -	Rp 468.016.200,00
27	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale	2022	Rp 49.727.400,00	Rp -	Rp 49.727.400,00
28	Pembayaran Termin Terakhir Atas Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale (DAK Air Minum)	2022	Rp 13.185.100,00	Rp -	Rp 13.185.100,00
29	Pembayaran Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale (DAK Air Minum)	2022	Rp 356.298.600,00	Rp -	Rp 356.298.600,00
30	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale (DAK Air Minum)	2022	Rp 123.161.200,00	Rp -	Rp 123.161.200,00
31	Pembayaran Studi Optimalisasi Proses Koagulasi-Flokulasi dengan Elektrokoagulasi IPA Sebuha Kapasitas 20 Liter/Detik	2022	Rp 98.790.000,00	Rp -	Rp 98.790.000,00
32	Optimalisasi IPA Sebuha	2022	Rp 180.085.100,00	Rp -	Rp 180.085.100,00
33	Perencanaan Optimalisasi IPA Sebuha	2022	Rp 56.759.200,00	Rp -	Rp 56.759.200,00
34	Pengembangan Laboratorium dan Bahan Kimia IPA Sebuha	2023	Rp 530.014.300,00	Rp -	Rp 530.014.300,00
35	Rehab Kantor PDAM Sebuha	2023	Rp 270.568.300,00	Rp -	Rp 270.568.300,00
36	Pembangunan Drainase IPA Sebuha	2023	Rp 265.134.000,00	Rp -	Rp 265.134.000,00
37	Pembangunan Laboratorium dan Bahan Kimia IPA Sebuha	2024	Rp 44.829.500,00	Rp -	Rp 44.829.500,00
38	Pompa Dosing Kimia IPA Sebuha	2024	Rp 99.811.200,00	Rp -	Rp 99.811.200,00
39	Pembayaran Pengadaan Mixer Mesin Pengaduk IPA Sebuha	2024	Rp 49.911.000,00	Rp -	Rp 49.911.000,00
40	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap	2022	Rp 39.901.000,00	Rp -	Rp 39.901.000,00
41	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap	2022	Rp 39.998.000,00	Rp -	Rp 39.998.000,00
42	Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap	2022	Rp 49.528.200,00	Rp -	Rp 49.528.200,00
43	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap	2022	Rp 298.653.000,00	Rp -	Rp 298.653.000,00

44	Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap Tahap II	2023	Rp	1.538.337.400,00	Rp -	Rp	1.538.337.400,00
45	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap Tahap III	2024	Rp	1.988.044.700,00	Rp -	Rp	1.988.044.700,00
46	Pembayaran Termin Terakhir atas Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap	2022	Rp	696.857.300,00	Rp -	Rp	696.857.300,00
47	Pembayaran Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuwang	2022	Rp	37.651.500,00	Rp -	Rp	37.651.500,00
48	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuwang (DAK Air Minum)	2022	Rp	12.256.400,00	Rp -	Rp	12.256.400,00
49	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuwang (DAK Air Minum)	2022	Rp	93.248.700,00	Rp -	Rp	93.248.700,00
50	Pembayaran Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sebuwang (DAK Air Minum)	2022	Rp	267.488.700,00	Rp -	Rp	267.488.700,00
51	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale Timur (DAK Air Minum)	2022	Rp	40.777.300,00	Rp -	Rp	40.777.300,00
52	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale Timur (DAK Air Minum)	2022	Rp	13.917.200,00	Rp -	Rp	13.917.200,00
53	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale Timur (DAK Air Minum)	2022	Rp	123.179.900,00	Rp -	Rp	123.179.900,00
54	Pembayaran Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Tideng Pale Timur (DAK Air Minum)	2022	Rp	355.622.800,00	Rp -	Rp	355.622.800,00
55	Pembayaran Termin Terakhir atas Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap Hilir	2022	Rp	695.800.000,00	Rp -	Rp	695.800.000,00
56	Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap Hilir	2022	Rp	49.528.200,00	Rp -	Rp	49.528.200,00
57	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap Hilir	2022	Rp	298.200.000,00	Rp -	Rp	298.200.000,00
58	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Kecamatan Sesayap Hilir Tahap II	2024	Rp	2.603.678.800,00	Rp -	Rp	2.603.678.800,00
59	Pompa Centrifugal End Suction	2023	Rp	256.858.610,95	Rp -	Rp	256.858.610,95
60	Pompa Dosing Kimia	2023	Rp	49.983.000,00	Rp -	Rp	49.983.000,00
61	Pipa HDPE Ø 20 mm PN 10 SDR-11 (1/2)	2023	Rp	4.210.000,00	Rp -	Rp	4.210.000,00
62	Hydraulic Butt Fusion Welding Machine SHD 160/63 (2-6")	2023	Rp	68.197.400,00	Rp -	Rp	68.197.400,00
63	Pipa HDPE Ø 63 mm PN 10 SDR-17 (2)	2023	Rp	23.754.410,00	Rp -	Rp	23.754.410,00
64	Pipa HDPE Ø 90 mm PN 10 SDR-17 (3)	2023	Rp	30.116.500,00	Rp -	Rp	30.116.500,00
65	Pipa HDPE Ø 110 mm PN 10 SDR-17 (4)	2023	Rp	51.615.000,00	Rp -	Rp	51.615.000,00
66	Pipa HDPE Ø 160 mm PN 10 SDR-17 (6)	2023	Rp	89.910.000,00	Rp -	Rp	89.910.000,00
67	Pengadaan dan Pemasangan SR PDAM	2023	Rp	234.100.000,00	Rp -	Rp	234.100.000,00
68	Pemasangan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2023	Rp	2.575.442.000,00	Rp -	Rp	2.575.442.000,00
69	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Sambungan Rumah	2023	Rp	255.000.000,00	Rp -	Rp	255.000.000,00
70	Pembayaran Pengadaan Water Meter 8mm 1/2"	2024	Rp	119.968.800,00	Rp -	Rp	119.968.800,00
71	Pembayaran Pengadaan Asesh Electric Coupling	2024	Rp	199.876.400,00	Rp -	Rp	199.876.400,00
72	Jaringan Perpipaan SPAM Sedahan untuk Kawasan Tideng Pale - Sesayap, Kabupaten Tana Tidung	2021	Rp	6.989.976.800,00	Rp -	Rp	6.989.976.800,00
73	Jaringan Air Minum Lainnya (Pengembangan Jaringan Perpipaan Kec. Sesayap Hilir)	2021	Rp	3.019.156.100,00	Rp -	Rp	3.019.156.100,00
74	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Optimalisasi IPA Sedahan)	2021	Rp	3.125.440.000,00	Rp -	Rp	3.125.440.000,00
75	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih (Jalan)	2019	Rp	9.800.000,00	Rp -	Rp	9.800.000,00
76	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih - Intake	2010	Rp	5.600.000,00	Rp -	Rp	5.600.000,00
77	Kantor PDAM	2010	Rp	293.187.000,00	Rp 52.773.660,00	Rp	240.413.340,00
78	Perencanaan Pavingisasi IPA Sedahan	2013	Rp	549.988.035,00	Rp 132.722.570,70	Rp	417.265.464,30
79	Pengadaan dan Pemasangan Water Meter	2016	Rp	237.787.000,00	Rp 53.502.075,00	Rp	184.284.925,00
80	Pengembangan Instalasi Air Bersih di Tideng Pale	2012	Rp	1.833.364.000,00	Rp 794.674.400,00	Rp	1.038.189.600,00
81	Eks Bebangun	2007	Rp	218.000.000,00	Rp 130.799.995,67	Rp	87.200.004,33
82	Panel VSD Star Delta 30 KW (Pipi Inverter)	2023	Rp	150.186.779,55	Rp -	Rp	150.186.779,55
83	Hydraulic Butt Fusion Welding Machine SHD 250/90 (3-10")	2023	Rp	129.216.600,00	Rp -	Rp	129.216.600,00
84	Panel VSD Star Delta 18.5 KW (Pipi Inverter)	2023	Rp	39.517.609,50	Rp -	Rp	39.517.609,50
85	Jack Hammer Merin 2 Tdk	2024	Rp	39.937.000,00	Rp -	Rp	39.937.000,00
86	Pembayaran Pengadaan Magnetic Locabel Ball Valve	2024	Rp	59.855.640,00	Rp -	Rp	59.855.640,00
			Rp	45.024.336.300,00	Rp 1.164.472.701,37	Rp	43.859.861.686,63